



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kajian Fiskal Regional Gabungan 2021

KHATULISTIWA

Kinerja Tangguh Fiskal Regional, Ekonomi Bangkit

156

PERAN FISKAL DALAM PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
ANALISIS INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

130

ANALISIS HARMONISASI
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH

26

PERKEMBANGAN INDIKATOR
MAKROEKONOMI DAN
KESEJAHTERAAN

52

PERKEMBANGAN FISKAL
APBN, APBD, DAN
ANGGARAN KONSOLIDASIAN

90

ANALISIS SEKTOR
UNGGULAN DAN POTENSIAL
REGIONAL

KHATULISTIWA

KFR GABUNGAN 2021

Tema:

**KINERJA TANGGUH
FISKAL REGIONAL,
EKONOMI BANGKIT**

copyright©2022

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2022

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Hadiyanto

Direktur Jenderal Perbendaharaan

PENANGGUNG JAWAB

Tri Budhianto

Direktur Pelaksanaan Anggaran

EDITOR

Heny Muryantini, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, Nur Hidayat, Vicensia Retnasari, Mohamad Irfan Surya Wardana, Agung Kurniawan Purbohadi

KONTRIBUTOR

Catur Ery Prabowo, Kurniawan Santoso, Tommi Helmiwan, Susanti Dewi. Dian Merini, Febrian Yalisman, Sabar Sautomo, Teguh Dwi Prasetyo. Adiatma, Ali Syukri Zend, Andi Eka Iftitah Nurdin, Citra Murni Rohani Purba, Chyntia Bella Br. Sitepu, Enjun Fajar Sadida, Priyo Arief Wicaksono, Risky Utama, Sweetta Wulandari, Wirasukma Legendani.

DESAIN DAN LAYOUT

Dhika Habibi Zakaria, Ridwan Abdullah



KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, sebab berkat rahmat-Nya kami telah menyusun Laporan Khatulistiwa Tahun 2021 sebagai konsolidasi dari KFR Tingkat Wilayah yang disusun oleh seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Laporan ini diharapkan mampu memperkaya khazanah informasi atas perkembangan atas implementasi kebijakan fiskal yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian dan kesejahteraan di tingkat nasional dan secara spasial pada 6 regional yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua.

Khatulistiwa Tahun 2021 mengusung tema "Kinerja Tangguh Fiskal Regional, Ekonomi Bangkit" sebagai bentuk optimisme peran fiskal dalam menghadapi kondisi yang diliputi ketidakpastian seiring dengan transisi menuju normal pasca Covid-19, di tengah dinamika pandemi Covid-19. Penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD menjadi instrumen utama dengan memberikan stimulus fiskal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian yang berperan strategis dalam pemulihan perekonomian.

Pembaca yang budiman...

Sebagai negara berdaulat (sovereign nation), Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan fiskal dan implementasinya senantiasa diarahkan untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian bagi segenap masyarakat Indonesia.

Kebijakan fiskal yang tertuang pada APBN dan APBD memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi tumbuhnya investasi, dan memastikan distribusi pembangunan di Indonesia

yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, sinkronisasi pembangunan daerah terutama yang dibiayai oleh APBN dan APBD mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama (ultimate goal) yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan fiskal tersebut.

Pembaca yang budiman...

Pelaksanaan fiskal tahun 2021 masih menghadapi sejumlah tantangan menuju pemulihan ekonomi yang sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 serta fondasi kebijakan menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 yang harus didukung oleh harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, antara lain melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pendapatan negara dan daerah, belanja yang lebih berkualitas, dan defisit anggaran yang lebih terkendali.

Dalam penyusunan KFR Tahun 2021, telah dilakukan beberapa penguatan substansi analisis antara lain berupa asesmen terhadap daerah-daerah yang menjadi mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan, termasuk implementasi kebijakan pusat-daerah, sehingga dapat dievaluasi keselarasannya. Selain itu, dalam KFR tahun 2021, juga mengangkat analisis tematik atas implementasi dukungan fiskal terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia, termasuk identifikasi permasalahan, bentuk dukungan fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah, dan identifikasi atas kebutuhan dukungan fiskal lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah.

Pembaca yang budiman...

Hasil telaahan makro tahun 2021 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang telah dilaksanakan berperan penting dalam menjaga momentum akselerasi pemulihan ekonomi. Momentum ini harus terus dijaga dalam rangka menuju konsolidasi fiskal tahun 2023, dimana

defisit anggaran harus kembali di bawah 3 persen dari PDB. Perekonomian nasional saat ini masih terkonsentrasi di regional Jawa dan Sumatera dengan kontribusi sebesar 80,09 persen terhadap PDB Nasional. Upaya pemerataan pembangunan secara berkesinambungan harus terus dilakukan dengan menciptakan peluang-peluang baru guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar kawasan Jawa-Sumatera. Selain itu, indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan yang tercermin, antara lain pada capaian IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat ketimpangan pendapatan, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan.

Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan secara inklusif melalui optimalisasi fungsi APBN/APBD sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, termasuk melalui peningkatan alokasi anggaran belanja pemerintah terutama bagi Kawasan Timur Indonesia, penyempurnaan kebijakan TKDD, terutama penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah terdesentralisasi pencairan anggarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta sinkronisasinya dengan belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, kemandirian fiskal pemerintah perlu terus didorong dengan strategi dan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis pada pengembangan potensi daerah secara spesifik sebagai keunggulan masing-masing daerah.

Pembaca yang budiman...

Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing regional diulas dalam Laporan

Khatulistiwa ini. Dengan demikian, Laporan Khatulistiwa Tahun 2021 ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian fiskal dan perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat nasional dan regional.

Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa Tahun 2021 dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi
Wabarokatuh**

Jakarta, 2022

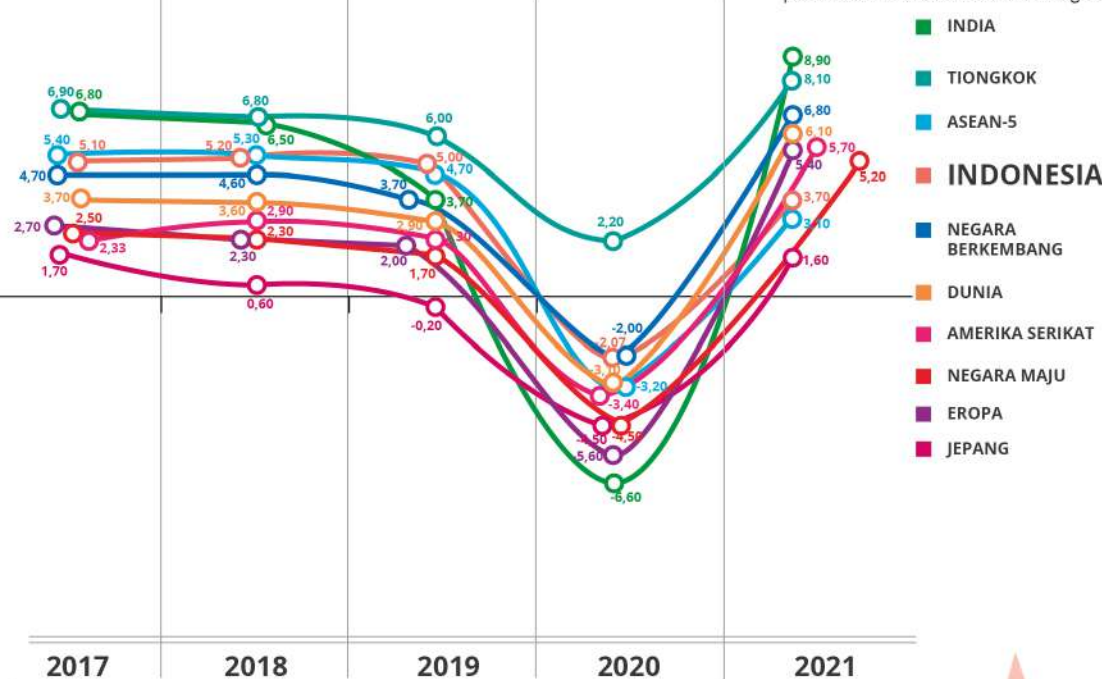
HADIYANTO

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Laporan Khatulistiwa merupakan gabungan dari Kajian Fiskal Regional (KFR) yang disusun oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mengulas mengenai dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2017-2021 (DALAM PERSEN)

Seiring pengendalian pandemi Covid-19 yang membaik dengan dibarengi akselerasi vaksinasi, perekonomian negara-negara di dunia kembali menggeliat. Aktivitas dunia usaha mulai pulih, aktivitas dunia usaha mulai optimis, sehingga roda perekonomian mulai bergerak menghasilkan rebound pertumbuhan ekonomi di seluruh negara.



TREN PERTUMBUHAN PDB INDONESIA TAHUN 2021 (DALAM PERSEN)

Tahun 2021 perekonomian Indonesia tumbuh 3,69 persen, tetapi belum mencapai target. Namun demikian, gap capaian dengan target kembali menyempit, setelah tahun 2020 harus melebar akibat pandemi Covid-19.



DASHBOARD FISKAL REGIONAL TAHUN 2021

KINERJA TANGGUH FISKAL REGIONAL EKONOMI BANGKIT

PELAKSANAAN APBN TAHUN 2021 (DALAM TRILIUN)

APBN 2021 sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di tengah tantangan Covid-19 varian Delta dan Omicron

BELANJA NEGARA
2.786,41
TRILIUN

DEFISIT
(775,06)
TRILIUN

PENDAPATAN NEGARA & HIBAH
2.011,35
TRILIUN

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021 (DALAM TRILIUN)

APBD 2021 mengalami penurunan baik dari segi pagu, maupun realisasinya jika dibandingkan dengan tahun 2020. Perjuangan keras APBD tahun 2021 masih menemui tantangan besar pandemi Covid-19

TAHUN 2020 DEFISIT
60,60
TRILIUN



PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2021 (DALAM TRILIUN)

REALISASI PENDAPATAN NEGARA & HIBAH Rp2.011,35 T

Capaian seluruh komponen pendapatan negara tahun 2021 mampu melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini tidak terlepas dari pemulihan ekonomi global, terutama negara mitra dagang Indonesia, sehingga menghasilkan permintaan eksternal yang kuat. Selain itu, peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat di berbagai daerah menyebabkan permintaan domestik menggeliat. Hal ini berdampak pada recovery pendapatan negara yang sempat mengalami perlambatan di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19



BELANJA NEGARA TAHUN 2021 (DALAM TRILIUN)

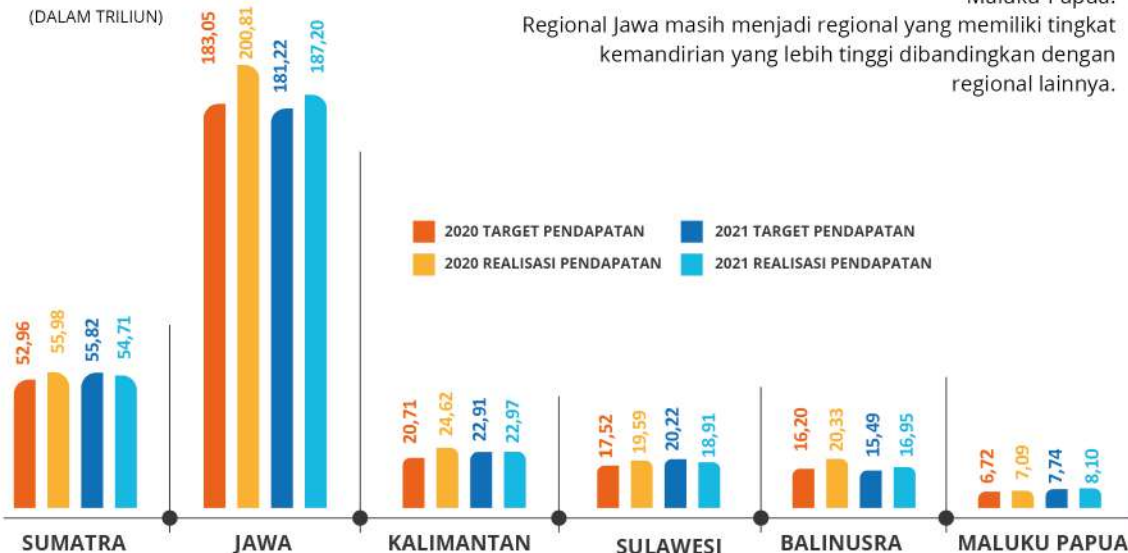
REALISASI BELANJA NEGARA Rp2.786,41 T

Masih dalam kondisi pemulihan ekonomi, instrumen belanja APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian. Dukungan dilakukan melalui program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang berlanjut di tahun 2021. APBN terus berupaya untuk menjadi instrumen yang dapat melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian.



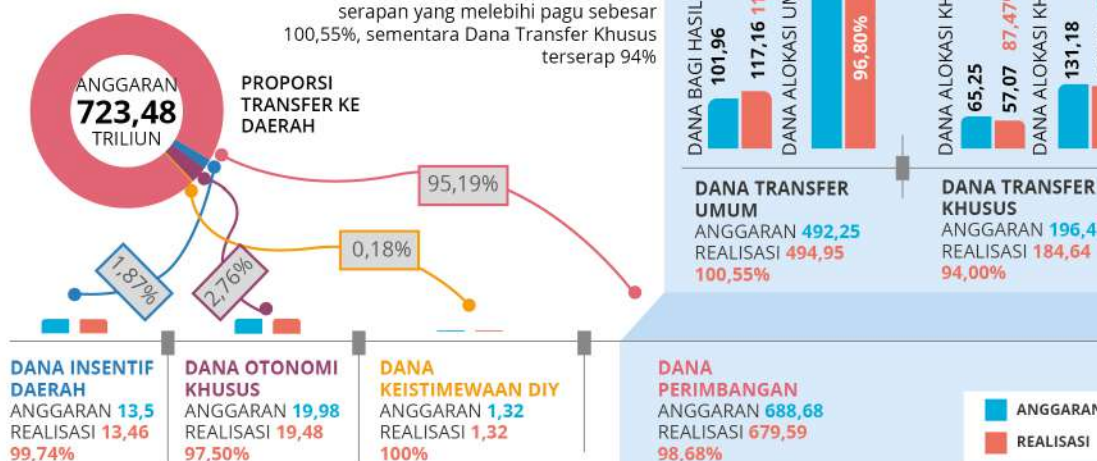
PERBANDINGAN PAD & TOTAL PENDAPATAN REGIONAL TAHUN 2020-2021 (DALAM TRILIUN)

Pada tahun 2021, hampir seluruh regional mengalami penurunan pendapatan PAD, kecuali Regional Maluku-Papua. Regional Jawa masih menjadi regional yang memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional lainnya.



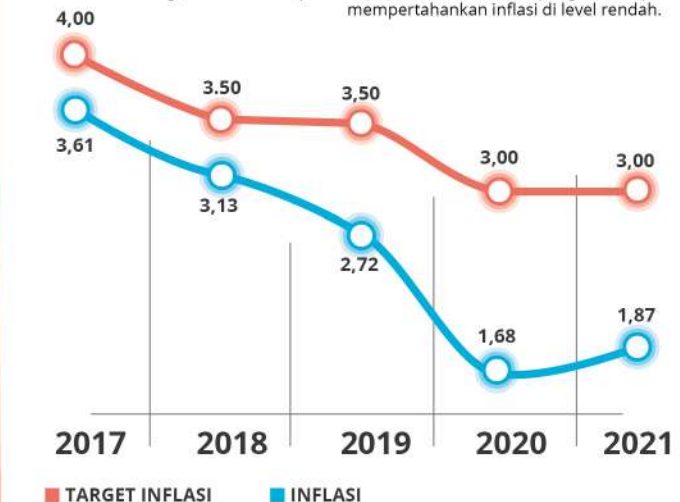
TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2021 (DALAM TRILIUN)

Tingkat realisasi dana transfer ke daerah tahun 2021 tergolong tinggi, yaitu Dana Insentif Daerah 99,74%, Dana Otonomi Khusus 97,50%, dan Dana Keistimewaan DIY sebesar 100%. Pos Dana Transfer Umum dalam Dana Perimbangan memiliki serapan yang melebihi pagu sebesar 100,55%, sementara Dana Transfer Khusus terserap 94%



TREN INFLASI TAHUN 2017-2021 (DALAM PERSEN)

Inflasi tahun 2021 tetap terjaga pada level yang rendah, sehingga kondusif untuk mendukung stabilitas dalam fase pemulihan ekonomi. Terjaganya stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan distribusi bahan pangan mampu mempertahankan inflasi di level rendah.



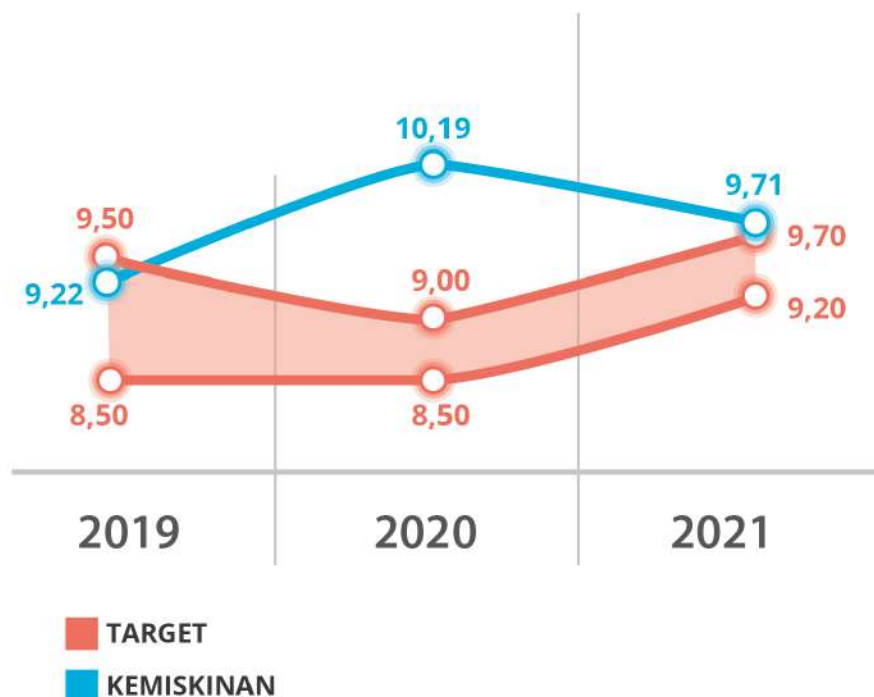
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen atau 0,35 poin di tengah pandemi Covid-19. Peningkatan dicapai oleh seluruh komponen pembentuk IPM (kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran perkapita). Namun, capaian IPM masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi belum dapat mencapai batas atas target tingkat kemiskinan tahun 2021. Jumlah penduduk miskin menjadi berkurang dari 27,55 juta orang 2020 menjadi sebanyak 26,50 juta orang. APBN terus bekerja keras dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, khususnya melalui belanja negara pada sektor perlindungan sosial, kesehatan, serta dukungan permodalan usaha mikro, kecil, menengah.



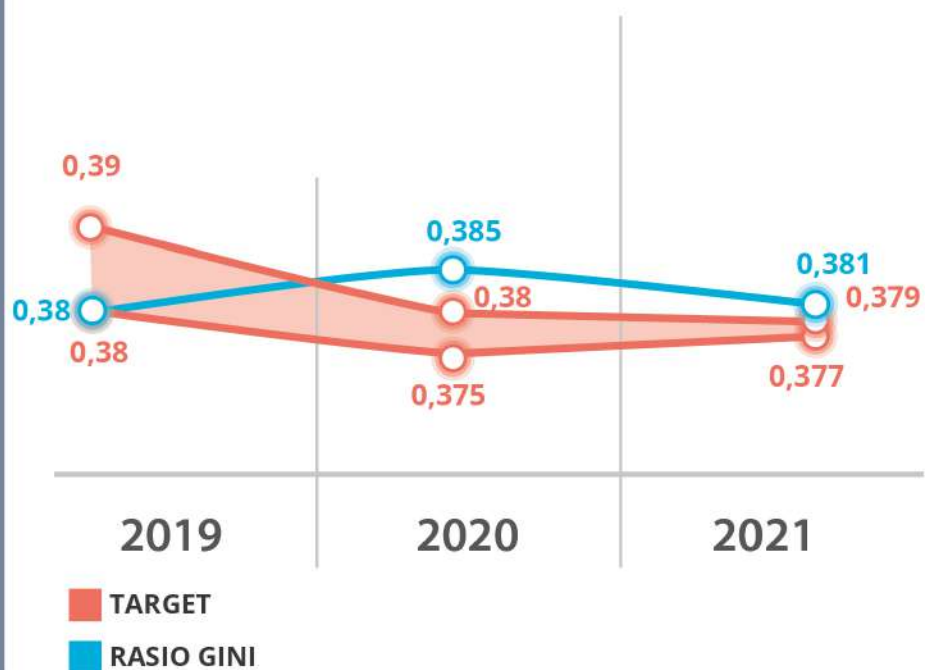
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian 6,49%, seiring dengan aktivitas perekonomian yang mulai membaik dengan pelonggaran restriksi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,67 juta jiwa, yaitu dari 9,77 juta jiwa pada Agustus 2020 menjadi 9,10 juta jiwa pada Agustus 2021.



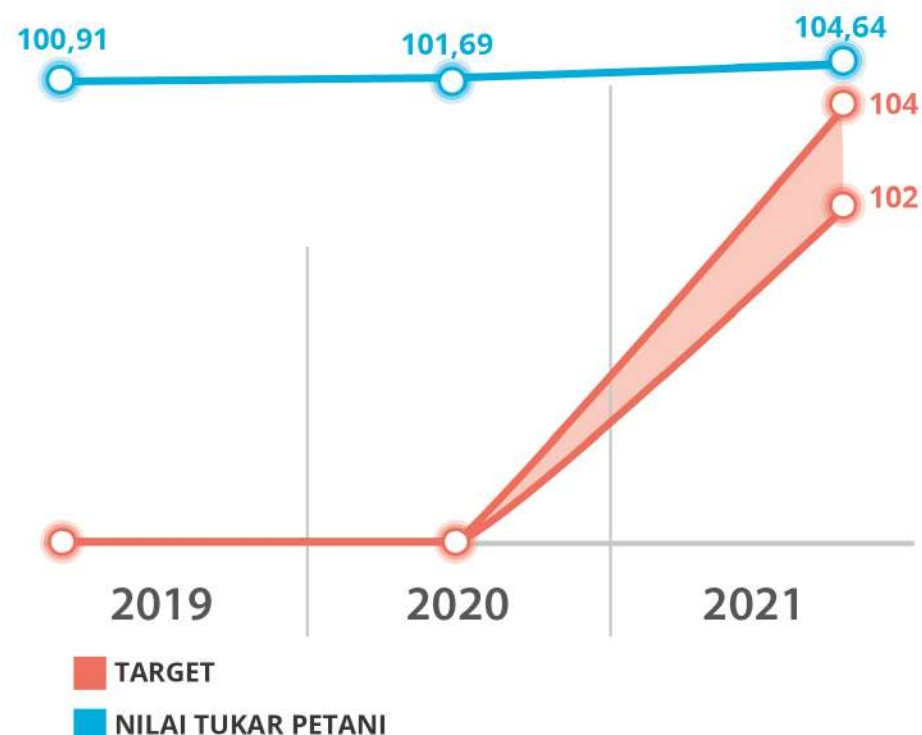
RASIO GINI

Capaian tingkat ketimpangan tahun 2021 sebesar 0,381 mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Rasio Gini di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan.



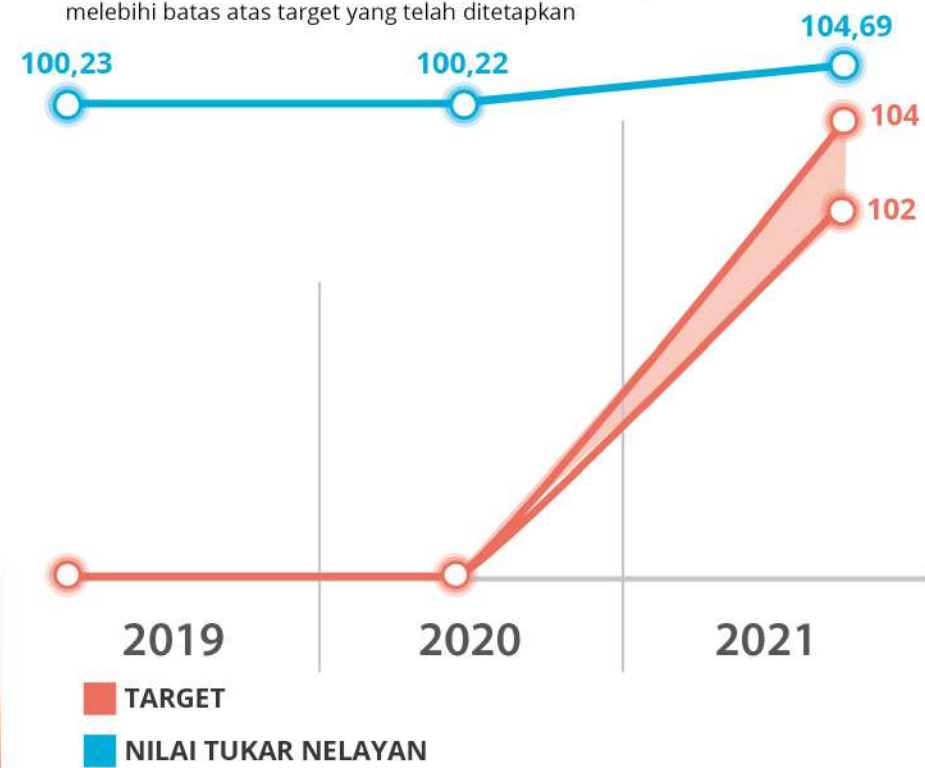
NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tahun 2021 meningkat dan sepanjang tahun selalu memiliki angka di atas 100 atau petani selalu mengalami surplus. Capaian NTP dapat melebihi batas atas target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator NTP tidak terlepas dari kenaikan harga komoditas Indonesia di pasar global.



NILAI TUKAR NELAYAN

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional tahun 2021 meningkat dan sepanjang tahun selalu memiliki angka di atas 100 atau nelayan mengalami surplus. NTN nasional tahun 2021 tercatat sebesar 104,69 lebih besar dari capaian di tahun 2020 sebesar 100,22. Oleh karena itu, Capaian NTN dapat melebihi batas atas target yang telah ditetapkan



**18 RINGKASAN EKSEKUTIF**

- 1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN KINERJA FISKAL 18
- 2. KINERJA APBN 19
- 3. KINERJA APBD 21
- 4. KINERJA INDIKATOR KESEJAHTERAAN 22
- 5. SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL DAERAH 23

26 BAB I PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

- 1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI 27
 - 1.I. Pertumbuhan Ekonomi 27
 - 1.II. Perkembangan Tingkat Inflasi 35
 - 1.III. Perkembangan Suku Bunga 36
 - 1.IV. Perkembangan Nilai Tukar 36
- 2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN 38
 - 2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 38
 - 2.II. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) 40
 - 2.III. Perkembangan Tingkat Kemiskinan 41
 - 2.IV. Perkembangan Tingkat Pengangguran 44
 - 2.V. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 47
 - 2.VI. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 49

52 BAB II PERKEMBANGAN FISKAL APBN, APBD, DAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

- 1. ANALISIS APBN 53
 - 1.I. Perkembangan Kinerja APBN 53
- 2. ANALISIS APBD 65
 - 2.I. GAMBARAN UMUM APBD 65
- 3. ANALISIS FISKAL KONSOLIDASIAN 72
 - 3.I. OVERVIEW KINERJA ANGGARAN KONSOLIDASIAN 72
 - 3.II. PERKEMBANGAN PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 74
 - 3.III. PERKEMBANGAN BELANJA KONSOLIDASIAN. 75
 - 3.IV. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN 77

90 BAB III ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL

- 1. OVERVIEW KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL 91
- 2. SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR POTENSIAL WILAYAH 94
 - 2.I. Regional Sumatera 94
 - 2.II. Regional Jawa 100
 - 2.III. Regional Kalimantan 106
 - 2.IV. Sektor Potensial Regional Kalimantan 110
- 3. REGIONAL SULAWESI 111
- 4. REGIONAL BALI NUSRA 117
 - 4.I. Sektor Unggulan Regional Bali Nusra 117
 - 4.II. Sektor Potensial Regional Bali Nusra 121
- 5. REGIONAL MALUKU PAPUA 122
 - 5.I. Sektor Unggulan Regional Maluku Papua 123
 - 5.II. Sektor Potensial Regional Maluku Papua 127

130 BAB IV ANALISIS HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

- 1. SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 131
- 2. TANTANGAN DALAM PROSES BERSINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 132
- 3. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021 134
 - 3.I. PRIORITAS NASIONAL 134

3.II. TKDD: DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa	136
4. REVIU HARMONISASI BELANJA PUSAT-DAERAH TAHUN 2021	138
4.I. REGIONAL SUMATERA	138
4.II. REGIONAL JAWA	142
4.III. Regional Bali dan Nusa Tenggara	145
4.IV. REGIONAL KALIMANTAN	147
4.V. REGIONAL SULAWESI	149
4.VI. Regional Maluku dan Papua	152

156 BAB V PERAN FISKAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA-NASIONAL	157
1.I. Perkembangan IPM Nasional	157
1.II. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Pendukung IPM	158
1.III. Capaian Output Strategis Belanja Kesehatan dan Pendidikan	160
2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA-REGIONAL	161
2.I. Perkembangan IPM Regional Sumatera	161
2.II. Perkembangan IPM Regional Jawa	166
2.III. Perkembangan IPM Regional Kalimantan	171
2.IV. Perkembangan IPM Regional Sulawesi	176
2.V. Perkembangan IPM Regional Bali Nusa	183
2.VI. Perkembangan IPM Regional Papua	187

194 BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. SIMPULAN	195
2. REKOMENDASI	196
2.I. Regional Sumatera	197
2.II. Regional Jawa	197
2.III. Regional Kalimantan	198
2.IV. Regional Sulawesi	198
2.V. Regional Bali-Nusa Tenggara	199
2.VI. Regional Maluku-Papua	199



- 33 TABEL 1. DISTRIBUSI PDRB TAHUN 2021 DAN TINGKAT PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2018-2021
- 34 TABEL 2. TINGKAT PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI PDB INDONESIA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2018 – 2021
- 66 TABEL 3. I-ACCOUNT APBD 2021
- 74 TABEL 4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN, APBD, DAN TRANSFER KE DAERAH)
- 75 TABEL 5. PROPORSI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021
- 76 TABEL 6. PERUBAHAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021
- 77 TABEL 7. RASIO BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021
- 77 TABEL 8. RASIO DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021
- 79 TABEL 9. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)
- 79 TABEL 10. INDIKATOR FISKAL REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021
- 81 TABEL 11. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL JAWA TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)
- 81 TABEL 12. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL JAWA (TRILIUN RUPIAH)
- 83 TABEL 13. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL BALI & NUSRA TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)
- 83 TABEL 14. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL BALI & NUSA TENGGARA
- 84 TABEL 15. . LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)
- 85 TABEL 16. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL KALIMANTAN
- 86 TABEL 17. .LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)
- 86 TABEL 18. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL SULAWESI
- 88 TABEL 19. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL MALUKU & PAPUA TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)
- 88 TABEL 20. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL MALUKU & PAPUAI
- 94 TABEL 23. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA
- 95 TABEL 24. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA
- 95 TABEL 25. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2021
- 97 TABEL 26. PERSENTASE KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2021
- 98 TABEL 27. PERSENTASE KONTRIBUSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2021
- 99 TABEL 28. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SUMATERA
- 99 TABEL 29. RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR INFORMASI & KOMUNIKASI 2019-2021 PADA TIGA PROVINSI UTAMA YANG MENJADIKAN SEKTOR INFORMASI & KOMUNIKASI SEBAGAI SEKTOR POTENSIAL
- 100 TABEL 21. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL JAWA
- 101 TABEL 30. PERSENTASE KONTRIBUSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2021
- 102 TABEL 31. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2021
- 103 TABEL 32. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2021
- 104 TABEL 33. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL JAWA
- 105 TABEL 34. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL JAWA
- 106 TABEL 22. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN
- 107 TABEL 35. PERBANDINGAN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020
- 108 TABEL 36. PERBANDINGAN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020
- 109 TABEL 37. LUAS AREAL DAN NILAI PRODUKSI KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021
- 111 TABEL 38. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TAHUN 2021 PER PROVINSI
- 112 TABEL 39. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SULAWESI
- 113 TABEL 40. PERGESERAN NILAI PDRB REGIONAL SULAWESI PER JENIS SEKTOR
- 114 TABEL 41. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TIAP PROVINSI TERHADAP PDRB MASING-MASING PROVINSI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2021

- 115 TABEL 42. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2021
- 116 TABEL 43. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2021
- 116 TABEL 44. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2021
- 117 TABEL 45. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL BALI NUSRA
- 118 TABEL 46. PERGESERAN NILAI PDRB REGIONAL BALI-NUSRA PER JENIS SEKTOR (DALAM MILIAR RUPIAH)
- 119 TABEL 47. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2018-2021
- 120 TABEL 48. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2018-2021
- 121 TABEL 49. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL BALI NUSRA
- 121 TABEL 50. RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 PER PROVINSI
- 122 TABEL 51. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL MALUKU PAPUA
- 123 TABEL 52. PERGESERAN NILAI PDRB MALUKU-PAPUA PER JENIS SEKTOR (DALAM TRILIUN RUPIAH)
- 124 TABEL 53. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL MALUKU - PAPUA TAHUN 2018-2021
- 126 TABEL 54. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2018-2021
- 127 TABEL 55. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL MALUKU PAPUA
- 127 TABEL 56. RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN DAN RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 PER PROVINSI
- 135 TABEL 57. PRIORITAS NASIONAL DAN MAJOR PROJECT TAHUN 2021
- 136 TABEL 58. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
- 137 TABEL 59. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL K/L TAHUN 2021
- 157 TABEL 60. UMUR HARAPAN HIDUP
- 157 TABEL 61. HARAPAN LAMA SEKOLAH
- 157 TABEL 62. RATA-RATA LAMA SEKOLAH
- 157 TABEL 63. RATA-RATA LAMA SEKOLAH
- 158 TABEL 64. TARGET DAN CAPAIAN IPM DALAM RPJMN
- 158 TABEL 65. HDI
- 165 TABEL 66. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017-2021
- 170 TABEL 67. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017-2021
- 175 TABEL 68. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017-2021
- 180 TABEL 69. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017-2021
- 185 TABEL 70. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017-2021
- 186 TABEL 71. BELANJA SUB-FUNGSI KESEHATAN PERORANGAN REGIONAL BALI NUSRA TA 2017-2021 (DALAM MILIAR RUPIAH)
- 190 TABEL 72. KONDISI RUANGAN KELAS DENGAN STATUS RUSAK SEDANG DAN BERAT
- 191 TABEL 73. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL PAPUA TAHUN 2017-2021



GAMBAR 1. KINERJA FISKAL, PEREKONOMIAN, DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2021	18
GAMBAR 2. SEBARAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL	19
GAMBAR 3. PETA SPASIAL REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD TA 2021	20
GAMBAR 4. PETA SPASIAL REALISASI APBD TAHUN 2021	21
GAMBAR 5. KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM REGIONAL TAHUN 2021	22
GAMBAR 6. POTENSI EKONOMI DAERAH MENURUT REGIONAL	24
GAMBAR 7. TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI PERIODE TAHUN 2011-2021	28
GAMBAR 8. TINGKAT VAKSINASI PERIODE TAHUN 2020-2021	28
GAMBAR 9. TINGKAT VAKSINASI PERIODE TAHUN 2020-2021	28
GAMBAR 10. PERKEMBANGAN INDEKS MOBILITAS DAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULANAN (Y.O.Y.) TAHUN 2021	30
GAMBAR 12. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA	31
GAMBAR 11. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA	31
GAMBAR 13. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA	32
GAMBAR 14. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN PDB SEKTORAL (PERSENTASE END TO END)	34
GAMBAR 15. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI NASIONAL (Y.O.Y)	35
GAMBAR 16. PETA TINGKAT INFLASI TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL TAHUN 2021	36
GAMBAR 17. PERKEMBANGAN BI7DRR DAN KREDIT BANK UMUM	37
GAMBAR 18. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING PERIODE TAHUN 2021	37
GAMBAR 19. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING PERIODE 2018 S.D. 2021 (TRIWULANAN)	38
GAMBAR 20. PERKEMBANGAN IPM INDONESIA	39
GAMBAR 21. PERKEMBANGAN IPM PROVINSI TAHUN 2016-2021 (END TO END)	39
GAMBAR 22. PERKEMBANGAN GINI RATIO INDONESIA TAHUN 2016-2021	40
GAMBAR 23. PERKEMBANGAN GINI RATIO INDONESIA TAHUN 2016-2021	41
GAMBAR 24. PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2016-2021	42
GAMBAR 25. PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TAHUN 2016-2021	43
GAMBAR 26. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI PERIODE TAHUN 2019 - 2021	44
GAMBAR 27. PERKEMBANGAN JUMLAH PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PERIODE TAHUN 2016-2021	45
GAMBAR 28. JUMLAH PENGANGGURAN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN PERIODE TAHUN 2017-2021	45
GAMBAR 29. JUMLAH PENGANGGURAN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN PERIODE TAHUN 2017-2021	46
GAMBAR 30. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021	46
GAMBAR 31. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI NASIONAL PERIODE TAHUN 2019-2021	47
GAMBAR 32. CAPAIAN NTP PROVINSI PERIODE 2019 S.D. 2021	48
GAMBAR 33. PETA CAPAIAN NTP TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL TAHUN 2021	48
GAMBAR 34. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN NASIONAL PERIODE TAHUN 2019-2021	49
GAMBAR 35. CAPAIAN NTN PROVINSI PERIODE 2019 S.D. 2021	50
GAMBAR 36. PETA CAPAIAN NTP TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL TAHUN 2021	51
GAMBAR 37. PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2016-2021	53
GAMBAR 38. KINERJA APBN TAHUN ANGGARAN 2021	54
GAMBAR 39. SEBARAN PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2021	55
GAMBAR 40. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2016-2021	56
GAMBAR 41. SEBARAN PENDAPATAN NEGARA DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2021	56
GAMBAR 42. SEBARAN PENDAPATAN NEGARA TINGKAT DAERAH SELAIN DI REGIONAL JAWA TAHUN 2021	57
GAMBAR 43. SEBARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT SELAIN DI DKI JAKARTA TAHUN 2021	58
GAMBAR 44. PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2016-2021	59
GAMBAR 45. SEBARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2021	60
GAMBAR 46. PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN TAHUN 2017-2021	61
GAMBAR 47. PERKEMBANGAN JUMLAH BLU PUSAT TAHUN 2005-2021	62
GAMBAR 48. JUMLAH DAN RUMPUN BLU PUSAT PER PROVINSI TAHUN 2021	62
GAMBAR 49. JUMLAH DEBITUR DAN REALISASI PENYALURAN KUR PER SEKTOR TAHUN 2019-2021	63

GAMBAR 50. JUMLAH DEBITUR DAN REALISASI PENYALURAN KUR PER PROVINSI TAHUN 2019-2021	64
GAMBAR 51. JUMLAH DEBITUR DAN REALISASI PENYALURAN UMI PER PROVINSI TAHUN 2017-2021	64
GAMBAR 52. MATRIKS ISU STRATEGIS PELAKSANAAN BELANJA NEGARA DI DAERAH TAHUN 2021	65
GAMBAR 53. PERKEMBANGAN TARGET KOMPONEN APBD (2019-2021)	66
GAMBAR 54. PELAKSANAAN APBD DI TINGKAT REGIONAL	67
GAMBAR 55. PERTUMBUHAN REALISASI APBD REGIONAL DIBANDINGKAN NASIONAL	67
GAMBAR 56. PERTUMBUHAN REALISASI KOMPONEN PAD	68
GAMBAR 57. PERTUMBUHAN REALISASI KOMPONEN PENDAPATAN TRANSFER	69
GAMBAR 58. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL PER JENIS	69
GAMBAR 59. KOMPOSISI BELANJA APBD 2021	70
GAMBAR 60. REALISASI KOMPONEN BELANJA OPERASI REGIONAL	70
GAMBAR 61. PERTUMBUHAN BELANJA OPERASI PER REGIONAL (2020-2021)	71
GAMBAR 62. PERTUMBUHAN BELANJA DILUAR OPERASI PER REGIONAL (2020-2021)	71
GAMBAR 64. KOMPOSISI DAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN(2019-2021)	72
GAMBAR 63. PERTUMBUHAN KOMPONEN SURPLUS/DEFISIT, PEMBIAYAAN, DAN SILPA (2020-2021)	72
GAMBAR 65. PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN (2019-2021)	73
GAMBAR 66. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL(2020-2021)	73
GAMBAR 67. PROPORSI BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021	76
GAMBAR 68. PETA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2021 PER REGIONAL	78
GAMBAR 69. PROPORSI BELANJA NEGARA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2020-2021	80
GAMBAR 70. PROPORSI BELANJA NEGARA REGIONAL JAWA TAHUN 2020-2021	82
GAMBAR 71. PROPORSI BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN REGIONAL BALI & NUSRA TAHUN 2020-2021	84
GAMBAR 72. PROPORSI BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2020-2021	85
GAMBAR 73. PROPORSI BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2020-2021 (TRILIUN RUPIAH)	87
GAMBAR 74. PROPORSI BELANJA NEGARA REGIONAL MALUKU & PAPUA TAHUN 2020-2021	88
GAMBAR 75. KONTRIBUSI PDRB PER SEKTOR LAPANGAN USAHA DI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021	91
GAMBAR 76. KONTRIBUSI PDRB PER SEKTOR LAPANGAN USAHA DI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021	92
GAMBAR 77. PETA SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL PER REGIONAL TAHUN 2021	93
GAMBAR 78. PETA SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL PER REGIONAL TAHUN 2021	93
GAMBAR 79. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL SUMATERA	94
GAMBAR 80. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021	95
GAMBAR 81. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU, SUMATERA UTARA, DAN LAMPUNG TERHADAP REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021	96
GAMBAR 82. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN PROVINSI RIAU, SUMATERA UTARA, DAN KEPULAUAN RIAU TERHADAP REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021	97
GAMBAR 83. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU, SUMATERA UTARA, DAN LAMPUNG TERHADAP REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021	98
GAMBAR 84. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PER PROVINSI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021	100
GAMBAR 86. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021	101
GAMBAR 85. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL JAWA	101
GAMBAR 87. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021	103
GAMBAR 88. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI REGIONAL JAWA TAHUN 2019-2021	104
GAMBAR 89. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PER PROVINSI REGIONAL JAWA TAHUN 2019-2021	105
GAMBAR 90. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL KALIMANTAN	106



GAMBAR 91. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021	107
GAMBAR 92. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN & PENGGALIAN TAHUN 2019-2021	108
GAMBAR 93. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN & PENGGALIAN TAHUN 2019-2021	109
GAMBAR 94. PETA SEKTOR POTENSIAL SETIAP PROVINSI DI REGIONAL KALIMANTAN	110
GAMBAR 95. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN & PENGGALIAN TAHUN 2019-2021	111
GAMBAR 96. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL SULAWESI	112
GAMBAR 97. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021	113
GAMBAR 98. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2021	114
GAMBAR 99. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN PER PROVINSI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2021	115
GAMBAR 100. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PER PROVINSI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2021	117
GAMBAR 101. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL BALI NUSRA	117
GAMBAR 102. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 2021	118
GAMBAR 103. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2019-2021	119
GAMBAR 104. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2019-2021	120
GAMBAR 105. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PER PROVINSI REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2019-2021	122
GAMBAR 106. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL MALUKU PAPUA	123
GAMBAR 107. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021	124
GAMBAR 108. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2019-2021	125
GAMBAR 109. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU - PAPUA TAHUN 2019-2021	126
GAMBAR 110. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU - PAPUA TAHUN 2019-2021	127
GAMBAR 111. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI INDONESIA	132
GAMBAR 112. SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	133
GAMBAR 113. INSTRUMEN SINERGI KEBIJAKAN FISKAL ANTARA PEMERINTAH DAN DAERAH	134
GAMBAR 114. TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2021	137
GAMBAR 115. TARGET OUTPUT DAK NONFISIK TAHUN 2021	138
GAMBAR 116. PERTUMBUHAN IPM NASIONAL	158
GAMBAR 118. REALISASI BELANJA FUNGSI KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI	159
GAMBAR 119. SUBFUNGSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT FUNGSI EKONOMI	159
GAMBAR 120. SUBFUNGSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT FUNGSI KESEHATAN	160
GAMBAR 121. SUBFUNGSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT FUNGSI PENDIDIKAN	160
GAMBAR 122. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	161
GAMBAR 123. CAPAIAN IPM	161
GAMBAR 117. IPM SUMATERA	162
GAMBAR 124. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL SUMATERA	162
GAMBAR 125. UHH DI REGIONAL SUMATERA	163
GAMBAR 126. RLS & HLS DI REGIONAL SUMATERA	163
GAMBAR 127. PENGELUARAN PER KAPITA MASYARAKAT DI REGIONAL SUMATERA	164

GAMBAR 128. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL SUMATERA	165
GAMBAR 129. CAPAIAN IPM	166
GAMBAR 130. IPM JAWA	167
GAMBAR 131. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL JAWA	167
GAMBAR 132. IPM JAWA	167
GAMBAR 133. INDEKS HLS DAN RLS REGIONAL JAWA	169
GAMBAR 134. INDEKS HLS DAN RLS REGIONAL JAWA	169
GAMBAR 135. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL JAWA	170
GAMBAR 136. CAPAIAN IPM	171
GAMBAR 137. IPM KALIMANTAN	172
GAMBAR 138. UHH KALIMANTAN	172
GAMBAR 140. IPM KALIMANTAN	174
GAMBAR 139. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL KALIMANTAN	174
GAMBAR 141. PENGELURAN PER KAPITA KALIMANTAN	175
GAMBAR 142. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL KALIMANTAN	176
GAMBAR 143. CAPAIAN IPM	177
GAMBAR 144. IPM SULAWESI	177
GAMBAR 145. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL SULAWESI	177
GAMBAR 146. UHH SULAWESI	178
GAMBAR 147. HLS DAN RLS SULAWESI	178
GAMBAR 148. PENGELUARAN PER KAPITA SULAWESI	179
GAMBAR 149. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL SULAWESI	181
GAMBAR 150. CAPAIAN IPM	183
GAMBAR 152. IPM BALI NUSRA	183
GAMBAR 151. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL BALI-NUSRA	183
GAMBAR 153. HLS DAN RLS BALI-NUSRA	184
GAMBAR 155. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL BALI-NUSRA	186
GAMBAR 154. PENGELUARAN PER KAPITA BALI-NUSRA	186
GAMBAR 156. IPM REGIONAL PAPUA	187
GAMBAR 157. IPM PAPUA	187
GAMBAR 158. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL PAPUA	188
GAMBAR 159. UHH REGIONAL PAPUA	188
GAMBAR 160. HLS DAN RLS REGIONAL PAPUA	189
GAMBAR 161. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL PAPUA	190
GAMBAR 162. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL PAPUA	191

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN KINERJA FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pada Alinea ke IV yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/D). Fungsi tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjadi stimulus investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi fungsi APBN diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa karena pelaksanaan APBN/D yang dilakukan di tengah kondisi yang diliputi ketidakpastian seiring belum berakhirnya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan guncangan yang sangat hebat terhadap perekonomian Indonesia, mobilitas manusia terhenti, sektor keuangan global bergejolak, perdagangan global merosot, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yang

masuk kedalam jurang resesi. APBN/D menjadi instrumen utama dalam memberikan stimulus fiskal yang mampu menjadi bantalan sekaligus berperan strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian.

Perekonomian Indonesia tahun 2021 berhasil mengalami recovery dan rebound, sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69 persen (C-to-C). Pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi Wilayah Maluku-Papua sebesar 10,09 persen, sedangkan terendah tercatat berada di Wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 0,07 persen. Peningkatan kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang menggeliat kembali setelah tahun sebelumnya terdapat pengetatan restriksi aktivitas dan mobilitas akibat pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang lebih terkendali, menghasilkan penurunan kasus Covid-19 yang turut didukung akselerasi vaksinasi. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2021, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 mencapai Rp16.970,8 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp15.438,0 triliun. PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5, sehingga Indonesia kembali termasuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country).

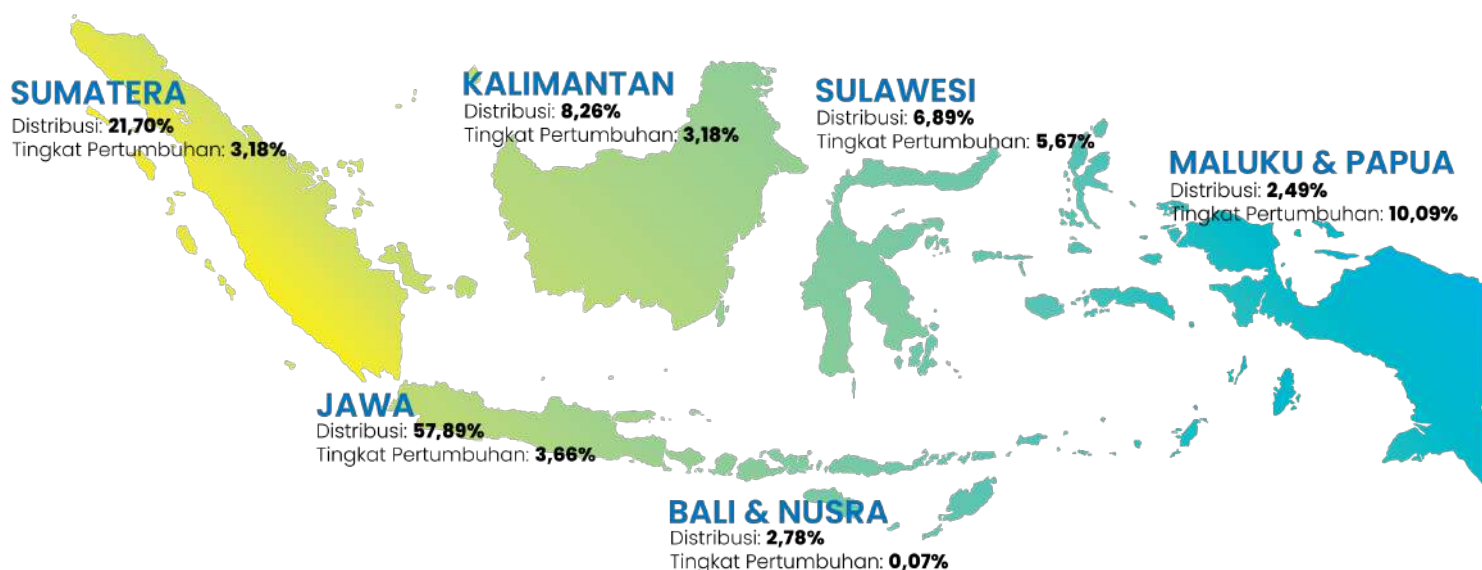
Dilihat secara spasial, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh perkembangan aktivitas

GAMBAR 1. KINERJA FISKAL, PEREKONOMIAN, DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2021

APBN		Makro Ekonomi	
a. Realisasi Pendapatan	Rp2.011,35 T (115,35%)	a. Pertumbuhan Ekonomi	3,69%
b. Realisasi Belanja	Rp2.786,41 T (101,32%)	b. Produk Domestik Bruto	Rp16.970,80 T
c. Defisit	Rp775,06 T (77,02%)	c. Inflasi	1,87%
d. Pembiayaan	Rp871,72 T (86,62%)		
e. SiLPA	Rp96,66 T		
APBD (konsolidasi)		Kesejahteraan	
a. Realisasi Pendapatan	Rp1.140,89 T (98,90%)	a. Indeks Pembangunan Manusia	72,29
b. Realisasi Belanja	Rp1.213,77 T (97,45%)	b. Rasio Gini	0,381
c. Defisit	Rp72,87 T (79,25%)	c. Pengangguran	6,49%
d. Pembiayaan	Rp73,69 T (84,59%)	d. Kemiskinan	9,71%
e. SiLPA	Rp0,82T		

sumber: KFR Kanwil DJPb, diolah

GAMBAR 2. SEBARAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL



sumber: BPS, diolah

ekonomi di regional Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 57,89 persen, diikuti oleh regional Sumatera sebesar 21,70 persen, dan regional Kalimantan sebesar 8,25 persen, sedangkan regional Sulawesi memiliki kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,78 persen, serta regional Maluku-Papua sebesar 2,49 persen. Berdasarkan share PDB tersebut, variasi angka kontribusi PDB setiap regional menunjukkan bahwa distribusi PDB masih didominasi oleh provinsi-provinsi di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Namun demikian, pemerintah telah berupaya untuk mendorong peningkatan kontribusi PDB ini ke Kawasan Indonesia Timur (KTI) melalui sejumlah program prioritas di bidang infrastruktur dan kesejahteraan baik yang didanai melalui APBN maupun APBD. Secara laju pertumbuhan, Provinsi Maluku Utara mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 16,40 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah adalah di Provinsi Bali yang mengalami kontraksi sebesar 2,57 persen.

Pada capaian tingkat inflasi nasional di tahun 2021, tingkat inflasi Indonesia terkendali dengan besaran 1,87 persen atau lebih tinggi 0,19 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tingkat inflasi tahun 2021 yang berada dibawah asumsi makro sebesar 3 ± 1 persen. Tingkat inflasi tahun 2021 merupakan tingkat inflasi tahunan (Y-o-Y) tertinggi yang terjadi sejak periode awal pandemi, yaitu inflasi bulan Mei 2020 sebesar 2,13 persen (Y-o-Y). Meskipun begitu, tingkat inflasi yang masih

rendah pada tahun 2021 dapat mengindikasikan permintaan domestik masih tertahan dan belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19. Peningkatan inflasi di tahun 2021 seiring dengan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat dan pola musiman hari besar keagamaan nasional yang mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa.

2. KINERJA APBN

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2021 masih memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan pengelolaan yang prudent dan sustainable. Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif, melampaui target, dan telah berada pada level sebelum pandemi. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat tumbuh sebesar 22,07 persen dari sebesar Rp1.647,78 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.011,41 triliun pada tahun 2021. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp1.743,65 triliun atau tercapai sebesar 115,36 persen. Selain itu, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2021 telah berada pada level sebelum pandemi (tahun 2019) setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dunia, membaiknya harga komoditas, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, realisasi belanja

GAMBAR 3.

PETA SPASIAL REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD TA 2021



sumber: Kementerian Keuangan, diolah

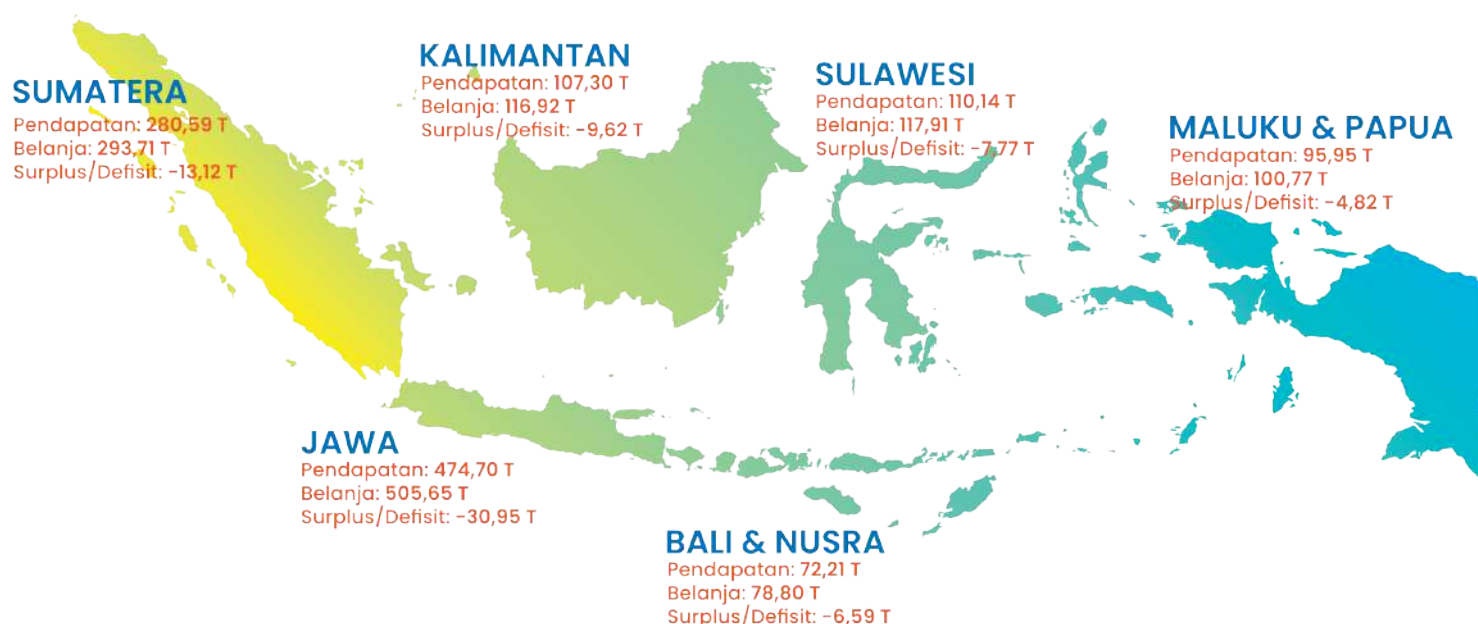
negara pada TA 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun atau 101,32 persen, melebihi pagu APBN TA 2021. Capaian tersebut meningkat Rp190,93 triliun atau tumbuh sebesar 7,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.000,70 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp785,71 triliun. Pada bagian BPP, besaran realisasi belanja barang merupakan kebutuhan belanja utama yakni sebesar Rp530,06 triliun atau sekitar 19,02 persen dari total belanja negara, disusul kemudian oleh belanja pegawai sebesar Rp334,41 triliun (22,35 persen total belanja), belanja kewajiban bunga utang sebesar Rp387,75 triliun (13,92 persen total belanja), sedangkan belanja modal sebesar Rp239,63 triliun (8,60 persen total belanja). Belanja negara baik dalam bentuk BPP maupun TKDD berperan cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Optimalisasi belanja pada tahun 2021 dilakukan dalam kerangka belanja yang responsif dan fleksibel, seiring dengan tingginya realisasi belanja pemerintah, kondisi perekonomian pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan.

Dilihat secara spasial, porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata serta pencairan Program PC-PEN yang dilakukan terpusat, sehingga belanja tersebut diakui dilakukan di wilayah Jawa, meskipun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia. Tahun 2021, regional Jawa memiliki kontribusi sebesar 60,55 persen untuk pencairan anggaran

belanja K/L dan TKDD, disusul oleh regional Sumatera sebesar 15,64 persen. Porsi terendah dari realisasi anggaran berada di regional Bali-Nusa Tenggara dengan kontribusi sebesar 4,14 persen. Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan belanja perkapita, maka masyarakat di regional Jawa dengan jumlah penduduk sebanyak 153,57 juta jiwa mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp7,80 juta per kapita, lebih rendah dibandingkan dengan nilai belanja perkapita di regional Maluku-Papua dengan jumlah penduduk sebanyak 7,26 juta jiwa, yakni sebesar Rp13,99 juta perkapita. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam mengembangkan kawasan Indonesia Timur di tengah Covid-19 masih tetap dilakukan seoptimal mungkin. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan countercyclical menghasilkan realisasi defisit anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau 4,57 persen dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun atau mencapai 6,14 persen dari PDB. Realisasi defisit tahun 2021 lebih rendah dari target sebesar Rp1.006,38 triliun atau dari target sebesar 5,70 persen dari PDB seiring dengan realisasi penerimaan perpajakan dan PNPB yang melampaui target. Realisasi defisit APBN pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan terjadinya pemulihan dan mulai menuju ke arah di bawah 3 persen. Pada masa pandemi Covid-19, yaitu tahun 2020 dan 2021, pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

GAMBAR 4. PETA SPASIAL REALISASI APBD TAHUN 2021



sumber: Kementerian Keuangan, diolah

2020 dimana defisit APBN dapat di atas 3 persen untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2023 akan kembali di bawah 3 persen. Defisit anggaran tersebut selanjutnya ditutup dengan pembiayaan (neto)

Kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan countercyclical menghasilkan realisasi defisit anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau 4,57 persen dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun atau mencapai 6,14 persen dari PDB. Realisasi defisit tahun 2021 lebih rendah dari target sebesar Rp1.006,38 triliun atau dari target sebesar 5,70 persen dari PDB seiring dengan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP yang melampaui target. Realisasi defisit APBN pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan terjadinya pemulihan dan mulai menuju ke arah di bawah 3 persen. Pada masa pandemi Covid-19, yaitu tahun 2020 dan 2021, pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana defisit APBN dapat di atas 3 persen untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2023 akan kembali di bawah 3 persen. Defisit anggaran tersebut selanjutnya ditutup dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp871,72 triliun. Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk TA 2021 sebesar Rp96,66 triliun yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembiayaan APBN

pada tahun-tahun berikutnya.

3. KINERJA APBD

Dari sisi fiskal daerah, konsolidasi APBD secara nasional di tahun 2021 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah mengalami kontraksi. Konsolidasi realisasi pendapatan APBD secara nasional (gabungan) adalah sebesar Rp1.140,89 triliun atau terkontraksi sebesar 7,97 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp84,15 triliun (7,28 persen). Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kontraksi sebesar 19,58 triliun, sedangkan dana transfer (TKDD) mengalami peningkatan sebesar Rp89,89 triliun. Dana transfer merupakan kontributor utama dalam pendapatan daerah, yakni sebesar Rp802,47 triliun atau sekitar 70,34 persen dari total pendapatan daerah. Pada pos belanja daerah, terjadi kontraksi belanja yakni dari Rp1.300,35 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1.213,77 triliun di tahun 2021 atau terkontraksi sebesar 6,66 persen. Belanja pegawai masih menjadi kebutuhan belanja utama yang menyerap anggaran sebesar Rp406,03 triliun atau sekitar 33,45 persen dari total belanja, disusul kemudian oleh realisasi belanja barang sebesar Rp322,85 triliun atau 26,60 persen dari total belanja, dan belanja modal sebesar Rp193,62 triliun atau sekitar 15,95 persen dari total belanja daerah.

Secara ideal, proporsi alokasi dan serapan belanja modal yang bersumber dari APBD hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih besar atau cenderung mendekati kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang, sehingga belanja yang bersifat investasi dapat memberikan stimulus yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Dengan pendapatan daerah yang lebih rendah daripada realisasi belanjanya, maka secara konsolidasi APBD dihasilkan angka defisit anggaran sebesar Rp72,87 triliun, ditambah dengan pembiayaan neto yang telah direalisasikan sebesar Rp73,69 triliun, maka SiLPA Daerah di tahun 2021 mencapai Rp0,82 triliun.

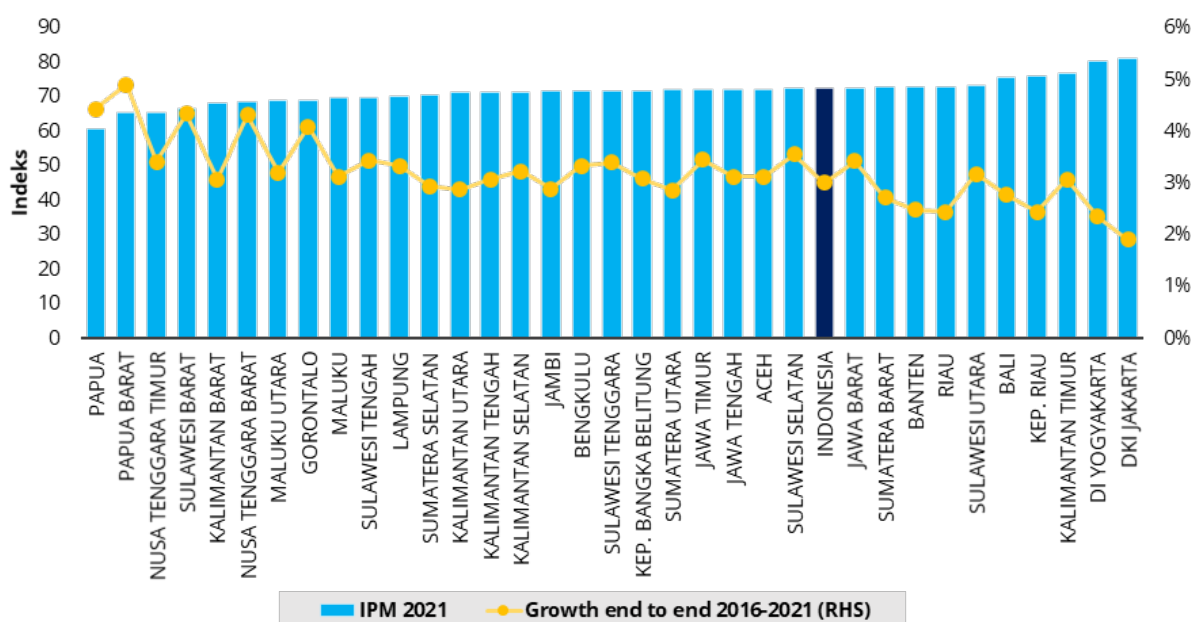
Di lihat secara spasial, pada tahun 2021 belanja daerah dikontribusikan secara signifikan oleh pemerintah daerah di regional Jawa sekitar 41,66 persen dari total belanja APBD konsolidasi, disusul oleh regional Sumatera dengan kontribusi sebesar 24,20 persen. Adapun dari sisi postur APBD secara umum, dapat diketahui bahwa seluruh regional mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran terbesar terjadi di regional Jawa sebesar Rp30,95 triliun, sedangkan terendah berada di regional Maluku-Papua sebesar Rp4,82 triliun. Namun demikian, dari sisi kemandirian fiskal daerah, regional Jawa memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional lainnya dengan kontribusi PAD sebesar 39,44 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan dana transfer berkontribusi sebesar 57,71 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa regional Jawa

lebih memiliki kemampuan lebih besar dalam memperoleh PAD yang akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk untuk infrastruktur atau belanja signifikan lain yang lebih banyak sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi regionalnya.

4. KINERJA INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama (ultimate goal) dari setiap perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Pemerintah terus berupaya untuk membangun keselarasan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan perbaikan indikator kesejahteraan. Oleh sebab itu, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran yang menggambarkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin ke dalam 3 aspek, yaitu: akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak. Pada tahun 2021, capaian tingkat IPM nasional sebesar 72,29 atau meningkat sebesar 0,35 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 71,94. Jakarta memiliki IPM tertinggi dan termasuk dalam kategori sangat tinggi mencapai 81,11, sedangkan provinsi Papua masih menjadi yang terendah dengan indeks sebesar 60,62 meskipun pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan tahun

GAMBAR 5. KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM REGIONAL TAHUN 2021



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

sebelumnya. Rata-rata IPM di wilayah Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia bagian timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di KTI masih menjadi tantangan tersendiri.

Dari indikator kesejahteraan yang lain, tingkat kemiskinan nasional telah mengalami penurunan dari 10,19 persen di tahun 2020 menjadi 9,71 persen di tahun 2021. Jumlah penduduk miskin menjadi berkurang dari 27,55 juta orang (2020) menjadi sebanyak 26,50 juta orang di tahun 2021. Penurunan angka kemiskinan merupakan target dari program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, dan ini terus menerus dilakukan melalui belanja negara terutama pada sektor perlindungan sosial, kesehatan, serta dukungan permodalan usaha mikro, kecil, menengah. Sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional, mayoritas provinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan kecuali Provinsi Aceh, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat kemiskinan tertinggi dialami oleh Provinsi Papua sebesar 0,58 poin, sedangkan terendah dialami Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,05 poin. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi (di atas 15 persen) masih terjadi pada provinsi-provinsi di KTI, seperti Papua (27,38 persen), Papua Barat (21,82 persen), Nusa Tenggara Timur (20,44 persen), Maluku (16,32 persen), dan Gorontalo (15,41 persen), sedangkan di KBI Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan sebesar 15,53 persen. Hal ini menandakan bahwa pemerintah perlu untuk terus fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan pada kantong-kantong atau daerah miskin dan terarah dalam mengatasi akar penyebabnya, termasuk meningkatkan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatannya.

Pada tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan angka perbaikan dengan nilai rasio gini dari 0,385 pada tahun 2020 menjadi 0,381 di tahun 2021. Sebagian besar provinsi menunjukkan indeks dibawah rata-rata nasional. Ketimpangan terendah terjadi pada Provinsi Bangka Belitung dengan gini rasio 0,247 sedangkan tertinggi terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan gini rasio 0,436. Penurunan indeks rasio gini tersebut selaras dengan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia dalam 2 tahun terakhir terus mengalami perbaikan meskipun belum signifikan. Penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,58 poin, dari 7,07 persen

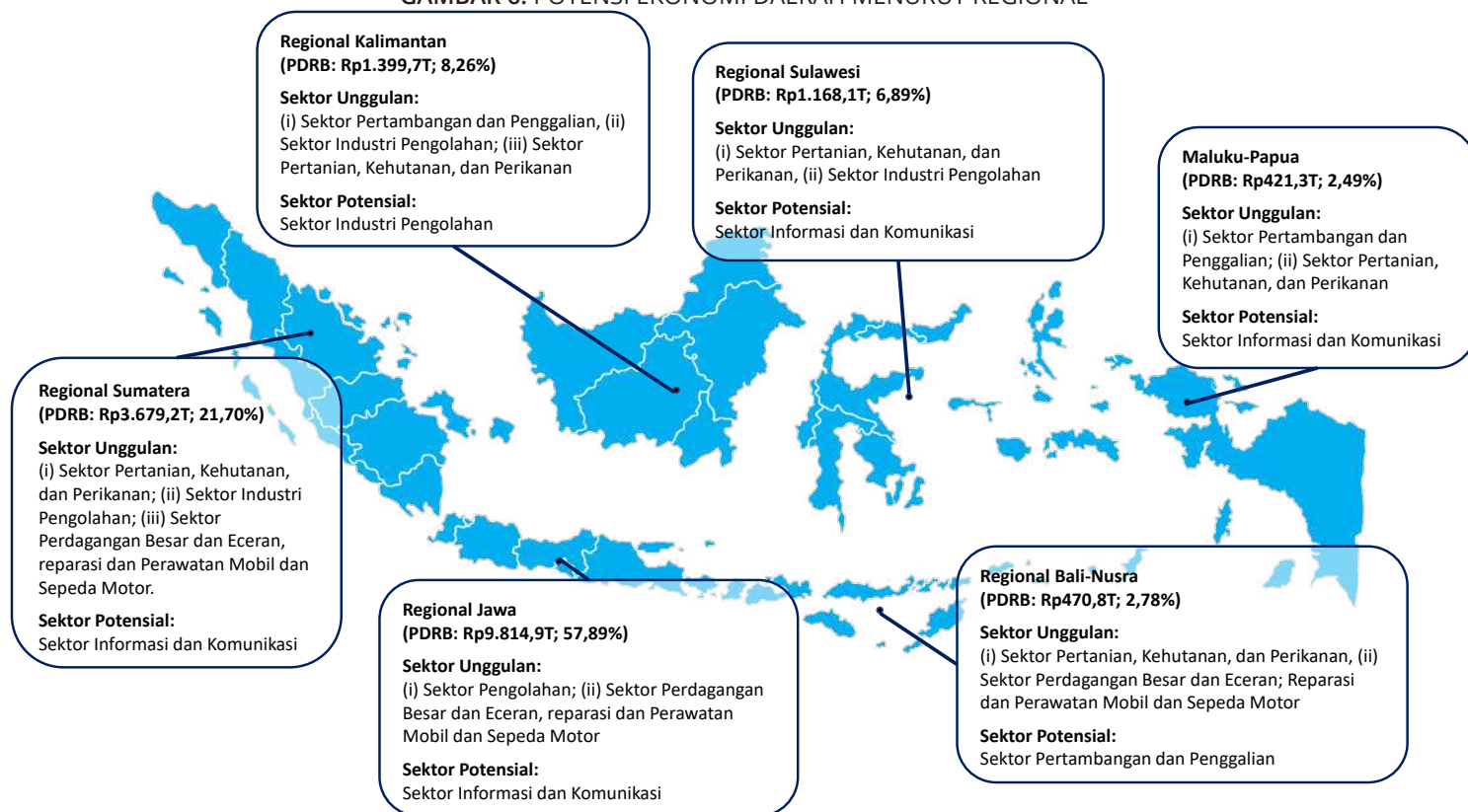
pada tahun 2020 menjadi 6,49 persen di tahun 2021. Jumlah pengangguran turun dari 9,77 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 9,10 juta jiwa di tahun 2021. Penurunan jumlah pengangguran dan TPT tersebut belum berada pada level sebelum pandemi seiring terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat gelombang kedua kasus Covid-19 pada triwulan III 2021.

5. SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL DAERAH

Kebijakan fiskal yang dituangkan dalam APBN dan APBD merupakan instrumen kebijakan yang langsung berdampak dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang efektif harus memperhatikan kebutuhan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah, kultur masyarakat, dan potensi ekonomi pada masing-masing wilayah. Pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam RPJMN bertujuan untuk percepatan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok wilayah melalui program-program berbasis infrastruktur dan ekonomi yang akan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah dalam mengalokasikan dana APBN dan APBD tersebut. Kemandirian fiskal daerah harus semakin ditingkatkan dengan upaya-upaya konstruktif, sehingga daerah semakin mampu dalam membiayai kebutuhan daerah. Adapun hasil identifikasi dan pemetaan atas sektor unggulan dan potensial sesuai dengan karakteristik daerah, kultur masyarakat, dan potensi ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan variasi antara satu regional dengan regional lainnya. Namun, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, serta Pertambangan dan Penggalan, masih menjadi sektor utama aktivitas perekonomian di daerah.

Berdasarkan pemetaan sektor unggulan dan potensial ekonomi daerah, maka diperlukan sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk saling mendukung dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan. Secara umum belanja pemerintah pusat dan daerah yang dilihat dari belanja K/L dengan TKDD pada komponen DAK Fisik, Dak non Fisik, dan Dana Desa telah berjalan selaras.

GAMBAR 6. POTENSI EKONOMI DAERAH MENURUT REGIONAL



Tidak terdapat tumpang tindih antara belanja K/L dengan TKDD. Keduanya saling mendukung dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan. Selain itu, harmonisasi antara belanja pusat dan daerah juga dilihat implementasi dukungan terhadap pencapaian Major Project. Hasil analisis menunjukkan implementasi belanja pusat dan daerah saling mendukung dalam upaya pencapaian Major Project untuk seluruh Prioritas Nasional (PN).

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



BAB I PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Foto Sahid Subekti

Highlights 2021:

- Gelombang kedua pandemi covid-19 yang terjadi di triwulan III 2021 menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi nasional
- Pertumbuhan PDB sebesar 3,69% (y.o.y)
- Tingkat inflasi sebesar 1,87% (y.o.y)
- Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada rentang level Rp13.875 sampai Rp14.648
- BI-7 Day Reverse Repo Rate sebesar 3,50%

1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

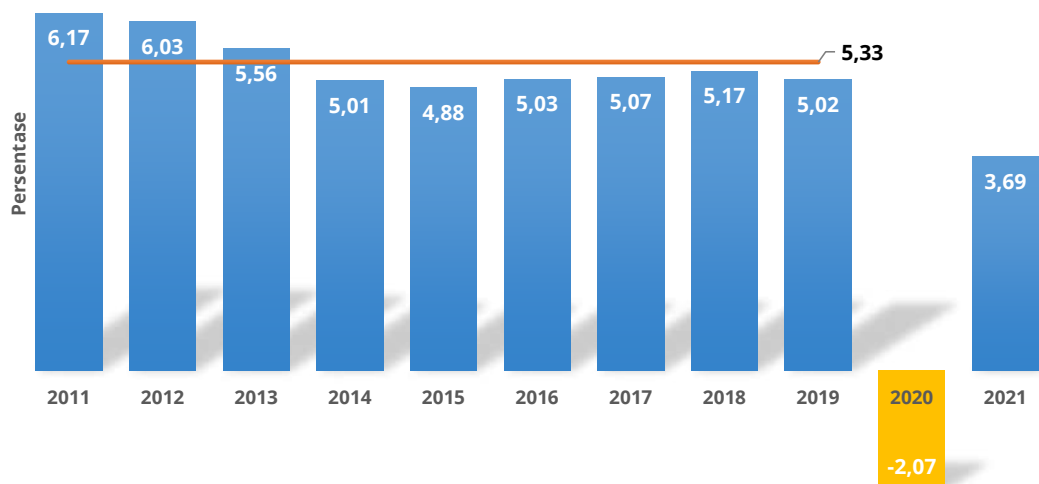
Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan dan tumbuh secara positif. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,79 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,24 juta. Pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar 3,69% (c-to-c), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07% (c-to-c). Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 terlihat mendekati level sebelum pandemi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan sebesar 5,33% (c-to-c) selama periode tahun 2011-2019. Gelombang kedua pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal triwulan III 2021 menyebabkan perlambatan ekonomi nasional sehingga pemulihan ekonomi menjadi melambat. Perekonomian nasional terus pulih sejalan dengan terkendalinya pandemi covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan membaiknya perekonomian global. Kinerja ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan tetap meningkat dengan melanjutkan tren positif yang terjadi di tahun 2021. Keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi menjadi kunci untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi pandemi covid-19 di Indonesia makin terkendali seiring turunnya kasus harian dan tingginya tingkat vaksinasi. Meskipun begitu, munculnya varian baru Omicron atau varian covid-19 lainnya tetap diwaspadai dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin.

Pemulihan ekonomi nasional terjadi seiring dengan perekonomian global yang terus pulih sepanjang tahun 2021 meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Variasi kecepatan pemulihan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan penanganan pandemi yang terkait

dengan perbedaan tingkat vaksinasi dan perbedaan jumlah stimulus yang diberikan di setiap negara. Pemulihan ekonomi global yang terjadi di tahun 2021 tidak terlepas dari cepatnya pengembangan berbagai vaksin covid-19 yang mampu didistribusikan secara luas di dunia. Kebersamaan negara-negara di dunia untuk bersama-sama menghadapi pandemi covid-19 merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan sebagai kesatuan masyarakat global. Meskipun begitu, terjadi perbedaan tingkat vaksinasi antara negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Percepatan dan perluasan program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi covid-19. Pengadaan vaksin di Indonesia dilakukan dengan mengamankan dan mendatangkan vaksin dari berbagai sumber ke Indonesia. Pemerintah terus meningkatkan cakupan vaksinasi di Indonesia untuk mengatasi pandemi covid-19 terutama untuk mengantisipasi kemunculan varian baru, seperti Omicron yang mulai menyebar pada akhir periode tahun 2021.

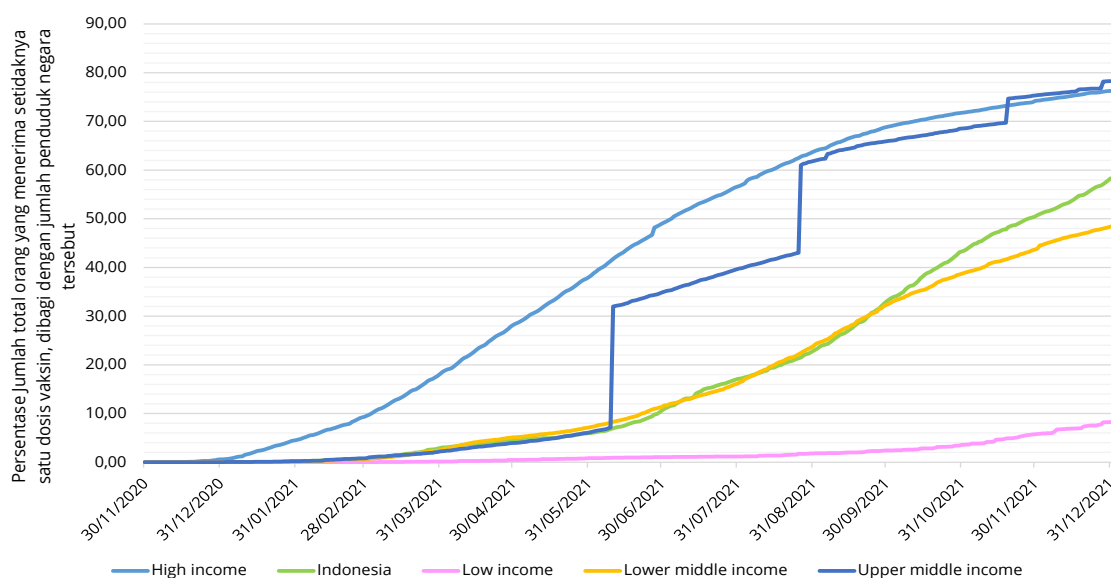
Momentum perbaikan ekonomi nasional terus dijaga melalui stimulus fiskal yang menjadi instrumen penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kebijakan stimulus fiskal dalam jumlah besar ditempuh banyak negara di dunia untuk penanganan dampak pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Secara umum, stimulus fiskal tersebut dialokasikan untuk anggaran biaya kesehatan, program bantuan sosial kepada masyarakat, penguatan program prioritas, insentif kepada dunia usaha khususnya UMKM, serta keringanan pajak kepada korporasi. Pemberian insentif pajak dan kondisi ekonomi yang mengalami resesi menyebabkan beban anggaran menjadi lebih berat terutama dari turunnya penerimaan pajak. Pelebaran defisit fiskal terjadi di banyak negara dalam rangka memberikan stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi di negaranya. Kemampuan stimulus fiskal

GAMBAR 7. TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI PERIODE TAHUN 2011-2021



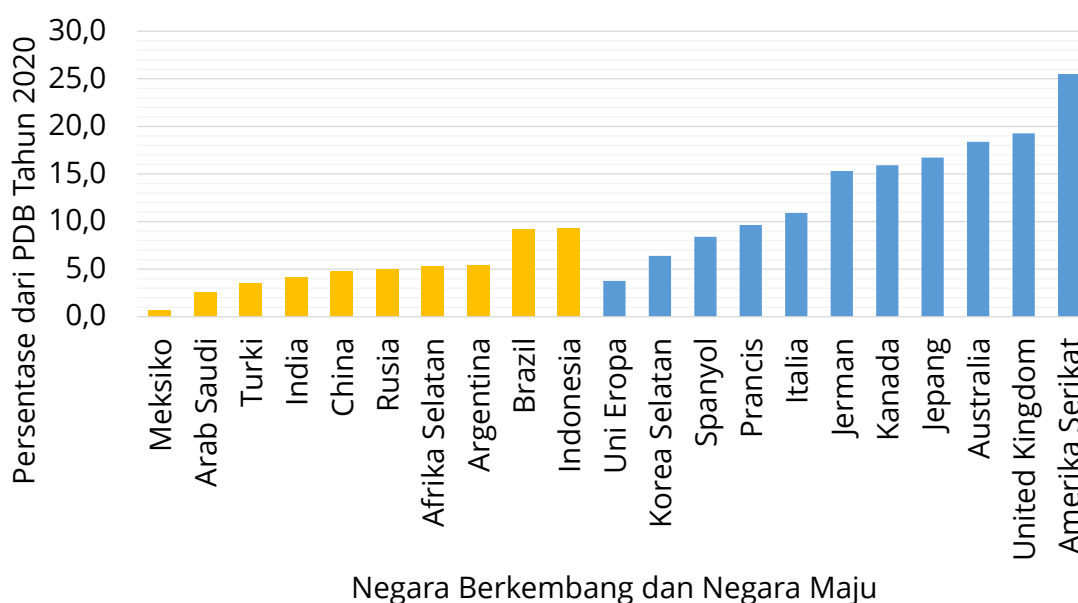
Sumber: BPS

GAMBAR 8. TINGKAT VAKSINASI PERIODE TAHUN 2020-2021



Sumber: <https://ourworldindata.org/coronavirus>

GAMBAR 9. TINGKAT VAKSINASI PERIODE TAHUN 2020-2021



Sumber: IMF Fiscal Policy Responses to Covid-19

yang terbatas menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi lebih lambat. Negara maju cenderung lebih mampu untuk meningkatkan defisit fiskal yang lebih besar sehingga negara maju relatif lebih mampu untuk memberikan stimulus fiskal yang lebih besar.

Kebijakan penanggulangan dampak pandemi covid-19 dilanjutkan pemerintah pada tahun 2021 dengan memberikan stimulus fiskal yang cukup besar di bidang kesehatan dan perekonomian. Pada tahun 2021, pemerintah melanjutkan strategi kebijakan yang mengutamakan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan anggaran penanganan pandemi covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp744,77 triliun. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 terdiri dari 5 klaster, yaitu klaster kesehatan dengan anggaran sebesar Rp214,96 triliun, klaster perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp186,64 triliun, klaster program prioritas dengan anggaran sebesar Rp117,94 triliun, klaster UMKM dan korporasi dengan anggaran sebesar Rp162,40 triliun, dan klaster insentif usaha sebesar Rp62,83 triliun. Kebijakan di bidang kesehatan dilakukan meliputi dan tidak terbatas pada program vaksinasi, sarana dan prasarana laboratorium covid-19, pengetesan dan penelusuran, physical distancing, dan insentif perpajakan kesehatan. Kebijakan di bidang perlindungan sosial yang dilakukan adalah dengan Program Keluarga Harapan, pemberian logistik/pangan/sembako, bantuan sosial Jabodetabek dan non jabodetabek, perluasan Kartu Pra Kerja, diskon listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA, serta BLT Dana Desa. Kebijakan penguatan program prioritas dilakukan melalui beberapa sektor penting seperti program padat karya, ketahanan pangan, dukungan ekonomi kreatif, subsidi bunga pinjaman daerah serta bantuan sektor pariwisata. Kebijakan untuk melindungi UMKM dan Korporasi dilakukan diantaranya melalui subsidi bunga KUR dan Non KUR, penempatan dana dan cadangan, IJP UMKM dan korporasi, BPUM, bantuan PKL dan pembebasan rekmin. Kebijakan pemberian insentif usaha dilakukan antara lain dengan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, dan stimulus lainnya.

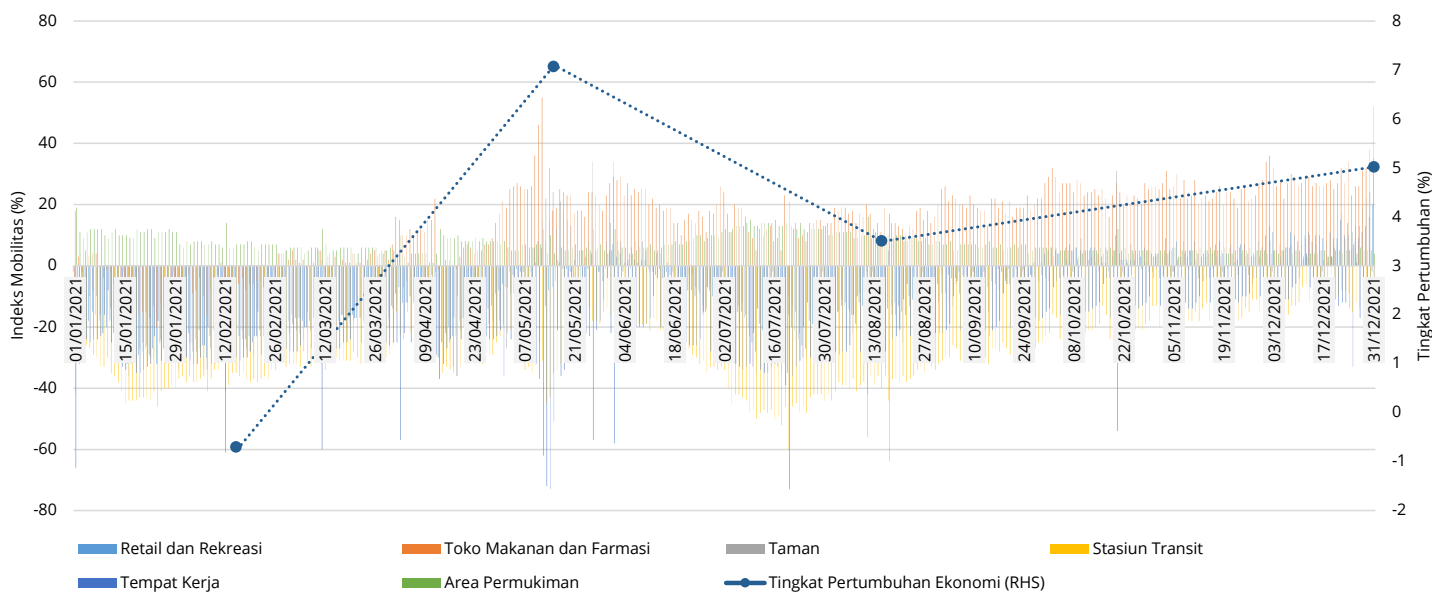
Kebijakan pemulihan ekonomi nasional tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga didukung oleh sinergi dan koordinasi kebijakan yang kuat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pihak lainnya. Bank Indonesia memberikan stimulus moneter yang besar dalam bentuk kebijakan suku bunga rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, dan injeksi likuiditas (quantitative easing). Pelonggaran kebijakan makroprudensial dilakukan untuk mendorong peningkatan pembiayaan perbankan bagi dunia

usaha. Digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan untuk integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Bank Indonesia juga melanjutkan dukungan pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana baik melalui mekanisme lelang utama maupun melalui mekanisme Greenshoe Option. Sementara itu, OJK melanjutkan kebijakan untuk meredam volatilitas di pasar modal dan melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan. LPS memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa simpanannya terjamin pada perbankan sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga.

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2021 mengalami tren peningkatan meskipun proses pemulihan ekonomi sempat melambat akibat penyebaran varian baru Covid-19. Pada triwulan II 2021 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% (y.o.y.) dari -0,70% (y.o.y.) pada triwulan I 2021. Pertumbuhan tersebut mencatatkan angka positif untuk pertama kalinya sejak pandemi covid-19 terjadi di Indonesia pada awal triwulan II 2020. Gelombang kedua kasus covid-19 terjadi di awal triwulan III 2021 akibat penyebaran varian Delta Covid-19. Upaya pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus tersebut dilakukan dengan meningkatkan pembatasan mobilitas melalui kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan berbagai skenario yang disesuaikan dengan berbagai kondisi daerah di Indonesia. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi kembali melambat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021. Meskipun begitu, kebijakan untuk mengutamakan aspek kesehatan melalui kebijakan PPKM terbukti efektif untuk menekan laju kasus harian covid-19 yang mengalami kasus tertinggi pada bulan Juli 2021. Perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,51% (y.o.y.) pada triwulan III 2021 seiring dengan peningkatan pembatasan interaksi fisik sehingga menurunkan kembali aktivitas ekonomi di berbagai sektor perekonomian. Perekonomian pada triwulan IV 2021 kembali mengalami peningkatan seiring pelonggaran pembatasan mobilitas dan berakhirnya gelombang kedua kasus covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 5,02% (y.o.y.) sehingga pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2021 tercatat positif sebesar 3,69% (y.o.y.). Perekonomian Indonesia di tahun 2021 belum kembali seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19, tetapi seiring terkendalinya pandemi Covid-19 dan membaiknya aktivitas sosial dan ekonomi maka tren peningkatan dapat terus berlanjut di tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2021 melambat seiring dengan turunnya mobilitas masyarakat pada bulan Juli dan Agustus 2021 akibat terjadinya gelombang kedua covid-19 yang disebabkan oleh varian Delta. Grafik pada gambar Perkembangan Indeks Mobilitas dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y.o.y.) Tahun

GAMBAR 10. PERKEMBANGAN INDEKS MOBILITAS DAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULANAN (Y.O.Y.) TAHUN 2021



Sumber: Google Community Mobility Reports, dan BPS, diolah

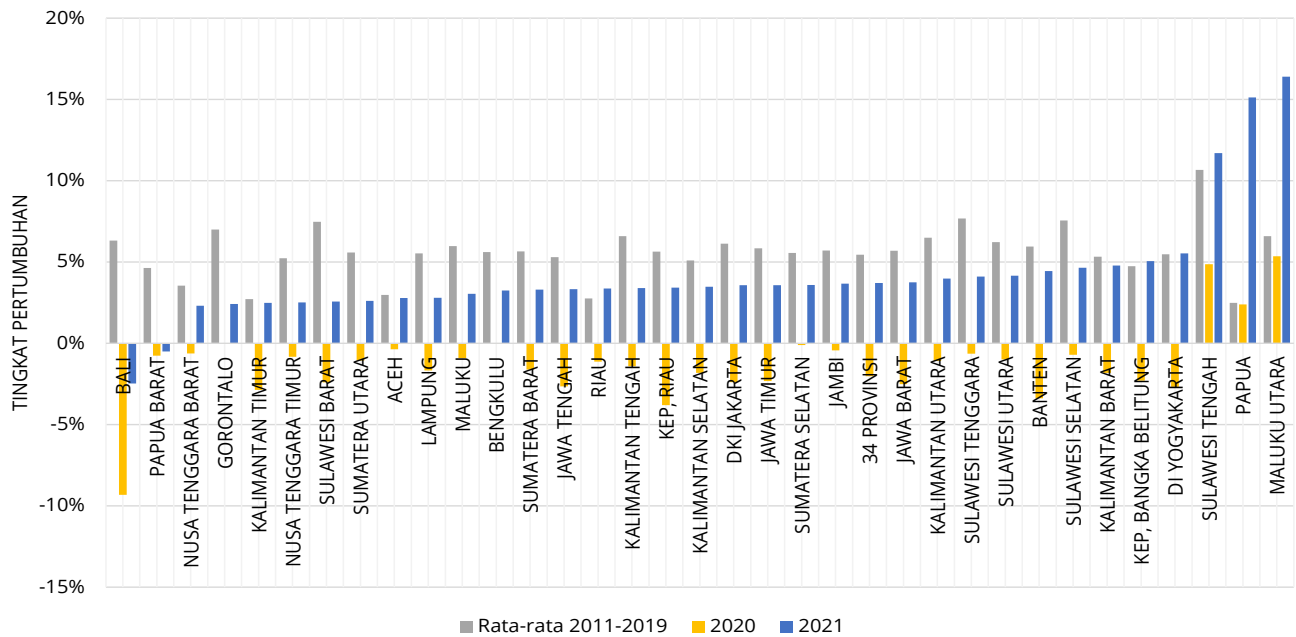
2021, menunjukkan tingkat mobilitas masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2021. Pada triwulan III 2021 terlihat bahwa mobilitas masyarakat di luar rumah mengalami penurunan. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas masyarakat di area permukiman dan terjadi penurunan aktivitas di area stasiun transit atau sarana transportasi umum. Sementara itu, pada triwulan III 2021, mobilitas di area perkantoran tidak banyak berubah. Kondisi di area perkantoran tersebut dapat saja disebabkan lingkungan perkantoran telah melakukan adaptasi model bekerja dari rumah (work from home) sehingga telah menjadi kebiasaan baru dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada bulan September 2021, pemerintah melakukan kebijakan pelonggaran pembatasan mobilitas seiring adanya tren penurunan kasus dan kematian Covid-19. Kebijakan pelonggaran tersebut mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Pada triwulan IV 2021, perekonomian Indonesia mencatatkan kinerja positif dan kembali pada tren peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi setelah sempat melambat akibat merebaknya varian delta covid-19 pada triwulan III 2021.

Perekonomian nasional didukung oleh capaian perekonomian daerah yang tumbuh secara positif hampir di seluruh daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah yang mencatatkan pertumbuhan tahunan (y-o-y) berturut-turut sebesar 16,40%, 15,11%, dan 11,70%. Ketiga provinsi tersebut tidak mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi covid-1. Sementara itu, terdapat provinsi yang tercatat mengalami kontraksi

pertumbuhan kembali, baik pada tahun 2021 maupun tahun 2020, yaitu provinsi Bali dan Papua Barat dengan capaian pertumbuhan tahun 2021 (y-o-y) berturut-turut sebesar 2,47% dan 0,51%. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi daerah belum berada pada tingkatan sebelum pandemi, yang diukur dengan membandingkan capaian tingkat pertumbuhan tahun 2021 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan periode tahun 2011-2019. Terdapat 5 (lima) provinsi di Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari periode sebelum pandemi covid-19, yaitu Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan D.I. Yogyakarta. Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut secara berturut-turut sebesar 16,40%, 11,70%, 3,36%, 5,05%, dan 5,53% (y-o-y). sementara itu, capaian tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata periode tahun 2011-2019 untuk provinsi tersebut secara berturut-turut sebesar 6,59%, 10,66%, 2,75%, 4,74%, dan 5,47%.

Secara spasial, struktur ekonomi Indonesia masih dominan terjadi di pulau Jawa dengan tingkat distribusi sebesar 57,89% dari perekonomian nasional di tahun 2021. Sepanjang periode tahun 2010-2021 distribusi perekonomian tidak mengalami perubahan dengan distribusi tertinggi sampai terendah berturut-turut, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, serta Maluku & Papua. Seluruh wilayah di Indonesia pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun belum pada tingkatan sebelum pandemi. Kinerja ekonomi yang positif di tahun 2021 masih lebih baik dibandingkan kinerja ekonomi di tahun 2020 yang sebagian besar mengalami kontraksi. Tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 terjadi di Maluku & Papua dengan capaian sebesar 10,09% (y-o-y). Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi di

GAMBAR 11. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA



Sumber: BPS

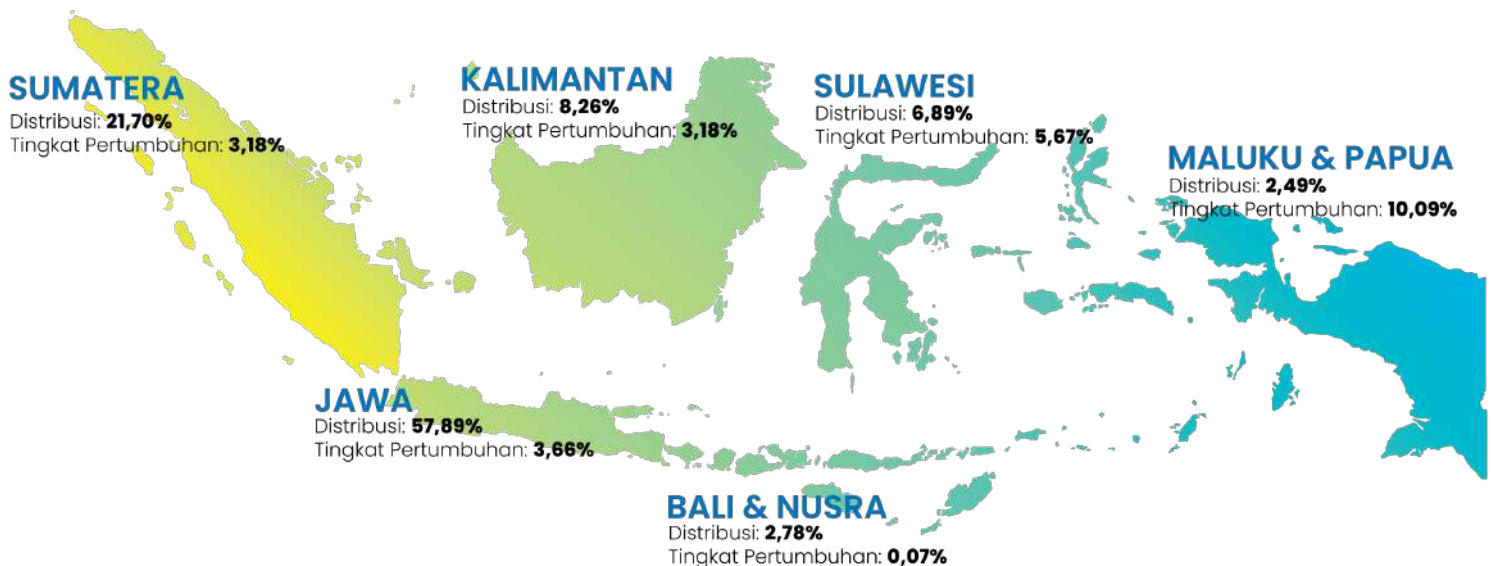
Bali & Nusa Tenggara dengan capaian sebesar 0,07% (y-o-y). Distribusi perekonomian yang terpusat di pulau Jawa dapat mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengusung tema pembangunan ekonomi inklusif untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah dengan menciptakan akses yang ekonomi yang luas bagi seluruh masyarakat. Wujud pembangunan ekonomi inklusif diantaranya dilakukan dalam bentuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan IKN dilakukan dalam rangka menyebarluaskan sumber dan pusat perekonomian baru sehingga

perekonomian tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Pembangunan IKN diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Selain itu, pembangunan ekonomi inklusif dilakukan dengan mendorong keunggulan kompetitif masing-masing wilayah. Pusat ekonomi baru dapat dikembangkan di luar pulau Jawa dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di luar pulau Jawa. Dengan demikian, dapat timbul industri baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah atau wilayah.

1.I.A. P E R K E M B A N G A N P D B BERDASARKAN PENGELUARAN

GAMBAR 12. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA



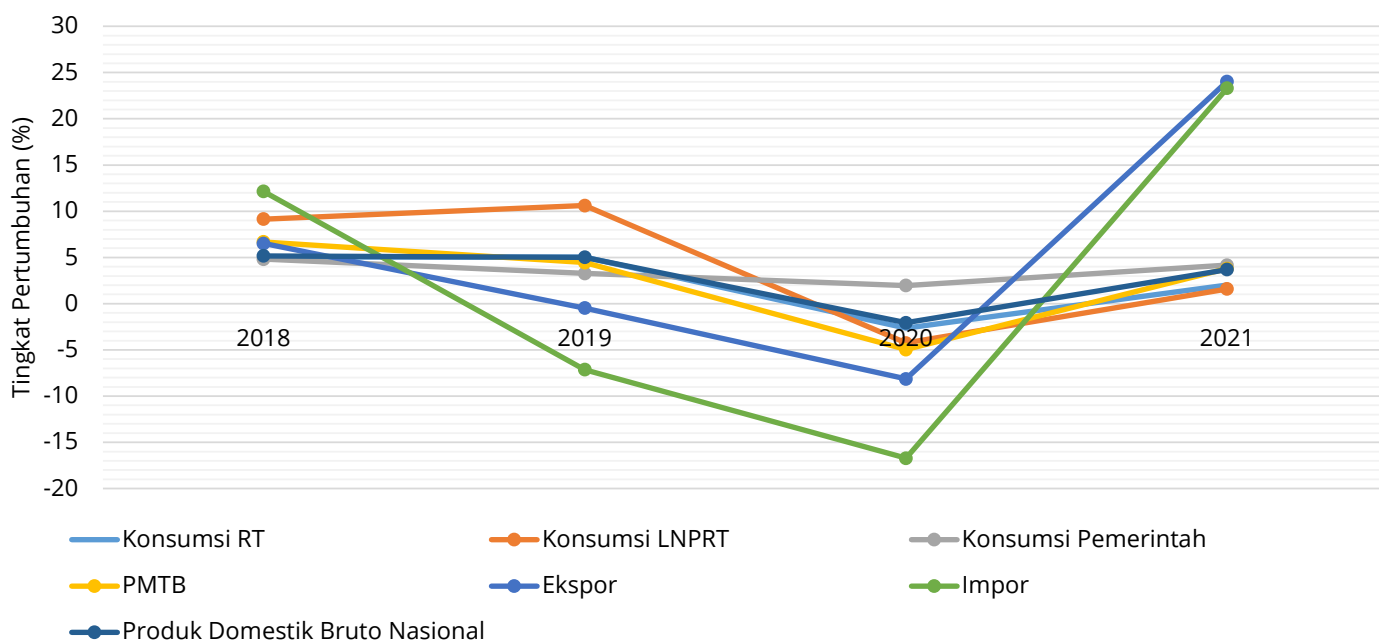
Sumber: Peta Pertumbuhan PDRB per Regional Tahun 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ditopang oleh pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran. Gelombang kasus kedua covid-19 yang terjadi pada awal triwulan III 2021 membuat perlambatan pertumbuhan seluruh komponen pengeluaran. Meskipun begitu, kebijakan pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah mampu untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen pengeluaran terbesar yang memberikan kontribusi terhadap PDB. Tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2021 mencapai 2,02% (y.o.y) setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,63% (y.o.y). Tingkat pertumbuhan tersebut menuju pada level sebelum terjadi pandemi covid-19, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 tumbuh berturut-turut sebesar 5,05% dan 5,04% (y.o.y). Aktivitas investasi dengan komponen pengeluaran berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sempat melambat pada triwulan III 2021, tetapi mampu meningkat pada triwulan IV 2021. Capaian PMTB secara keseluruhan tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,80% (y.o.y) setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,96% (y.o.y). Tingkat pertumbuhan tersebut menuju pada level sebelum terjadi pandemi covid-19, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 tumbuh berturut-turut sebesar 6,68% dan 4,45% (y.o.y). Konsumsi pemerintah tahun 2021 mampu tumbuh relatif tinggi sebesar 4,17% (y.o.y) setelah pada tahun 2020 tumbuh positif sebesar 1,96%. Konsumsi pemerintah merupakan satu-satunya komponen pengeluaran yang tumbuh positif di tahun 2020 dan relatif tumbuh tinggi lagi di tahun 2021 seiring dengan kebijakan countercyclical yang dilakukan pemerintah untuk menopang dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan countercyclical pemerintah di masa pandemi ditujukan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sehingga mampu menggerakkan perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam menopang kinerja ekonomi Indonesia. Dukungan pemerintah dalam mendorong konsumsi masyarakat dilakukan diantaranya melalui program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga masyarakat tersebut dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, pemerintah juga mendukung peningkatan konsumsi masyarakat melalui program bantuan sosial, diskon tarif listrik, dan insentif pajak. Sementara itu, konsumsi pemerintah dilakukan dengan optimalisasi belanja dan spending better. Realisasi belanja modal pemerintah juga relatif mampu mendorong peningkatan komponen investasi. Selain itu, kebijakan belanja negara dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menciptakan nilai tambah ekonomi.

Konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah merupakan komponen pengeluaran tertinggi yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional dan regional. Hampir seluruh komponen pengeluaran di tiap regional mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021, kecuali komponen konsumsi pemerintah di regional Bali & Nusra yang mengalami kontraksi sebesar 1,70% (y.o.y). Komponen konsumsi rumah tangga di seluruh regional dan seluruh provinsi tumbuh secara positif di tahun 2021. Sementara itu, komponen PMTB sebagian besar mengalami pertumbuhan dan terdapat 3 (tiga) provinsi yang mengalami kontraksi. Provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan PMTB di tahun 2021, yaitu provinsi Sumatera Selatan,

GAMBAR 13. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA



Sumber: BPS, diolah

TABEL 1. DISTRIBUSI PDRB TAHUN 2021 DAN TINGKAT PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2018-2021

Regional	Komponen Pengeluaran*)	Distribusi PDRB 2021 (%)	Laju Pertumbuhan				
			2018	2019	2020	2021	Tren
Sumatera	(1) Konsumsi RT	49,74	4,78	4,10	-1,77	2,04	
	(4) PMTB	32,66	5,28	4,80	-1,56	2,52	
	(3) Konsumsi Pemerintah	7,61	4,05	3,97	-5,76	2,39	
Jawa	(1) Konsumsi RT	61,10	5,20	5,10	-1,91	2,46	
	(4) PMTB	30,02	5,01	2,90	-4,52	1,87	
	(3) Konsumsi Pemerintah	8,82	8,54	1,45	4,89	5,41	
Bali & Nusra	(1) Konsumsi RT	60,40	4,03	4,95	-2,89	1,03	
	(4) PMTB	36,49	5,09	2,66	-5,70	2,81	
	(3) Konsumsi Pemerintah	16,10	4,48	4,23	-3,46	-1,70	
Kalimantan	(4) PMTB	30,68	5,53	2,93	-5,98	3,47	
	(1) Konsumsi RT	28,74	4,14	4,15	-0,20	1,33	
	(3) Konsumsi Pemerintah	7,80	4,67	4,75	0,37	2,81	
Sulawesi	(1) Konsumsi RT	47,38	6,01	5,81	-1,38	2,64	
	(4) PMTB	39,90	5,75	3,07	-6,45	3,50	
	(3) Konsumsi Pemerintah	11,26	4,81	4,68	-3,27	2,34	
Maluku&Papua	(1) Konsumsi RT	44,41	5,12	4,19	-3,42	1,77	
	(4) PMTB	33,99	5,87	3,44	-6,11	2,94	
	(3) Konsumsi Pemerintah	22,18	1,76	5,26	-3,62	2,08	

*) Komponen pengeluaran dengan distribusi PDRB terbesar
Sumber : BPS, diolah

Bali, dan Papua Barat dengan capaian berturut-turut sebesar 3,14%, 4,4%, dan 0,8% (y.o.y). Provinsi Bali dan Papua Barat adalah daerah yang mengalami kontraksi pertumbuhan PMTB secara berturut-turut di tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, komponen pengeluaran pemerintah sebagian besar mengalami pertumbuhan dan terdapat 7 (tujuh) provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu provinsi Riau, Kepulauan Riau, Bali, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Selain itu, Bali dan Papua Barat adalah provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan di komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan di tahun 2021.

1.I.B. PERKEMBANGAN PDB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan ekonomi tahunan (y.o.y), pada tahun 2021, hampir seluruh sektor ekonomi di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan positif. Sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan tahun 2021 hanya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan capaian sebesar

0,33% (y.o.y). Selanjutnya, beberapa sektor ekonomi memiliki kinerja positif yang relatif tumbuh tinggi pada triwulan II 2021, tetapi kembali tercatat negatif pada triwulan III 2021. Penyebaran varian Delta Covid-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor yang terdampak cukup dalam atas turunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pada triwulan II 2021, sektor transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh tinggi sebesar 25,10% (y.o.y.) serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 21,58% (y.o.y.). Namun, pada triwulan III 2021, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi menjadi 0,72% (y.o.y.), dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami kontraksi menjadi 0,14% (y.o.y.). Selain itu, sektor jasa pendidikan juga mengalami kontraksi pada triwulan III 2021, dari 5,89% (y.o.y.) menjadi 4,42% (y.o.y.). Sektor industri pengolahan (manufaktur) mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3,68% (y.o.y.) pada triwulan III 2021 dari 6,58% (y.o.y.) pada triwulan II 2021. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksi juga mengalami

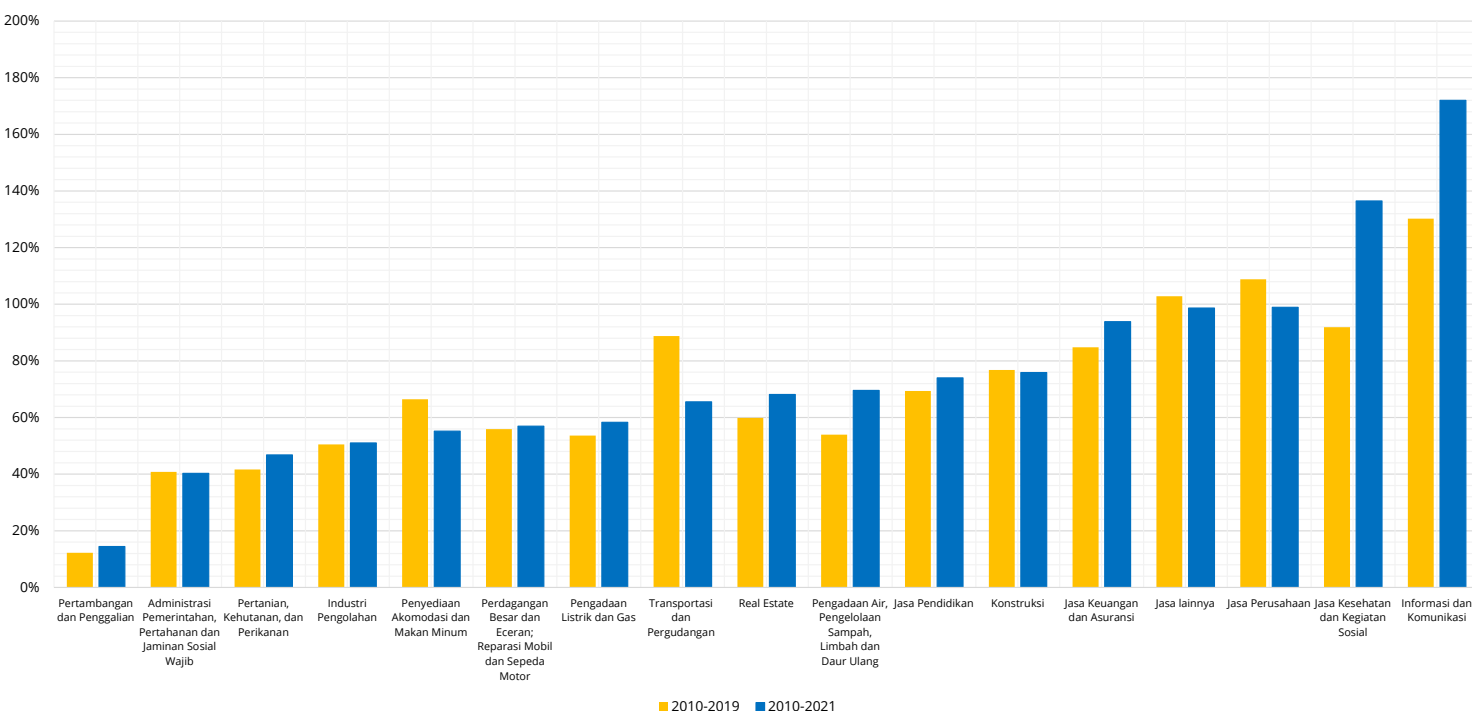
TABEL 2. TINGKAT PERTUMBUHAN DAN DISTRIBUSI PDB INDONESIA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2018 – 2021

PDB Lapangan Usaha	Distribusi PDB ADHB 2021 (%)	Laju Pertumbuhan (%)					Tren
		2018	2019	2020	2021		
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,28	3,9	3,6	1,8	1,8		
2. Pertambangan dan Penggalian	8,98	2,2	1,2	-2,0	4,0		
3. Industri Pengolahan	19,25	4,3	3,8	-2,9	3,4		
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,12	5,5	4,0	-2,3	5,6		
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	5,6	6,8	4,9	5,0		
6. Konstruksi	10,44	6,1	5,8	-3,3	2,8		
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,97	5,0	4,6	-3,8	4,7		
8. Transportasi dan Pergudangan	4,24	7,1	6,4	-15,1	3,2		
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,43	5,7	5,8	-10,3	3,9		
10. Informasi dan Komunikasi	4,41	7,0	9,4	10,6	6,8		
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	4,2	6,6	3,3	1,6		
12. Real Estate	2,76	3,5	5,8	2,3	2,8		
13. Jasa Perusahaan	1,77	8,6	10,3	-5,4	0,7		
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,44	7,0	4,7	-0,0	-0,3		
15. Jasa Pendidikan	3,28	5,4	6,3	2,6	0,1		
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	7,2	8,7	11,6	10,5		
17. Jasa lainnya	1,84	9,0	10,6	-4,1	2,1		

Sumber : BPS, diolah

perlambatan pertumbuhan, secara berturut-turut dari 9,52% (y.o.y.) dan 4,42% (y.o.y.) pada triwulan II 2021 menjadi 5,15% (y.o.y.) dan 3,84% (y.o.y.) pada triwulan III 2021.

Perkembangan pertumbuhan PDB sektor jasa periode tahun 2010-2021 (end to end) lebih tinggi dibandingkan sektor primer dan sekunder. Sektor jasa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

GAMBAR 14. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN PDB SEKTORAL (PERSENTASE END TO END)


Sumber : BPS

dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar terhadap sektor jasa. Peringkat 5 (lima besar) sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2010-2021 (end to end), yaitu Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Perusahaan, Jasa Lainnya, serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Semua sektor tersebut adalah sektor jasa atau sektor tersier. Sementara itu, sektor primer mengalami pertumbuhan relatif rendah dibandingkan sektor lainnya. Sektor primer, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 46,81%, dan sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 14,48%. Selanjutnya, sektor sekunder seperti sektor konstruksi tumbuh sebesar 75,87%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh sebesar 69,60%, sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 58,32%, serta sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 51,04%.

1.II. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI

1.II.A. PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL

Tingkat inflasi nasional yang rendah masih berlanjut di tahun 2021 dengan capaian sebesar 1,87% (y.o.y). Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dari inflasi tahun 2020 sebesar 1,68% (y.o.y) dan berada di bawah target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 2% sampai 4%. Tingkat inflasi tahun 2021 merupakan tingkat inflasi tahunan (y.o.y) tertinggi yang terjadi sejak periode awal pandemi, yaitu inflasi bulan mei 2020 sebesar 2,13% (y.o.y). Meskipun begitu, tingkat inflasi yang masih rendah pada tahun 2021

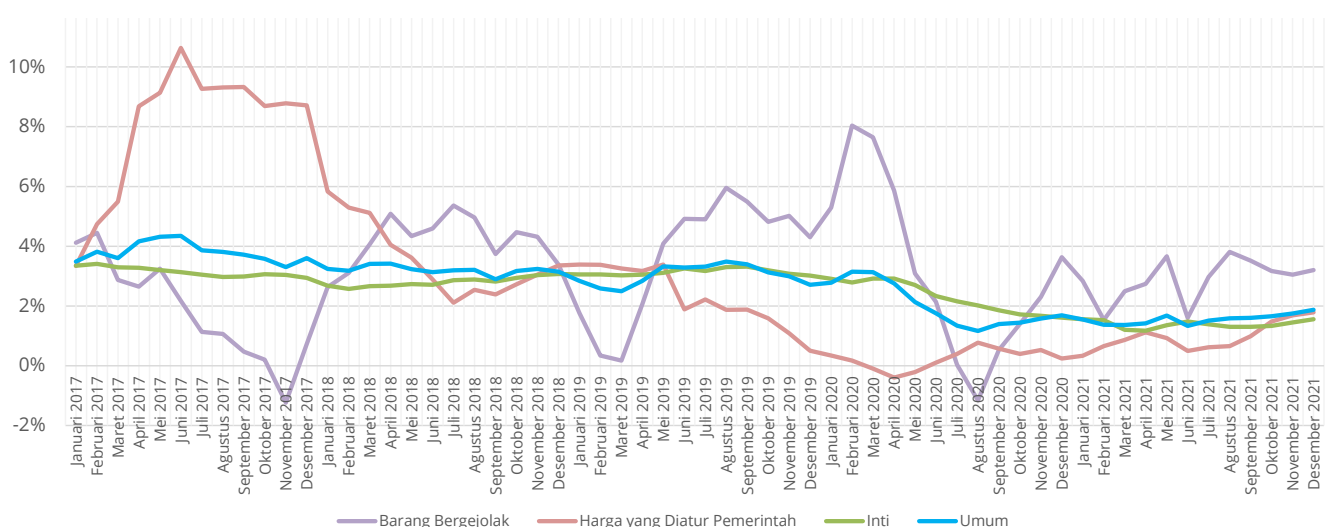
dapat mengindikasikan permintaan domestik masih tertahan dan belum pulih sepenuhnya akibat pandemi covid-19. Peningkatan inflasi di tahun 2021 seiring dengan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat dan pola musiman hari besar keagamaan nasional yang mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa.

Peningkatan inflasi di akhir tahun 2021 didorong oleh komponen inflasi inti, inflasi barang bergejolak, dan inflasi harga yang diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 berada pada tingkat yang rendah sebesar 1,56% (y.o.y). Inflasi inti tahun 2021 lebih rendah dari inflasi inti tahun 2020 sebesar 1,61% (y.o.y). Inflasi inti secara bertahap mulai meningkat sejak periode triwulan IV 2021 seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas akibat gelombang kasus kedua covid-19 yang terjadi di periode triwulan III 2021. Inflasi kelompok barang bergejolak tahun 2021 sebesar 3,20% (y.o.y) lebih rendah dari inflasi barang bergejolak tahun 2020 sebesar 3,63% (y.o.y). Tingkat inflasi kelompok barang bergejolak tahun 2021 tetap terjaga pada tingkat yang rendah seiring dengan pasokan bahan pangan yang memadai meskipun terjadi peningkatan konsumsi di musim liburan. Selanjutnya, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah mengalami peningkatan, yaitu di tahun 2020 sebesar 0,25% (y.o.y) menjadi sebesar 1,79% (y.o.y). Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan permintaan angkutan udara akibat kebijakan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat.

1.II.B. PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL

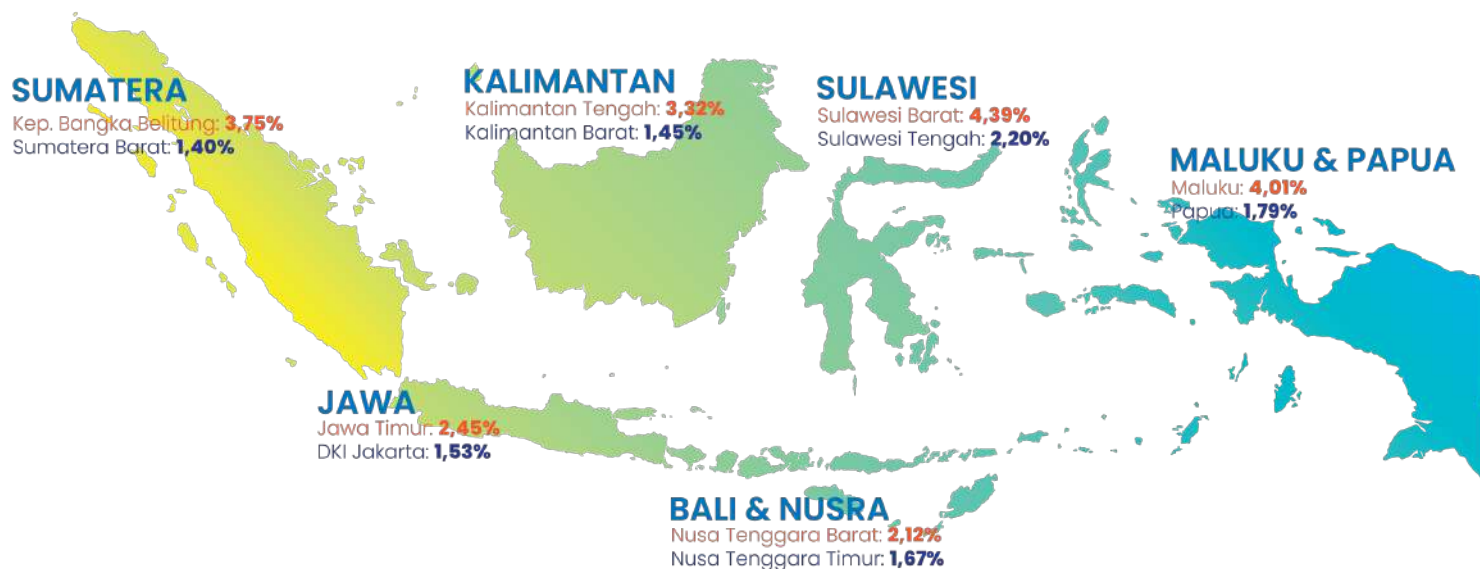
Tingkat inflasi tahun 2021 seluruh provinsi di Indonesia sebagian besar mengalami peningkatan. Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan

GAMBAR 15. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI NASIONAL (Y.O.Y)



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 16. PETA TINGKAT INFLASI TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

Bangka Belitung mengalami tingkat inflasi tertinggi secara nasional, yaitu berturut-turut sebesar 4,39%, 4,01%, dan 3,75% (y.o.y). Angka inflasi Sulawesi Barat berasal dari angka inflasi Mamuju. Angka inflasi Maluku berasal dari angka inflasi Ambon dan Tual yang mencatatkan tingkat inflasi tahun 2021 berturut-turut sebesar 4,05% dan 3,45% (y.o.y). Angka inflasi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari angka inflasi Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan yang mencatatkan tingkat inflasi tahun 2021 berturut-turut sebesar 3,60% dan 4,01% (y.o.y). Selanjutnya, terdapat 8 (delapan) provinsi yang mengalami tingkat inflasi yang lebih rendah di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.

Tingkat inflasi tahun 2021 terendah terjadi di provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta. Tingkat inflasi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 1,40% (y.o.y). Angka inflasi tersebut berasal dari Padang dan Bukittinggi yang mencatatkan tingkat inflasi tahun 2021 berturut-turut sebesar 1,37% dan 1,69% (y.o.y). Tingkat inflasi Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 1,45% (y.o.y). Angka inflasi tersebut berasal dari Pontianak, Sintang, dan Singkawang yang mencatatkan tingkat inflasi tahun 2021 berturut-turut sebesar 1,16%, 1,88%, dan 2,55% (y.o.y). Tingkat inflasi DKI Jakarta tahun 2021 tercatat sebesar 1,53% (y.o.y). Tingkat inflasi yang terjaga tetap rendah tersebut seiring dengan belum pulih sepenuhnya tingkat konsumsi masyarakat akibat pandemi covid-19.

1.III. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA

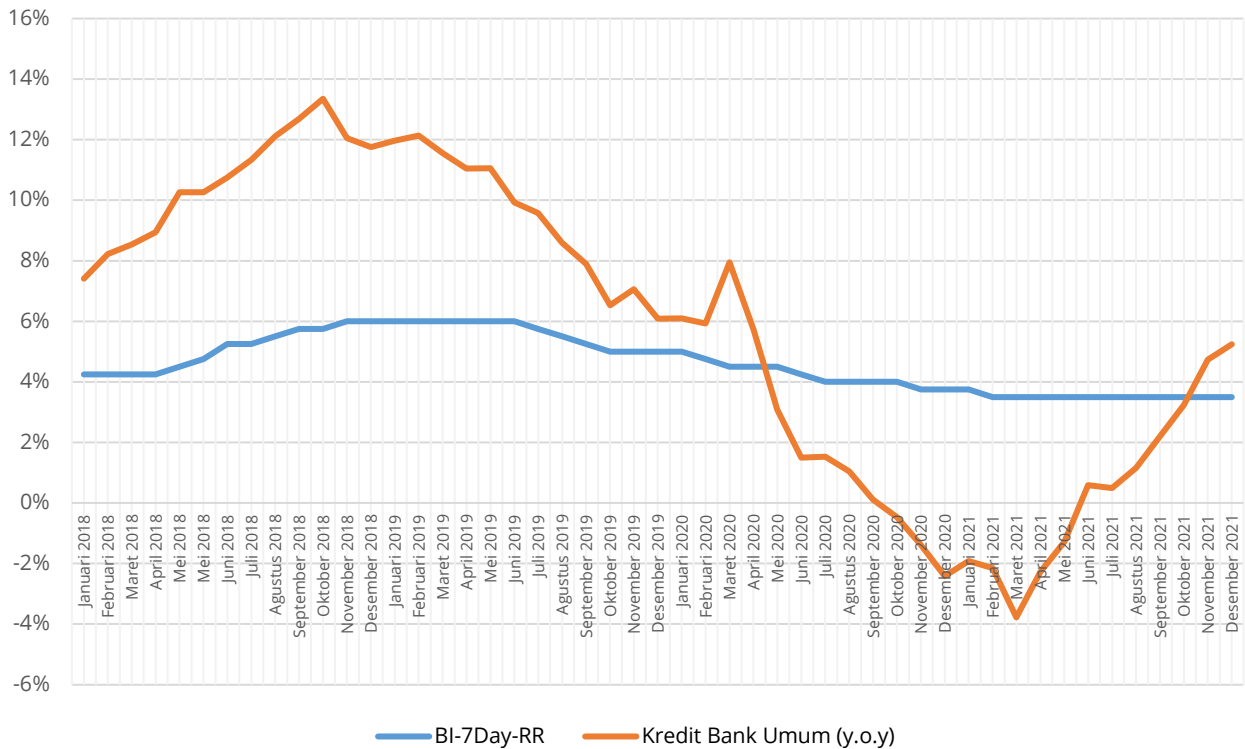
Kebijakan suku bunga rendah dilanjutkan Bank Indonesia di tahun 2021 untuk mendorong proses pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tahun

2021 mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Februari 2021, yaitu turun 25 bps menjadi sebesar 3,50%. Bank Indonesia mempertahankan besaran BI7DRR tersebut sampai akhir periode tahun 2021. Besaran suku bunga tersebut merupakan yang terendah sejak BI7DRR menjadi suku bunga acuan yang menggantikan BI Rate pada bulan Agustus 2016. Penurunan suku bunga acuan dilakukan BI dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19 yang mulai diturunkan mulai bulan Juni 2020 sebesar 25 bps sehingga suku bunga acuan menjadi sebesar 4,25%. Kebijakan suku bunga acuan yang rendah dilakukan untuk mendorong tersedianya kredit terjangkau sehingga momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga. Selain itu, kebijakan suku bunga juga diarahkan Bank Indonesia pada penguatan efektivitas transmisinya pada penurunan suku bunga kredit perbankan.

Perkembangan kredit sepanjang tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan secara bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami tren penurunan. Pertumbuhan kredit bulan Desember 2021 tercatat sebesar 5,24% (y.o.y), lebih baik dibandingkan bulan Desember 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,41% (y.o.y). Pada bulan Juni 2021 pertumbuhan kredit mencatatkan angka positif setelah 8 (delapan) bulan sebelumnya mengalami angka negatif. Tren pertumbuhan kredit terjadi di seluruh kelompok penggunaan kredit, yaitu kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja. Pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus mengalami tren peningkatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi setelah tertahan oleh gelombang kasus kedua covid-19 pada triwulan III 2021.

1.IV. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR

GAMBAR 17. PERKEMBANGAN BI7DRR DAN KREDIT BANK UMUM



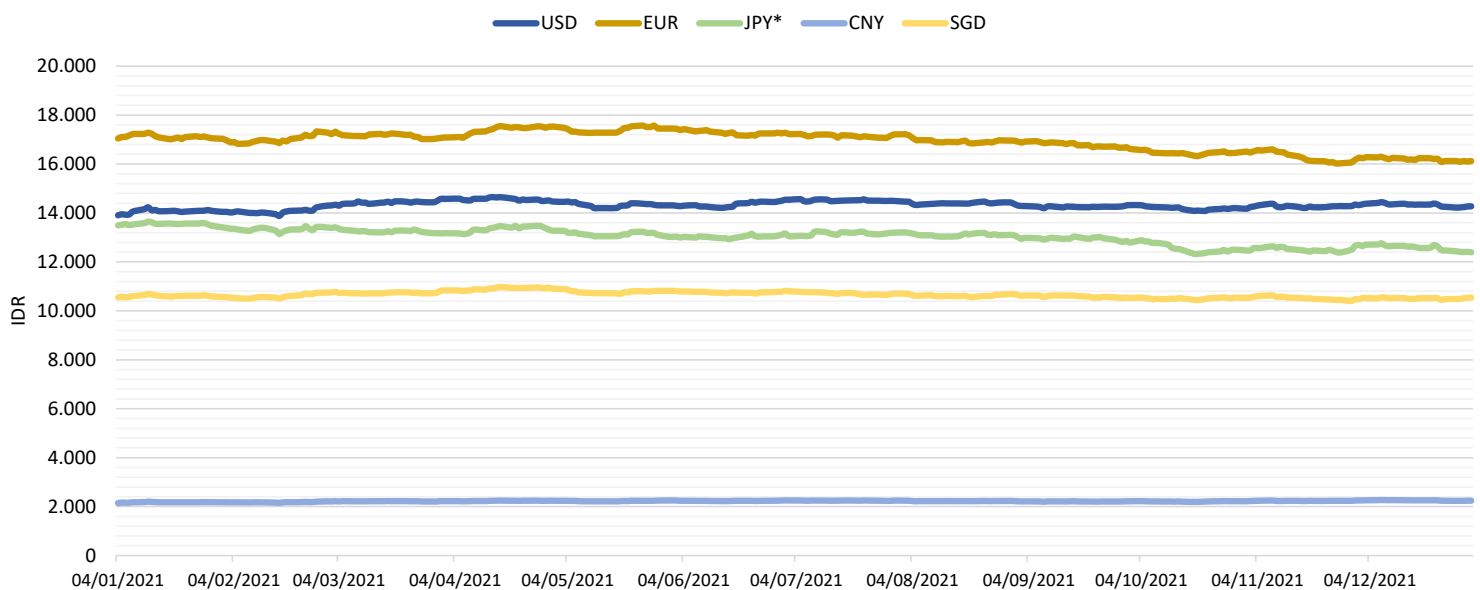
Sumber: BPS, diolah

Nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2021 relatif stabil pada tingkat volatilitas yang relatif rendah. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) diasumsikan sebesar Rp14.600,- dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2021. Di awal tahun 2021, nilai tukar Rupiah dibuka di angka Rp13.903 dan ditutup di angka Rp14.269 per Dolar AS. Sepanjang tahun 2021, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS relatif stabil pada rentang level Rp13.875 sampai Rp14.648 per Dolar AS. Penguatan nilai tukar Rupiah tertinggi terjadi di periode Februari 2021 dan terendah terjadi di periode April 2021. Selanjutnya, perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain relatif

memiliki pola yang sama dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

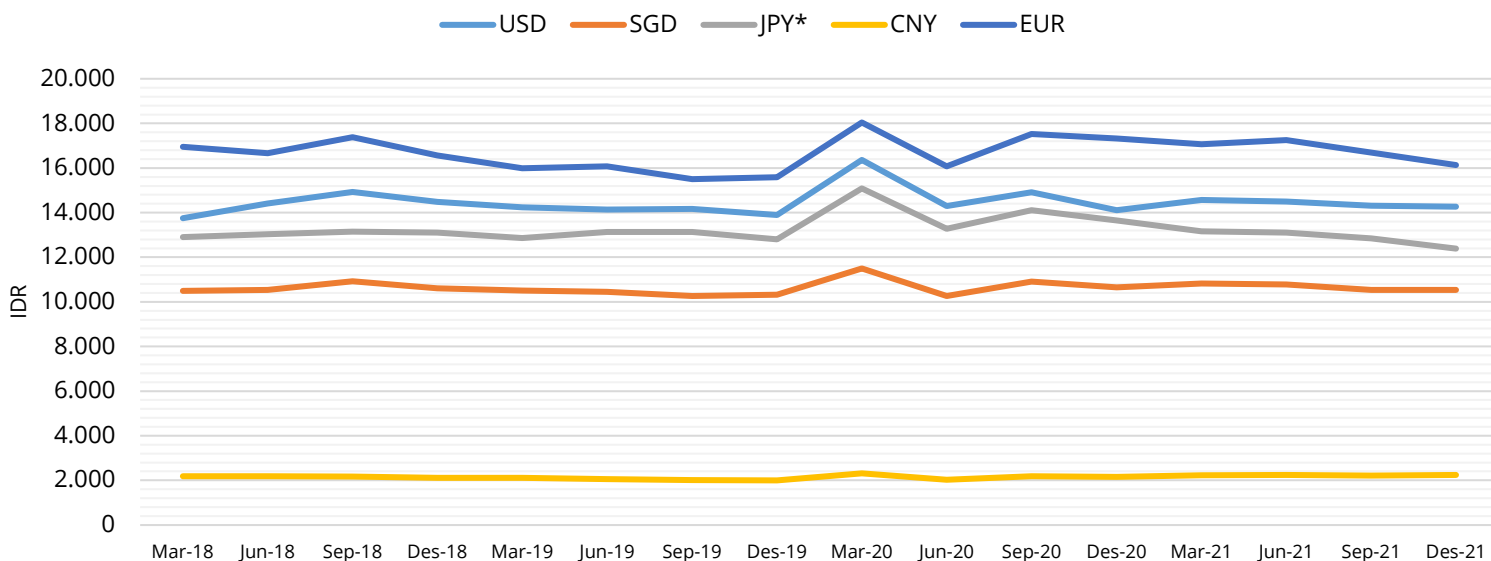
Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi triple intervention di pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar dilakukan BI dengan cadangan devisa yang memadai (first line of defense) dan memperkuat kerjasama internasional (second line of defense). Nilai tukar Rupiah pada tahun

GAMBAR 18. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING PERIODE TAHUN 2021



Sumber: BI, diolah

GAMBAR 19. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING PERIODE 2018 S.D. 2021 (TRIWULANAN)



Sumber: BI, diolah

2021 terjaga relatif stabil seiring dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga baik. Tingkat nilai tukar Rupiah yang relatif stabil juga didorong oleh aliran masuk modal asing yang dapat dikarenakan prospek perekonomian Indonesia yang relatif baik, dan imbal hasil aset keuangan yang relatif menarik.

Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang utama lainnya relatif stabil dan memiliki pola yang relatif sama dengan perkembangan Rupiah terhadap Dolar AS. Nilai tukar Rupiah terhadap Euro pada tahun 2021 dibuka di angka Rp17.038 dan ditutup menguat di angka Rp16.127. Sepanjang tahun 2021, nilai tukar Rupiah terhadap Euro relatif stabil pada rentang level Rp16.015 sampai Rp17.574 per Euro. Nilai tukar Rupiah terhadap Yen pada tahun 2021 dibuka di angka Rp13.496 dan ditutup menguat di angka Rp12.389. Nilai tukar Rupiah terhadap Yen relatif stabil di sepanjang tahun 2021, yaitu pada rentang level Rp12.323 sampai Rp13.647 per Yen. Nilai tukar Rupiah terhadap Yuan pada tahun 2021 dibuka di angka Rp2.141 dan ditutup melemah di angka Rp2.238. Nilai tukar Rupiah terhadap Yuan relatif stabil di sepanjang tahun 2021, yaitu pada rentang level Rp2.141 sampai Rp2.266 per Yuan. Selanjutnya, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Singapura pada tahun 2021 dibuka di angka Rp10.547 dan ditutup menguat di angka Rp10.534. Sepanjang tahun 2021 nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Singapura relatif stabil pada rentang level Rp10.402 sampai Rp10.975 per dolar Singapura. Stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terjaga ditopang kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga dengan baik.

2. INDIKATOR

KESEJAHTERAAN

Highlights 2021:

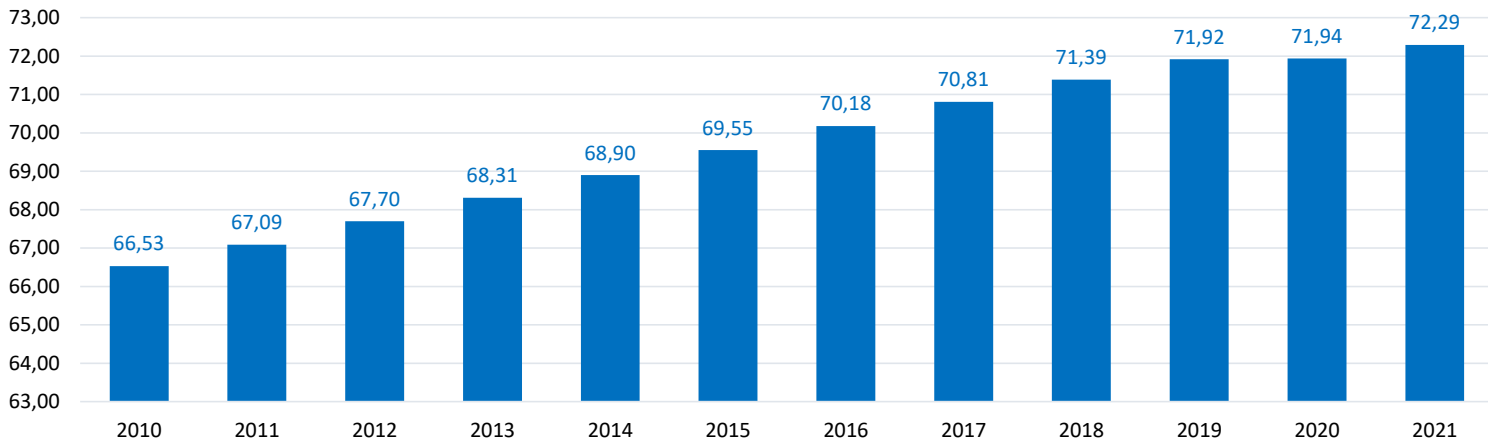
- Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi sebesar 72,29
- Rasio Gini turun menjadi sebesar 0,381
- Jumlah Penduduk Miskin turun menjadi sebesar 26,50 juta orang
- Persentase Penduduk Miskin turun menjadi sebesar 9,71%
- Jumlah Pengangguran turun menjadi sebesar 9,10 juta jiwa
- Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi sebesar 6,49%
- Nilai Tukar Petani naik menjadi sebesar 104,64
- Nilai Tukar Nelayan naik menjadi sebesar 104,69

2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2.I.A. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mengalami peningkatan di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung. IPM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,49% atau sebesar 0,35 poin dari tahun 2020 sebesar 71,94 menjadi 72,29 di tahun 2021. IPM Indonesia sejak tahun 2016 masuk kategori tinggi karena nilainya antara 70 dan 80. Pengeluaran per kapita sebagai salah satu indikator dalam perhitungan IPM mengalami peningkatan

GAMBAR 20. PERKEMBANGAN IPM INDONESIA



Sumber: BPS, diolah

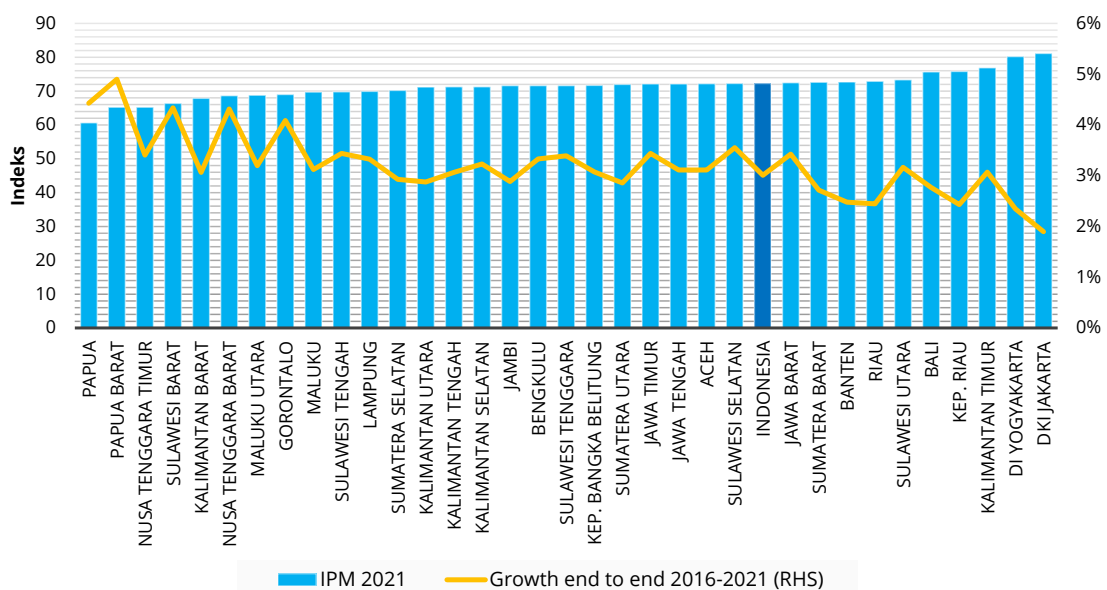
sebesar Rp143 ribu per orang per tahun di tahun 2021 setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp286 ribu per orang per tahun. Peningkatan pengeluaran per kapita tersebut seiring kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Selain itu, insentif usaha dan insentif perpajakan diberikan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mendorong konsumsi masyarakat.

Nilai semua indikator di ketiga dimensi yang diukur dalam penghitungan IPM tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran atau standar hidup layak. Dimensi kesehatan dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami kenaikan 0,14% atau sebesar 0,10 poin dari tahun 2020 sebesar 71,47 menjadi 71,57 di tahun 2021. Artinya, setiap bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki rata-rata peluang hidup sampai usia 71,57 tahun. Dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami kenaikan 0,77% atau sebesar 0,10 poin dari tahun 2020 sebesar 12,98 menjadi 13,08 di tahun 2021.

Artinya, anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki rata-rata peluang bersekolah selama 13,08 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan Diploma I. Dimensi pendidikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan 0,71% atau sebesar 0,06 poin dari tahun 2020 sebesar 8,48 menjadi 8,54 di tahun 2021. Artinya, pada tahun 2021, penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan secara rata-rata selama 8,54 tahun atau setara dengan menamatkan jenjang pendidikan kelas VIII. Dimensi pengeluaran dengan indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan 1,30% atau sebesar Rp143 ribu per orang per tahun dari tahun 2020 sebesar Rp11,01 juta per orang per tahun menjadi Rp11,16 juta per orang per tahun. Artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia selama tahun 2021 adalah sebesar Rp11,16 juta.

Secara spasial, seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM pada tahun 2021 dengan sebagian besar berada pada kategori tinggi dan terdapat 1 (satu) provinsi yang mengalami peningkatan kategori.

GAMBAR 21. PERKEMBANGAN IPM PROVINSI TAHUN 2016-2021 (END TO END)



Sumber: BPS, diolah

Pada tahun 2021, terdapat 11 provinsi yang masuk kategori sedang pada rentang nilai IPM sebesar 60 sampai kurang dari 70. Jika peningkatan IPM terus berlanjut maka pada tahun 2022 terdapat 3 provinsi yang kemungkinan besar akan naik kategori dari kategori sedang menjadi kategori tinggi. Terdapat 21 provinsi yang berada pada kategori IPM tinggi dengan rentang nilai IPM sebesar 70 sampai kurang dari 80. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat 2 provinsi yang berada pada kategori sangat tinggi pada rentang nilai IPM 80 ke atas, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Mulai tahun 2021, provinsi DI Yogyakarta masuk pada kategori sangat tinggi dengan nilai IPM sebesar 80,22 setelah pada tahun 2020 berada pada kategori tinggi dengan nilai IPM sebesar 79,97.

IPM Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan yang terendah, tetapi selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan tertinggi di Indonesia. Peningkatan IPM Provinsi Papua dan Papua Barat selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2021, yaitu berturut-turut sebesar 4,43% dan 4,90% dari 58,05 dan 62,21 pada tahun 2016 menjadi 60,62 dan 65,26 pada tahun 2021. Peningkatan IPM Provinsi Papua ditopang oleh peningkatan pada indikator komponen dimensi pendidikan, yaitu HLS dan RLS. Indikator HLS Provinsi Papua meningkat sebesar 8,60% dari 10,23 tahun pada tahun 2016 menjadi 11,11 tahun pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,88 tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. RLS Provinsi Papua meningkat sebesar 9,92% dari 6,15 tahun pada tahun 2016 menjadi 6,76 tahun pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,61 tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Sementara itu, peningkatan IPM Provinsi Papua Barat ditopang oleh peningkatan pada dimensi pengeluaran dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator pengeluaran per kapita Provinsi Papua Barat meningkat sebesar 10,51% dari Rp7,18 juta per orang per tahun pada tahun 2016 menjadi Rp7,93

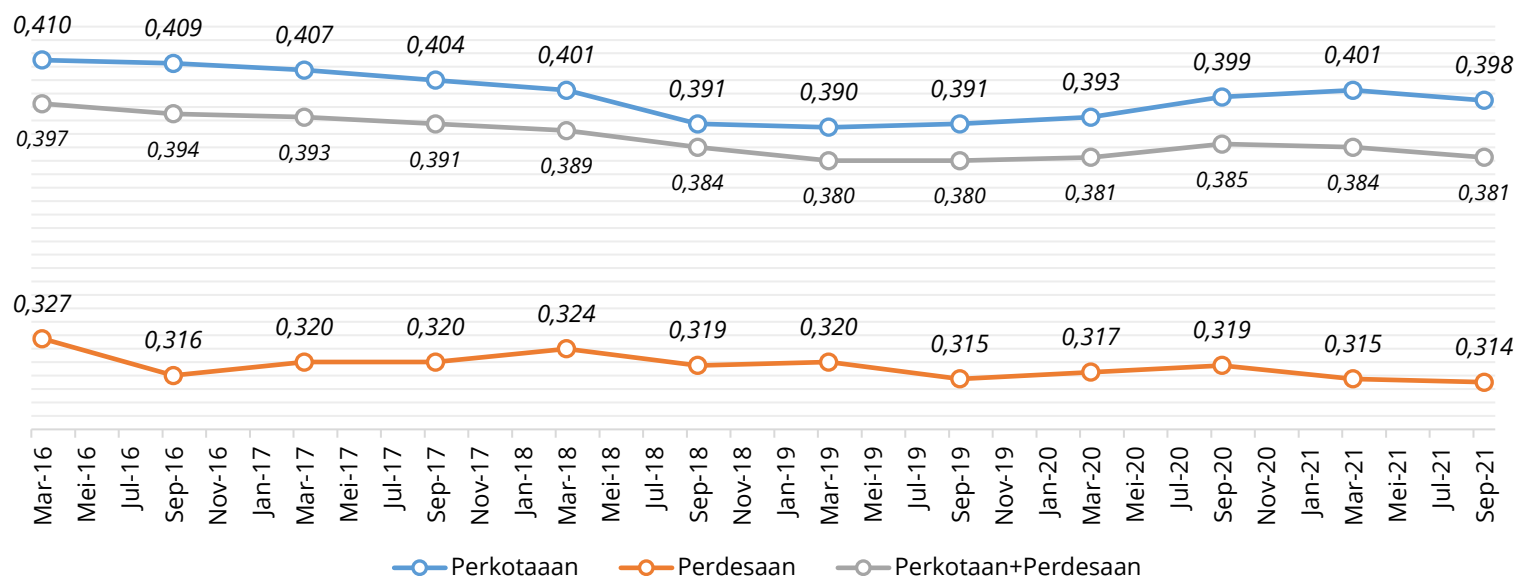
juta per orang per tahun pada tahun 2021 atau meningkat sebesar Rp754 ribu per orang per tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun.

APBN 2021 dirancang tidak hanya untuk mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, tetapi juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Di bidang kesehatan, selain fokus mendukung program penanganan pandemi covid-19, pemerintah juga memperluas akses layanan kesehatan terhadap kelompok miskin, diantaranya dilakukan melalui program reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di bidang pendidikan, pemerintah melakukan perluasan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, diantaranya dilakukan melalui program beasiswa pendidikan (LPDP, Bidik Misi, KIP), Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selanjutnya, di bidang ekonomi, pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat kembali.

2.II. PERKEMBANGAN TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN (RASIO GINI)

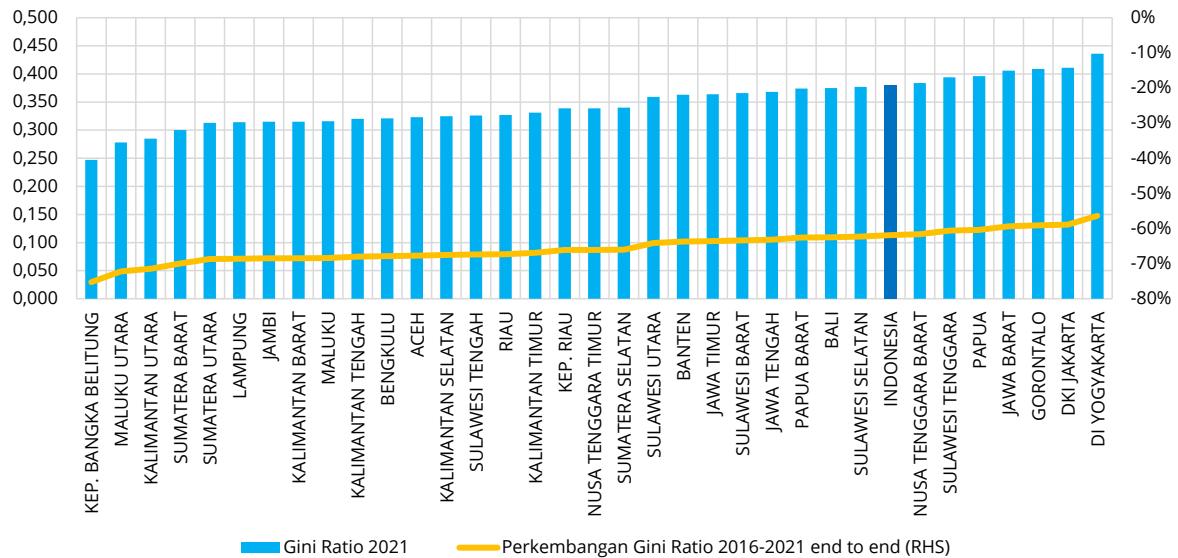
Tren penurunan rasio Gini yang terjadi sebelum pandemi covid-19 mulai menunjukkan penurunan kembali di tahun 2021. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia turun sebesar 0,004 poin dibandingkan rasio Gini September 2020, yaitu dari sebesar 0,385 menjadi sebesar 0,381. Rasio Gini di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Pada September 2021, penurunan rasio Gini terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan dengan penurunan

GAMBAR 22. PERKEMBANGAN GINI RATIO INDONESIA TAHUN 2016-2021



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 23. PERKEMBANGAN GINI RATIO INDONESIA TAHUN 2016-2021



Sumber: BPS

lebih besar terjadi di daerah perdesaan. Rasio Gini di perkotaan pada September 2021 tercatat turun sebesar 0,001 poin dibandingkan rasio Gini di perkotaan September 2020, yaitu dari sebesar 0,399 menjadi 0,398. Selanjutnya, rasio Gini di perdesaan pada September 2021 tercatat turun sebesar 0,005 poin dibandingkan rasio Gini di perdesaan September 2020, yaitu dari sebesar 0,319 menjadi 0,314.

Tingkat ketimpangan pengeluaran di daerah perdesaan tergolong dalam kategori ketimpangan rendah, sementara di daerah perkotaan tergolong dalam kategori ketimpangan sedang. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,97% yang berarti ketimpangan pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori ketimpangan rendah. Berdasarkan daerah, tingkat ketimpangan pengeluaran di daerah perdesaan tercatat sebesar 20,83% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,00% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan sedang.

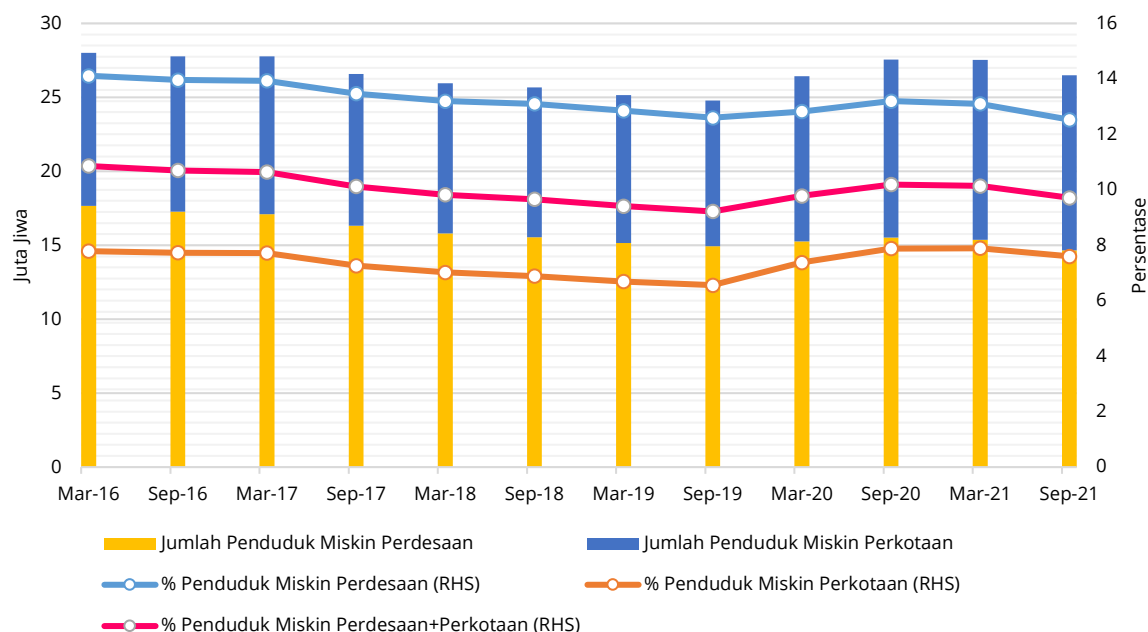
Seluruh provinsi mengalami penurunan rasio Gini selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, sementara perkembangan rasio Gini pada masa pandemi bervariasi di setiap provinsi. Rasio Gini tertinggi pada tahun 2021 tercatat di provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Gorontalo dengan rasio Gini berturut-turut sebesar 0,436, 0,411, dan 0,409. Sementara itu, rasio Gini terendah pada tahun 2021 tercatat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara dengan rasio Gini berturut-turut sebesar 0,247, 0,278, dan 0,285. Selain itu, ketiga provinsi dengan rasio Gini terendah tersebut juga mencatatkan perkembangan penurunan terbesar selama kurun waktu tahun 2016

hingga tahun 2021, yaitu provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 75,30% dari 0,288 menjadi 0,247, provinsi Maluku Utara sebesar 72,20% dari 0,309 menjadi 0,278, dan provinsi Kalimantan Utara sebesar 71,50% dari 0,305 menjadi 0,285. Selanjutnya, pada masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 terdapat 3 provinsi yang terus mengalami peningkatan rasio Gini, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Papua. Rasio Gini provinsi DKI Jakarta meningkat 0,011 poin pada tahun 2020 dan meningkat 0,009 poin pada tahun 2021. Rasio Gini provinsi Jawa Tengah meningkat 0,009 poin pada tahun 2020 dan meningkat 0,001 poin pada tahun 2021. Rasio Gini provinsi Papua meningkat 0,001 poin pada tahun 2020 dan meningkat 0,004 poin pada tahun 2021.

APBN merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan diantaranya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. APBN dirancang untuk mendukung pembangunan tersebut agar tercipta lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, serta agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.III. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan setelah periode tahun 2020 mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya pandemi covid-19. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 adalah sebesar 26,50 juta orang, turun sebesar 1,05 juta orang dibandingkan pada September 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 27,55 juta orang. Kategori penduduk miskin pada September 2021, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata

GAMBAR 24. PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2016-2021


Sumber: BPS, diolah

pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan sebesar Rp486.168,- per kapita per bulan dengan rincian komponen Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007,- (74,05%) dan komponen Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp126.161,- (25,95%). Selanjutnya, persentase penduduk miskin pada September 2021 mengalami penurunan dibandingkan periode September 2020, yaitu dari 10,19% menjadi 9,71%. Penurunan tersebut mengembalikan tingkat kemiskinan pada level satu digit setelah pada periode tahun 2020 berada di atas 10% akibat pandemi covid-19.

Secara spasial, jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan pada September 2021 mengalami penurunan dibandingkan periode September 2020. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan dari sebesar 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi sebesar 11,86 juta orang pada September 2021. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan dari sebesar 15,11 juta orang pada September 2020 menjadi sebesar 14,64 juta orang pada September 2021. Selanjutnya, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan dari sebesar 7,88% pada September 2020 menjadi sebesar 7,60% pada September 2021. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan dari sebesar 13,20% pada September 2020 menjadi sebesar 12,53% pada September 2021.

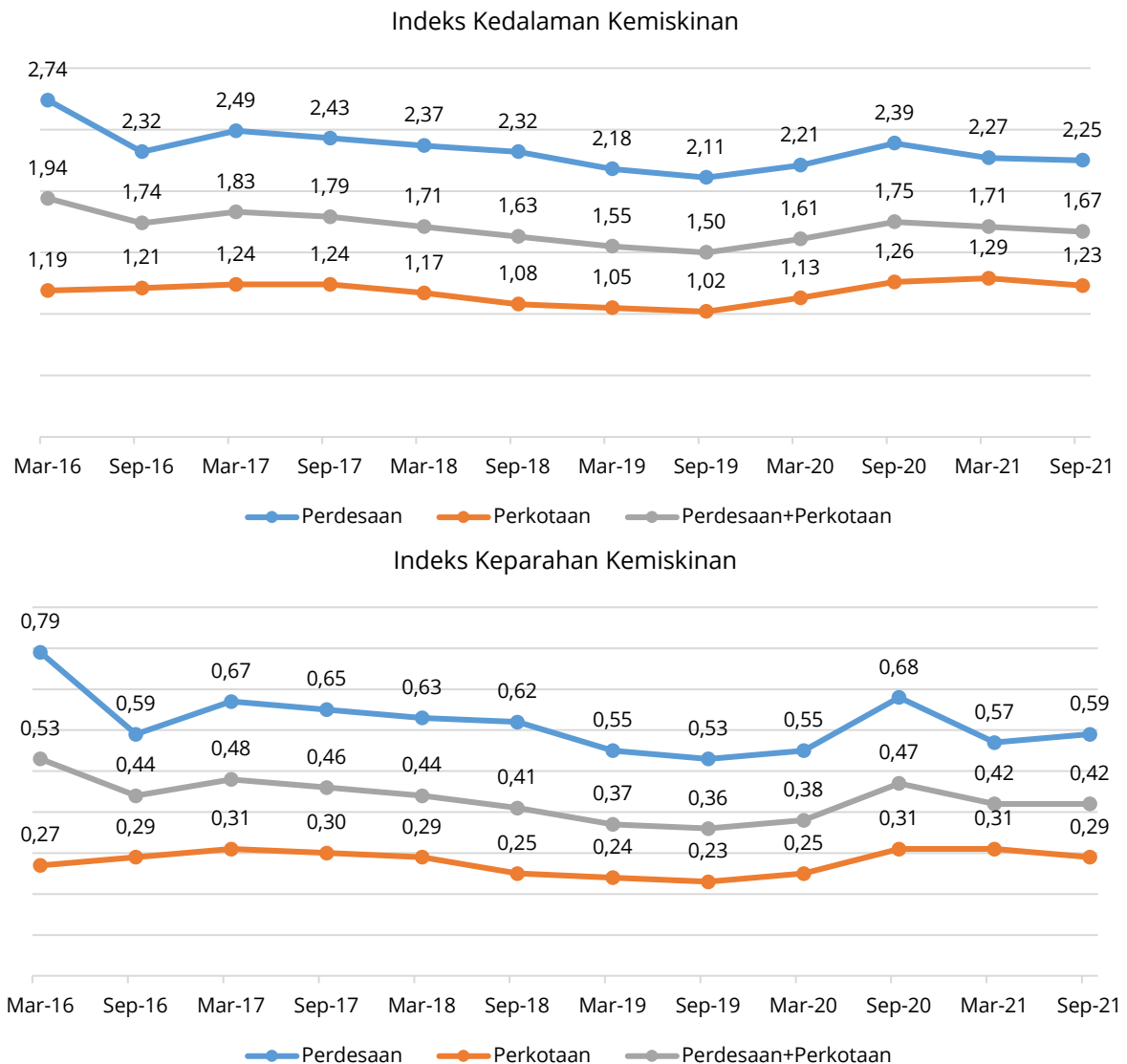
Disparitas kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi, tetapi tingkat kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Jika tren penurunan ini berlanjut

maka disparitas kemiskinan di antara daerah perkotaan dan perdesaan akan makin mengecil. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 1,43% poin selama kurun waktu 2016 hingga 2021. Sementara itu, di daerah perkotaan hanya mengalami penurunan sebesar 0,13% poin selama kurun waktu 2016 hingga 2021.

Pandemi covid-19 memiliki dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kemiskinan di daerah perkotaan dibandingkan di daerah perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan belum kembali pada level sebelum pandemi atau terjadi peningkatan dari sebesar 6,56% pada September 2019 menjadi sebesar 7,60% pada September 2021. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan telah berada pada tren penurunan sebagaimana sebelum pandemi atau terjadi penurunan dari sebesar 12,60% pada September 2019 menjadi sebesar 12,53% pada September 2021.

Selanjutnya, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada September 2021 menunjukkan perbaikan dibandingkan September 2020, tetapi belum berada pada level sebelum pandemi covid-19. Indeks kedalaman kemiskinan mengukur jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengukur ketimpangan pengeluaran antarpenguduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2021 yang sebesar 1,67 mengalami penurunan sebesar -0,08 poin dibandingkan periode September 2020 yang sebesar 1,75, tetapi masih lebih tinggi dari periode September 2019 sebesar 1,50. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, yaitu pada September 2020

GAMBAR 25. PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TAHUN 2016-2021



Sumber: BPS, diolah

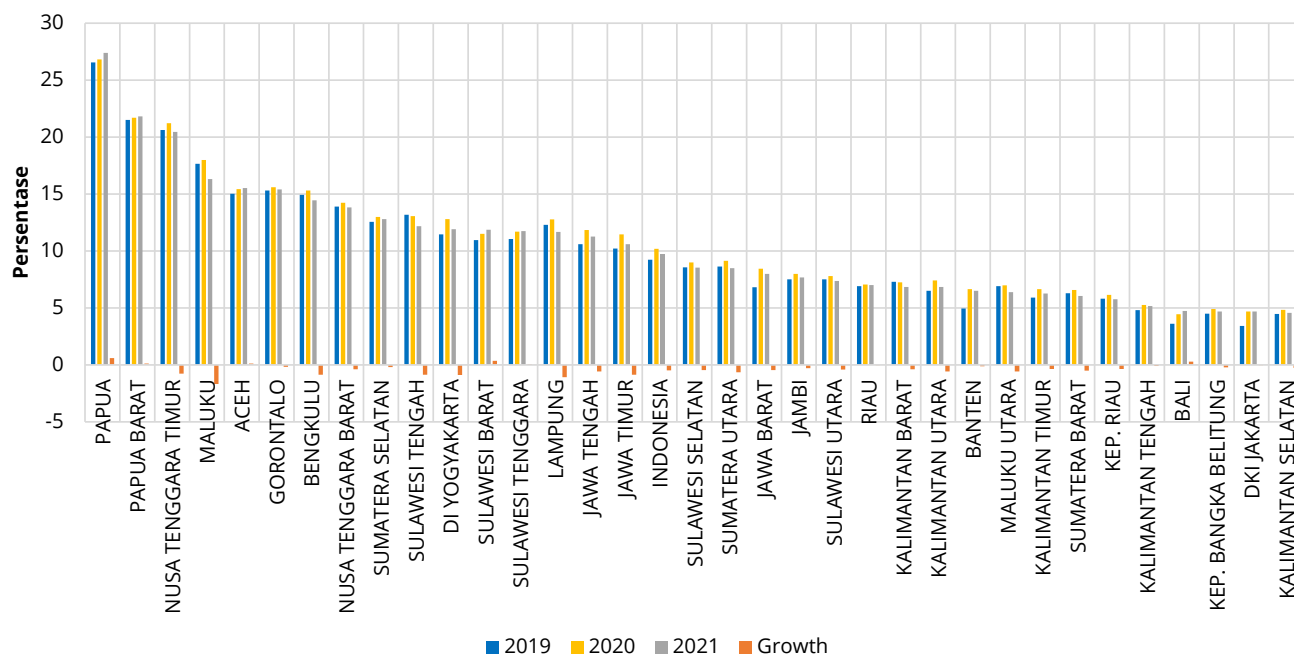
sebesar 0,47 menjadi sebesar 0,42 pada September 2021, tetapi indeks pada September 2021 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan indeks pada periode September 2019 yang sebesar 0,36.

Secara spasial, sebagian besar provinsi di Indonesia pada September 2021 mengalami penurunan persentase penduduk miskin dibandingkan periode September 2020. Sebagian besar provinsi mengalami penurunan persentase kemiskinan yang lebih besar dari penurunan pada tingkat nasional. Provinsi yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Maluku sebesar 1,69% poin, Lampung sebesar 1,09% poin, dan DI Yogyakarta sebesar 0,89% poin. Sementara itu, terdapat provinsi yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin, provinsi dengan peningkatan terbesar, yaitu Papua sebesar 0,58% poin, Sulawesi Barat sebesar 0,35% poin, dan Bali sebesar 0,27% poin. Selain itu, terdapat provinsi yang terus mengalami peningkatan persentase penduduk miskin pada periode tahun 2020 sampai 2021, provinsi tersebut mengalami kenaikan secara berturut-turut,

yaitu Papua meningkat sebesar 0,25% poin dan 0,58% poin, Sulawesi Barat meningkat sebesar 0,55% poin dan 0,35% poin, Bali meningkat sebesar 0,84% poin dan 0,27% poin, Papua Barat meningkat sebesar 0,19% poin dan 0,12% poin, Aceh meningkat sebesar 0,42% poin dan 0,10% poin, serta Sulawesi Tenggara meningkat sebesar 0,65% poin dan 0,05% poin.

Selanjutnya, sebagian besar provinsi di Indonesia pada September 2021 memiliki persentase penduduk miskin di bawah 10% meskipun tidak sedikit provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 10%. Provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi pada September 2021, yaitu Papua sebesar 27,38%, Papua Barat sebesar 21,82%, Nusa Tenggara Timur 20,44%, dan Maluku sebesar 16,30%. Sementara itu, provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah, yaitu Kalimantan Selatan sebesar 4,56%, DKI Jakarta sebesar 4,67%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,67%, dan Bali sebesar 4,72%.

Penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2021

GAMBAR 26. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI PERIODE TAHUN 2019 - 2021


Sumber: BPS, diolah

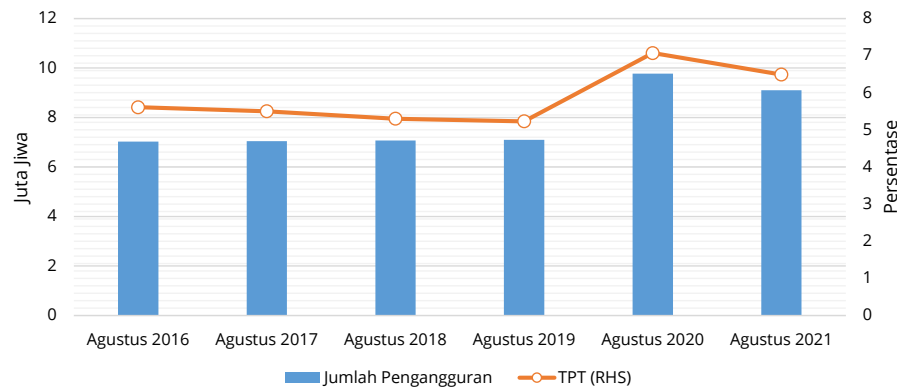
seiring dengan terkendalinya pandemi covid-19 dan terjaganya pemulihan ekonomi nasional. Intervensi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan diantaranya melalui program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga masyarakat tersebut dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, dilakukan penguatan pemulihan ekonomi nasional agar mampu terus membuka lapangan kerja baru dan menurunkan pengangguran yang sempat terkena dampak PHK di masa pandemi.

2.IV. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN

Perkembangan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 mengalami penurunan dan menuju ke tingkat sebelum pandemi covid-19. Jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,67 juta jiwa, yaitu dari 9,77 juta jiwa pada Agustus 2020 menjadi 9,10 juta jiwa pada Agustus 2021. Jumlah pengangguran pada Agustus 2021 masih lebih besar dari sebelum pandemi, yaitu pada Agustus 2019 sebesar 7,10 juta jiwa dan pada Agustus 2021 sebesar 9,10 juta jiwa. Selanjutnya, TPT mengalami penurunan sebesar 0,58% poin, yaitu dari 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 6,49% pada Agustus 2021. Penurunan tersebut juga belum berada pada level sebelum pandemi, yaitu pada Agustus 2019 sebesar 5,23% dan pada Agustus 2021 sebesar 6,49%. Penurunan jumlah pengangguran dan TPT tersebut belum berada pada level sebelum pandemi seiring terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat gelombang kedua kasus covid-19 pada triwulan III 2021.

Penurunan TPT di daerah perkotaan lebih besar dari penurunan TPT di daerah perdesaan, sedangkan penurunan TPT laki-laki lebih besar dari penurunan TPT perempuan. TPT di daerah perkotaan lebih besar dari daerah perdesaan dan TPT dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dari TPT perempuan. Pada Agustus 2021, TPT di daerah perkotaan sebesar 8,32% dan di daerah perdesaan sebesar 4,17%. TPT di perkotaan turun lebih besar dari TPT di perdesaan pada periode tahun 2020 sampai 2021, sementara TPT laki-laki turun lebih besar dari TPT perempuan. TPT di perkotaan turun sebesar 0,66% poin dari 8,98% menjadi 8,32%, sedangkan TPT di perdesaan turun sebesar 0,54% poin dari 4,71% menjadi 4,17%. TPT laki-laki turun sebesar 0,72% poin dari 7,46% menjadi 6,74%, sedangkan TPT perempuan turun sebesar 0,35% poin dari 6,46% menjadi 6,11%.

Jumlah pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, paling besar berasal dari jenjang pendidikan menengah atas (SMU dan SMK). Hampir semua kelompok pendidikan mengalami penurunan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2020 sampai Agustus 2021. Kelompok pendidikan yang tidak atau belum tamat Sekolah Dasar (SD) adalah yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2020 sampai Agustus 2021. Kelompok pendidikan menengah atas (SMU dan SMK) berkontribusi paling besar atas jumlah pengangguran terbuka di Indonesia, yaitu sebesar 4,58 juta jiwa atau 50,36% dari total jumlah pengangguran terbuka. Kelompok pendidikan Universitas mengalami perbaikan kontribusi terhadap jumlah pengangguran. Kelompok tersebut mengalami tren peningkatan sebelum masa pandemi, kemudian peningkatan tersebut makin besar pada mulai masa pandemi tahun 2020, dan mulai turun pada Agustus

GAMBAR 27. PERKEMBANGAN JUMLAH PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PERIODE TAHUN 2016-2021

Sumber: BPS, diolah

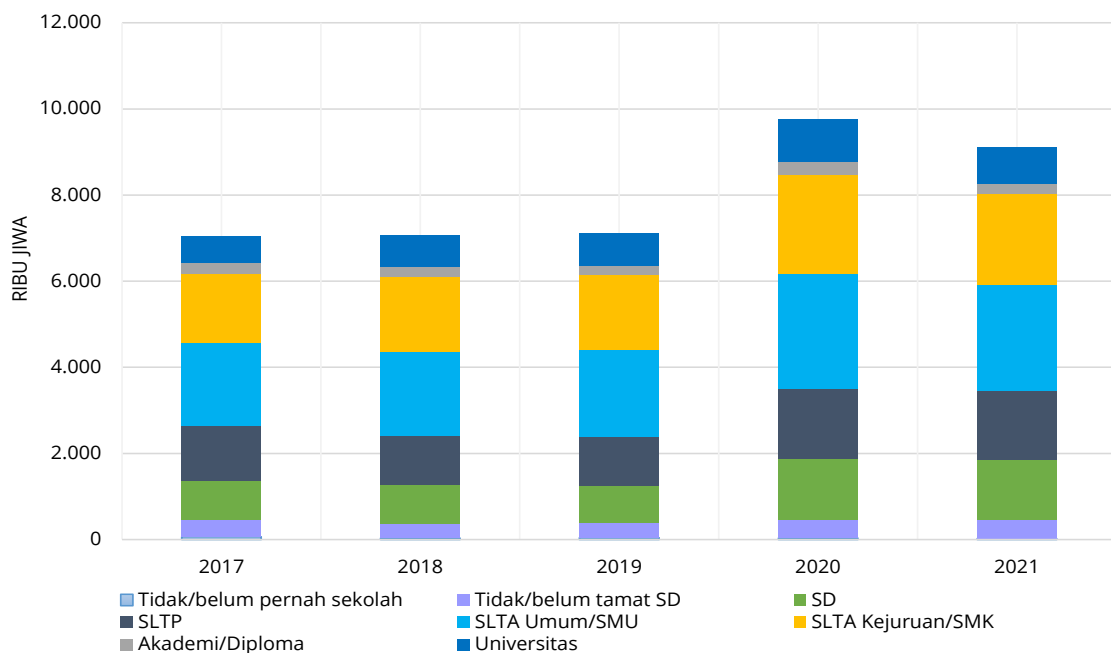
2021. Selain itu, berdasarkan kelompok usia, TPT pada usia muda (15-29 tahun) memiliki kontribusi paling tinggi pada jumlah pengangguran di Indonesia, yaitu sebesar 50,9% dari tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan pada Agustus 2021 setelah mengalami penurunan pada periode Agustus 2020. Penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 2,6 juta orang, yaitu pada Agustus 2020 sebesar 128,45 juta orang menjadi sebesar 131,05 juta orang pada Agustus 2021. Penyerapan tenaga kerja per Agustus 2021 yang terbesar, yaitu industri pengolahan sebesar 1,21 juta orang, perdagangan besar dan eceran - reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,03 juta orang, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,64 juta orang, serta jasa pendidikan sebesar 0,46 juta orang. Sementara itu, terdapat sektor usaha yang terus mengalami penurunan tenaga kerja selama periode tahun 2019 sampai 2021, secara berturut-turut, yaitu pengadaan listrik dan gas turun 60,08 ribu dan 19,03 ribu tenaga kerja, real estat turun 10,24 ribu dan 37,71 ribu tenaga kerja, serta transportasi dan pergudangan turun sebesar 64,37 ribu dan 148,29

ribu tenaga kerja.

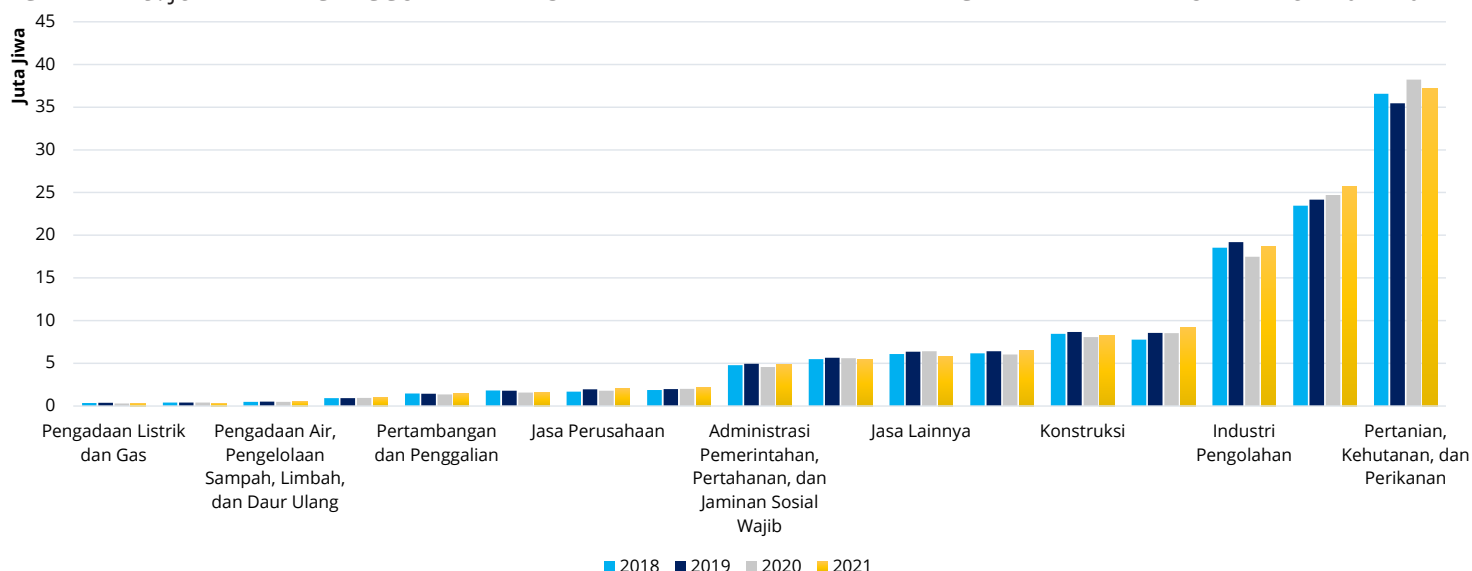
Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan sejalan dengan pembatasan sosial atau pembatasan interaksi fisik akibat pandemi covid-19. Industri pengolahan selain sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja pada Agustus 2021, tetapi juga sebagai sektor yang banyak kehilangan tenaga kerja pada Agustus 2020, yaitu sebesar 1,72 juta tenaga kerja. Tenaga kerja di industri pengolahan kemungkinan besar kesulitan untuk melaksanakan program work from home (WFH) sehingga jika terjadi pembatasan sosial atau pembatasan interaksi fisik maka industri pengolahan tidak dapat melakukan aktivitasnya dan tenaga kerjanya tidak dapat bekerja.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Indonesia dan penyerapan tenaga kerjanya meningkat di masa awal pandemi dan turun ketika pandemi mulai terkendali. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sektor terbesar yang mengalami peningkatan tenaga kerja ketika sebagian besar sektor lainnya mengalami penurunan tenaga kerja. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

GAMBAR 28. JUMLAH PENGANGGURAN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN PERIODE TAHUN 2017-2021

Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 29. JUMLAH PENGANGGURAN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN PERIODE TAHUN 2017-2021



Sumber: BPS, diolah

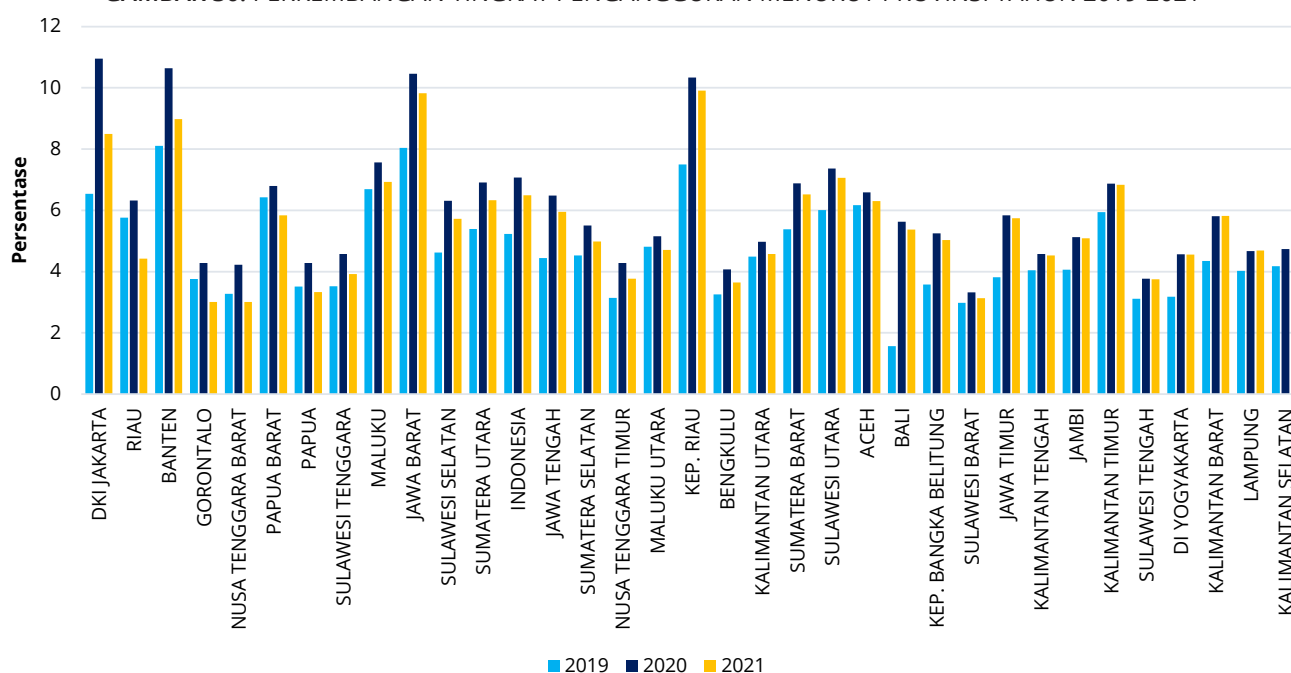
menyerap tenaga kerja sebesar 28,33% dari total tenaga kerja di semua sektor pada Agustus 2021. Peningkatan yang terjadi pada Agustus 2020 adalah sebesar 2,77 juta tenaga kerja, sedangkan penurunan pada Agustus 2021 sebesar 1,09 juta tenaga kerja. Kondisi tersebut kemungkinan menggambarkan bahwa sektor tersebut menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang kehilangan pekerjaan pada sektor lainnya.

Secara spasial, sebagian besar provinsi mengalami penurunan TPT pada Agustus 2021. Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah dengan TPT tertinggi di Indonesia pada Agustus 2021, yaitu sebesar 9,91%, diikuti dengan Jawa Barat sebesar 9,82%, Banten sebesar 8,98%, dan DKI Jakarta sebesar 8,50%. Sementara itu, provinsi Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua menjadi provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terendah pada Agustus 2021,

yaitu berturut-turut sebesar 3,01%, 3,01%, 3,13%, dan 3,33%. Penurunan TPT tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta, Riau, Banten, dan Gorontalo, yaitu berturut-turut sebesar 2,45% poin, 1,90% poin, 1,66% poin, dan 1,27% poin. Selain itu, terdapat provinsi yang mengalami peningkatan TPT terus menerus pada periode 2019 sampai 2021, yaitu provinsi Kalimantan Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, sebagian besar provinsi belum berada pada level tingkat pengangguran sebelum pandemi. Namun, terdapat 6 (enam) provinsi yang mengalami tingkat pengangguran Agustus 2021 lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi pada Agustus 2019. Provinsi tersebut, yaitu Riau, Gorontalo, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Maluku Utara.

APBN 2021 terus bekerja keras untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sehingga mampu untuk membuka lapangan kerja baru dalam rangka

GAMBAR 30. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

menyerap penambahan angkatan kerja baru serta mampu untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di masa pandemi. APBN melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mendukung penguatan sektor ketenagakerjaan melalui berbagai program, diantaranya yaitu program prioritas padat karya dan kartu prakerja. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga terus melakukan kebijakan struktural untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan struktural tersebut, diantaranya yaitu di bidang investasi, perdagangan, dan produktivitas tenaga kerja.

2.V. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP)

2.V.A. PERKEMBANGAN NTP NASIONAL

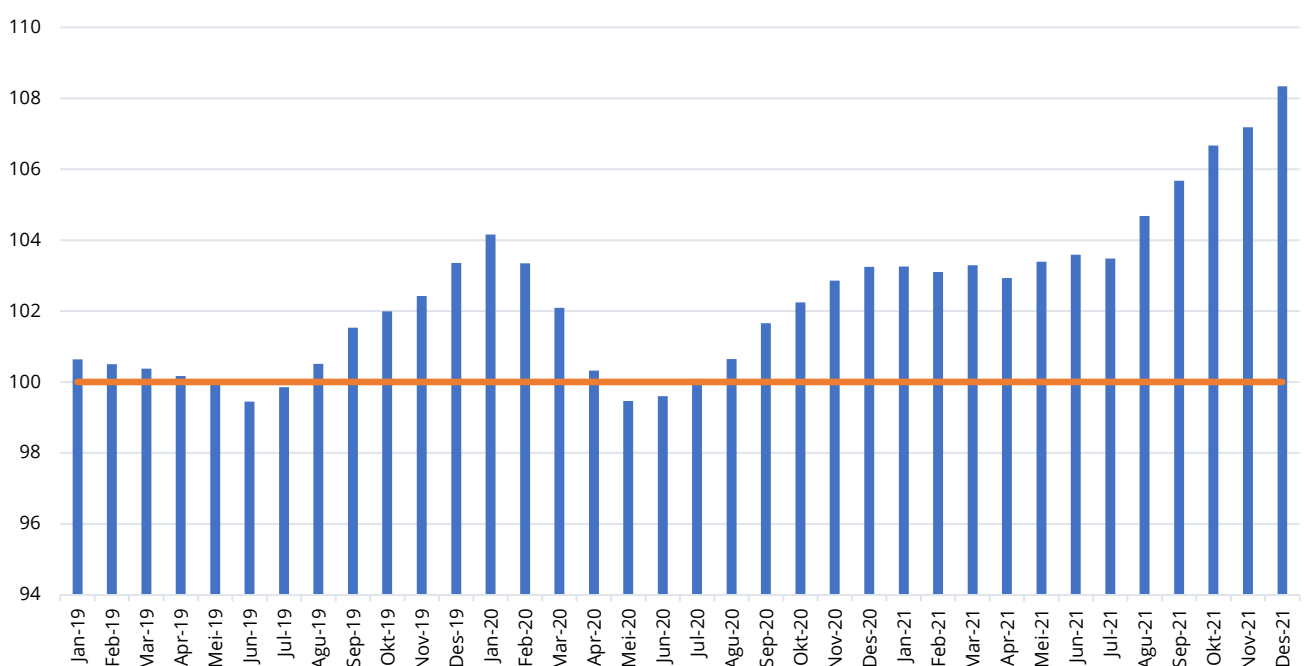
Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tahun 2021 meningkat cukup tinggi dan sepanjang tahun selalu memiliki angka di atas 100 atau petani selalu mengalami surplus. NTP nasional tahun 2021 tercatat sebesar 104,64 lebih besar dari capaian di tahun 2020 sebesar 101,65 dan capaian tahun 2019 sebesar 100,90. Pada sepanjang tahun 2021 atau setiap bulannya capaian NTP selalu memiliki angka di atas 100. NTP yang di atas 100 menggambarkan bahwa petani mengalami surplus, yaitu pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya, jika NTP di bawah 100 maka petani mengalami defisit, yaitu pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum para

petani dapat menikmati surplus pendapatan atas kegiatan produksi yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Capaian NTP tersebut sekaligus memberikan sinyal positif bahwa kesejahteraan para petani mulai meningkat.

Kenaikan NTP nasional tahun 2021 ditopang oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 5,10% lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 2,09%. Penghitungan NTP dilakukan dengan membandingkan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani merupakan indeks harga jual atas hasil produksi petani. Sementara itu, indeks harga yang dibayarkan petani adalah indeks harga barang kebutuhan petani, baik untuk keperluan rumah tangga maupun proses produksi.

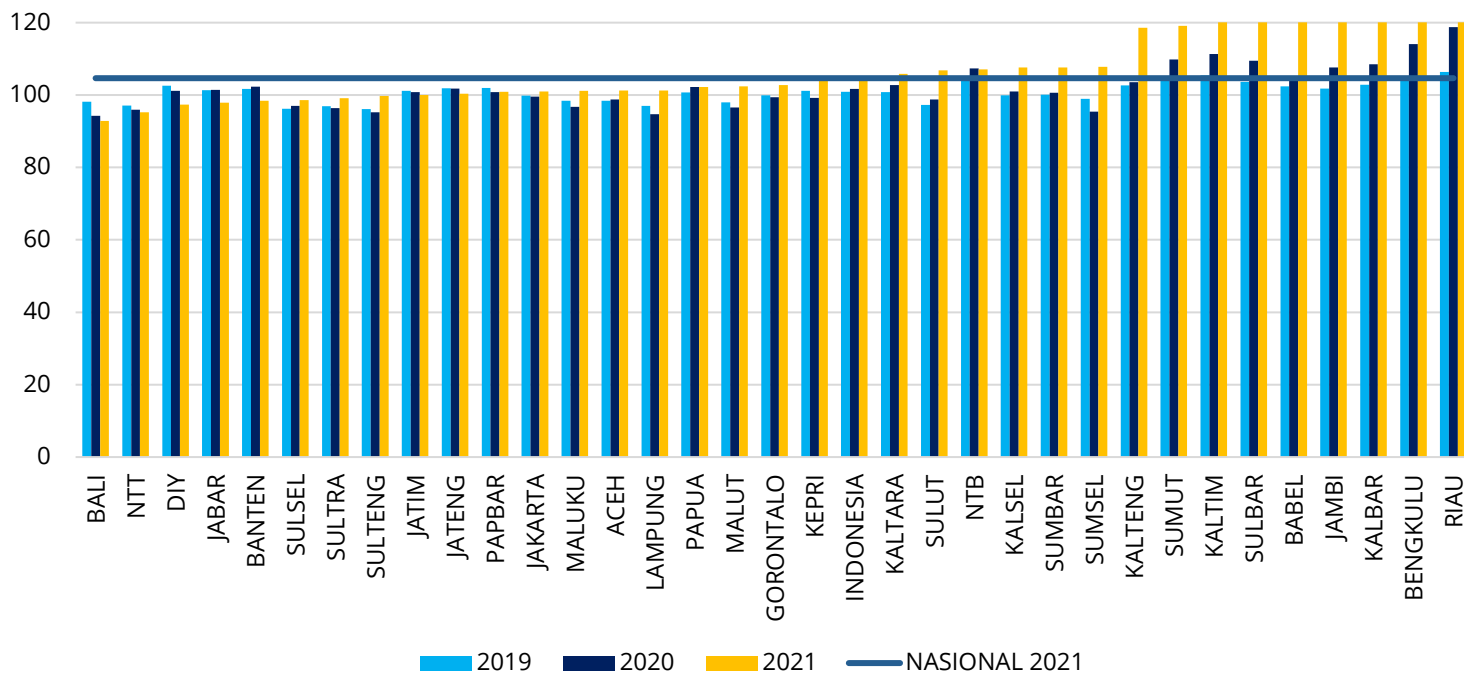
NTP tahun 2021 dipengaruhi oleh komponen pengeluaran Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan yang meningkat paling tinggi. Komponen Upah Buruh merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi (108,96) pada kelompok pengeluaran Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM), sedangkan komponen Sewa dan Pengeluaran Lainnya merupakan pengeluaran dengan indeks terendah (105,36). Sementara itu, komponen Pakaian dan Alas Kaki merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi (110,82) pada kelompok Indeks Konsumsi Rumah tangga, sedangkan komponen Pendidikan merupakan pengeluaran dengan indeks terendah (103,30). Pengeluaran untuk Pupuk, Pestisida, Obat, dan Pakan meningkat paling tinggi dibandingkan komponen lainnya, yaitu meningkat sebesar 3,45%

GAMBAR 31. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI NASIONAL PERIODE TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS

GAMBAR 32. CAPAIAN NTP PROVINSI PERIODE 2019 S.D. 2021



Sumber: BPS, diolah

dari 103,80 pada tahun 2020 menjadi 107,38 pada tahun 2021.

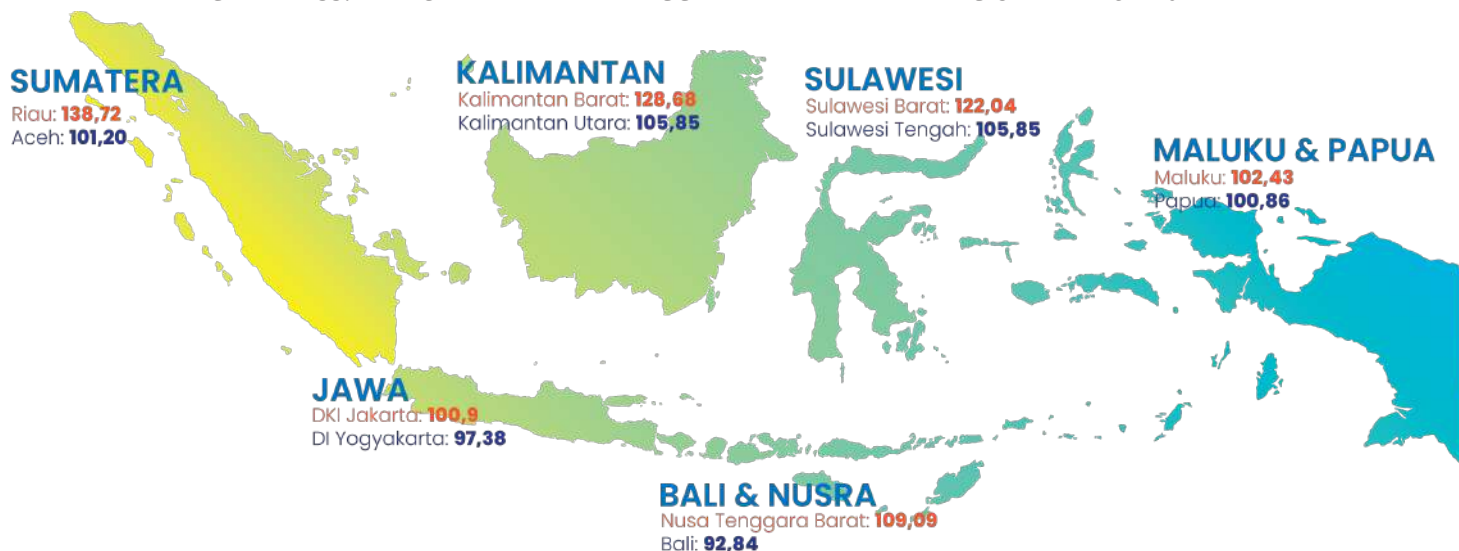
Provinsi Riau merupakan daerah dengan NTP tertinggi di tahun 2021, yaitu sebesar 138,72. Riau menjadi provinsi dengan NTP tertinggi selama tahun 2019 sampai 2021 dengan peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2021 sebesar 16,78% dibandingkan peningkatan di tahun 2020 sebesar 11,66%. Sementara itu, Bali merupakan daerah dengan NTP terendah di tahun 2021 dengan capaian di bawah angka 100, yaitu sebesar 92,84. Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat 8 (delapan) provinsi yang memiliki angka NTP di bawah 100, berturut-turut dari yang terendah, yaitu Bali (92,84), Nusa Tenggara Timur (95,22), DI

Yogyakarta (97,38), Jawa Barat (97,84), Banten (98,44), Sulawesi Selatan (98,55), Sulawesi Tenggara (99,16), dan Sulawesi Tengah (99,72).

2.V.B. PERKEMBANGAN NTP REGIONAL

Capaian NTP di setiap regional pada tahun 2021 cukup bervariasi dengan sebagian besar daerah mengalami peningkatan. Regional Sumatera, Kalimantan, dan Maluku & Papua mencatatkan NTP dengan angka di atas 100 untuk semua provinsi di setiap regionalnya. NTP tahun 2021 secara rata-rata di regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku & Papua mengalami peningkatan dibandingkan dengan

GAMBAR 33. PETA CAPAIAN NTP TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

capaian NTP periode tahun 2020. Sementara itu, regional Jawa dan Bali & Nusa Tenggara mengalami capaian yang menurun. Selain itu, disparitas capaian NTP di regional Sumatera merupakan yang tertinggi pada tahun 2021, yaitu NTP Riau sebesar 138,72 dan NTP Aceh sebesar 101,20.

NTP regional Sumatera secara rata-rata memiliki angka tertinggi pada tahun 2021, sedangkan NTN regional Bali & Nusa Tenggara secara rata-rata memiliki angka terendah. NTP dengan angka tertinggi dan terendah di tingkat nasional pada tahun 2021 dicapai oleh provinsi yang sama seperti tahun 2020, tetapi di tingkat regional pada umumnya dicapai oleh provinsi yang berbeda. NTP Provinsi Riau sebesar 138,72 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Sumatera, sedangkan NTP Provinsi Aceh sebesar 101,20 merupakan yang terendah. NTP Provinsi DKI Jakarta sebesar 100,97 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Jawa, sedangkan NTP Provinsi DI Yogyakarta sebesar 97,38 merupakan yang terendah. NTP Provinsi Kalimantan Barat sebesar 128,68 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Kalimantan, sedangkan NTP Provinsi Kalimantan Utara sebesar 105,85 merupakan yang terendah. NTP Provinsi Sulawesi Barat sebesar 122,04 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Sulawesi, sedangkan NTP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 98,55 merupakan yang terendah. NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 107,09 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Bali & Nusa Tenggara, sedangkan NTP Provinsi Bali sebesar 92,84 merupakan yang terendah. NTP Provinsi Maluku Utara sebesar 102,43 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Maluku & Papua, sedangkan NTP Provinsi Papua barat sebesar 100,86 merupakan yang terendah.

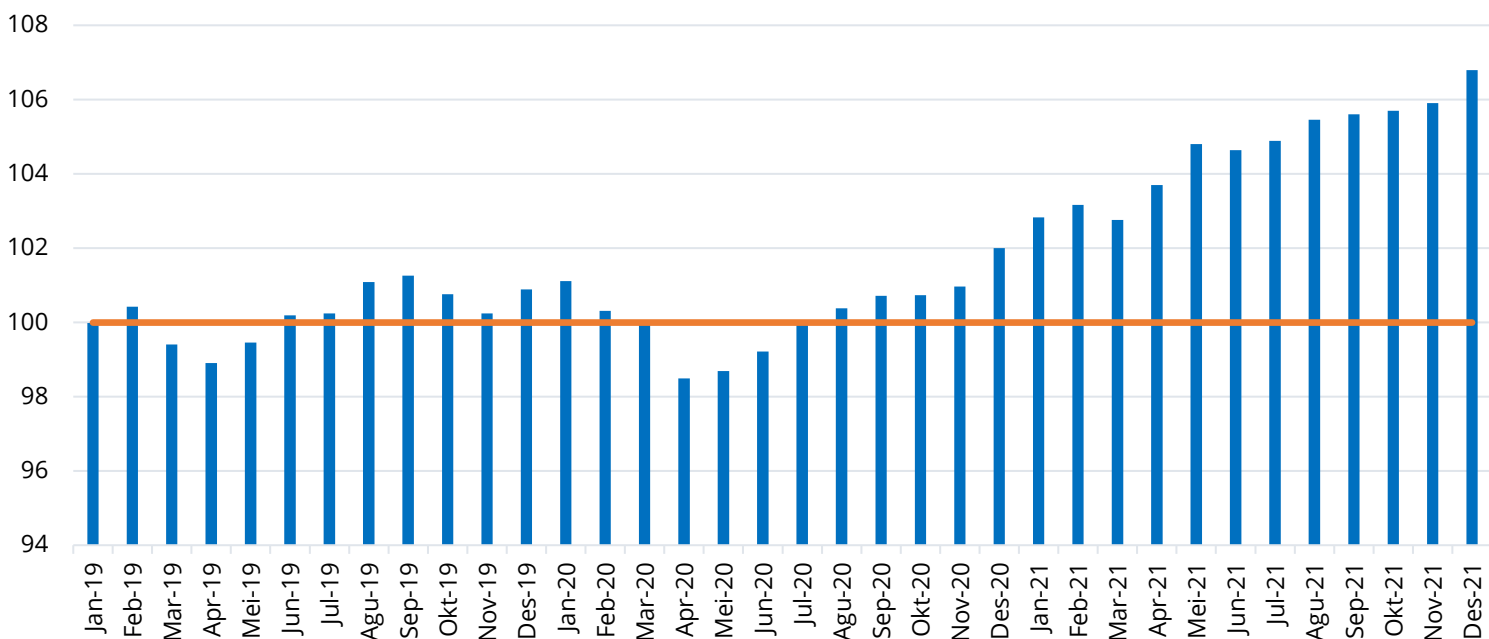
2.VI. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)

2.VI.A. PERKEMBANGAN NTN NASIONAL

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional tahun 2021 meningkat cukup tinggi dan sepanjang tahun selalu memiliki angka di atas 100 atau nelayan mengalami surplus. NTN nasional tahun 2021 tercatat sebesar 104,69 lebih besar dari capaian di tahun 2020 sebesar 100,22 dan capaian tahun 2019 sebesar 100,23. Pada sepanjang tahun 2021 atau setiap bulannya capaian NTN selalu memiliki angka di atas 100. NTN yang di atas 100 menggambarkan bahwa nelayan mengalami surplus, yaitu pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya, jika NTN di bawah 100 maka nelayan mengalami defisit, yaitu pendapatan nelayan turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum para nelayan dapat menikmati surplus pendapatan atas kegiatan produksi yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Capaian NTN tersebut sekaligus memberikan sinyal positif bahwa kesejahteraan para nelayan mulai meningkat.

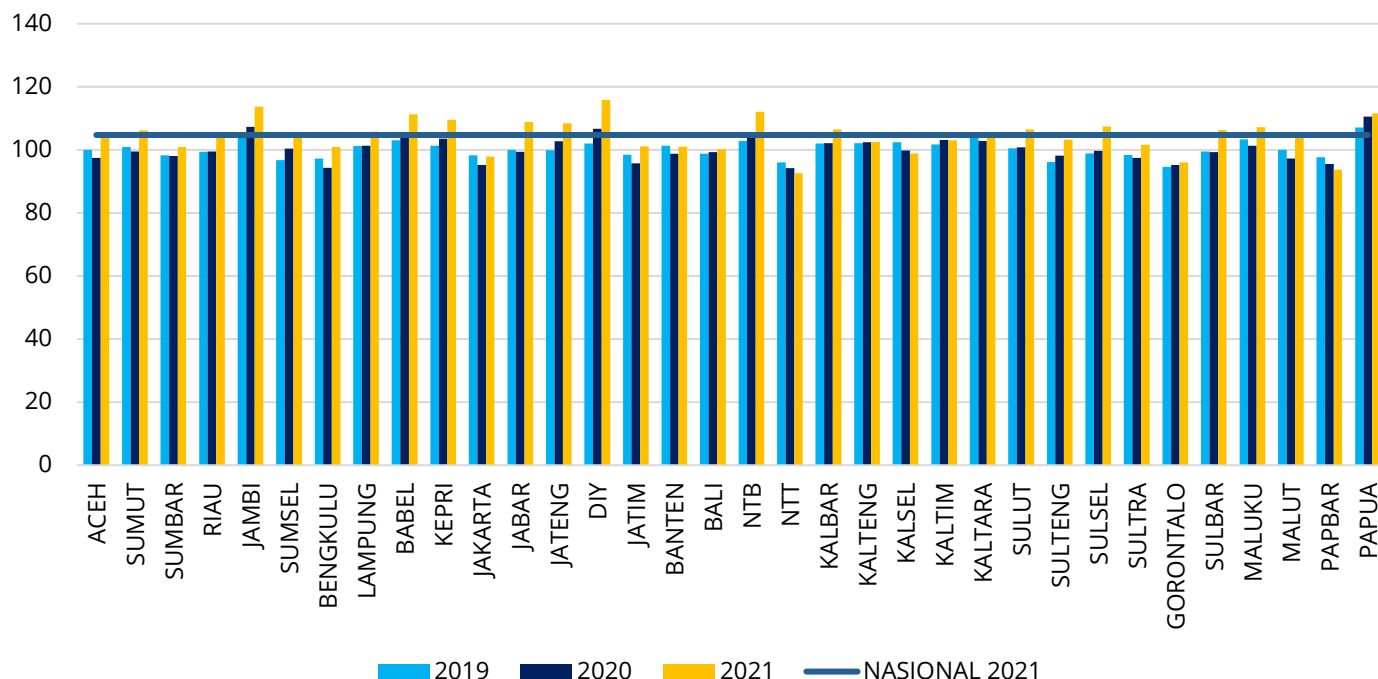
Kenaikan NTN nasional tahun 2021 ditopang oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 5,94% lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) sebesar 1,42%. Penghitungan NTN dilakukan dengan membandingkan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan (Ib). Indeks harga yang diterima nelayan merupakan indeks harga jual atas hasil produksi nelayan. Sementara itu, indeks harga yang dibayarkan nelayan adalah indeks harga barang kebutuhan nelayan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun

GAMBAR 34. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN NASIONAL PERIODE TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 35. CAPAIAN NTN PROVINSI PERIODE 2019 S.D. 2021



Sumber: BPS, diolah

proses produksi.

NTN tahun 2021 dipengaruhi oleh komponen penerimaan Penangkapan Laut dan komponen pengeluaran Pakaian dan Alas Kaki yang meningkat paling tinggi. Komponen penerimaan Penangkapan Laut memiliki indeks tertinggi pada kelompok penerimaan, yaitu sebesar 111,33 dan meningkat sebesar 6,13% dari periode tahun 2020. Komponen Sewa dan Pengeluaran Lainnya merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi (105,69) pada kelompok pengeluaran Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM), sedangkan komponen Transportasi dan Komunikasi merupakan pengeluaran dengan indeks terendah (103,26). Sementara itu, komponen Pakaian dan Alas Kaki merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi (109,47) pada kelompok Indeks Konsumsi Rumah tangga, sedangkan komponen Pendidikan merupakan pengeluaran dengan indeks terendah (102,32). Pengeluaran untuk Pakaian dan Alas Kaki meningkat paling tinggi dibandingkan komponen pengeluaran lainnya, yaitu meningkat sebesar 2,22% dari 107,09 pada tahun 2020 menjadi 109,47 pada tahun 2021.

Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah dengan NTN tertinggi di tahun 2021, yaitu sebesar 115,83. Peningkatan NTN DI Yogyakarta, yaitu sebesar 8,60% dari sebesar 106,66 pada tahun 2020. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan NTN terendah di tahun 2021 dengan capaian di bawah angka 100, yaitu sebesar 92,55. Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) provinsi yang memiliki angka NTN di bawah 100, berturut-turut dari yang terendah, yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 92,55,

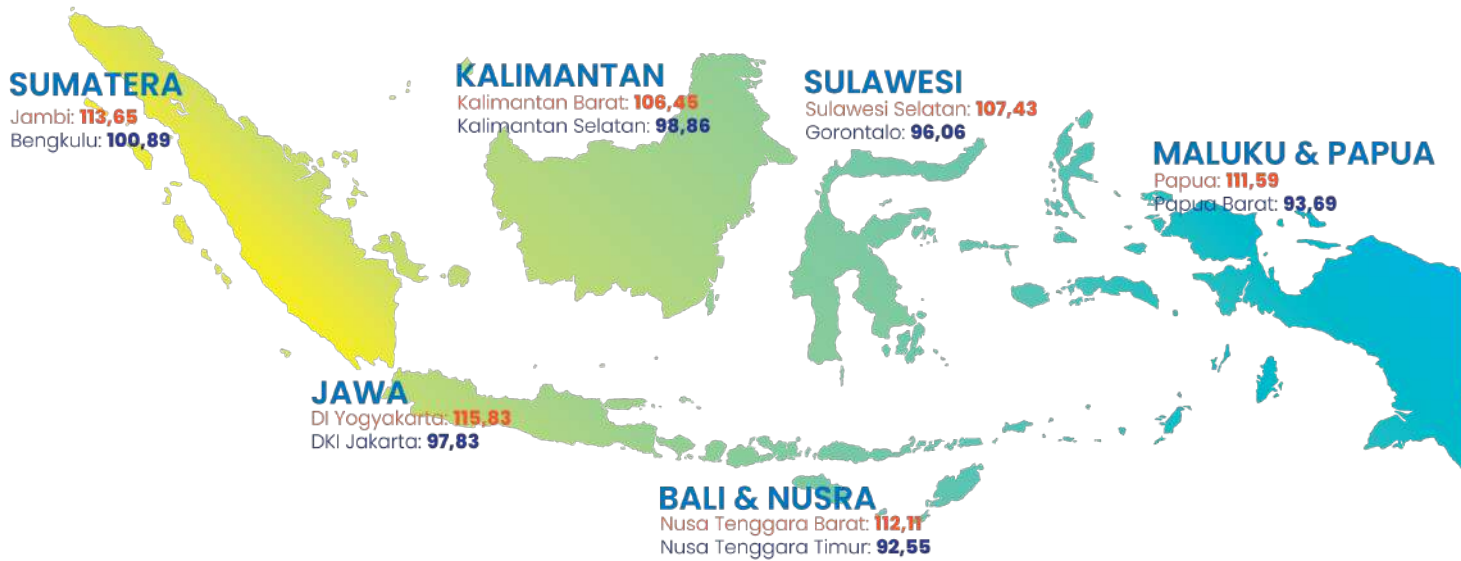
Papua Barat sebesar 93,69, Gorontalo sebesar 96,06, DKI Jakarta sebesar 97,83, dan Kalimantan Selatan sebesar 98,86.

2.VI.B. PERKEMBANGAN NTN REGIONAL

Capaian NTN di setiap regional pada tahun 2021 cukup bervariasi dengan sebagian daerah mengalami peningkatan dan sebagian lainnya mengalami penurunan. Regional Sumatera adalah satu-satunya wilayah yang mencatatkan angka NTN di atas 100 untuk semua provinsinya. NTN tahun 2021 secara rata-rata di regional Sumatera, Sulawesi, dan Bali & Nusa Tenggara mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian NTN periode tahun 2020. Sementara itu, regional Jawa, Kalimantan, dan Maluku & Papua mengalami capaian NTN yang menurun. Selain itu, disparitas capaian NTN di regional Bali & Nusa Tenggara merupakan yang tertinggi pada tahun 2021, yaitu NTN Nusa Tenggara Barat sebesar 112,11 dan NTN Nusa Tenggara Timur sebesar 92,55.

NTN regional Sumatera secara rata-rata memiliki angka tertinggi pada tahun 2021, sedangkan NTN regional Bali & Nusa Tenggara secara rata-rata memiliki angka terendah. NTN Provinsi Jambi sebesar 113,65 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Sumatera, sedangkan NTN Provinsi Bengkulu sebesar 100,89 merupakan yang terendah. NTN Provinsi DI Yogyakarta sebesar 115,83 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Jawa, sedangkan NTN Provinsi DKI Jakarta sebesar 97,83 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Kalimantan Barat sebesar 106,45 merupakan NTN dengan angka tertinggi

GAMBAR 36. PETA CAPAIAN NTP TERTINGGI DAN TERENDAH PER REGIONAL TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

di regional Kalimantan, sedangkan NTN Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 98,86 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 107,43 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Sulawesi, sedangkan NTN Provinsi Gorontalo sebesar 96,06 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 112,11 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Bali & Nusa Tenggara, sedangkan NTN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 92,55 merupakan yang terendah. NTN Provinsi Papua sebesar 111,59 merupakan NTN dengan angka tertinggi di regional Maluku & Papua, sedangkan NTN Provinsi Papua barat sebesar 93,69 merupakan yang terendah.



BAB II PERKEMBANGAN FISKAL APBN, APBD, DAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Foto Sahid Subekti

1. ANALISIS APBN

1.1. PERKEMBANGAN KINERJA APBN

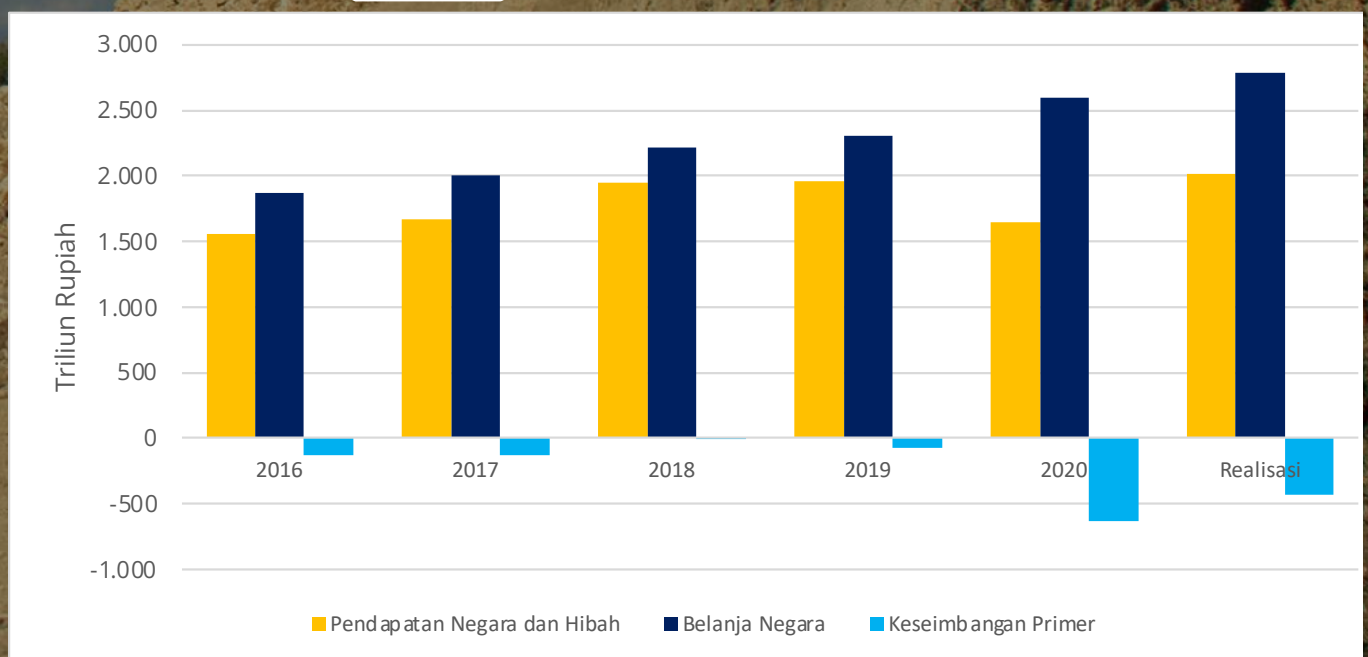
Pelaksanaan APBN T.A. 2021 dilakukan dengan melanjutkan kebijakan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19, percepatan pemulihan ekonomi, dan penguatan reformasi. Kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan pada tiga prioritas utama, yaitu, pertama, kebijakan fiskal diarahkan untuk melanjutkan penanganan Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat. Kedua, pemulihan ekonomi dilakukan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif melalui pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Ketiga, kebijakan fiskal diarahkan pada penguatan reformasi struktural untuk membentuk pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Pelaksanaan APBN T.A. 2021 melanjutkan kebijakan countercyclical pemerintah melalui pemberian stimulus fiskal untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19. Kebijakan countercyclical dilakukan melalui penambahan anggaran belanja negara dan/atau mengurangi penerimaan pajak sehingga pemerintah mampu melakukan pemberian stimulus fiskal dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Pemberian stimulus fiskal di bidang pendapatan negara dilakukan dalam bentuk insentif pajak, relaksasi prosedur, dan peningkatan pelayanan PNPB kepada masyarakat. Stimulus fiskal di bidang belanja negara diberikan melalui pengadaan

vakzin, kelanjutan program perlindungan sosial, dan dukungan pada program/sektor terdampak. Selanjutnya, dukungan pembiayaan juga diberikan melalui restrukturisasi BUMN, BLU, dan SWF, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan.

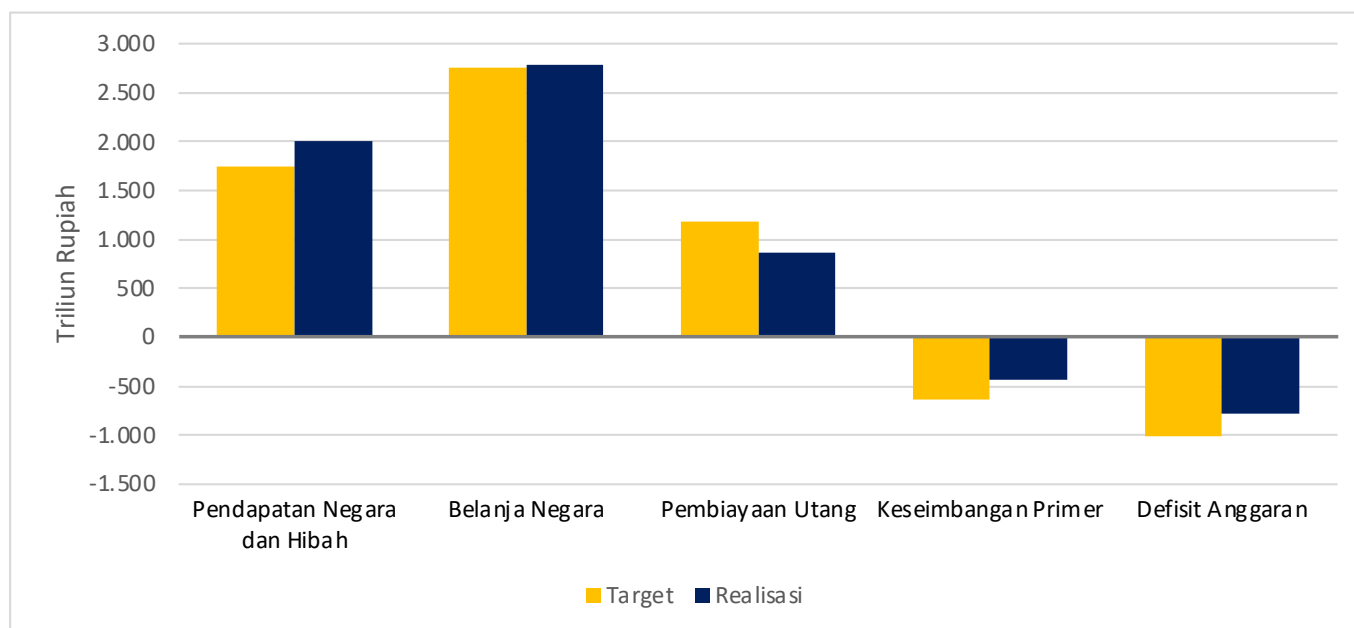
APBN T.A. 2021 menunjukkan perbaikan dan menuju ke tingkat sebelum pandemi Covid-19 (periode 2016-2019). Pendapatan Negara dan Hibah T.A. 2021 memiliki realisasi sebesar Rp2.011,41 triliun yang lebih besar dari realisasi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.960,63 triliun. Kebijakan countercyclical pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 terlihat dari realisasi Belanja Negara yang melanjutkan tren pertumbuhan pada periode tahun 2016-2021 meskipun pada tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid-19. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp2.595,48 triliun atau tumbuh sebesar 12,39%, dan pada tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun atau tumbuh sebesar 7,36%. Belanja Negara yang terus tumbuh pada periode tahun 2020-2021 menyebabkan Keseimbangan Primer mengalami defisit yang relatif tinggi, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp633,61 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp431,57 triliun. Sementara itu, Keseimbangan Primer pada periode sebelum pandemi Covid-19 menunjukkan tren perbaikan dengan tingkat defisit paling rendah terjadi

GAMBAR 37. PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2016-2021



Sumber: LKPP Audited 2016-2020 dan LKPP Unaudited 2021

GAMBAR 38. KINERJA APBN TAHUN ANGGARAN 2021



Sumber: LKPP Unaudited 2021

pada tahun 2018, yaitu defisit sebesar Rp11,49 triliun. Defisit Keseimbangan Primer yang relatif tinggi pada periode pandemi Covid-19 menunjukkan kebijakan fiskal pemerintah yang berupaya secara maksimal untuk menangani dampak pandemi Covid-19 dan menggerakkan kembali perekonomian Indonesia.

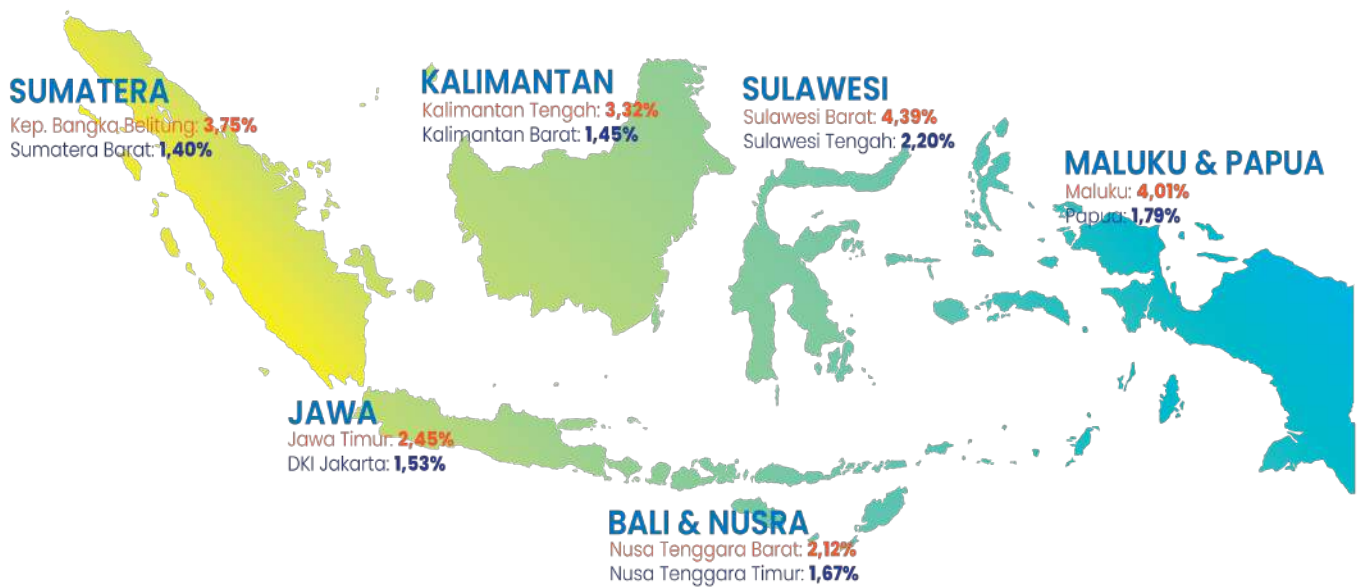
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 mencatatkan kinerja positif yang terlihat dari pendapatan negara yang melampaui target, belanja negara yang optimal, dan keseimbangan primer yang di bawah target. Pendapatan negara meningkat cukup tinggi dan melampaui target APBN, yaitu tumbuh sebesar 22,06% pada tahun 2021 setelah mengalami kontraksi sebesar 15,96% pada tahun 2020. Pendapatan negara tercapai sebesar Rp2.011,35 triliun dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,65 triliun atau tercapai sebesar 115,35% dari target. Kebijakan belanja negara yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mengalami pertumbuhan dan tercapai di atas target APBN. Realisasi belanja negara pada tahun 2021 tercatat di atas target APBN, yaitu tercapai sebesar Rp2.786,41 triliun dari target sebesar Rp2.750,03 atau tercapai sebesar 101,32% dari target. Realisasi belanja negara tersebut tercatat tumbuh sebesar 7,35% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Kinerja positif juga terlihat dari keseimbangan primer yang berada di bawah target APBN, yaitu tercatat sebesar Rp431,57 triliun dari target sebesar Rp633,12 atau terjadi penurunan sebesar 31,83% dibandingkan dengan periode tahun 2020.

Kinerja positif APBN 2021 juga terlihat dari pembiayaan anggaran yang efisien, realisasi defisit yang menurun, dan realisasi SiLPA yang menurun. Pembiayaan anggaran terutama pembiayaan utang dilakukan

secara efisien seiring dengan capaian pendapatan negara yang melebihi target. Pembiayaan utang berada di bawah target APBN, yaitu tercapai sebesar Rp870,54 triliun dari target sebesar Rp1.177,35 triliun atau terjadi penurunan sebesar 26,06% dibandingkan realisasi pembiayaan utang periode tahun 2020. Realisasi defisit mengalami penurunan, yaitu tercatat sebesar Rp775,06 triliun pada APBN T.A. 2021, turun sebesar 18,21% dari realisasi defisit APBN T.A. 2020 sebesar Rp947,70 triliun. Realisasi defisit APBN T.A. 2021 tercatat sebesar 4,57% dari PDB yang berada di bawah target sebesar 5,70% dari PDB. Selain itu, SiLPA yang lebih kecil pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pembiayaan anggaran terutama pembiayaan utang telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan capaian pendapatan negara dan komposisi portofolio utang.

Pelaksanaan APBN tahun 2021 banyak terjadi di regional Jawa dengan besaran pendapatan negara dan hibah sebesar 88,58%, serta besaran belanja negara sebesar 71,93%. Tingginya realisasi APBN di regional Jawa ditopang oleh pelaksanaan APBN di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur dengan komposisi berturut-turut, yaitu besaran pendapatan negara dan hibah sebesar 66,05% dan 10,71%, serta besaran belanja negara sebesar 57,53% dan 4,51%. Sebaran pelaksanaan APBN di tingkat regional dan provinsi tidak banyak berubah dari masa sebelum pandemi Covid-19. Regional Bali & Nusra mengalami besaran APBN terendah, yaitu besaran pendapatan negara dan hibah sebesar 0,88%, serta besaran belanja negara sebesar 2,96%. Rendahnya pelaksanaan APBN di regional Bali & Nusra terutama dikarenakan regional tersebut hanya ditopang oleh 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

GAMBAR 39. SEBARAN PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2021



Tingginya pelaksanaan APBN di regional Jawa terutama di provinsi DKI Jakarta dikarenakan keberadaan DKI Jakarta sebagai pusat pengelolaan administrasi pemerintahan. Pendapatan Perpajakan yang tercatat di Jakarta, yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp916,57 triliun atau sebesar 59,21% dari total Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.547,88 triliun. Sementara itu, Belanja Non Kementerian/Lembaga pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp809,89 triliun atau sebesar 40,48% dari total Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.000,70 triliun. Belanja Non Kementerian/Lembaga merupakan jenis belanja yang dikelola Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN dan dicatatkan sebagai realisasi di DKI Jakarta. Salah satu komponen Belanja Non Kementerian/Lembaga, yaitu Belanja Pembayaran Bunga Utang yang tercatat di DKI Jakarta dan realisasi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp343,50 triliun atau 17,17% dari total Belanja Pemerintah Pusat. Meskipun secara administrasi pelaksanaan APBN banyak tercatat di DKI Jakarta, tetapi manfaat APBN dirasakan dan didistribusikan kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri.

1.1.A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

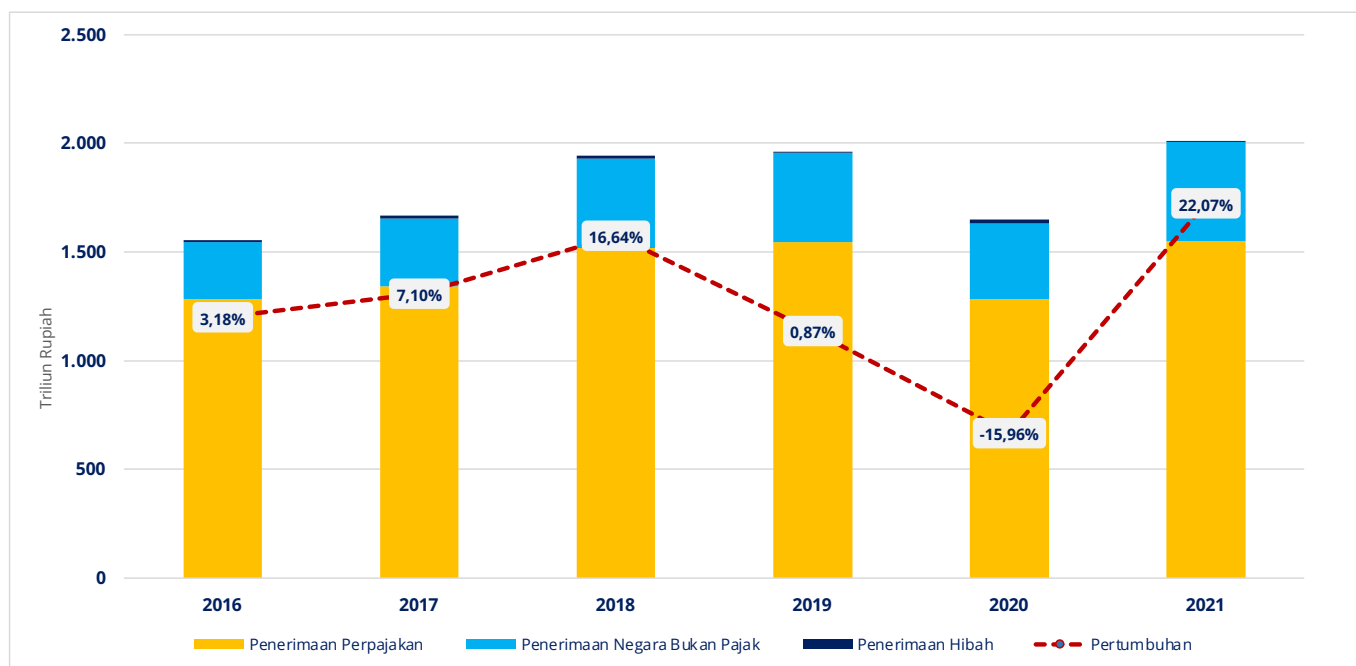
Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif, melampaui target, dan telah berada pada level sebelum pandemi. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat tumbuh sebesar 22,06% dari sebesar Rp1.647,78 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.011,35 triliun pada tahun 2021. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp1.743,65 triliun atau tercapai sebesar 115,36%. Selain itu, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2021 telah berada pada level

sebelum pandemi (tahun 2019) setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2021 tercatat lebih besar dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp1.960,63 triliun. Kontribusi komponen Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 masih lebih besar dibandingkan kontribusi komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meskipun kontribusi komponen PNBP mengalami tren peningkatan terbesar.

Penerimaan Perpajakan pada tahun 2021 tercatat melampaui target dan tumbuh positif setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Realisasi Penerimaan Perpajakan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,45% setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 15,96%. Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2021 tercapai sebesar 107,15% dari target atau tercapai sebesar Rp1.547,88 triliun dari target APBN sebesar Rp1.444,54 triliun. Jika dilihat rinciannya, terdapat dua komponen Penerimaan Perpajakan yang realisasinya melampaui target, yaitu Pajak Dalam Negeri tercapai sebesar 104,58% dari target atau tercapai sebesar Rp1.474,19 triliun dari target sebesar Rp1.409,58 triliun, dan Pajak Perdagangan Internasional tercapai sebesar 210,80% dari target atau tercapai sebesar Rp73,70 triliun dari target sebesar Rp34,96 triliun. Penerimaan perpajakan yang melampaui target tersebut seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dunia, membaiknya harga komoditas, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan dan melampaui dari target APBN dengan persentase realisasi yang lebih besar dari capaian Penerimaan

GAMBAR 40. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2016-2021



Sumber: LKPP Audited 2016-2020 dan LKPP Unaudited 2021

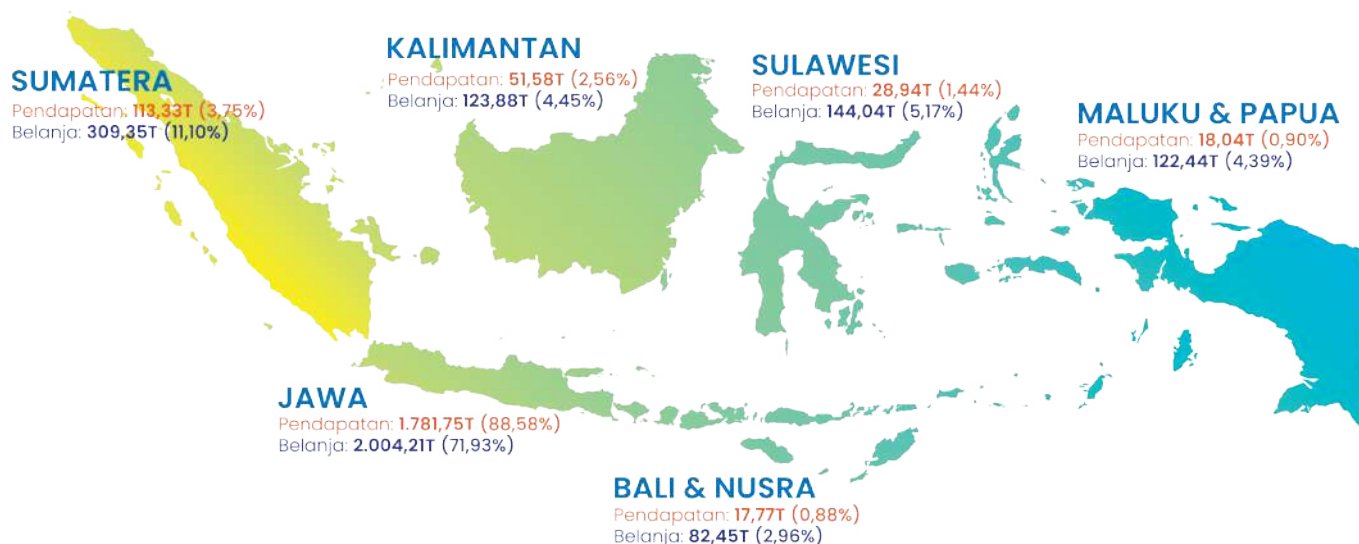
Perpajakan. Realisasi PNBP tahun 2021 tercapai sebesar 153,75% dari target atau tercapai sebesar Rp458,49 triliun dari target APBN sebesar Rp298,20 triliun. Jika dilihat rinciannya, realisasi semua komponen PNBP telah melampaui dari target yang ditetapkan. Realisasi PNBP pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 33,37% setelah pada periode tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 15,94%. Capaian PNBP yang melampaui target ditopang oleh kenaikan harga komoditas migas dan non migas serta kenaikan pendapatan BLU dan PNBP kementerian/lembaga.

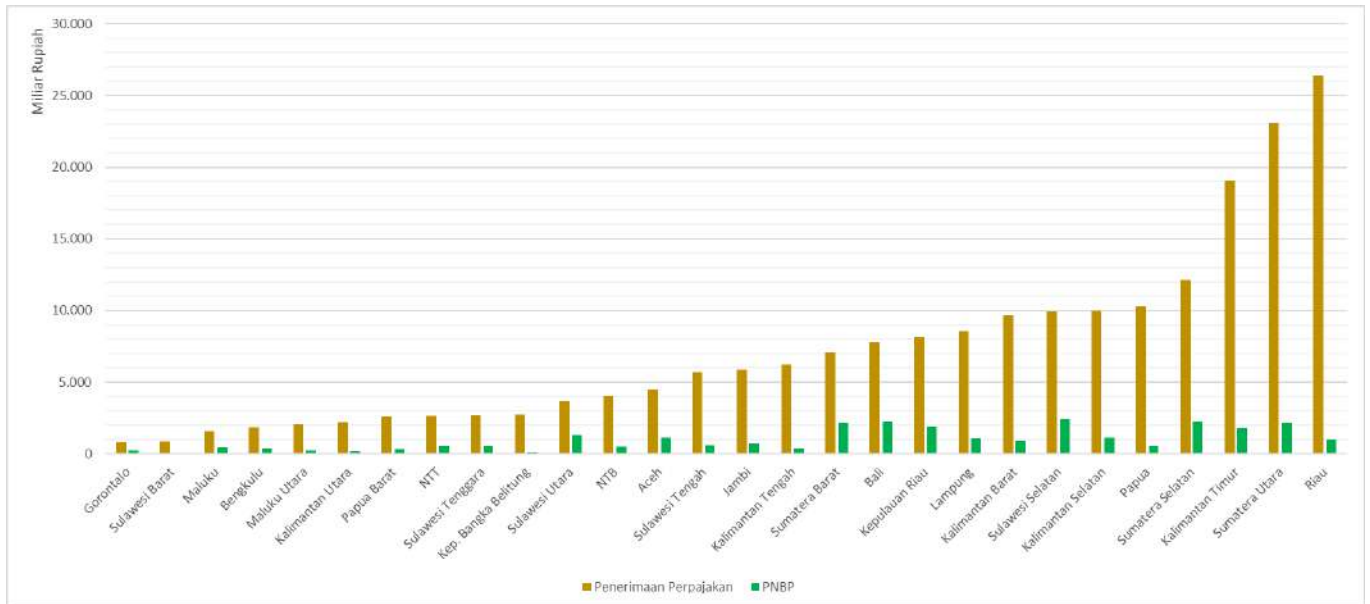
Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2021 sebesar Rp5,00 triliun atau telah melampaui target APBN sebesar Rp0,90 triliun. Realisasi tersebut lebih

rendah dari realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2020 yang sebesar Rp18,83 triliun atau terjadi penurunan sebesar 73,47%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020. Realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang Tahun 2021 sebesar Rp2,76 triliun lebih rendah dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp17,00 triliun atau terjadi penurunan sebesar 83,78%.

Regional Jawa mencatatkan realisasi Pendapatan Negara tertinggi dibandingkan regional lainnya seiring dengan kegiatan ekonomi yang lebih banyak terjadi di regional Jawa dan pusat pemerintahan yang berada di regional Jawa, yaitu di DKI Jakarta. Realisasi

GAMBAR 41. SEBARAN PENDAPATAN NEGARA DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2021



GAMBAR 42. SEBARAN PENDAPATAN NEGARA TINGKAT DAERAH SELAIN DI REGIONAL JAWA TAHUN 2021

Sumber: LKPP Audited 2016-2020 dan LKPP Unaudited 2021

penerimaan pajak dan PNBP di regional Jawa pada tahun 2021 berturut-turut, yaitu sebesar 86,93% dan 94,02% dari total realisasi seluruh daerah di Indonesia. Sementara itu, DKI Jakarta merupakan daerah yang mencatatkan realisasi tertinggi di regional Jawa, yaitu penerimaan pajak sebesar Rp916,57 triliun atau 59,21%, dan realisasi PNBP sebesar Rp407,03 triliun atau 88,77% dari total realisasi seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan ekonomi tahun 2021 di regional Jawa, yaitu sebesar 57,89% dari total seluruh PDRB di Indonesia. Tingginya tingkat ekonomi di regional Jawa kemungkinan besar sangat memengaruhi tingginya tingkat penerimaan pajaknya. Selain itu, di DKI Jakarta terdapat Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus yang ruang lingkupnya seluruh wilayah Indonesia. Tingginya tingkat realisasi PNBP di regional Jawa tidak terlepas juga dari kantor pusat Kementerian/Lembaga yang berada di DKI Jakarta dengan ruang lingkup pengelolaan penerimaannya di seluruh wilayah Indonesia.

Penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas di tahun 2021, sementara realisasi PNBP tertinggi terjadi di daerah yang mengalami peningkatan pendapatan BLU. Penerimaan Perpajakan tertinggi selain daerah di Regional Jawa terjadi di daerah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua. Sementara itu, realisasi terendah tercatat di daerah Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Bengkulu, dan Maluku Utara. Tingginya realisasi penerimaan pajak seiring dengan tingginya harga komoditas perkebunan (CPO dan turunannya) dan tingginya harga komoditas pertambangan. Realisasi PNBP tertinggi terjadi di daerah Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera

Barat. Sementara itu, realisasi PNBP terendah tercatat di daerah Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Tingginya realisasi PNBP seiring dengan peningkatan pendapatan BLU, penguatan regulasi terhadap objek dan tarif PNBP, dan optimalisasi pemanfaatan BMN.

1.1.B. BELANJA NEGARA

Belanja Negara pada tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan dan melampaui pagu anggaran. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2021 tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,35% dari sebesar Rp2.595,48 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.786,41 triliun pada tahun 2021. Peningkatan tersebut sebagian besar berasal dari kenaikan realisasi Belanja Pemerintah Pusat, yaitu dari sebesar Rp1.832,95 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.000,70 triliun pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 9,15%. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2021 yang melampaui anggaran merupakan upaya optimalisasi belanja terutama dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi Belanja Negara tercapai sebesar Rp2.786,41 triliun atau 101,32% dari pagu anggaran sebesar Rp2.750,03 triliun. Optimalisasi belanja utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja barang dan belanja modal untuk percepatan pembayaran beberapa program pemulihan ekonomi nasional dan realisasi proyek infrastruktur dasar atau konektivitas, dan pengadaan peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Negara yang melampaui pagu anggaran merupakan kondisi yang cukup jarang terjadi, selain terjadi pada tahun 2021, kondisi yang serupa juga terjadi pada tahun 2007. Optimalisasi

belanja pada tahun 2021 dilakukan dalam kerangka belanja yang responsif dan fleksibel. Seiring dengan tingginya realisasi belanja pemerintah, kondisi perekonomian pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan. Optimalisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen belanja yang melebihi pagu anggaran, yaitu Belanja Barang (146,22%), Belanja Subsidi (138,06%), dan Belanja Bantuan Sosial (107,57%). Sementara itu, komponen belanja lainnya memiliki realisasi di bawah pagu anggarannya.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 tumbuh positif sebesar 9,15% yang digunakan terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain belanja barang dan belanja modal, realisasi belanja subsidi juga mengalami peningkatan sebesar 23,37%, yaitu dari Rp196,23 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp242,09 triliun pada tahun 2021. Realisasi belanja subsidi tersebut berasal dari realisasi belanja subsidi energi sebesar Rp140,40 triliun dengan tingkat pertumbuhan 28,99% dan realisasi belanja subsidi non energi sebesar Rp101,69 dengan tingkat pertumbuhan 16,36%. Realisasi belanja subsidi energi bersumber dari belanja subsidi BBM dan LPG 3 Kg. Sementara itu, subsidi kredit program merupakan komponen belanja subsidi non energi yang mengalami realisasi terbesar seiring dengan dukungan terhadap UMKM melalui program PEN.

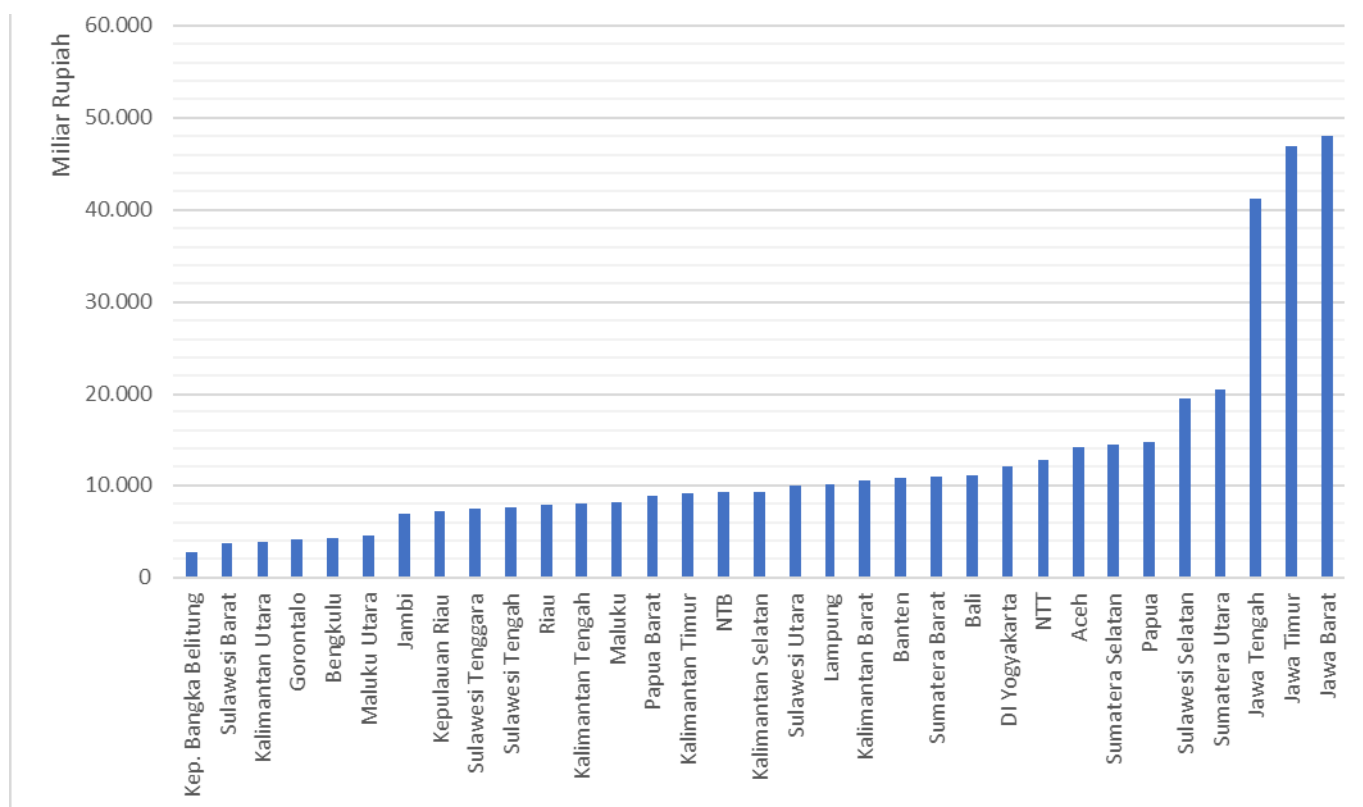
Regional Jawa terutama daerah DKI Jakarta mencatatkan realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat tertinggi dibandingkan daerah

lainnya seiring dengan pusat pemerintahan yang berada di DKI Jakarta. Realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat di regional Jawa berturut-turut, yaitu sebesar 71,93% dan 86,91% dari total realisasi belanja di seluruh Indonesia. Sementara itu, realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat di daerah DKI Jakarta berturut-turut, yaitu sebesar 57,53% dan 78,96% dari total realisasi belanja di seluruh Indonesia. Belanja yang hanya dilakukan di DKI Jakarta sehubungan dengan keberadaan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, yaitu belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan belanja hibah. Meskipun belanja subsidi dan belanja hibah tercatat di DKI Jakarta, tetapi manfaatnya didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat juga pembayaran belanja yang dicatatkan di DKI Jakarta tetapi manfaatnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu belanja pegawai untuk pensiunan dan belanja bantuan sosial.

1.I.C. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami peningkatan sebesar 3,04%, yaitu dari Rp762,53 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp785,71 triliun pada tahun 2021. Peningkatan realisasi TKDD terutama dipengaruhi oleh peningkatan Transfer ke Daerah sebesar 3,24%, yaitu dari Rp691,43 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp713,85 triliun pada tahun 2021, sedangkan Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 1,06%, yaitu dari Rp71,10 triliun pada tahun

GAMBAR 43. SEBARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT SELAIN DI DKI JAKARTA TAHUN 2021



2020 menjadi Rp71,85 triliun pada tahun 2021. Jika dilihat dari persentase realisasi TKDD terhadap pagu anggaran maka persentase realisasi pada tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020, yaitu persentase realisasi tahun 2021 dan tahun 2020 berturut-turut sebesar 98,77% dan 99,82%.

Realisasi TKDD mengalami pemulihan dan menuju ke level sebelum pandemi terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Transfer ke Daerah, sementara realisasi Dana Desa selalu mengalami pertumbuhan positif meskipun di masa pandemi. Realisasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan sebesar 3,24%, yaitu dari sebesar Rp691,43 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp713,85 triliun pada tahun 2021. Meskipun begitu, realisasi Transfer ke Daerah pada tahun 2021 masih lebih rendah dari realisasi pada tahun 2019 yang sebesar Rp743,16 triliun. Sementara itu, realisasi Dana Desa selalu tumbuh positif pada periode tahun 2020 dan 2021, yaitu berturut-turut tumbuh sebesar 1,84% dan 1,06%.

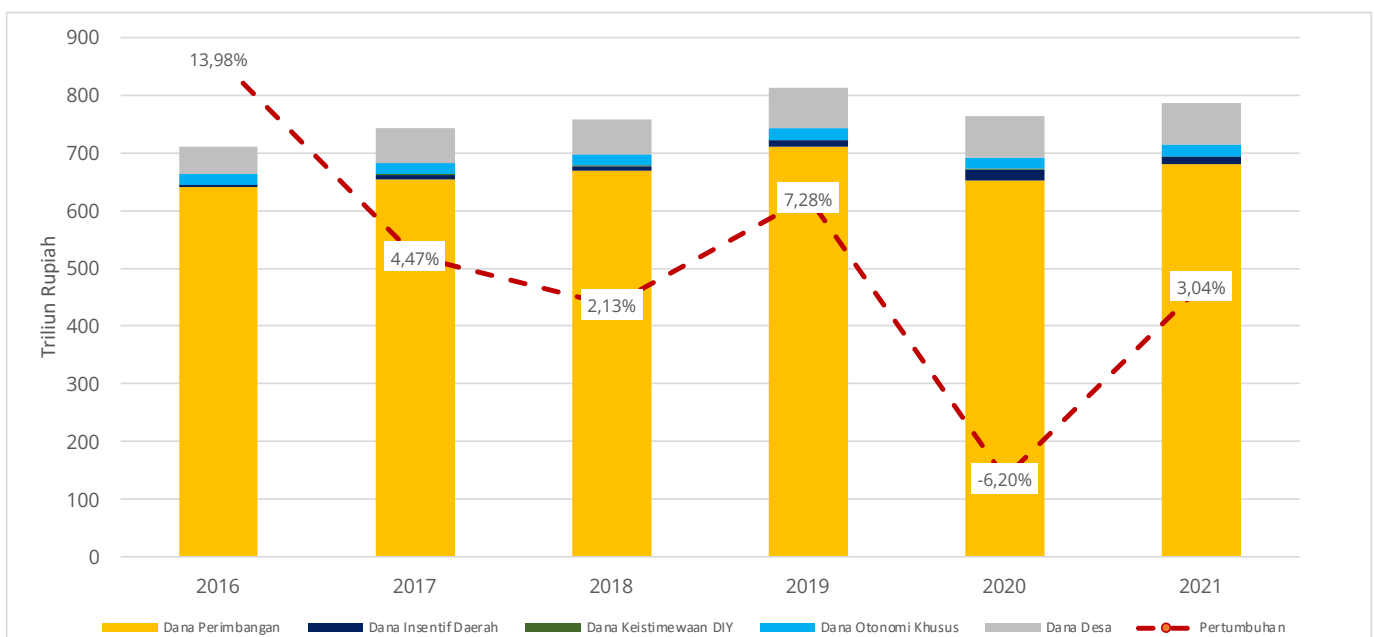
Sebagian besar komponen TKDD telah berada pada level sebelum pandemi, dan beberapa komponen mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi selama periode tahun 2016-2021. Dana Perimbangan yang merupakan komponen TKDD dengan porsi terbesar (86,49%) mencatatkan realisasi yang belum berada pada level sebelum pandemi. Selain itu, Dana Otonomi Khusus juga belum berada pada level sebelum pandemi dengan perkembangan selama kurun waktu 2019-2021 mengalami penurunan sebesar 7,14%. Dana Insentif Daerah mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2016-2021 dengan pertumbuhan sebesar 169,29%. Selain Dana Insentif Daerah, selama kurun waktu 2016-2021,

Dana Keistimewaan DIY dan Dana Desa mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu berturut-turut mengalami peningkatan sebesar 141,12% dan 53,93%.

Anggaran TKDD tahun 2021 menjadi instrumen kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut diantaranya adalah tambahan (top up) BLT Desa kepada 35 kabupaten prioritas yang dibiayai dari Dana Desa. Kebijakan burden sharing antara APBD dan APBDesa yang bersumber dari anggaran earmark 8% dari Dana Transfer Umum apabila Dana Desa tidak mencukupi. Kebijakan lainnya, yaitu kebijakan dukungan program PEN untuk perlindungan sosial dengan alokasi 20% belanja wajib Dana Transfer Umum, dan untuk pemulihan ekonomi dengan alokasi 15% belanja wajib Dana Transfer Umum.

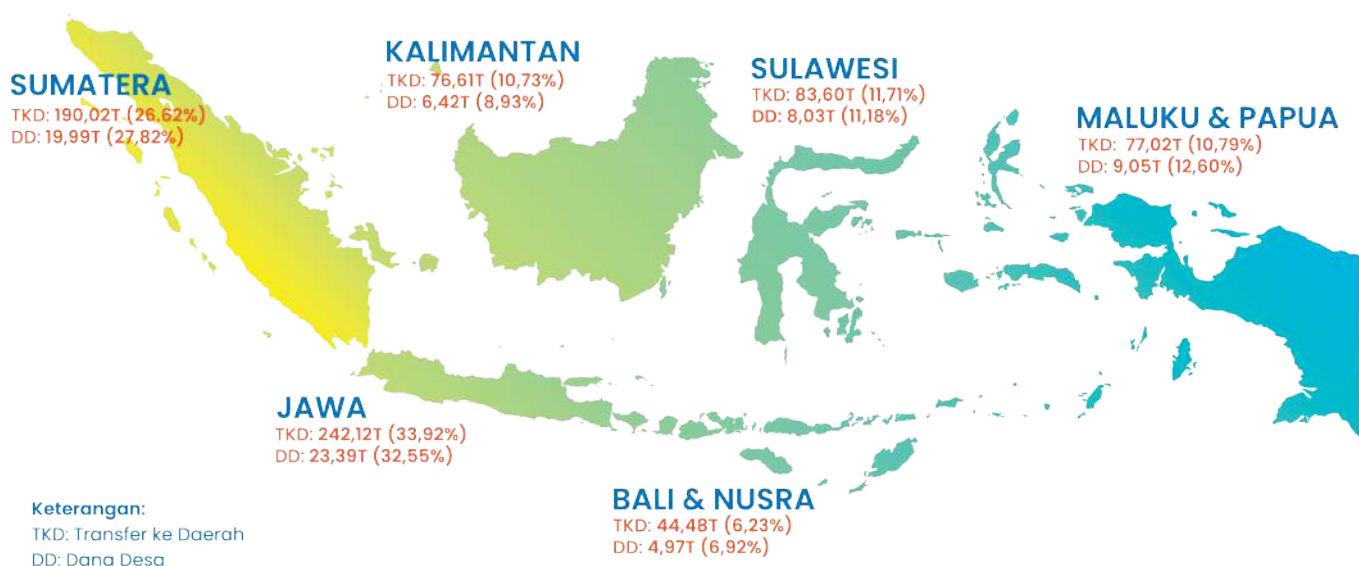
Sebaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa lebih banyak terjadi di luar regional Jawa dibandingkan sebaran Belanja Pemerintah Pusat yang lebih banyak terjadi di regional Jawa. Meskipun begitu, regional Jawa masih mencatatkan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tertinggi dibandingkan regional lainnya. Sebaran Dana Desa di regional Jawa masih yang tertinggi meskipun DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan alokasi Dana Desa. Regional Bali & Nusra mencatatkan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terendah, tetapi jika dilihat per daerah maka ketiga daerah pada

GAMBAR 44. PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2016-2021



Sumber: LKPP Audited 2016-2020 dan LKPP Unaudited 2021

GAMBAR 45. SEBARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2021



regional Bali & Nusra tidak tercatat sebagai daerah dengan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terendah.

Transfer Ke Daerah tertinggi sebagian besar terjadi di regional Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta terjadi di Papua dan Sumatera Utara. Sementara itu, realisasi Transfer Ke Daerah terendah terjadi di Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Sama halnya dengan Transfer Ke Daerah, daerah dengan Dana Desa tertinggi sebagian besar berada di regional Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta terjadi di Papua dan Aceh. Sementara itu, DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi Dana Desa, dan realisasi Dana Desa terendah terjadi di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Utara.

1.I.D. SURPLUS/DEFISIT APBN

Realisasi defisit APBN tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau mencapai 4,57% dari PDB. Capaian tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu defisit APBN tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun atau mencapai 6,14% dari PDB. Realisasi defisit tahun 2021 lebih rendah dari target sebesar Rp1.006,38 triliun atau dari target sebesar 5,70% dari PDB seiring dengan realisasi penerimaan perpajakan dan PNPB yang melampaui target. Realisasi defisit APBN pada tahun 2021 menunjukkan terjadinya pemulihan dan mulai menuju ke arah di bawah 3%. Pada masa pandemi Covid-19, yaitu tahun 2020 dan 2021, pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dimana defisit APBN dapat di atas 3% untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada

tahun 2023 akan kembali di bawah 3%.

Realisasi Defisit APBN dan defisit Keseimbangan Primer tahun 2021 menunjukkan arah perbaikan. Realisasi defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer di tahun 2020 merupakan yang tertinggi dikarenakan mulai terjadinya pandemi Covid-19 di tahun tersebut. Sementara itu, realisasi defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer sebelum masa pandemi Covid-19 menunjukkan tren perbaikan dengan keseimbangan primer menuju ke arah positif dan mengalami defisit terkecil pada tahun 2018. Defisit anggaran tahun 2021 yang menuju ke arah di bawah 3% menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal yang sehat, diantaranya dilakukan melalui optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNPB serta melakukan spending better atau belanja yang berkualitas melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Defisit anggaran tahun 2021 dibiayai terutama melalui pembiayaan utang dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal. Realisasi Pembiayaan (Neto) Tahun 2021 sebesar Rp871,72 triliun atau 86,62% dari target sebesar Rp1.006,38 triliun. Pembiayaan utang tahun 2021 berada di bawah target APBN, yaitu tercapai sebesar Rp870,54 triliun dari target sebesar Rp1.177,35 triliun atau terjadi penurunan sebesar 29,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi Pembiayaan dikarenakan penurunan defisit APBN, pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program, dan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB III. Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terutama digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19, seperti pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung

GAMBAR 46. PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN TAHUN 2017-2021



penguatan reformasi.

1.I.E. PENGELOLAAN BLU PUSAT

Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Tahun 2021 mencatatkan capaian positif dengan kontribusi Pendapatan BLU terhadap PNB sebesar 27,49%, dan memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 81,86%. Realisasi Pendapatan BLU tahun 2021, yaitu sebesar Rp126,04 triliun atau realisasinya sebesar 214,39% dari target APBN yang sebesar Rp58,79 triliun. Kinerja BLU tetap tumbuh positif meskipun di masa pandemi, yaitu pada tahun 2020 pendapatan BLU tumbuh sebesar 41,82% dari Rp48,87 triliun menjadi Rp69,31 triliun, dan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 81,86%. Kenaikan Pendapatan BLU ditopang oleh kenaikan penerimaan dari BLU Pengelola Dana terutama dari penerimaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit akibat meningkatnya harga CPO yang disebabkan tingginya permintaan terhadap CPO. Selain itu, kenaikan Pendapatan BLU juga dikontribusikan dari pendapatan jasa layanan pendidikan, rumah sakit, dan penyelenggaraan telekomunikasi.

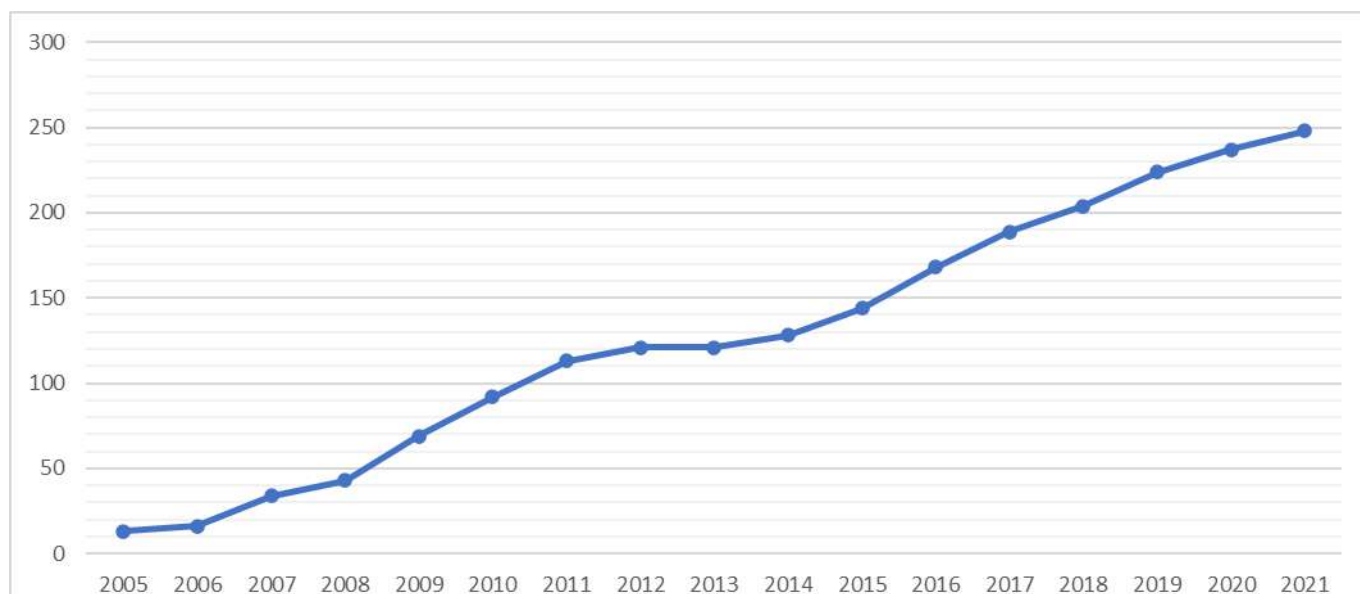
Pertumbuhan jumlah BLU yang terjadi tidak semata-mata menunjukkan bahwa Pemerintah fokus untuk meningkatkan pendapatan, tetapi bagi Pemerintah, pertumbuhan BLU menunjukkan upaya Pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada tahun 2021, BLU di Indonesia tercatat berjumlah 248 unit dengan terjadi penambahan BLU baru pada tahun 2021 sejumlah 11 unit. BLU di Indonesia terbagi dalam 5 rumpun, yaitu pendidikan, kesehatan, kawasan, barang jasa lainnya, dan pengelola dana. Tujuan pembentukan BLU adalah

tanpa mengutamakan mencari keuntungan, tetapi dengan pelayanan yang meningkat maka secara langsung dapat meningkatkan pendapatannya. BLU senantiasa didorong untuk meningkatkan kualitas organisasi seperti tata kelola, pelayanan, kualitas SDM, leadership, dan manajemennya. Selain itu, BLU didorong untuk makin efisien melalui inovasi pelayanan yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital dengan berfokus kepada peningkatan pelayanan dan tujuan didirikannya BLU tersebut.

Jumlah BLU lebih banyak berada di regional Jawa terutama di provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan. Meskipun begitu, pelayanan yang diberikan oleh BLU tersebut tidak terbatas hanya di regional Jawa dan provinsi DKI Jakarta saja, melainkan pelayanan yang meliputi seluruh regional dan provinsi di Indonesia. Salah satu BLU tersebut adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di Jakarta, tetapi memiliki pelayanan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, LPDP juga memiliki program beasiswa afirmasi yang ditujukan untuk daerah tertentu, diantaranya adalah daerah di regional Maluku & Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebagian besar layanan BLU berada pada rumpun kesehatan dan pendidikan dengan lokasi BLU yang lebih banyak berada di regional Jawa dan Sumatera, sementara terdapat provinsi yang tidak memiliki satker dengan status BLU. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat adalah daerah yang tidak memiliki BLU Pusat. Sementara itu, provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara tidak memiliki BLU pada rumpun kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar BLU pada rumpun kesehatan adalah rumah sakit, sedangkan sebagian besar

GAMBAR 47. PERKEMBANGAN JUMLAH BLU PUSAT TAHUN 2005-2021

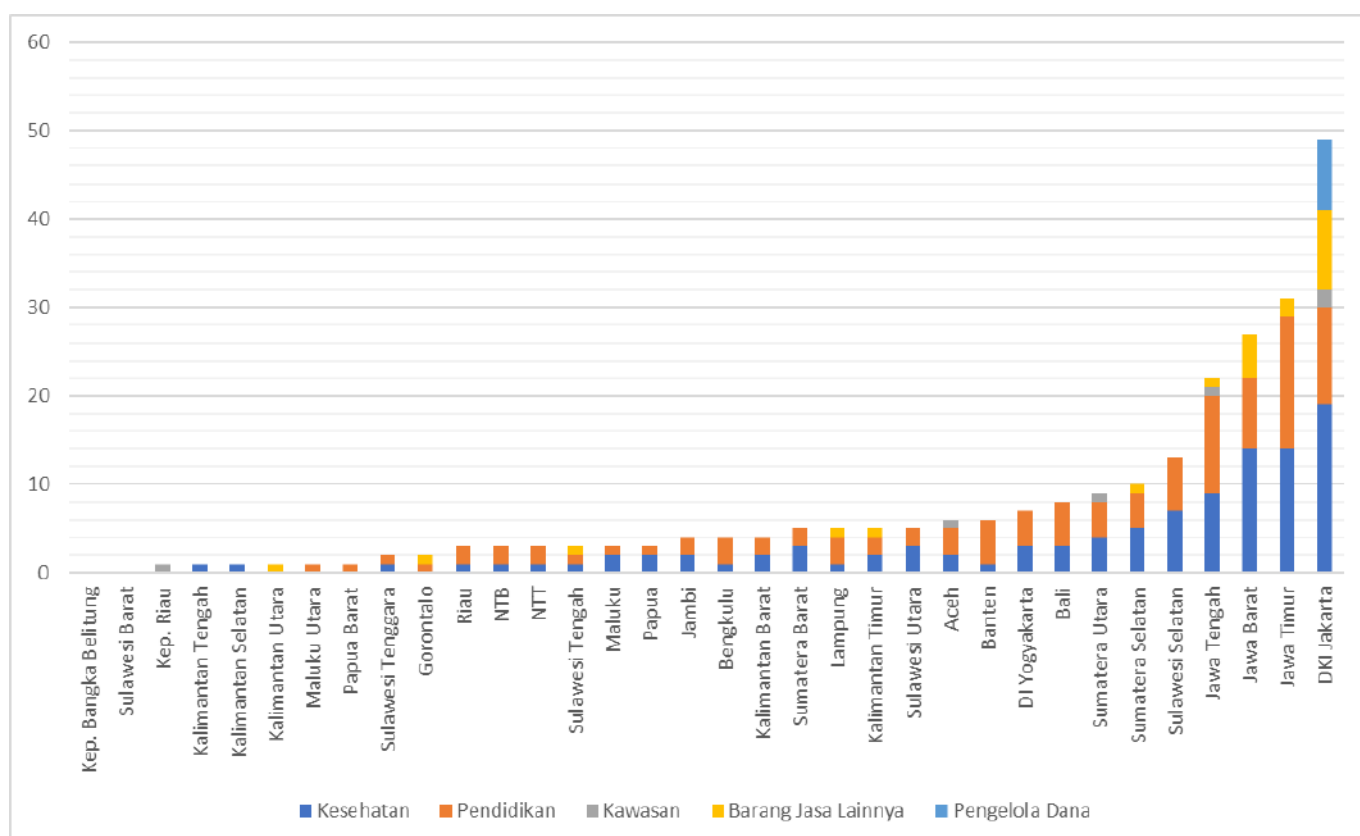


BLU pada rumpun pendidikan adalah universitas dan politeknik. BLU pada rumpun kawasan berada di regional Jawa dan Sumatera, diantaranya adalah kawasan perdagangan pada provinsi Kepulauan Riau dan Aceh. BLU pada rumpun pengelola dana semuanya berada di DKI Jakarta. BLU pada rumpun barang jasa lainnya sebagian besar berada di regional Jawa, sedangkan yang berada di luar regional Jawa lebih banyak memiliki layanan terkait perhubungan, yaitu bandar udara dan kereta api.

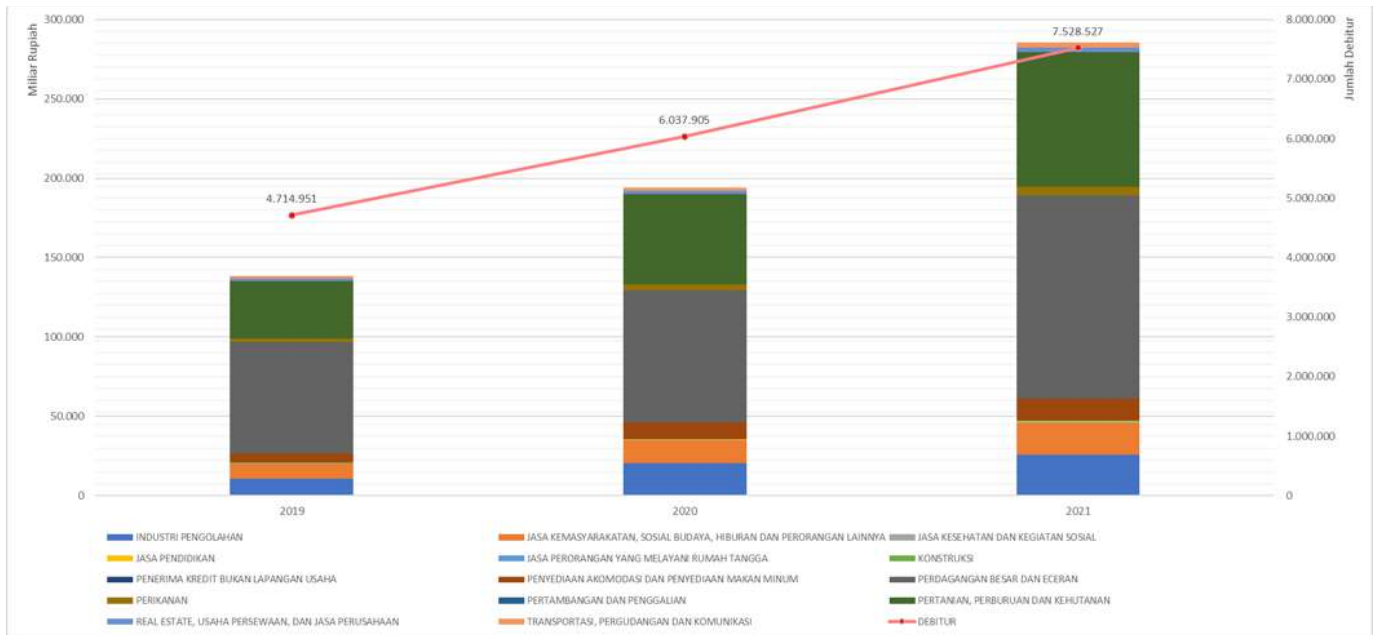
1.I.F. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

Program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan akses finansial dalam rangka mendorong perkembangan UMKM. Pada masa pandemi Covid-19, KUR dan UMi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

GAMBAR 48. JUMLAH DAN RUMPUN BLU PUSAT PER PROVINSI TAHUN 2021



GAMBAR 49. JUMLAH DEBITUR DAN REALISASI PENYALURAN KUR PER SEKTOR TAHUN 2019-2021



Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat modal usaha pelaku UMKM dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Konsep dukungan pemerintah pada program KUR dilakukan melalui subsidi bunga dan melalui lembaga penyalur perbankan serta lembaga keuangan. Sementara itu, pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum dapat difasilitasi perbankan melalui program KUR. Konsep dukungan pemerintah pada pembiayaan UMi dilakukan melalui pemberian pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan tingkat bunga tertentu.

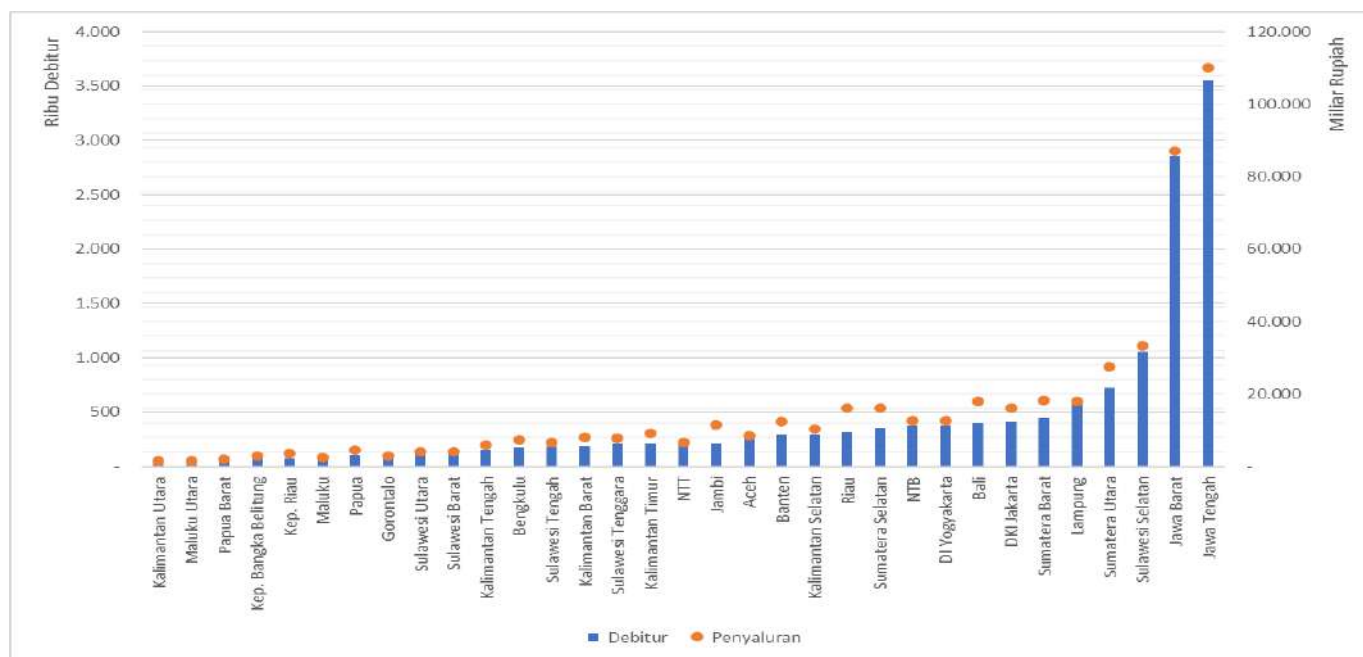
Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 mencapai Rp285,45 triliun dengan realisasi belanja subsidi bunga KUR penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp11,88 triliun. Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 meningkat sebesar 47,18% dibandingkan tahun 2020, sedangkan realisasi belanja subsidi bunga juga meningkat sebesar 138,40%. Kenaikan realisasi belanja subsidi bunga KUR terutama disebabkan oleh penambahan pagu dan pembayaran atas subsidi IJP KUR dan subsidi bunga KUR tahun sebelumnya. Jumlah debitur KUR pada tahun 2021 sejumlah 7,53 juta debitur atau meningkat 24,69% dibandingkan jumlah debitur tahun 2020. Pelaku UMKM pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran mendominasi penerimaan penyaluran KUR. Pada tahun 2021, sektor tersebut memiliki porsi sebesar 44,82% dari total penyaluran dana KUR, diikuti dengan sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar 29,29%, sektor Industri Pengolahan sebesar 9,07%, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan

dan Perorangan Lainnya sebesar 6,92%, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 4,86%.

Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 masih dominan terjadi di regional Jawa, yaitu sebesar Rp161,02 triliun atau 56,41% dari total penyaluran KUR. Sementara itu, jumlah debitur pada regional Jawa sebesar 4,53 juta debitur atau 60,22% dari total debitur KUR. Setelah regional Jawa, Sumatera merupakan regional yang memiliki jumlah debitur dan realisasi penyaluran yang relatif tinggi dibandingkan dengan regional lainnya meskipun pada tingkat provinsi di regional Sumatera memiliki data yang cukup bervariasi. Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan merupakan daerah di luar regional Jawa yang memiliki jumlah debitur dan realisasi penyaluran KUR yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan jumlah debitur dan realisasi penyaluran KUR yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Selanjutnya, realisasi penyaluran UMi pada tahun 2021 mencapai Rp7,03 triliun atau meningkat sebesar 16,98% dari realisasi penyaluran tahun 2020. Sementara itu, total penyaluran UMi periode tahun 2017 sampai 2021 telah mencapai sebesar Rp18,09 triliun dengan total penerima manfaat sebesar 5,40 juta debitur. Penyaluran UMi dengan akad syariah tercatat memiliki porsi yang relatif besar, yaitu sebesar 47,87% dari total penyaluran meskipun penggunaan akad konvensional masih yang tertinggi, yaitu sebesar 52,13%. Nilai pembiayaan UMi paling besar terjadi di rentang nilai Rp2.500.001,- s.d. Rp5.000.000,-.

GAMBAR 50. JUMLAH DEBITUR DAN REALISASI PENYALURAN KUR PER PROVINSI TAHUN 2019-2021

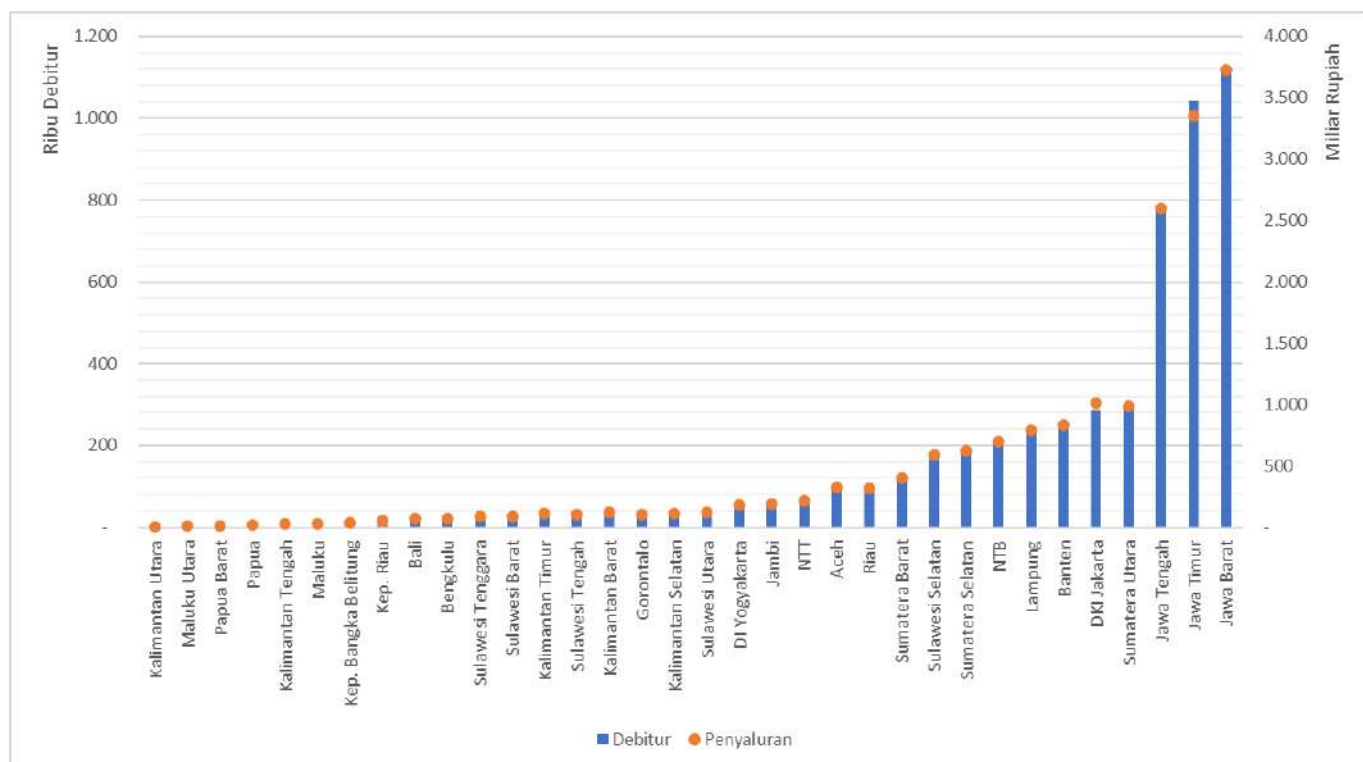


Dilihat berdasarkan tingkat usia, debitur program UMi paling banyak berada pada rentang usia 40 s.d. 49 tahun. Tenor yang paling banyak diminati debitur adalah tenor 6 s.d. 12 bulan. Selain itu, Perempuan dan Kelompok merupakan jenis kelamin dan skema yang paling banyak di program UMi, yaitu Laki-laki 5,25% dan Perempuan 94,75%, sedangkan skema individu sebesar 14,75% dan skema kelompok sebesar 85,25%.

Sama halnya dengan KUR, penyaluran UMi pada

periode tahun 2017-2021 masih dominan terjadi di regional Jawa, yaitu sebesar Rp11,71 triliun atau 64,77% dari total penyaluran UMi. Sementara itu, jumlah debitur pada regional Jawa sebesar 3,53 juta debitur atau 65,39% dari total debitur UMi. Sumatera merupakan regional setelah Jawa yang memiliki jumlah debitur dan realisasi penyaluran yang relatif tinggi dibandingkan dengan regional lainnya meskipun datanya cukup bervariasi di tingkat provinsinya. Seluruh provinsi pada regional Maluku & Papua merupakan daerah dengan jumlah debitur dan

GAMBAR 51. JUMLAH DEBITUR DAN REALISASI PENYALURAN UMI PER PROVINSI TAHUN 2017-2021



realisasi penyaluran yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi Sumatera Utara, Lampung, NTB, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan merupakan daerah di luar regional Jawa yang memiliki jumlah debitur dan realisasi penyaluran UMi yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Kalimantan Tengah, dan Maluku merupakan provinsi dengan jumlah debitur dan realisasi penyaluran KUR yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

1.I.G. ISU STRATEGIS PELAKSANAAN APBN DI DAERAH

Isu strategis pelaksanaan APBN di Daerah/Provinsi tahun 2021 terkait dengan harga komoditas, SDM pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan, pengadaan barang dan jasa, pandemi Covid-19, faktor alam, dan kondisi infrastruktur. Berbagai Isu tersebut dirasakan oleh daerah memengaruhi tingkat pendapatan dan kualitas belanja negara. Perkembangan harga komoditas merupakan isu strategis di daerah yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap komoditas perkebunan dan pertambangan. Sementara itu, isu strategis pelaksanaan belanja negara di daerah diantaranya, yaitu output kegiatan yang tidak tercapai, penyerapan anggaran tidak optimal, dan penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan belanja negara di daerah belum optimal kemungkinan dikarenakan kualitas perencanaan yang tidak baik, keterlambatan penyelesaian pekerjaan/

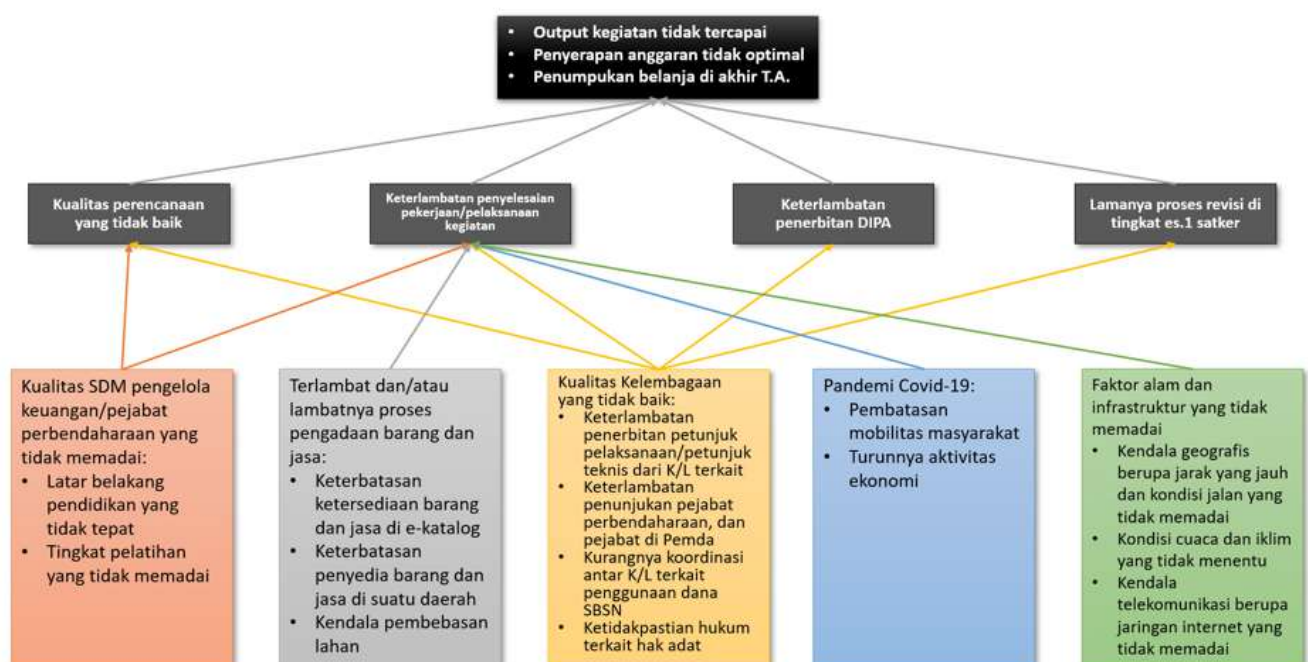
pelaksanaan kegiatan, keterlambatan penerbitan DIPA, dan lamanya proses revisi di tingkat Eselon I Satker berkenaan. Kualitas perencanaan yang tidak baik kemungkinan dikarenakan kualitas SDM pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan yang tidak memadai, dan juga dapat disebabkan oleh kualitas kelembagaan yang tidak baik. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pelaksanaan kegiatan kemungkinan dikarenakan kualitas SDM pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan yang tidak memadai, terlambat dan/atau lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, kualitas kelembagaan yang tidak baik, pandemi Covid-19, dan faktor alam serta infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, keterlambatan penerbitan DIPA dan lamanya proses revisi di tingkat eselon 1 Satker kemungkinan dikarenakan kualitas kelembagaan yang tidak baik.

2. ANALISIS APBD

2.I. GAMBARAN UMUM APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan efektivitas daerah untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan perekonomian pasca pandemi. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 pada pasal 5 menyebutkan bahwa, dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan covid-19 dengan prioritas penanganan kesehatan, penanganan

GAMBAR 52. MATRIKS ISU STRATEGIS PELAKSANAAN BELANJA NEGARA DI DAERAH TAHUN 2021



dampak ekonomi dan penanganan jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan realokasi program dan kegiatan yang bukan prioritas kepada belanja yang lebih bersifat urgent dalam rangka mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi.

Secara nasional, setelah mengalami penurunan di Tahun 2020, target pendapatan APBD 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,72 M (1,25%). Akan tetapi hal ini tidak diikuti oleh kenaikan realisasi pendapatan yang terkontraksi sebesar 7,97% (yoy). Sementara itu, alokasi pagu belanja mengalami penurunan sebesar 12,15 M (0,97%) sejalan dengan realisasi belanja yang juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6,66% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk alokasi dana yang diperuntukkan untuk menutupi surplus/defisit APBD mengalami kenaikan sebesar 7,74 M (9,8%) dimana nilai realisasinya juga mengalami pertumbuhan sebesar 20,79% (yoy).

pendapatan mengalami penurunan (yoy) baik di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6% dari 328 T menjadi 309 T maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPD) sebesar 85,1% dari 199 T menjadi 30 T. Sebaliknya, target pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 12,6% (yoy) dari 713 menjadi 802 T.

Dari sisi belanja, penurunan alokasi belanja dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada hampir seluruh komponen belanja kecuali komponen belanja tidak terduga. Komponen jenis belanja yang mengalami penurunan terbesar (yoy) adalah belanja modal (18,2%), diikuti belanja transfer (6,2%), dan belanja operasi (4,6%). Penurunan target belanja operasi disebabkan oleh berkurangnya belanja subsidi sebesar 1,58 T (25,42%) menjadi 6,23 T. Sebaliknya alokasi belanja tidak terduga (BTT) mengalami pertumbuhan sebesar 262,2%. Kenaikan belanja ini digunakan untuk membiayai penanganan pandemi

TABEL 3. I-ACCOUNT APBD 2021

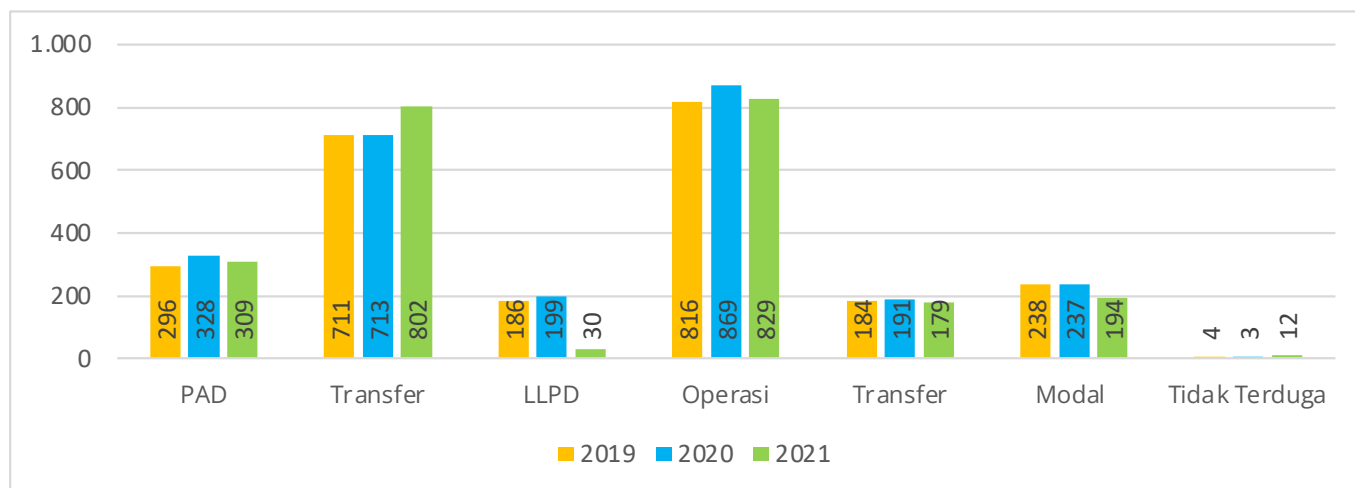
Sumber : LKPP 2021 Unaudited

I-Account (dalam Triliun)	Nasional			
	Pagu 2021	Real 2021	% Real	% Growth (yoy)
PENDAPATAN DAERAH	1.153,6	1.140,89	98,90%	-7,97%
BELANJA DAERAH	1.245,5	1.213,77	97,45%	-6,66%
SURPLUS/DEFISIT	-91,95	-72,87	79,25%	20,24%
PEMBIAYAAN	87,11	73,69	84,59%	20,79%
SILPA	-4,84	0,82	-16,94%	103,33%

Dalam kurun waktu 2019 - 2021, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat kondisi perekonomian yang belum pulih kembali ke masa sebelum pandemi covid-19. Target

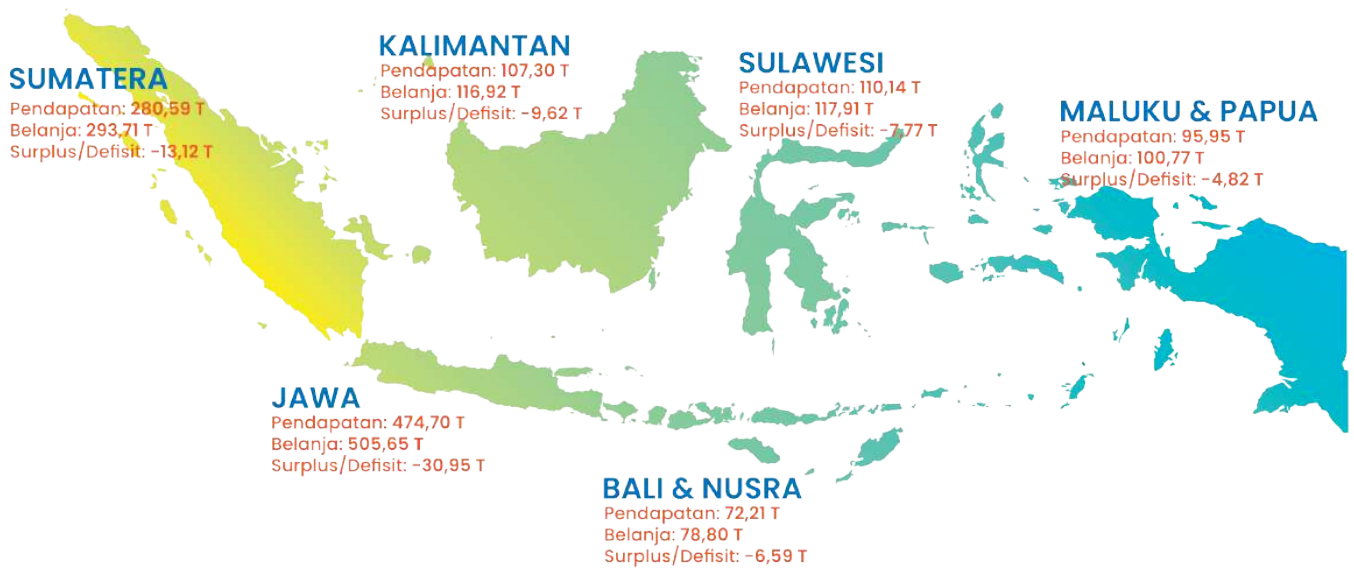
Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/4350 SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA 2022 yang mengamanatkan kenaikan 5-10% BTT daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

GAMBAR 53. PERKEMBANGAN TARGET KOMPONEN APBD (2019-2021)



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

GAMBAR 54. PELAKSANAAN APBD DI TINGKAT REGIONAL



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

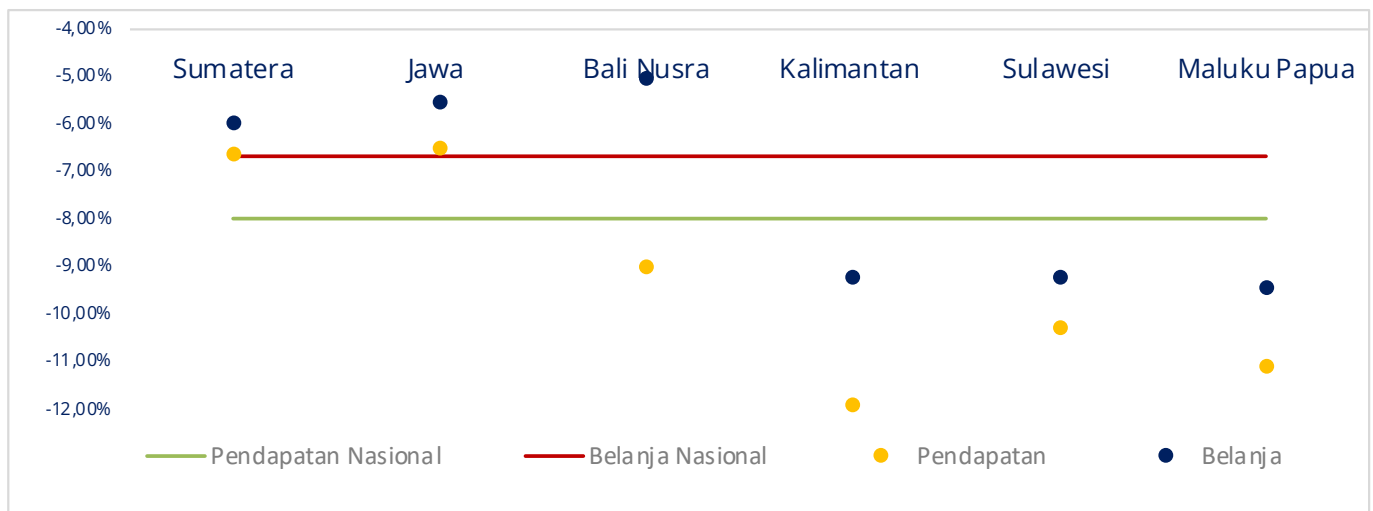
Defisit nasional mengalami penyempitan dari target yang diestimasikan, Untuk menutup defisit, pembiayaan netto yang juga mengalami kenaikan sebesar 73,69 M atau 20,79% dibandingkan dengan pembiayaan tahun lalu, telah direalisasikan. Pembiayaan ini dikontribusikan oleh kenaikan penerimaan pinjaman daerah dari program PEN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Disisi lain, pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA TYL mengalami penurunan 10,2% apabila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Di tingkat regional, wilayah Jawa dan sekitarnya masih menjadi kontributor terbesar pendapatan nasional dengan porsi 42,4% diikuti oleh Regional Sumatera (24,63%), Sulawesi (9,89%), Kalimantan (9,80%), Maluku Papua (8,45%) dan Bali Nusra (6,61%). Apabila dibandingkan dengan persentase pertumbuhan

pendapatan nasional, Regional Sumatera (-6,48%) dan Jawa (-6,61%) berada diatas sedangkan keempat regional lainnya memiliki pertumbuhan pendapatan dibawah nasional (-7,97%) diantaranya Regional Bali Nusra (-8,99%), Sulawesi (-10,25%), Maluku Papua (-11,06%), dan Kalimantan (-11,89%). Dari sisi belanja, tercatat tiga regional yakni Jawa (-5,51%), Sumatera (-5,97%), dan Bali Nusra (-5,04%) memiliki tingkat pertumbuhan belanja diatas sedangkan untuk Regional Kalimantan (-9,2%), Sulawesi (-9,19%), dan Maluku Papua (-9,43%) masih berada dibawah nasional.

Sejalan dengan ukuran perekonomiannya yang besar, Regional Jawa adalah wilayah dengan defisit yang terbesar di Indonesia. Dari sisi pembiayaan, pembiayaan netto seluruh regional tumbuh pada

GAMBAR 55. PERTUMBUHAN REALISASI APBD REGIONAL DIBANDINGKAN NASIONAL



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

kisaran 9% - 81,3%. Pertumbuhan pembiayaan tertinggi terjadi pada Regional Sulawesi sedangkan terendah pada Regional Kalimantan.

2.I.A. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 tercatat 1.140,89 Triliun atau mencapai 98,9% dari target pendapatan akumulatif sampai dengan akhir tahun. Capaian ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun lalu (89,98%). Meskipun capaiannya naik, nominal realisasi pendapatan daerah berkontraksi 7,97%. Hal ini disebabkan adanya penurunan target pendapatan daerah sebesar 84,15 T (7,28%).

Pajak Daerah masih menjadi pendapatan penopang terbesar PAD. Pada 2021, terjadi kenaikan capaian realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan target sebesar 12% dibandingkan tahun lalu. Selain pajak, seluruh komponen PAD mengalami pertumbuhan khususnya untuk jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPD). Kenaikan paling minim terjadi pada pendapatan retribusi daerah, yakni sebesar 1%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan sejumlah mekanisme pada UU Cipta Kerja yang belum disertai perangkat aturan di tingkat daerah, sehingga memunculkan kendala lain dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah retribusi dalam rangka pengajuan izin usaha.

Disamping PAD, dana perimbangan memegang peranan penting bagi kelangsungan pemulihan ekonomi di daerah. Di Tahun 2021, kontribusi dana transfer mencapai 802,47 T atau 57,48% dari total seluruh pendapatan daerah. Nilai ini sebagian besar direalisasikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji PNS Daerah. Realisasi DAU 2021 mengalami

penurunan 1,02% dibandingkan Tahun 2020. Selain DAU, komponen DID (27,03%) dan Otsus (0,48%) juga mengalami penurunan. Sebaliknya, belanja pendapatan DBH mengalami kenaikan signifikan (24,71%) yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari sektor migas dan batubara.

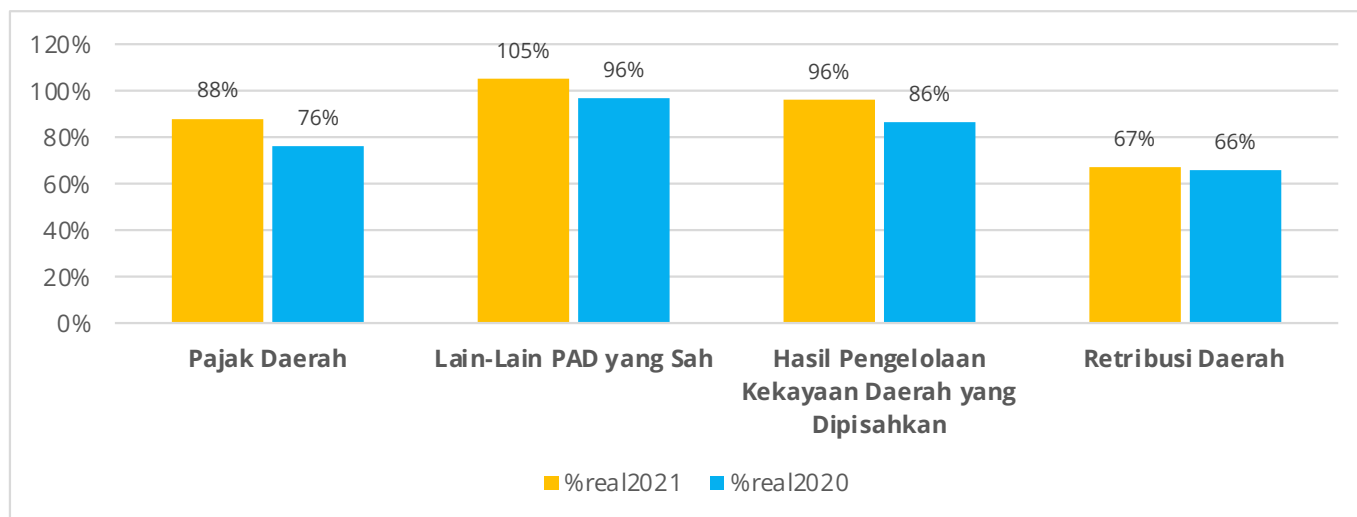
Hampir keseluruhan PAD regional mengalami penurunan realisasi belanja dibandingkan tahun lalu. Penurunan PAD tertinggi terjadi pada Regional Bali Nusra sebesar 16,61% yang disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan dari sektor pariwisata yang merupakan unggulan Provinsi Bali belum sepenuhnya pulih. Hal ini juga yang berkontribusi menaikkan ketergantungan Regional Bali Nusra terhadap pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar 11,08%.

Disisi lain, PAD pada Regional Maluku Papua yang mengalami kenaikan sebesar 14,16%. Pada regional ini, terlihat kenaikan PAD yang mencolok di Provinsi Papua yang naik sebesar 49%. Apabila ditelusuri lebih jauh, komponen lain-lain PAD yang sah menyumbang 46% dari keseluruhan PAD Provinsi Papua. Sejalan dengan PAD, kenaikan pendapatan dari dana transfer sebesar 22,25% juga terjadi pada regional ini yang mengindikasikan rendahnya tingkat kemandirian sehingga kebijakan local taxing power harus terus digalakkan. Sebaliknya LLPD yang Sah pada regional ini mengalami penurunan tajam (94,95%) terutama yang berasal dari hibah.

2.I.B. BELANJA DAERAH

Realisasi belanja daerah Tahun 2021 tercatat 1.213,77 Triliun atau mencapai 97,45% dari target belanja yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Persentase capaian belanja ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun lalu (86,26%).

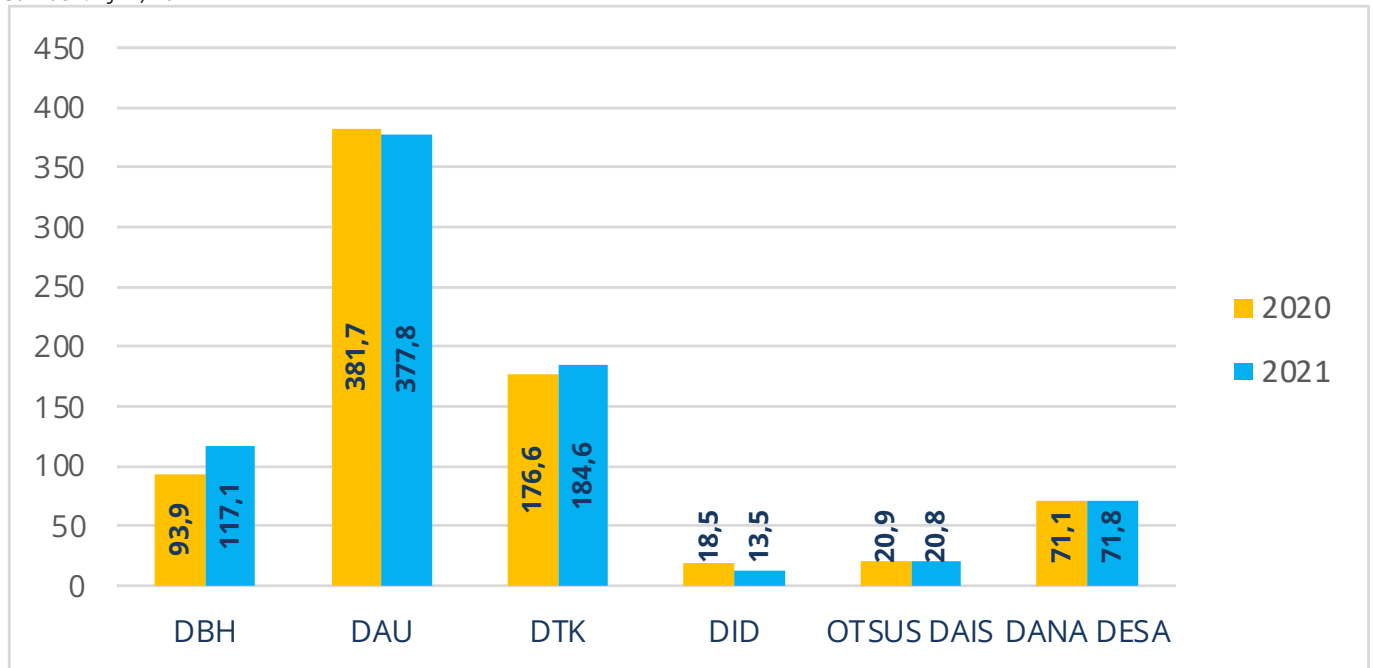
GAMBAR 56. PERTUMBUHAN REALISASI KOMPONEN PAD



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

GAMBAR 57. PERTUMBUHAN REALISASI KOMPONEN PENDAPATAN TRANSFER

Sumber : DJPK, 2021



Meskipun capaiannya naik, nominal realisasi belanja daerah terkonsentrasi 6,66%. Hal ini disebabkan adanya penurunan alokasi belanja daerah sebesar 86,58 T (0,97%).

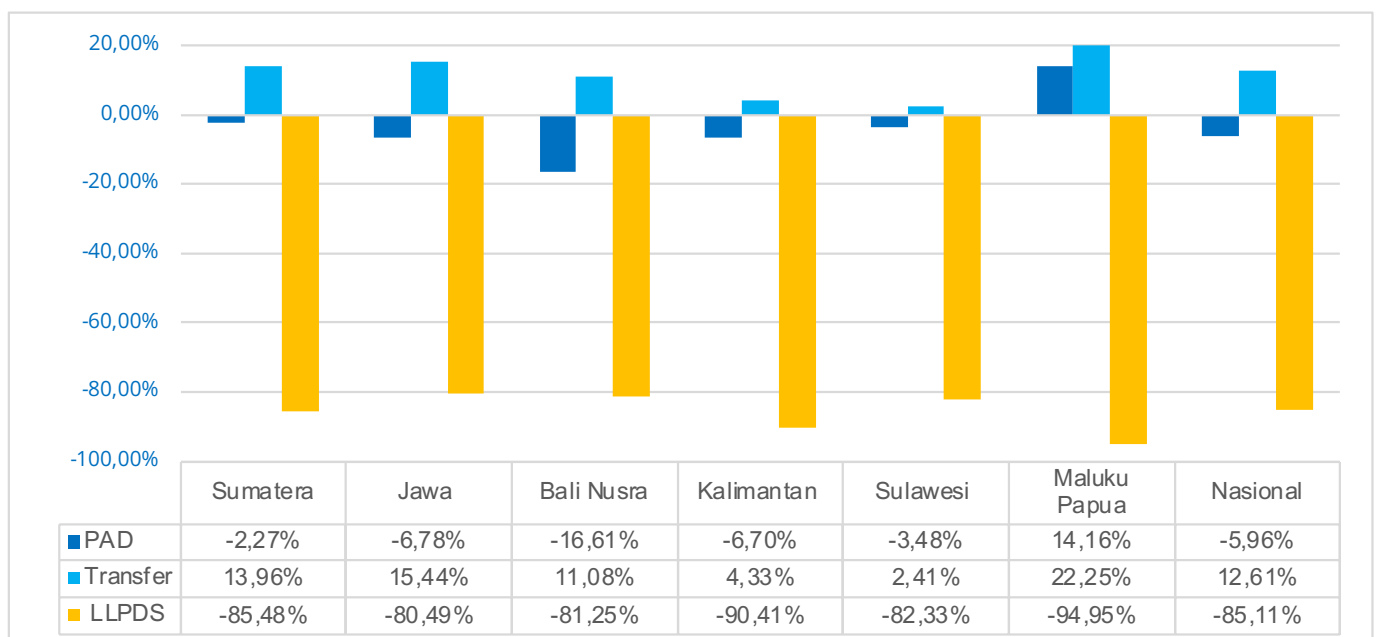
Berdasarkan komposisi, belanja operasi merupakan jenis belanja APBD 2021 terbesar dengan realisasi mencapai 828,93 T atau 68% dari seluruh belanja. Pada posisi kedua dan ketiga, belanja modal dan transfer terealisasi sebesar 15% dan 16% atau sebesar 193,62 T dan 179,24 T. Selain ketiga belanja ini, terdapat belanja tidak terduga yang terealisasi

sebesar 1% atau setara 11,98 T.

Belanja operasi didominasi oleh pembayaran belanja pegawai pada seluruh regional. Meskipun jumlahnya terbilang besar, belanja pegawai di daerah mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 dengan persentase penurunan sebesar 7% - 9% pada tiap regional.

Pertumbuhan belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bansos cukup variatif di tiap regional. Pergerakan belanja barang dan jasa

GAMBAR 58. PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL PER JENIS



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

selama kurun waktu dua tahun cukup variatif antara (-3,03%) - 3,65%. Penurunan belanja barang dan jasa tertinggi terjadi pada Regional Bali Nusra sedangkan peningkatan belanja tertinggi terjadi pada Regional Kalimantan.

Untuk jenis belanja bunga, pertumbuhan belanja terjadi pada Regional Sulawesi (54,02%), Jawa (59,09%), dan Bali Nusra (23,18%). Untuk jenis belanja subsidi, hanya Regional Sulawesi yang mengalami kenaikan belanja sebesar 32,79%. Pada jenis belanja hibah, kenaikan belanja Tahun 2021 terjadi untuk Regional Sumatera (1,8%), Jawa (6,24%), dan Bali Nusra (16,1%). Sedangkan untuk belanja bansos, masih terjadi

pertumbuhan belanja untuk Regional Sumatera (121,36%), Jawa (34,79%) dan Maluku Papua (6,47%).

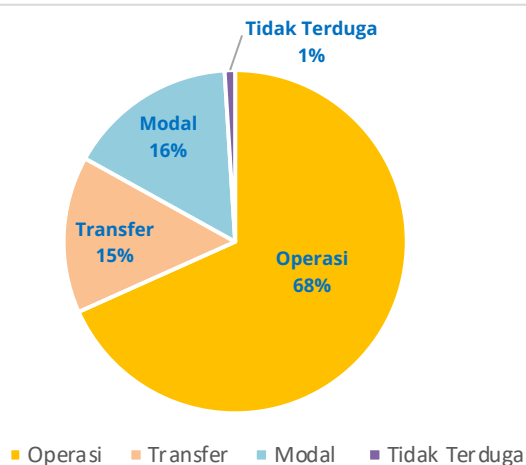
Selain belanja operasi, belanja modal dan transfer APBD 2021 juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi pada seluruh regional dengan persentase penurunan belanja modal berkisar 9,4% – 21,1% dan belanja transfer sebesar 4,0% -16,5%. Disisi lain, terjadi pertumbuhan BTT pada seluruh regional pada kisaran 103,3%-491,6%.

2.I.C. SURPLUS/DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Realisasi defisit APBD Tahun 2021 sebesar Rp72,87 triliun. Nilai defisit tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp60,60 Triliun di Tahun 2020. Realisasi defisit tahun 2021 lebih rendah dari target sebesar 91,95 Triliun atau mencapai 79,25%. Defisit anggaran tahun 2021 dibiayai terutama melalui penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah pusat. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terutama digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19, seperti pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung penguatan reformasi. Persentase SILPA mengalami pertumbuhan dari sebelumnya turun 36% di 2021 menjadi 103% di 2022 yang mengindikasikan kenaikan sumber pembiayaan yang didapatkan Pemda di 2021.

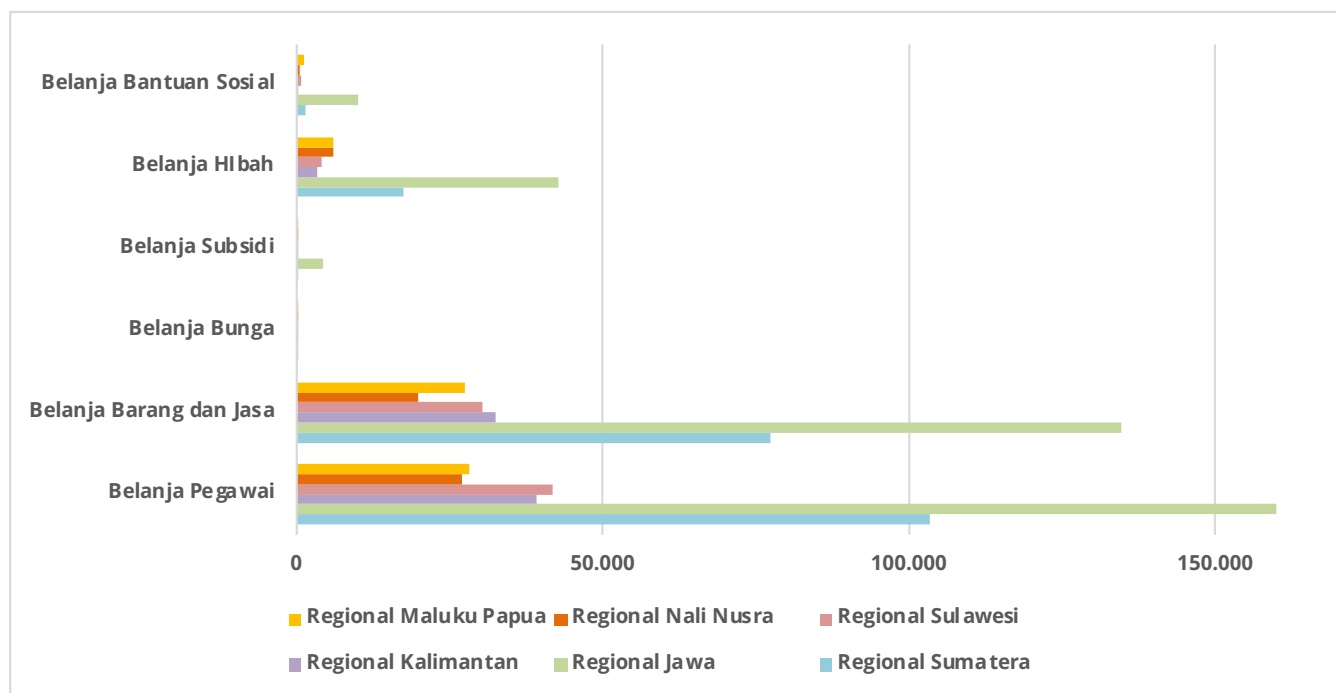
Sejalan dengan pelebaran defisit, terjadi peningkatan

GAMBAR 59. KOMPOSISI BELANJA APBD 2021



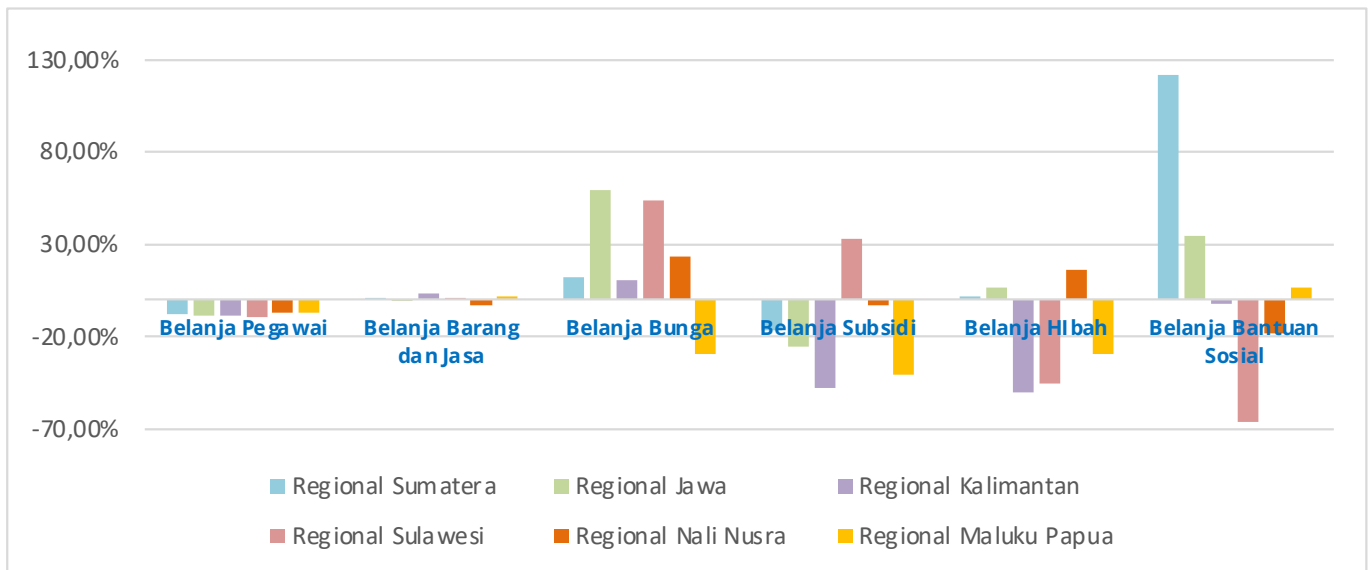
Sumber : LKPP 2021 Unaudited

GAMBAR 60. REALISASI KOMPONEN BELANJA OPERASI REGIONAL



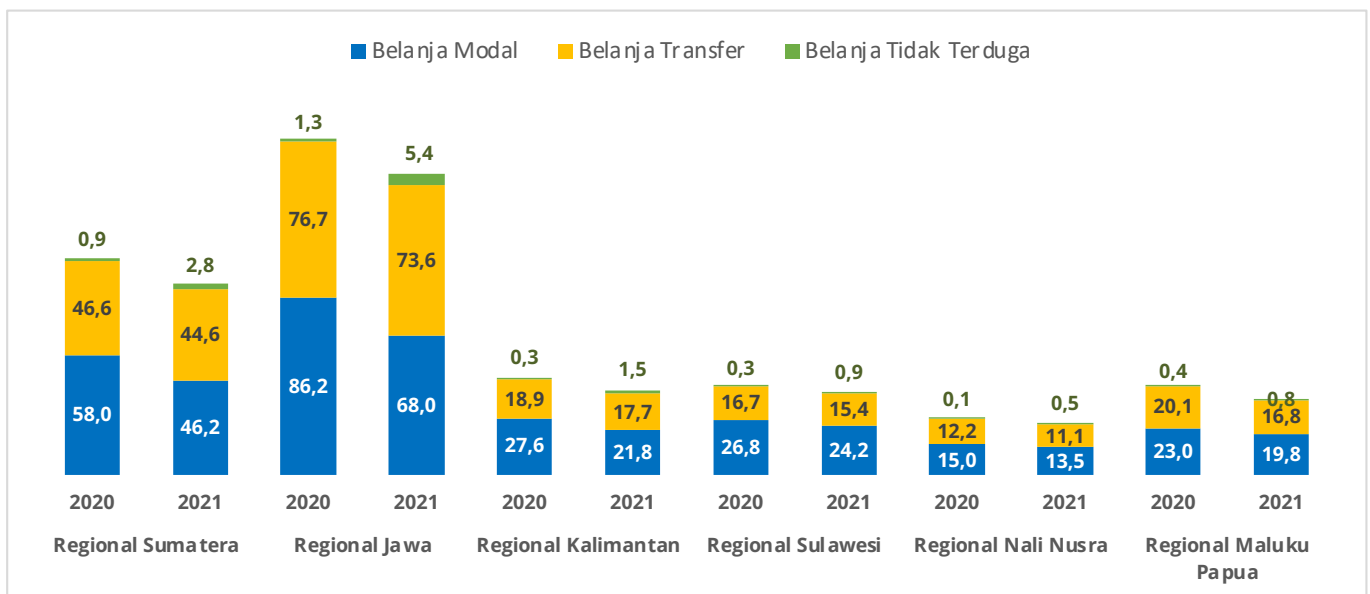
Sumber : LKPP 2021 Unaudited

GAMBAR 61. PERTUMBUHAN BELANJA OPERASI PER REGIONAL (2020-2021)



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

GAMBAR 62. PERTUMBUHAN BELANJA DI LUAR OPERASI PER REGIONAL (2020-2021)



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

pembiayaan dari 61 Triliun di 2020 menjadi 73,69 T di 2021 sehingga SILPA 2021. Jumlah ini mengalami kenaikan dari 403 T (2020) menjadi 819 T(2021). Kontributor terbesar penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar 60,06 T atau setara 64% dari seluruh penerimaan pembiayaan. Komponen ini mengalami penurunan 9,24% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 66,18 T. Sebaliknya, sumber penerimaan pinjaman daerah yang berkontribusi 36% dari total penerimaan pembiayaan, mengalami kenaikan 70,36% atau 23,63 T dibandingkan Tahun 2020. Kenaikan pinjaman daerah terutama bersumber dari pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka pinjaman PEN daerah.

Disisi lain, komponen Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih menjadi kontributor dominan dari seluruh pengeluaran yang akan diterima kembali pada periode anggaran berjalan/mendatang dengan nominal mencapai 15,17 T dan persentase mencapai 74%. Pengeluaran pada komponen ini mengalami kenaikan 31% apabila dibandingkan dengan Tahun 2021. Selain PMD, komponen pembayaran cicilan pokok utang juga mengalami kenaikan dibandingkan dari 4,07 T menjadi 4,50 T.

Perkembangan defisit regional mengalami kenaikan berkisar 9% - 81,3% pada seluruh wilayah. Persentase kenaikan defisit terendah adalah Regional Sulawesi sedangkan tertinggi adalah Regional Bali Nusra.

Pelebaran defisit disebabkan oleh belum pulihnya pendapatan pada sektor pariwisata.

Sebaliknya, pembiayaan regional cenderung mengalami kenaikan baik dari penerimaan maupun pengeluaran kecuali untuk Regional Maluku Papua yang mengalami penurunan pengeluaran pembiayaan sebesar 22,22% yang disebabkan penurunan pengeluaran pembayaran cicilan pokok utang.

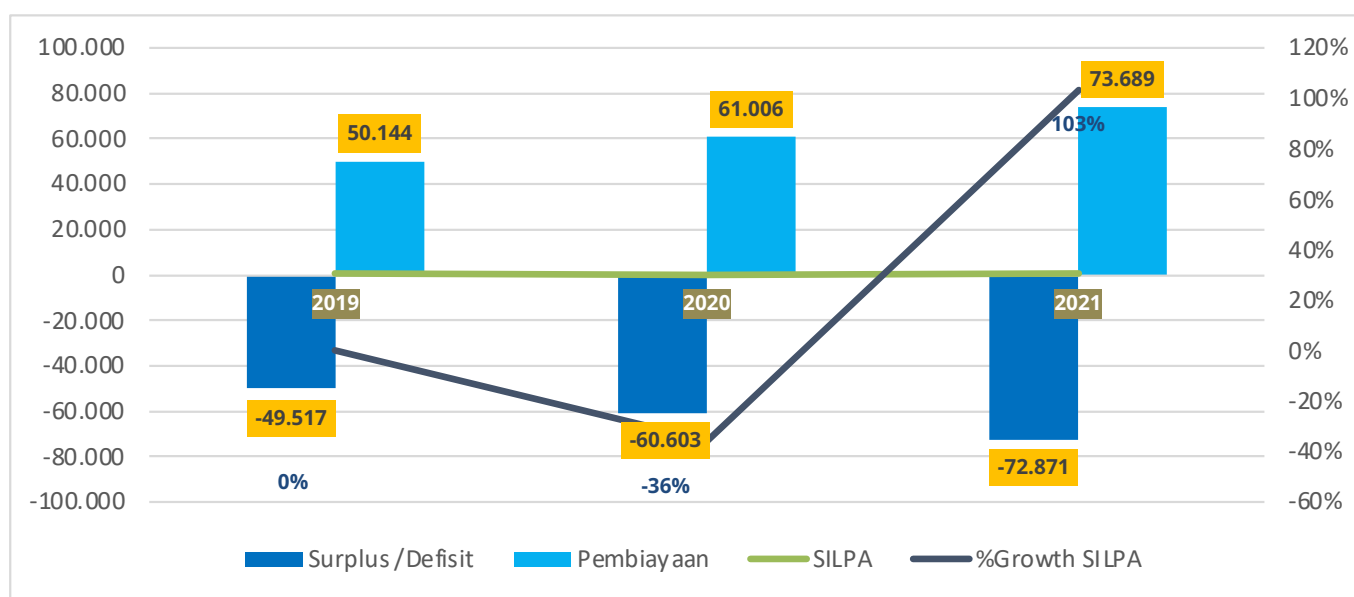
3. ANALISIS FISKAL KONSOLIDASIAN

Tahun 2021, seluruh pendapatan tumbuh positif kecuali pendapatan hibah, berbanding terbalik dengan belanja negara yang kontraksi memasuki fase penurunan status pandemi covid-19 menjadi endemi.

3.1. OVERVIEW KINERJA ANGGARAN KONSOLIDASIAN

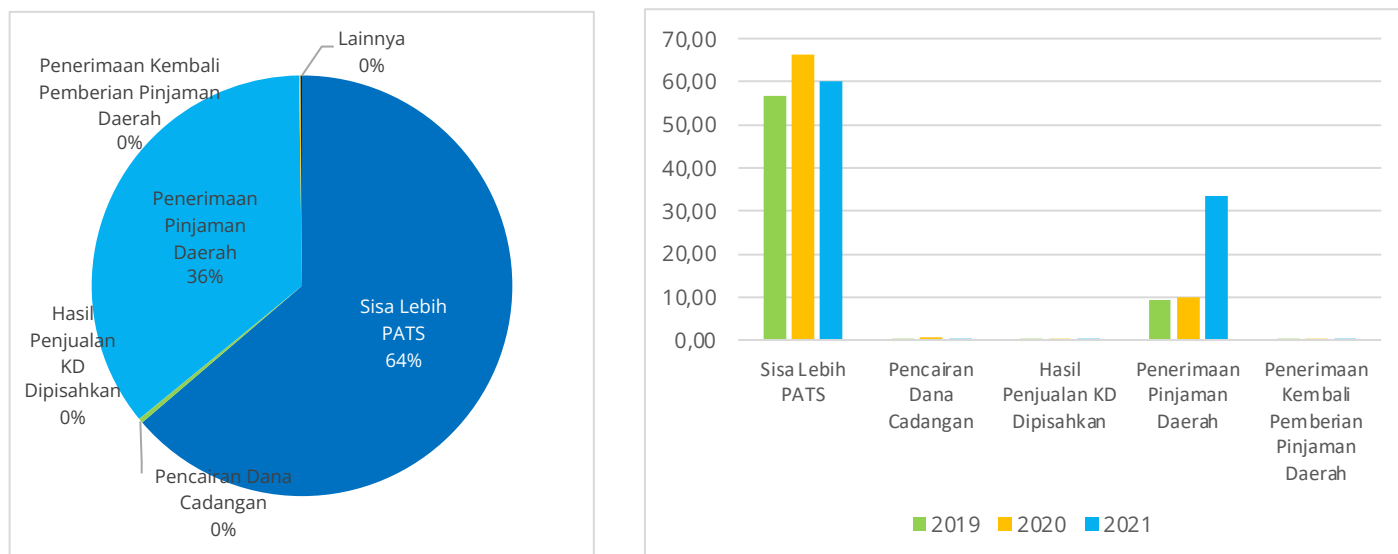
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah

GAMBAR 63. PERTUMBUHAN KOMPONEN SURPLUS/DEFISIT, PEMBIAYAAN, DAN SILPA (2020-2021)



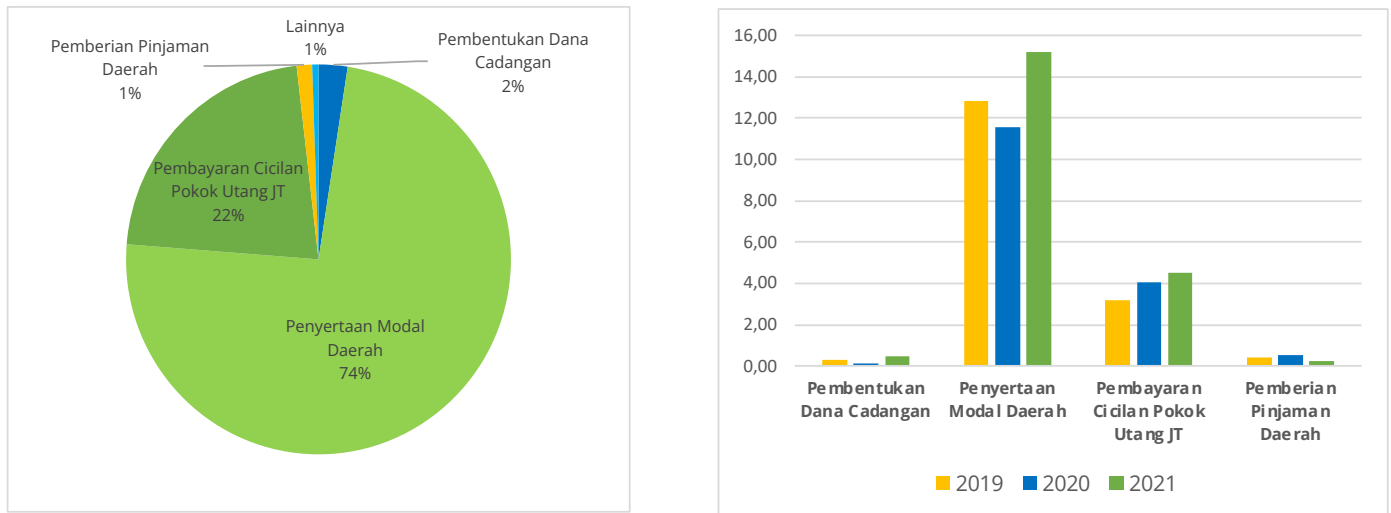
Sumber : LKPP 2021 Unaudited

GAMBAR 64. KOMPOSISI DAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN (2019-2021)



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

**GAMBAR 65. PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
(2019-2021)**



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan eliminasi terhadap akun resiprokal sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 11 maka Pendapatan Transfer dalam LRA Konsolidasian dieliminasi sebesar Belanja Transfer selain Dana Desa sehingga pada pos Pendapatan Transfer nilainya nol dan Belanja Transfer hanya sebesar Dana Desa.

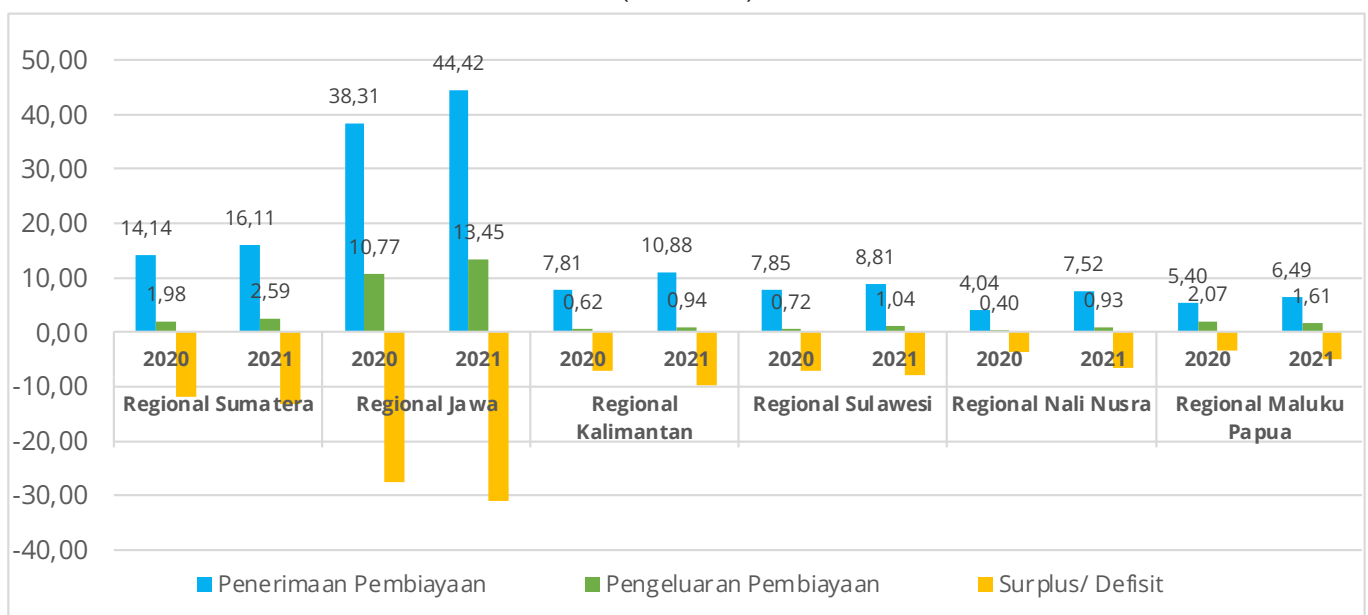
Pada tahun 2021, Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian dialokasikan sebesar Rp2.286,34 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp1.739,48 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp543,54 triliun, dan Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar Rp3,32 triliun, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah

Daerah dieliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat. Alokasi Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut didominasi oleh Pendapatan Perpajakan yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp99,71 triliun atau 6,08 persen dari Pendapatan Perpajakan Tahun 2020.

Pada periode yang sama, Pendapatan Bukan Pajak juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp90,6 triliun atau 20,00 persen, sedangkan Pendapatan Hibah mengalami kontraksi sebesar Rp26,39 triliun atau 88,83 persen dari tahun 2020.

Belanja Negara Konsolidasian Tahun 2021 sebesar Rp3.070,79 triliun yang didominasi oleh Belanja Pemerintah dengan kontribusi sebesar 95,73 persen sedangkan sisanya 4,27 persen merupakan belanja Dana Desa (Belanja TKDD pada Pemerintah Pusat

**GAMBAR 66. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN REGIONAL
(2020-2021)**



Sumber : LKPP 2021 Unaudited

selain Dana Desa dieliminasi dengan pendapatan Transfer pada Pemerintah Daerah – akun resiprokal). Belanja Konsolidasian tahun 2021 kontraksi sebesar Rp151,45 triliun atau sebesar 4,70 persen dibandingkan dengan tahun 2020.

Pada Tahun 2021 Defisit Anggaran Konsolidasian diperkirakan sebesar Rp784,45 triliun. Defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp315,37 triliun atau 28,67 persen jika dibandingkan dengan Konsolidasian tahun 2020. Sumber pembiayaan untuk menutup Defisit diperkirakan berasal dari Pembiayaan Konsolidasian sebesar Rp941,52 triliun yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp950,99 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri Konsolidasian sebesar minus Rp9,47 triliun. Sehingga diperkirakan SiLPA Konsolidasian tahun 2021 sebesar Rp157,07 triliun.

3.II. PERKEMBANGAN PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Dalam LKPK menggunakan istilah Pendapatan untuk setiap jenis Pendapatan dan Hibah dalam lembar muka laporan keuangan (Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Pendapatan Hibah) dalam rangka konsistensi penggunaan istilah dan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini berbeda dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang menggunakan istilah Penerimaan untuk setiap jenis Pendapatan dan Hibah dalam lembar muka laporan keuangan sebagaimana diatur dalam UU APBN (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah). Namun demikian, hal tersebut hanya merupakan perbedaan istilah dan

tidak mempengaruhi pengakuan dan pengukuran dari Pendapatan yang digunakan LKPK maupun Penerimaan yang digunakan dalam LKPP.

Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian tahun 2021 masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi 76,1 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan kontribusi 23,8 persen. Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2021 mencapai 9,11 persen, rasio ini meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 8,33 persen. Selain karena adanya pemulihan di beberapa sektor, meningkatnya rasio pajak juga dipengaruhi penerimaan pajak tahun 2021 yang melampaui target pemerintah.

3.II.A. ANALISIS PROPORSI PENDAPATAN DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021 Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian mencapai Rp2.286,34 triliun. Di antara empat komponen Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian pada tahun 2021, realisasi Penerimaan Perpajakan menjadi kontributor tertinggi penyumbang pendapatan yakni sebesar 76,1 persen atau setara dengan Rp1.730,48 triliun. Penyumbang pendapatan terbesar kedua adalah Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang menyumbang 23,8 persen atau sebesar Rp543,54 triliun. Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat (kecuali Dana Desa) dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah karena dikategorikan belanja pemerintah pusat sebagai Transfer ke Daerah.

Secara umum, proporsi Penerimaan Negara dan Hibah selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak

TABEL 4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN, APBD, DAN TRANSFER KE DAERAH)

Uraian	2019	2020	2021	Growth 21 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.259,03	2.122,41	2.286,34	7,72
Penerimaan Perpajakan	1.755,11	1.639,77	1.739,48	6,08
Penerimaan Negara Bukan Pajak	500,46	452,94	543,54	20,00
Penerimaan Hibah	3,46	29,71	3,32	(88,83)
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Belanja Negara	2.596,51	3.222,24	3.070,79	(4,70)
Belanja Pemerintah	2.486,25	3.084,42	2.939,57	(4,70)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	110,26	137,82	131,22	(4,79)
Surplus/Defisit Anggaran	(337,48)	(1.099,82)	(784,45)	28,67
Pembiayaan	496,37	1.100,22	941,52	(14,42)
Pembiayaan Dalam Negeri	507,27	1.059,49	950,99	(10,24)
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(10,89)	40,73	(9,47)	(123,25)
SiLPA/SiKPA	158,89	0,40	157,07	39.167,50

mengalami perubahan signifikan, Penerimaan Perpajakan mendominasi dengan porsi rata-rata 76,1 persen sedangkan PNBPN rata-rata 23,8 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2020 dan 2019, kedua komponen Pendapatan Negara tersebut mengalami pertumbuhan di tahun 2021 meskipun terdapat kontraksi pada penerimaan hibah sebesar 88,8%.

3.II.B. ANALISIS PERUBAHAN PENDAPATAN DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Tahun 2021, Pendapatan Negara dan Hibah pada dialokasikan sebesar Rp2.286,34 triliun atau mengalami pertumbuhan 7,7 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.122,42 triliun. Penerimaan Perpajakan baik pusat maupun daerah mengalami pertumbuhan sebesar 6,1 persen dibandingkan tahun 2020 disebabkan bisa

lima tahun terakhir, terutama di masa sulit karena dampak pandemi Covid-19, akhirnya bisa tumbuh di tahun 2021. Pada tahun 2016 rasio perpajakan berada di angka 10,37 persen, turun di 2017 menjadi 9,89 persen, naik di tahun 2018 menjadi 10,24 persen, lalu turun di tahun 2019 menjadi 9,76 persen, dan kembali turun di 2020 menjadi 8,33 persen. Tingkat rasio pajak Indonesia di tahun 2021 mencapai 9,11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kenaikan tax ratio tersebut seiring membaiknya perekonomian Indonesia di tahun lalu. Bahkan, jauh lebih baik dibandingkan saat awal pandemi di 2020.

3.III. PERKEMBANGAN BELANJA KONSOLIDASIAN.

Belanja Konsolidasian adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan

TABEL 5. PROPORSI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021

Uraian	2019		2020		2021	
	Real	Proporsi	Real	Proporsi	Real	Proporsi
Pendapatan Negara dan Hibah	2.259,03	100,0	2.122,42	100,0	2.286,34	100,0
Penerimaan Perpajakan	1.755,11	77,7	1.639,77	77,3	1.730,48	76,1
Pajak Dalam Negeri	1.714,06	75,9	1.606,29	75,7	1.665,79	72,9
Pajak Perdagangan Internasional	41,05	1,8	33,49	1,6	73,70	3,2
Penerimaan Negara Bukan Pajak	500,47	22,2	452,94	21,3	543,54	23,8
Penerimaan Sumber Daya Alam	154,89	6,9	80,62	3,8	150,88	6,6
Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN/D	89,60	4,0	74,92	3,5	39,72	1,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	207,25	9,2	240,59	11,3	226,97	9,9
Pendapatan BLU	48,71	2,2	56,80	2,7	125,97	5,5
Penerimaan Hibah	3,46	0,2	29,71	1,4	3,32	0,1

tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada PNBPN yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,0 persen yang disebabkan kondisi yang sudah mulai stabil akibat pandemi Covid-19.

Pencapaian target pajak tahun 2021 terealisasi karena faktor harga minyak mentah dan komoditas yang naik secara signifikan yang berdampak pada naiknya penerimaan dalam bentuk PPH migas. Selain itu, kinerja positif sektor pertambangan yang tumbuh ikut mengerek pencapaian penerimaan perpajakan.

3.II.C. RASIO PAJAK KONSOLIDASIAN

Rasio Pajak Konsolidasian terhadap Produk Domestik Bruto – Atas Dasar Harga Berlaku (PDB-ADHB) masih rendah. Setelah mengalami tren penurunan dalam

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat/ Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara/ Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada Pemerintah Pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja TKDD pada Pemerintah Pusat dengan Pendapatan Transfer pada Pemerintah Daerah merupakan akun resiprokal sehingga perlu dilakukan eliminasi sehingga Belanja Transfer pada LKPK hanya berupa Dana Desa.

3.III.A. ANALISIS PROPORSI BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

TABEL 6. PERUBAHAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021

Uraian	2019 Real	2020 Real	Growth	2021 Real	Growth
Penerimaan Perpajakan	1.755,11	1.639,77	-6,6%	1.739,48	6,1%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	500,47	452,94	-9,5%	543,54	20,0%
Penerimaan Hibah	3,46	29,71	758,7%	3,32	-88,8%
Total	2.259,04	2.122,42	-6,0%	2.286,34	7,7%

Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2021 mencapai Rp3.070,79 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah sebesar Rp2.939,57 triliun dan Belanja Transfer sebesar Rp131,22 triliun.

Secara keseluruhan, Belanja Negara Konsolidasian pada tahun 2021 kontraksi dibandingkan dengan tahun 2020 namun masih meningkat dibanding tahun 2019. Dalam kurun 2019-2020 tahun terakhir, Belanja Pegawai masih menjadi belanja yang memiliki porsi terbesar yakni rata-rata 26,3 persen. Namun pada tahun 2021 porsi belanja terbesar ada pada belanja barang dengan besar realisasi Rp856,4 triliun atau 27,9 persen dari total belanja negara. Belanja barang yang tinggi disebabkan adanya pembayaran klaim pasien covid-19 dan program vaksinasi yang masiv di tahun 2021.

Proporsi belanja pegawai tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 26,3 persen menjadi 24,4 persen dari total belanja negara. Sedangkan pada belanja modal terjadi pertumbuhan sebesar 1,4 persen. Dana transfer masih stagnan dengan porsi sebesar 4,3 persen.

3.III.B. ANALISIS PERUBAHAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

Secara keseluruhan, Belanja Negara Konsolidasian tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 4,7 persen. Disebabkan Belanja Lain-lain kontraksi secara

signifikan sebesar 80 persen. Kontraksi belanja lain-lain disebabkan adanya perbedaan akun belanja untuk penanganan pandemi covid-19 di tahun 2021 yang sudah di pos-pos kan sesuai dengan belanja yang sebenarnya, berbeda di tahun 2020.

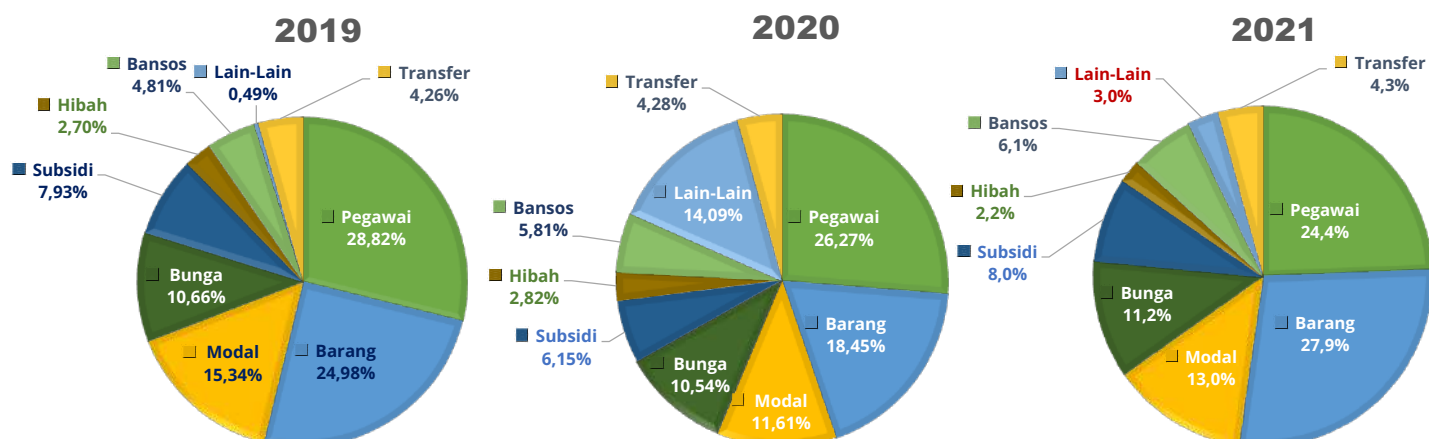
belanja untuk penanganan covid-19 masih dianggarkan pada belanja lain-lain karena alasan keadaan kahar. Selain belanja lain-lain kontraksi juga dialami pada belanja hibah sebesar 25,5 persen, belanja pegawai sebesar 11,5 persen dan belanja transfer 4,8 persen. Kenaikan belanja barang sebesar 44,1 persen dengan alasan yang sama pada belanja lain-lain yaitu adanya pengalihan pos akun covid-19.

3.III.C. RASIO BELANJA KONSOLIDASIAN

Rasio Belanja konsolidasian merupakan perbandingan antara jumlah total belanja konsolidasian terhadap pendapatan suatu output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja konsolidasian perkapita merupakan perbandingan antara jumlah belanja konsolidasian dengan jumlah penduduk.

Rasio total belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk tahun 2021 adalah Rp10,73 juta per kapita. Hal ini berarti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya, selama tahun 2021 pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp10,73 juta untuk setiap jiwa penduduknya. Rasio tersebut menurun dibandingkan tahun 2020, namun masih diatas tahun 2019.

GAMBAR 67. PROPORSI BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021



TABEL 7. RASIO BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Belanja Pemerintah Konsolidasian	2.488,27	3.086,44	2.939,57
PDB-AHDB	16.043,58	15.785,68	16.970,8
Rasio Belanja - PDB	15,5	19,6	17,3
Jumlah Penduduk	266,91	269,60	273,86
Rasio Belanja - Populasi	9.322.435,2	11.448.073,9	10.733.853,6

3.III.D. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN

Pemerintah Indonesia ber tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan belanja pemerintah. Peningkatan belanja tersebut tidak mampu diimbangi oleh peningkatan pendapatan negara. Sehingga menyebabkan anggaran selalu defisit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara rasio defisit anggaran tidak dapat melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena defisit anggaran akan meningkatkan potensi untuk berhutang di kemudian hari. Maka perlu dibatasi sehingga keuangan negara dapat dikelola dengan baik.

Pada tahun 2021 adalah masa pemulihan dari pandemi Covid-19 yang puncaknya berada di tahun 2020 lalu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perpu tersebut disebutkan bahwa rasio defisit dapat melebihi 3 persen sampai dengan tahun 2022.

Pemerintah berusaha sangat ketat menjaga rasio defisit anggaran APBN terhadap PDB selalu di bawah 3 persen sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menguncang perekonomian hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Di tahun 2021 ini pemerintah berhasil menekan rasio defisit dari 6,97 persen

menjadi 4,62 persen berkat naiknya pendapatan negara dimana salah satunya adalah target pajak yang mencapai target. Meskipun sudah berhasil turun dari tahun lalu defisit anggaran belum menyentuh angka ideal yaitu 3,0 persen. Pelebaran defisit tersebut masih diperlukan pemerintah untuk penanganan pandemi covid-19 dimana berfokus pada vaksinasi massal untuk membentuk herd immunity. Diharapkan dengan program vaksinasi tersebut masyarakat bisa hidup sejalan dengan virus yang tidak mungkin bisa di musnahkan seluruhnya dan membentuk tatanan The New Normal atau kondisi normal yang baru.

3.IV. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak Maret 2020 memaksa pemerintah mengambil langkah extraordinary dengan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan belanja dan menurunkan penerimaan pajak. Kebijakan yang mengubah postur APBN dan APBD tahun 2020 tersebut diambil pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi akibat melambatnya aktivitas ekonomi. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan.atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

TABEL 8. RASIO DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Belanja Pemerintah Konsolidasian	2.488,27	3.086,44	2.939,57
PDB-AHDB	16.043,58	15.785,68	16.970,8
Rasio Belanja - PDB	15,5	19,6	17,3
Jumlah Penduduk	266,91	269,60	273,86
Rasio Belanja - Populasi	9.322.435,2	11.448.073,9	10.733.853,6

Secara spasial dapat dilihat bahwa rasio defisit Anggaran Konsolidasian terhadap PDRB masing-masing regional sangat bervariasi, paling rendah 2,33 persen pada regional Jawa dan tertinggi 10,77 persen pada regional Bali & Nusra. Kontribusi PDRB pada regional Kalimantan sebesar 8,26 persen merupakan tertinggi ketiga setelah regional Jawa dan Sumatera dengan pertumbuhan PDRB 11,8 persen ditahun 2021 yang merupakan tertinggi ketiga setelah regional Jawa dan Papua. Rasio defisit regional Kalimantan tergolong paling rendah kedua setelah regional Jawa. Angka-angka tersebut menunjukkan kemampuan ekonomi regional Kalimantan dalam menghadapi tantangan COVID-19 lebih baik dibandingkan kawasan lainnya yang ditunjukan dengan laju PDRB yang tumbuh 11,8 persen yoy, tertinggi kedua di seluruh regional.

Pada regional Maluku & Papua, memiliki kontribusi PDRB yang paling rendah sebesar 2,49 persen, dengan rasio defisit terendah sebesar 31,16. Namun regional Maluku & Papua memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan seluruh regional dengan laju pertumbuhan sebesar 13,88 persen yoy.

Rasio pajak konsolidasian terhadap PDRB juga variatif dengan rasio terendah berada di regional Sulawesi sebesar 2,95 persen dan rasio tertinggi selalu pada regional Jawa dengan tingkat rasio sebesar 14,97 persen di tahun 2021. Kontribusi pajak terbesar juga berada di regional Jawa sebesar 70 persen, hal ini tidak bisa dipungkiri karena pusat perekonomian masih terpusat di regional Jawa terutama provinsi DKI Jakarta. Kontribusi pajak terbesar kedua berada pada regional Sumatera sebesar 10 persen. Posisi strategis yang dekat dengan ibukota negara membuat regional Sumatera lebih maju dibandingkan regional lainnya.

3.IV.A. REGIONAL SUMATERA

Hasil konsolidasi antara laporan keuangan

pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi di regional Sumatera menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir mengalami defisit. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah hanya mampu menutup defisit anggaran sebesar rata-rata 9,6 persen dan menghasilkan SiKPA Rp162,97 triliun atau turun 20,8 persen dari tahun sebelumnya.

3.IV.A.1. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Hingga akhir tahun 2021, realisasi pendapatan negara dan hibah konsolidasian regional Sumatera sebesar Rp 196,4 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 22,3 persen yoy. Rebound terjadi karena sudah mulai membaiknya perekonomian akibat program vaksinasi massal sebagai langkah awal menuju immunity herd. Meskipun masih terjadi refocussing anggaran dalam rangka stabilitas ekonomi yang menyebabkan naiknya belanja negara sebesar 5,9 persen, hal ini dapat ditangani dengan tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2021.

Pada regional Sumatera penerimaan perpajakan tumbuh 47,4 persen yoy dan masih menjadi penyumbang utama pendapatan negara di regional Sumatera dengan kontribusi sebesar 70,3 persen.

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB regional Sumatera pada tahun 2021 mencapai 3,8 persen. Angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan rasio Pajak Konsolidasian nasional terhadap PDB yang mencapai 9,11 persen. Rasio pajak di regional Sumatera mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini bendanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi regional Sumatera yang tumbuh 9,27 persen. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan terhadap rasio pajak per kapita regional Sumatera yang mencapai 2,3 triliun per juta jiwa dengan kenaikan penduduk pada regional Sumatera 630 ribu jiwa selama tahun 2021.

GAMBAR 68. PETA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2021 PER REGIONAL



3.IV.A.2. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

Tahun 2021, secara agregat belanja konsolidasian pada regional Sumatera mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen yoy. Dari total belanja Rp375,09 triliun, sebesar 91,5 persen adalah untuk belanja pemerintah dan sisanya adalah belanja transfer ke daerah/desa. Secara spasial tiga provinsi yang memiliki kontribusi Belanja Negara tahun 2021 terbesar pada regional Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 19,0 persen, Provinsi Lampung sebesar 15,5 persen dan Provinsi Aceh sebesar 14,1 persen.

Jika dibandingkan komposisi Belanja Pemerintah antara tahun 2020 dengan 2021, terlihat komposisi belanja masih relatif sama secara total dengan proporsi tertinggi pada belanja pegawai sebesar 41,2 persen di tahun 2020 dan 41,9 persen di tahun 2021. Belanja Pegawai, Barang dan Modal mengalami pertumbuhan di tahun 2021, artinya pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat dengan rebound belanja-belanja tersebut. Rasio belanja terhadap PDRB meningkat di tahun 2021 menjadi 11,06 juta per kapita yang artinya masih diperlukan sekali APBN sebagai shock absorber

pada masa pemulihan pandemi untuk menyokong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. pada belanja lain-lain terutama belanja hibah. Rasio belanja terhadap PDRB meningkat di tahun 2021 menjadi 11,06 juta per kapita yang artinya masih diperlukan sekali APBN sebagai shock absorber pada masa pemulihan pandemi untuk menyokong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3.IV.A.3. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021, defisit Pemerintah konsolidasian pada regional Sumatera mencapai minus Rp178,69 triliun dengan tingkat rasio pada PDRB sebesar 4,9 persen atau kontraksi 25,7 persen dari tahun lalu. Dibandingkan dengan rasio defisit Pemerintah terhadap total PDB nasional sebesar 4,62 masih diatasnya sedikit. Penerimaan masih bisa dioptimalkan lagi meskipun sudah mulai membaik apabila dibandingkan tahun lalu yang memiliki rasio defisit hingga 6,6 persen. Pemerintah perlu usaha ekstra lagi untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan yang ada khususnya sektor unggulan.

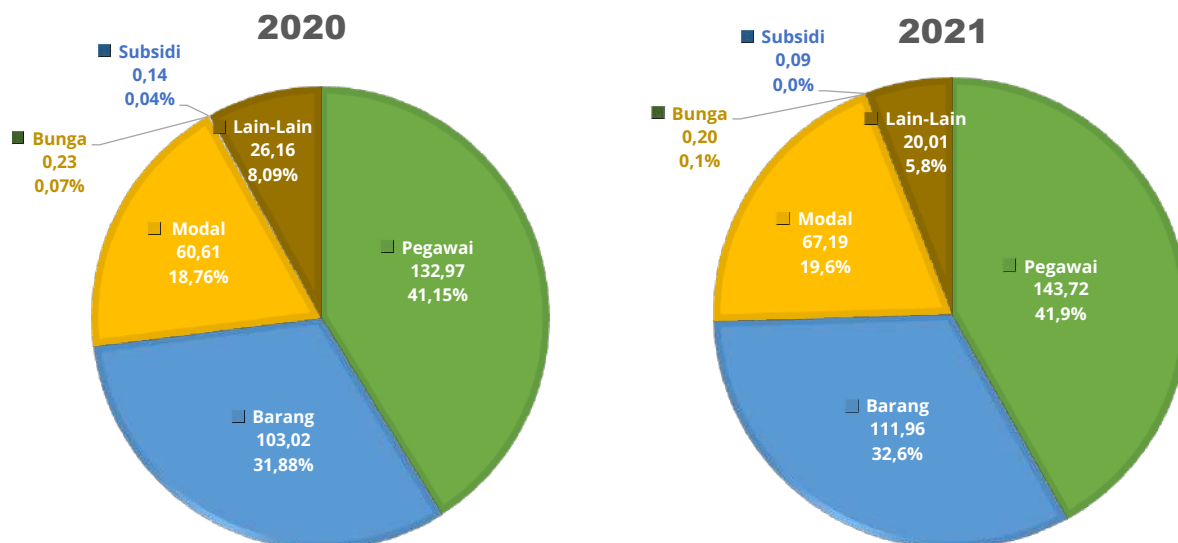
TABEL 9. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2019	2020	2021	Growth 21 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	183,96	160,56	196,40	22,3%
Penerimaan Perpajakan	109,23	93,63	138,01	47,4%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	29,09	27,76	53,70	93,4%
Penerimaan Hibah	5,61	4,61	4,60	-0,2%
Belanja Negara	418,65	384,29	407,01	5,9%
Belanja Pemerintah	351,79	321,02	375,09	16,8%
Belanja Transfer	66,86	63,27	31,92	-49,5%
Surplus/Defisit Anggaran	(234,68)	(223,73)	(178,69)	20,1%
Pembiayaan	17,18	17,84	15,72	-11,9%
SILPA/SiKPA	(217,50)	(205,89)	(162,97)	20,8%

TABEL 10. INDIKATOR FISKAL REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (Triliun Rupiah)	109,23	93,63	138,01
Surplus/defisit Konsolidasian (Triliun Rupiah)	(234,68)	(223,73)	(178,69)
Belanja Konsolidasian (Triliun Rupiah)	418,65	384,29	375,09
PDRB (Triliun Rupiah)	3.413,33	3.371,98	3.679,16
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	58,56	58,56	59,19
Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	3,2	2,8	3,8
Rasio Pajak Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	1,9	1,6	2,3
Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB (%)	6,9	6,6	4,9
Rasio Belanja Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	7,2	6,5	10,2

GAMBAR 69. PROPORSI BELANJA NEGARA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2020-2021



3.IV.B. REGIONAL JAWA

Hasil konsolidasi antara laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2019 regional Jawa mampu mendapatkan surplus anggaran sebesar Rp191,56 triliun. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami defisit, terutama kontraksi terdalam pada tahun 2020 hingga menyentuh Rp713,41 triliun dimana wabah pandemi Covid-19 masih dalam masa kritisnya. Namun di tahun 2021 sudah mulai bangkit ditunjukkan dengan pengurangan defisit negara sebesar 67,9 persen menjadi Rp229,12 triliun.

Pengurangan defisit pada tahun 2021 dipengaruhi oleh kenaikan Pendapatan Negara sebesar 12,9 persen yoy. Meskipun pendapatan tumbuh namun terjadi kontraksi pada Belanja Negara sebesar 11,1 persen. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kontraksi pada Belanja Transfer pada regional Jawa hingga 86,6 persen, sedangkan Belanja Pemerintah sendiri tumbuh 5,7 persen. Pertumbuhan Belanja Pemerintah dipicu oleh program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dimana regional Jawa memiliki populasi terbesar di Indonesia.

3.IV.B.1. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Pendapatan Negara dan Hibah pada regional Jawa yang tumbuh 12,9 persen dipengaruhi oleh tumbuhnya Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan

Pajak. Meskipun Penerimaan Hibah kontraksi cukup dalam mencapai 51,7 persen, namun kenaikan Penerimaan Pajak sebesar 16,1 cukup memberikan dampak yang signifikan dimana kontribusi terbesar pada Pendapatan Negara adalah dari Penerimaan Perpajakan. Pertumbuhan ini

menandakan bahwa kerja keras Pemerintah di tahun 2021 ini dimana lebih difokuskan pada pemulihan akibat pandemi Covid-19 membuahkan hasil. Program vaksinasi yang sukses memberikan kekuatan tersendiri bagi masyarakat untuk membantu membangun ekonomi negara. Secara spasial, seluruh Provinsi di regional Jawa menyumbang pertumbuhan Pendapatan Negara dengan kontribusi pertumbuhan terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 21,9 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 17,0 persen.

Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB regional Jawa pada tahun 2021 mencapai 14,9 persen lebih tinggi 9,5 persen dari tahun 2020. Pertumbuhan ini berpengaruh juga pada pertumbuhan rasio pajak perkapita dimana pada tahun 2021 terjadi kenaikan penduduk sebesar 1,2 juta jiwa namun rasio pajak perkapita ikut tumbuh juga sebesar 15,6 persen mencapai Rp9,6 triliun per juta jiwa.

3.IV.B.2. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021, secara agregat Belanja Konsolidasian regional Jawa mengalami kontraksi hingga 11,1 persen yoy. Kontraksi yang cukup dalam pada Belanja Transfer mengeliminasi pertumbuhan Belanja Pemerintah sebesar 5,7 persen yoy. Terjadi pertumbuhan PDRB di tahun 2021 pada regional Jawa, namun Rasio Belanja terhadap PDRB kontraksi hingga 15,8 persen yoy.

Perbandingan proporsi Belanja Pemerintah antara tahun 2021 dengan 2020, terlihat Pada tahun 2021, secara agregat Belanja Konsolidasian regional Jawa mengalami kontraksi hingga 11,1 persen yoy. Kontraksi yang cukup dalam pada Belanja Transfer mengeliminasi pertumbuhan Belanja Pemerintah sebesar 5,7 persen yoy. Terjadi pertumbuhan PDRB di tahun 2021 pada regional Jawa, namun Rasio Belanja

TABEL 11. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL JAWA TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2019	2020	2021	Growth 21 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.821,20	1.689,93	1.907,21	12,9
Penerimaan Perpajakan	1.389,56	1.264,93	1.469,01	16,1
Penerimaan Negara Bukan Pajak	421,12	396,43	424,41	7,1
Penerimaan Hibah	10,52	28,57	13,79	(51,7)
Belanja Negara	1.629,63	2.403,35	2.136,33	(11,1)
Belanja Pemerintah	1.355,95	1.965,47	2.077,61	5,7
Belanja Transfer	273,69	437,88	58,72	(86,6)
Surplus/Defisit Anggaran	191,56	(713,41)	(229,12)	67,9
Pembiayaan	428,94	1.306,02	987,36	(24,4)
SiLPA/SiKPA	620,50	592,60	758,23	27,9

TABEL 12. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL JAWA (TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (Triliun Rupiah)	1.389,56	1.264,93	1.469,01
Surplus/defisit Konsolidasian (Triliun Rupiah)	191,56	(713,41)	(229,12)
Belanja Konsolidasian (Triliun Rupiah)	1.629,63	2.403,35	2.136,33
PDRB (Triliun Rupiah)	9.484,00	9.271,00	9.814,99
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	151,06	151,59	152,79
Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	14,6	13,6	14,9
Rasio Pajak Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	9,2	8,3	9,6
Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB (%)	2,0	(7,7)	(2,3)
Rasio Belanja Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	17,2	25,9	21,8

terhadap PDRB kontraksi hingga 15,8 persen yoy.

Perbandingan proporsi Belanja Pemerintah antara tahun 2021 dengan 2020, terlihat pada tahun 2020 proporsi terbesar adalah Belanja Pegawai dengan Belanja Barang yang sama sebesar 23 persen dari Total Belanja regional Jawa. Berbeda pada tahun 2021 dimana terjadi pergeseran proporsi Belanja pada Belanja Barang menjadi proporsi terbesar sebesar 28 persen. Hal ini dikarenakan program penanganan kesehatan termasuk program vaksinasi dan klaim pasien covid-19 dibebankan pada belanja barang, dimana pada tahun 2020 dibebankan pada belanja lain- lain karena keadaan darurat saat masuknya virus corona ke wilayah Indonesia. Belanja Modal, Subsidi dan Bunga terdapat pergeseran yang tidak terlalu signifikan.

3.IV.B.3. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021, defisit Anggaran Pemerintah Konsolidasian regional Jawa mencapai Rp229,12 triliun dengan tingkat rasio terhadap PDRB 2,3

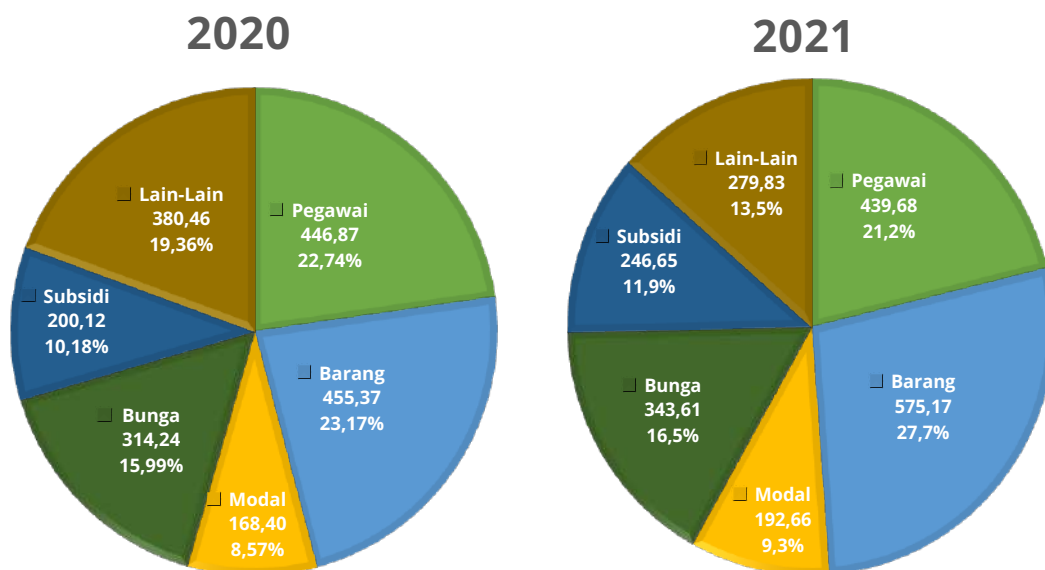
persen. Meskipun masih mengalami defisit namun dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan defisit yang cukup signifikan mencapai 67,9 persen. Perubahan terutama diakibatkan karena tumbuhnya Pendapatan Negara khususnya Pendapatan Pajak namun tidak diimbangi dengan optimalnya Belanja Negara yang kontraksi dari tahun lalu. Perencanaan pembiayaan yang kurang akurat juga menyebabkan SiLPA tahun 2021 bertambah.

3.IV.C. REGIONAL BALI & NUSA TENGGARA

Hasil konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian pada regional Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami defisit. Tahun 2021, Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian pada Regional Bali dan Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan yang disumbat oleh peningkatan Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara

Bukan Pajak. Pada sisi Belanja Negara juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun

GAMBAR 70. PROPORSI BELANJA NEGARA REGIONAL JAWA TAHUN 2020-2021



lalu. Meskipun keduanya tumbuh namun regional Bali dan Nusa Tenggara masih mengalami defisit anggaran yang cukup besar terlebih lagi pembiayaan yang kontraksi dari tahun lalu tak cukup menutupnya.

3.IV.C.1. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021 dampak Covid-19 sudah mulai menurun terlihat dari meningkatnya pendapatan dari seluruh regional termasuk Bali dan Nusa Tenggara. Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh 20,5 persen yoy, terutama didorong oleh meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak meningkat signifikan hingga 63,9 persen yoy hampir menyamai kontribusi Penerimaan Perpajakan yang selama ini selalu menjadi kontributor terbesar dalam Pendapatan Negara. Penerimaan Hibah mengalami kontraksi cukup dalam 47,5 persen yoy meskipun kontribusinya tidak signifikan terhadap total Pendapatan Negara.

3.IV.C.2. PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021 Belanja Negara Konsolidasian regional Bali dan Nusa Tenggara tumbuh signifikan hingga 113,5 yoy. Peningkatan disebabkan pada tahun lalu belanja transfer mengalami defisit dan tahun ini kembali ke positif kembali sehingga kenaikan Belanja Transfer bisa sampai 113 persen. Sedangkan Belanja Pemerintah hanya tumbuh sekitar 2 persen yoy. Meskipun tipis pertumbuhan menandakan titik awal pemulihan ekonomi pada regional Bali dan Nusa Tenggara. Apabila dilihat dari Proporsi Belanja Pemerintah antara tahun 2020 dengan 2021 pada regional Bali dan Nusa Tenggara terlihat penurunan proporsi terbesar pada Belanja Lain-Lain hingga 3,4

persen. Belanja Modal terjadi kenaikan sebesar 3 persen dipengaruhi limpahan pekerjaan dari tahun 2020 yang selesai di tahun 2021.

Rasio Belanja Per Kapita mengalami rebound cukup signifikan setelah mengalami kontraksi hampir setengahnya pada tahun 2020. Namun Belanja yang tinggi tidak diimbangi dengan Penerimaan Perpajakan yang hanya tumbuh sebesar 1,3 persen yoy di tahun 2021 mengakibatkan defisit anggaran yang membengkak hingga Rp50,72 triliun atau meningkat 552,8 persen yoy.

3.IV.C.3. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN KONSOLIDASI

Peningkatan defisit pada Regional Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021 terjadi dikarenakan pertumbuhan Belanja Negara yang tumbuh hingga 113,4 persen yoy. Pertumbuhan terjadi dikarenakan adanya defisit pada Belanja Transfer sehingga mengurangi perhitungan pada Belanja Negara Regional Bali dan Nusa Tenggara yang tidak terjadi pada tahun 2021. Sedangkan Belanja Pemerintah tanpa Belanja Transfer di tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 2,0 persen yoy. Meskipun PDRB Regional Bali dan Nusa Tenggara berhasil naik di tahun 2021, Rasio defisit terhitung bertambah persen defisitnya yang tadinya sudah mendekati surplus di tahun 2020 disebabkan perhitungan Belanja Transfer.

3.IV.D. REGIONAL KALIMANTAN

Hasil konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah regional Kalimantan menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir mengalami defisit anggaran.

TABEL 13. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL BALI & NUSRA TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2019	2020	2021	Growth 21 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	20,48	36,74	44,31	20,6
Penerimaan Perpajakan	17,64	22,39	22,69	1,4
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,84	12,64	20,71	63,9
Penerimaan Hibah	0,00	1,72	0,90	-47,5
Belanja Negara	81,38	44,52	95,02	113,5
Belanja Pemerintah	29,71	87,70	89,42	2,0
Belanja Transfer	51,66	-43,19	5,60	113,0
Surplus/Defisit Anggaran	-60,90	-7,77	-50,72	-552,4
Pembiayaan	0,00	4,58	4,28	-6,6
SILPA/SiKPA	-60,90	-3,19	-46,44	-1353,8

TABEL 14. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL BALI & NUSA TENGGARA

Uraian	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (Triliun Rupiah)	17,64	22,39	22,69
Surplus/defisit Konsolidasian (Triliun Rupiah)	(60,90)	(7,77)	(50,72)
Belanja Konsolidasian (Triliun Rupiah)	81,38	44,52	95,02
PDRB (Triliun Rupiah)	490,00	463,00	470,84
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	14,86	14,96	15,14
Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	3,6	4,8	4,8
Rasio Pajak Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	1,2	1,5	1,5
Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB (%)	(12,4)	(1,7)	(10,8)
Rasio Belanja Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	5,5	2,9	6,3

Pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah hanya mampu menutup sekitar 20 persen dari total defisit pada regional Kalimantan. Pada Tahun 2020 pertumbuhan pendapatan negara dan hibah cukup signifikan, dan terus bertumbuh di tahun 2021. Belanja negara yang sempat kontraksi di tahun 2020 sudah mengalami rebound di tahun 2021.

3.IV.D.1. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Hingga akhir tahun 2021, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Konsolidasian pada regional Kalimantan sebesar Rp94,33 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,6 persen yoy. Pertumbuhan didominasi oleh Pendapatan Perpajakan yang menyumbang kontribusi sebesar 65,9 persen atau tumbuh sebesar 27,5 persen yoy.

Secara spasial penyumbang Pendapatan Negara dan Hibah terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp41,77 triliun atau sekitar 44,3 persen dari total Pendapatan dan Hibah Negara regional Kalimantan dan tumbuh sebesar 65,5 persen yoy.

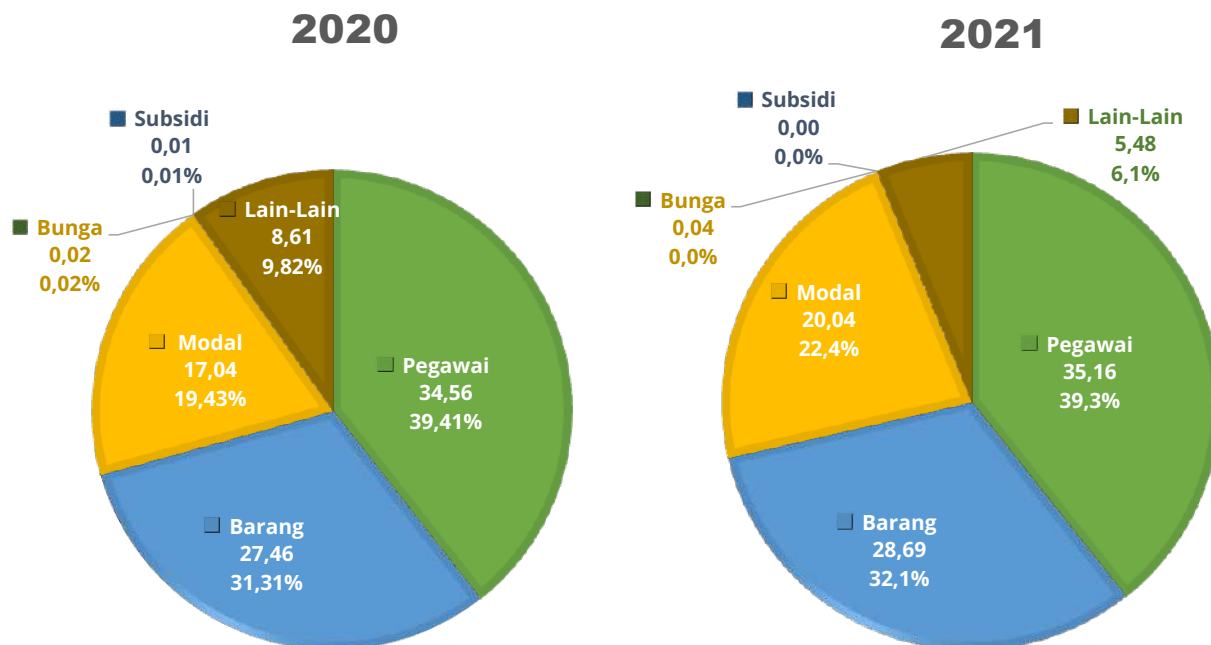
Berbanding terbalik dengan Provinsi Kalimantan Barat dimana pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 41,2 persen yoy.

3.IV.D.2. PERKEMBANGAN BELANJA KONSOLIDASIAN

Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicanangkan Pemerintah di tahun 2021 menghasilkan dampak yang positif. Selain Pendapatan Negara yang tumbuh, Belanja Negara pada regional Kalimantan juga tumbuh menjadi Rp152,98 triliun atau sebesar 35,9 persen yoy. Belanja Negara pada regional Kalimantan masih sangat dipengaruhi oleh Belanja Pemerintah dimana realisasi tahun 2021 sebesar Rp133,74 triliun atau tumbuh sebesar 5,8 persen yoy.

Rasio Belanja Negara Per Kapita pada regional Kalimantan setiap tahun mengalami pertumbuhan, meskipun setiap tahunnya juga jumlah penduduk mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021 Belanja Per Kapita mencapai Rp9,1 triliun per juta jiwa atau tumbuh sebesar 33,8 persen yoy. Apabila dilihat dari proporsi jenis Belanja Pemerintah tahun 2020

GAMBAR 71. PROPORSI BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN REGIONAL BALI & NUSRA TAHUN 2020-2021



dan 2021 pada regional Kalimantan terlihat Belanja Pegawai selalu mendominasi dengan persentase diatas 35 persen dari total Belanja. Belanja Barang dan Modal tumbuh sedangkan Belanja Lain-Lain kontraksi yang disebabkan turunnya belanja Hibah.

3.IV.D.3. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021 Defisit Pemerintah Konsolidasian regional Kalimantan mencapai Rp58,65 triliun atau kontraksi sebesar 98,7 persen. Rasio Defisit terhadap PDRB sebesar minus 4,2 persen. Kontraksi hampir dua kali lipat dikarenakan kontraksi Defisit tidak sebanding dengan pertumbuhan PDRB yang hanya tumbuh 11,8 persen yoy.

3.IV.E. REGIONAL SULAWESI

Hasil Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada regional Sulawesi menunjukkan selama tiga tahun terakhir mengalami defisit. Defisit anggaran sempat mengalami penurunan di tahun 2020 hingga Rp46,76 triliun namun mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 sebesar 128,8 persen mencapai Rp106,98 triliun. Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi di tahun 2021 sedangkan Belanja Negara terus bertumbuh. Pembiayaan hanya mampu menutup sekitar 6 persen dari defisit.

3.IV.E.1. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Hingga akhir tahun 2021, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada regional Sulawesi mencapai

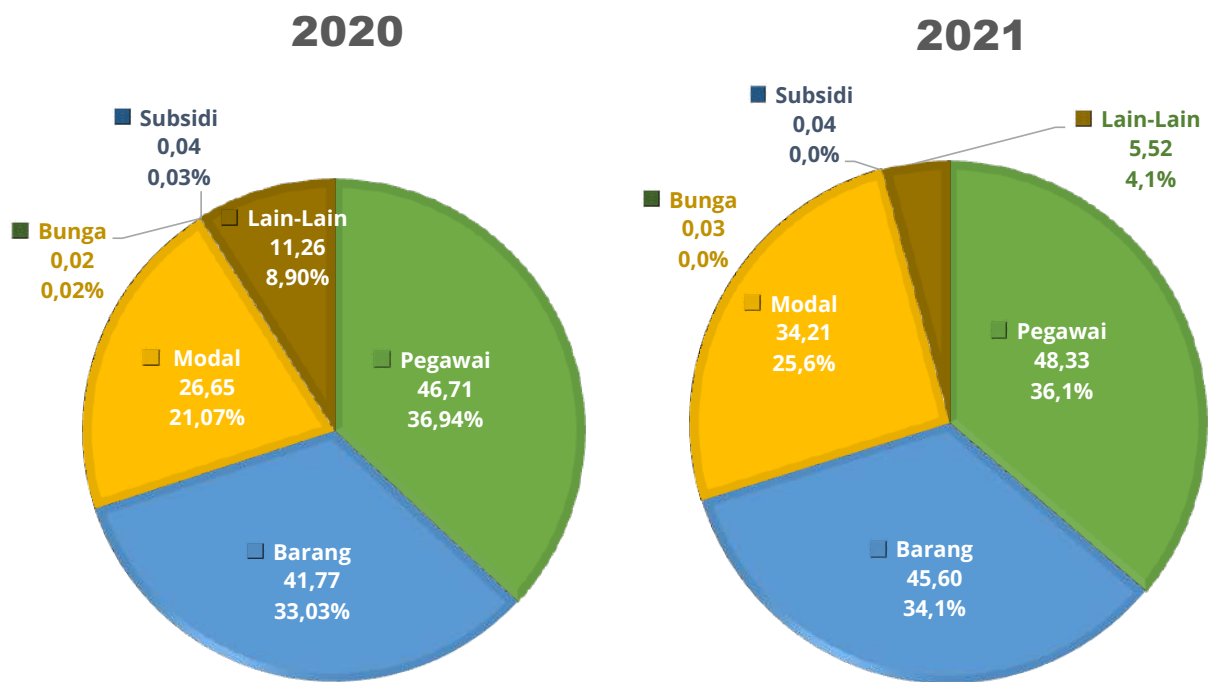
TABEL 15. . LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2019	2020	2021	Growth 21 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	48,30	83,04	94,33	13,6
Penerimaan Perpajakan	44,18	48,81	62,22	27,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,12	31,43	31,10	(1,0)
Penerimaan Hibah	0,00	2,80	1,01	(64,1)
Belanja Negara	129,50	112,54	152,98	35,9
Belanja Pemerintah	37,53	126,45	133,74	5,8
Belanja Transfer	91,97	(13,91)	18,88	235,7
Surplus/Defisit Anggaran	(81,21)	(29,51)	(58,65)	(98,8)
Pembiayaan	0,00	15,65	12,07	(22,9)
SiLPA/SiKPA	(81,21)	(13,86)	(46,58)	(236,2)

TABEL 16. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL KALIMANTAN

Uraian	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (Triliun Rupiah)	44,18	48,81	62,22
Surplus/defisit Konsolidasian (Triliun Rupiah)	(81,21)	(29,51)	(58,65)
Belanja Konsolidasian (Triliun Rupiah)	129,50	112,54	152,98
PDRB (Triliun Rupiah)	1.292,00	1.252,00	1.399,73
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	16,49	16,63	16,81
Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	3,4	3,9	4,4
Rasio Pajak Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	2,7	2,9	3,7
Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB (%)	(6,3)	(2,4)	(4,2)
Rasio Belanja Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	7,9	6,8	9,1

GAMBAR 72. PROPORSI BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2020-2021



Rp61,56 triliun atau kontraksi sebesar 20,0 persen yoy. Kontraksi disebabkan adanya penurunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mencapai 39,6 persen yoy dimana penerimaan tersebut mendominasi di tahun 2020 dibandingkan Penerimaan Perpajakan. Sedangkan Penerimaan Perpajakan di tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 16,6 persen yoy atau Rp33,15 triliun dan terhitung Rasio Pajak Per Kapita mencapai Rp1,6 triliun per juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 200 ribu jiwa di tahun 2021. Rasio Pajak terhadap PDRB mengalami pertumbuhan tipis sebesar 3,7 persen yoy, dapat mengikuti laju pertumbuhan PDRB sebesar 11,3 persen yoy.

3.IV.E.2. PERKEMBANGAN BELANJA KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021, Belanja Negara Konsolidasian pada regional Sulawesi mengalami pertumbuhan

sebesar 36,3 persen mencapai Rp168,54 triliun dimana pada tahun 2020 Belanja Negara mengalami kontraksi sebesar 10,2 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh program pemulihan ekonomi nasional dimana pada tahun 2021 ini efek pandemi Covid-19 mulai berkurang dikarenakan program vaksinasi. Rasio Belanja Per Kapita regional Sulawesi meningkat sebesar 35,5 persen yoy mencapai Rp8,4 triliun per juta jiwa.

Proporsi Belanja Pemerintah Konsolidasian regional Sulawesi tahun 2020 dan 2021 terlihat hampir sama, dengan proporsi terbesar ada pada Belanja Pegawai hingga mencapai diatas 40 persen dari Total Belanja. Belanja Barang kontraksi tipis namun ditunjang oleh Belanja Modal yang tumbuh sebesar 7,9 persen yoy.

3.IV.E.3. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN

Posisi perhitungan keseimbangan umum konsolidasi pada regional Sulawesi mengalami defisit sebesar Rp106,98 triliun atau kontraksi sebesar 128,8 yoy. Dipengaruhi kontraksi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tumbuhnya Belanja Negara tahun 2021. Meskipun Rasio Belanja tergolong baik untuk perekonomian yang meningkat sebesar 35,5 persen yoy, namun Rasio Belanja terhadap PDRB kontraksi cukup signifikan lebih dari 50 persen yoy.

3.IV.F. REGIONAL PAPUA & MALUKU

Hasil Konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah regional Maluku dan Papua menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami defisit anggaran. Pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah hanya mampu menutup sekitar 1,6 persen saja di tahun 2021. Secara umum Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi meskipun pada regional lain sudah menunjukkan pertumbuhan. Namun lain halnya pada Belanja Negara yang tumbuh signifikan.

3.IV.F.1. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KONSOLIDASIAN

Hingga akhir tahun 2021, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada regional Maluku dan Papua mencapai Rp72,89 triliun atau kontraksi sebesar 13,9 persen yoy. Disebabkan karena penurunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana menjadi kontributor terbesar Pendapatan Negara dari tahun 2020. Meskipun Penerimaan Perpajakan tumbuh 11,1 persen yoy namun tidak bisa mengangkat kontraksi PNBPN mencapai 18,4 persen yoy. Penerimaan Hibah juga mengalami kontraksi signifikan sebesar 89,1 persen yoy meskipun tidak terlalu berkontribusi pada total Pendapatan Negara.

Rasio Pajak Per Kapita terlihat sempat menurun di tahun 2020 namun mengalami rebound di tahun 2021 sebesar 10,5 persen yoy mencapai Rp2,1 triliun per juta jiwa dengan kenaikan penduduk sebesar 100 ribu jiwa. Rasio Pajak terhadap PDRB mengalami kontraksi tipis 2,3 persen saja dikarenakan pertumbuhan PDRB regional Maluku Papua yang cukup signifikan.

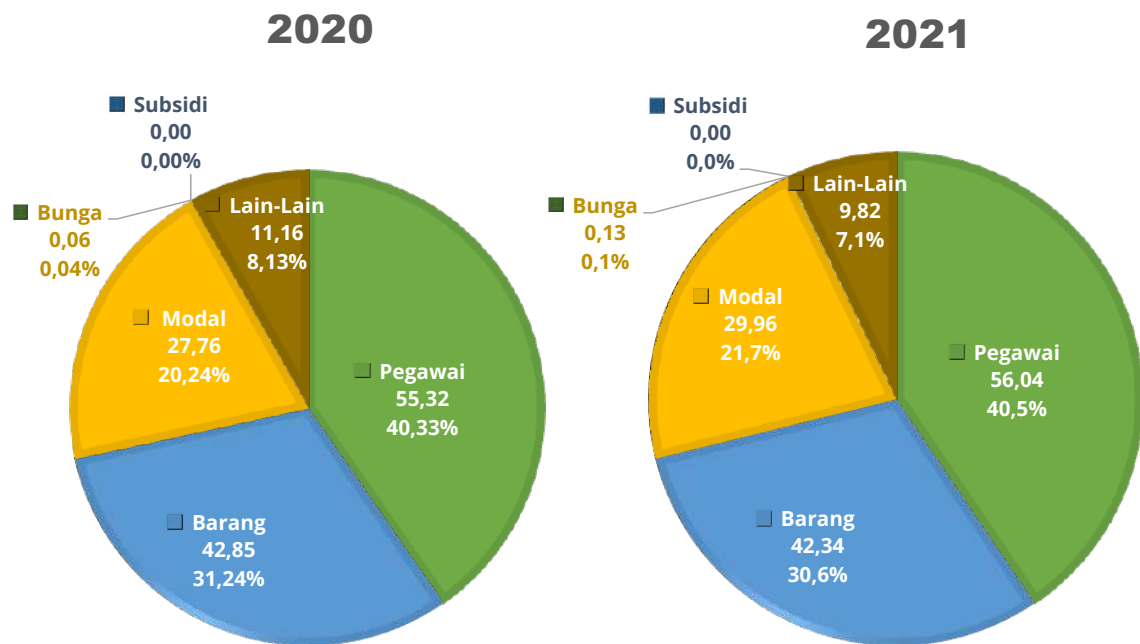
TABEL 17. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2019	2020	2021	Growth 21 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	27,60	76,93	61,56	(20,0)
Penerimaan Perpajakan	22,69	28,43	33,15	16,6
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,91	44,45	26,86	(39,6)
Penerimaan Hibah	0,00	4,05	1,54	(61,9)
Belanja Negara	137,78	123,69	168,54	36,3
Belanja Pemerintah	51,41	137,14	138,30	0,8
Belanja Transfer	86,37	(13,45)	30,23	324,8
Surplus/Defisit Anggaran	(110,18)	(46,76)	(106,98)	(128,8)
Pembiayaan	0,00	7,78	7,05	(9,3)
SiLPA/SiKPA	(110,18)	(38,98)	(99,93)	(156,3)

TABEL 18. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL SULAWESI

Uraian	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (Triliun Rupiah)	22,69	28,43	33,15
Surplus/defisit Konsolidasian (Triliun Rupiah)	(110,18)	(46,76)	(106,98)
Belanja Konsolidasian (Triliun Rupiah)	137,78	123,69	168,54
PDRB (Triliun Rupiah)	1.016,00	1.050,00	1168,12
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	19,7	19,9	20,1
asio Pajak terhadap PDRB (%)	2,2	2,7	2,8
Rasio Pajak Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	1,2	1,4	1,6
Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB (%)	(10,8)	(4,5)	(9,2)
Rasio Belanja Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	7,0	6,2	8,4

GAMBAR 73. PROPORSI BELANJA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2020-2021 (TRILIUN RUPIAH)



3.IV.F.2. PERKEMBANGAN BELANJA KONSOLIDASIAN

Pada Tahun 2021, Belanja Konsolidasian regional Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan hingga 76,0 persen yoy dengan realisasi mencapai Rp204,19 triliun. Secara spasial penyumbang realisasi Belanja terbesar adalah Provinsi Papua yang menyumbang hingga 67,5 persen.

Apabila dilihat dari proporsi Belanja tahun 2020 dan 2021 terlihat memiliki proporsi yang hampir sama pada semua jenis belanja. Proporsi terbesar adalah realisasi belanja barang diatas 35 persen setiap tahunnya. Disusul belanja pegawai dan belanja modal. Belanja lain-lain tergolong cukup besar dengan proporsi diatas 10 persen setiap tahunnya didominasi oleh belanja hibah. Meningkatnya realiasi belanja di tahun 2021 disebabkan meningkatnya realisasi belanja pegawai, barang dan modal secara bersamaan, Rasio Belanja Per Kapita tahun 2021 naik signifikan hingga 74 persen dengan kenaikan penduduk sebesar 100 ribu jiwa di tahun 2021.

3.IV.F.3. PERKEMBANGAN SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2021 , defisit pemerintah konsolidasi regional Maluku dan Papua mencapai Rp131,29 triliun atau kontraksi signifikan sebesar 318 persen yoy. Defisit yang cukup tinggi disebabkan tumbuhnya Belanja Transfer hingga 318 persen yoy dan Pembiayaan kontraksi hingga 81 persen sehingga saling mendukung menjadikan

defisit menjadi lebih besar. Rasio Defisit terhadap PDRB meningkat signifikan hingga 267,1 persen,

selain dari penambahan defisit yang signifikan tadi juga dikarenakan terjadi pertumbuhan PDRB regional.

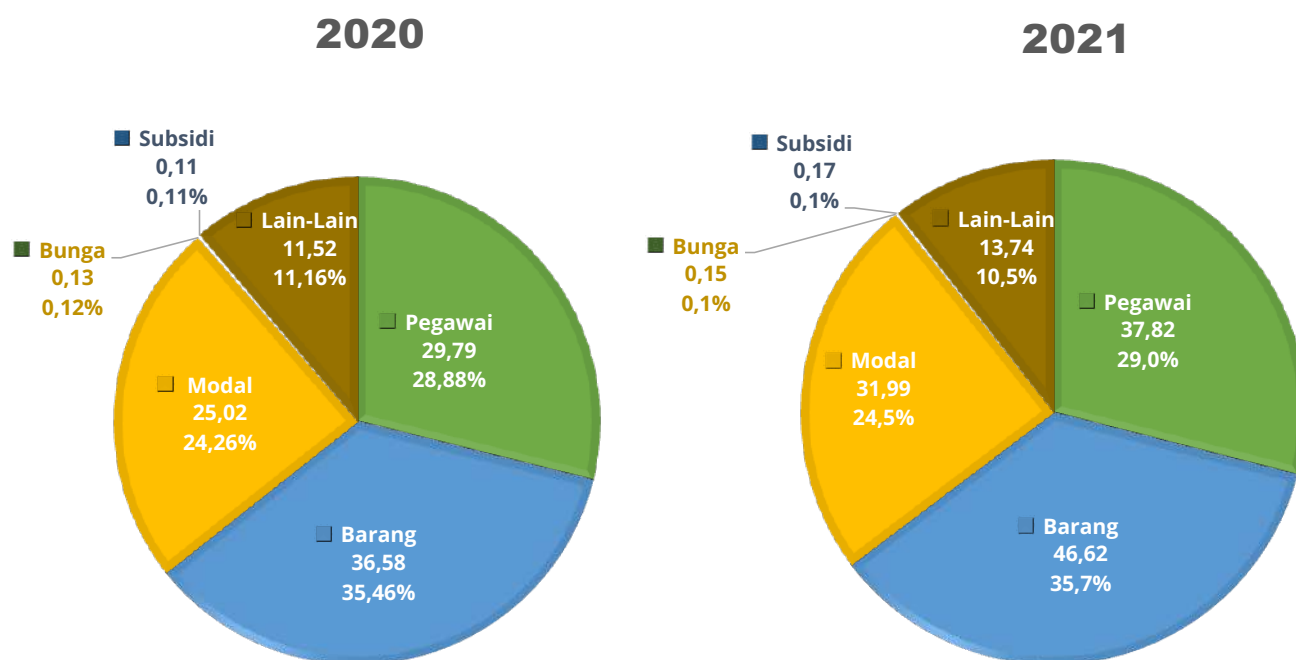
TABEL 19. LRA KONSOLIDASIAN REGIONAL MALUKU & PAPUA TAHUN 2019-2021 (TRILIUN RUPIAH)

Uraian	2019	2020	2021	Growth 21 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	16,12	84,63	72,89	(13,9)
Penerimaan Perpajakan	14,56	16,63	18,48	11,1
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,55	66,48	54,25	(18,4)
Penerimaan Hibah	0,00	1,52	0,17	(89,1)
Belanja Negara	131,31	116,00	204,19	76,0
Belanja Pemerintah	36,98	103,15	130,47	26,5
Belanja Transfer	94,33	12,86	73,71	473,3
Surplus/Defisit Anggaran	(115,19)	(31,37)	(131,29)	(318,5)
Pembiayaan	0,00	11,06	2,11	(81,0)
SiLPA/SiKPA	(115,19)	(20,31)	(129,19)	(536,0)

TABEL 20. RASIO PAJAK TERHADAP PDRB REGIONAL MALUKU & PAPUA

Uraian	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan Konsolidasian (Triliun Rupiah)	14,56	16,63	18,48
Surplus/defisit Konsolidasian (Triliun Rupiah)	(115,19)	(31,37)	(131,29)
Belanja Konsolidasian (Triliun Rupiah)	131,31	116,00	204,19
PDRB (Triliun Rupiah)	358,00	370,00	421,34
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	7,4	8,6	8,7
Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	4,1	4,5	4,4
Rasio Pajak Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	2,0	1,9	2,1
Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB (%)	32,2	8,5	31,2
Rasio Belanja Per Kapita (Triliun per Juta Jiwa)	17,7	13,5	23,5

GAMBAR 74. PROPORSI BELANJA NEGARA REGIONAL MALUKU & PAPUA TAHUN 2020-2021



HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN

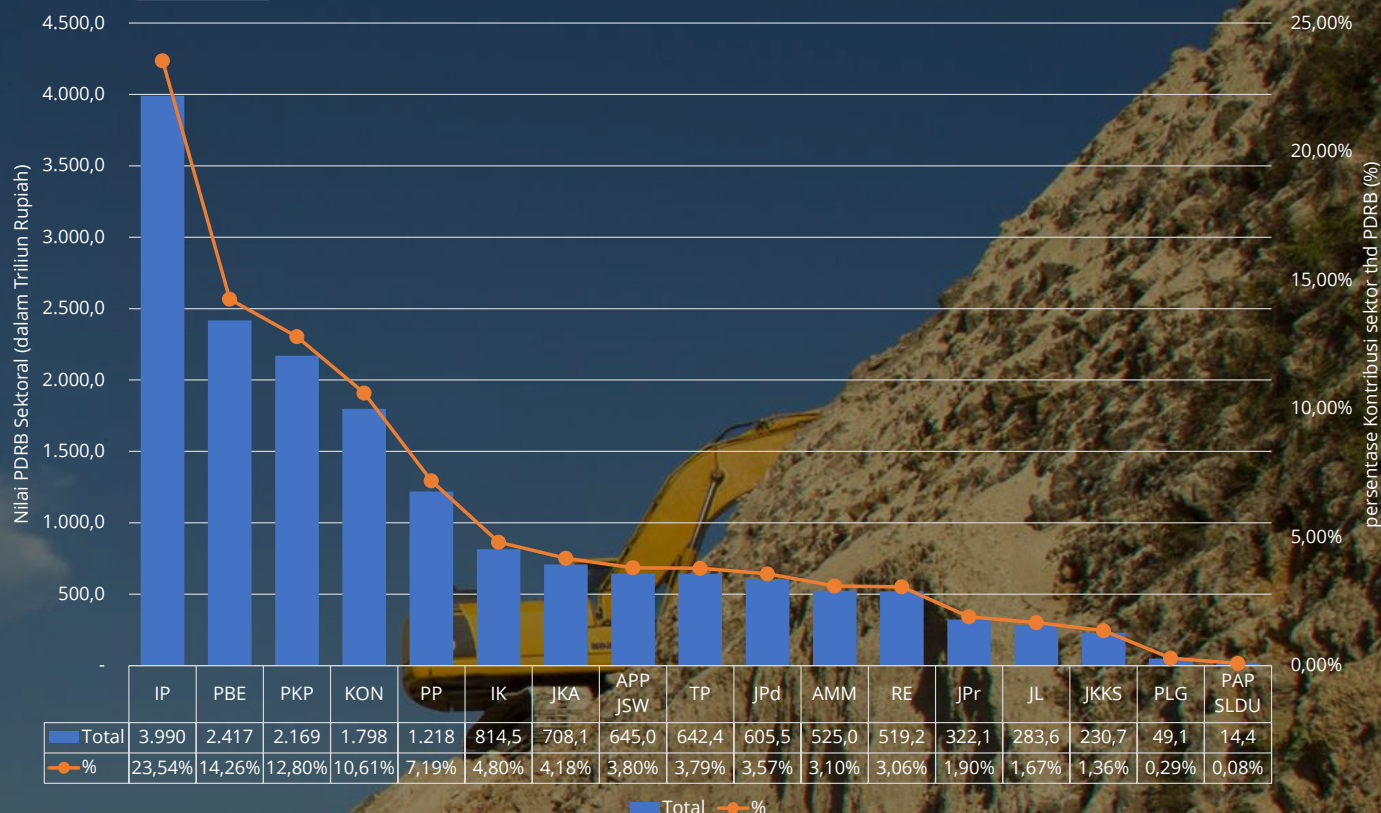


BAB III ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL REGIONAL

Foto Sahid Subekti

1. OVERVIEW KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL

GAMBAR 75. KONTRIBUSI PDRB PER SEKTOR LAPANGAN USAHA DI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

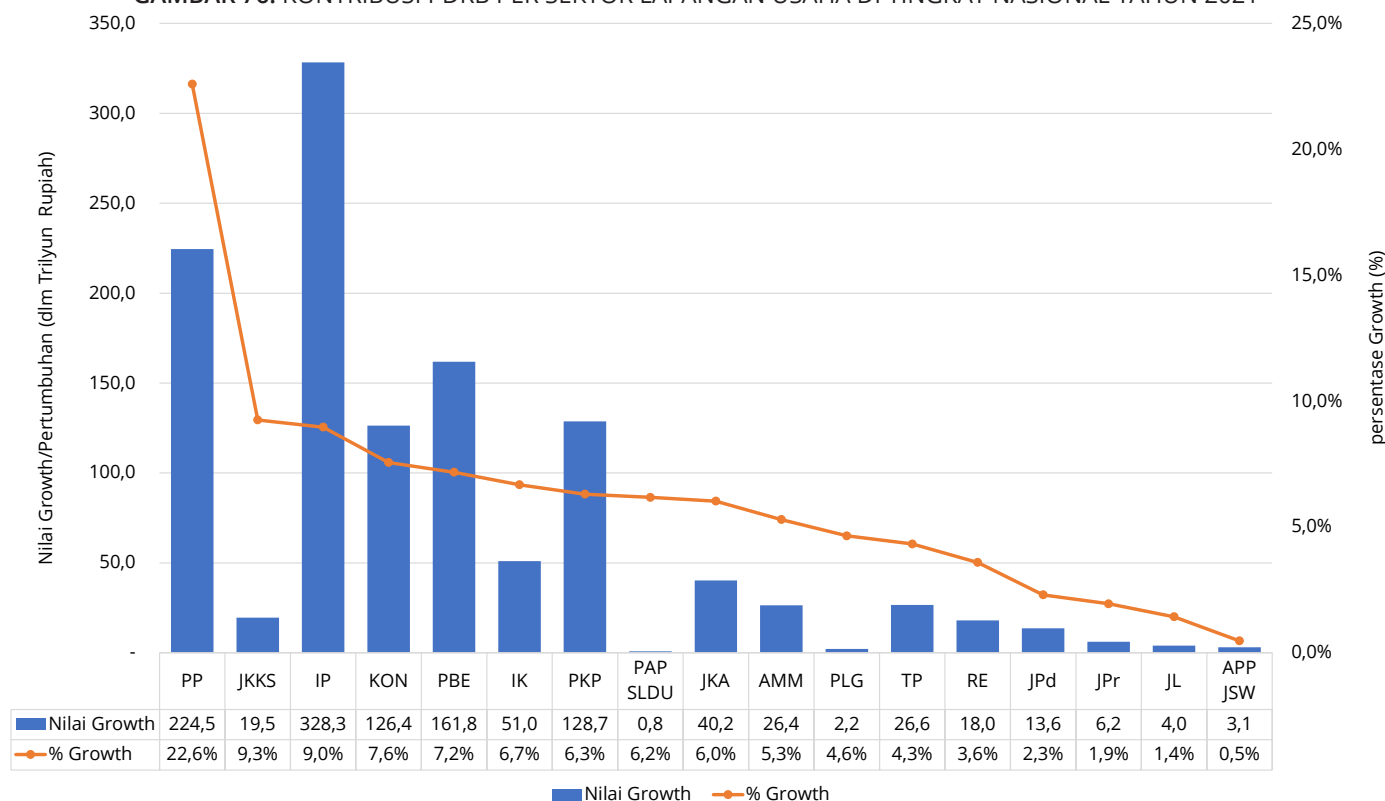
Bab ini membahas keunggulan, potensi ekonomi, dan tantangan fiskal pada setiap regional di Indonesia. Keunggulan suatu regional akan dilihat dari besaran kontribusi suatu sektor perekonomian terhadap PDRB. Sementara itu potensi ekonomi, diukur dari laju pertumbuhan suatu sektor pada setiap regional.

Keterangan:

IP = Industri Pengolahan; PBE = Perdagangan Besar dan Eceran; PKP = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; KON = Konstruksi; PP = Pertambangan dan Penggalian; IK = Informasi dan Komunikasi; JKA = Jasa Keuangan dan Asuransi; APPJSW = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; TP = Transportasi dan Pergudangan; JPd = Jasa Pendidikan; AMM = Akomodasi dan Makan Minum; RE = Real Estate; JPr = Jasa Perusahaan; JL = Jasa Lainnya; JKKS = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; PLG = Pengadaan Listrik dan Gas; PAPSLDU = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Secara nasional, terdapat empat besar sektor lapangan usaha yang cukup dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB (lebih dari 10 persen)

dan dipandang sebagai sektor unggulan, yaitu: (i) Sektor Industri pengolahan; (ii) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan Sepeda Motor; (iii) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (iv) Sektor Konstruksi. Keempat sektor lapangan usaha tersebut menguasai total $\pm 61,20$ persen total PDRB di secara nasional. Besaran kontribusi setiap regional terhadap nilai total PDRB sektoral pada keempat lapangan usaha unggulan di atas secara nasional sangat tergantung pada skala ekonomi, kondisi/karakteristik regional, serta keunggulan kompetitif atau sumber daya yang dimiliki masing-masing regional. Mengingat konsentrasi kegiatan perekonomian terpusat di Pulau Jawa (hampir mencapai ± 58 persen dari perekonomian secara nasional), maka penentuan sektor unggulan di tingkat nasional sangat ditentukan oleh komposisi sektor unggulan di Regional Jawa. Hal tersebut terbukti dari kenyataan bahwa 4 besar atau sektor lapangan usaha di tingkat nasional sama dengan di regional Jawa. Sementara itu, keberadaan sektor unggulan yang sama di regional lain hanya bersifat menguatkan posisi tersebut, tapi dianggap belum bisa mempengaruhi komposisi sektor unggulan yang ada di tingkat nasional.

GAMBAR 76. KONTRIBUSI PDRB PER SEKTOR LAPANGAN USAHA DI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021


Sumber: BPS, diolah

Laju Pertumbuhan PDRB Per Sektor Lapangan Usaha di Tingkat Nasional Tahun 2021

Keterangan:

PP = Pertambangan dan Penggalian; JKKS = Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; IP = Industri Pengolahan; KON = Konstruksi; PBE = Perdagangan Besar dan Eceran; IK = Informasi dan Komunikasi; PKP = Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; PAP SLDU = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; JKA = Jasa Keuangan dan Asuransi; AMM = Akomodasi dan Makan Minum; PLG = Pengadaan Listrik dan Gas; TP = Transportasi dan Pergudangan; RE = Real Estate; JPd = Jasa Pendidikan; JPr = Jasa Perusahaan; JL = Jasa Lainnya; APPJSW = Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

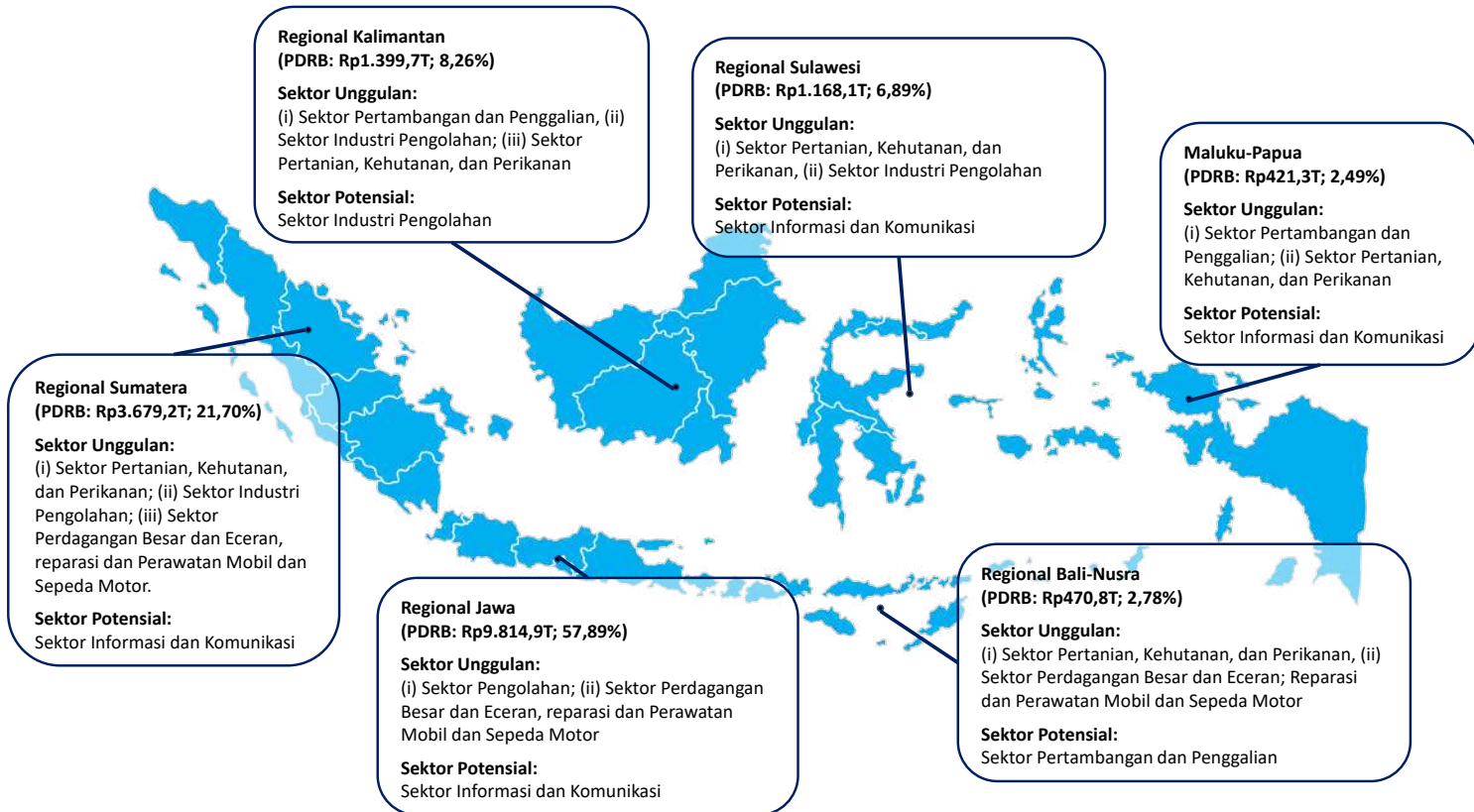
Dari sisi laju pertumbuhan sektoral di tingkat nasional, terlihat bahwa pada tahun 2021 seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif baik secara nominal maupun persentase. Hal tersebut tidak lepas dari dampak pemulihan ekonomi seiring dengan situasi pandemic yang mulai membaik serta terkendali. Dilihat dari sisi persentase, maka Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi seiring dengan adanya peningkatan produksi batubara untuk memenuhi permintaan dari pasar di luar negeri (khususnya Tiongkok dan India) yang Sebagian besar dipenuhi dari wilayah Kalimantan. Bila kita perhatikan lagi, dengan mengacu pada besaran nilai laju lapangan usaha di tingkat nasional,

maka selain sektor pertambangan dan penggalian, terdapat beberapa sektor yang dinilai cukup potensial untuk berkembang, antara lain: (i) Jasa Kesehatan, (ii) Industri Pengolahan, (iii) Konstruksi, (iv) Perdagangan besar dan Eceran, serta (v) Informasi dan Komunikasi.

Sektor unggulan dan potensial di tingkat nasional tidak sama dengan sektor unggulan di tingkat regional. Bahkan, secara spasial, terdapat perbedaan sektor unggulan dan sektor potensial pada setiap regional. Namun demikian, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, terdapat beberapa sektor yang dinilai dominan serta mampu menjadi sektor unggulan dan potensial di beberapa wilayah regional. Pada kategori unggulan; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor utama di 5 (lima) wilayah regional, kecuali Jawa. Sementara itu, pada kategori potensial, Sektor Informasi dan komunikasi dapat menjadi sektor potensial di 4 (empat) wilayah regional, yaitu: Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Pada tahun 2021, secara nasional, seluruh lapangan usaha yang ada dapat menyerap tenaga kerja sebesar 323,37 juta orang. Terdapat hubungan/korelasi positif antara sektor unggulan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di tingkat nasional. 3 Sektor utama atau unggulan di tingkat nasional dan kontributor terbesar PDB tahun 2021 (yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan), menjadi 3 sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Secara keseluruhan, ketiga sektor yang menyumbangkan 50,6% PDB tahun 2021 tersebut

GAMBAR 77. PETA SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL PER REGIONAL TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

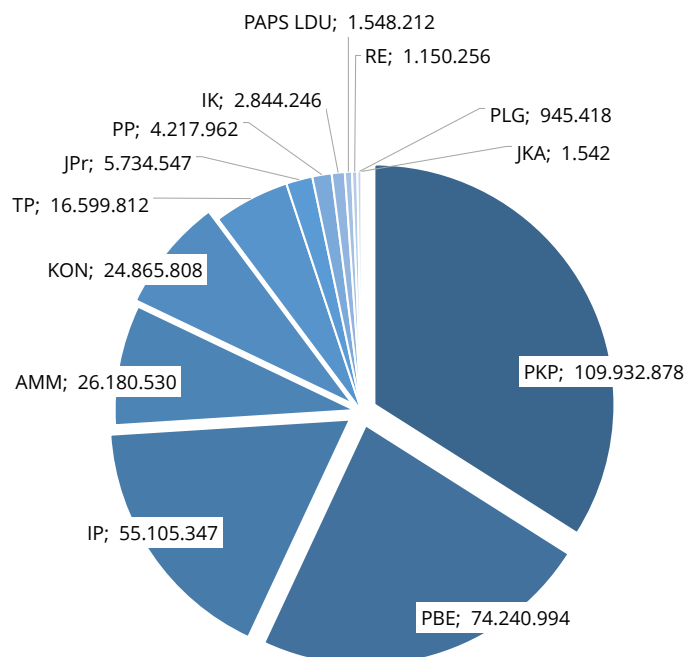
menyerap total hampir 240 juta orang tenaga kerja atau 74 persen dari total tenaga kerja terserap sektor lapangan usaha di tahun 2021.

Keterangan: PKP = Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; PBE = Perdagangan Besar dan Eceran; IP = Industri Pengolahan; AMM = Akomodasi dan Makan Minum; KON = Konstruksi; TP = Transportasi dan Pergudangan; JP = Jasa Perusahaan; PP = Pertambangan dan Penggalian; IK = Informasi dan

Komunikasi; PAP SLDU = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; RE = Real Estate; PLG = Pengadaan Listrik dan Gas; JKA = Jasa Keuangan dan Asuransi.

Seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid yang semakin membaik, terdapat optimisme untuk pengembangan sektor unggulan dan sektor potensial di setiap regional sehingga dalam menopang pertumbuhan perekonomian. Meskipun demikian,

GAMBAR 78. PETA SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL PER REGIONAL TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan utama untuk pengembangan sektor-sektor tersebut, seperti: regulasi/kebijakan, infrastruktur, kapasitas SDM yang memadai, dan perkembangan situasi eksternal/global yang tidak dapat dikendalikan. Berbagai hal tersebut akan dibahas secara lebih detil dalam bagian penjelasan sector unggulan dan sector potensial wilayah di setiap regional pada subbab berikutnya.

2. SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR POTENSIAL WILAYAH

2.1. REGIONAL SUMATERA

2.1.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA

TABEL 23. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA

Sektor Unggulan	Nilai Kontribusi terhadap PDRB	% Kontribusi terhadap PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	827,66T	22,50%
Industri Pengolahan	767,34T	20,86%
Perdagangan Besar dan Eceran	497,88T	13,53%
Konstruksi	414,99T	11,28%
Pertambangan dan Penggalian	399,39T	10,86%

Sumber: BPS (diolah)

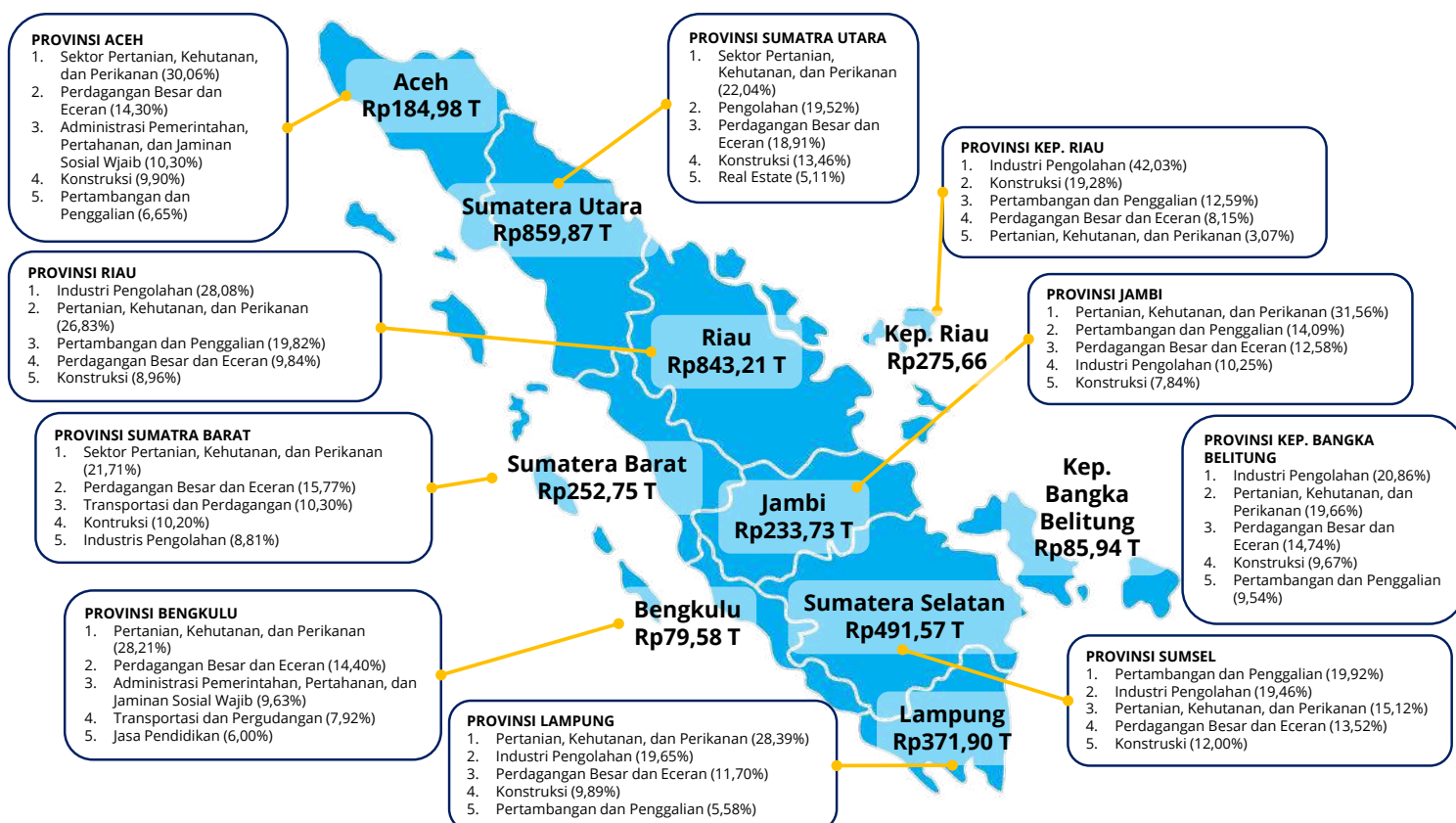
Sektor unggulan regional Sumatera diukur dari nilai dan persentase terhadap total PDRB menggunakan data yang dirilis oleh BPS. Lima besar sektor unggulan di regional Sumatera tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel Sektor Unggulan Regional Sumatera menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor unggulan utama di regional Sumatera pada tahun 2021. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 22,50% terhadap total PDRB regional Sumatera dengan nilai kontribusi terhadap total PDRB sebesar Rp827,66T. Terdapat empat sektor lainnya yang berkontribusi di atas 10% terhadap total PDRB, yaitu sektor industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; konstruksi; serta pertambangan dan penggalian. Kelima sektor unggulan tersebut mendominasi kontribusi terhadap PDRB regional Sumatera dengan total kontribusi 79,02%.

Peta sektor unggulan Sumatera menyajikan lima sektor unggulan terbesar masing-masing provinsi beserta kontribusinya terhadap PDRB masing-masing provinsi. Berdasarkan hasil penelusuran, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memimpin sektor unggulan utama pada 7 dari 10 provinsi di regional Sumatera. Provinsi tersebut antara lain Jambi, Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Secara umum, tidak terdapat perubahan berarti pada kontribusi sektor unggulan terhadap total

GAMBAR 79. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL SUMATERA



Sumber: BPS, diolah

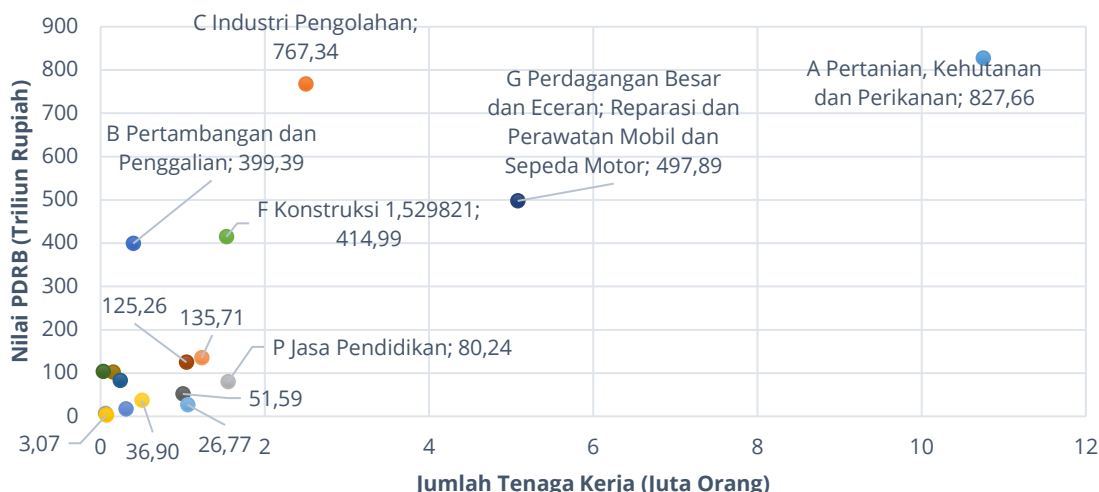
TABEL 24. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SUMATERA

Sektor Unggulan	2020			2021		
	Nilai*	% Kontr	Rank	Nilai*	% Kontr	Rank
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	757,08	22.48%	1	827,66	22,50%	1
Industri Pengolahan	698,24	20.73%	2	767,34	20,86%	2
Perdagangan Besar dan Eceran	462,59	13.74%	3	497,88	13,53%	3
Konstruksi	390,68	11.60%	4	414,99	11,28%	4
Pertambangan dan Penggalian	320,96	9.53%	5	399,39	10,86%	5

Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: *merupakan nilai PDRB per sektor (dalam triliun rupiah)

GAMBAR 80. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

PDRB. Seluruh sektor mengalami peningkatan nilai rupiah dari tahun 2020. Namun, terdapat dua sektor yang mengalami penurunan persentase kontribusi, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran serta Sektor Konstruksi. Meski demikian, seluruh sektor masih bertahan pada peringkat yang sama di tahun 2020. Sektor yang mengalami kenaikan baik dari segi nilai maupun kontribusi, antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor pertambangan dan penggalian.

Pada tahun 2021, sektor unggulan lapangan usaha berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Lima sektor unggulan tingkat regional Sumatera menyerap 20,25 juta orang tenaga kerja atau 71,93% persen dari seluruh tenaga kerja yang diserap sektor usaha. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap tenaga kerja tertinggi sebesar 10,75 juta orang. Disusul sektor unggulan perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan; dan konstruksi

masing-masing sebanyak 5,08 juta; 2,5 juta; dan 1,53 juta. Sementara itu, sektor unggulan ke-5 memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja yang kecil. Sektor pertambangan dan penggalian hanya mampu menyerap 0,4 juta tenaga kerja walaupun memiliki PDRB yang cukup besar (Rp399,99 Triliun). Di sisi lain, terdapat 6 sektor di luar 5 sektor unggulan yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding sektor unggulan kelima (pertambangan dan penggalian).

2.I.B. SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

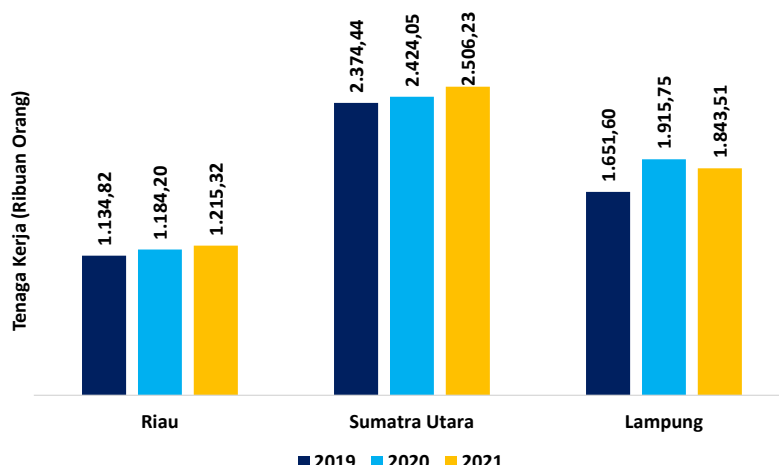
Pembangunan sektor pertanian salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya para petani melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan (BPS, 2021). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi dominan terhadap sektor regional Sumatera. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan,

TABEL 25. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Riau	24,50%	24,47%	25,83%	27,33%
2	Sumatera Utara	22,75%	23,04%	22,86%	22,89%
3	Lampung	14,58%	14,42%	13,90%	12,76%
4	7 Provinsi Lainnya	38,17%	38,07%	37,41%	37,02%
Kontribusi total sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Regional Sumatera		21,12%	20,87%	22,48%	22,50%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 81. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU, SUMATERA UTARA, DAN LAMPUNG TERHADAP REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

dan perikanan terhadap perekonomian regional Sumatera tahun 2018-2021 selalu berada di atas 20% dengan rata-rata 21,74%. Pada 2021, kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB regional Sumatera sebesar Rp827,66 miliar atau 20,50%.

Riau, Sumatera Utara, dan Lampung merupakan provinsi penyumbang terbesar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berdasarkan rata-rata kontribusi tahun 2018-2021. Rata-rata kontribusi Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Lampung tahun 2018-2021 sebesar Rp190,78 miliar; Rp170,45 miliar; dan Rp103,24 miliar atau 25,62%; 22,89%; dan 13,86% dari total kontribusi sektor.

Di Provinsi Riau, Sektor unggulan pertanian, kehutanan, dan perikanan bergerak naik sepanjang tahun 2017-2021. Sektor ini memiliki capaian LQ sebesar 2,21 (LQ>1 maka merupakan sektor unggulan). Berdasarkan analisis LQ, subsektor kehutanan dan penebangan kayu serta subsektor tanaman perkebunan merupakan subsektor unggulan dalam 5 tahun terakhir termasuk ketika terjadi pandemi. Provinsi Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia sebesar 2,86 juta ha atau 19,51% dari seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia (BPS, 2021; dataindonesia.id). Hal ini mendukung peningkatan PDRB dalam subsektor perkebunan di Riau. Meskipun memiliki potensi dan mampu memberikan kontribusi terbesar dalam aspek PDRB di regional Sumatera, kemampuan sektor unggulan ini di Provinsi Riau dalam penyerapan tenaga kerja masih lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara dan Lampung.

Kemudian, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan rata-rata PDRB tahun 2018-2021 di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terbesar kedua di regional Sumatera. Berdasarkan

data BPS, sektor ini berkontribusi sebesar 22,89% terhadap seluruh PDRB regional di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data 2021, sektor ini berkontribusi 22,04% dari seluruh PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, sektor ini juga berhasil menyerap 9,07% dari total penduduk yang bekerja di Sumut. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,69% poin dibanding periode Agustus 2020.

Sektor unggulan Pertanian, kehutanan, dan perikanan juga merupakan penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Lampung sebesar 28,39 persen (BPS, 2021). Sektor ini menyerap lebih dari 1,5 juta tenaga kerja (BPS, 2021). Lampung menghasilkan padi, jagung, dan kopi sebagai komoditas hasil produksi andalan tingkat nasional. Pemerintah setempat juga memperkuat sektor ini melalui Kartu Petani Berjaya (KPB). Komitmen pemerintah daerah telah tertuang dalam misi pada RPJMD 2019-2024 untuk kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Sementara itu, Lampung juga diprioritaskan sebagai percontohan nasional untuk program pertanian. Untuk mempertahankan sektor ini, pemerintah daerah juga berencana untuk melindungi 10.175 ha sawah di Lampung Barat melalui pembuatan perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

2.I.C. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

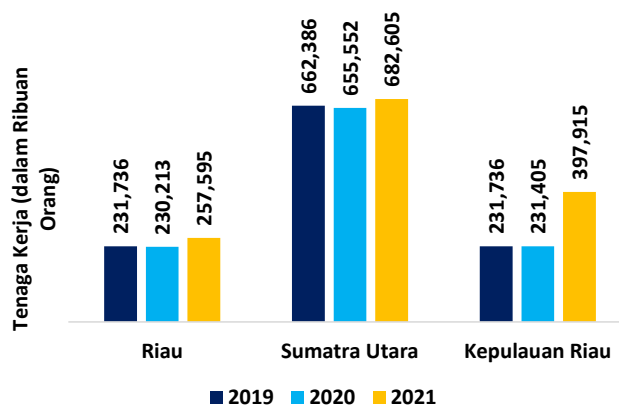
Industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang berupa kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling) (BPS, 2021). Sepanjang tahun 2018-2021, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB regional bergerak

TABEL 26. PERSENTASE KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Riau	28,89%	28,77%	29,73%	30,86%
2	Sumatera Utara	23,16%	22,55%	22,41%	21,88%
3	Kepulauan Riau	14,32%	14,92%	15,17%	15,10%
4	7 Provinsi Lainnya	33,63%	33,76%	32,69%	32,16%
Kontribusi total sektor industri pengolahan terhadap PDRB Regional Sumatera		19.85%	19.79%	20.73%	20.86%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 82. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN PROVINSI RIAU, SUMATERA UTARA, DAN KEPULAUAN RIAU TERHADAP REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

cenderung meningkat. Penurunan terjadi hanya pada tahun 2019. Sektor ini telah menyerap rata-rata 2,4 juta tenaga kerja (BPS; tahun 2019-2021).

Berdasarkan data BPS, tiga provinsi yang berkontribusi pada sektor unggulan industri pengolahan, yaitu Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Pada tahun 2021, masing-masing provinsi kontribusi sebesar Rp236,78 juta; Rp167,89 juta; dan Rp115,85 juta. Sementara itu, rata-rata kontribusi sepanjang tahun 2018-2021 pada Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau masing-masing sebesar Rp205,94 miliar; Rp156,27 miliar; dan Rp103,56 miliar.

Secara regional, Provinsi Riau merupakan kontributor terbesar pada sektor industri pengolahan. Riau menyumbang 30,86% pada sektor ini di tahun 2021. Meski demikian, jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor ini masih lebih rendah dari Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Sektor industri pengolahan juga mendominasi perekonomian Provinsi Riau. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Riau menurut analisis shift share meliputi subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional. Berdasarkan analisis LQ, subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas dan Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman merupakan lapangan usaha unggulan. Kendala dari sektor industri pengolahan, antara lain tingkat produktivitas yang masih rendah; infrastruktur sektor hulu sampai hilir produksi belum memadai; dan kurangnya riset teknologi pengembangan produk turunan. Industri pengolahan merupakan salah satu sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja

terbesar (8,18%). Industri pengolahan merupakan sektor unggulan khususnya di Dumai dan Pekanbaru. Pada sektor Industri Pengolahan, dari 355 Industri Skala Besar Riau, sebagian besar bertumpu pada hasil perkebunan untuk menjalankan operasinya.

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara merupakan kontributor terbesar kedua pada industri pengolahan. Sektor ini juga merupakan sektor unggulan di provinsi Sumatera Utara sendiri. Subsektor industri pengolahan yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan di Sumut adalah (1) Industri makanan dan minuman, (2) Industri Logam Dasar, (3) Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, (4) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, (5) Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, dan (6) Industri Alat Angkutan.

Kemudian, Kepulauan Riau turut berdampak signifikan terhadap sektor unggulan industri pengolahan. Dengan nilai PDRB lapangan usaha sebesar Rp103,56 miliar, Kepulauan Riau menjadi kontributor terbesar ketiga di regional Sumatera. Industri ini juga yang menopang ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2021. Lapangan pekerjaan di sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan persentase sebesar 2,25%. Pada tahun 2021, kontribusi sektor industri pengolahan berasal dari peningkatan nilai tambah subkategori industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik, serta sub kategori industri mesin dan perlengkapan. Kepulauan Riau juga memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK) Galang Batang di Pulau

Bintan, Kepulauan Riau yang mendukung industri pengolahan. KEK Galang Batang dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauxit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter.

2.I.D. SEKTOR PERDAGANGAN BESAR & ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL & SEPEDA MOTOR

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor merupakan kontributor terbesar ketiga pada sektor unggulan regional Sumatera tahun 2021. Berdasarkan data BPS, sektor ini telah berkontribusi sebesar Rp497,89 juta pada tahun 2021 atau rata-rata Rp465,17 juta (tahun 2018-2021). Sepanjang tahun 2018-2021, tingkat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian regional relatif stabil atau stagnan, yaitu pada kisaran 13%. Nilainya sempat menguat pada tahun 2019, namun kemudian bergerak sedikit turun hingga tahun 2021.

Terdapat tiga provinsi yang berkontribusi terbesar melalui sektor perdagangan besar dan eceran, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Masing-masing kontribusi tahun 2021 sebesar

Rp162,58 miliar; Rp83 miliar; dan Rp22,47miliar. Sementara itu, rata-rata kontribusi tahun 2018-2021 pada Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, yaitu Rp150,11 miliar; Rp78,41 miliar; dan Rp61,14 miliar. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB provinsi, sektor ini juga membantu perekonomian melalui peran penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi dan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir.

Selain berdampak pada kontribusi regional, sektor perdagangan besar dan eceran juga merupakan sektor unggulan pada ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Sumatera Utara merupakan kontributor tertinggi pada sektor ini dengan capaian 2021 sebesar 32,65% atau Rp162,58 miliar. Penguatan sektor ini didukung oleh karakteristik Sumatera Utara yang lebih banyak bergantung pada konsumsi rumah tangga. Berbagai metode analisis yang digunakan menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan di Provinsi Sumatera Utara.

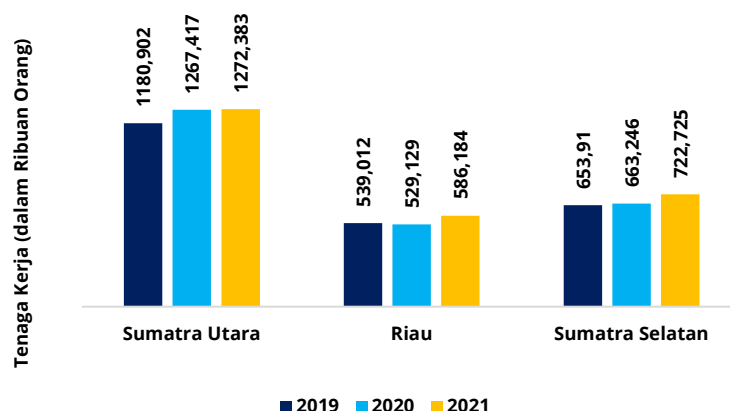
Di posisi kedua, terdapat provinsi Riau sebagai kontributor sektor unggulan perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2021, PDRB sektor unggulan perdagangan besar dan eceran di Provinsi Riau sebesar Rp83 miliar atau 16,67% dari kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran regional

TABEL 27. PERSENTASE KONTRIBUSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Sumatera Utara	31,39%	31,83%	33,12%	32,65%
2	Riau	17,31%	17,29%	16,20%	16,67%
3	Kepulauan Riau	5,16%	5,14%	4,66%	4,51%
4	7 Provinsi Lainnya	46,14%	45,74%	46,02%	46,17%
Kontribusi total sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Regional Sumatera		13.24%	13.85%	13.74%	13.53%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 83. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU, SUMATERA UTARA, DAN LAMPUNG TERHADAP REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

Sumatera. Sementara itu, sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar kedua (18,62%) di Provinsi Riau. Penyerapan tenaga kerja pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sebanyak 54,75% angkatan kerja di Riau bekerja di sektor informal.

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Selatan merupakan kontributor terbesar ketiga pada sektor unggulan perdagangan besar dan eceran regional Sumatera, dengan nilai kontribusi mencapai Rp61,135 miliar pada tahun 2021. Selain menjadi sektor unggulan, sektor tersebut merupakan bagian dari sektor potensial. Berdasarkan data BPS, ditunjukkan bahwa dari total 4,18 juta orang tenaga kerja di provinsi Sumatera Selatan (data Agustus 2021), terdapat sebanyak lebih dari 722 ribu orang atau $\pm 17\%$ tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Setiap tahun, jumlah penyerapan tenaga kerja sektor ini selalu meningkat. Pada tahun 2021, dengan perubahan dari 663,25 ribu orang di Tahun 2020 menjadi 722,73 ribu orang di Tahun 2021, sektor ini bahkan menjadi lapangan usaha dengan peningkatan persentase terbesar di wilayah Sumatera selatan, yaitu mencapai 1,08 persen poin.

2.I.E. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SUMATERA

Untuk regional Sumatera, dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis BPS, sektor potensial di regional Sumatera adalah sektor informasi dan komunikasi. Sektor ini merupakan sektor potensial karena memiliki rata-rata laju pertumbuhan tertinggi sebesar 8,70% dan menduduki peringkat

kelima dalam kontribusinya terhadap PDRB regional Sumatera.

2.I.F. SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sektor informasi dan komunikasi didukung oleh perkembangan pesat teknologi informasi di Indonesia. Berdasarkan publikasi BPS (2020), perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga (nasional) yang mencapai angka 78,18 persen. Pertumbuhan pengguna internet rumah tangga juga didukung oleh pertumbuhan penduduk pengguna telepon seluler. Pada tahun 2020, jumlah pengguna telepon seluler mencapai 62,84% dan komputer rumah tangga mencapai 18,83 persen. Keberadaan pandemi Covid-19 bahkan mendorong pertumbuhan di sektor ini. Persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai komputer menurut pulau menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di Pulau Sumatera semula 16,82% (tahun 2019) menjadi 16,94% (tahun 2020).

Tabel Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Informasi & Komunikasi menunjukkan bahwa Kepulauan Riau memiliki rata-rata laju pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi tertinggi sepanjang tahun 2019-2021. Namun, di saat yang sama, rata-rata kontribusi sektor ini terhadap PDRB provinsi hanya sebesar 6,64%. Artinya, meskipun secara rata-rata regional Sumatera sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor potensial dengan rata-rata laju pertumbuhan yang signifikan, namun sektor ini belum termasuk dalam sektor basis/unggulan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja,

TABEL 28. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SUMATERA

Uraian	Rata-rata laju pertumbuhan 2019-2021	Rank laju pertumbuhan	Rata-rata % kontribusi terhadap PDRB 2018-2021	Rank % kontribusi terhadap PDRB
Informasi dan Komunikasi	8,70%	1	3%	9

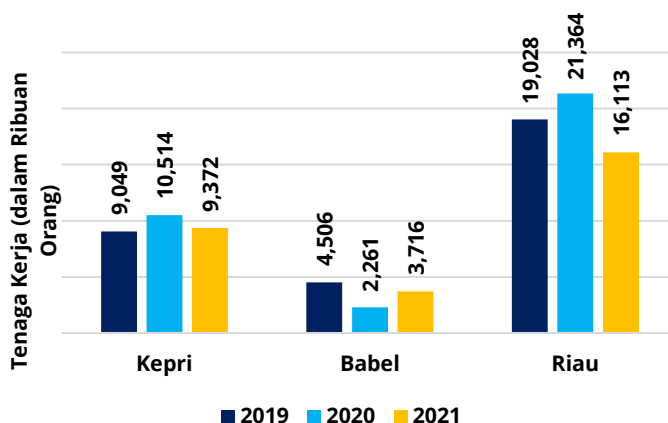
Sumber: BPS (diolah)

TABEL 29. RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR INFORMASI & KOMUNIKASI 2019-2021 PADA TIGA PROVINSI UTAMA YANG MENJADIKAN SEKTOR INFORMASI & KOMUNIKASI SEBAGAI SEKTOR POTENSIAL

Provinsi	Rata-rata Laju Pertumbuhan 2019-2021	Rata-rata % Kontribusi terhadap PDRB Provinsi 2019-2021
Kepulauan Riau	12,66%	6,64%
Bangka Belitung	12,34%	1,67%
Riau	9,70%	6,63%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 84. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PER PROVINSI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

maka terjadi pergerakan fluktuatif penyerapan tenaga kerja di sektor informasi dan komunikasi tahun 2019-2021. Pada Provinsi Kepulauan Riau dan Riau, terjadi peningkatan signifikan di tahun 2020. Kemudian, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di tahun 2021 yang masih merupakan masa pandemi Covid-19. Sementara itu, Provinsi Bangka Belitung bergerak sebaliknya. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di tahun 2021 setelah sebelumnya menurun di tahun 2020.

perekonomian di regional Jawa yaitu: perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor informasi dan komunikasi. Kelima sektor unggulan di atas menguasai $\pm 67,46\%$ porsi PDRB di regional Jawa. Sejak tahun 2019, kelima sektor unggulan ini tidak mengalami banyak perubahan. Total kontribusi kelima sektor terbesar terhadap PDRB Jawa tersebut lebih dari 60 persen.

2.II. REGIONAL JAWA

2.II.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL JAWA

Untuk regional Jawa, dilihat dari nilai dan persentase terhadap total PDRB berdasarkan data yang dirilis BPS, 5 (lima) besar sektor unggulan di regional adalah sebagai berikut:

TABEL 21. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL JAWA

Sektor Unggulan	Nilai Kontribusi terhadap PDRB	% Kontribusi terhadap PDRB
Industri Pengolahan	2.751,1T	28,03%
Perdagangan Besar dan eceran	1.557,1T	15,86%
Konstruksi	996,1T	10,15%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	725,0T	7,39%
Informasi dan Komunikasi	592,6T	6,03%

Sumber: BPS (diolah)

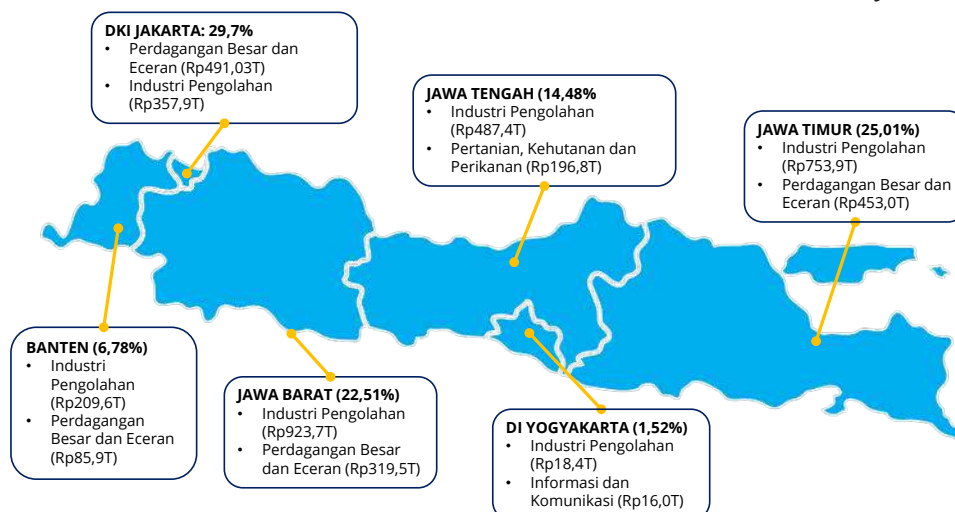
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Sektor Industri Pengolahan dengan sangat dominan dan menjadi sektor unggulan utama penggerak perekonomian di regional Jawa dengan kontribusi terhadap total PDRB mencapai 28,03%. Selain Sektor Industri Pengolahan, terdapat beberapa sektor lain yang juga berikan kontribusi besar terhadap

Jawa merupakan kawasan regional yang dihuni oleh lebih dari 150 juta penduduk atau sebesar hampir 60% dari total populasi Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak di kawasan ini, terutama penduduk yang berada dalam usia produktif, dapat digunakan sebagai salah satu pendukung dalam menggerakkan roda perekonomian dan pengembangan sektor-sektor unggulan maupun potensial. Pada tahun 2021, regional Jawa menyumbang 57,89% dari total PDB Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar Peta Sektor Unggulan Setiap Provinsi di Regional Jawa, provinsi penyumbang PDRB terbesar di regional Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta (29,7%), Provinsi Jawa Timur (25,01%), dan Provinsi Jawa Barat (22,51%).

Seperti yang ditunjukkan pada tabel Sektor Unggulan Regional Jawa, kontribusi setiap sektor tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2020. Seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mengalami penurunan sebesar Rp5,53triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, meskipun sektor akomodasi dan makan minum bertumbuh positif dibandingkan tahun 2020, namun secara peringkat kontribusinya terhadap PDRB Jawa menurun satu tingkat dan masih belum pulih sepenuhnya seperti masa sebelum pandemi.

Sektor lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan besar dan

GAMBAR 85. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL JAWA



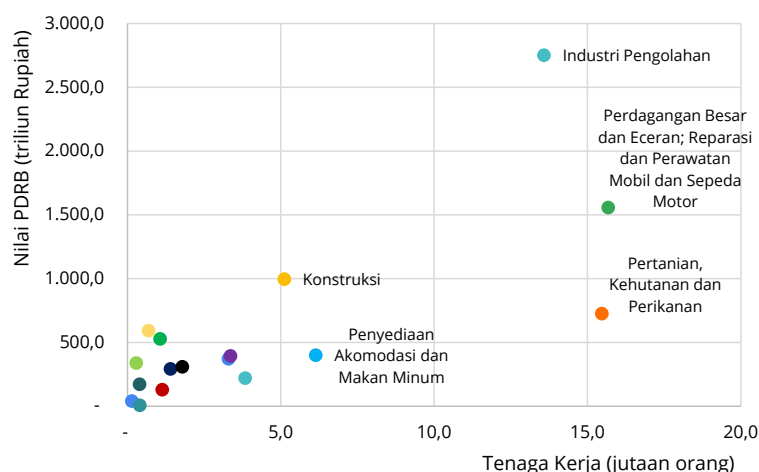
Sumber: BPS, diolah

TABEL 30. PERSENTASE KONTRIBUSI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018-2021

Provinsi	2020		2021		Pertumbuhan	
	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	713.625,85	4	725.017,08	4	11.391,23	0
Pertambangan dan Penggalian	146.741,87	14	170.458,99	14	23.717,12	0
Industri Pengolahan	2.555.376,09	1	2.751.146,36	1	195.770,27	0
Pengadaan Listrik dan Gas	38.049,93	16	39.848,80	16	1.798,88	0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.754,53	17	7.296,09	17	541,56	0
Konstruksi	925.232,01	3	996.095,32	3	70.863,30	0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.453.097,85	2	1.557.119,30	2	104.021,46	0
Transportasi dan Pergudangan	351.842,09	9	372.995,58	9	21.153,48	0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	371.958,64	8	399.530,04	7	27.571,41	-1
Informasi dan Komunikasi	554.323,90	5	591.592,24	5	37.268,34	0
Jasa Keuangan dan Asuransi	499.411,26	6	526.293,18	6	26.881,91	0
Real Estat	326.474,63	10	338.456,23	10	11.981,59	0
Jasa Perusahaan	286.542,21	12	291.762,11	12	5.219,90	0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	312.897,60	11	307.374,67	11	-5.522,94	0
Jasa Pendidikan	386.330,65	7	392.831,33	8	6.500,68	1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118.621,53	15	127.794,77	15	9.173,24	0
Jasa Lainnya	217.529,25	13	219.381,16	13	1.851,91	0
Jumlah	9.264.809,89		9.814.993,25		550.183,36	

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 86. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun kedua sektor ini menyerap tenaga kerja yang signifikan, namun kontribusinya terhadap PDRB lebih kecil dibandingkan industri pengolahan.

Berdasarkan nilai kontribusinya, sektor maju dan tumbuh cepat dengan kontribusi PDRB terbesar di regional Jawa, yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan, adalah (i) industri pengolahan; (ii) perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; dan (iii) sektor konstruksi. Selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menduduki peringkat keempat dalam kontribusinya terhadap PDRB Jawa dan menyerap tenaga kerja yang signifikan. Namun sektor ini memiliki comparative advantage yang rendah dan mempunyai tingkat pertumbuhan di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata sektor ini pada tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut kurang menguntungkan karena tidak mampu bersaing dengan daerah lainnya.

2.II.B. INDUSTRI PENGOLAHAN

Badan Pusat Statistik mendefinisikan industri pengolahan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/maklon dan pekerjaan perakitan (assembling). Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama pada setiap provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian regional Jawa, dengan pengecualian di DKI Jakarta. Sejak tahun 2018, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Jawa cenderung stabil di angka 27-28%. Pada tahun 2021, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB regional Jawa sebesar Rp2.751.146,36 Milyar atau 28,03%.

Pada tahun 2021, sebagaimana yang tercantum pada tabel Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tiap Provinsi terhadap Total PDRB Regional Jawa Tahun 2018-2021, provinsi penyumbang PDRB sektor industri pengolahan terbesar di regional Jawa adalah Jawa Barat (9,41%), Jawa Timur (7,68%) dan Jawa Tengah (4,97%). Setelah mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 akibat banyaknya penutupan bisnis maupun PHK di sektor ini karena adanya pandemi COVID-19, sudah terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di tahun 2021. Namun demikian, peningkatan tersebut masih belum kembali sepenuhnya seperti di tahun 2019, kecuali provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Di provinsi Jawa Barat, relaksasi ekonomi yang diberikan pemerintah digunakan oleh pelaku usaha di sektor industri pengolahan untuk mengembangkan kembali bisnisnya. Hampir di semua industri mengalami pertumbuhan positif pada triwulan IV/2021 dibanding triwulan sebelumnya. Terlebih lagi, pemberlakuan lockdown ketat dan terjadinya krisis energi di beberapa negara lain membuka peluang bagi produsen dalam negeri untuk mengisi kekosongan pasokan global maupun domestik. Sektor industri pengolahan menduduki peringkat kedua dalam penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Barat.

Industri Pengolahan di Jawa Timur merupakan kontributor utama dalam struktur PDRB Provinsi Jatim pada tahun 2021 sebesar 30,25% dan menyumbang 7,68% pada PDRB Regional Jawa. Meskipun industri pengolahan kontributor terbesar PDRB Jawa Timur, namun kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja masih dibawah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

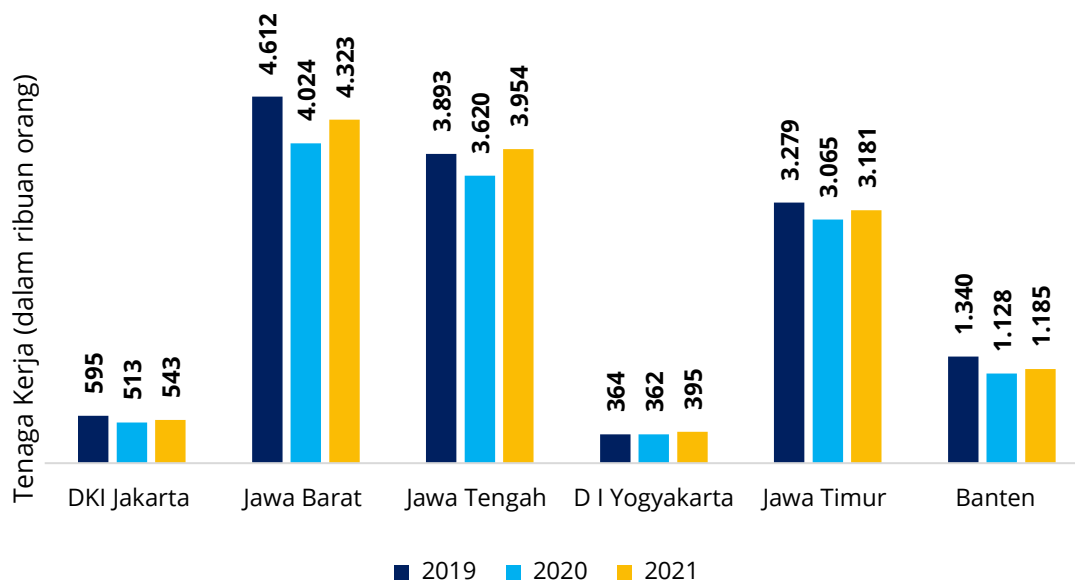
Sementara itu di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021, Industri Pengolahan memiliki peran dominan dan tumbuh positif sebesar 2,32%. Penyumbang terbesar di sektor industri pengolahan didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman, subsektor industri pengolahan tembakau, industri pengilangan migas, industri tekstil dan pakaian jadi,

TABEL 31. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Banten	2,19%	2,15%	2,11%	2,14%
2	DIY	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
3	DKI Jakarta	3,90%	3,67%	3,40%	3,65%
4	Jawa Barat	9,45%	9,34%	9,25%	9,41%
5	Jawa Tengah	4,98%	4,95%	5,01%	4,97%
6	Jawa Timur	7,44%	7,52%	7,61%	7,68%
Kontribusi total industri pengolahan terhadap PDRB Regional Jawa		28,16%	27,83%	27,58%	28,03%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 87. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Di tahun 2021 ini, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan telah melebihi jumlah tenaga kerja sebelum masa pandemi dan menduduki peringkat kedua dalam penyerapan total tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah.

2.II.C. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Dalam kamus pembakuan statistik yang dikeluarkan oleh BPS, sektor kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikuti

kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor merupakan kontributor utama PDRB provinsi DKI Jakarta dan menduduki peringkat kedua pada provinsi lainnya. Namun, sektor ini bukan merupakan kontributor utama di provinsi D.I. Yogyakarta. Sejak tahun 2018, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Jawa cenderung stabil di angka 15-16%. Pada tahun 2021, kontribusi perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB regional Jawa sebesar Rp1.557.119,3 Milyar atau 15,86%.

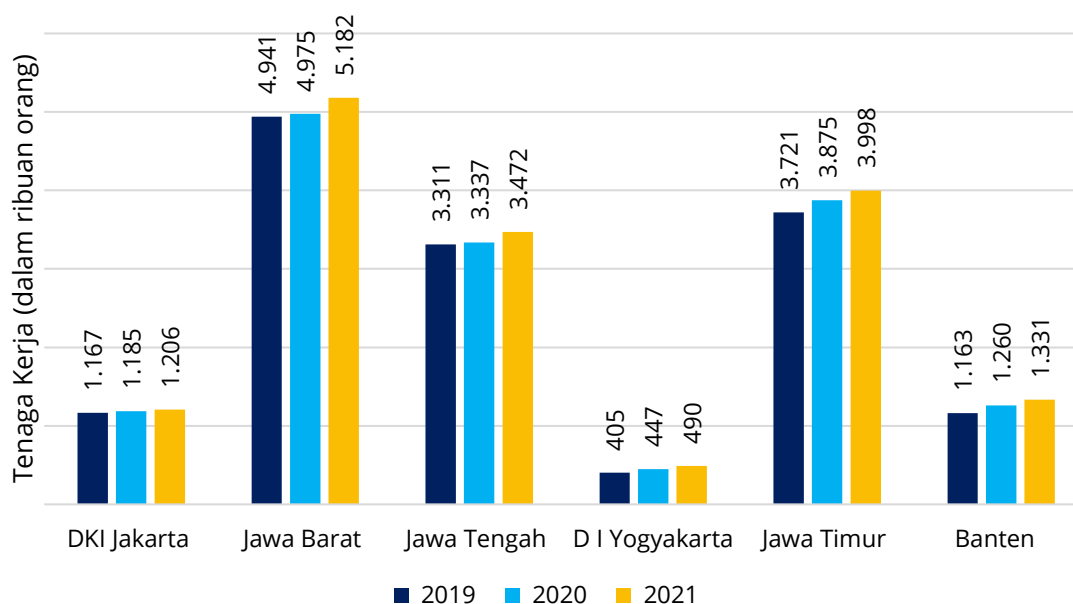
Pada tahun 2021, sebagaimana yang tercantum pada tabel Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan

TABEL 32. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL JAWA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Banten	5,51%	5,52%	5,73%	5,52%
2	DIY	0,80%	0,78%	0,80%	0,78%
3	DKI Jakarta	31,62%	31,75%	31,68%	31,53%
4	Jawa Barat	20,98%	21,22%	20,91%	20,52%
5	Jawa Tengah	12,44%	12,26%	12,52%	12,55%
6	Jawa Timur	28,64%	28,47%	28,36%	29,09%
Kontribusi total sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Regional Jawa		15,88%	16,13%	15,68%	15,86%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 88. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI REGIONAL JAWA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

Besar dan Eceran, provinsi penyumbang PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor terbesar di regional Jawa adalah DKI Jakarta (31,53%), Jawa Timur (29,09%) dan Jawa Barat (20,52%). Dengan jumlah penduduk yang sangat besar sebagai konsumen domestik dan posisi geografis regional Jawa yang strategis, menjadi faktor utama pendorong kegiatan ekonomi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini selalu memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB regional Jawa dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jawa.

Meskipun dengan adanya pandemi COVID-19, penyerapan tenaga kerja di sektor ini tidak mengalami penurunan dan malah mengalami peningkatan, baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor yang signifikan terdapat di Jawa Barat (206.444 tenaga kerja atau peningkatan sebesar 4,15%) dan Jawa Tengah (134.434 tenaga kerja atau peningkatan sebesar 4,03%), namun secara persentase, peningkatan terbesar terjadi di D.I. Yogyakarta yaitu 9,53% (42.593 tenaga kerja).

Salah satu kondisi yang menghambat kinerja sektor perdagangan adalah tingginya biaya logistik. Biaya untuk mengirim barang antar daerah dalam negeri lebih mahal dibanding pengiriman dari dan ke luar negeri. Hal ini berdampak pada rendahnya daya

saing produk lokal di banding produk impor. Belum optimalnya jejaring pasar dan kerjasama perdagangan juga menyebabkan kurang berkembangnya pasar ekspor yang menghambat kinerja sektor perdagangan. Faktor penghambat lainnya adalah belum dimanfaatkannya teknologi informasi secara maksimal dalam melakukan kegiatan perdagangan dan pemasaran. Ketimpangan kondisi infrastruktur fisik (jalan dan jembatan) dan infrastruktur teknologi (jangkauan jaringan komunikasi) antar daerah di regional Jawa juga menjadi salah satu hal yang mengakibatkan asimetri informasi yang berujung pada fluktuasi atau perbedaan harga barang dan jasa antar daerah.

2.II.D. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL JAWA

Untuk regional Jawa, dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi selama tiga tahun terakhir berdasarkan data yang dirilis BPS, sektor potensial di regional Jawa adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor ini merupakan sektor potensial karena memiliki rata-rata laju pertumbuhan tertinggi sebesar 10,26% dan menduduki peringkat kelima dalam kontribusinya terhadap PDRB regional Jawa.

2.II.E. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TABEL 33. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL JAWA

Uraian	Rata-rata laju pertumbuhan 2019-2021	Rank laju pertumbuhan	Rata-rata % kontribusi terhadap PDRB 2018-2021	Rank % kontribusi terhadap PDRB
Informasi dan Komunikasi	10,26%	1	5,71%	5

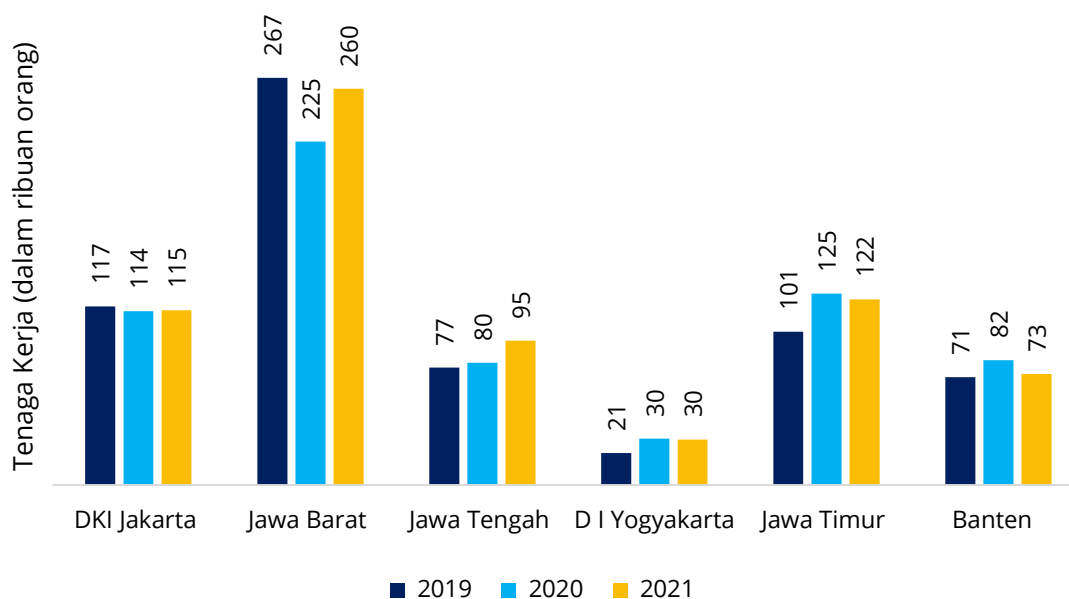
Sumber: BPS (diolah)

TABEL 34. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL JAWA

Provinsi	Rata-rata Laju Pertumbuhan 2019-2021	Rata-rata % Kontribusi terhadap PDRB Provinsi 2019-2021
Banten	7,88%	3,85%
DKI Jakarta	9,12%	8,95%
Jawa Barat	16,90%	3,58%
Jawa tengah	11,11%	4,06%
D.I. Yogyakarta	14,60%	9,48%
Jawa Timur	8,03%	4,99%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 89. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PER PROVINSI REGIONAL JAWA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

Menurut kamus BPS, sektor informasi dan komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Termasuk penerbitan yang mencakup perolehan hak cipta untuk isinya (produk informasi) dan membuat isinya tersedia ke masyarakat umum dengan cara atau melalui reproduksi dan distribusi dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang layak dari penerbitan (dalam bentuk cetakan, elektronik atau audio pada internet seperti produk multimedia seperti buku referensi cd room dan lain-lain) dicakup dalam kategori ini.

Berdasarkan tabel Laju Pertumbuhan dan kontribusi sektor potensial regional Jawa, provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 paling tinggi adalah Jawa Barat (16,9%), D.I. Yogyakarta (14,6%), dan Jawa Tengah (11,11%). Selain itu, pada provinsi D.I. Yogyakarta, selain memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, sektor informasi dan komunikasi juga memiliki kontribusi yang signifikan

terhadap PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta.

Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja di sektor informasi dan komunikasi di regional Jawa mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Namun bila menilik penyerapan tenaga kerja per provinsi, sebagaimana tergambar pada gambar Pertumbuhan Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Informasi dan Komunikasi Per Provinsi Regional Jawa Tahun 2019-2021, dapat dilihat bahwa setiap provinsi memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang beragam. Hanya Jawa Tengah yang menunjukkan penambahan jumlah tenaga kerja positif selama tiga tahun. Penyerapan tenaga kerja sektor ini di DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami penurunan di tahun 2020, namun telah terjadi peningkatan di tahun 2021. Sedangkan di Provinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten mengalami perubahan sebaliknya, terjadi peningkatan di tahun 2020 dan penurunan di 2021.

Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup pesat di masa pandemi akibat adanya kebijakan bekerja atau bersekolah dari rumah. Hal ini menyebabkan bertambahnya produksi

dan distribusi barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi. Pertumbuhan sektor ini dikarenakan meningkatnya rata-rata konsumsi rumah tangga untuk komunikasi, terlebih di saat masa pandemi ini, kebutuhan rumah tangga relatif banyak dipenuhi melalui komunikasi digital. Salah satu pendukung bertumbuhnya sektor potensial ini adalah perangkat yang digunakan dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan teknologi informasi itu sendiri. Pergeseran berbagai kegiatan perkantoran, perdagangan dan pendidikan dari luring menjadi daring akibat kebijakan pembatasan pergerakan di masa pandemi, mendorong bertambahnya kebutuhan kepemilikan perangkat komunikasi yang berkontribusi langsung pada sektor ini. Bertambahnya jumlah produk digital yang dihasilkan juga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi.

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

2.III.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN

Untuk regional Kalimantan, dilihat dari nilai dan persentase terhadap total PDRB berdasarkan data yang dirilis BPS, 5 (lima) besar sektor unggulan di regional adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan sangat dominan menjadi sektor unggulan utama penggerak perekonomian di regional Kalimantan dengan kontribusi terhadap total PDRB mencapai 29,53%.

Selain Sektor Pertambangan dan Penggalian, terdapat beberapa sektor lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di regional Kalimantan yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran. Kelima sektor unggulan di atas menguasai $\pm 78,24\%$ porsi PDRB di regional Kalimantan. Gambaran umum mengenai distribusi/sebaran sektor-sektor unggulan tersebut di seluruh provinsi pada regional Kalimantan dapat dilihat dalam Peta Sektor Unggulan di bawah ini.

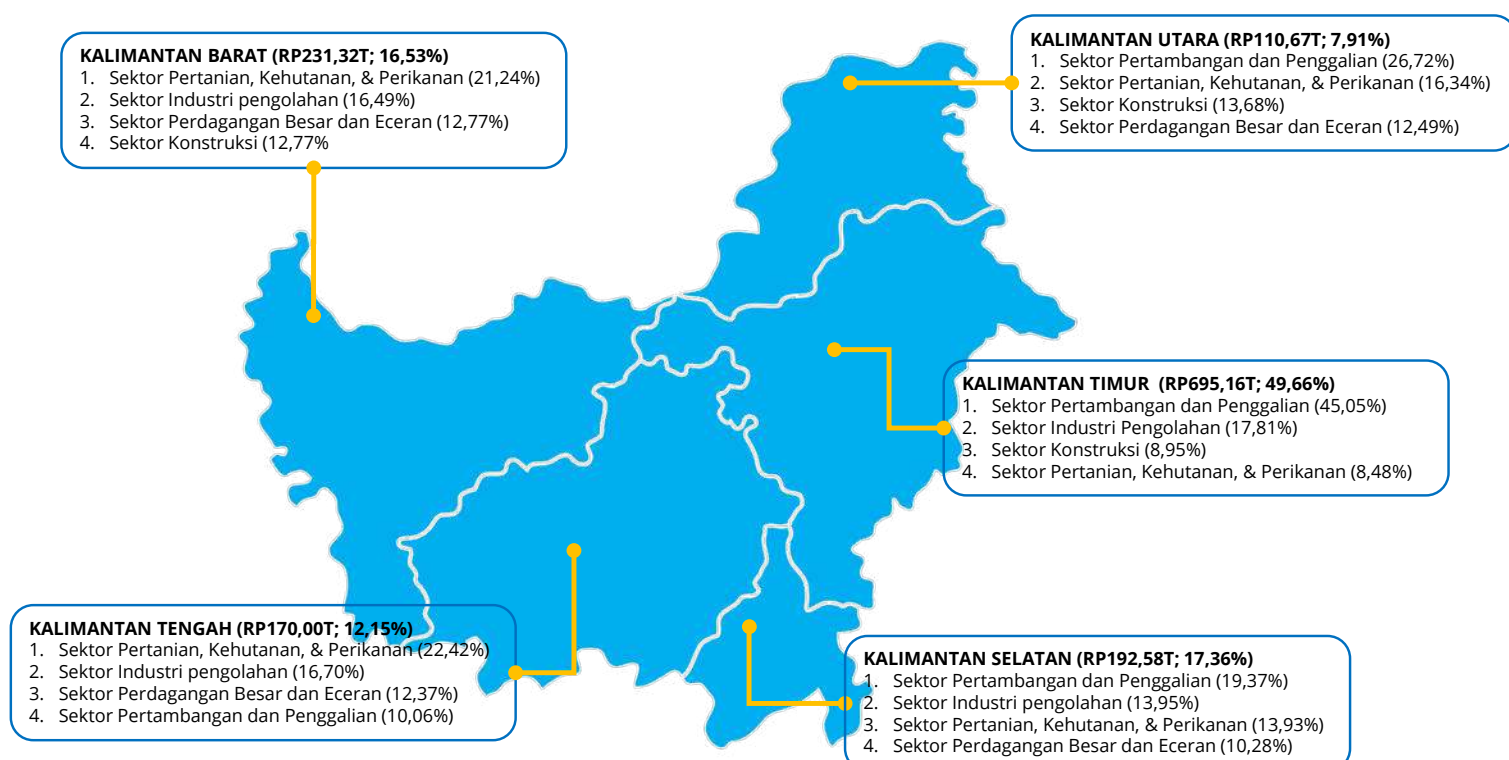
Melalui peta sektor unggulan di atas, dapat kita lihat distribusi dukungan atau kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap perekonomian, baik secara parsial di setiap provinsi serta secara keseluruhan terhadap regional Kalimantan. Bila kita perhatikan, maka terlihat bahwa dominasi sektor unggulan Pertambangan dan Penggalian di regional Kalimantan didukung/ dikontribusikan oleh status sektor tersebut sebagai sektor unggulan utama hampir di seluruh provinsi pada regional Kalimantan, terutama di Kalimantan timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

TABEL 22. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN

Sektor Unggulan	Nilai Kontribusi thd PDRB	% kontribusi thd PDRB
Pertambangan dan Penggalian	413,39 T	29,53%
Industri Pengolahan	227,13 T	16,23%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	191,07 T	13,65%
Konstruksi	137,87 T	9,85%
Perdagangan Besar dan Eceran	125,65 T	8,98%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 90. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL KALIMANTAN



Sumber: BPS, diolah

TABEL 35. PERBANDINGAN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

Sektor Unggulan	2020			2021		
	Nilai*	% kontr.	Rank	Nilai*	% kontr.	Rank
Sektor Pertambangan dan Penggalian	338,25	26,99%	1	413,39	29,53%	1
Sektor Industri Pengolahan	207,26	16,54%	2	227,13	16,23%	2
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	173,39	13,84%	3	191,07	13,65%	3
Sektor Konstruksi	126,71	10,11%	4	137,87	9,85%	4
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	118,61	9,46%	5	125,65	8,98%	5

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 91. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, maka relatif tidak terdapat perubahan berarti atas kondisi sektor unggulan di regional Kalimantan, baik dari sisi komposisi maupun peringkat nilai dan kontribusi. Meskipun komposisinya masih sama, namun terdapat perbedaan atas status perkembangan kontribusi sektoral di tahun 2021. Hanya terdapat satu sektor yang mengalami peningkatan persentase kontribusi, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian saja. Sementara itu, sektor unggulan lainnya justru mengalami penurunan persentase kontribusi meskipun secara nominal mengalami kenaikan.

Pada Tahun 2021, kontribusi sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja cukup besar. Kelima sektor unggulan pada regional Kalimantan mampu menyerap sekitar 5,6 juta orang tenaga kerja atau 70,5% dari total serapan seluruh sektor usaha. Dari kelima sektor unggulan; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 2,8 juta orang tenaga kerja. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, dengan total serapan hanya sebanyak 381 ribu orang tenaga kerja saja. Meskipun tingkat serapan tenaga kerjanya rendah, namun karena nilai ekonominya yang tinggi, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi PDRB per kapita atau per tenaga kerja yang tinggi bila dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 1,076 Miliar/orang/

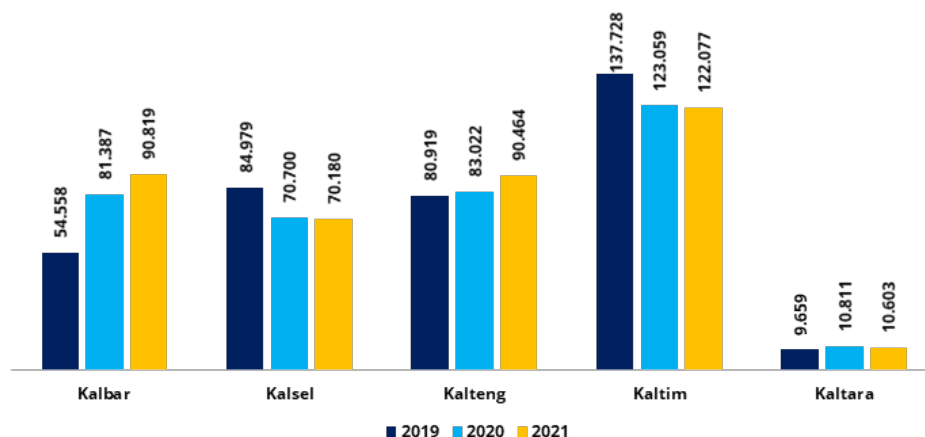
tahun atau hampir 16 kali lipat dibandingkan nilai pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum terdapat hubungan linear negatif antara tingkat penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi PDRB per kapita atau per tenaga kerja pada sektor unggulan.

Pembahasan lebih lanjut terkait sektor unggulan pada regional Kalimantan, terutama 2 (dua) sektor utamanya yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap PDRB di wilayah Kalimantan, yaitu: (i) Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan (ii) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.III.B. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Selama tiga tahun terakhir, rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian regional sangat besar, yaitu berada di kisaran 28,81%. Sektor pertambangan dan penggalian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis di sebagian besar regional Kalimantan, yaitu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sektor pertambangan berturut-turut menyumbang 19,37 persen, 45,05 persen, dan 26,72 persen dari struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara di tahun 2021.

GAMBAR 92. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN & PENGGALIAN TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

Komoditas utama dari sektor pertambangan dan penggalian di regional Kalimantan adalah batu bara. Selama sepuluh tahun berturut-turut, kontribusi sektor pertambangan batu bara telah menjadi faktor utama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi bahwa Pulau Kalimantan menyimpan cadangan sebesar 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batubara terbesar di Indonesia, yakni 88,31 miliar ton sumber daya dan 25,84 miliar ton cadangan batubara. Meskipun masih menopang ekonomi secara signifikan, namun dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini telah menjadi “sunset industry”, karena mengalami perlambatan pertumbuhan, terutama di wilayah Kalimantan Selatan.

Sebagai sektor unggulan, kontribusi penyerapan tenaga kerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian di Kalimantan relatif kecil, sektor ini hanya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 384.143 orang atau sekitar 5 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Kalimantan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan sektor ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja dan lebih banyak ditopang dengan alat berat. Perkembangan tingkat serapan tenaga kerja pada tiga provinsi utama yang mengandalkan sektor ini sebagai kontributor utama perekonomian yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara relatif stagnan dan tidak menunjukkan peningkatan.

Tantangan fiskal untuk sektor pertambangan dan penggalian di regional Kalimantan relatif besar. Hal ini disebabkan sektor ini sangat volatile dan dipengaruhi oleh kondisi permintaan/ pasar global. Naik turunnya sektor ini sangat bergantung dari negara-negara utama tujuan ekspor batubara yaitu Tiongkok dan India. Dari sisi pemerintah, adalah bagaimana memberikan kepastian hukum atau aturan-aturan main dalam pertambangan sehingga dalam bisnis pertambangan ini tetap berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat terutama daerah penghasil tambang yang dalam kenyataan tingkat kemiskinannya tinggi. Selain itu, dikaitkan dengan fakta bahwa sektor pertambangan memiliki share besar terhadap perekonomian, maka hendaknya dapat dijadikan pemicu tumbuhnya industri-industri lainnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan hilirisasi produk pertambangan, seperti pengolahan batubara menjadi produk turunan, serta gasifikasi batubara yang akan menghasilkan DME untuk mensubstitusi dan mengurangi impor LPG yang dimanfaatkan oleh sektor lainnya.

2.III.C. SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Sektor lain yang merupakan unggulan di regional Kalimantan ialah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata

TABEL 36. PERBANDINGAN SEKTOR UNGGULAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

Jenis Komoditas	Nilai Ekspor (dlm \$)
Karet Alam	283.483.972
Kayu Lapis (Plywood)	123.329.316
Buah Pinang	39.471.506
Kelapa Bulat	37.994.111
Bungkil dan residu padat kelapa sawit	34.630.543
Kelapa parut	26.348.680
Bungkil dan residu kelapa sawit (Palm Kernel Expeller)	22.084.290
Total	567.342.418

Sumber: BPS (diolah)

TABEL 37. LUAS AREAL DAN NILAI PRODUKSI KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Areal (dlm HA)	1.480.988	1.640.883	1.922.083	2.018.660	2.049.790
Nilai Produksi (dlm Ton)	5.778.611	7.230.094	7.664.841	7.685.770	7.920.462

Sumber: BPS (diolah)

kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian regional atas dasar harga berlaku relatif besar, yaitu berada di kisaran 13,43%. Sektor ini masih menjadi sektor basis atau kekuatan utama pada perekonomian di beberapa provinsi, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pada kedua provinsi tersebut, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan sumbangan dominan terhadap PDRB di tahun 2021, masing-masing sebesar 21,24 persen di Kalimantan Barat dan di 22,42 persen di Kalimantan Tengah. Sub sektor perkebunan adalah sub sektor yang mendominasi dan memegang peranan paling besar dengan kontribusi tertinggi terhadap total PDRB dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

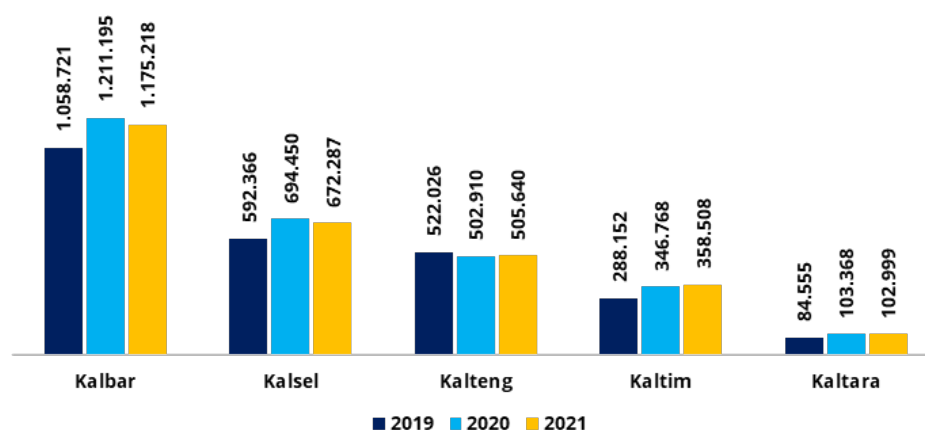
Di Kalimantan Barat, terdapat beberapa komoditi yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi komoditi ekspor unggulan, antara lain: CPO dan turunannya, ikan red arwana, sarang burung walet, serta kelapa dan turunannya. Beberapa diantaranya bahkan masuk ke dalam 10 besar komoditi ekspor dengan nilai terbesar di tahun 2021.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, sub sektor yang menjadi kontributor terbesar yaitu Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, yang di dalamnya disokong oleh komoditas tanaman perkebunan yang berupa hasil perkebunan kelapa sawit yang sudah sejak lama menjadi komoditas utama di Kalimantan Tengah. Beberapa komoditas yang menopang subsektor ini antara lain berasal dari: tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. Berdasarkan tabel kontribusi pada sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa

Pertanian, komoditas utama yang menjadi penyokong utama dengan nilai tertinggi adalah Tanaman Perkebunan. Setiap tahunnya, tanaman perkebunan menyumbang lebih dari 70 persen komoditas pada subsektor tersebut, dengan rata rata sebesar 73,2 persen. Kontribusi Kelapa sawit dilihat dari luasan kebunnya mencapai 11,7 persen daratan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini berdampak pada besarnya peran kebun kelapa sawit Kalimantan Tengah terhadap total kebun sawit secara nasional, yaitu mencapai 10%. Komoditas minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penyumbang ekspor terbesar setelah komoditas batubara, dengan kontribusi sebesar 16,32 persen dari total ekspor Kalimantan Tengah dari bulan Januari-Mei 2021 atau sebesar US\$195,44 juta. Tingginya kontribusi pada ekspor komoditas kelapa sawit tidak lepas dari tingginya permintaan minyak nabati, sehingga terdapat indikasi kuat atas prospek kelapa sawit yang cerah. Selain itu, kebijakan beberapa negara produsen minyak nabati yang melakukan pembatasan mobilitas, menyebabkan peningkatan peluang kontribusi industri kelapa sawit di Kalimantan Tengah untuk menjadi pemasok kelapa sawit ke negara-negara mitra.

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah tersebar di setiap kabupaten, akan tetapi konsentrasi sebaran perkebunan kelapa sawit terdapat pada zona 1 (wilayah barat) Kalimantan Tengah yang terdiri dari Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan dan Kotawaringin Timur. Pada periode tahun 2017-2021, luas dari perkebunan kelapa sawit maupun hasil produksinya secara konsisten mengalami peningkatan.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha penyerap

GAMBAR 93. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN & PENGALIAN TAHUN 2019-2021

Sumber: BPS, diolah

tenaga kerja terbesar di regional Kalimantan sesuai dengan karakteristik lapangan usaha ini yang masih membutuhkan tenaga kerja manusia dalam proses pengerjaannya. Pada tahun 2021, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2,81 juta orang atau sekitar 35,2 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Kalimantan dan menjadi sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar. Meskipun nilai nominal PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami peningkatan, namun bila dilihat dari tren selama kurun 2019-2021, tingkat penyerapan tenaga kerja sektor ini justru mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara spasial, pada tahun 2021 hanya terdapat 2 provinsi yang mengalami kenaikan serapan tenaga kerja, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

2.IV. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL KALIMANTAN

Untuk regional Kalimantan, dilihat dari rata-rata nilai laju dan kontribusi/share PDRB sektoral selama rentang Tahun 2018 s/d 2021, sektor potensial di regional Kalimantan adalah sektor Industri Pengolahan. Sektor ini merupakan sektor potensial karena memiliki rata-rata laju pertumbuhan positif dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB regional Kalimantan. Pada Tahun 2021, nilai PDRB sektor ini tumbuh sebesar 3,2 persen dan memberikan total kontribusi sebesar 16,3% terhadap total perekonomian di regional Kalimantan. Sektor

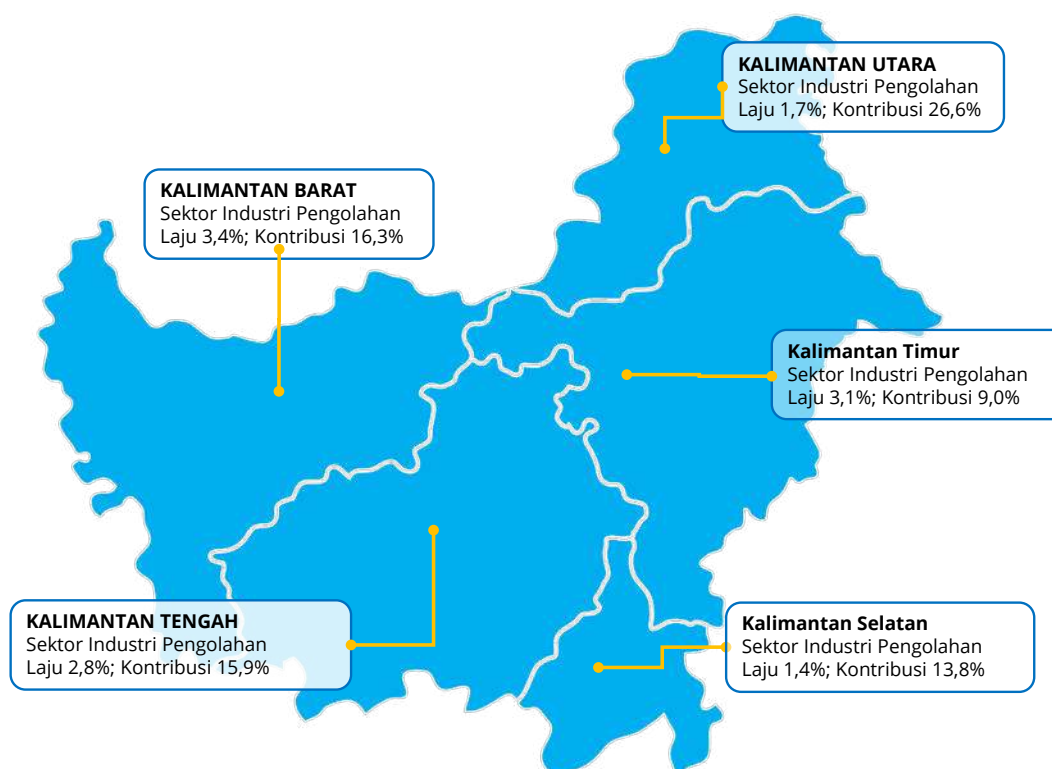
ini berkembang menjadi sektor potensial utama di beberapa provinsi, antara lain: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Secara spasial, sebaran sektor unggulan pada setiap provinsi di regional Kalimantan adalah sebagaimana gambar Peta Sektor Potensial Setiap Provinsi di Regional Kalimantan.

2.IV.A. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Sektor industri pengolahan, terutama industri yang mengolah turunan hasil tambang dan perkebunan masih menjadi potensi ekonomi regional Kalimantan beberapa periode ke depan. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata kontribusi sektor pengolahan terhadap perekonomian regional atas dasar harga berlaku relatif besar, yaitu berada di kisaran 16,26%. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang potensial serta mempunyai peranan yang penting dan strategis di sebagian besar regional Kalimantan, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sektor industri pengolahan berturut-turut menyumbang 16,49 persen, 17,81 persen, 13,95 persen, dan 16,70 persen dari struktur PDRB Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah di tahun 2021.

Keberadaan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang unggul dan potensial di regional Kalimantan tidak lepas dari efek kebijakan pemindahan

GAMBAR 94. PETA SEKTOR POTENSIAL SETIAP PROVINSI DI REGIONAL KALIMANTAN



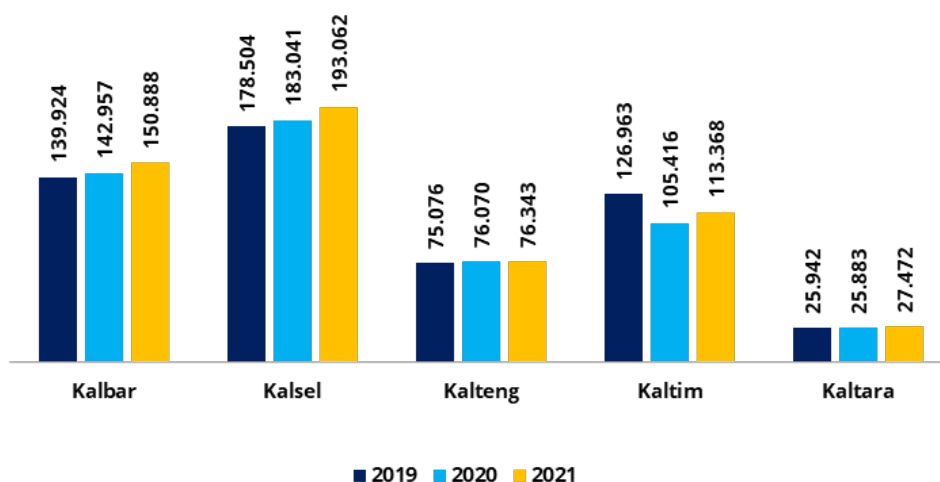
Sumber: BPS, diolah

TABEL 38. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TAHUN 2021 PER PROVINSI

Provinsi	laju pertumbuhan 2021	kontribusi terhadap PDRB
Kalbar	5,1%	16,5%
Kalsel	6,2%	13,9%
Kalteng	4,1%	16,7%
Kaltim	2,2%	17,8%
Kaltara	2,5%	9,0%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 95. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK SEKTOR PERTAMBANGAN & PENGGALIAN TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan, tepatnya di provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut karena sektor pengolahan merupakan salah satu dari beberapa sektor yang penting untuk mendukung keberadaan IKN nanti. Selain itu, sektor ini juga sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan transformasi ekonomi berupa hilirisasi hasil batubara dan CPO sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur bahwa pengembangan industri pengolahan difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan energi yang berkesinambungan serta terjangkau.

Potensi industri pengolahan di wilayah Kalimantan berasal dari berbagai daerah dan berbagai skala industri, dari mulai kecil hingga besar. Di Kalimantan timur, potensi industri pengolahan berasal dari beberapa kab/kota, seperti: (i) Kutai Timur dan Penajam Paseur Utara dengan pengolahan kepala sawit; (ii) Bontang dengan pengolahan minyak bumi dan gas; serta (iii) Samarinda dengan industri agro dan aneka, industri semen dan kapur, industri air minum dan industri logam, mesin dan elektronika. Di provinsi Kalimantan Selatan, sejalan kebijakan green economy, terbuka peluang investasi pada industri pengolahan biodiesel, industri pengolahan DME, maupun industri pengolahan minyak goreng. Sementara

itu di Kalimantan tengah, terdapat potensi besar dari produk anyaman bambu, rotan dan sejenisnya, yang didukung dengan potensi ketersediaan sumber daya alam tanaman Purun yang melimpah. Namun demikian, untuk mendukung pengembangan potensi tersebut terdapat tantangan terkait dengan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi tanaman Purun melalui pendidikan dan penciptaan wadah kerajinan anyaman Purun.

Sebagai sektor unggulan dan potensial, kontribusi penyerapan tenaga kerja lapangan usaha industri pengolahan di Kalimantan cukup lumayan, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 561.133 orang atau sekitar 7 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Kalimantan pada tahun 2021. Secara umum, tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di seluruh provinsi di regional Kalimantan, selalu mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.

3. REGIONAL SULAWESI

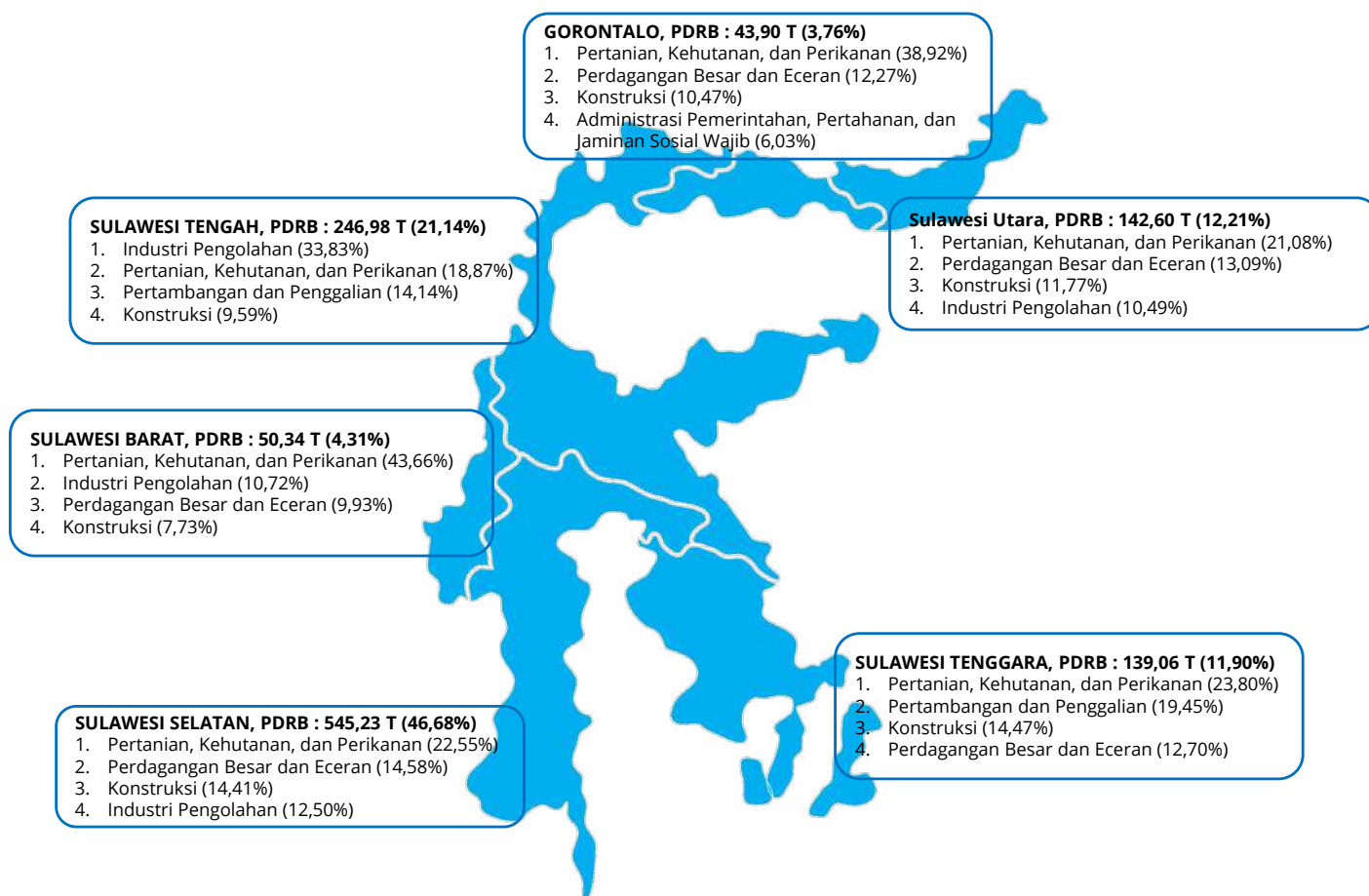
3.IV.A. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SULAWESI

TABEL 39. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL SULAWESI

Sektor Unggulan	Nilai Kontribusi terhadap	% Kontribusi terhadap
	PDRB	PDRB
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	271,80 T	23,27%
Industri Pengolahan	184,24 T	15,77%
Konstruksi	147,64 T	12,64%
Perdagangan Besar Dan Eceran;	141,94 T	12,15%
Pertambangan Dan Penggalian	97,21 T	8,32%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 96. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

Untuk regional Sulawesi, dilihat dari nilai dan persentase kontribusi terhadap total PDRB berdasarkan data yang dirilis BPS, 5 (lima) besar sektor unggulan di regional dapat dilihat pada tabel Sektor Unggulan Regional Sulawesi.

Berdasarkan data tabel tersebut, terlihat bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dominan menjadi sektor unggulan utama penggerak perekonomian di regional Sulawesi dengan kontribusi terhadap total PDRB mencapai 23,27%. Selain Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, terdapat beberapa sektor lain yang juga berikan kontribusi besar terhadap perekonomian di regional Sulawesi yaitu: sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Kelima sektor

unggulan di atas menguasai $\pm 72,15\%$ porsi PDRB di regional Sulawesi. Gambaran umum mengenai distribusi/sebaran sektor-sektor unggulan tersebut di seluruh provinsi pada regional Sulawesi dapat dilihat dalam Peta Sektor Unggulan di bawah ini:

Pada tahun 2021, regional Sulawesi menyumbang 6,89% dari total PDB Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar Peta Sektor Unggulan Setiap Provinsi di Regional Sulawesi, provinsi penyumbang PDRB terbesar di regional Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 46,68 persen, disusul kemudian provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi sebesar 21,14 persen.

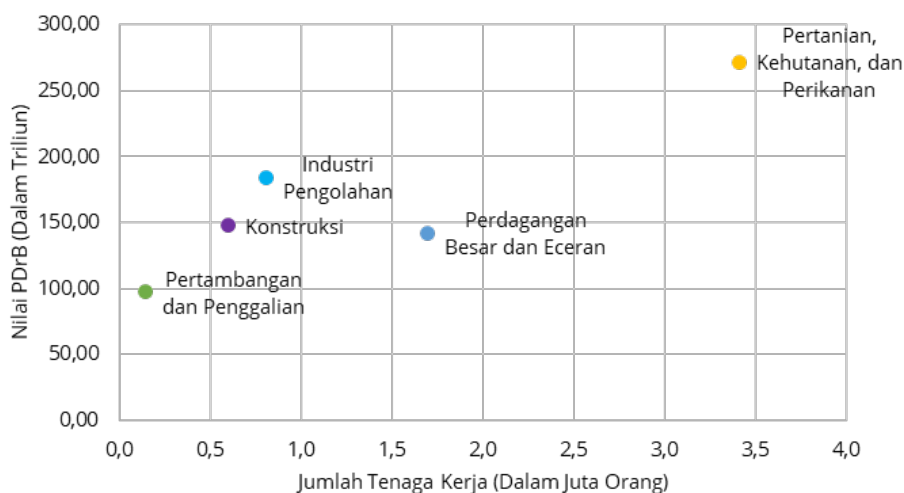
Melalui peta sektor unggulan di atas, dapat kita lihat distribusi dukungan atau kontribusi sektor-sektor

TABEL 40. PERGESERAN NILAI PDRB REGIONAL SULAWESI PER JENIS SEKTOR

Sektor Unggulan	2020			2021		
	Nilai*	% kontr.	Rank	Nilai*	% kontr.	Rank
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	248,452	23,62%	1	271,800	23,27%	1
Industri Pengolahan	147,124	13,98%	2	184,242	15,77%	2
Konstruksi	132,816	12,62%	3	147,638	12,64%	3
Perdagangan Besar dan Eceran;	130,020	12,36%	4	141,944	12,15%	4
Pertambangan dan Penggalian	85,002	8,08%	5	97,206	8,32%	5

Sumber: BPS (diolah)
Keterangan: *merupakan nilai PDRB per sektor (dalam triliun rupiah)

GAMBAR 97. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021



Sumber: BPS, diolah

unggulan terhadap perekonomian, baik secara parsial di setiap provinsi serta secara keseluruhan terhadap regional Sulawesi. Bila kita perhatikan, maka terlihat lima dari enam provinsi yang ada di pulau Sulawesi memiliki sektor unggulan yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada regional Sulawesi sebesar 23,27 persen. Hanya di Sulawesi Tengah, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tidak menempati peringkat pertama yang berkontribusi dalam PDRB provinsi tersebut. Namun demikian, kontribusinya masih tergolong tinggi yakni mencapai 18,87 persen.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel Pergeseran Nilai PDRB Regional Sulawesi per Jenis Sektor kontribusi setiap sektor tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2020, tidak terdapat perubahan peringkat dari komposisi sektor unggulan di regional Sulawesi. Seluruh sektor mengalami pertumbuhan apabila dilihat dari nilainya. Meskipun demikian, apabila dilihat dari persentase kontribusinya, Sektor Industri Pertanian Kehutanan dan Perikanan, serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami sedikit penurunan kontribusinya terhadap PDRB regional.

Pada Tahun 2021, kontribusi sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja cukup besar. Kelima sektor unggulan pada regional Sulawesi mampu menyerap sekitar 6,6 juta orang tenaga kerja atau 70,8% dari

total serapan seluruh sektor usaha. Dari kelima sektor unggulan; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 3,4 juta orang tenaga kerja. Hal ini kembali menunjukkan begitu dominannya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di regional Sulawesi, tidak hanya kontribusinya terhadap PDRB, tetapi juga kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja di regional tersebut. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, dengan total serapan hanya sebanyak 144,5 ribu orang tenaga kerja saja.

Pembahasan lebih lanjut terkait sektor unggulan pada regional Sulawesi, terutama 2 (dua) sektor utamanya yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap PDRB di wilayah Sulawesi, yaitu (i) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan (ii) Sektor Industri Pengolahan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.IV.B. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

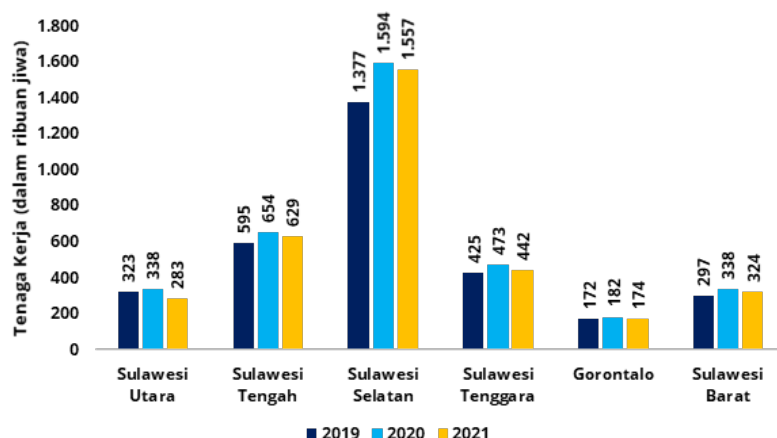
Sejak tahun 2018, kontribusi sektor ini terhadap PDRB regional Sulawesi berada pada kisaran angka 23-24%. Terlihat adanya sedikit tren penurunan besarnya kontribusi selama periode 2018-2021. Tren penurunan

TABEL 41. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TIAP PROVINSI TERHADAP PDRB MASING-MASING PROVINSI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Sulawesi Utara	10,79%	11,11%	11,46%	11,06%
2	Sulawesi Tengah	17,99%	17,72%	17,29%	17,15%
3	Sulawesi Selatan	44,85%	44,14%	44,06%	45,24%
4	Sulawesi Tenggara	12,19%	12,57%	12,65%	12,17%
5	Gorontalo	6,28%	6,57%	6,52%	6,29%
6	Sulawesi Barat	7,89%	7,89%	8,03%	8,09%
Kontribusi total Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Regional Sulawesi		24,94%	23,97%	23,62%	23,27%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 98. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

kontribusi sektor ini terhadap PDRB dapat menjadi indikasi bahwa walaupun hingga saat ini sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi basis perekonomian regional Sulawesi, namun perlahan akan tergeser oleh perluasan produksi dari sektor lainnya. Hal ini telah terjadi khususnya di provinsi Sulawesi Tengah, dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan kontribusinya hingga sebesar 9% selama periode 2018-2021. Pada tahun 2021, kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB regional Sulawesi sebesar Rp 271,8 triliun atau 23,27 persen.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis di hampir seluruh provinsi di regional Sulawesi. Pada tahun 2021, sebagaimana yang tercantum pada tabel Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tiap Provinsi terhadap PDRB masing-masing provinsi Regional Sulawesi Tahun 2018-2021, provinsi dengan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terbesar pada PDRB regional Sulawesi adalah Sulawesi Selatan (45,24%), disusul oleh Sulawesi Tengah (17,15%), Sulawesi Tenggara (12,17%), Sulawesi Utara (11,06%), Sulawesi Barat (8,09%), dan Gorontalo (6,29%). Secara keseluruhan, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap total PDRB regional Sulawesi

cenderung mengalami penurunan selama periode 2018-2021.

Kondisi morfologi geografi pulau Sulawesi yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan cukup memberikan variasi komoditas yang dapat dihasilkan baik dari pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Beberapa gunung berapi aktif yang terdapat di pulau Sulawesi juga turut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan komoditas pertanian. Komoditas perhutanan juga cukup banyak dan beragam, terutama untuk produksi kayu dengan berbagai macam variasi dan kelas kayu. Selanjutnya untuk sektor perikanan, Pulau Sulawesi yang dikelilingi oleh Laut Maluku dan Samudra Pasifik memiliki kekayaan alam laut yang melimpah dan menjadikan wilayah Sulawesi sebagai salah satu daerah dengan hasil penangkapan ikan terbesar di Indonesia. Hal tersebut di atas menunjukkan betapa besarnya produk yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Selain kontribusinya terhadap PDRB regional Sulawesi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sebanyak 3.409.587 orang atau sekitar 36 persen dari seluruh angkatan kerja di regional Sulawesi

terserap di sektor ini. Bahkan di saat terjadinya guncangan ekonomi di masa-masa awal pandemi COVID-19, sektor ini menjadi penyelamat dengan fleksibilitasnya dalam menyerap tenaga kerja dari sektor usaha lainnya sempat lesu di awal pandemic. Pada seluruh provinsi di Sulawesi terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2020.

3.IV.C. INDUSTRI PENGOLAHAN

Badan Pusat Statistik mendefinisikan industri pengolahan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/maklon dan pekerjaan perakitan (assembling). Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang sedang berkembang dan menjadi sektor unggulan di regional Sulawesi, khususnya pada provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Sejak tahun 2018, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Sulawesi mengalami peningkatan dari senilai Rp102,4

triliun atau 11,01 persen menjadi senilai Rp184,2 triliun atau 15,77 persen di Tahun 2021.

Pada tahun 2021, sebagaimana yang tercantum pada tabel Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tiap Provinsi terhadap Total PDRB Regional Sulawesi Tahun 2018-2021, provinsi penyumbang PDRB sektor Industri Pengolahan terbesar di regional Sulawesi adalah Sulawesi Tengah (45,35%), disusul oleh Sulawesi Selatan (36,98%), Sulawesi Utara (8,12%), Sulawesi Tenggara (5,57%), Sulawesi Barat (2,93%), dan Gorontalo (1,05%). Secara keseluruhan, kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap total PDRB regional Sulawesi mengalami peningkatan selama periode 2018-2021. Peningkatan kontribusi yang signifikan terlihat di provinsi Sulawesi Tengah, dari 18,54 persen di Tahun 2018 menjadi sebesar 45,35 persen di Tahun 2022.

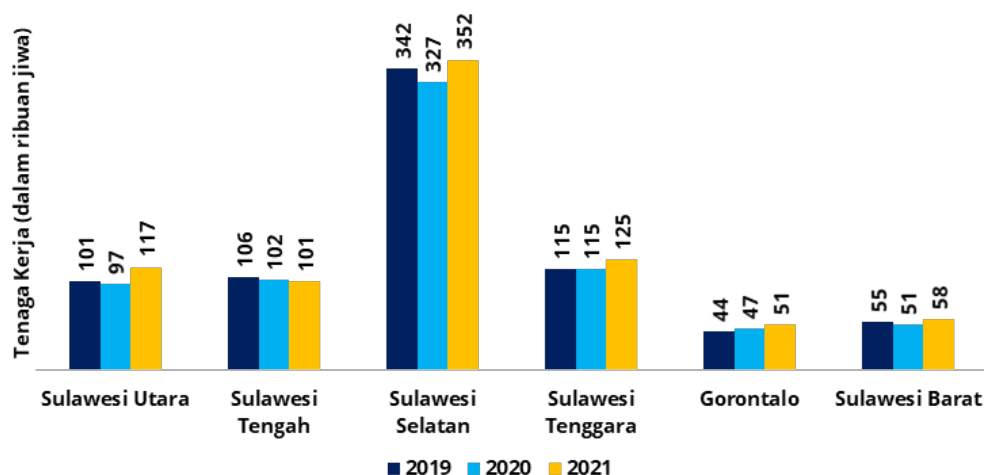
Pandemi COVID-19 turut berdampak terhadap sektor Industri Pengolahan, pada grafik yang tercantum dalam gambar Pertumbuhan Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Per Provinsi Regional Sulawesi Tahun 2019-2021, terlihat terdapat 4 (empat) provinsi di Sulawesi yang penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut mengalami penurunan di Tahun 2020. Pembatasan mobilitas warga membuat

TABEL 42. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Sulawesi Utara	10.69%	9.95%	8.58%	8.12%
2	Sulawesi Tengah	18.54%	19.00%	37.06%	45.35%
3	Sulawesi Selatan	58.03%	58.29%	43.72%	36.98%
4	Sulawesi Tenggara	7.11%	7.26%	6.24%	5.57%
5	Gorontalo	1.51%	1.54%	1.22%	1.05%
6	Sulawesi Barat	4.12%	3.96%	3.18%	2.93%
Kontribusi total sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Regional Sulawesi		11.01%	11.20%	13.98%	15.77%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 99. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN PER PROVINSI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

perekonomian menjadi lesu sehingga beberapa pengusaha berusaha bertahan dengan mengurangi produksi yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian, seiring berjalannya waktu serta melalui berbagai program pemulihan ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah, dampak pandemi pada sektor industri pengolahan relatif berhasil diminimalisir, terlihat dalam grafik kembali terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di 5 (lima) provinsi, bahkan lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi.

Perkembangan sektor Industri Pengolahan di Sulawesi tidak terlepas dari geliat industrialisasi di provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran Industri Pengolahan nikel di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, menjadi motor dalam pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut. Industri pengolahan nikel tersebut telah terintegrasi dengan penambangan di hulu, dan dapat meningkatkan ekspor besi dan baja. Pertumbuhan industri ini dimotori oleh puluhan perusahaan swasta pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang menambang puluhan juta ton bijih nikel.

Selain Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sektor Industri Pengolahan di regional Sulawesi ditopang oleh kawasan industri lainnya di regional tersebut, antara lain: Kawasan Industri Palu, Sulawesi Tengah (status KEK); Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara; dan Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kawasan industri memegang peranan penting dan strategis dalam mendorong pembangunan dan perekonomian. Perusahaan yang berlokasi di kawasan industri dinilai mampu memacu produktifitas dan menciptakan nilai

tambah yang lebih tinggi.

3.IV.D. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL SULAWESI

Untuk regional Sulawesi, dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi selama tiga tahun terakhir berdasarkan data yang dirilis BPS, sektor potensial di regional Sulawesi adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor ini merupakan sektor potensial karena memiliki rata-rata laju pertumbuhan sebesar 8,6 persen, tertinggi setelah sektor industri pengolahan yang memang merupakan sektor unggulan.

3.IV.E. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sektor Informasi dan Komunikasi mendukung hampir semua kegiatan usaha. Beberapa yang tergolong pada sektor ini, antara lain aktivitas penerbitan, produksi multimedia, penyiaran dan pemrograman, telekomunikasi, dan aktivitas jasa informasi di internet.

Berdasarkan tabel rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 per provinsi, provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 paling tinggi adalah Sulawesi Selatan (9,4%), Sulawesi Tengah (9,0%), dan Sulawesi Utara (7,00%). Dan provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 paling tinggi adalah Sulawesi Selatan (9,4%), Sulawesi Tengah

TABEL 43. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2021

Uraian	Rata-rata laju pertumbuhan 2019-2021	Rank laju pertumbuhan	Rata-rata % kontribusi terhadap PDRB 2018-2021	Rank % kontribusi terhadap PDRB
Industri Pengolahan	14,9%	1	13,0%	2
Informasi dan Komunikasi	8,6%	2	4,2%	9

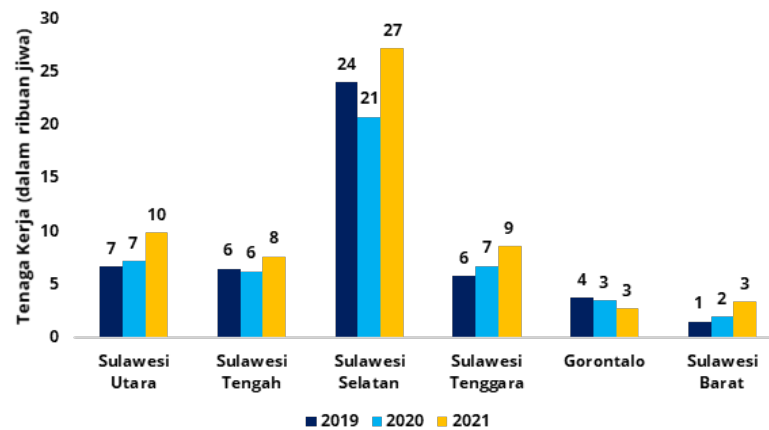
Sumber: BPS (diolah)

TABEL 44. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018-2021

Provinsi	Rata-rata laju pertumbuhan 2019-2021	Rata-rata % kontribusi terhadap PDRB 2018-2021
Sulawesi Utara	7.0%	4.1%
Sulawesi Tengah	9.0%	3.1%
Sulawesi Selatan	9.4%	5.3%
Sulawesi Tenggara	6.5%	1.8%
Gorontalo	6.1%	2.7%
Sulawesi Barat	6.0%	4.2%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 100. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PER PROVINSI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

(9,0%), dan Sulawesi Utara (7,00%).

Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja di sektor informasi dan komunikasi di regional Sulawesi mengalami peningkatan selama periode 2019 - 2021. Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan sempat mengalami penurunan di Tahun 2020, akan tetapi kembali meningkat di tahun 2021, bahkan menjadi lebih tinggi penyerapannya bila dibandingkan di Tahun 2019. Dari Keenam Provinsi di Regional Sulawesi, hanya Provinsi Gorontalo yang penyerapan tenaga kerjanya mengalami penurunan selama periode 2019-2021.

Disaat Pandemi COVID-19 mulai melanda tanah air pada Maret 2020, banyak sektor ekonomi yang terdampak hingga terhambat laju pertumbuhannya. Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh positif saat terjadinya pandemi. Di regional Sulawesi, Sektor Informasi dan Komunikasi mampu bertumbuh tertinggi kedua setelah Sektor Industri Pengolahan, kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah pengguna jasa internet selama pandemi COVID-19 sebagai bentuk menjaga jarak sesuai protokol kesehatan, hal ini menciptakan peluang ekonomi bahkan dapat berperan sebagai

TABEL 45. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL BALI NUSRA

Sektor Unggulan	Nilai Kontribusi terhadap PDRB	% Kontribusi terhadap PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	98.845,30 Milyar	20,99%
Perdagangan Besar dan Eceran	52.666,71 Milyar	11,19%
Konstruksi	49.319,90 Milyar	10,47%
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	39.210,83 Milyar	8,33%
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	37.167,33 Milyar	7,89%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 101. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL BALI NUSRA

BALI: Rp219,8T; 46,68%

- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (16,66%)
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,71%)
- Konstruksi (11%)

NTB: Rp140,15T; 29,77%

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,8%)
- Pertambangan dan Penggalian (17,33%)
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (13,98%)

NTT: Rp110,88T; 23,55%

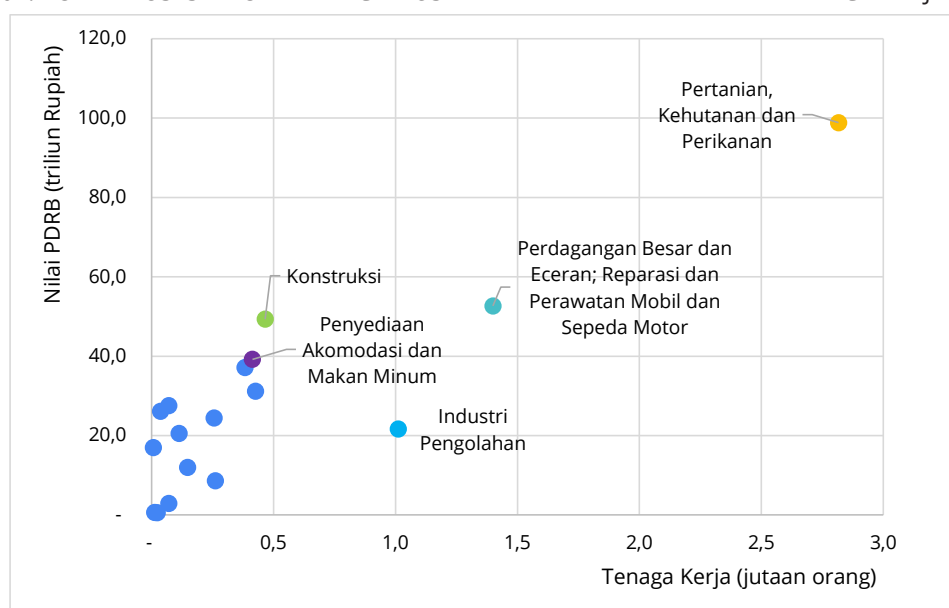
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (29,17%)
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (13,41%)
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (11,48%)

Sumber: BPS, diolah

TABEL 46. PERGESERAN NILAI PDRB REGIONAL BALI-NUSRA PER JENIS SEKTOR (DALAM MILIAR RUPIAH)

Uraian	2020		2021		Pertumbuhan	
	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	95.166,5	1	98.845,3	1	3.678,82	0
Pertambangan dan Penggalian	26.576,8	8	27.620,5	7	1.043,70	-1
Industri Pengolahan	21.190,9	10	21.638,0	10	447,09	0
Pengadaan Listrik dan Gas	691,7	16	679,7	16	-11,99	0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	597,7	17	596,7	17	-1,05	0
Konstruksi	46.280,5	3	49.319,9	3	3.039,45	0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	51.119,7	2	52.666,7	2	1.546,98	0
Transportasi dan Pergudangan	27.132,9	7	24.486,4	9	-2.646,47	2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43.634,8	4	39.210,8	4	-4.423,94	0
Informasi dan Komunikasi	25.118,7	9	26.170,3	8	1.051,57	-1
Jasa Keuangan dan Asuransi	19.562,7	11	20.573,5	11	1.010,80	0
Real Estat	16.736,9	12	17.026,7	12	289,82	0
Jasa Perusahaan	3.003,6	15	2.938,8	15	-64,82	0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36.703,6	5	37.167,3	5	463,74	0
Jasa Pendidikan	30.813,0	6	31.219,5	6	406,55	0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.020,4	13	12.041,9	13	1.021,56	0
Jasa Lainnya	8.645,3	14	8.637,0	14	-8,30	0
Jumlah	463.995,6		470.839,1		6.843,5	

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 102. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 2021


Sumber: BPS, diolah

sumber baru dari pertumbuhan ekonomi. Adanya pandemi dapat dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital.

4. REGIONAL BALI NUSRA

4.1. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL BALI NUSRA

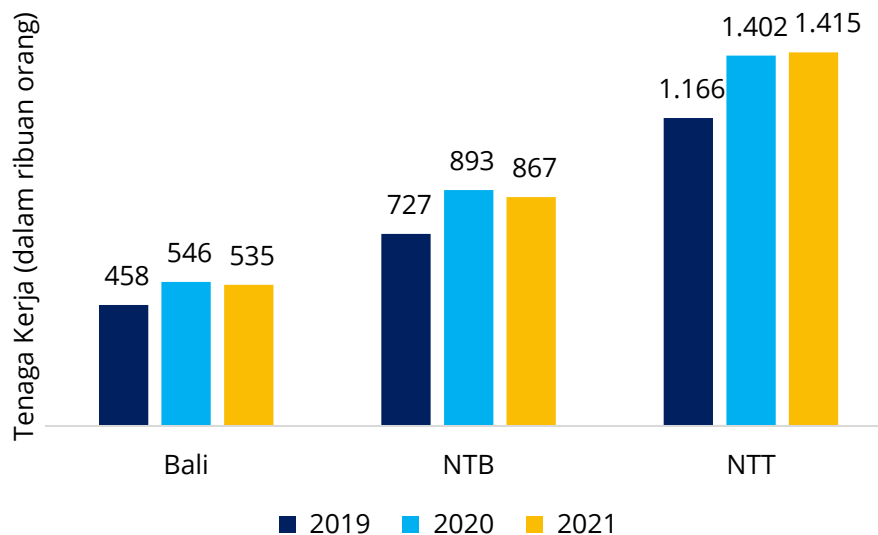
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sangat

dominan menjadi sektor unggulan utama penggerak perekonomian di regional Bali-Nusra dengan kontribusi terhadap total PDRB mencapai 20,99%. Selain Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, terdapat beberapa sektor lain yang juga berikan kontribusi besar terhadap perekonomian di regional Bali-Nusra yaitu: perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kelima sektor unggulan di atas pada tahun 2021 menguasai ±58,88% porsi PDRB di regional Bali-Nusra.

TABEL 47. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Bali	36,01%	36,03%	35,54%	34,97%
2	NTB	32,58%	32,27%	32,57%	32,35%
3	NTT	31,41%	31,70%	31,89%	32,73%
Kontribusi total sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Regional Bali-Nusra		19,55%	19,15%	20,51%	20,99%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 103. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2019-2021

Sumber: BPS, diolah

Pada tahun 2021, regional Bali-Nusra menyumbang 2,78% dari total PDB Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar Peta Sektor Unggulan Setiap Provinsi di Regional Bali Nusra, provinsi penyumbang PDRB terbesar di regional Bali-Nusra adalah Provinsi Bali (46,68%). Sedangkan kedua provinsi lainnya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkontribusi sebesar 29,77% dan 23,55%.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel Pergeseran Nilai PDRB Regional Bali-Nusra per Jenis Sektor (dalam miliar Rupiah), kontribusi setiap sektor tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2020. Meski demikian, masih banyak sektor yang malah tumbuh negatif di tahun 2021 seperti sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan sektor jasa perusahaan. Secara keseluruhan, regional Bali-Nusra masih mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan positif ini didukung oleh pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor konstruksi.

Sektor lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kedua sektor ini menyerap tenaga

kerja yang signifikan, dan kontribusinya terhadap PDRB juga besar di regional Bali-Nusra dibandingkan sektor lain. Sektor industri pengolahan di Bali-Nusra menyerap tenaga kerja yang cukup besar pula, namun kontribusinya terhadap PDRB tidak signifikan.

4.I.A. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan, pengambilan dan penanaman hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor utama pada seluruh provinsi di regional Bali-Nusra dan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian. Sejak tahun 2018, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Bali-Nusra cenderung stabil di angka 19-20%. Pada tahun 2021, kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB regional Bali-Nusra sebesar Rp98.845,30 miliar atau 20,99%.

Pada tahun 2021, sebagaimana yang tercantum

pada tabel persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Tiap Provinsi terhadap Total PDRB Regional Bali-Nusra Tahun 2018-2021, ketiga provinsi di regional ini memiliki kontribusi yang hampir sama kepada PDRB Bali-Nusra bila dilihat dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 ketika sebelum pandemi. Dengan melesunya pariwisata yang sebelumnya adalah tonggak utama perekonomian Bali-Nusra akibat pandemi, tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, beralih ke sektor lainnya, termasuk ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

provinsi Bali, lahan pertaniannya sangat subur karena tersusun atas tanah hasil deposit abu gunung berapi dan diirigasi dengan menggunakan sistem pengairan tradisional yang dikenal dengan nama subak. Produk dari lahan pertanian di Bali antara lain tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai; tanaman perkebunan seperti kopi dan coklat; serta tanaman hortikultura, termasuk buah-buahan seperti manggis, mangga dan pisang. Karena keterbatasan lahan, pengembangan sektor pertanian terbatas pada pengembangan intensifikasi atau peningkatan hasil

per satuan luas tanah. Sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh hingga 5,4% melalui strategi modernisasi/digitalisasi pertanian, pengembangan pertanian organik, dan penguatan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor hilir. Selain pertanian, sektor ini juga didukung dengan adanya padang rumput di wilayah barat Bali untuk tempat budidaya hewan ternak sapi Bali yang merupakan hasil persilangan dengan banteng, berwarna khas coklat kemerahan dan memiliki lemak yang sedikit.

Di provinsi NTB, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih tetap bertahan meski di tengah pandemi karena sebagian besar petani tetap beraktivitas seperti biasa ditengah pemberlakuan PPKM. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan tahun 2020.

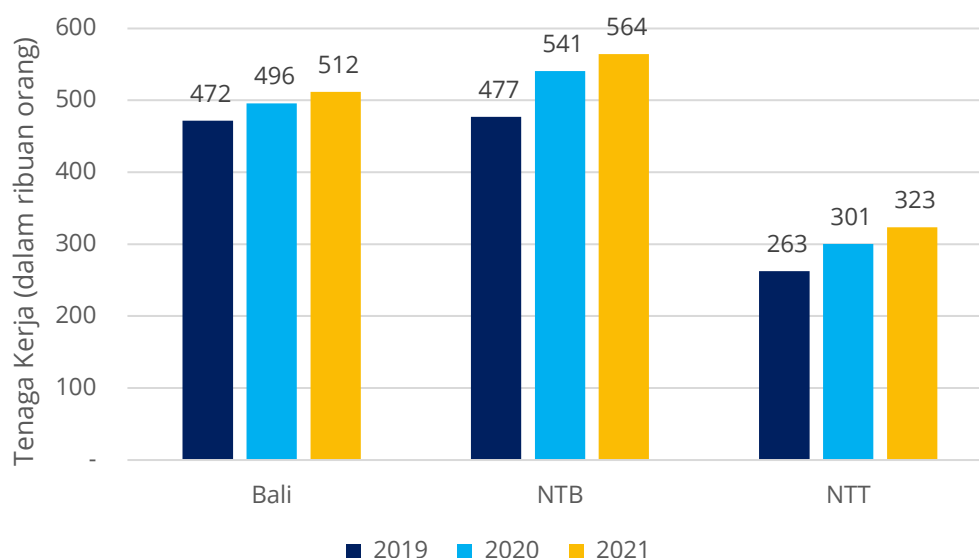
Di provinsi NTT, imbas pandemi dapat dilihat dari perbandingan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesejahteraan pelaku usaha pada sektor pertanian, dengan melihat kemampuan produksi petani dari perbandingan hasil produksi dengan biaya produksinya. Selama tahun 2021, NTUP NTT di subsektor pertanian berada di bawah 100, sedangkan

TABEL 48. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Bali	40,60%	40,20%	39,66%	38,61%
2	NTB	36,76%	36,90%	37,11%	37,18%
3	NTT	22,64%	22,89%	23,23%	24,13%
Kontribusi total Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Regional Bali-Nusra		10,69%	10,92%	11,02%	11,19%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 104. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR PER PROVINSI REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

pada subsektor peternakan mampu bertahan di atas angka 100. Meski demikian, sektor ini mampu tumbuh sebesar 2,01 persen pada tahun 2021.

4.I.B. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor merupakan salah satu dari tiga kontributor utama PDRB provinsi NTB dan NTT. Namun, sektor ini bukan merupakan kontributor utama di provinsi Bali. Sejak tahun 2018, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Bali-Nusra cenderung stabil di angka 10-11%. Pada tahun 2021, kontribusi perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB regional Bali-Nusra sebesar Rp52.666,71 miliar atau 11,19%.

Pada tahun 2021, sebagaimana yang tercantum pada tabel Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, provinsi penyumbang PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor terbesar di regional Bali-Nusra adalah Bali (38,61% dari Total PDRB sektoral atau 4,32% dari total PDRB regional) dan NTB (37,18% dari Total PDRB sektoral atau 4,16% dari total PDRB regional). Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi, sektor ini mulai bangkit di tahun 2021 meskipun pertumbuhannya masih tidak terlalu signifikan.

Pertumbuhan di sektor ini dapat dilihat dari indeks mobilitas penduduk ke lokasi-lokasi yang berkaitan dengan lapangan usaha perdagangan. Indeks mobilitas ini menurun signifikan di tahun 2020 dikarenakan adanya lockdown wilayah. Namun sejak

adanya pelanggaran pembatasan sosial di tahun 2021, meskipun masih fluktuatif, aktivitas penduduk di lokasi toko kelontong dan toko obat/apotik cenderung terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan mulai ramainya aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern terutama pada akhir tahun yang bertepatan dengan momen perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Pelonggaran pembatasan sosial ini memberi ruang gerak bagi pelaku perdagangan maupun konsumen sehingga mampu mendorong pertumbuhan di sektor ini. Selain pusat perbelanjaan, tingkat penjualan kendaraan pada tahun 2021 juga telah menunjukkan tren yang positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meskipun dengan adanya pandemi COVID-19, penyerapan tenaga kerja di sektor ini tidak mengalami penurunan dan malah mengalami peningkatan, baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor yang signifikan terdapat di NTT Bali-Nusra Barat (22.923 tenaga kerja atau peningkatan sebesar 7,63%) dan NTB (23.427 tenaga kerja atau peningkatan sebesar 4,33%) seperti yang digambarkan pada gambar Pertumbuhan Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Per Provinsi Regional Bali-Nusra Tahun 2019-2021

4.II. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL BALI NUSRA

Untuk regional Bali-Nusra, dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi selama tiga tahun terakhir berdasarkan data yang dirilis BPS, sektor potensial di regional Bali-Nusra adalah sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini merupakan sektor potensial karena memiliki rata-rata

TABEL 49. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL BALI NUSRA

Uraian	Rata-rata laju pertumbuhan 2019-2021	Rank laju pertumbuhan	Rata-rata % kontribusi terhadap PDRB 2018-2021	Rank % kontribusi terhadap PDRB
Pertambangan & Penggalian	7,46%	1	5,31%	8
	10,69%	10,92%	11,02%	11,19%

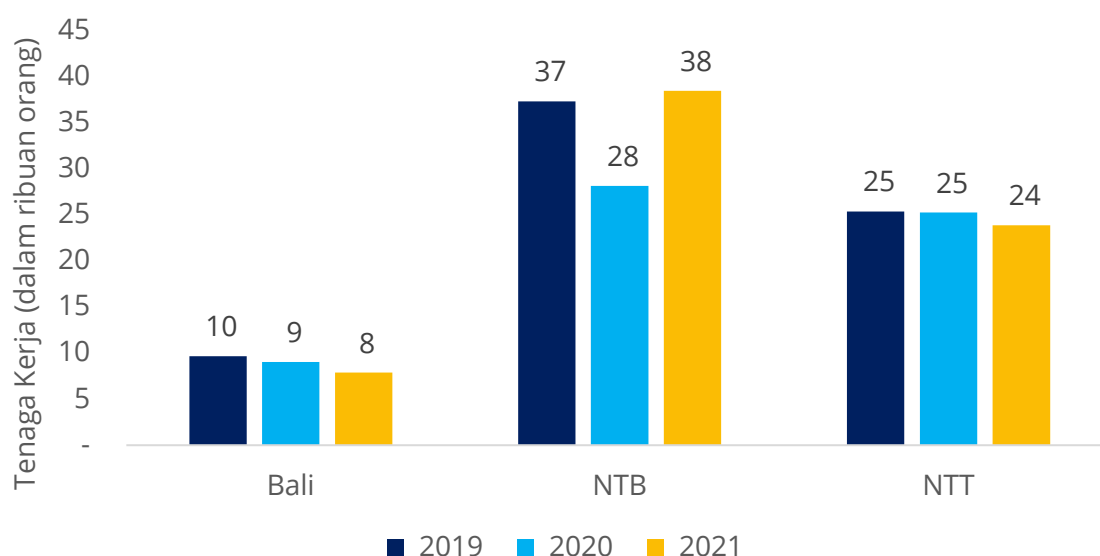
Sumber: BPS (diolah)

TABEL 50. RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 PER PROVINSI

Provinsi	Rata-rata laju pertumbuhan 2019-2021	Rata-rata % kontribusi terhadap PDRB 2018-2021
Bali	-1,81%	0,93%
NTB	9,23%	16,08%
NTT	-2,70%	1,11%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 105. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PER PROVINSI REGIONAL BALI-NUSRA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

laju pertumbuhan tertinggi sebesar 7,46% dan menduduki peringkat kedelapan dalam kontribusinya terhadap PDRB regional Bali-Nusra.

4.II.A. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Menurut kamus BPS, sektor ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau di bawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.

Berdasarkan tabel Sektor Unggulan Regional Maluku Papua, provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 paling tinggi provinsi NTB sebesar 9,23% dan rata-rata

kontribusinya ke PDRB regional Bali-Nusra sebesar 16,08%. Menilik dari tabel tersebut pula, dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian ini bukan merupakan sektor yang potensial di Bali dan NTT. Hal ini dikarenakan setiap provinsi di kawasan regional Bali dan Nusa Tenggara memiliki ciri geografis yang berbeda. Meski secara rata-rata laju pertumbuhan sektor ini masih tinggi, namun di tahun 2021 mulai mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian di regional Bali-Nusra mengalami penurunan dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Pada tahun 2020, provinsi NTB yang perekonomiannya menggantungkan dari sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yang signifikan akibat adanya pembatasan sosial karena pandemi. Namun demikian, di tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di sektor ini telah mengalami peningkatan kembali dan jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019. Sektor pertambangan dan penggalian di provinsi NTB bergantung pada penambangan emas, perak, tembaga, besi, mangan dan titanium. Potensi kandungan mineral logam ini berada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Selain itu, investasi asing yang masuk ke NTB juga terkonsentrasi di

TABEL 51. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL MALUKU PAPUA

Sektor Unggulan	Nilai Kontribusi terhadap PDRB	% Kontribusi terhadap PDRB
Pertambangan dan Penggalian	110,63 T	26,26%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55,54 T	13,18%
Konstruksi	52,12 T	12,37%
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, &	48,73 T	11,56%
Jaminan Sosial Wajib		
Perdagangan Besar dan Eceran;	42,29 T	10,04%

Sumber: BPS (diolah)

sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini juga menyumbang tingginya ekspor di provinsi NTB. Namun demikian, untuk mendukung tumbuhnya sektor ini ke depannya, perlu dilakukan usaha intensifikasi melalui strategi modernisasi/digitalisasi dan penguatan keterkaitan sektor pertambangan dengan sektor hilir seperti sektor pengolahan hasil tambang.

5. REGIONAL MALUKU PAPUA

5.1. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL MALUKU PAPUA

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Sektor Pertambangan dan Penggalian dominan menjadi sektor unggulan utama penggerak perekonomian di regional Maluku - Papua dengan kontribusi terhadap total PDRB mencapai 26,26 persen. Selain Sektor Pertambangan dan Penggalian, terdapat beberapa sektor lain yang juga berikan kontribusi besar terhadap perekonomian di regional Sulawesi yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor konstruksi, sektor Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Perdagangan Besar. Kelima sektor unggulan di atas menguasai $\pm 73,41\%$ porsi PDRB di regional Maluku - Papua. Sejak tahun 2018, kelima sektor unggulan ini tidak mengalami banyak perubahan. Total kontribusi kelima sektor terbesar terhadap PDRB Regional Maluku - Papua tersebut lebih dari 70 persen.

Pada tahun 2021, regional Maluku - Papua menyumbang 2,49% dari total PDB Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar Peta Sektor Unggulan Setiap Provinsi di Regional Maluku Papua, provinsi penyumbang PDRB terbesar di regional Maluku-Papua adalah Provinsi Papua sebesar 55,86 persen, disusul kemudian provinsi Papua Barat dengan kontribusi sebesar 20,19 persen.

Melalui peta sektor unggulan di atas, dapat kita lihat distribusi dukungan atau kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap perekonomian, baik secara parsial di setiap provinsi serta secara keseluruhan terhadap regional Maluku - Papua. Bila kita perhatikan, sektor industri pengolahan menjadi sektor unggulan di provinsi Maluku Utara dan provinsi Papua Barat, namun apabila dilihat secara keseluruhan, sektor tersebut hanya memiliki kontribusi sebesar 9,22

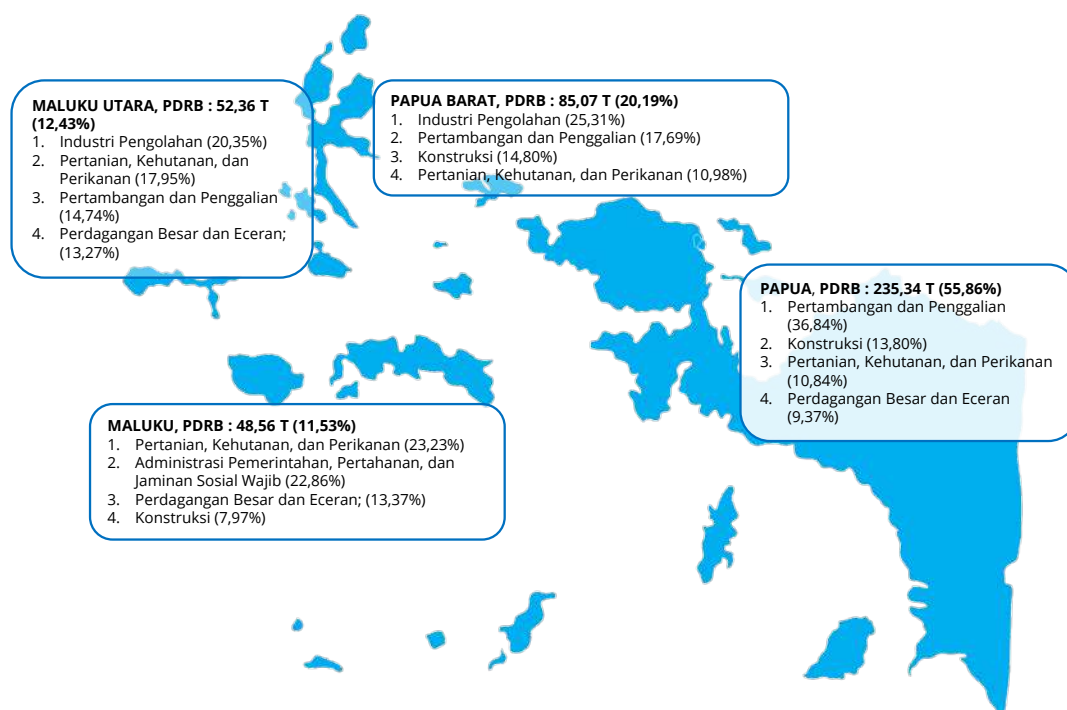
TABEL 52. PERGESERAN NILAI PDRB MALUKU-PAPUA PER JENIS SEKTOR (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Sektor Unggulan	2020			2021		
	Nilai*	% Kontr	Rank	Nilai*	% Kontr	Rank
Pertambangan dan Penggalian	76,62	20,65%	1	110,63	26,26%	1
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53,54	14,43%	2	55,54	13,18%	2
Konstruksi	49,93	13,45%	3	52,12	12,37%	3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	48,17	12,98%	4	48,73	11,56%	4

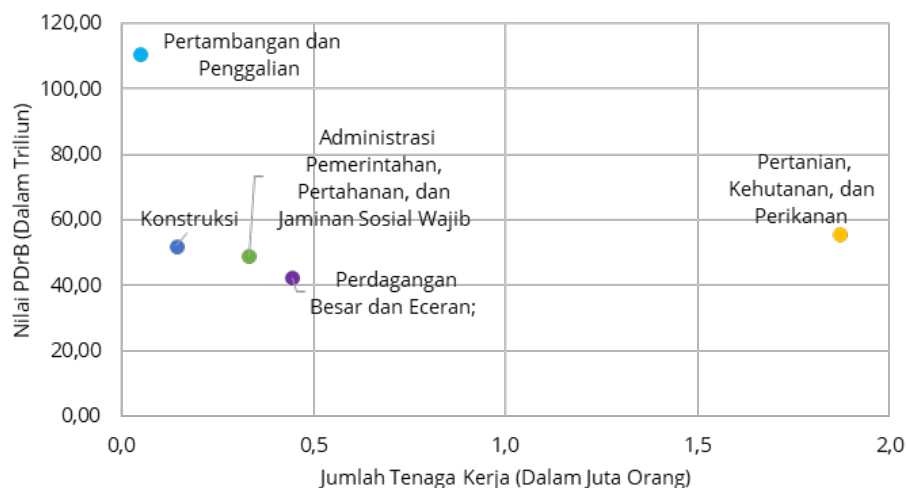
Sumber: BPS (diolah)

Keterangan: *merupakan nilai PDRB per sektor (dalam triliun rupiah)

GAMBAR 106. PETA SEKTOR UNGGULAN SETIAP PROVINSI DI REGIONAL MALUKU PAPUA



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 107. KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PDRB TAHUN 2021


Sumber: BPS, diolah

persen terhadap PDRB regional Maluku-Papua. Pada regional Maluku yang terdiri dari dua provinsi yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara agregat menjadi sektor unggulan, sedangkan pada regional Papua yang terdiri dari provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, sektor Pertambangan dan Penggalian yang menjadi sektor unggulan di wilayah tersebut.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel Pergeseran Nilai PDRB Maluku-Papua per Jenis Sektor, kontribusi setiap sektor tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2020. Seluruh sektor unggulan mengalami pertumbuhan apabila dilihat dari nilainya, akan tetapi apabila dilihat dari persentase kontribusinya terhadap PDRB Regional, selain sektor Pertambangan dan Penggalian, terjadi penurunan persentase kontribusi dari keempat sektor unggulan lainnya di Regional Maluku – Papua.

Pada Tahun 2021, kontribusi sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja cukup besar. Kelima sektor unggulan pada regional Maluku - Papua mampu menyerap sekitar 2,8 juta orang tenaga kerja atau 75,85 persen dari total serapan seluruh sektor usaha. Dari kelima sektor unggulan; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 1,8 juta orang tenaga kerja. Hal ini kembali menunjukkan begitu pentingnya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di regional Maluku - Papua, tidak hanya kontribusinya terhadap

PDRB, tetapi juga kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja di regional tersebut. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB regional, justru paling sedikit menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor unggulan lainnya, dengan serapan hanya sebanyak 48,3 ribu orang tenaga kerja saja, hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal.

Pembahasan lebih lanjut terkait sektor unggulan pada regional Maluku - Papua, terutama 2 (dua) sektor utamanya yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap PDRB di wilayah Sulawesi, yaitu (i) Sektor Pertambangan dan Penggalian dan (ii) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dapat diuraikan sebagai berikut:

5.I.A. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

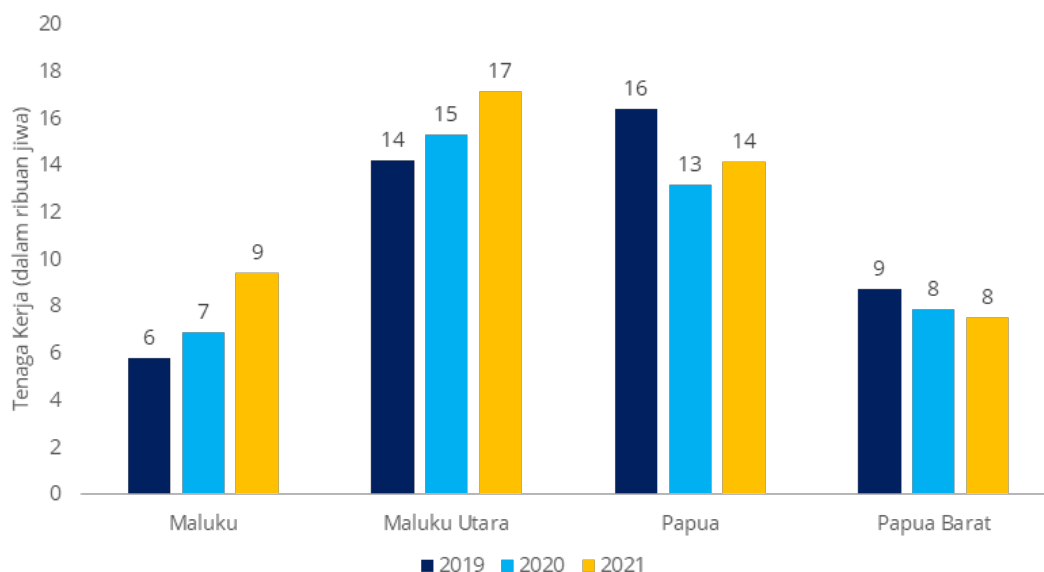
Selama periode Tahun 2018 – 2022, rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian regional cukup besar, yaitu berada di kisaran 22,8 persen. Kontribusi sektor ini sempat mengalami penurunan pada Tahun 2019, akan tetapi kembali meningkat di tahun 2020 dan 2022 hingga mencapai 26,26 persen. Sektor pertambangan dan penggalian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis di sebagian besar regional Maluku – Papua, khususnya pada provinsi

TABEL 53. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL MALUKU - PAPUA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Maluku	1.14%	1.63%	1.33%	1.06%
2	Maluku Utara	4.09%	6.71%	6.38%	6.97%
3	Papua	79.93%	69.00%	73.41%	78.36%
4	Papua Barat	14.83%	22.66%	18.88%	13.60%
Kontribusi total Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Regional Maluku-Papua		26.11%	18.06%	20.65%	26.26%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 108. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

Papua. Hanya di provinsi Maluku saja, sektor Pertambangan dan Penggalian tidak menjadi sektor unggulan, karena hanya berkontribusi 2,42 persen saja terhadap PDRB di provinsi tersebut.

Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan di Papua karena konsentrasi mineral logam pertambangan diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar, dengan potensi terbesar pada pertambangan emas. Selain itu, bagian barat Papua memiliki kandungan minyak, gas, mineral logam (tembaga, emas, mangan, aluminium, nikel, cobalt, corum dan besi), serta mineral industri dan golongan C (bahan konstruksi, batu gamping, marmer, asbes, dan gypsum) yang berlimpah dan menjadi objek utama dalam investasi sektor pertambangan.

Peranan sektor pertambangan dan penggalian di provinsi Maluku Utara, terlihat dari besarnya kontribusi produk pertambangan dan penggalian pada pertumbuhan ekspor Maluku Utara. Besi dan baja serta bijih, kerak dan abu logam menjadi andalan ekspor Maluku Utara dengan negara tujuan Tiongkok dan India.

Pada tahun 2021, sebagaimana yang tercantum pada tabel Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Tiap Provinsi terhadap Total PDRB Regional Maluku - Papua Tahun 2018-2021, provinsi dengan kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terbesar pada PDRB regional Maluku - Papua adalah Provinsi Papua (78,36%), Papua Barat (13,60%), Maluku Utara (6,97%) dan Maluku (1,06%). Secara keseluruhan, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap total PDRB regional Maluku-Papua mengalami peningkatan

selama periode 2018-2021, meskipun sempat mengalami penurunan di Tahun 2019. Penurunan kontribusi di Tahun 2019 terjadi seiring dengan masa transisi peralihan sistem tambang Freeport ke underground atau penambangan bawah tanah dan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Pada Tahun 2020 kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian kembali meningkat, bahkan pada Tahun 2021 kontribusinya telah melampaui kontribusi di Tahun 2018, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan produksi tambang bawah tanah di Kabupaten Mimika, permintaan ekspor konsentrat yang terjaga, dan harga produk tambang di pasar Internasional yang tinggi.

Sebagai sektor unggulan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian relatif kecil, hanya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 48.305 orang atau sekitar 1,3 persen dari total penyerapan tenaga kerja oleh seluruh lapangan usaha di Regional Maluku Papua pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan sektor bersifat padat modal, yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja dan lebih banyak ditopang dengan peralatan berat. Perkembangan/pertumbuhan kontribusi penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertambangan dan penggalian selama rentang tahun 2019 s/d 2021 di keempat provinsi di regional ini sebagaimana terdapat pada gambar Pertumbuhan Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Per Provinsi Regional Maluku-Papua Tahun 2019-2021

Pada regional Maluku terlihat tren peningkatan tenaga kerja yang terserap di sektor Pertambangan dan Penggalian. Sebaliknya di regional Papua terlihat penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap apabila dibandingkan dengan jumlahnya di Tahun 2019.

TABEL 54. PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TIAP PROVINSI TERHADAP TOTAL PDRB REGIONAL MALUKU-PAPUA TAHUN 2018-2021

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1	Maluku	19.94%	20.49%	20.74%	20.31%
2	Maluku Utara	16.36%	16.54%	16.63%	16.92%
3	Papua	47.16%	45.96%	45.70%	45.94%
4	Papua Barat	16.54%	17.02%	16.94%	16.82%
Kontribusi total sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Regional Sulawesi		13.62%	14.68%	14.43%	13.18%

Sumber: BPS (diolah)

5.I.B. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Sejak tahun 2018, kontribusi sektor ini terhadap PDRB regional Maluku - Papua berada pada kisaran angka 13-14%. Walaupun sempat mengalami kenaikan persentase kontribusi di Tahun 2019, kontribusinya kembali menurun di Tahun 2020 dan 2021. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa walaupun hingga saat ini sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi sektor unggulan di regional Maluku- Papua, namun perlahan dapat tergeser oleh perluasan produksi dari sektor lainnya.

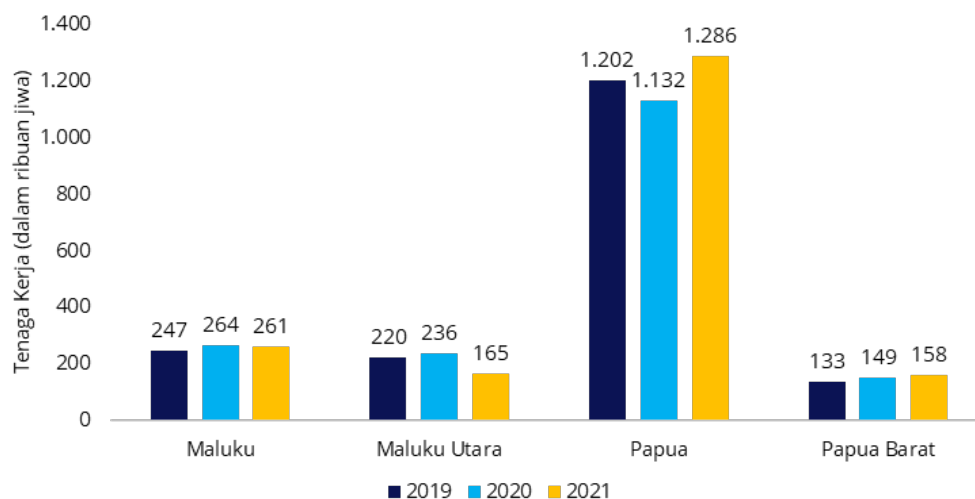
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis di seluruh provinsi di regional Maluku – Papua, khususnya pada provinsi Maluku yang menjadi sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di provinsi tersebut. Pada tahun 2021, sebagaimana yang tercantum pada tabel di atas, provinsi penyumbang PDRB Regional Maluku-Papua sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terbesar berturut-turut adalah Papua (45,94%), Maluku (20,31%), Maluku Utara (16,92%), dan Papua Barat (16,82%). Secara keseluruhan, walaupun sempat mengalami kenaikan di Tahun 2019, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap total PDRB regional Maluku-Papua berturut-turut

di Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan hingga kontribusinya lebih rendah bila dibandingkan kontribusi di Tahun 2018.

Selain kontribusinya terhadap PDRB regional Maluku Papua, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sebanyak 1.870.774 orang atau sekitar 50 persen dari seluruh angkatan kerja di regional Maluku - Papua terserap pada sektor ini.

Adapun perkembangan/pertumbuhan kontribusi penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama rentang tahun 2019 s/d 2021 di ketiga provinsi utama yang mengandalkan lapangan usaha ini sebagaimana dalam gambar Pertumbuhan Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Per Provinsi Regional Maluku - Papua Tahun 2019-2021.

Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sub sektor pertanian, tanaman pangan menjadi komoditas utama yang ditanam oleh para pelaku sektor ini, tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu menjadi pilihan teratas untuk terus ditanam dan dikembangkan produktivitasnya. Selanjutnya, pada subsektor perkebunan di regional Maluku produksi dan produktivitas tanaman pala,

GAMBAR 109. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU - PAPUA TAHUN 2019-2021


Sumber: BPS, diolah

TABEL 55. LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR POTENSIAL REGIONAL MALUKU PAPUA

Uraian	Rata-rata laju pertumbuhan 2019-2021	Rank laju pertumbuhan	Rata-rata % kontribusi terhadap PDRB 2018-2021	Rank % kontribusi terhadap PDRB
Pengadaan Listrik Dan Gas	5,4%	1	0,1%	17
Informasi dan Komunikasi	5,3%	2	3,3%	8

Sumber: BPS (diolah)

kelapa, kakao, dan cengkeh menjadi komoditas yang tidak hanya menumbuhkan tingkat perekonomian di regional ini tetapi juga mempunyai kontribusi yang cukup signifikan di level nasional. Subsektor peternakan yang dikembangkan pada regional Maluku, yaitu jenis peternakan yang terdiri dari ternak besar yaitu sapi, kerbau, kuda, dan ternak kecil yaitu kambing, domba, babi, dan jenis unggas yaitu ayam buras, ayam petelur, dan itik. Pada subsektor perikanan, produksinya didukung dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Untuk produksi perikanan tangkap fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap, sedangkan perikanan budidaya fokus pada peningkatan produksi. Pengembangan perikanan budidaya didukung dengan beragamnya lahan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya seperti di perairan laut, di tambak air payau, di kolam/air tawar, di sawah, dan di perairan umum. Komoditi unggulannya lobster, udang, ikan kerapu, ikan nila, ikan mas, dan rumput laut merupakan komoditi yang dominan pada produksi perikanan di regional Maluku

MALUKU PAPUA

Pada regional Maluku - Papua, dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi selama tiga tahun terakhir berdasarkan data yang dirilis BPS, sektor potensial di regional ini adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor ini merupakan sektor potensial karena memiliki rata-rata laju pertumbuhan tercepat kedua yakni sebesar 5,3%, dibawah sektor Pengadaan Listrik Dan Gas. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas tidak dimasukkan sebagai sektor potensial karena kontribusinya yang masih terlalu kecil terhadap PDRB regional yakni hanya sebesar 0,1 %, sementara pada sektor informasi dan komunikasi kontribusinya sebesar 3,3%, sebagaimana tabel Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Potensial Regional Maluku Papua.

5.II.A. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Menurut kamus BPS, sektor informasi dan komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk

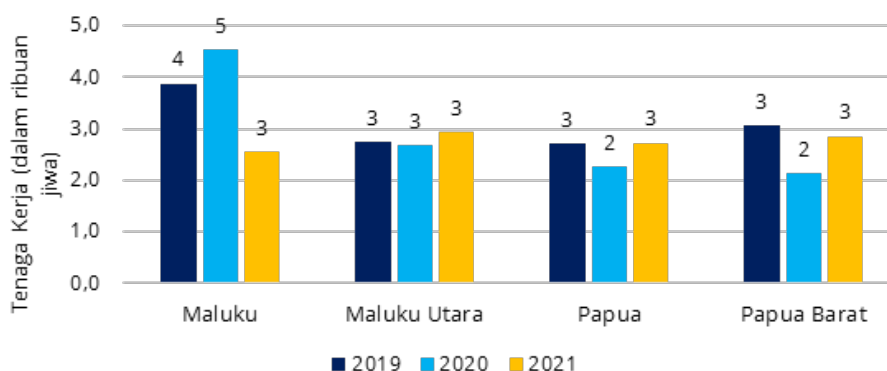
5.II. SEKTOR POTENSIAL REGIONAL

TABEL 56. RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN DAN RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 PER PROVINSI

Provinsi	Rata-rata laju pertumbuhan 2019-2021	Rata-rata % kontribusi terhadap PDRB 2018-2021
Maluku	3.7%	3.1%
Maluku Utara	7.9%	3.3%
Papua	4.7%	4.0%
Papua Barat	7.1%	1.8%

Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 110. PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN PER PROVINSI REGIONAL MALUKU - PAPUA TAHUN 2019-2021



Sumber: BPS, diolah

mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Termasuk penerbitan yang mencakup perolehan hak cipta untuk isinya (produk informasi) dan membuat isinya tersedia ke masyarakat umum dengan cara atau melalui reproduksi dan distribusi dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang layak dari penerbitan (dalam bentuk cetakan, elektronik atau audio pada internet seperti produk multimedia seperti buku referensi cd room dan lain-lain) dicakup dalam kategori ini.

Berdasarkan tabel rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi sektor informasi dan komunikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 per provinsi, provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan paling tinggi pada sektor informasi dan komunikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah provinsi Maluku Utara (7,9%) dan provinsi Papua Barat (7,1%).

Meskipun kontribusinya terhadap PDRB regional terus meningkat dengan laju pertumbuhan yang tergolong cepat, ternyata secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja di sektor informasi dan komunikasi di regional Maluku-Papua mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2019, Sektor Informasi dan Komunikasi menyerap 12.402 tenaga kerja, lalu berkurang di Tahun 2020 dan 2021 berturut-turut 11.640 dan 11.085 tenaga kerja. Sementara provinsi Papua Barat juga mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja di Tahun 2020, kemudian kembali meningkat di Tahun 2021, tetapi belum melebihi penyerapan di Tahun 2019. Berbeda dari daerah lainnya, provinsi Maluku justru mengalami lonjakan penyerapan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19 Tahun 2020, tetapi berkurang drastis penyerapan tenaga kerjanya di Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, sektor informasi dan komunikasi hanya menempati peringkat delapan dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB di regional Maluku-Papua, meski demikian sektor ini diyakini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih di tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut terlihat dari tingginya laju pertumbuhan bahkan saat terjadinya pandemi COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas warga justru menjadi peluang bagi transformasi digital. Masyarakat didorong untuk beradaptasi dengan penerapan gaya kerja dan gaya hidup digital, sebagai bagian dari pola hidup di era kenormalan baru. Selain itu, Pemerintah saat ini tengah serius membangun wilayah timur Indonesia, khususnya provinsi Papua dan Papua Barat. Upaya tersebut salah satunya melalui program tol langit, yaitu suatu konsep akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan komunikasi yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan infrastruktur menuju transformasi digital di wilayah Papua antara lain dengan pembangunan 824 titik Base Transceiver Station (BTS), serta penguatan jaringan existing Palapa Ring timur dan Microwave Link. Keberhasilan Program Tol Langit ini akan mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan integrasi ekonomi dan keuangan digital di tanah Papua Barat dan Papua dalam ekosistem digital nasional.

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



BAB IV ANALISIS HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Foto Sahid Subekti

Kebijakan fiskal terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berbagi peran dalam melaksanakan kebijakan fiskal sesuai kewenangannya masing-masing. Untuk itu, kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal, mendorong fungsi APBN secara optimal, hingga akhirnya APBN mampu mencapai tujuan bernegara. Sinergi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tercermin dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan didasarkan pada sejumlah undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, beserta peraturan turunannya.

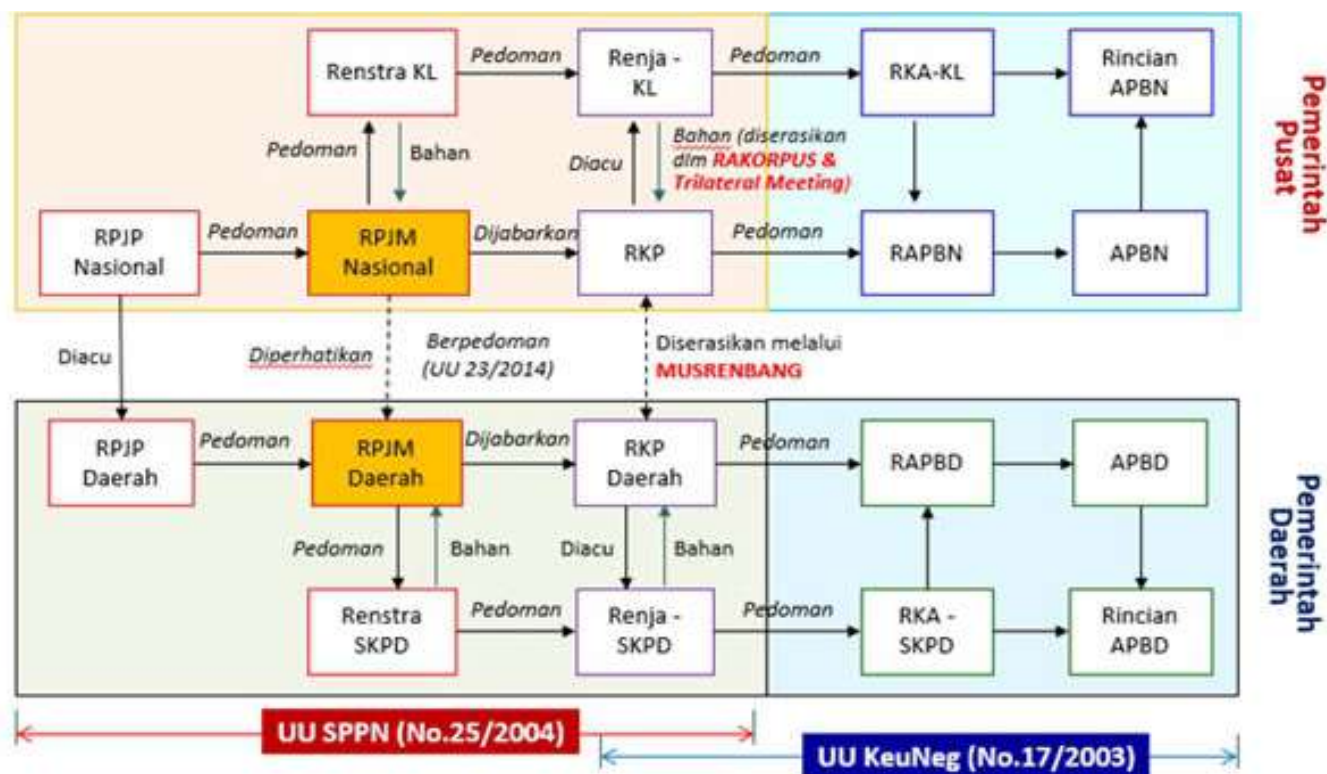
1. SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. SPPN bertujuan untuk: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi antardaerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah serta antara pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam UU SPPN terdapat tiga ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat visi misi rencana pembangunan 20 tahun. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang merupakan turunan atas RPJP untuk rencana pembangunan lima tahun. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rencana kerja tahunan pemerintah dengan berpedoman pada RPJMN. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki peran sentral dalam merumuskan ketiga dokumen perencanaan pembangunan nasional tersebut. Tidak berbeda dengan sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional, perencanaan pembangunan di tingkat daerah juga terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. SPPN mengamanatkan adanya sinergisitas perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang disetujui oleh DPR/DPD. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Sebab itu, APBN/APBD menjadi satu bagian tak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sedangkan penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan dan penganggaran yang diatur oleh undang-undang yang terpisah dan dikerjakan oleh kementerian yang berbeda (perencanaan dibawah koordinasi Bappenas dan penganggaran dibawah koordinasi Kementerian Keuangan) menyebabkan terjadinya diskoneksi antara perencanaan dan penganggaran nasional. Masalah selanjutnya, perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga tidak sinergi baik dari konten perencanaan pembangunan (RPJMN terhadap RPJMN, atau RKPD terhadap RKP) maupun dari tahapan perencanaan dan penganggaran. Hal ini menjadi semakin rumit karena wewenang untuk melakukan sinergi antara pusat dan daerah ada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Wasono dan Maulana, 2018).

GAMBAR 111. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI INDONESIA



Sumber: Kemenkeu

2. TANTANGAN DALAM PROSES BERSINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Undang-undang Keuangan Negara menjadikan program sebagai filosofinya, sedangkan Undang-undang SPPN menjadikan fungsi sebagai basis penganggaran. Keduanya menciptakan perencanaan dan penganggaran yang tidak kompatibel dan bahkan terputus sehingga menimbulkan masalah cukup serius bagi kualitas dan integritas pembangunan di Indonesia (Wasono dan Maulana, 2018). Terhadap adanya kondisi keterlepaskaitan antara perencanaan dan penganggaran tersebut, disusunlah regulasi untuk menjembatani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Regulasi tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

PP nomor 17 tahun 2017 melahirkan perubahan instrumen proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di antaranya: 1) sesuai amanat Presiden, Bappenas kedepan akan berperan sebagai Sistem Integrator dalam mengintegrasikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas Presiden; 2) penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lagi dilaksanakan dengan pendekatan money follow function namun dilakukan dengan pendekatan

dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan melalui kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerangka pelayanan umum dan investasi; dan 3) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional menggunakan pendekatan tematik, instrum, integratif dan spasial yang merupakan penjabaran tema dan Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah (Bappenas, 2019).

Bappenas mencatat implementasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 masih meninggalkan beberapa catatan, diantaranya:

- PP No. 17 Tahun 2017 memunculkan aktor baru dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sampai saat ini belum ada koridor yang jelas mengenai sejauh mana kewenangan Kemenko Bidang Perekonomian dalam menjembatani Bappenas dan Kementerian

GAMBAR 112. SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Sumber: Paparan Bappenas dalam Diklat Project Appraisal Valuation 2, 2019

Keuangan.

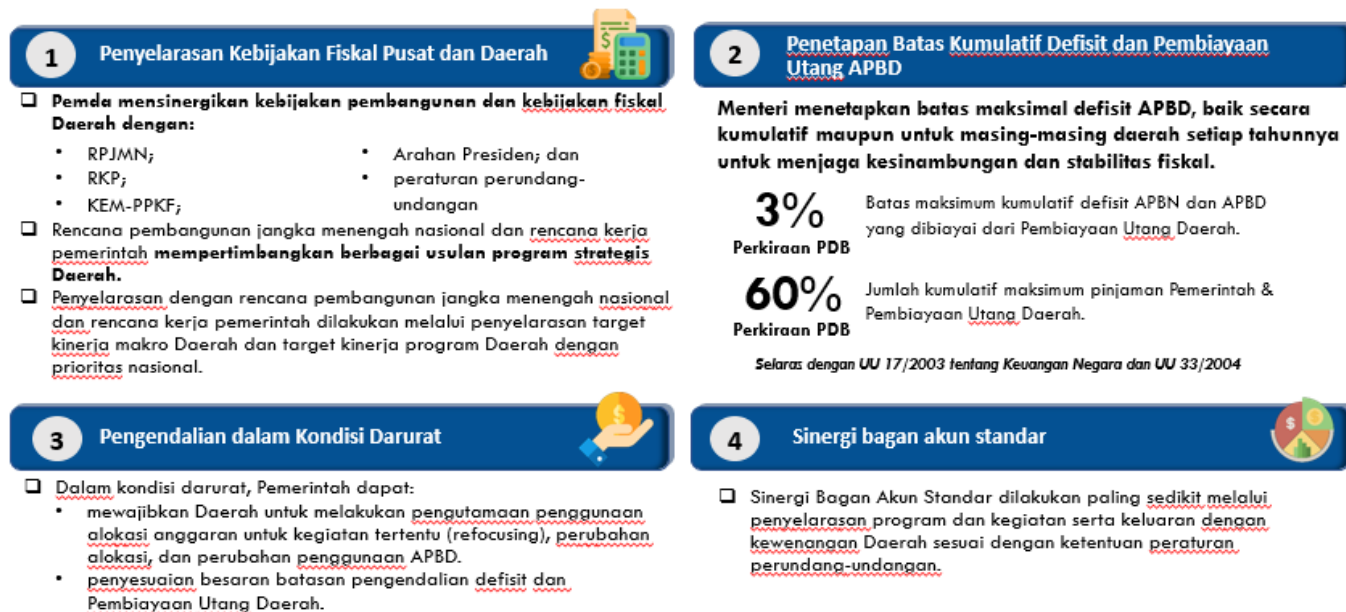
- PP No. 17 Tahun 2017 mengatur beberapa batas waktu tahapan perencanaan penganggaran, sebagai contoh Perpres RKP harus ditetapkan pada bulan Juni pada setiap tahunnya (Pasal 21 ayat 2). Sampai saat ini Penetapan Perpres RKP selalu mundur sampai dengan bulan Agustus-September, padahal ada amanat dalam Permendagri 86/2017 yang mengatur tentang Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjadikan Perpres tentang RKP sebagai referensi dalam penyusunan RKPD.
- Belum ada mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan “bersama-sama” antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan. Misalnya, dalam proses penelaahan Renja K/L, Kementerian Keuangan memiliki peran yang sama dengan Bappenas dalam hal menyetujui/menolak usulan kegiatan K/L, namun dalam penelaahan RKA-K/L proses ini belum berjalan secara setara.

Tinjauan lain atas proses perencanaan dan penganggaran juga dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan melalui revidi keselarasan perencanaan dan penganggaran tahun 2020 di tiga sektor layanan publik, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Revidi tersebut bertujuan untuk memotret keselarasan informasi kinerja (nomenklatur program, sasaran/target pembangunan, kerangka pendanaan) antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Revidi tersebut mencuplik beberapa temuan umum sebagai berikut:

1. Proyek prioritas pada RKP tahun 2020 masih mengacu pada RPJMN 2015-2019 karena RKP 2020 terbit mendahului RPJMN 2020-2024.
2. Beberapa indikator program prioritas/proyek prioritas dalam RPJMN 2020-2024 tidak tersedia dalam RPJMD-RKPD.
3. Terdapat ketidakselarasan struktur data perencanaan penganggaran pusat dan daerah, salah satunya perbedaan besaran (volume) dan satuan target antara RPJMN dengan RPJMD.
4. Perbedaan timeline proses perencanaan penganggaran di pusat dan daerah akibat perbedaan jadwal pilkada dengan Pilpres, sehingga tidak sedikit RPJMD yang ditetapkan mendahului periode RPJMN sehingga RPJMD tidak mengacu ke RPJMN.
5. Tidak tersedia lokasi/lokus pada dokumen RPJMN dan RKP pada beberapa proyek di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga tidak dapat dilakukan tracking belanja prioritas pada dokumen anggarannya.

Berbagai isu tersebut merupakan tantangan besar dalam mewujudkan sinergi antara kebijakan fiskal nasional melalui harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyempurnakan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, diuraikan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan pada 4 (empat)

GAMBAR 113. INSTRUMEN SINERGI KEBIJAKAN FISKAL ANTARA PEMERINTAH DAN DAERAH



Sumber: Paparan Sosialisasi DJPK, Kemenkeu; 2022

pilar utama, yaitu: 1) mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; 2) mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah; 3) mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah; dan 4) harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi bagan akun standar sebagai salah satu instrumen sinergi kebijakan fiskal diharapkan dapat menjadi solusi atas ketidakselarasan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2021

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 5 Perpres tersebut, RKP tahun 2021 dimutakhirkan berdasarkan UU No.9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan dengan Perpres. Perencanaan pembangunan pada tahun 2021 ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, sehingga tema RKP tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda

dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) dengan daya ungkit tinggi. Dengan mempertimbangkan isu yang berkembang, terutama terkait dengan pandemi COVID-19, maka untuk merespon isu tersebut telah dilakukan penambahan dua MP sehingga seluruhnya menjadi 43 MP.

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian PN dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; 2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan MP; (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3.1. PRIORITAS NASIONAL

Dokumen RKP tahun 2021 menjabarkan rencana

pembangunan secara lebih rinci ke dalam PN, PP, KP, dan MP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Adapun tujuh PN RKP beserta Major

Rp426.717,9 miliar atau sebesar 71,9% dari total alokasi belanja PN Rp593.633,3 miliar atau sebesar 34,5% dari total alokasi belanja K/L Rp1.235,7 triliun. Sesuai dengan tema RKP tahun 2021, anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi

TABEL 57. PRIORITAS NASIONAL DAN MAJOR PROJECT TAHUN 2021

Prioritas Nasional (PN)	Major Project (MP)
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas (Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi); 2. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; 3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 4. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; 5. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit; 6. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng; 7. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional.
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan; 2. Pengembangan Wilayah Metropolitan (Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar); 3. Pengembangan Kota Baru (Maja, Tanjung Selor, Sofifi, Sorong); 4. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); 5. Pemulihan Pasca Bencana (Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, Kawasan Selat Sunda); 6. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke); 7. Project Wilayah Adat Papua (Wilayah Adat Laa Pagi dan Wilayah Adat Domberay).
PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting; 3. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; 4. Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas); 5. Integrasi Bantuan Sosial menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh.
PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Meningkatkan Kemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; 3. Memperkuat Moderasi Beragama; 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas.
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar; 2. Infrastruktur Ekonomi; 3. Infrastruktur Perkotaan; 4. Proyek Prioritas Energi dan Ketenagalistrikan; 5. Infrastruktur TIK untuk Transformasi Digital.
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3; 2. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.
PN 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Penguatan National Security Operation Center (NSOC) - Security Operation Center (SOC) dan Pembentukan 121 Computer Security Incident Response Team (CSIRT); 2. Penguatan Laut Natuna

Sumber: RKP Tahun 2021

Project tahun 2021 disajikan dalam tabel Prioritas Nasional dan Major Project Tahun 2021.

Alokasi anggaran PN tahun 2021 sebagian besar dianggarkan dari belanja K/L yakni sebesar

serta sosial. Langkah ini tercermin dari dukungan pendanaan untuk pengembangan kawasan industri seperti Batang dan Subang, kawasan prioritas pariwisata, proyek-proyek infrastruktur, serta penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

TABEL 58. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

Kode PN	Nama PN	Alokasi Total (Rp Miliar)	Alokasi Belanja K/L (Rp Miliar)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	74.246,2	22.050,7
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	74.318,3	5.190,1
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	279.829,1	282.720,7
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.757,6	3.840,8
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	115.290,7	70.791,7
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	12.284,4	10.356,2
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	31.907,0	31.767,7
TOTAL		593.633,3	426.717,9

Sumber: RKP 2021 dan Aplikasi MEBE

Keterangan:

- Alokasi total Prioritas Nasional (Sumber RKP) mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, namun belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta).
- Data alokasi belanja K/L per tanggal 31 Desember 2021, diambil dari aplikasi MEBE.

(TIK). Major project terkait pengembangan destinasi wisata prioritas, kawasan industri, dan vokasi, serta MP lainnya terkait infrastruktur merupakan motor utama langkah pemulihan ekonomi.

Berdasarkan total alokasi PN per K/L, terdapat tiga K/L yang memiliki alokasi PN terbesar yakni Kementerian Sosial (25,0%), Kementerian Kesehatan (21,0%) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (13,4%). Alokasi tersebut sebagian besar berupa bantuan sosial yang digunakan untuk membiayai PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, masing-masing pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota juga diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan yang dituangkan dalam beberapa instrumen antara lain RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Periode RPJMN disesuaikan dengan masa jabatan presiden dan RPJMD disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah. Sementara RKP dan RKPD merupakan dokumen perencanaan yang dibuat tahunan. Dokumen penganggaran dituangkan dalam DIPA untuk belanja K/L dan DPA untuk belanja daerah. Reviu harmonisasi anggaran MP pada PN ini dilakukan dengan menyandingkan antara dokumen RKP dan RKPD serta DIPA dan DPA TA 2021.

3.II. TKDD: DAK FISIK, DAK NONFISIK DAN DANA DESA

Kebijakan Dana Alokasi Fisik Tahun 2021 difokuskan

pada: 1) refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas; 2) peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik; dan 3) peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya. Adapun target output tahun 2021 pada bidang DAK Fisik dijabarkan dalam gambar Target Output DAK Fisik Tahun 2021

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun 2021 difokuskan pada: 1) dukungan upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi; 2) peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan; 3) penambahan DAK Nonfisik jenis baru yaitu Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitas Penanaman Modal dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan 4) peningkatan pengelolaan DAK Nonfisik melalui perencanaan dan penganggaran berbasis output dan outcome, penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan laporan penggunaan, penguatan sinergi dengan DAK Fisik maupun Belanja K/L, serta integrasi pemantauan melalui integrasi aplikasi. Target output tahun 2021 pada bidang DAK Nonfisik dijabarkan dalam gambar Target Output DAK Nonfisik Tahun 2021.

Arah kebijakan Dana Desa Tahun 2021 difokuskan pada: 1) reformulasi dan pengalokasian penyaluran Dana Desa; 2) mendukung pemulihan ekonomi desa; dan 3) mendukung pengembangan sektor prioritas.

TABEL 59. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL K/L TAHUN 2021

NAMA K/L	PAGU (Rp Miliar)
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
Kementerian Pertanian	8.157,4
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	7.507,8
Kementerian Perdagangan	1.650,9
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN	2.288,4
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	2.278,5
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	315,0
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
Kementerian Sosial	106.033,9
Kementerian Kesehatan	89.686,4
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	56.240,9
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
Kementerian Agama	2.638,4
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	713,4
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	288,4
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	32.096,6
Kementerian Komunikasi Dan Informatika	20.883,0
Kementerian Perhubungan	14.825,3
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	4.131,4
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	4.086,5
Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	1.391,9
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
Kementerian Pertahanan	27.577,3
Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.040,8
Badan Siber Dan Sandi Negara	677,0

Sumber: Aplikasi MEBE

GAMBAR 114. TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2021



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

GAMBAR 115. TARGET OUTPUT DAK NONFISIK TAHUN 2021



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

Prioritas	Penggunaan
Pemulihan Perekonomian Desa	Program padat karya tunai
	Jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai
	Pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian
	Program Pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan perdesaan melalui peningkatan peran BUMDesa.
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital
Pengembangan Sektor Prioritas	Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi
	Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata
	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur Desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai
	Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Desa.

4. REVIU HARMONISASI BELANJA PUSAT-DAERAH TAHUN 2021

4.1. REGIONAL SUMATERA

Berdasarkan lampiran I Perpres Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 disebutkan bahwa pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, dan pertambangan; sebagai basis industri pengolahan setelah Jawa, pintu gerbang nasional bagi kawasan Asia, dan lumbung pangan dan energi nasional; serta pengembangan pariwisata terutama

kawasan Danau Toba dan kawasan pariwisata lainnya. Wilayah Sumatera adalah penghasil terbesar komoditas perkebunan utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, komoditas tambang batu bara dan timah, serta salah satu penghasil utama sumber energi migas, komoditi udang budidaya, dan hasil-hasil pertanian. Industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan nilai tambah dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pada tahun 2021, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah Sumatera dilakukan dengan tujuh langkah yaitu:

1. mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi di kawasan-kawasan industri dan KEK khususnya di sepanjang koridor Tol Trans Sumatera di pesisir timur, yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, dan KI/KEK Galang Batang dengan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal serta memantapkan pasokan energi; serta mengoptimalkan KPBPB antara lain KPBPB Sabang dan KPBPB Batam;
2. memacu pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau Toba dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang dengan melaksanakan rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun;
3. mengintegrasikan sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan industri dan kota-kota utama;
4. meningkatkan produktivitas budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya usaha rakyat;
5. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Medan, WM Palembang, dengan fokus peningkatan transportasi massal perkotaan, penyediaan layanan dasar seperti perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang aman, pengembangan sistem drainase perkotaan, penataan kawasan permukiman, dan ruang terbuka hijau publik di perkotaan;
6. meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera.
7. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

4.1.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK, DAK NONFISIK DAN DANA DESA

Hasil reviu harmonisasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa pada regional Sumatera yang dilakukan di masing-masing Kanwil DJPb dapat dijabarkan sebagai berikut:

Jalan

Reviu atas alokasi belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa pada output jalan di regional Sumatera menunjukkan keselarasan dan tidak terjadi tumpang tindih karena belanja K/L difokuskan pada pembangunan dan/atau rehabilitasi/pemeliharaan jalan nasional. Sedangkan alokasi anggaran pada DAK Fisik fokus pada pembangunan dan/atau rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi/kab/kota. Harmonisasi pada alokasi belanja K/L dan DAK Fisik ini sudah selaras karena dilakukan terhadap rincian kegiatan yang berbeda. Belanja Dana Desa pada output jalan digunakan untuk peningkatan konektivitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum di desa.

Sebagai contoh pada Provinsi Kepulauan Riau, untuk pembangunan jalan baru di Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui alokasi belanja K/L melalui kegiatan Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, sedangkan pada Alokasi DAK Fisik digunakan pada pelaksanaan rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur pada jalan yang sebelumnya sudah ada namun dilakukan peningkatan dengan menggunakan anggaran DAK Fisik pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota sehingga antara pembangunan jalan baru maupun rekonstruksi jalan di Provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi duplikasi anggaran. Sedangkan pembangunan jalan yang dibiayai oleh Dana Desa adalah jalan konektivitas antar desa dan jalan yang terhubung dengan jalan kabupaten.

Meski dari sisi penganggaran tidak terjadi duplikasi antara belanja K/L dan DAK Fisik, namun dalam beberapa kasus ditemukan ketidakefisienan alokasi anggaran pada salah satu sumber dana. Sebagai contoh pada Provinsi Jambi, sebagian besar anggaran untuk jalan baik pada belanja K/L maupun DAK Fisik digunakan untuk pemeliharaan atau rehabilitasi jalan. Namun jika kita lihat perbandingan rasio antara capaian output antara belanja K/L dan DAK Fisik terdapat gap yang cukup jauh. Provinsi Jambi dalam reviu-nya mencatat belanja K/L untuk jalan nasional memiliki rasio belanja dalam miliar per km sebesar 0,38 yang artinya untuk melakukan preservasi setiap km jalan dibutuhkan biaya sebesar 0,38 miliar. Sementara dari DAK Fisik rasionya sebesar 12,32 yang artinya negara mengeluarkan 12,32 miliar untuk setiap km jalan. Perbedaan rasio yang sangat jauh

ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk membuktikan apakah benar terjadi ketidakefisienan pada belanja DAK Fisik.

Irigasi

Pembangunan dan rehabilitasi irigasi baik kewenangan pusat maupun kewenangan daerah menunjukkan hasil yang selaras. Sebagai contoh di Provinsi Aceh, terdapat alokasi anggaran K/L pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satker Dinas Pengairan Provinsi Aceh berupa perawatan saluran Tahap I Daerah irigasi Jambo Aye Langkahon Pantan Labu Ruas yang terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur dengan nilai kontrak Rp103,18 miliar. Masing-masing kabupaten mendukung proyek dari K/L tersebut melalui DAK Fisik Penugasan Irigasi (Ketahanan Pangan) yakni Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp5,48 miliar dan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp3,59 miliar. Contoh berikutnya pada Provinsi Riau, harmonisasi belanja pusat dan daerah pada output irigasi tercermin pada alokasi Satker Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau berupa pembangunan embung, irigasi perpompaan besar dan menengah dengan total 42 unit yang tersebar di 8 kabupaten. Sedangkan dukungan dari pemerintah daerah tercermin pada alokasi DAK Fisik yang digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi seluas 2.969 hektar yang tersebar di 13 lokasi di 6 daerah.

Sanitasi

Secara umum, hasil revidi harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa pada output sanitasi menunjukkan keselarasan yang terlihat dari saling mendukungnya proyek yang dihasilkan antara belanja K/L dan DAK Fisik. Sebagai contoh pada Provinsi Jambi, belanja sanitasi yang dilakukan oleh K/L lebih fokus untuk perluasan jumlah keluarga yang mendapatkan fasilitas MCK yang layak. Sementara, belanja yang dilakukan dari DAK Fisik difokuskan untuk memperbaiki kualitas dari fasilitas itu sendiri dengan memiliki tujuan yang lebih spesifik yaitu untuk mengurangi stunting. Sementara untuk Dana Desa disalurkan dengan fokus membangun parit atau selokan yang layak sehingga sanitasi tetap terjaga.

Harmonisasi juga terlihat pada belanja yang dialokasikan pada proyek yang sama pada belanja K/L dan DAK Fisik namun di lokasi yang berbeda seperti di Provinsi Riau. Pada belanja K/L melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau terdapat alokasi anggaran untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala individu, komunal, pemukiman, dan skala kota yang diperuntukkan bagi 6.411 Kepala Keluarga (KK) di wilayah kota Pekanbaru

bagian selatan. Sementara DAK Fisik digunakan untuk pembangunan SPALD-T skala pemukiman di wilayah Kota Pekanbaru bagian barat dan utara, serta pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di 11 kabupaten/kota sebanyak 5.823 unit. Selanjutnya Dana Desa digunakan untuk pembangunan jamban umum dan MCK umum sebanyak 104 unit. Sementara Dana Desa digunakan untuk pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana di lokasi yang sama sepanjang 243 meter.

SPAM dan Air Bersih

Dalam RKP, Major Project di bidang sanitasi berupa Akses Air Minum Perpipaan sebanyak 10 Juta Sambungan Rumah (SR). Harmonisasi antara belanja K/L dan DAK Fisik dalam mendukung MP tersebut terlihat dari perluasan jaringan secara komprehensif sehingga lebih banyak jaringan air minum yang tersambung. Contoh pada Provinsi Jambi, alokasi untuk akses air minum dianggarkan Rp1,94 miliar dengan target 490 SR dan dari DAK Fisik dianggarkan sebesar Rp64,24 miliar dengan target 12.409 SR. Di sisi lain, Dana Desa dialokasikan untuk pemeliharaan saluran dan sumber air bersih. Hasil perhitungan rasio biaya per jumlah SR antara belanja K/L dan DAK Fisik menghasilkan gap yang tidak terlalu besar. Rasio belanja per SR dari belanja K/L sebesar 0,004 yang artinya untuk setiap 1 SR hanya membutuhkan biaya sebesar 4 juta rupiah. Sementara untuk rasio dari DAK Fisik adalah sebesar 0,005 yang artinya untuk 1 sambungan membutuhkan biaya 5 juta rupiah. Meskipun terjadi perbedaan namun masih dalam rentang yang masuk akal.

Contoh lainnya di Provinsi Riau, belanja K/L yang mendukung sanitasi dilaksanakan melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Riau berupa pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM regional Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis (Durolis), dan anggaran DAK Fisik dialokasikan untuk pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM jaringan perpipaan. Sementara Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga sepanjang 45 kilometer dan pemeliharaan sumber air bersih milik desa berupa mata air atau tandon penampungan air hujan sebanyak 2.105 unit.

Pasar

Hasil revidi atas harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa pada output pasar menunjukkan keselarasan sebagaimana ditunjukkan pada hasil revidi Kanwil DJPb Aceh dan Kanwil DJPb Riau. Pada Provinsi Aceh, belanja K/L dialokasikan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

UMK Kota Subulussalam pada program konstruksi fisik Pasar Rakyat Penang di kota Subulussalam dengan nilai kontrak sebesar Rp3,68 miliar. Dalam rangka meningkatkan konektivitas dan transportasi masyarakat kota Subulussalam, Pemerintah Kota Subulussalam menyediakan pendanaan DAK Fisik regular bidang jalan sebesar Rp1,41 miliar untuk kegiatan rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan pada jalan Lae Souraya, Kota Subulussalam. Pada Dana Desa, tidak ditemukan rewi pada output pasar. Berbeda dengan hasil rewi yang dilakukan di Provinsi Riau, pada belanja K/L terdapat belanja Tugas Pembantuan melalui Satker Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir berupa pembangunan 1 unit pasar rakyat dengan nilai kontrak Rp2,94 miliar, sedangkan pada DAK Fisik tahun 2021 tidak terdapat alokasi bidang pasar.

UMKM

Hasil rewi atas harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik dan Dana Desa pada output UMKM juga menunjukkan keselarasan. Salah satu contoh rewi pada Provinsi Aceh, belanja K/L untuk UMKM disalurkan melalui Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Aceh dalam bentuk bantuan modal alat kerja kepada 1.260 pengusaha UKM. Bantuan alat modal kerja tersebut berupa mesin jahit, peralatan kuliner, peralatan pengolahan industri makanan, mesin pembuat kopi dan lain-lain. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh menyiapkan pendanaan Pembangunan Sentra IKM (Industri Kecil Menengah) di Kecamatan Meuraksa dengan nilai kegiatan Rp1,30 miliar. Sentra IKM tersebut sebagai bagian dari upaya pendirian pusat promosi produk-produk UMKM di Aceh.

Untuk kategori UMKM Riau, belanja K/L digunakan untuk kegiatan non fisik berupa dukungan pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan output berupa penyuluhan terhadap 113 koperasi dan fasilitasi akses pembiayaan kredit program bagi 31 pelaku usaha. Sementara DAK Fisik bidang Industri Kecil dan Menengah dialokasikan untuk kegiatan fisik berupa pembangunan 11 sentra IKM. Selanjutnya Dana Desa digunakan untuk membangun pasar dan kios-kios di desa dengan total 123 unit. Hasil rewi ini mencerminkan keselarasan belanja pusat dan daerah yang cukup baik pada bidang UMKM.

Bidang Pendidikan: BOS

Revi harmonisasi antara belanja K/L dan DAK Nonfisik dilakukan pada belanja bidang pendidikan khususnya pada belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS untuk sekolah umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi disalurkan melalui DAK Nonfisik,

sedangkan BOS untuk madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama disalurkan melalui belanja Kementerian Agama. Berdasarkan hasil rewi yang dilakukan Kanwil DJPb, penyaluran pada belanja K/L dengan DAK Nonfisik khususnya pada bidang pendidikan (BOS) menunjukkan keselarasan karena meski memiliki output yang sama namun sasarannya berbeda sehingga mudah untuk dilakukan tracking.

4.I.B. HARMONISASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAJOR PROJECT (MP) PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan hasil rewi yang dilakukan oleh Kanwil DJPb di Regional Sumatera, harmonisasi pelaksanaan anggaran pada Prioritas Nasional ditunjukkan melalui dukungan Pusat dan Daerah pada major project dimaksud.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 1

Hasil rewi yang dilakukan Kanwil DJPb regional Sumatera, sinkronisasi antara pusat-daerah ditunjukkan melalui dukungan pendanaan daerah pada PN 1. Di Provinsi Riau, dukungan belanja daerah pada pelaksanaan PN 1 sebesar Rp41,39 miliar sementara dukungan pusat sebesar Rp87,06 miliar. Sinergi pendanaan antara pusat-daerah juga ditunjukkan pada Provinsi Sumatera Utara yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp410,06 miliar (pendanaan dari pusat Rp694,36 miliar) pada PN 1 untuk konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas, peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan, perluasan akses pendidikan menengah, kejuruan dan khusus. Sementara di Provinsi Bengkulu, meski sasaran RKP 2021 sudah disesuaikan dengan RKP 2021, namun masih diperlukan harmonisasi dalam pelaksanaan belanja terutama pada sektor pertanian agar belanja K/L dan Pemda dapat saling melengkapi, contohnya pada pengadaan benih yang harus dilakukan harmonisasi agar tidak tumpang tindih.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 2

Berdasarkan tujuh MP pada PN 2, hanya dua MP yang berada di wilayah Sumatera yakni Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan (Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar). Kedua MP tersebut berada di Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil rewi Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, pendanaan pada MP Pembangunan Wilayah

Batam-Bintan merupakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Alokasi APBN untuk MP ini disalurkan melalui Satker BLU BP Batam sebesar Rp45,00 miliar, sementara dukungan dari daerah tidak ada. Hal yang sama juga terjadi pada pendanaan MP Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang di Sumatera Selatan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp224,06 miliar untuk Pembangunan LRT (Penyediaan PSO dan Subsidi) melalui Kementerian Perhubungan, sementara dari Daerah tidak ada pendanaan.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 3

Dukungan daerah pada PN 3 di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp25,05 miliar yang difokuskan pada kegiatan yang sifatnya pendampingan pelatihan pelatihan. Alokasi anggaran tersebut cukup kecil dibandingkan dengan pendanaan pusat yang mencapai Rp1.132,39 miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi Riau dan Sumatera Selatan yang memiliki dukungan pendanaan dari daerah lebih besar dibandingkan dengan pusat. Di Riau, dukungan pendanaan daerah sebesar Rp1.549,04 miliar, sedangkan dari pusat sebesar Rp727,26 miliar. Sementara di Sumatera Selatan, dukungan daerah sebesar Rp338,95 miliar, jauh lebih besar dibandingkan dengan pendanaan pusat yang hanya sebesar Rp58,60 miliar.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 5

Hasil reviu harmonisasi pusat-daerah pada pendanaan major project PN 5 pada Provinsi Aceh ditunjukkan melalui dukungan daerah pada pembangunan Jalan Tol Sigli dan Banda Aceh sepanjang 74,21 km yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.226,55 miliar. Dukungan Pemda tersebut dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan, Setda Aceh dengan melakukan pendampingan kepada Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian (UPT Kementerian) untuk melihat perkembangan kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dukungan Daerah Sumatera Utara pada PN 5 sebagaimana dituangkan dalam RKPD tahun 2021 sebesar Rp274,50 miliar untuk peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan pengembangan perumahan.

Di Sumatera Selatan, dukungan Daerah pada PN 5 sebesar Rp355,76 miliar sedangkan dari Pusat sebesar Rp1.169,54 miliar. Pendanaan terbesar dari APBN untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp611,88 miliar. Berbanding terbalik dengan Riau, dukungan Daerah pada PN 5 mencapai Rp494,79 miliar, lebih besar dibandingkan pendanaan dari APBN yang hanya

dialokasikan Rp237,33 miliar. Sementara, hasil reviu di Jambi menunjukkan meskipun untuk beberapa proyek sudah selaras namun cukup banyak proyek yang seharusnya menjadi perhatian namun tidak diprogramkan di Provinsi Jambi. Selain itu, terdapat kendala lain yakni sulitnya mengukur capaian output dengan tepat dan sebaran output yang tidak menentu serta jumlah satuan yang kurang tepat.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 6

PN 6 pada RKP Tahun 2021 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. PN 6 mengusung MP yaitu: 1) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan 2) penguatan sistem peringatan dini bencana. Hasil reviu di Sumatera Utara, alokasi APBN untuk PN 6 sebesar Rp182,45 miliar, sedangkan pendanaan dari daerah dialokasikan sebesar Rp21,91 miliar yang dijabarkan dalam 6 Program Prioritas Daerah. Tidak jauh berbeda, di Riau dukungan daerah untuk PN 6 lebih kecil dibandingkan pendanaan dari Pusat yakni hanya Rp17,81 miliar, sementara pendanaan pusat sebesar Rp84,48 miliar.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 7

Hasil reviu pada Provinsi Riau menunjukkan dukungan Daerah pada pelaksanaan program prioritas pada PN 7 adalah sebesar Rp5,46, sementara pendanaan dari Pusat sebesar Rp15,31 miliar.

4.II. REGIONAL JAWA

Pengembangan Wilayah Jawa diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa modern, sebagai gerbang pariwisata internasional, serta mempertahankan peran sebagai lumbung pangan nasional. Dengan kepadatan penduduk dan infrastruktur yang relatif baik, transformasi ekonomi Wilayah Jawa diarahkan menjadi perekonomian berbasis aneka industri dan jasa yang modern dan efisien yang didukung pariwisata massal yang berkembang dengan karakter budaya lokal yang kuat, serta berpartisipasi dan menyatu dalam mata rantai global di bidang investasi, produksi, keuangan, perdagangan, dan pariwisata.

Pada tahun 2021, strategi pertumbuhan Wilayah Jawa dilakukan dengan tujuh langkah sebagai berikut:

1. mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus yaitu KEK Kendal, serta dua kawasan industri manufaktur direktif Presiden yaitu KI

Batang dan KI Subang yang terintegrasi dengan jaringan tol, kereta api, dan pelabuhan di sisi Pantai Utara Pulau Jawa;

2. meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata massal kelas dunia khususnya di poros Pulau Bali-Banyuwangi-Bromo-Borobudur-Kepulauan Seribu-Tanjung Lesung, dengan beberapa kawasan yang terus dikembangkan yaitu KEK Tanjung Lesung, DPP Borobudur dan sekitarnya, serta DPP Bromo-Tengger-Semeru akan dilaksanakan sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun;
3. mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya bangsa;
4. mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras.
5. meningkatkan kelayakhunian kawasan perkotaan sebagai pusat layanan dan aglomerasi wilayah serta pendukung sektor industri dan pariwisata, khususnya di WM Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, serta Kota Baru Maja dengan fokus pada peningkatan transportasi massal, drainase perkotaan, pengendalian banjir, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan yang arnan, penataan kawasan permukiman, ruang terbuka hijau publik, dan peningkatan kerja sama lintas daerah dalam regionalisasi penyelenggaraan layanan publik;
6. meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui form kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali;
7. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

4.II.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK, DAK NONFISIK DAN DANA DESA

Hasil revidu harmonisasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa pada regional Jawa secara umum telah menunjukkan adanya keselerasan alokasi untuk output yang terkait dengan pembangunan jalan, irigasi, sanitasi, SPAM dan Air Bersih sebagaimana berikut:

Jalan

Pembangunan jalan yang dialokasikan melalui belanja K/L, DAK Fisik, dan Dana Desa telah selaras dan

tidak tumpang tindih. Alokasi belanja K/L ditujukan untuk pembangunan jalan provinsi, sedangkan DAK Fisik jamak digunakan untuk pemeliharaan dan rekonstruksi jalan, serta Dana Desa dalam rangka pembangunan, pemeliharaan, hingga rehabilitasi jalan desa.

Sebagai contoh, pada provinsi Banten, alokasi belanja K/L untuk pembangunan jalan sebagian besar digunakan untuk membangun jalan baru maupun memperlebar jalan yang sudah ada dengan output sebesar 421,27 km. Sementara realisasi anggaran DAK Fisik sebesar Rp110,69 Miliar dititikberatkan untuk pemeliharaan atau rekonstruksi jalan yang sudah ada dalam rangka memperbaiki kualitas jalan. Demikian juga untuk pembangunan jalan yang direalisasikan melalui Dana Desa sebesar Rp39,64 Miliar digunakan untuk pembangunan jalan di wilayah desa yang belum tersentuh pendanaannya pada belanja K/L dan DAK Fisik.

Contoh lainnya pada Provinsi DI Yogyakarta, di mana untuk jalan dengan status jalan provinsi dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) didanai melalui alokasi belanja K/L dengan realisasi belanja sebesar Rp282,24 Miliar. Proyek tersebut antara lain pembangunan jalan penghubung dengan Provinsi Jawa Tengah serta Proyek Jalan Lintas Selatan Jawa. Sedangkan alokasi DAK Fisik digunakan untuk pemeliharaan jalan kabupaten sebagai penghubung antar kecamatan. Adapun alokasi Dana Desa ditujukan untuk pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan untuk 92,2 km jalan desa dan penghubung antar desa.

Irigasi

Pada Provinsi Jawa Barat, realisasi Belanja K/L sebesar Rp49,57 Miliar diperuntukkan bagi pembangunan jaringan irigasi, jaringan irigasi tersier, dan irigasi perpipaan dan perpompaan. DAK Fisik dialokasikan untuk pembangunan irigasi dalam rangka ketahanan pangan, sedangkan Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi tersier dengan kategori sederhana sepanjang 130.849 meter. Sasaran dan output berbeda antara belanja K/L, DAK Fisik, dan Dana Desa namun memiliki fungsi yang sejalan dan selaras.

Sanitasi

Pada provinsi Jawa Barat, belanja K/L untuk sanitasi dan persampahan dialokasikan untuk skala kota, skala kawasan dan berbasis masyarakat. Sedangkan belanja DAK Fisik ditujukan untuk sanitasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Pada Dana Desa alokasi anggaran ditujukan untuk fasilitas jamban umum dan pengelolaan

sampah pada tingkat desa.

Harmonisasi belanja juga tercermin dari pendanaan bidang Sanitasi pada Provinsi DI Yogyakarta. Realisasi belanja K/L sebesar Rp126,44 Miliar ditujukan untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu untuk 5.510 KK. Hal yang sama juga terdapat pada DAK Fisik sebesar Rp10,61 Miliar dengan skala lebih kecil. Sementara itu, Dana Desa sebesar Rp5,91 Miliar digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, MCK, Pengelolaan Sampah Desa, Sistem Pembuangan Air Limbah yang bersifat komunal, yakni dengan skala yang lebih kecil antara 25-50 KK.

SPAM dan Air Bersih

Pada Provinsi Jawa Barat, realisasi belanja K/L sebesar Rp8,05 Miliar merupakan program PEN yang ditujukan untuk pengadaan infrastruktur air minum berbasis masyarakat. Sedangkan belanja DAK Fisik dialokasikan untuk penyediaan air minum dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Lain halnya pada Provinsi DI Yogyakarta, kegiatan Bidang Air Minum pada K/L diperuntukkan pada BLM Pamsimas, sementara pada DAK Fisik dititikberatkan pada peningkatan jaringan distribusi Sambungan Air bersih kepada rumah tangga miskin sesuai dengan tema Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Sedangkan realisasi Dana Desa sebesar Rp1,71 Miliar diperuntukkan untuk pemeliharaan sambungan air bersih sepanjang 15,128 meter.

Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik

Realisasi Belanja DAK Nonfisik cukup besar terdapat pada penyaluran BOS. Penyaluran BOS melalui DAK Nonfisik diperuntukkan sekolah negeri dan swasta dibawah pembinaan Dinas Pendidikan, sementara untuk sekolah madrasah dilakukan oleh Kementerian Agama (belanja K/L). Penyaluran BOS ini secara prinsip sudah selaras/harmonis mengingat kewenangan pembinaan sekolah sudah dipisahkan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

4.II.B. HARMONISASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAJOR PROJECT (MP) PRIORITAS NASIONAL

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 1

Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi merupakan salah satu MP pada PN 1 yang dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta. MP tersebut bertujuan untuk mendorong (1) pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 4,68-5,46 persen, (2) kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,63 – 19,84 persen, dan (3) jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI) $\geq 3,0$ sebanyak 30 perusahaan. Pelaksanaan MP tersebut didukung dari kontribusi bersama antara APBN (Kementerian Perindustrian) dan APBD. Pendanaan dari APBN ditujukan untuk Fasilitas dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah melalui dana Dekonsentrasi yang terealisasi sebesar Rp1,11 Miliar, sedangkan pendanaan yang bersumber dari APBD mendukung 6 program/kegiatan dengan realisasi sebesar Rp1,9 Miliar. Perbedaan lingkup program/kegiatan yang dilaksanakan melalui dana APBN dan APBD mengindikasikan adanya keselarasan.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 2

Pada Provinsi Jawa Barat, adanya MP pada PN 2 sejalan dengan prioritas pembangunan daerah berupa terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Terdapat lima MP pada prioritas nasional kedua ini, yaitu Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga), Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis, Pengamanan Pesisir lima Perkotaan Pantura Jawa, Rumah Susun Perkotaan (1 Juta), serta Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Enam Wilayah Metropolitan, salah satunya di wilayah Bandung.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 3

Pada beberapa provinsi, porsi dukungan pendanaan MP untuk PN 3 umumnya lebih banyak didukung melalui pendanaan pemerintah pusat. Misalnya pada Provinsi DI Yogyakarta di mana belanja dalam rangka memperkuat sistem kesehatan menunjukkan porsi yang lebih besar pada belanja pusat dibandingkan belanja daerah yaitu masing-masing sebesar Rp 14,31 miliar dan Rp 6,36 miliar. Meski demikian, pendanaan yang bersumber dari belanja daerah memiliki variasi kegiatan, sasaran, dan target yang lebih luas. Demikian juga pada Provinsi Banten, dengan dukungan pendanaan pada 3 K/L (Kemenkes, BKKBN, serta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang ditujukan untuk penanganan stunting dengan realisasi belanja Rp7,88 miliar, sementara dukungan APBD melalui OPD Dinkes Provinsi Banten melalui program BAGAS (Banten Cegah Stunting) sebesar Rp6,88 miliar pada 8 kab/kota.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 5

Pada Provinsi DKI Jakarta, pencapaian sasaran pada PN 5 dijabarkan dalam MP Proyek Infrastruktur Ekonomi, yang terdiri dari jaringan pelabuhan utama terpadu: 7 pelabuhan, KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (JKT-SMG dan JKT-BDG) dan Infrastruktur Perkotaan berupa proyek Sistem Angkutan Umum Masal di 6 Wilayah Metropolitan. Untuk proyek KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa didanai oleh Kementerian Perhubungan dengan alokasi Rp1,98 Triliun. Sedangkan untuk Infrastruktur Perkotaan berupa proyek Sistem Angkutan Umum Masal di 6 WM. Realisasi belanja untuk proyek ini berada di Kementerian Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp112,78 Miliar. Adapun dukungan Pemprov dalam Prioritas Nasional berupa program perekonomian dan pembangunan dengan realisasi belanja sebesar Rp1,81 Miliar.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 6

Pendanaan untuk MP pada PN 6 umumnya dialokasikan pada belanja pemerintah pusat. Seperti pada Provinsi Jawa Tengah, terdapat 2 MP terkait Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Pengolahan limbah B3 menargetkan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan dan pengelolaan limbah medis di dalam fasyankes, yang mana keduanya tercantum dalam dokumen RPJMN dan tidak tercantum pada RPJMD.

Contoh lainnya pada Provinsi Jawa Barat, di mana terdapat MP yang Pengamanan Pesisir lima Perkotaan Pantura Jawa dialokasikan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan capaian belanja sebesar Rp2.03 miliar dengan output Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan. Selain itu, pada DIPA Kementerian Kesehatan dialokasikan MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu yang untuk 5 Daerah (Prov/Kab/Kota) dan telah tercapai realisasi sebesar 99,07%. Pada RKP tahun 2021 kegiatan ini dialokasikan untuk 27 Daerah (Provinsi/Kab/Kota).

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 7

MP pada PN 7 di antaranya berupa Penguatan NSOC SOC dan Pembentukan L21 CSIRT. MP tersebut di antaranya dialokasikan pada Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pada Provinsi Jawa Tengah target yang hendak dicapai berupa pengembangan SDM Bidang Keamanan Siber sebanyak 638 orang, sementara pada Provinsi DI Yogyakarta di antaranya

berupa perluasan area NSOC sebanyak 10 titik. Pada Provinsi Jawa Tengah, MP tersebut tidak tersedia pada RPJMD. Sedangkan hasil reвью Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta mengungkapkan suatu indikasi. Untuk belanja pusat, terdapat kegiatan yang sesuai dengan target prioritas namun tidak masuk dalam kategori kegiatan prioritas nasional, di satu sisi Pemda mengalokasikan banyak kegiatan yang mendukung pencapaian MP. Dengan demikian, perlu identifikasi kegiatan yang lebih mendalam sehingga sinkron antara pencapaian program prioritas yang didanai dengan belanja pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

4.III. REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat. Basis keunggulan Wilayah Nusa Tenggara berada pada sektor perikanan dan kelautan yaitu rumput laut, garam, peternakan sapi, perkebunan kopi, pertambangan tembaga, emas, serta pariwisata.

Pada tahun 2021, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. memfasilitasi pengembangan industri MICE (Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition) dan perhelatan olahraga internasional sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata Nusa Tenggara melalui pengembangan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, sesuai rencana induk (masterplan kawasan pariwisata yang telah disusun);
2. meningkatkan kelayakhunian kawasan perkotaan sebagai pusat layanan dan aglomerasi wilayah serta pendukung sektor industri dan pariwisata, khususnya di Denpasar dengan fokus pada peningkatan transportasi massal, drainase perkotaan, pengendalian banjir, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan yang arnan, penataan kawasan permukiman, ruang terbuka hijau publik, dan peningkatan kerja sama lintas daerah dalam regionalisasi penyelenggaraan layanan publik;
3. meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, peternakan, perkebunan, serta budidaya tanaman pangan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;

4. mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional.
5. meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali;
6. mengembangkan kawasan perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
7. mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
8. meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Nusa Tenggara;
9. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

4.III.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK, DAK NONFISIK DAN DANA DESA

Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik

Secara umum, hasil rewi harmonisasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik baik pada bidang jalan, irigasi, sanitasi, pasar, SPAM Air Bersih dan UMKM menunjukkan keselarasan dan tidak ditemukan adanya tumpang tindih atau duplikasi anggaran.

Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik

Hasil rewi harmonisasi yang dilakukan di Provinsi NTT menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan alokasi belanja DAK Nonfisik dengan output BOS untuk mendukung output yang sama pada belanja K/L. Pengalokasian belanja DAK Nonfisik dana BOS oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk sinkronisasi penganggaran dengan belanja K/L dalam bidang pendidikan, khususnya output BOS kepada unit pendidikan dan peserta didik di Provinsi NTT. Pengelolaan dana BOS dalam RPJMD NTT termasuk dalam Prioritas Daerah 6 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dengan MP yang ditetapkan adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan.

Harmonisasi Belanja K/L dengan Dana Desa

Demikian juga halnya dengan harmonisasi antara Belanja K/L dengan Dana Desa, hasil rewi pada 3 provinsi menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Desa telah dianggarkan selaras dan mendukung Belanja K/L. Sebagai salah satu contoh, pada Provinsi NTT sinkronisasi ditunjukkan melalui penganggaran antara pemerintah daerah dan pusat yang cukup baik, dengan tersedianya alokasi belanja Dana Desa sebagai pendukung belanja K/L untuk output bidang infrastruktur dan ketahanan pangan dalam mendukung tercapainya prioritas nasional khususnya yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan terjaganya kesehatan masyarakat perdesaan. Angka rata-rata capaian output atas penggunaan belanja Dana Desa berada di atas 90 persen, yang menggambarkan antusiasme masyarakat desa dalam membangun desanya.

4.III.B. HARMONISASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAJOR PROJECT (MP) PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan hasil rewi yang dilakukan oleh Kanwil DJPb di Regional Bali dan Nusa Tenggara, harmonisasi pelaksanaan anggaran pada Prioritas Nasional ditunjukkan melalui dukungan Pusat dan Daerah pada MP dimaksud.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 1

Berdasarkan hasil rewi harmonisasi PN 1 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat MP Destinasi Wisata Prioritas Mandalika berupa jalan Bypass BIL – Mandalika dengan pendanaan dari APBN dan Rumah Sakit Internasional Mandalika dengan dukungan dana dari APBN. Dukungan Pusat-Daerah dalam pendanaan yang mendukung pariwisata Mandalika ini menunjukkan harmonisasi belanja Pusat dan Daerah. Selanjutnya, MP Destinasi Wisata Prioritas Labuan Bajo di NTT, dalam pelaksanaan pengembangan pelabuhan Labuan Bajo mendapat dukungan ketersediaan alokasi belanja dari APBN pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara alokasi belanja Daerah dialokasikan untuk akses jalan KSPN Labuan Bajo.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 2

Harmonisasi Pusat-Daerah dalam pelaksanaan PN 2 terlihat dari sinkronnya pendanaan Pusat-daerah pada MP di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua

dan Kefamenanu. Hasil revidi menunjukkan terdapat dukungan anggaran APBN pada Kementerian Perhubungan dengan pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara, Pengembangan Bandara Hub Primer, dan Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang. Sedangkan dukungan pendanaan dari Daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kewilayahan perbatasan. Sinkronisasi pendanaan Pusat-Daerah yang saling mendukung juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada MP Pemulihan Pascabencana Pulau Lombok. Pendanaan APBN difokuskan untuk pembangunan kembali rumah korban gempa tahun 2018, sedangkan dukungan Daerah difokuskan pada rehabilitasi fasilitas publik.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 5

PN 5 pada RKP 2021 diharmonisasikan ke dalam RPJMD NTT dengan MP Proyek Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan empat target yaitu rumah susun perkotaan, pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak dan aman, ketersediaan akses air minum perpipaan, dan pembangunan waduk multiguna. Pendanaan dari APBN digunakan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, sedangkan APBD dilaksanakan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 6

Secara umum, harmonisasi Pusat-Daerah pada PN 6 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan keselarasan. Hasil revidi pada MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah 83 pada PN 6 di Provinsi NTB menunjukkan bahwa dukungan Daerah terlihat pada alokasi di Pemprov berupa pengolahan 136.800 Kg limbah B3. Sedangkan dari pendanaan Pusat dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan berupa sosialisasi pengelolaan limbah medis terhadap 10 Kab/kota. Sementara hasil revidi pada MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, harmonisasi telah diselenggarakan oleh Pemprov NTT ke dalam Proyek Prioritas Daerah pada RPJMD dan RKP 2021, dengan menyediakan alokasi Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alokasi Belanja Daerah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait penanganan bencana baik pra maupun pasca bencana, termasuk

sistem dan informasi bencana dalam rangka peringatan dini bencana.

4.IV. REGIONAL KALIMANTAN

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah, memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan Kalimantan sebagai paru-paru dunia, serta mendorong pemerataan pembangunan terutama di Kalimantan bagian utara. Wilayah Kalimantan merupakan penghasil utama batu bara, migas, dan komoditas lainnya seperti bauksit, bijih besi, pasir zirkon, pasir kuarsa, kelapa sawit, dan karet.

Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan dilakukan dengan enam langkah sebagai berikut:

1. melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru yang dapat mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, menambah bangkitan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya, serta memberikan dampak positif ke berbagai sektor;
2. meningkatkan investasi dan optimalisasi kawasan-kawasan strategis khususnya kawasan industri pengolahan sumber daya alam hasil perkebunan dan pertambangan yaitu KI Ketapang dan KI Surya Borneo;
3. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan.
4. mempertahankan pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis di kawasan hutan tropik Kalimantan sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi plasma nutfah dan satwa yang dilindungi, sebagai pusat penelitian obat-obatan, serta untuk menjamin daya dukung lingkungan.
5. meningkatkan pelayanan perLinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Kalimantan.
6. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

4.IV.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK, DAK NONFISIK DAN

DANA DESA

Hasil revidu harmonisasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa pada regional Kalimantan secara umum sudah menunjukkan keselarasan, namun terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Jalan

Pembangunan jalan nasional dengan jalan provinsi/kab/kota sudah menunjukkan keselarasan dari sisi pendanaan, namun masih terdapat beberapa catatan diantaranya: 1) capaian output jalan nasional di Kalimantan Barat hanya terealisasi 60% dari target padahal tingkat kemandapan jalan di Kalimantan termasuk rendah; 2) adanya perbedaan capaian panjang jalan yang dibangun disebabkan tipe jalan yang dibangun dari DIPA K/L dan DAK Fisik.

Irigasi

Hasil revidu harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa pada bidang irigasi menunjukkan keselarasan dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Keselarasan ini terlihat dari Jaringan irigasi di Kab. Kutai Kartanegara terintegrasi dengan bendungan Marangkayu yang telah selesai dibangun dan diproyeksikan untuk pengembangan dan peningkatan daerah irigasi Marangkayu dengan luas mencapai 3.000 ha dengan sistem tadah dan irigasi desa.

Sanitasi

Harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik bidang sanitasi, ditunjukkan dengan pendanaan yang bersifat komplementer (saling melengkapi) antara keduanya. Belanja K/L diarahkan untuk penanganan sampah sedangkan DAK Fisik untuk pembangunan tangki septik. Penanggulangan sampah dan pembuatan tangki septik tersebut ditujukan untuk peningkatan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat.

SPAM/Air Minum

Secara umum, keselarasan juga ditunjukkan pada hasil revidu harmonisasi di bidang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di regional Kalimantan.

UMKM

Hasil revidu yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat

alokasi belanja infrastruktur K/L untuk UMKM, alokasi hanya dari DAK Fisik sebesar Rp3,47 miliar yang digunakan untuk merevitalisasi sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Balikpapan.

Bidang Pendidikan: BOS

Hasil revidu harmonisasi yang dilakukan di seluruh provinsi regional Kalimantan menunjukkan belanja K/L dengan DAK Nonfisik menunjukkan bahwa alokasi pendidikan terutama BOS telah selaras.

Dana Desa

Secara umum, Belanja K/L dan Dana Desa sudah selaras yang ditunjukkan dengan beberapa kategori yang terdapat pada kedua sumber belanja yaitu belanja K/L dan Dana Desa. Namun demikian terdapat beberapa kategori yang outputnya tidak dapat ditemukan pada belanja K/L seperti MCK dan embung desa. Namun hal ini bukan merupakan ketidakselarasan antara belanja K/L dan Dana Desa mengingat belanja K/L lebih dimanfaatkan kepada masyarakat di seluruh wilayah dan Dana Desa lebih ke prioritas kebutuhan desa tertentu yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Sebagai contoh lain adalah terkait volume jalan yang dibangun dari belanja K/L dan Dana Desa dimana struktur konstruksi yang digunakan adalah berbeda.

4.IV.B. HARMONISASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAJOR PROJECT (MP) PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan hasil revidu yang dilakukan oleh Kanwil DJPb di Regional Kalimantan, harmonisasi pelaksanaan anggaran pada Prioritas Nasional ditunjukkan melalui dukungan Pusat dan Daerah pada MP dimaksud.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 1

Salah satu objek revidu Kanwil DJPb Kalimantan Barat pada PN 1 yakni pada MP Kawasan Industri Ketapang dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Kabupaten Mempawah. Hasil revidu menunjukkan bahwa belum ditemukan adanya alokasi dana baik dalam belanja K/L maupun belanja Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan dan pengembangan dua Major Project ini. Hal ini mengindikasikan ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran baik di Pusat maupun di Daerah.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 2

Di Kalimantan Barat, pada PN 2 terdapat Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk yang terdapat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia lebih tepatnya di Sarawak. Dari Belanja K/L output telah dibangun dan ditingkatkan jalan sepanjang 189,71 km melalui pembangunan jalan kawasan prioritas dan jalan strategis yang salah satunya menyasar pada kawasan strategis Paloh Aruk. Selain itu, output Fasilitas Pengembangan Promosi dan Koordinasi di Kawasan Perbatasan telah tercapai pada 2 wilayah Kabupaten. Namun, dari pendanaan Daerah belum ditemukan output langsung yang berhubungan dengan pengembangan Kawasan ini baik dari segi infrastruktur maupun dari segi pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan. Namun demikian terdapat kegiatan Identifikasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal pada Masyarakat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wilayah Perbatasan yang ada di Kawasan Kalimantan Barat dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 3

Berdasarkan hasil rewiu yang dilakukan Kanwil DJPb Kalimantan Timur terdapat beberapa temuan terkait pelaksanaan PN 2 yaitu:

1. Sampai dengan akhir tahun 2021 belum ada kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pemindahan IKN, meskipun pada RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 terdapat agenda dukungan pembangunan terkait IKN yaitu penyiapan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman;
2. Terdapat belanja modal pembangunan jalan yang menghubungkan IKN dengan daerah sekitarnya bekerja sama dengan PT. SMI, namun dalam dokumen anggaran pembangunan jalan tersebut tidak ada pernyataan mendukung IKN;
3. Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten PPU telah selesai 100 persen. Namun demikian, masih terdapat kendala pembebasan lahan untuk jalan yang terhubung dengan jembatan tersebut yang menjadi tanggung jawab Pemda Kota Balikpapan.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 5

Hasil rewiu harmonisasi Pusat-Daerah pada pendanaan major project PN 5 pada Provinsi

Kalimantan Barat menunjukkan bahwa terdapat proyek Prioritas Strategis dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Ekonomi yaitu Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yaitu Pelabuhan Kijing skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Namun pada tahun 2021, baik dari Belanja K/L maupun Pemerintah Daerah Tahun 2021 belum ditemukan adanya dukungan output yang menunjuk spesifik untuk jaringan Pelabuhan Kijing tersebut.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 6

PN 6 pada RKP Tahun 2021 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. PN 6 mengusung MP yaitu: 1) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan 2) penguatan sistem peringatan dini bencana. Hasil rewiu di regional Kalimantan, tidak ditemukan MP pada PN 6.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 7

Hasil rewiu harmonisasi Pusat-Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat pada Program Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, terdapat pendanaan pada Belanja K/L namun tidak dianggarkan pada APBD karena tidak ada belanja di fungsi Pertahanan dan fungsi Agama pada klasifikasi belanja berdasarkan fungsi pada APBD.

4.V. REGIONAL SULAWESI

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi dan mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah, memantapkan perannya sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur, serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Wilayah Sulawesi merupakan penghasil utama komoditas perikanan tangkap dan budidaya; pertanian tanaman pangan padi dan jagung; perkebunan kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa; peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; serta pertambangan aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Di samping itu, Wilayah Sulawesi juga memiliki keunggulan pariwisata bahari Bunaken dan Wakatobi serta pariwisata alam dan budaya Tanah Toraja.

Pada tahun 2021 strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Sulawesi akan dilakukan dengan enam langkah sebagai berikut:

1. mengoptimalkan peran kawasan-kawasan strategis baik KEK maupun KI sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah, yaitu KEK/KI Palu dan KEK Bitung;
2. meningkatkan investasi di kawasan-kawasan pariwisata unggulan yaitu DPP Manado-Likupang/KEK Likupang dan DPP Wakatobi;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, baik infrastruktur darat yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, maupun infrastruktur pelabuhan dan udara yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi dengan wilayah lain;
4. meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata di Wilayah Sulawesi, termasuk di WM Makassar dan WM Manado sebagai pusat pelayanan aglomerasi wilayah, dengan fokus pada penyediaan transportasi massal, drainase perkotaan, akses pada energi, perumahan, air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan yang aman, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah urban sprawl.
5. meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi;
5. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

4.V.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK, DAK NONFISIK DAN DANA DESA

Jalan

Pembangunan jalan di regional Sulawesi telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan antar wilayah. Pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka meminimalisasi ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama melalui pemerataan penyediaan infrastruktur jalan serta percepatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas daerah pada lokasi yang terpisah. Pada Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo, pembangunan jalan didukung melalui belanja K/L, DAK Fisik, dan Dana Desa.

Sanitasi

Secara umum, telah terdapat harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka pemerataan penyediaan sanitasi. Hal tersebut tercermin misalnya pada Provinsi Sulawesi Tengah, di mana program sanitasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian PUPR) berupa pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi pada 43 kab/kota. Sementara realisasi belanja DAK Fisik sebesar Rp31,73 Miliar berupa pembangunan tangki septik skala individual pedesaan sebanyak 1.125 unit. Adapun Dana Desa ditujukan untuk pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman berupa gorong-gorong, selokan, parit, hingga pemeliharaan/pembangunan MCK sejumlah 2.553 unit.

Perumahan/Permukiman

Dari hasil revidu yang dilakukan oleh Kanwil DJPb, belanja terkait bidang perumahan/permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan DAK Fisik, berupa penyelenggaraan pembangunan maupun rehabilitasi yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Misalnya, pada Provinsi Sulawesi Tenggara, belanja terkait bidang perumahan/permukiman dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat (Kementerian PUPR) dan DAK Fisik. Belanja pemerintah pusat dikhususkan untuk pembangunan rusun maupun daerah transmigrasi dengan realisasi anggaran Rp148,8 Miliar dan target 4.970 unit, sedangkan belanja melalui DAK Fisik digunakan untuk membiayai peningkatan/rehabilitasi rumah warga di daerah afirmasi (selain daerah transmigrasi) dengan realisasi anggaran Rp15,7 Miliar untuk 416 unit.

SPAM/Air Minum

Penyediaan SPAM/Air Minum melalui belanja pemerintah pusat (K/L), DAK Fisik, dan Dana Desa, pada prinsipnya telah selaras dan harmonis dalam rangka meminimalisasi ketimpangan horizontal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh pada Provinsi Gorontalo, kegiatan yang dilakukan melalui belanja K/L dan DAK Fisik telah selaras, di mana belanja K/L ditujukan untuk infrastruktur air minum berbasis masyarakat dengan capaian sebanyak 1.610 SR, sedangkan DAK Fisik ditujukan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sebanyak 6.230 SR. Adapun Dana Desa diperuntukkan bagi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa untuk 305 unit.

Contoh lainnya pada Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana realisasi belanja K/L diperuntukkan bagi infrastruktur SPAM dan sambungannya sehingga mampu melayani target 8.475 SR. Sedangkan untuk proyek/kegiatan yang dilaksanakan melalui DAK Fisik

adalah pembuatan sumur maupun sambungan air bersih pada Kawasan yang tidak dapat dijangkau sistem SPAM dengan capaian 11.471 SR. Terakhir, Dana Desa diperuntukkan bagi revitalisasi dan pengembangan sumber air minum di desa sebanyak 10.019 unit.

Harmonisasi Belanja K/L dengan DAK Nonfisik - BOS

Salah satu belanja DAK Nonfisik yang memiliki porsi belanja dominan pada regional Sulawesi adalah belanja BOS. Hasil revidi yang dilakukan oleh Kanwil DJPb menunjukkan bahwa pendanaan antara belanja DAK Nonfisik dengan belanja pemerintah pusat telah menunjukkan keselarasan dalam upaya mendukung pelaksanaan program prioritas nasional bidang pendidikan. Adapun penggunaan Dana BOS sendiri ditujukan untuk beberapa jenis kegiatan seperti penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi dan buku teks pembelajaran, biaya pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler, biaya ulangan dan ujian, pembelian barang habis pakai, langganan daya dan jasa serta perawatan sekolah, honor guru dan kegiatan pengembangan profesi, transport siswa miskin, biaya pengelolaan BOS, pembelian komputer desktop, media pembelajaran dan mebelair.

4.V.B. HARMONISASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAJOR PROJECT (MP) PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan hasil revidi yang dilakukan oleh Kanwil DJPb di Regional Sulawesi, harmonisasi pelaksanaan anggaran pada Prioritas Nasional ditunjukkan melalui dukungan Pusat dan Daerah pada MP dimaksud.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 1

Pada provinsi Sulawesi Selatan, pelaksanaan MP PN 1 sejalan dengan fokus pembangunan yang diarahkan kepada pemulihan industri dan pariwisata pasca Covid-19. Untuk mendukung hal tersebut, telah terealisasi Rp80,94 Miliar (belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang di antaranya ditujukan untuk membangun 2 sentra industri, 2 kawasan pergudangan, fasilitasi 2 destinasi wisata unggulan sentra UMKM, serta 2 unit pasar di Luwuk Utara.

Pada Provinsi Gorontalo, implementasi MP dalam PN 1 di antaranya berupa Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Output yang dihasilkan antara lain berupa Peningkatan Jaminan Mutu dan Daya Saing Komoditi Perikanan dan

Penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional. Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Gorontalo.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 2

Harmonisasi belanja pusat dan daerah pada MP PN 2 salah satunya tercermin pada Provinsi Sulawesi Selatan. Pada provinsi tersebut, salah satu MP yang sedang dalam proses pengerjaan adalah Pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi Antara Makassar-Parepare dengan panjang 144 km. Pembangunan jalur KA tersebut menjadi bagian dari jaringan kereta api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan seluruh Pulau Sulawesi. Di tahun 2021 sendiri telah terbangun 100 km lintasan kereta api dengan anggaran sebesar Rp459,48 miliar sehingga diharapkan akan rampung dan dapat digunakan pada akhir tahun 2022.

Pembangunan Jalur KA Makassar-Parepare tersebut akan berperan sebagai sarana transportasi untuk mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang, serta membangun konektivitas nasional. Adapun Pemda memberikan dukungan terhadap Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar. Mulai dari upaya dan strategi pembebasan lahan yang menjadi jalur KA, sampai pada memastikan konektivitas jalan menuju jalur tersebut. Melalui Program Preservasi Jalan, Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelenggaraan Pelabuhan dan Angkutan Pelayaran, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran Rp321 Miliar untuk mendukung PN 2 tahun 2021.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 3

Dukungan Belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk MP pada PN 3 di antaranya terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Major Project Penguatan Sistem Kesehatan Nasional (MP 1), Proyek Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting (MP 2), program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 (MP 3), serta Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (MP5), telah terealisasi Rp 683 Miliar atau 91 persen dari alokasi APBN Rp720.540. Dalam rangka mendukung PN tersebut, Pemda menyediakan alokasi Rp20,9 Miliar melalui program Pengembangan Layanan Kesehatan, Brigade Siaga Bencana (BSB) Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Sedangkan pada Provinsi Sulawesi Barat, keselarasan

dukungan pendanaan untuk MP pada PN 3 tercermin dari kegiatan Pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil (KAT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Dari sisi belanja daerah, Pemda berperan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada program percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Belanja ini merupakan pendukung atas MP yang terdapat di dalam RKP dan RPJMN Pemerintah Pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum belanja daerah dan pusat untuk MP pada PN 3 di Sulawesi Barat di tahun 2021 telah selaras dan saling melengkapi.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 5

Pelaksanaan MP pada PN 5 salah satunya terkait dengan implementasi Proyek Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar (MP 1). Pada beberapa provinsi, MP tersebut didukung pendanaannya baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai contoh, pada Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibangun Rumah Susun dengan dana APBN 68 unit ditambah Rusun untuk pendidikan senilai Rp104,42 miliar. Pembangunan Bendungan senilai Rp79,210 miliar, Sistem pengolahan limbah domestik senilai Rp214,1 miliar, Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (PEN) untuk 12590 sambungan rumah, pembangunan Pembangunan 3 waduk/bendungan senilai Rp490,9 miliar. Sementara itu pada Provinsi Gorontalo, pelaksanaan MP 1 yang terdiri dari 5 target prioritas, di mana 4 di antaranya yakni berupa perumahan, DAS, Sanitasi, dan Air Minum merupakan program yang pendanaannya didukung baik oleh pemerintah pusat (K/L) maupun pemerintah daerah.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 6

Berdasarkan hasil Reviu Kanwil DJPb, dukungan belanja MP pada PN 6 di Regional Sulawesi cukup beragam umumnya dilaksanakan secara tersendiri antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, untuk MP 2 yakni Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, baik pada Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo, pendanaannya didukung oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BMKG. Pada Provinsi Gorontalo, dukungan belanja pemerintah pusat ditargetkan untuk prediksi dan peringatan cuaca dengan scaling up weather capacity, sementara pada Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan untuk menghasilkan output Layanan Informasi Gempa Bumi dan Tsunami serta Peralatan Seismograf untuk Informasi Gempa Bumi.

4.VI. REGIONAL MALUKU DAN PAPUA

Pengembangan Wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua. Secara keseluruhan terdapat tujuh wilayah adat di Wilayah Papua yakni Laa Pago, Saireri, Mamta, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay. Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata berbasis gugus pulau dan mendorong transformasi perekonomian wilayah dengan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan berbasis kemaritiman seperti pengolahan hasil laut, wisata sejarah dan bahari; berbasis perkebunan seperti pengolahan kelapa, lada, pala, dan cengkeh; serta berbasis mineral seperti pengolahan nikel, tembaga, dan emas.

Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Papua dilakukan dengan delapan langkah sebagai berikut:

1. melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menyambungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produksi rakyat;
2. mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna dan komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
3. mempercepat pengembangan ekonomi kemaritiman melalui industri perikanan dan pariwisata bahari di DPP Raja Ampat;
4. mendorong hilirisasi industri pertambangan;
5. mempercepat penyiapan sumber daya manusia terampil disertai pengembangan kewirausahaan terutama pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda asli Papua (Papua Creative Hub) sebagai pendukung pengembangan ekonomi lokal;
6. membangun kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi wilayah, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong sebagai pendukung kawasan industri dan pariwisata, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, serta transportasi umum perkotaan;
7. meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Papua. Kedelapan, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sedangkan strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Maluku dilakukan dengan tujuh langkah sebagai berikut:

1. mengembangkan pusat-pusat industri pengolahan yang meliputi kawasan industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di KI Teluk Weda, kawasan industri pengolahan hasil perkebunan, kawasan industri pengolahan perikanan, serta pengembangan pasar dan pelabuhan ikan.
2. meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan perkebunan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
3. mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya DPP/KEK Morotai;
4. menyiapkan rencana pengembangan industri terpadu untuk mendukung pengembangan Blok Masela, yang meliputi pengembangan kawasan kegiatan turunan migas, kawasan permukiman pekerja, dan fasilitas pendukung;
5. mengembangkan kawasan perkotaan, termasuk pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, serta transportasi umum perkotaan;
6. meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Maluku;
7. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

4.VI.A. HARMONISASI BELANJA K/L DENGAN DAK FISIK, DAK NONFISIK DAN DANA DESA

Hasil revidu harmonisasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa pada regional Maluku dan Papua secara umum sudah menunjukkan keselarasan sebagai berikut:

Jalan

Pada regional Maluku dan Papua, pembangunan Jalan yang didanai melalui belanja pemerintah pusat dengan DAK Fisik serta Dana Desa telah selaras dalam rangka meminimalisasi ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama melalui pemerataan penyediaan infrastruktur jalan serta percepatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas daerah pada lokasi yang terpisah.

Sebagai contoh, pada Provinsi Papua Barat realisasi belanja K/L sebesar Rp267,37 Miliar dengan output sepanjang 60,29 km. Sementara belanja DAK Fisik dengan realisasi Rp193,22 Miliar ditujukan untuk Jalan Provinsi dan Kabupaten sepanjang 52,76 km, dan belanja Dana Desa sebesar Rp18,45 Miliar ditujukan untuk output sepanjang 41,91 km.

Irigasi

Hasil revidu harmonisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dan Dana Desa terkait dengan bidang Irigasi menunjukkan adanya keselarasan. Pada Provinsi Papua, belanja K/L yang ditujukan untuk bidang irigasi sebesar Rp123,3 Miliar dengan output 55 unit, sedangkan untuk belanja DAK Fisik dan Dana Desa masing-masing terealisasi belanjanya sebesar Rp56,12 Miliar dan Rp180,5 juta. Pada Provinsi Maluku Utara, bidang Irigasi teralokasi dananya pada belanja K/L, DAK Fisik, dan Dana Desa masing-masing sebesar Rp20,2 Miliar, 36,9 Miliar, dan Rp232,7 juta.

Sanitasi

Terdapat keselarasan untuk pembangunan bidang Sanitasi antara belanja K/L, DAK Fisik, dan Dana Desa. Misalnya pada Provinsi Papua Barat, pembangunan bidang Sanitasi ditujukan untuk 3.420 KK dengan realisasi belanja Rp45,96 Miliar, sedangkan untuk DAK Fisik ditargetkan untuk 385 unit dengan realisasi belanja Rp13,42 Miliar. Sementara untuk Dana Desa pendanaan sebesar Rp17,35 Miliar dengan output 661 unit MCK.

4.VI.B. HARMONISASI PELAKSANAAN ANGGARAN MAJOR PROJECT (MP) PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan hasil revidu yang dilakukan oleh Kanwil DJPb di Regional Maluku dan Papua, harmonisasi pelaksanaan anggaran pada Prioritas Nasional ditunjukkan melalui dukungan Pusat dan Daerah pada MP sebagaimana berikut:

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 1

Hasil revidu atas yang dilakukan oleh Kanwil DJPb regional Maluku dan Papua menemukan suatu indikasi yang beragam. Pada wilayah Papua Barat, adanya keselarasan kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung destinasi wisata prioritas di Raja Ampat didukung dengan pembangunan akses pelabuhan di Misool Selatan Raja Ampat oleh pemerintah daerah serta pemberdayaan

kepada masyarakat oleh pemerintah pusat melalui pengembangan 25 kawasan hutan. Sementara itu, di Provinsi Maluku diindikasikan terdapat beberapa MP yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tahun 2021, misalnya yang terkait dengan Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi dan Nelayan, serta Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf Internasional.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 2

Pendanaan untuk MP pada PN 2 teridentifikasi hanya terdapat pada wilayah Papua yang utamanya didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat. Beberapa di antaranya (1) pada provinsi Papua melalui Pengembangan Kawasan Perbatasan (PKSN) Jayapura, dan (2) pada provinsi Papua Barat melalui pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok di Sorong. Pengembangan PKSN mendapat dukungan dana dari belanja pusat sebesar Rp38,62 Miliar. Sementara pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok menjadi fokus belanja pemerintah pusat (Kemenhub) sebesar Rp8,83 Miliar.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 3

Harmonisasi pendanaan pada MP PN 3 salah satunya tercermin dari dukungan pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di provinsi Papua Barat dan Maluku dalam upaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja rangka. Target yang ditetapkan dalam MP tersebut berupa peningkatan tenaga kerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55%.

Pada Provinsi Papua Barat, pelaksanaan MP tersebut sejalan dengan strategi percepatan pembangunan di wilayah Papua yakni mempercepat penyiapan sumber daya manusia terampil disertai pengembangan kewirausahaan terutama pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda asli Papua. Dukungan pemerintah pusat atas MP tersebut melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja kepada 1.424 orang dengan realisasi belanja sebesar Rp1,54 Miliar. Di sisi lain, pemerintah daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi untuk 85 orang dengan realisasi sebesar Rp1,55 Miliar.

Pada Provinsi Maluku, pendanaan dari pemerintah pusat di antaranya dilaksanakan melalui program Percontohan Penerapat Teknologi Pertanian, Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (SDC), Peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas, hingga Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi Pendidikan. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja menargetkan pertumbuhan tenaga kerja yang bersertifikat berbasis kompetensi sebesar 27,66 persen.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 5

Pada regional Maluku dan Papua, dukungan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah MP pada PN 5 cukup beragam. Misalnya pada MP Proyek Prioritas Strategis dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar yang salah satunya menargetkan 1 juta Rusun perkotaan. Pada Provinsi Papua Barat, sebanyak 88 unit rumah susun dengan terealisasi dengan dana sebesar Rp49,33 Miliar seluruhnya dialokasikan pada belanja pemerintah pusat. Demikian juga pada Provinsi Maluku Utara yang pada alokasi APBN terealisasi sebesar Rp27,25 Miliar untuk 109 unit rumah susun perkotaan. Lain halnya pada Provinsi Maluku di mana pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp47,28 Miliar untuk Rusun hunian ASN/TNI/Polri sebanyak 88 unit. Sedangkan pemerintah daerah melalui Program Pengembangan Perumahan mengalokasikan dana sebesar Rp8,80 Miliar.

Harmonisasi Pusat-Daerah pada Pelaksanaan Major Project PN 6

Pelaksanaan MP pada PN 6 menunjukkan adanya pembagian peran pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya untuk MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Pada Provinsi Papua Barat, dukungan dana untuk penyediaan 4 unit peralatan seismograf untuk informasi gempa bumi dilaksanakan oleh pemerintah pusat (BMKG) dengan realisasi sebesar Rp1,41 Miliar. Sementara itu, pemerintah daerah melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase, utama perkotaan dan pengaman pantai sebanyak 91 paket dengan realisasi Rp13,70 Miliar. Pada Provinsi Maluku Utara, pemerintah pusat melaksanakan proyek penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu dengan realisasi sebesar Rp1,79 miliar. Sedangkan pada Provinsi Maluku, pada proyek yang sama terdapat alokasi sebesar Rp1,01 Miliar.

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



BAB V PERAN FISKAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Foto Sahid Subekti

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA-NASIONAL

1.1. PERKEMBANGAN IPM NASIONAL

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu sasaran yang dicapai untuk mewujudkan bangsa yang kompetitif. Konstitusi telah mengamanahkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara di antaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan maupun indikator ekonomi yang lainnya, namun keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari kualitas pembangunan manusia. Kualitas hidup manusia selama ini dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Manfaat IPM di antaranya untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah/negara. IPM bagi pemerintah digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2022).

IPM merupakan Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan modal manusia berdasarkan tiga aspek pembentuk IPM. Semakin tinggi nilai IPM merepresentasikan pembangunan modal manusia yang semakin baik.

Dimensi pertama IPM berupa umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan dalam indeks kesehatan. Indikator yang digunakan dalam mengukur indeks kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

TABEL 60 UMUR HARAPAN HIDUP

Umur Harapan Hidup (UHH)						
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka UHH	70.90	71.06	71.20	71.34	71.47	71.57

Sumber : BPS, 2022

Dimensi kedua IPM yaitu pengetahuan yang direpresentasikan dengan indeks pendidikan. Indeks pendidikan adalah rata-rata aritmatik dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun)

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

TABEL 61 HARAPAN LAMA SEKOLAH

Harapan Lama Sekolah (HLS)						
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka HLS	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98	13.08

Sumber : BPS, 2022

RLS merupakan waktu (dalam tahun) yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk tamat SD lama sekolah dihitung 6 tahun, SMP dihitung 9 tahun, dan SMA dihitung 12 tahun tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak. Indeks pendidikan diperoleh dari rata-rata HLS dan RLS.

TABEL 62 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Harapan Lama Sekolah (HLS)						
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka RLS	7.95	8.10	8.17	8.34	8.48	8.54

Sumber : BPS, 2022

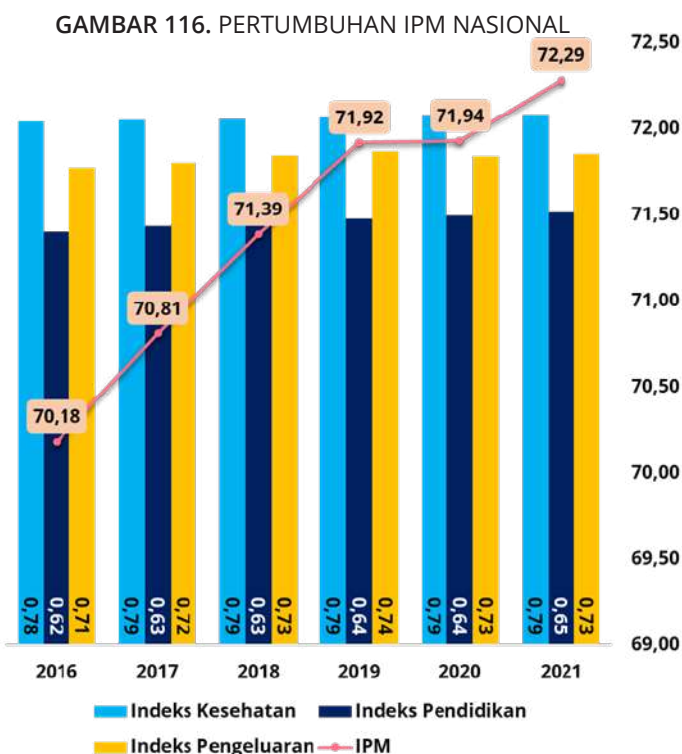
Dimensi ketiga IPM adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan indeks Pengeluaran (ekonomi). Indeks pengeluaran dilihat dari pengeluaran perkapita, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan (tahun dasar 2012=100). Pengeluaran perkapita ditujukan untuk mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan (dihitung berdasar 96 Komoditas terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 non makanan).

TABEL 63 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Pengeluaran Perkapita (ribuan)						
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Pengeluaran Perkapita	10,42	10,6	11,05	11,29	11,01	11,15

Sumber : BPS, 2022

Indonesia berhasil meningkatkan capaian IPM setiap tahunnya. Capaian IPM 2016 sebesar 70,18 dan mengalami kenaikan positif tahun 2021 sebesar 72,29. Indeks komposit IPM kesehatan stagnan pada angka 0,79 sejak tahun 2017 s.d 2021. Indeks pendidikan cukup fluktuatif antara 0,62 sampai dengan 0,65. Indeks pengeluaran yang tercermin dari pengeluaran perkapita setiap tahun hampir meningkat, namun tahun 2020 dan 2021 menurun menjadi 0,73 diindikasikan karena dampak Covid-19 yang memaksa sektor ekonomi mengalami perlambatan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat.



Berdasarkan RPJMN 2015-2019, target IPM nasional ditetapkan sebesar 76,3 pada tahun 2019, namun capaian IPM sebesar 71,92 dan target IPM tersebut belum tercapai. Di sisi lain, dalam RPJMN 2020-2024 target IPM ditetapkan sebesar 75,54 lebih rendah dibandingkan RPJMN periode sebelumnya. Capaian IPM tahun 2021 sebesar 72,29 sehingga untuk menuju target 75,54 di tahun 2024 perlu kerja keras pemerintah yang didukung oleh stakeholder terkait untuk mencapai target tersebut.

TABEL 64. TARGET DAN CAPAIAN IPM DALAM RPJMN

Target dan Capaian IPM dalam RPJMN			
	Target Akhir Periode RPJMN	Capaian	Keterangan
RPJMN 2015 - 2019	76,3	71,92	Tidak tercapai di tahun 2019
RPJMN 2020 - 2024	75,54	-	Capaian tahun 2021 sebesar 72,29

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan data UNDP Reports (2020), Capaian Human Development Index (HDI) atau IPM Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,3 poin periode 2010-2019. Capaian positif tersebut masih belum mampu mengejar ketertinggalan dengan negara-negara tetangga lingkup ASEAN. Meskipun capaian IPM terus membaik dari tahun ke tahun, capaian HDI Indonesia berada pada urutan 107 dari 189 negara. Kondisi HDI tersebut mengindikasikan kualitas SDM Indonesia lebih rendah daripada lebih dari setengah negara di dunia. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai eksekutor maupun sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM.

TABEL 65. HDI

No	Negara	HDI			Ketegori	
		2010	2019	Perubahan	2010	2019
1	Singapura	90,9	93,8	2,9	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Brunei	82,7	83,8	1,1	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Malaysia	77,2	81	3,8	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Thailand	72,4	77,7	5,3	Tinggi	Tinggi
5	Indonesia	66,5	71,8	5,3	Sedang	Tinggi
6	Philippine	67,1	71,8	4,7	Sedang	Tinggi
7	Vietnam	66,1	70,4	4,3	Sedang	Tinggi
8	Laos	55,2	61,3	6,1	Rendah	Sedang
9	Cambodia	53,9	59,4	5,5	Rendah	Rendah
10	Myanmar	51,5	58,3	6,8	Rendah	Rendah

Sumber : United Nations Development Programme (UNDP) Reports (2020)

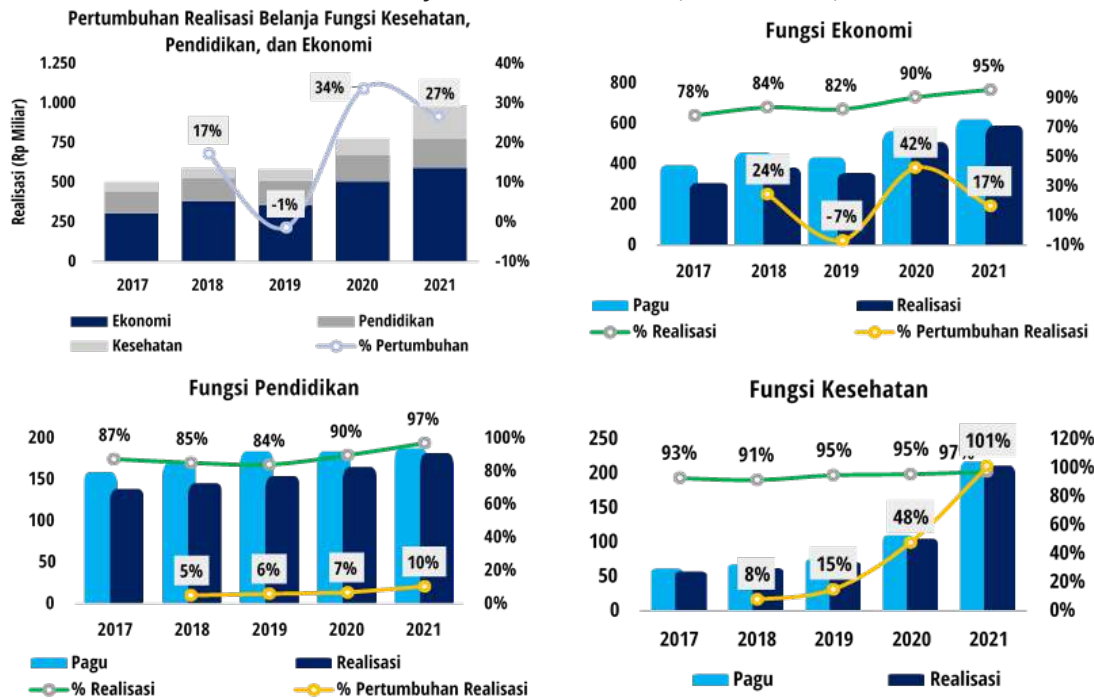
1.II. PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PENDUKUNG IPM

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara Nasional mengalami tren peningkatan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Penurunan hanya terjadi pada Tahun 2019 sebesar 1% terutama akibat menurunnya belanja fungsi ekonomi sebesar 7% dari tahun sebelumnya.

Fungsi Ekonomi dalam lima tahun terakhir mempunyai proporsi tertinggi diantara dua fungsi lainnya yakni rata-rata 62% jika dibandingkan Fungsi Pendidikan yang rata-rata sebesar 24% dan Kesehatan yang rata-rata sebesar 14%. Namun untuk tahun 2021 saja, realisasi masing-masing fungsi telah tumbuh yakni sebesar 17% untuk belanja Ekonomi, 10% untuk fungsi Pendidikan, serta 101% untuk fungsi Kesehatan yang tumbuh signifikan dikarenakan masih besarnya kebutuhan belanja dalam rangka penanganan Covid-19.

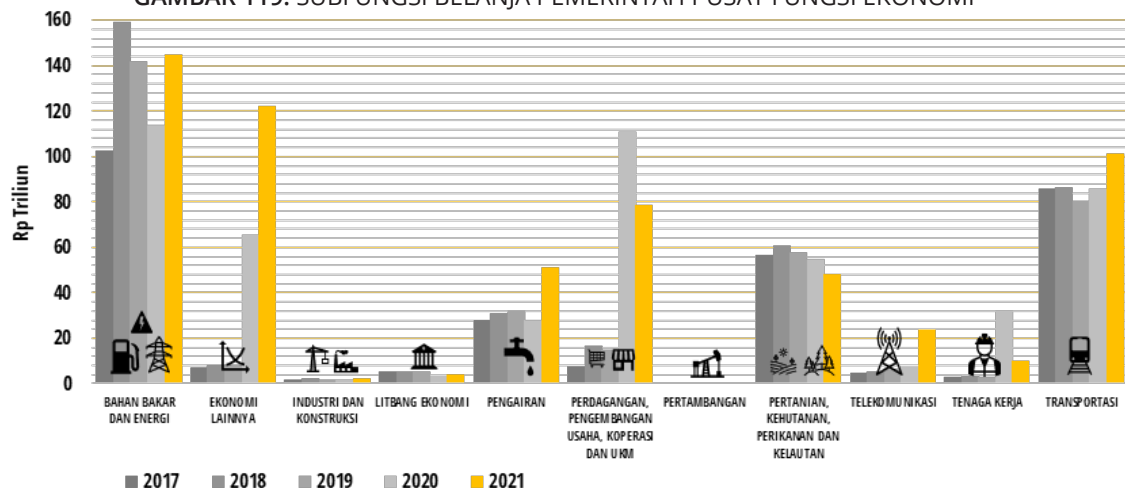
Jika dijabarkan ke subfungsinya, untuk Fungsi Ekonomi terdiri dari 11 subfungsi, dimana realisasinya didominasi oleh subfungsi Bahan Bakar

GAMBAR 118. REALISASI BELANJA FUNGSI KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 119. SUBFUNGSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT FUNGSI EKONOMI



Sumber: BPS, diolah

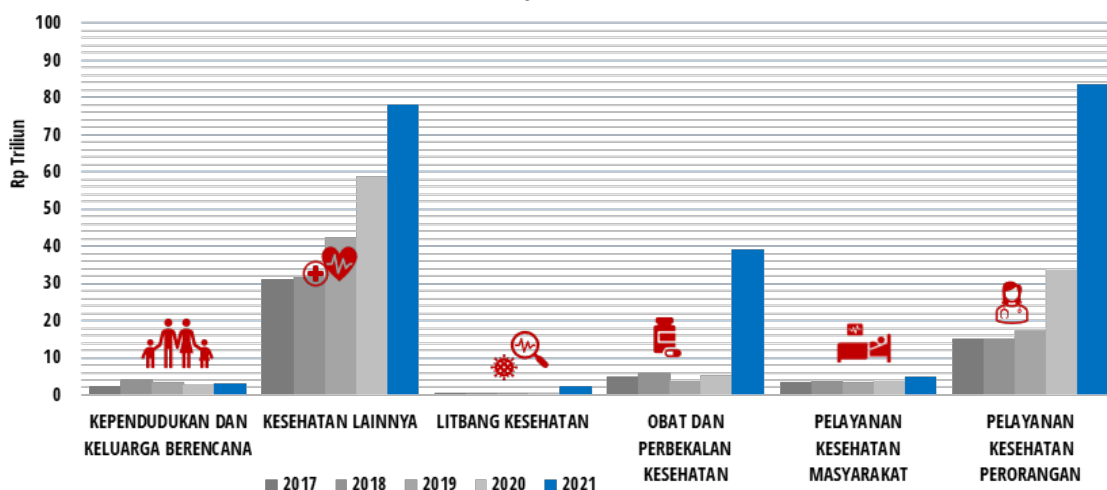
dan Energi, serta Transportasi. Pada dua tahun terakhir atau pasca pandemi, terjadi peningkatan signifikan pada subfungsi Tenaga Kerja, subfungsi Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UMKM, serta Ekonomi Lainnya. Tahun 2021, terjadi kenaikan signifikan pada Subfungsi Pengairan dan Telekomunikasi. Sedangkan Subfungsi Industri dan konstruksi, Pertambangan, dan Litbang Ekonomi mempunyai proporsi belanja pemerintah pusat yang paling rendah pada Fungsi Ekonomi dan tidak menunjukkan adanya peningkatan signifikan.

Pada Fungsi Kesehatan, terdapat enam Subfungsi yang didominasi oleh Subfungsi Kesehatan Lainnya dan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Pada dua tahun terakhir atau pasca pandemi Covid-19, terjadi peningkatan signifikan pada kedua subfungsi

tersebut. Khusus tahun 2021, terjadi kenaikan signifikan pada Subfungsi Obat dan Perbekalan Kesehatan. Sedangkan subfungsi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Litbang Kesehatan, dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai porsi yang paling rendah.

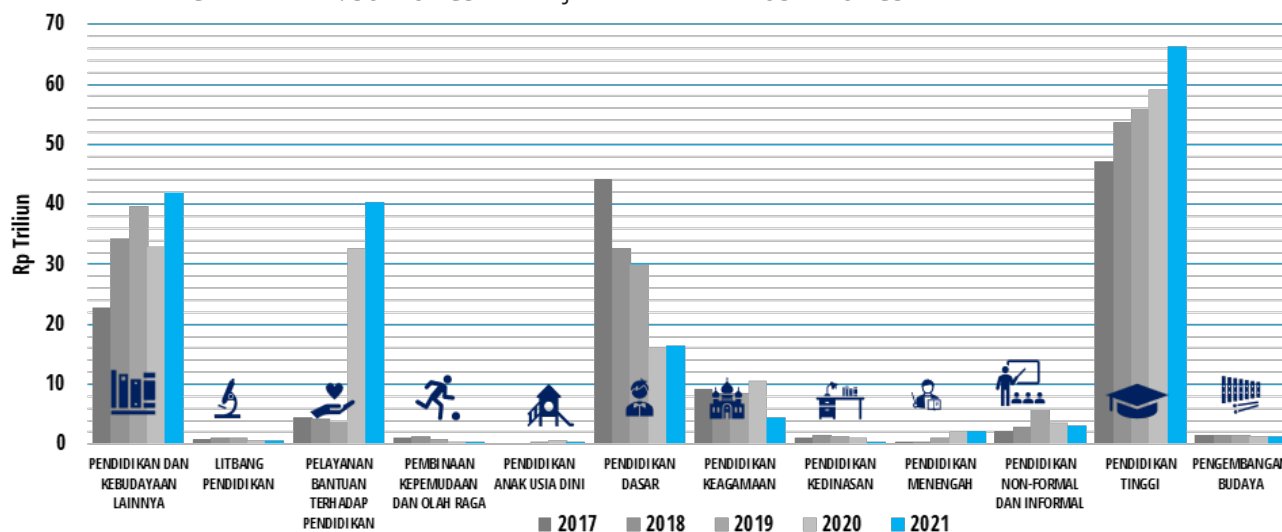
Pada Fungsi Pendidikan, terdapat 12 Subfungsi yang didominasi oleh Subfungsi Pendidikan Tinggi, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya. Pada dua tahun terakhir atau pasca pandemi covid-19, terjadi peningkatan signifikan Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan, berbanding terbalik dengan Pendidikan dasar yang justru menurun cukup signifikan. Sedangkan subfungsi Litbang Pendidikan, Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai porsi yang

GAMBAR 120. SUBFUNGSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT FUNGSI KESEHATAN



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 121. SUBFUNGSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT FUNGSI PENDIDIKAN



Sumber: BPS, diolah

paling rendah diantara yang lainnya.

Belanja Pemerintah Pusat Fungsi Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan selama 5 tahun terakhir selalu mengalami penumpukan belanja pada akhir tahun, rata-rata mencapai 240% dibandingkan rata-rata belanja Januari hingga November. Dari grafik yang tercantum pada gambar subfungsi nampak di Bulan Desember selalu terjadi peningkatan penyerapan yang cukup signifikan, bahkan tahun 2020 dan 2021 total belanja ketiga fungsi meningkat 391% di TA 2020 dan 310% di TA 2021. Hal ini menyebabkan kesempatan masyarakat dalam mendapatkan manfaat dari belanja pemerintah juga menjadi tertunda.

1.III. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

Tahun 2021, dukungan fiskal APBN dalam bentuk output strategis pada bidang kesehatan berfokus

pada penanganan Covid-19. Realisasi fiskal tertinggi ditujukan untuk perawatan pasien Covid-19 seiring kemunculan varian baru Delta dan Omicron. Dukungan tersebut memungkinkan pasien penderita Covid-19 memperoleh layanan kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Peningkatan dan penguatan layanan kesehatan menjadi keluaran lain dalam pelaksanaan fiskal 2021. PBI/JKN merupakan salah satu dukungan fiskal yang diberikan dalam rangka menjamin aksesibilitas masyarakat miskin agar dapat memperoleh layanan kesehatan. Selain itu, dukungan lain diberikan dalam bentuk penyediaan obat-obatan, pengadaan alat serta sarana dan prasarana kesehatan. Upaya pengendalian penyakit Tuberkulosis yang merupakan salah satu penyakit menular mematikan di dunia, menjadi salah satu prioritas dalam dukungan fiskal pemerintah.

Pada bidang pendidikan, output strategis berfokus pada peningkatan aksesibilitas pendidikan serta kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Dukungan

GAMBAR 122. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN



Sumber: BPS, diolah

terbesar diberikan pada program yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses pendidikan lebih baik melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Bantuan Operasional Sekolah. Dukungan untuk kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga menjadi prioritas, seiring peran strategis guru dan tenaga pendidik dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, guna menyesuaikan dengan kebiasaan baru seiring pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan kuota internet untuk para siswa pada berbagai jenjang, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terus berlanjut di tengah pandemi.

Covid-19, perkembangan IPM di Regional Sumatera di tahun 2021 nampak mulai melanjutkan kenaikan.

Pada tahun 2021, hanya empat dari sepuluh provinsi di Regional Sumatera yang mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021 masing-masing provinsi yakni Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Utara.

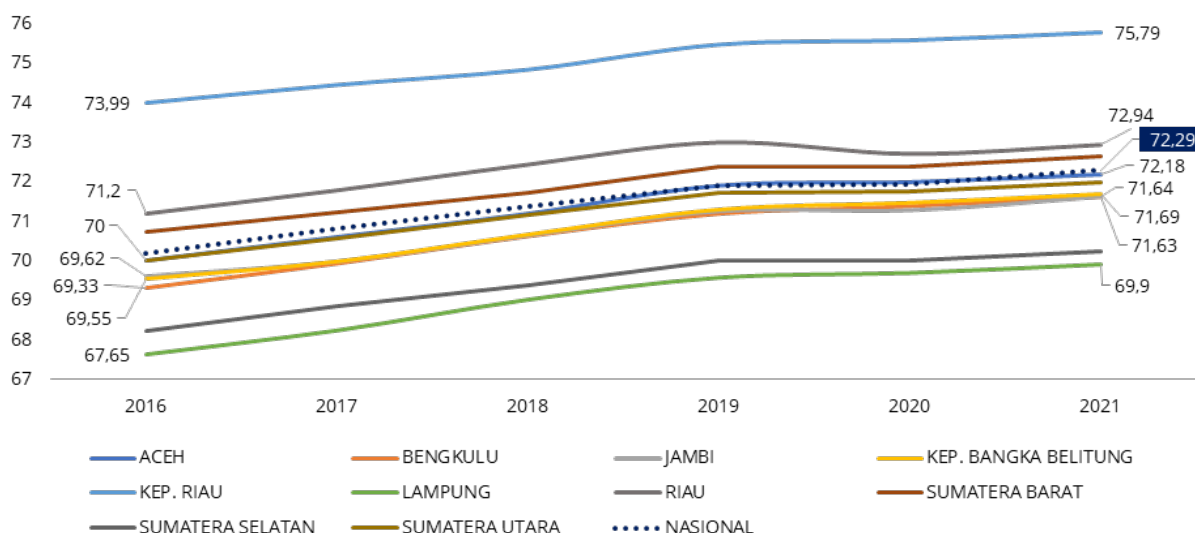
Capaian IPM tertinggi diraih oleh Kepulauan Riau sebesar 75,79, cukup jauh dibanding provinsi lainnya yang berkisar antara 69,9 hingga 72,94. Namun nilai tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebesar 76,26. Selanjutnya kenaikan IPM tertinggi tahun 2021 diraih oleh Jambi yang tumbuh 0,48%, Sumatera Barat 0,37%, dan Bengkulu 0,34%. Secara keseluruhan provinsi di regional Sumatera, pertumbuhan IPM rata-rata Tahun 2021 mencapai 0,33%. Nilai tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya tumbuh rata-rata 0,06% dari tahun 2019. Hal tersebut sedikit banyak berkaitan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Tahun 2020.

2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA-REGIONAL

2.1. PERKEMBANGAN IPM REGIONAL SUMATERA

Sepanjang lima tahun terakhir, tingkat IPM provinsi-provinsi di Regional Sumatera terus mengalami perbaikan. Meskipun sempat melambat dan beberapa menurun di tahun 2020 akibat pandemi

GAMBAR 123. CAPAIAN IPM



Sumber: BPS, diolah

Meskipun Regional Sumatera menjadi penopang perekonomian kawasan barat Indonesia, tujuh dari sepuluh provinsi di Regional Sumatera memiliki capaian IPM yang lebih rendah daripada capaian nasional. Hanya Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau yang memiliki capaian lebih tinggi daripada capaian nasional. Terutama Kepulauan Riau yang memiliki gap IPM jauh lebih tinggi dari rata-rata Nasional, hal ini tidak lepas dari adanya tiga Kawasan Ekonomi Khusus dan kegiatan perekonomian yang cukup berkembang dibandingkan provinsi-provinsi regional Sumatera lainnya, bahkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

GAMBAR 117. IPM SUMATERA

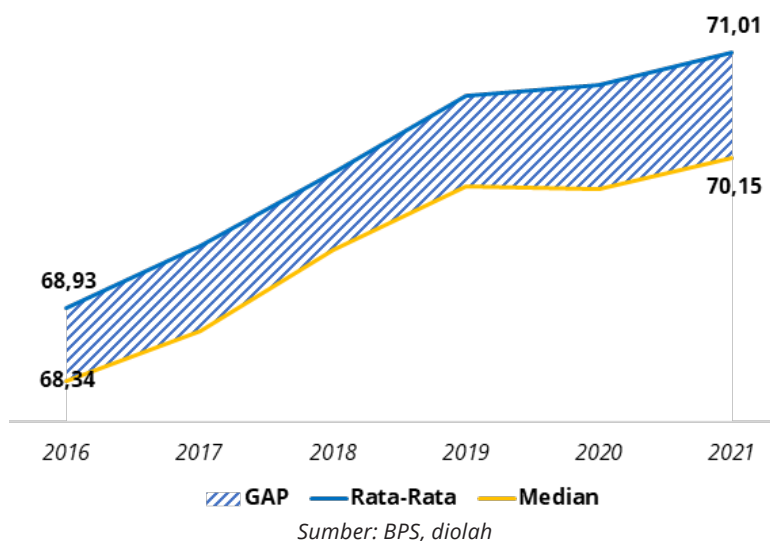


Sumber: BPS, diolah

Sejalan dengan capaian tingkat nasional, pada level regional disparitas capaian IPM antar provinsi juga menunjukkan kondisi yang belum merata. Selisih capaian IPM antara Provinsi Kepulauan Riau (75,79) sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, dengan Provinsi Sumatera Barat (72,65) sebesar 3,14 poin. Selisih tersebut meningkat dibandingkan kondisi enam tahun lalu yang mencapai 2,79 poin, menunjukkan upaya pemerataan antar wilayah di Regional Sumatera belum menunjukkan hasil yang positif.

Grafik perkembangan rata-rata dan nilai tengah capaian IPM sampai level provinsi dan kabupaten/kota di Regional Sumatera, serta gap antara rata-rata dan nilai tengah menunjukkan terdapat penyempitan gap antara rata-rata dengan nilai tengah pada tahun 2018, namun gap Kembali meningkat sejak tahun 2019

GAMBAR 124. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL SUMATERA



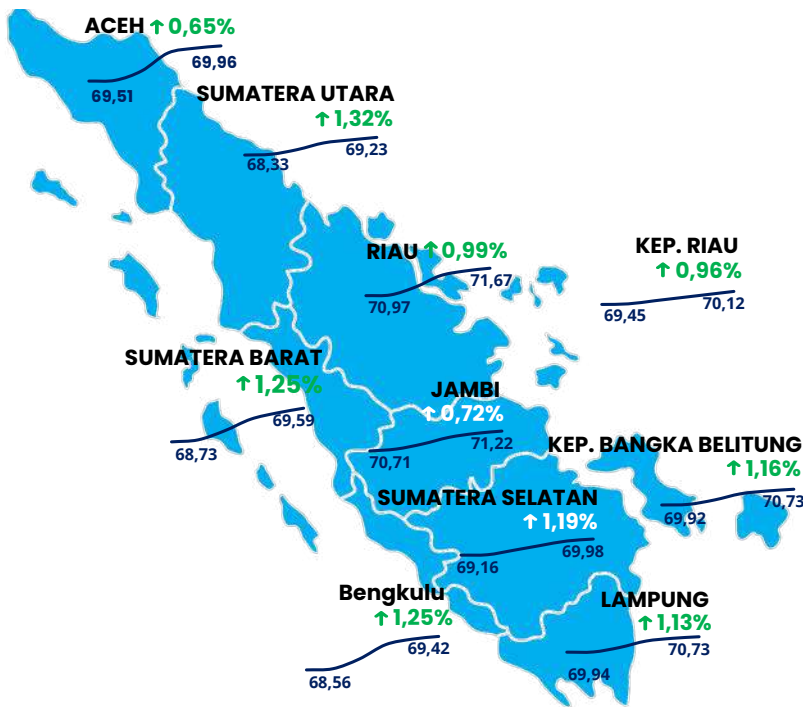
Pada indeks kesehatan, kondisi komponen UHH terus mengalami perbaikan. Dalam enam tahun terakhir, UHH seluruh provinsi di Regional Sumatera terus meningkat. Pelayanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku kesehatan masyarakat terus membaik.

Derajat kesehatan yang direpresentasikan dengan UHH tertinggi pada Regional Sumatera berada di Provinsi Riau. Angka UHH Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 71,67. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,99 persen dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, UHH terendah berada di Provinsi Sumatera Utara dengan angka 69,23, meski mengalami peningkatan 1,32 persen dalam enam tahun terakhir. Peningkatan UHH di Provinsi Aceh merupakan peningkatan terendah dibandingkan provinsi lain di Regional Sumatera yakni sebesar 0,65%. Sayangnya dari seluruh provinsi di Regional Sumatera, hanya Provinsi Riau yang memiliki angka UHH diatas capaian Nasional sebesar 71,57.

Angka UHH di Riau lebih tinggi daripada provinsi lain di Regional Sumatera, dengan persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang paling rendah dari Provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2020 yang dirilis Kementerian Kesehatan, BBLR Provinsi Riau sebanyak 0,8%. Angka tersebut lebih rendah dari provinsi lainnya yang berada pada kisaran 1,0% – 6,9%. Selain itu, BBLR Provinsi Riau lebih rendah dari BBLR nasional sebanyak 3,1%. Hal ini menunjukkan pemenuhan gizi ibu hamil di Provinsi Riau lebih baik daripada Provinsi lainnya yang turut mempengaruhi tingginya angka UHH pada provinsi tersebut.

Terdapat beberapa indikator pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin/nifas serta bayi yang menunjukkan kondisi yang belum optimal. Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan kesehatan ibu hamil berada pada kisaran 45,8

GAMBAR 125. UHH DI REGIONAL SUMATERA



Sumber: BPS, diolah

– 95 persen, dengan angka terendah justru dimiliki Provinsi Riau, sedangkan angka nasional sebesar 84,6 persen. Pada periode hamil, jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (67 – 94,4 persen) dengan angka terendah pada Provinsi Sumatera Utara, tertinggi Kepulauan Riau, dan angka nasional 83,6 persen. Adapun pada indikator tingkat persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan persalinan, beberapa Provinsi masih lebih rendah dari kondisi nasional. Provinsi Riau mendapatkan nilai terendah yakni 49,2, cukup jauh ketimbang Provinsi tentangga sendiri yakni Kepulauan Riau yang mencapai angka 95,9. Selain itu, kondisi dukungan untuk imunisasi, baik imunisasi dasar, maupun lanjutan di Provinsi Aceh, Sumbar, dan Riau menunjukkan hasil yang masih jauh lebih rendah dibawah kondisi nasional. Di sisi lain Provinsi Sumsel menempati angka tertinggi di 91,7.

Fasilitas layanan kesehatan di Regional Sumatera mayoritas sudah di atas angka Nasional. Saat ini, sudah terdapat minimal satu puskesmas pada setiap kecamatan di Regional Sumatera. Sebagian besar puskesmas tersebut telah terakreditasi yang mencerminkan mutu layanan kesehatan yang sudah baik, bahkan 2 Provinsi yakni Kep. Bangka Belitung dan Bengkulu persentase akreditasi puskesmasnya mencapai 100%. Hampir seluruh puskesmas juga memiliki persediaan obat esensial dan imunisasi dasar lengkap untuk layanan kesehatan, namun Lampung menjadi provinsi persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Akan tetapi, fasilitas layanan kesehatan berupa rumah sakit masih tergolong rendah. Persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang di Regional Sumatera masih cukup timpang, dengan Aceh sebagai Provinsi dengan persentase tertinggi (95,8) dan Kepulauan Riau yang terendah (25,0). Begitu juga dengan kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas juga tergolong masih timpang. Hal ini ditunjukkan oleh persentase puskesmas dengan standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang ada pada kisaran 22,9 – 81,3 persen. Beberapa puskesmas juga tidak memiliki dokter terutama pada puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan yang ada pada angka 9,3%.

Pada perilaku kesehatan masyarakat, beberapa indikator menunjukkan kondisi yang cukup baik. Masyarakat memiliki kesadaran untuk berupaya melakukan pencegahan dan penanganan masalah gizi. Upaya tersebut tercermin dari pemberian asi eksklusif dan penimbangan balita secara periodik. Cakupan pemberian asi eksklusif di Regional Sumatera terdinggi pada Provinsi Riau di angka 79,6%, sudah melampaui target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan di tahun 2020 sebesar 40 persen.

Dilihat dari sisi lingkungan, kondisi kesehatan di Regional Sulawesi bervariasi. Upaya peningkatan kualitas air minum melalui aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, menunjukkan kondisi yang masih belum ideal karena masih banyak yang dibawah Target RPJMN, terutama Aceh (34,5) dan Sumut (40,4). Sumsel menduduki peringkat tertinggi di Regional Sumatera (74,6). Sementara itu, kondisi rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak di Provinsi Bengkulu menjadi yang terendah di Indonesia (62,47). Adapun kondisi akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat juga masih perlu dilakukan perbaikan karena baru 68,11 persen rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak. Selain itu, masih

GAMBAR 126. RLS & HLS DI REGIONAL SUMATERA



Sumber: BPS, diolah

terdapat rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan status angka rumah tangga kumuh sebesar 17,15, cukup jauh di atas angka nasional sebesar 10,04 persen.

Pada indeks pendidikan, kondisi komponen HLS dan RLS juga terus mengalami perbaikan. Peningkatan pada komponen pembentuk indeks pendidikan lebih baik daripada peningkatan pada komponen pembentuk indeks kesehatan. Secara khusus, kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin dari angka RLS mengalami peningkatan yang lebih baik daripada perbaikan kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tercermin dari angka HLS.

Pembangunan sistem pendidikan tertinggi di Regional Sumatera berada di Provinsi Aceh. Angka HLS di Provinsi Aceh mencapai 14,36 dengan pertumbuhan 3,38 persen dalam enam tahun terakhir. Tingginya capaian HLS di Provinsi Aceh tersebut selaras dengan tingginya persentase kepala sekolah dan guru yang layak pada jenjang SD untuk swasta sebesar 95,61 persen; SMP 97,08 persen; SMK 98,16 persen, dan SMA 98,63 persen.

Sementara itu, angka HLS terendah di Regional Sumatera berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 12,17 dengan tingkat pertumbuhan sepanjang enam tahun terakhir mencapai 3,93 persen yang sekaligus menjadi pertumbuhan yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Regional Sumatera.

Kualitas pendidikan masyarakat tertinggi di Regional Sumatera berada di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian angka RLS di Provinsi Riau sebesar 10,18 dengan peningkatan 0,51 poin atau 5,27 persen dari tahun 2016. Capaian kualitas pendidikan Provinsi Riau tersebut selaras dengan rendahnya angka mengulang sekolah jenjang SD rata-rata sebesar 0,33 persen; SMP 0,13 persen; dan SMA 0,11 persen. Dari sisi angka putus sekolah, rata-rata jenjang SD sebesar 0,16 persen; SMP 0,17 persen; SMK 0,16 persen; dan SMA 0,14 persen.

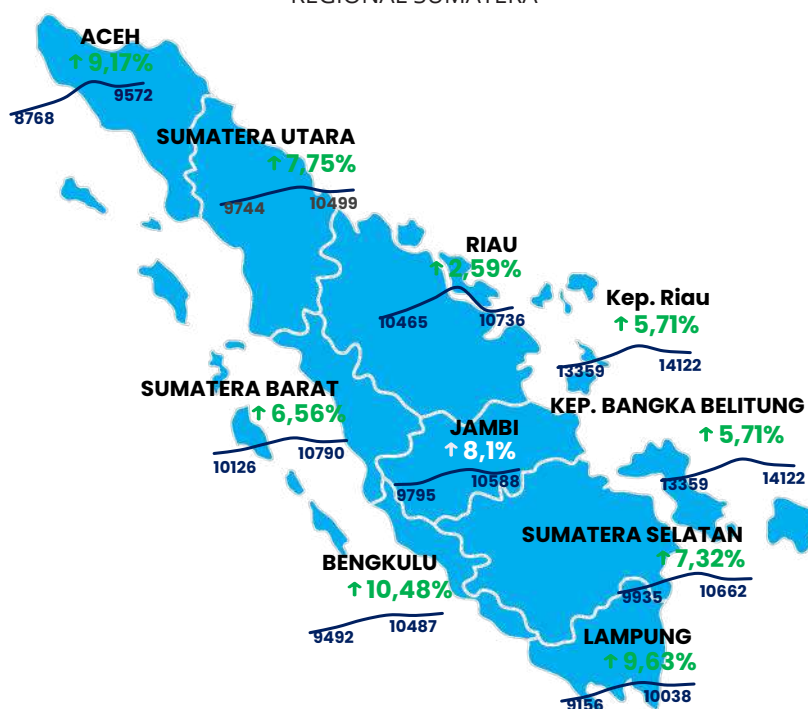
Sementara itu, capaian angka RLS terendah berada di Provinsi Lampung dan Kep. Bangka Belitung dengan capaian yang sama yakni 8,08. Angka RLS di Provinsi Lampung tersebut meningkat sebesar 5,9 persen, sedangkan Kepulauan Bangka Belitung naik 6,04% dalam enam tahun terakhir. Peningkatan tertinggi terjadi pada Provinsi Riau sebesar 6,98%. Peningkatan pembangunan sistem pendidikan dan kualitas pendidikan masyarakat tersebut menjadi sinyal positif dan menjadi momentum yang harus dijaga dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan di Regional Sumatera dan nasional.

Pemerintah terus berupaya membangun sistem pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana sistem pendidikan. Berdasarkan data

statistik pendidikan pada setiap jenjang pendidikan tahun 2020/2021 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah guru terus meningkat dalam lima tahun terakhir di regional Sumatera. Sebanyak 156.131 (37,84 persen) dari total 412.575 guru SD; 78.450 (43,57 persen) dari total 180.067 guru SMP; 38.370 (38,37 persen) dari total 100.002 guru SMA; dan 33.951 (46,72 persen) dari total 72.674 guru SMK merupakan guru baru dalam lima tahun terakhir di regional Sumatera. Selanjutnya, upaya peningkatan kuantitas tenaga pendidik saat ini cukup optimal. Hal ini tercermin dari perbandingan antara jumlah guru dengan siswa jenjang SD regional Sumatera rata-rata 1:15; SMP 1:13; SMA 1:14; dan SMK 1:14. Upaya peningkatan tenaga pendidikan, tidak hanya dilakukan dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Sebanyak 94,22 persen tenaga pendidik SD, 96,77 persen tenaga pendidik SMP, 97,79 persen tenaga pendidik SMA, dan 95,64 persen tenaga pendidik SMK merupakan lulusan di atas sarjana.

Indeks pengeluaran yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita sempat terhambat di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Terhentinya aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat, menyebabkan kontraksi pengeluaran per kapita pada seluruh provinsi di Regional Sumatera di tahun 2020 secara YoY. Namun, membaiknya kondisi penanganan Covid-19 dan akselerasi vaksinasi di tahun 2021 menghasilkan perbaikan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat di Regional Sumatera kembali meningkat, meskipun sebagian belum kembali ke

GAMBAR 127. PENGELUARAN PER KAPITA MASYARAKAT DI REGIONAL SUMATERA



Sumber: BPS, diolah

TABEL 66. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017-2021

Wilayah	Kesehatan (Miliar Rp)						Pendidikan (Miliar Rp)						Ekonomi (Miliar Rp)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren
ACEH	193,59	275,79	271,35	219,86	241,01		3.636,93	3.833,44	4.466,44	3.969,87	4.173,46		2.836,30	2.915,74	2.922,06	2.278,71	3.018,43	
BENGKULU	114,62	164,68	158,30	115,96	135,66		912,38	911,82	1.038,22	868,95	1.009,52		1.384,43	1.229,10	879,08	628,82	1.011,36	
JAMBI	116,81	166,25	173,42	132,29	151,00		1.371,36	1.395,88	1.490,01	1.592,97	1.833,51		1.800,09	1.623,77	2.021,57	1.437,70	1.882,70	
KEP. BANGKA BELITUNG	89,62	106,94	102,26	64,86	78,94		332,52	401,73	355,02	405,12	380,73		688,11	660,15	554,28	525,93	761,03	
KEP. RIAU	183,37	178,41	188,74	138,15	189,58		358,60	431,85	590,96	410,41	583,10		2.918,15	2.954,65	2.964,36	2.603,10	3.317,89	
LAMPUNG	179,86	281,51	257,78	172,25	204,08		2.096,83	2.316,21	2.582,53	2.480,58	2.380,78		2.845,97	3.024,30	3.477,54	2.187,87	3.294,98	
RIAU	151,60	194,60	186,10	135,47	156,55		1.733,13	1.860,93	2.174,17	1.911,19	1.649,05		1.309,54	1.705,98	1.763,55	1.224,79	1.815,10	
SUMATERA BARAT	835,65	930,24	1.040,64	1.068,42	1.078,56		3.232,05	3.331,51	3.673,07	3.746,43	3.708,73		3.008,88	2.797,42	3.043,70	2.398,47	2.365,71	
SUMATERA SELATAN	1.016,07	1.005,73	1.247,12	1.181,08	1.228,43		2.326,84	2.527,81	2.884,90	2.675,02	2.583,01		4.465,89	3.294,49	3.666,53	3.245,26	4.402,80	
SUMATERA UTARA	918,05	969,88	1.031,64	918,16	851,52		3.915,18	3.990,21	4.482,76	4.424,47	4.038,53		7.571,54	7.259,13	6.252,02	5.437,08	5.096,06	
SUMATERA	3.799,24	4.274,03	4.657,36	4.146,51	4.315,32		19.915,82	21.001,39	23.738,08	22.485,02	22.340,42		28.828,89	27.464,73	27.544,70	21.967,74	26.966,05	

level sebelum pandemi.

Secara umum, seluruh provinsi mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dari tahun 2016. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp14.122, mengalami peningkatan 5,71 persen dari tahun 2016. Sementara itu, pengeluaran per kapita terendah berada di Provinsi Aceh sebesar Rp9.572. Namun, pola konsumsi yang tercermin dari angka pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh tumbuh mencapai 9,17 persen dalam enam tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi ketiga setelah Provinsi Bengkulu dan Lampung di Regional Sumatera yang masing-masing naik 10,48 dan 9,63 persen.

Upaya pemerintah dalam mendukung perbaikan kondisi pembangunan manusia di Regional Sumatera melalui belanja pemerintah mengalami perlambatan karena dampak negatif pandemi Covid-19. Dukungan

pemerintah melalui belanja K/L berdasarkan fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mengalami tren penurunan tahun 2020 di seluruh provinsi di Sumatera. Pada tahun 2020 pemerintah melakukan refocusing dan realokasi belanja untuk program PG-PEN. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan yang harus tertunda. Seiring perbaikan kondisi pandemi Covid-19 dengan penanganan yang lebih baik, realisasi anggaran belanja pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara perlahan kembali meningkat di tahun 2021 dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda.

Komposisi tiga belanja pemerintah berdasarkan fungsi menunjukkan belanja fungsi ekonomi memiliki kontribusi yang lebih tinggi daripada fungsi kesehatan dan pendidikan. Kontribusi belanja ekonomi di Regional Sumatera pada 5 tahun terakhir sebesar 50,40 persen, sedangkan kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar 41,56 persen dan 8,04

GAMBAR 128. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL SUMATERA



Sumber: BPS, diolah

persen. Hal ini disebabkan cakupan belanja ekonomi yang lebih luas, sedangkan belanja kesehatan dan pendidikan lebih spesifik serta sebagian merupakan kewenangan atau sudah dianggarkan pada belanja pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota

Komposisi dari sisi lokasi, menunjukkan kontribusi Provinsi Sumatera Utara menjadi yang tertinggi. Kontribusi Provinsi Sumatera Utara di belanja kesehatan sebesar 22,1 persen, pendidikan sebesar 19,01 persen, dan ekonomi sebesar 24,81 persen. Sementara itu, kontribusi terendah berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu belanja kesehatan sebesar 2,1 persen, pendidikan sebesar 1,71 persen, dan ekonomi sebesar 2,4 persen.

Tahun 2021, dukungan fiskal APBN di Regional Sumatera pada bidang kesehatan masih berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Output dengan realisasi terbesar berupa Obat-obatan habis pakai terealisasi sebesar Rp344,52 M dengan jumlah output mencapai 58 paket. Realisasi terbesar kedua berupa pengadaan alat kesehatan sebesar Rp162,79 miliar dengan capaian output 2.934 Unit. Realisasi terbesar ketiga yaitu Alat Kontrasepsi dengan realisasi Rp73,03 M dan penerima 2.972 Faskes.

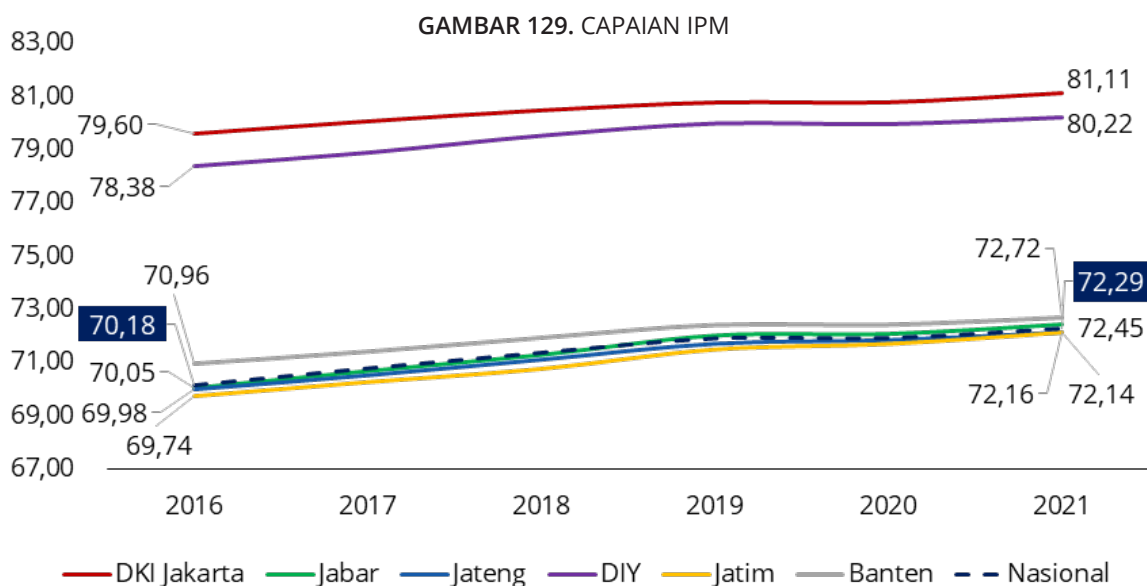
Teradapat Gap yang cukup tinggi pada belanja fungsi Kesehatan di Provinsi Sumbar, Sumsel, dan Sumut dibandingkan Provinsi lainnya di regional Sumatera. Jika ditelusuri hingga level output, tingginya alokasi belanja pemerintah pusat pada fungsi Kesehatan khususnya Sub-Fungsi Kesehatan Perorangan didominasi belanja operasional UPT BLU yang tidak dimiliki provinsi lainnya. Hal ini menyebabkan pada fungsi Kesehatan ketiga provinsi tersebut alokasinya nampak jauh lebih tinggi hingga berkisar Rp850 miliar s.d. 1,2 triliun, dibandingkan provinsi lain di regional Sumatera yang hanya di kisaran Rp79 miliar s.d. 204 miliar.

Pada sektor pendidikan, dukungan fiskal APBN tahun 2021 di Regional Sumatera fokus dalam rehabilitasi sarana prasarana. Upaya peningkatan sistem pembangunan pendidikan menitikberatkan pada peningkatan mutu dengan adanya rehabilitasi sarana prasarana pendidikan dengan realisasi Rp698,52M, disamping Tunjangan Profesi Guru total sebesar Rp691,55M kepada 27 ribu orang sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas SDM pendidik, serta Rp555,4M Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang diberikan kepada hampir 550 ribu orang.

2.II. PERKEMBANGAN IPM REGIONAL JAWA

Dalam lima tahun terakhir, nilai IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia provinsi-provinsi di Regional Jawa terus mengalami perbaikan. Status IPM tahun 2021 dengan kategori sangat tinggi di atas 80 dicapai Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada tahun sebelumnya, terdapat perlambatan nilai IPM khususnya tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Bahkan, Provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan IPM tahun 2020 sebesar 0,02 poin. Penurunan IPM 2020 tersebut dipengaruhi oleh penurunan indeks pada dimensi standar kehidupan yang layak yang tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan indeks pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan. Seiring dengan menurunnya trend pandemi Covid-19, IPM seluruh provinsi Regional Jawa mulai menunjukkan trend kenaikan di tahun 2021.

Pada tahun 2021, dua dari enam provinsi di Regional Jawa mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021 masing-masing provinsi. Capaian IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebesar 72,14 meningkat 0,60 persen dari tahun 2020. Peningkatan capaian IPM Provinsi Jawa



Sumber: BPS, diolah

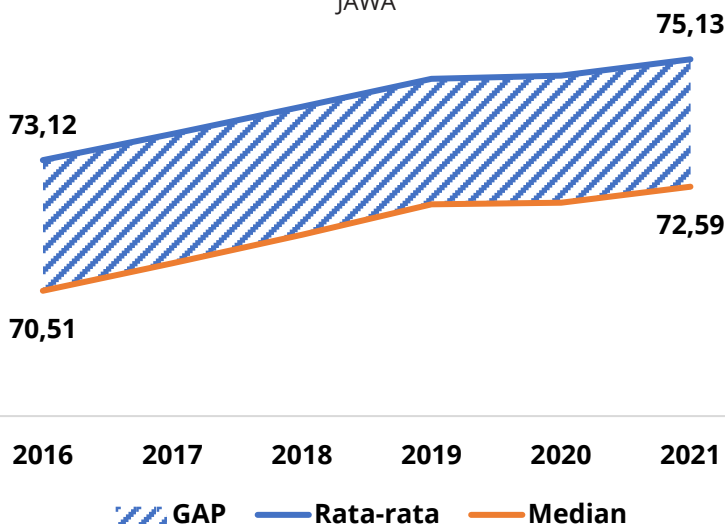
GAMBAR 130. IPM JAWA



Sumber: BPS, diolah

Timur merupakan kenaikan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Regional Jawa dan mampu melebihi target dalam RPJMD Jawa Timur namun capaian IPM tersebut masih di bawah rata-rata nasional 72,29. Selanjutnya, provinsi yang memiliki peningkatan capaian tertinggi kedua adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 72,45 dengan peningkatan sebesar 0,50 persen dari tahun 2020 dan mampu mencapai target RPJMD Jawa Barat.

GAMBAR 131. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL JAWA



Sumber: BPS, diolah

Di sisi lain, terdapat empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD masing-masing provinsi. Selanjutnya, hal yang patut dijadikan acuan adalah capaian IPM pada Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta karena selama 5 tahun terakhir IPM kedua provinsi tersebut merupakan tertinggi di Indonesia dan mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Bahkan, IPM rata-rata 34 provinsi di Indonesia tahun 2021 sebesar 72,29 masih cukup jauh di bawah capaian IPM DKI Jakarta sebesar 81,11 dan DI Yogyakarta sebesar 80,22. Hal ini menunjukkan tingginya disparitas pencapaian pembangunan

manusia antar provinsi di Indonesia.

Selama ini Regional Jawa memberikan kontribusi terbesar perekonomian nasional. Hal ini juga selaras dengan tingginya nilai IPM provinsi pada Regional Jawa kecuali dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Capaian IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2021 melebihi target RPJMD sebesar 72,14 namun capaian tersebut masih di bawah capaian nasional 72,29. Hal yang sama juga terjadi pada Provinsi Jawa Tengah yaitu capaian IPM sebesar 72,23 16 masih di bawah capaian nasional. Kondisi di atas menunjukkan bahwa meskipun Regional Jawa menyumbang perekonomian terbesar nasional namun masih terdapat ketidakmerataan capaian IPM. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk dapat meningkatkan dan melakukan pemerataan capaian IPM ke depannya.

Sejalan dengan capaian tingkat nasional, pada level regional disparitas capaian IPM antar provinsi juga menunjukkan kondisi yang belum merata. Selisih capaian IPM tahun 2021 antara Provinsi DKI Jakarta (81,11) sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, dengan Provinsi Jawa Timur (72,14) sebesar 8,97 poin. Selisih tersebut lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2016 yang mencapai 9,86 poin. Namun, apabila dilihat lebih rinci, upaya pemerataan antar wilayah di Regional Jawa belum menunjukkan hasil yang positif, hanya Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang memiliki capaian terbaik. Grafik pada gambar perkembangan rata-rata dan nilai tengah capaian IPM provinsi dan kabupaten/kota di Regional Jawa menunjukkan perkembangan rata-rata dan nilai tengah capaian IPM sampai level provinsi dan kabupaten/kota di Regional Jawa, serta gap antara rata-rata dan nilai tengah tersebut. Grafik tersebut menunjukkan tidak terdapat penyempitan gap antara rata-rata dengan nilai tengah. Hal ini mengindikasikan pembangunan di wilayah tertinggal masih belum terakselerasi dengan baik untuk mengejar ketertinggalan dari daerah dengan capaian yang lebih baik.

Pada indeks kesehatan, kondisi komponen Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami perbaikan setiap tahunnya. Dalam enam tahun terakhir, UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat seluruh provinsi di Regional Jawa terus

GAMBAR 132. IPM JAWA



Sumber: BPS, diolah

mengalami peningkatan. Pelayanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku kesehatan masyarakat terus membaik.

Derajat kesehatan yang direpresentasikan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir tertinggi pada Regional Jawa di Provinsi DI Yogyakarta. Angka UHH Provinsi DI Yogyakarta tahun 2021 sebesar 75,04. Angka di atas tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya UHH pada Provinsi DI Yogyakarta selaras dengan tingginya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak mencapai 97,12 persen (tertinggi se Indonesia); termasuk tingginya perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih mencapai 99,76 persen dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan mencapai 98,75 persen. Selain itu, tingginya angka UHH DI Yogyakarta juga ditopang dari rumah tangga dengan akses sumber air minum layak sebesar 95,69 persen.

Sementara itu, UHH terendah tahun 2021 di Provinsi Banten sebesar 70,02. Angka UHH Provinsi Banten mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen dalam enam tahun terakhir. UHH Provinsi Banten juga masih berada di bawah capaian nasional sehingga hal tersebut menjadi alarm bagi Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Belum maksimalnya nilai UHH Provinsi Banten juga sejalan dengan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 82,8900 persen; perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih mencapai 96,96 persen dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan mencapai 87,50 persen rumah tangga dengan akses sumber air minum layak sebesar 93,51 persen.

Angka UHH di DI Yogyakarta tertinggi di Indonesia namun demikian Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2020 yang dirilis Kementerian Kesehatan, AKB Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 5,7 bayi setiap seribu kelahiran, AKB Provinsi DI Yogyakarta lebih tinggi dari AKB nasional sebanyak 4,6 bayi lahir mati setiap seribu kelahiran dan menjadi satu-satunya. Kondisi tersebut menunjukkan dukungan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin/nifas serta bayi masih belum optimal khususnya di Provinsi DI Yogyakarta.

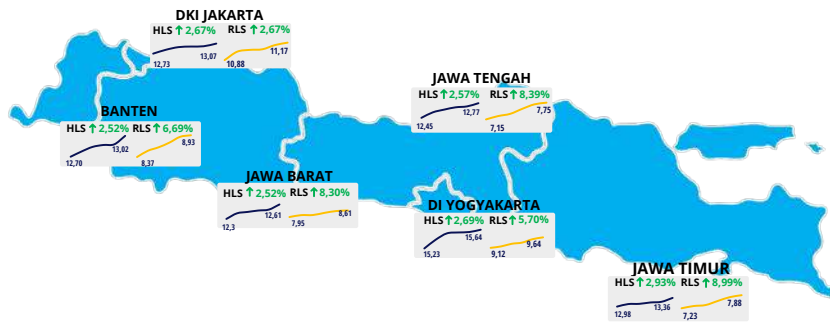
Secara umum, pada Regional Jawa untuk Indikator pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin/nifas serta bayi yang menunjukkan kondisi yang optimal. Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan kesehatan ibu hamil berada pada kisaran 66,7-98,9 persen. Capaian terendah hanya di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 66,7 di bawah

rata-rata nasional 84,6. Sedangkan provinsi lainnya pada Regional Jawa pada kisaran 91-98,9, tertinggi Provinsi DKI Jakarta. Pada periode hamil, jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (67,4 – 99,3 persen), terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 67,4 persen masih di bawah angka nasional 83,6 persen. Di sisi lain, dukungan berupa makanan tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita kurus sudah berjalan optimal, kecuali di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang masih di bawah rata-rata nasional 89. Hal ini ditujukan untuk mengurangi jumlah kematian neonatal yang sebagian besar disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Adapun pada indikator tingkat persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan persalinan pada regional Jawa pada kisaran 93,7-99,6 persen di atas rata-rata nasional 86 persen sedangkan target dalam Renstra 2020 sebesar 87 persen. Selain itu, kondisi dukungan untuk imunisasi, baik imunisasi dasar, maupun lanjutan di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menunjukkan hasil yang belum optimal karena masih lebih rendah dari kondisi nasional.

Fasilitas layanan kesehatan di Regional Jawa juga secara umum menuju kondisi ideal. Saat ini, sudah puskesmas pada setiap kecamatan di Regional Jawa pada kisaran 1,5-7,2 lebih tinggi dari rata-rata nasional 1,4. Sebagian besar puskesmas tersebut (47,9 – 100 persen) telah terakreditasi yang mencerminkan mutu layanan kesehatan yang sudah baik. Hampir seluruh puskesmas juga memiliki persediaan obat esensial dan imunisasi dasar lengkap untuk layanan kesehatan. Hal di atas juga didukung dengan fasilitas layanan kesehatan berupa rumah sakit masih tergolong tinggi. Persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C di Regional Jawa berada pada kisaran 79,1-91,1 persen lebih tinggi dari kondisi nasional sebesar 69,8. Selain itu, kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas juga tergolong masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh persentase puskesmas dengan standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih rendah pada kisaran 13,8 - 88,4 persen. Selanjutnya, setiap puskesmas pada Regional Jawa memiliki dokter DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Pada perilaku kesehatan masyarakat di Regional Jawa, beberapa indikator menunjukkan kondisi yang cukup baik. Masyarakat memiliki kesadaran untuk berupaya melakukan pencegahan dan penanganan masalah gizi. Upaya tersebut tercermin dari pemberian asi eksklusif dan penimbangan balita secara periodik. Cakupan pemberian asi eksklusif di Regional Jawa berada pada kisaran 55,9 – 81,4 persen, sudah melampaui target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan di tahun 2020 sebesar 40 persen. Sementara itu, persentase rata-rata bayi ditimbang setiap bulan menunjukkan kisaran 40,1 – 70,1 persen, sedangkan persentase nasional 61,3 persen. Perilaku sehat lainnya ditunjukkan oleh

GAMBAR 133. INDEKS HLS DAN RLS REGIONAL JAWA



Sumber: BPS, diolah

pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga. Kondisi kesehatan kerja dan olahraga menunjukkan kondisi cukup merata pada kisaran 57,9 – 100 persen melebihi capaian nasional sebesar 37,5 perseb. Selain itu, di beberapa provinsi, sebagian besar wilayah kabupaten/kota telah merapkan kawasan tanpa rokok yaitu di Provinsi Banten, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Adapun penerapan kawasan tanpa rokok di tiga provinsi lainnya, masih dilakukan di sebagian kecil kabupaten/kota.

Dilihat dari sisi lingkungan, kondisi kesehatan di Regional Jawa bervariasi. Upaya peningkatan kualitas air minum melalui aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, menunjukkan kondisi yang lebih baik (42,6 – 77,4 persen) daripada kondisi nasional sebesar 57,8 persen. Provinsi DI Yogyakarta sebesar 77,4 persen dan Jawa Tengah 73,9 persen mampu melebihi target RPJMN 2020 sebesar 60 persen. Sementara itu, kondisi rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak di Regional Jawa mencapai 92,87-99,84 persen lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 90,21. Adapun kondisi akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Jawa Barat masih perlu dilakukan perbaikan kondisi karena baru 71,40 persen rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak. Selain itu, masih terdapat rumah tangga di Provinsi Banten 11,89 persen, Jawa Barat 12,83 persen dan DKI Jakarta 22,07 persen status angka rumah tangga kumuh yang lebih tinggi daripada angka nasional, 10,04 persen.

Indeks pendidikan Regional Jawa yang ditunjukkan dengan komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara umum, peningkatan pada komponen pembentuk indeks pendidikan lebih baik daripada peningkatan pada komponen pembentuk indeks kesehatan. Secara khusus, kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin dari angka RLS mengalami peningkatan yang lebih baik daripada perbaikan kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tercermin dari angka HLS.

Pembangunan sistem pendidikan tertinggi di Regional Jawa berada di Provinsi DI Yogyakarta. Rata-rata anak usia 7 tahun yang mengenyam jenjang pendidikan memiliki peluang untuk bersekolah (HLS) di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2021 mencapai 15,64 atau setara dengan Diploma III. Selain itu, tingkat pertumbuhan 2,69% persen dalam enam tahun terakhir. Capaian HLS Provinsi DI Yogyakarta tertinggi secara nasional dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, angka HLS terendah di Regional Jawa berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 12,61 atau hampir setara dengan menamatkan pendidikan sampai tingkat Diploma I. Tingkat pertumbuhan HLS dalam enam tahun terakhir Provinsi Jawa Barat mencapai 2,52 persen.

Kualitas pendidikan pada masyarakat yang tercermin dari RLS tertinggi di Regional Jawa dicapai Provinsi DKI Jakarta. Angka RLS di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mencapai 11,17 (setara kelas 2 SMA) dengan pertumbuhan 2,7% persen dalam enam tahun terakhir. Capaian RLS Provinsi DKI Jakarta tertinggi secara nasional dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, angka RLS terendah di Regional Jawa berada di Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,75 (hampir setara kelas 1 atau 2 SMP) dengan tingkat pertumbuhan sepanjang enam tahun terakhir mencapai 8,4 persen.

Pemerintah terus berupaya membangun sistem pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana sistem pendidikan. Berdasarkan data

GAMBAR 134. INDEKS HLS DAN RLS REGIONAL JAWA



Sumber: BPS, diolah

statistik pendidikan pada setiap jenjang pendidikan tahun 2020/2021 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah guru terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 245.528 (37,01 persen) dari total 663.404 guru SD; 117.599 (40,45 persen) dari total 290.695 guru SMP; 49.472 (40,7 persen) dari total 121.565 guru SMA; dan 80.522 (45,12 persen) dari total 178.475 guru SMK merupakan guru baru dalam lima tahun terakhir di Regional Jawa.

Selanjutnya, upaya peningkatan kuantitas tenaga pendidik saat ini cukup optimal. Hal ini tercermin dari perbandingan antara jumlah guru dengan siswa jenjang SD Regional Jawa rata-rata 1:20; SMP 1:18; SMA 1:17; dan SMK 1:18. Upaya peningkatan tenaga

TABEL 67. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017-2021

Wilayah	Kesehatan (Miliar Rp)						Pendidikan (Miliar Rp)						Ekonomi (Miliar Rp)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren
ACEH	193,59	275,79	271,35	219,86	241,01		3.636,93	3.833,44	4.466,44	3.969,87	4.173,46		2.836,30	2.915,74	2.922,06	2.278,71	3.018,43	
BENGKULU	114,62	164,68	158,30	115,96	135,66		912,38	911,82	1.038,22	868,95	1.009,52		1.384,43	1.229,10	879,08	628,82	1.011,36	
JAMBI	116,81	166,25	173,42	132,29	151,00		1.371,36	1.395,88	1.490,01	1.592,97	1.833,51		1.800,09	1.623,77	2.021,57	1.437,70	1.882,70	
KEP. BANGKA BELITUNG	89,62	106,94	102,26	64,86	78,94		332,52	401,73	355,02	405,12	380,73		688,11	660,15	554,28	525,93	761,03	
KEP. RIAU	183,37	178,41	188,74	138,15	189,58		358,60	431,85	590,96	410,41	583,10		2.918,15	2.954,65	2.964,36	2.603,10	3.317,89	
LAMPUNG	179,86	281,51	257,78	172,25	204,08		2.096,83	2.316,21	2.582,53	2.480,58	2.380,78		2.845,97	3.024,30	3.477,54	2.187,87	3.294,98	
RIAU	151,60	194,60	186,10	135,47	156,55		1.733,13	1.860,93	2.174,17	1.911,19	1.649,05		1.309,54	1.705,98	1.763,55	1.224,79	1.815,10	
SUMATERA BARAT	835,65	930,24	1.040,64	1.068,42	1.078,56		3.232,05	3.331,51	3.673,07	3.746,43	3.708,73		3.008,88	2.797,42	3.043,70	2.398,47	2.365,71	
SUMATERA SELATAN	1.016,07	1.005,73	1.247,12	1.181,08	1.228,43		2.326,84	2.527,81	2.884,90	2.675,02	2.583,01		4.465,89	3.294,49	3.666,53	3.245,26	4.402,80	
SUMATERA UTARA	918,05	969,88	1.031,64	918,16	851,52		3.915,18	3.990,21	4.482,76	4.424,47	4.038,53		7.571,54	7.259,13	6.252,02	5.437,08	5.096,06	
SUMATERA	3.799,24	4.274,03	4.657,36	4.146,51	4.315,32		19.915,82	21.001,39	23.738,08	22.485,02	22.340,42		28.828,89	27.464,73	27.544,70	21.967,74	26.966,05	

pendidikan, tidak hanya dilakukan dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Sebanyak 96,32 persen tenaga pendidik SMK, 97,01 persen tenaga pendidik SMA, 97,38 persen tenaga pendidik SMP, dan 96,79 persen tenaga pendidik SD merupakan lulusan di atas sarjana.

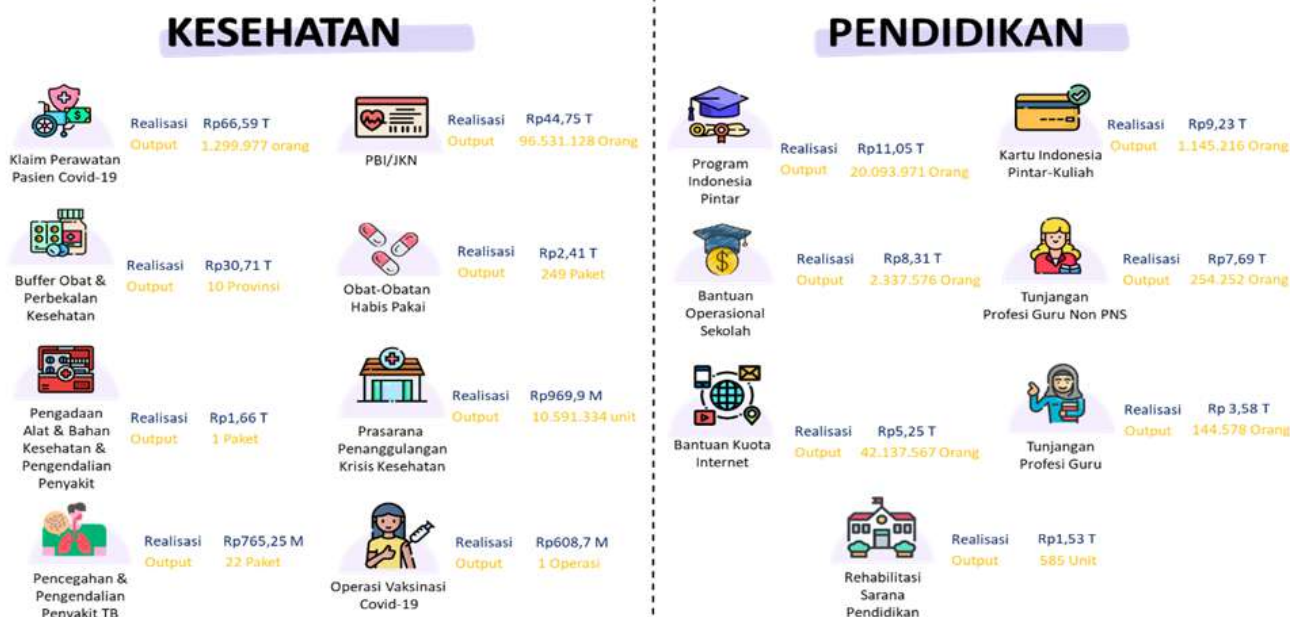
Perbaikan fasilitas sekolah dilakukan dalam bentuk perbaikan secara kuantitas dan kualitas. Penambahan kuantitas sekolah di Regional Jawa pada jenjang SD sampai dengan SMA/SMK ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah ruang kelas 2018-2020 di seluruh provinsi. Selain penambahan kuantitas ruang kelas sekolah, perbaikan dari segi kuantitas juga dilakukan terhadap ruang kelas. Kondisi ruang kelas SD sampai SMA/SMK mengalami perbaikan setiap tahunnya, perbaikan terbanyak pada jenjang SMA/SMK khususnya di Provinsi DKI Jakarta .

Pemerintah berupaya meningkatkan kuantitas

fasilitas penunjang sekolah lainnya, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar, maupun tidak berkaitan langsung. Penambahan fasilitas penunjang perpustakaan pada jenjang SD-SMA/SMK di seluruh provinsi. Penambahan perpustakaan tertinggi jenjang SD-SMA/SMK pada Provinsi DI Yogyakarta. Selanjutnya, jumlah fasilitas laboratorium SD tertinggi di DKI Jakarta, SMP dan SMA tertinggi di DI Yogyakarta, dan SMK tertinggi di Jawa Tengah. Fasilitas pendukung lainnya di antaranya penambahan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di tiap provinsi, tertinggi jenjang SD-SMA/SMK di DI Yogyakarta. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya berupa sanitasi sekolah yang tercermin dari kelayakan sumber air di sekolah, jumlah toilet di setiap provinsi di Regional Jawa menunjukkan jumlah kuantitas yang memadai.

Indeks pengeluaran yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita sempat berkontraksi di

GAMBAR 135. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL JAWA



Sumber: BPS, diolah

tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Regional Jawa sebagai penyumbang perekonomian terbesar secara nasional mengalami kontraksi yang cukup dalam karena terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat serta rendahnya mobilitas. Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada turunnya pengeluaran per kapita pada seluruh provinsi di Regional Jawa di tahun 2020 secara YoY. Tahun 2021, kondisi perekonomian nasional mengalami perbaikan karena membaiknya kondisi penanganan Covid-19 dan akselerasi vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak positif pada menggaliatnya kembali sektor ekonomi termasuk mobilitas masyarakat Indonesia. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat di Regional Jawa kembali meningkat di seluruh provinsi.

Secara umum, seluruh provinsi di Regional Jawa mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dari tahun 2016. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.520 mengalami peningkatan 6,02 persen dari tahun 2016. Pengeluaran per kapita Provinsi DKI Jakarta merupakan tertinggi secara nasional yang dicapai setiap tahunnya. Sementara itu, pengeluaran per kapita terendah tahun 2021 berada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10.934. Di sisi lain, pertumbuhan pengeluaran per kapita tahun 2021 pada Provinsi Jawa Barat menunjukkan kenaikan yang didorong oleh kontribusi konsumsi rumah tangga.

Upaya pemerintah dalam mendukung perbaikan kondisi pembangunan manusia di Regional Jawa melalui belanja pemerintah mengalami perlambatan karena dampak negatif pandemi Covid-19. Dukungan pemerintah melalui belanja K/L berdasarkan fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mengalami tren penurunan tahun 2020 di hampir seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta. Pada tahun 2020 pemerintah melakukan refocusing dan realokasi belanja untuk program PC-PEN. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan yang harus tertunda. Banyaknya program PC-PEN tahun 2020 yang teralokasikan pada DIPA Satker yang tersentralisasi di Provinsi DKI Jakarta berdampak pada naiknya belanja kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Seiring perbaikan kondisi pandemi Covid-19 dengan penanganan yang lebih baik, realisasi anggaran belanja pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara perlahan kembali meningkat di tahun 2021 dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda.

Komposisi tiga belanja pemerintah berdasarkan fungsi menunjukkan belanja fungsi ekonomi memiliki kontribusi yang lebih tinggi daripada fungsi kesehatan dan pendidikan. Kontribusi belanja ekonomi di Regional Jawa sebesar 60,16 persen, sedangkan kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar 24,04 persen dan 15,80 persen. Hal ini disebabkan cakupan belanja ekonomi yang lebih luas, sedangkan

belanja kesehatan dan pendidikan lebih spesifik.

Komposisi dari sisi lokasi, menunjukkan kontribusi Provinsi DKI Jakarta menjadi yang tertinggi. Kontribusi Provinsi DKI Jakarta di belanja kesehatan sebesar 96,10 persen, pendidikan sebesar 70,12 persen, dan ekonomi sebesar 91,11 persen. Sementara itu, kontribusi terendah berada di Provinsi Banten yaitu belanja kesehatan sebesar 0,14 persen, pendidikan sebesar 2,99 persen, dan ekonomi sebesar 0,54 persen. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang menjadi pusat aktivitas perekonomian di Regional Jawa, sehingga aktivitas dan kegiatan di Provinsi Jawa lebih banyak sekaligus jumlah Satker yang mengalokasikan PC-PEN tersentralisasi di DKI Jakarta.

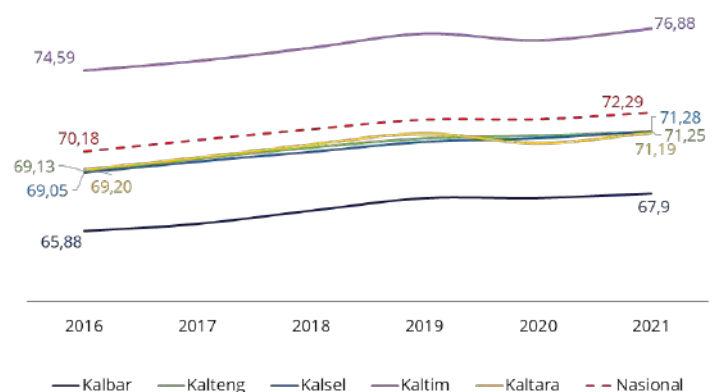
Tahun 2021, dukungan fiskal APBN di Regional Jawa pada bidang kesehatan masih berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Output dengan realisasi terbesar berupa Klaim Perawatan Pasien Covid-19 terealisasi sebesar Rp66,59 T dengan jumlah output mencapai 1,3 juta orang. Realisasi terbesar kedua berupa pembayaran PBI/JKN sebesar Rp44,75 T dan penerima 96,5 juta orang. Realisasi terbesar ketiga yaitu Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan realisasi Rp30,71 T dan penerima 10 provinsi.

Pada sektor pendidikan, dukungan fiskal APBN tahun 2021 di Regional Jawa fokus dalam peningkatan indikator sistem pembangunan dan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan sistem pembangunan pendidikan menitikberatkan pada peningkatan mutu sarana pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sementara itu, bantuan operasional sekolah dan program bantuan tunai berupa KIP dan PIP menjadi fokus utama peningkatan kualitas pendidikan di Regional Jawa.

2.III. PERKEMBANGAN IPM REGIONAL KALIMANTAN

Dalam lima tahun terakhir, nilai IPM provinsi-provinsi di Regional Kalimantan mengalami kenaikan namun

GAMBAR 136. CAPAIAN IPM



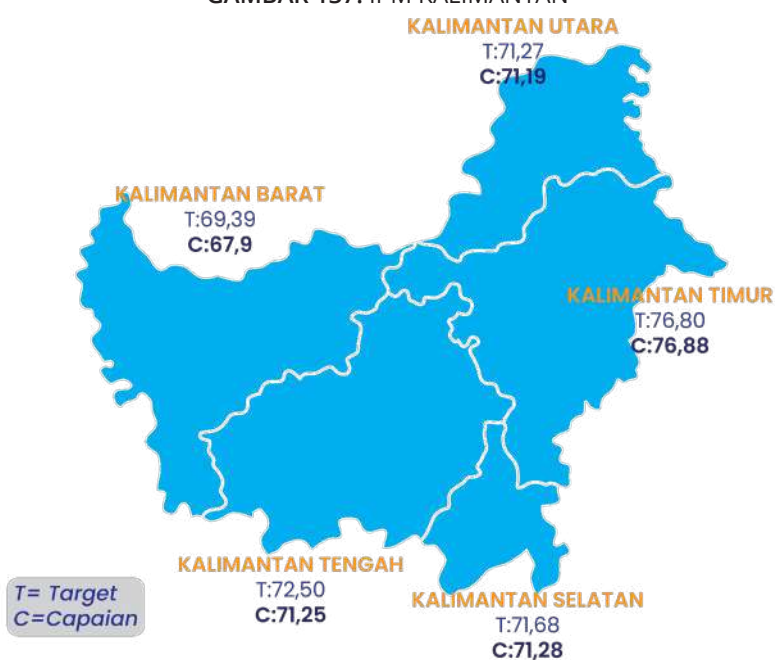
Sumber: BPS, diolah

cukup lambat. Perlambatan semakin tajam pada masa pandemi Covid-19. Bahkan, IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,37 dan 0,52. Secara umum, Provinsi Kalimantan Timur mencapai IPM tertinggi setiap tahunnya dan lebih tinggi dibandingkan capaian IPM nasional. Sedangkan, capaian IPM empat provinsi lainnya di bawah capaian nasional dan capaian terendah IPM diperoleh Provinsi Kalimantan Barat.

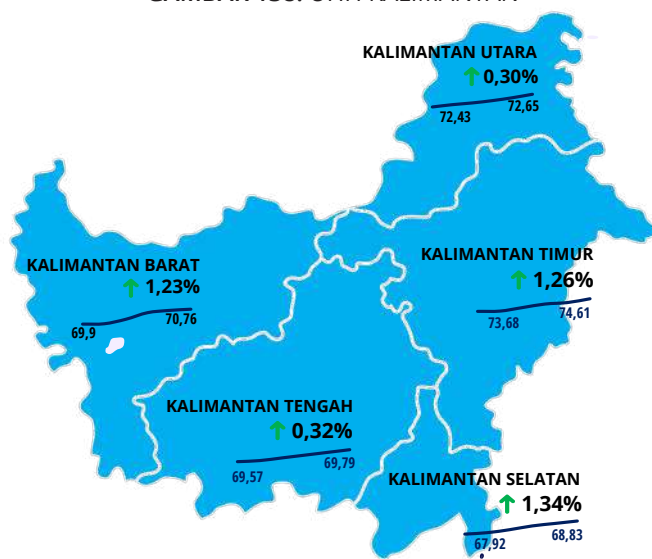
Pada tahun 2021, Provinsi Kalimantan Timur satu-satunya di Regional Kalimantan yang mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021. Capaian IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar 76,88 meningkat 0,64 persen dari tahun 2020. Peningkatan capaian tersebut merupakan tertinggi di antara provinsi lainnya pada Regional Kalimantan. Capaian terendah IPM pada regional ini diperoleh Provinsi Kalimantan Barat sebesar 67,9. Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 hanya sebesar 0,01 % merupakan terendah di antara provinsi lainnya di Regional Kalimantan.

Regional Kalimantan sebagai salah satu regional dengan kawasan terluas di Indonesia memiliki IPM sebagian besar di bawah nasional. Dari sisi target RPJMD masing-masing provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang dapat melampaui target sedangkan empat provinsi lainnya di bawah target RPJMD masing-masing. Target IPM dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,80 dan capaian sebesar 76,88. Provinsi lainnya di Regional Kalimantan tidak dapat mencapai target RPJMD bahkan di bawah capaian nasional. Kondisi di atas menunjukkan masih

GAMBAR 137. IPM KALIMANTAN



GAMBAR 138. UHH KALIMANTAN



terdapat ketidakmerataan capaian IPM khususnya di Kalimantan.

Pada indeks kesehatan, kondisi komponen Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami perbaikan setiap tahunnya. Dalam enam tahun terakhir, UHH seluruh provinsi di Regional Kalimantan terus meningkat. Pelayanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku kesehatan masyarakat terus membaik.

Derajat kesehatan yang direpresentasikan dengan UHH saat lahir tertinggi Regional Kalimantan dicapai Provinsi Kalimantan Timur. Angka UHH Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar 74,61. Angka tersebut mengalami peningkatan 1,26 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 73,68. Angka UHH yang dicapai Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun melebihi capaian provinsi lainnya di Regional Kalimantan dan capaian positif tersebut juga lebih dari capaian nasional. Sementara itu, UHH terendah tahun 2021 berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 68,83 atau mengalami peningkatan 1,34 persen dalam enam tahun terakhir. Selain itu, capaian UHH Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah capaian rata-rata nasional 71,57. Rendahnya capaian UHH menjadi pemicu bagi Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya menjadi lebih baik lagi.

Angka UHH di Kalimantan Timur lebih tinggi daripada provinsi lain di Regional Kalimantan namun Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2020 yang dirilis Kementerian Kesehatan, AKB Kalimantan Timur sebanyak 7 (tujuh) bayi setiap seribu kelahiran. AKB tersebut lebih tinggi dari AKB nasional sebanyak 4,6 bayi lahir mati setiap seribu kelahiran. Tingginya angka kematian bayi tersebut menunjukkan dukungan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin/ nifas serta bayi masih belum optimal.

Terdapat beberapa indikator pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin/nifas serta bayi yang menunjukkan kondisi yang belum optimal. Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan kesehatan ibu hamil berada pada kisaran 32,2 – 96,7 persen, capaian Kalimantan Timur sebesar 32,2 masih di bawah kondisi nasional sebesar 84,6 persen. Pada periode hamil, jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (74,4 – 96,4 persen) masih di bawah angka nasional 83,6 persen. Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kondisi terbaik kedua di antara 34 provinsi di Indonesia sebesar 96,4 persen. Di sisi lain, dukungan berupa makanan tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita kurus sudah berjalan optimal di atas capaian nasional 89 persen. Hal ini ditujukan untuk mengurangi jumlah kematian neonatal yang sebagian besar disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Adapun pada indikator tingkat persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan persalinan, juga masih lebih rendah dari kondisi nasional. Hanya Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kondisi persalinan di fasilitas layanan kesehatan lebih baik daripada kondisi nasional. Selain itu, kondisi dukungan untuk imunisasi, baik imunisasi dasar, maupun lanjutan di Regional Kalimantan menunjukkan hasil yang belum optimal karena masih lebih rendah dari kondisi nasional kecuali Kalimantan Timur.

Fasilitas layanan kesehatan di Regional Kalimantan juga secara umum masih belum ada pada kondisi ideal. Saat ini, sudah terdapat minimal satu puskesmas pada setiap kecamatan di Regional Kalimantan. Sebagian besar puskesmas tersebut (93,5 – 100 persen) telah terakreditasi yang mencerminkan mutu layanan kesehatan yang sudah baik. Hampir seluruh puskesmas juga memiliki persediaan obat esensial dan imunisasi dasar lengkap untuk layanan kesehatan. Akan tetapi, fasilitas layanan kesehatan berupa rumah sakit masih tergolong rendah. Persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C di Regional Kalimantan berada pada kisaran 40 – 86,7 persen. Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur memiliki persentase lebih tinggi daripada kondisi nasional sebesar 69,8 persen. Selain itu, kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas juga tergolong masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh persentase puskesmas dengan standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih rendah pada kisaran 20,7 – 53,8 persen. Beberapa puskesmas juga tidak memiliki dokter terutama pada puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan 10,8, 5,2 dan 5,1 persen.

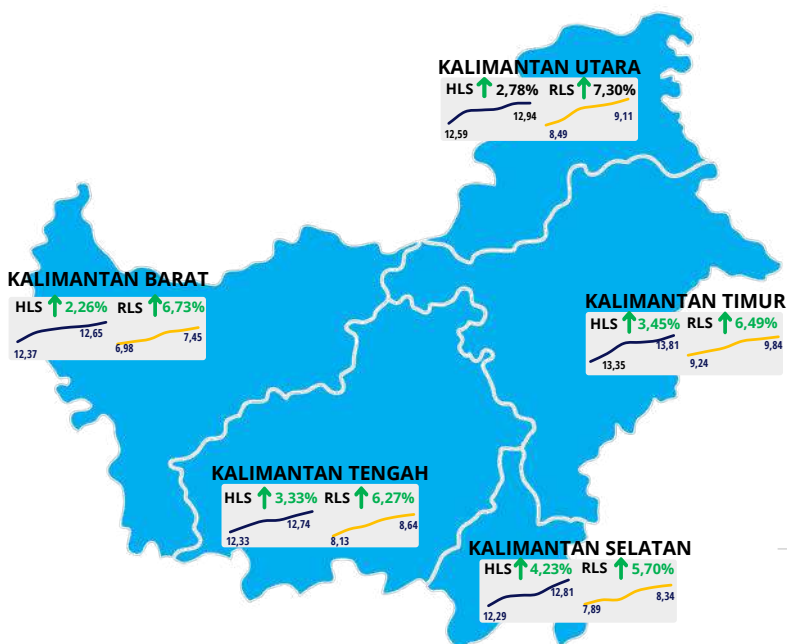
Pada perilaku kesehatan masyarakat Regional Kalimantan, beberapa indikator menunjukkan kondisi yang cukup baik. Masyarakat memiliki kesadaran untuk berupaya melakukan pencegahan dan penanganan masalah gizi. Upaya tersebut tercermin dari pemberian asi eksklusif dan penimbangan balita

secara periodik. Cakupan pemberian asi eksklusif di Regional Kalimantan berada pada kisaran 53,3–76,1 persen, sudah melampaui target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan di tahun 2020 sebesar 40 persen. Sementara itu, persentase rata-rata bayi ditimbang setiap bulan menunjukkan kisaran 30,0 – 50,8 persen, lebih rendah daripada persentase nasional 61,3 persen. Perilaku sehat lainnya ditunjukkan oleh pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga. Kondisi kesehatan kerja dan olahraga menunjukkan kondisi yang belum merata. Hanya Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah memiliki persentase tertinggi di Regional Kalimantan sebesar 80 dan 50 persen pada kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan keluarga, sedangkan capaian terendah di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat masing-masing sebesar 10,0, 7,7 dan 7,1 persen di bawah capaian nasional sebesar 37,5 persen. Selain itu, di beberapa provinsi, sebagian besar wilayah kabupaten/kota telah merapkan kawasan tanpa rokok yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Barat. Adapun penerapan kawasan tanpa rokok di Kalimantan Utara, masih dilakukan di sebagian kecil kabupaten/kota.

Dilihat dari sisi lingkungan, kondisi kesehatan di Regional Kalimantan bervariasi. Upaya peningkatan kualitas air minum melalui aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, menunjukkan kondisi yang lebih baik (45,4 – 66,1 persen) daripada kondisi nasional sebesar 57,8 persen. Namun, kondisi di lima provinsi selain Provinsi Kalimantan Utara, masih perlu upaya perbaikan karena hanya mencapai kisaran 45,4 – 59,2 persen, masih di bawah target RPJMN tahun 2020 sebesar 60 persen. Sementara itu, kondisi rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak di Regional Kalimantan menunjukkan kondisi yang belum ideal, karena berada di kisaran 70,36 - 89,50 persen rumah tangga yang dapat melakukan hal tersebut. Adapun kondisi akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih perlu dilakukan perbaikan kondisi karena nilai masing-masing sebesar 72,31 dan 75,81 persen rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak masih di bawah kondisi nasional 79,53 persen. Selain itu, persentase rumah tangga di Regional Kalimantan dengan status angka rumah tangga kumuh yang lebih rendah daripada angka nasional sebesar 10,04 persen.

Sejalan dengan capaian tingkat nasional, pada level regional disparitas capaian IPM antar provinsi juga menunjukkan kondisi yang belum merata. Selisih capaian IPM tahun 2021 antara Provinsi Kalimantan Timur (76,88) sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, dengan Provinsi Kalimantan Barat (67,9) sebesar 8,98 poin. Selisih tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2016 yang mencapai 8,71 poin. Grafik menunjukkan perkembangan rata-rata dan

GAMBAR 140. IPM KALIMANTAN



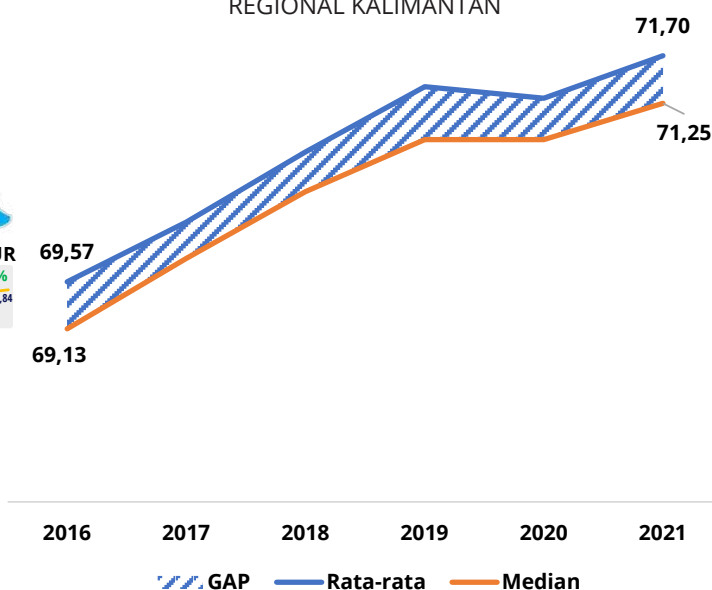
Sumber: BPS, diolah

nilai tengah capaian IPM sampai level provinsi dan kabupaten/kota di Regional Kalimantan, serta gap antara rata-rata dan nilai tengah tersebut. Grafik pada gambar perkembangan rata-rata dan nilai tengah capaian IPM provinsi dan kabupaten/kota di Regional Kalimantan tersebut menunjukkan tidak terdapat tidak penyempitan gap antara rata-rata dengan nilai tengah. Hal ini mengindikasikan pembangunan di wilayah tertinggal belum terakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dari daerah dengan capaian yang lebih baik.

Indeks pendidikan Regional Kalimantan yang ditunjukkan dengan komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara umum, peningkatan pada komponen pembentuk indeks pendidikan lebih baik daripada peningkatan pada komponen pembentuk indeks kesehatan. Secara khusus, kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin dari angka RLS mengalami peningkatan yang lebih baik daripada perbaikan kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tercermin dari angka HLS.

Pembangunan sistem pendidikan tertinggi di Regional Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Timur. Rata-rata anak usia 7 tahun yang mengenyam jenjang pendidikan memiliki peluang untuk bersekolah (HLS) di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 13,81 atau hampir setara dengan Diploma I/II. Selain itu, tingkat pertumbuhan 3,45% persen dalam enam tahun terakhir. Capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur tertinggi dalam Regional Kalimantan dalam enam tahun terakhir. Tingginya capaian HLS di Kalimantan Timur tersebut selaras dengan tingginya persentase kepala sekolah dan guru yang layak pada jenjang SD sebesar 95,60 persen; SMP 97,16 persen;

GAMBAR 139. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL KALIMANTAN



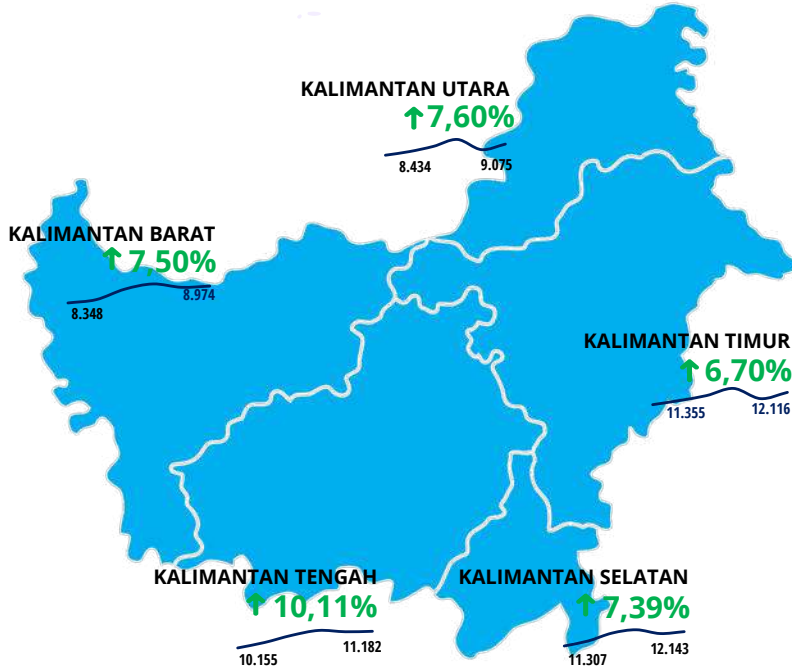
Sumber: BPS, diolah

dan SMA 97,20 persen. Dari sisi ruang kelas kategori baik, jenjang SD sebesar 55,69 persen; SMP 57,06 persen; dan SMA 55,77 persen. Dari sisi perbandingan jumlah perpustakaan terhadap jumlah sekolah di Provinsi Kalimantan Timur, perpustakaan jenjang SD mencapai 82,96 persen; SMP 97,56 persen; dan 110,81 persen. Sementara itu, angka HLS terendah di Regional Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 12,65 atau hampir setara dengan menamatkan pendidikan hampir setara tingkat SMA kelas III atau Diploma I. Tingkat pertumbuhan HLS dalam enam tahun terakhir Provinsi Kalimantan Barat mencapai 2,26 persen terendah di Regional Kalimantan.

Kualitas pendidikan masyarakat tertinggi di Regional Kalimantan dicapai Provinsi Kalimantan Timur. Angka RLS di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 9,84 (hampir setara kelas 1 SMA) dengan pertumbuhan 6,49% persen dalam enam tahun terakhir. Capaian RLS Provinsi Kalimantan Timur melebihi rata-rata nasional setiap tahunnya. Capaian pendidikan Kalimantan Timur tersebut selaras dengan rendahnya angka mengulang sekolah jenjang SD rata-rata sebesar 0,31 persen; SMP 0,25 persen; dan SMA 0,16 persen. Dari sisi angka putus sekolah, rata-rata jenjang SD sebesar 0,17 persen; SMP 0,07 persen; dan SMA 0,13 persen. Sementara itu, angka RLS terendah di Regional Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,45 (setara kelas 1 SMP) dengan tingkat pertumbuhan sepanjang enam tahun terakhir mencapai 6,73 persen.

Pemerintah terus berupaya membangun sistem pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana sistem pendidikan. Berdasarkan data statistik pendidikan pada setiap jenjang pendidikan

GAMBAR 141. PENGELURAN PER KAPITA KALIMANTAN



Sumber: BPS, diolah

tahun 2020/2021 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah guru terus meningkat dalam lima tahun terakhir di regional Kalimantan. Sebanyak 43.191 (36,57 persen) dari total 118.110 guru SD; 19.893 (42,71 persen) dari total 46.581 guru SMP; 9.600 (42,11 persen) dari total 22.800 guru SMA; dan 6.657 (39,55 persen) dari total 16.830 guru SMK merupakan guru baru dalam lima tahun terakhir di regional Kalimantan. Selanjutnya, upaya peningkatan kuantitas tenaga pendidik saat ini cukup optimal. Hal ini tercermin dari perbandingan antara jumlah guru dengan siswa jenjang SD regional Kalimantan rata-rata 1:15; SMP 1:14; SMA 1:16; dan SMK 1:16. Upaya peningkatan tenaga pendidikan, tidak hanya dilakukan dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Sebanyak 95,64 persen tenaga pendidik SMK, 97,61 persen tenaga pendidik SMA, 97,15 persen tenaga pendidik SMP, dan 94,58 persen tenaga pendidik SD merupakan lulusan di atas sarjana.

Perbaikan fasilitas sekolah dilakukan dalam bentuk perbaikan secara kuantitas dan kualitas. Penambahan kuantitas sekolah pada jenjang SD sampai dengan SMA/SMK ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah

ruang kelas pada sekolah negeri maupun swasta periode 2018-2020 di seluruh provinsi di Regional Kalimantan. Selain penambahan kuantitas ruang kelas sekolah juga dilakukan perbaikan terhadap ruang kelas jenjang sekolah dasar sampai menengah. Kondisi ruang kelas SD kategori baik tertinggi pada Kalimantan Timur, jenjang SMP tertinggi Kalimantan Utara, SMA dan SMK tertinggi pada Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah berupaya meningkatkan kuantitas fasilitas penunjang sekolah lainnya, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar, maupun tidak berkaitan langsung. Penambahan fasilitas penunjang perpustakaan pada jenjang SD-SMA/SMK dilakukan di seluruh provinsi pada Regional Kalimantan periode 2018-2020. Penambahan perpustakaan tertinggi jenjang SD, SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Timur sedangkan jenjang SMP di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, jumlah fasilitas laboratorium jenjang sekolah dasar sampai menengah meningkat setiap tahunnya. Perkembangan kuantitas laboratorium tertinggi pada jenjang SMK di Regional Kalimantan. Dari sisi pendukung fasilitas pendidikan dapat tercermin dari penambahan fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di tiap provinsi, tertinggi jenjang SD-SMA di Kalimantan Timur. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya berupa sanitasi sekolah yang tercermin dari kelayakan sumber air di sekolah, jumlah toilet sekolah di setiap provinsi Regional Kalimantan Timur menunjukkan kuantitas yang cukup memadai.

Indeks pengeluaran yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita sempat berkontraksi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Seluruh provinsi di Regional Kalimantan pada tahun 2020 secara YoY mengalami penurunan per kapita. Penurunan terbesar dialami Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,28 persen sedangkan terkecil dicapai Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,73 persen. Terhentinya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berdampak pada penurunan pengeluaran per kapita. Tahun 2021, kondisi perekonomian nasional mengalami perbaikan karena membaiknya kondisi penanganan Covid-19 dan akselerasi vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak positif pada menggeliatnya kembali sektor ekonomi termasuk

TABEL 68. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017-2021

Wilayah	Kesehatan (Miliar Rp)						Pendidikan (Miliar Rp)						Ekonomi (Miliar Rp)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren
KALIMANTAN BARAT	140,01	207,05	172,53	118,48	128,65		1.553,21	1.985,76	2.055,96	1.779,91	1.762,06		3.659,76	3.560,74	2.050,89	1.797,06	3.509,03	
KALIMANTAN SELATAN	183,53	255,77	250,04	187,50	226,86		1.957,77	2.266,57	2.154,68	2.326,81	2.275,27		2.506,46	2.612,90	2.870,34	1.521,73	2.931,35	
KALIMANTAN TENGAH	125,76	175,98	150,38	98,89	104,53		935,09	954,42	1.042,47	1.075,63	1.074,45		1.905,90	2.050,58	2.177,36	1.824,13	3.961,66	
KALIMANTAN TIMUR	145,33	215,45	172,40	128,00	160,91		1.216,61	1.344,96	1.683,64	1.590,26	1.478,14		2.787,87	2.598,86	2.589,74	2.400,38	3.225,58	
KALIMANTAN UTARA	23,58	24,31	32,09	15,41	24,65		126,14	155,30	361,40	169,00	410,28		1.918,96	1.846,89	1.615,29	1.071,93	1.703,36	
KALIMANTAN	618,20	878,56	777,44	548,29	645,60		5.788,82	6.707,00	7.298,15	6.941,60	7.000,20		12.778,94	12.669,97	11.303,61	8.615,24	15.330,98	

GAMBAR 142. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL KALIMANTAN



Sumber: BPS, diolah

mobilitas masyarakat Indonesia. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat di Regional Kalimantan kembali meningkat di seluruh provinsi.

Secara umum, seluruh provinsi di Regional Kalimantan mengalami peningkatan pengeluaran per kapita per tahun (ribuan) dari tahun 2016 kecuali tahun 2020 di masa pandemi. Pengeluaran per kapita tertinggi Regional Kalimantan dicapai Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp12.116 mengalami peningkatan 6,70 persen dari tahun 2016. Pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Timur merupakan tertinggi secara nasional yang dicapai setiap tahunnya. Sementara itu, pengeluaran per kapita terendah tahun 2021 berada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp8.974 dan mengalami peningkatan sebesar 7,50 persen dalam enam tahun terakhir.

Komposisi tiga belanja pemerintah berdasarkan fungsi menunjukkan belanja fungsi ekonomi memiliki kontribusi yang lebih tinggi daripada fungsi kesehatan dan pendidikan. Kontribusi belanja ekonomi di Regional Kalimantan sebesar 66,72 persen, sedangkan kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar 30,47 persen dan 2,81 persen. Hal ini disebabkan cakupan belanja ekonomi yang lebih luas, sedangkan belanja kesehatan dan pendidikan lebih spesifik.

Komposisi dari sisi lokasi, menunjukkan kontribusi Provinsi Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi. Kontribusi Provinsi Kalimantan Selatan di belanja kesehatan sebesar 35,14 persen, pendidikan sebesar 32,50 persen, dan ekonomi sebesar 19,12 persen. Sementara itu, kontribusi terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara yaitu belanja kesehatan sebesar 3,82 persen, pendidikan sebesar 5,86 persen, dan ekonomi sebesar 11,11 persen.

Tahun 2021, dukungan fiskal APBN di Regional Kalimantan pada bidang kesehatan berfokus pada layanan dan kesehatan. Output dengan realisasi terbesar berupa pengadaan obat/alat kontrasepsi sebesar Rp13,91 Realisasi terbesar kedua berupa pengadaan alat dan bahan laboratorium sebesar Rp9,04 M dan ketiga berupa pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan sebesar Rp6,23 M.

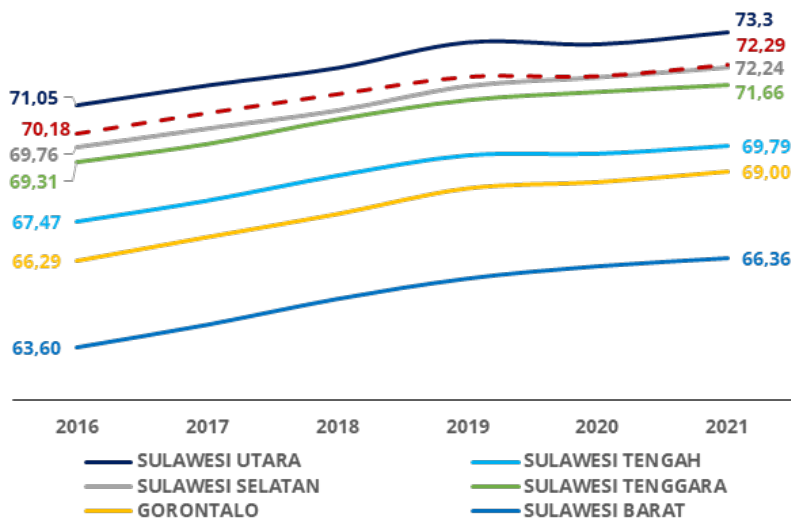
Pada sektor pendidikan, dukungan fiskal APBN tahun 2021 di Regional Kalimantan fokus dalam peningkatan indikator sistem pembangunan dan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan sistem pembangunan pendidikan menitikberatkan pada peningkatan mutu sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dengan belanja tunjangan profesi guru. Sementara itu, bantuan operasional sekolah dan program bantuan tunai berupa KIP dan PIP juga masih menjadi fokus utama peningkatan kualitas pendidikan di Regional Kalimantan.

2.IV. PER K E M B A N G A N I P M REGIONAL SULAWESI

Sepanjang lima tahun terakhir, tingkat IPM provinsi-provinsi di Regional Sulawesi terus mengalami perbaikan. Setelah sempat melambat di tahun 2020 akibat ketidakpastian yang disebabkan pandemi Covid-19, perkembangan IPM di Regional Sulawesi di tahun 2021 kembali terakselerasi.

Pada tahun 2021, empat dari enam provinsi di Regional Sulawesi mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan dalam RKPd tahun 2021 masing-masing provinsi. Capaian IPM Provinsi Sulawesi

GAMBAR 143. CAPAIAN IPM

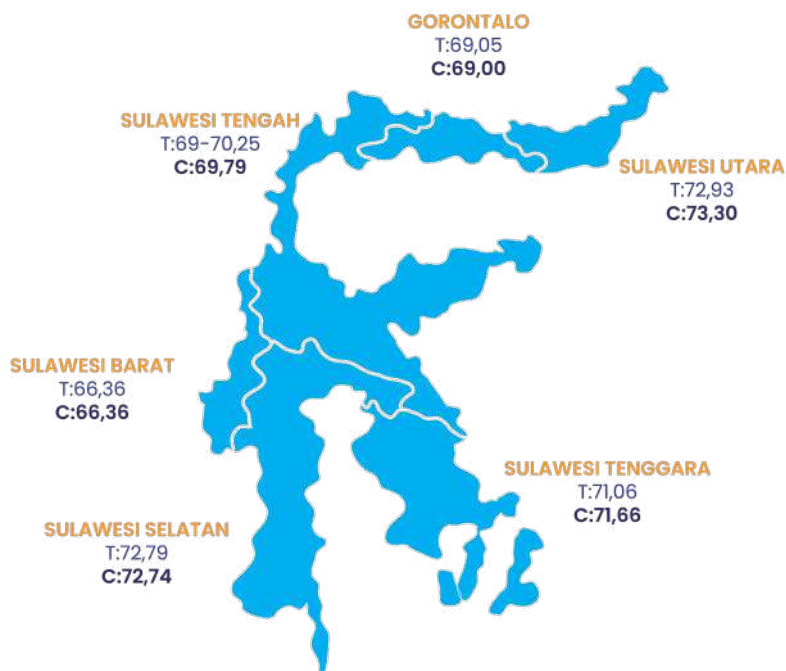


Sumber: BPS, diolah

Selatan tahun 2021 sebesar 72,24 meningkat 0,43 persen dari tahun 2020. Peningkatan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan merupakan peningkatan tertinggi ketiga di Regional Sulawesi. Akan tetapi, dengan peningkatan tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 72,79. Selain itu capaian IPM Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 69,00 meningkat 0,47 persen dari tahun 2020. Peningkatan tersebut merupakan tertinggi kedua di Regional Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Utara, tetapi capaian tersebut masih belum mencapai target tahun 2021 sebesar 69,05. Capaian IPM Regional Sulawesi tahun 2021 menjadi terendah ke-dua setelah Regional Maluku.

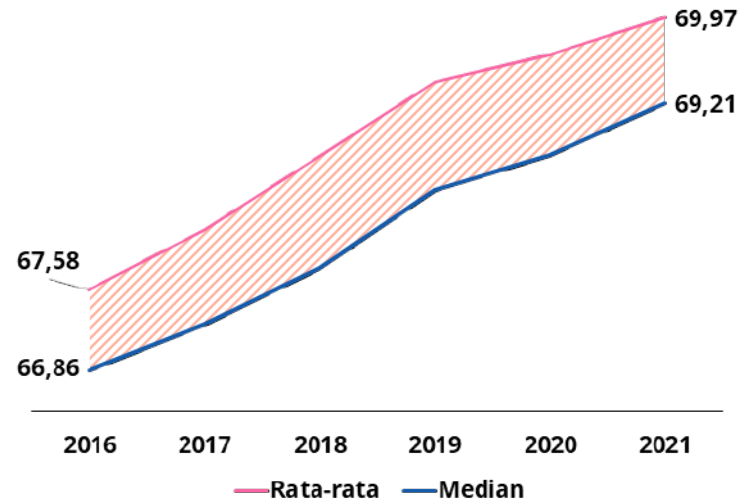
Meskipun Regional Sulawesi menjadi penopang perekonomian kawasan timur Indonesia, lima dari enam provinsi di Regional Sulawesi memiliki capaian

GAMBAR 144. IPM SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 145. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

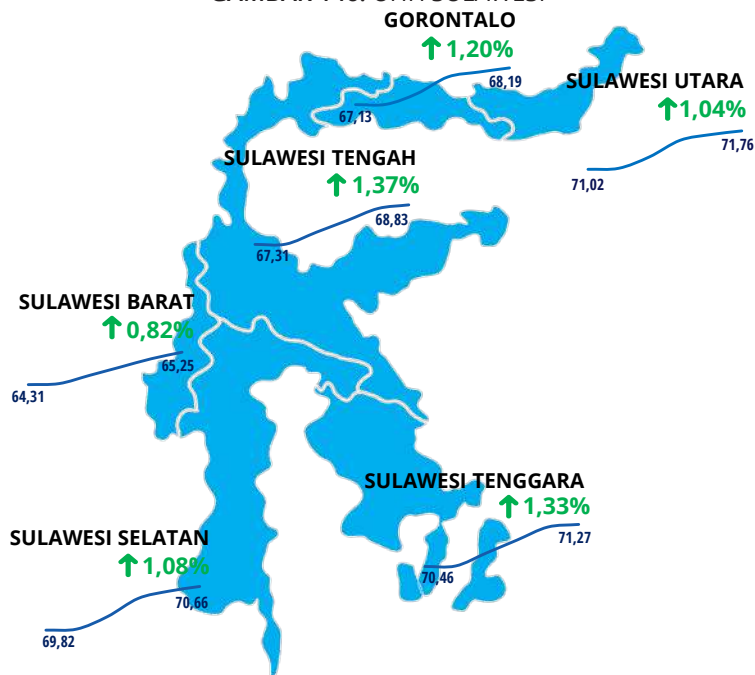
IPM yang lebih rendah daripada capaian nasional. Hanya Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki capaian lebih tinggi daripada capaian nasional. Hal ini merefleksikan pembangunan manusia yang masih belum merata.

Sejalan dengan capaian tingkat nasional, pada level regional disparitas capaian IPM antar provinsi juga menunjukkan kondisi yang belum merata. Selisih capaian IPM antara Provinsi Sulawesi Utara (73,30) sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, dengan Provinsi Sulawesi Barat (66,36) sebesar 6,94 poin. Selisih tersebut lebih baik dibandingkan kondisi enam tahun lalu yang mencapai 7,45 poin. Namun, apabila dilihat lebih rinci, upaya pemerataan antar wilayah di Regional Sulawesi belum menunjukkan hasil yang positif. Grafik pada gambar perkembangan rata-rata dan nilai tengah capaian IPM provinsi dan kabupaten/kota di Regional Sulawesi menunjukkan perkembangan rata-rata dan nilai tengah capaian IPM sampai level provinsi dan kabupaten/kota di Regional Sulawesi, serta gap antara rata-rata dan nilai tengah tersebut. Grafik tersebut menunjukkan tidak terdapat penyempitan gap antara rata-rata dengan nilai tengah. Hal ini mengindikasikan pembangunan di wilayah tertinggal masih belum terakselerasi dengan baik untuk mengejar ketertinggalan dari daerah dengan capaian yang lebih baik.

Pada indeks kesehatan, kondisi komponen UHH terus mengalami perbaikan. Dalam enam tahun terakhir, UHH seluruh provinsi di Regional Sulawesi terus meningkat. Pelayanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku kesehatan masyarakat terus membaik.

Derajat kesehatan, yang direpresentasikan dengan UHH, tertinggi pada Regional Sulawesi berada di Provinsi Sulawesi Utara. Angka UHH Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 71,76. Angka tersebut

GAMBAR 146. UHH SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

mengalami peningkatan 1,04 persen dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, UHH terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 65,25. Angka UHH Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan 1,46 persen dalam enam tahun

terakhir. Peningkatan pada tiga provinsi dengan UHH terendah yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah lebih tinggi daripada tiga provinsi lainnya. Hal ini menjadi pertanda positif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di daerah yang lebih tertinggal.

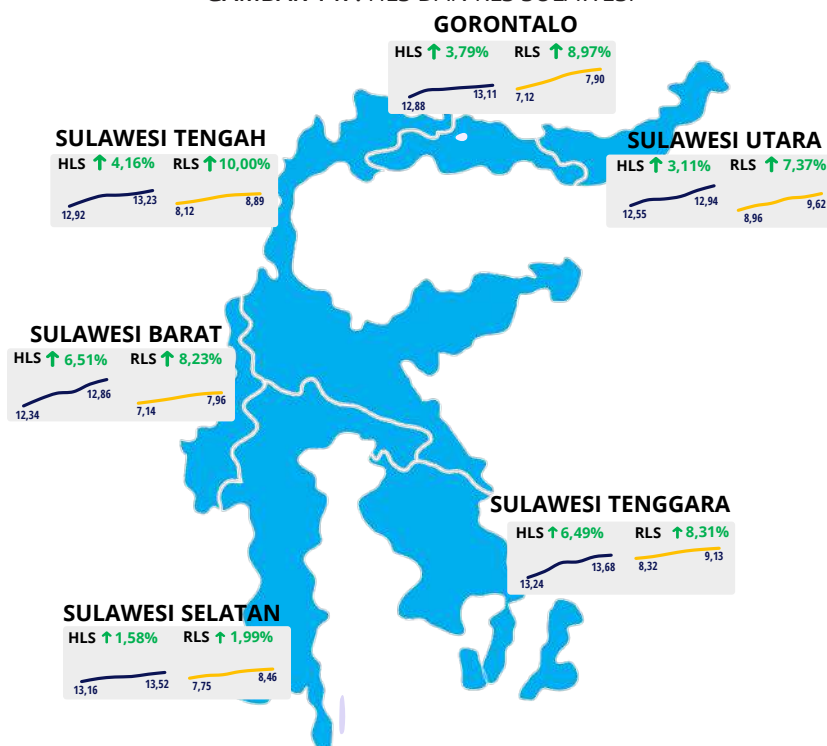
Angka UHH di Sulawesi Utara lebih tinggi daripada provinsi lain di Regional Sulawesi salah satunya dikarenakan Angka Kematian Bayi (AKB) yang lebih rendah. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2020 yang dirilis Kementerian Kesehatan, AKB Provinsi Sulawesi Utara sebanyak satu bayi setiap seribu kelahiran. AKB tersebut lebih rendah dari provinsi lainnya yang berada pada kisaran 5,13 – 10,83. Selain itu, AKB Provinsi Sulawesi Utara lebih rendah dari AKB nasional sebanyak 4,6 bayi lahir mati setiap seribu kelahiran dan menjadi satu-satunya provinsi di Regional Sulawesi dengan AKB di bawah AKB nasional. Hal ini menunjukkan dukungan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin/nifas serta bayi masih belum optimal.

Terdapat beberapa indikator pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin/nifas serta bayi yang menunjukkan kondisi yang belum optimal. Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan kesehatan ibu hamil berada pada kisaran 66,2 – 83,2 persen, masih di bawah kondisi nasional sebesar 84,6 persen. Pada periode hamil, jumlah ibu hamil yang mendapatkan

tablet tambah darah (63,4 – 81,9 persen) masih di bawah angka nasional 83,6 persen. Hanya di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki kondisi lebih baik yaitu sebesar 86,1 persen. Di sisi lain, dukungan berupa makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus sudah berjalan optimal, kecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini ditujukan untuk mengurangi jumlah kematian neonatal yang sebagian besar disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Adapun pada indikator tingkat persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan persalinan, juga masih lebih rendah dari kondisi nasional. Hanya Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang memiliki kondisi persalinan di fasilitas layanan persalinan lebih baik daripada kondisi nasional. Selain itu, kondisi dukungan untuk imunisasi, baik imunisasi dasar, maupun lanjutan di Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara menunjukkan hasil yang belum optimal karena masih lebih rendah dari kondisi nasional.

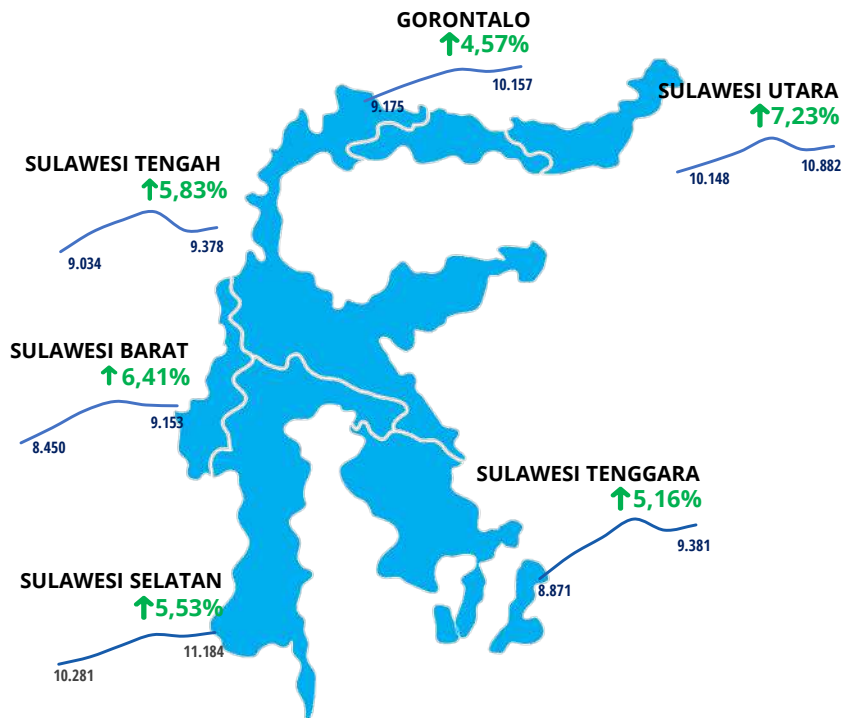
Fasilitas layanan kesehatan di Regional Sulawesi juga secara umum masih belum ada pada kondisi ideal. Saat ini, sudah terdapat minimal satu puskesmas pada setiap kecamatan di Regional Sulawesi. Sebagian besar puskesmas tersebut (86,7 – 98,9 persen) telah terakreditasi yang mencerminkan mutu layanan kesehatan yang sudah baik. Hampir seluruh puskesmas juga memiliki persediaan obat esensial dan imunisasi dasar lengkap untuk layanan kesehatan. Akan tetapi, fasilitas layanan kesehatan berupa rumah sakit masih tergolong rendah. Persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C di Regional Sulawesi berada pada kisaran 35,7 – 73,3 persen. Hanya

GAMBAR 147. HLS DAN RLS SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 148. PENGELUARAN PER KAPITA SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki persentase lebih tinggi daripada kondisi nasional sebesar 69,8 persen. Selain itu, kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas juga tergolong masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh persentase puskesmas dengan standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih rendah pada kisaran 17,7 – 52,1 persen. Beberapa puskesmas juga tidak memiliki dokter terutama pada puskesmas di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

Pada perilaku kesehatan masyarakat, beberapa indikator menunjukkan kondisi yang cukup baik. Masyarakat memiliki kesadaran untuk berupaya melakukan pencegahan dan penanganan masalah gizi. Upaya tersebut tercermin dari pemberian asi eksklusif dan penimbangan balita secara periodik. Cakupan pemberian asi eksklusif di Regional Sulawesi berada pada kisaran 46,9 – 77,9 persen, sudah melampaui target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan di tahun 2020 sebesar 40 persen. Sementara itu, persentase rata-rata bayi ditimbang setiap bulan menunjukkan kisaran 61,7 – 75,6 persen, lebih tinggi daripada persentase nasional 61,3 persen. Perilaku sehat lainnya ditunjukkan oleh pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga. Kondisi kesehatan kerja dan olahraga menunjukkan kondisi yang belum merata. Provinsi Sulawesi Utara memiliki persentase terendah di Regional Sulawesi untuk pelaksanaan kedua perilaku sehat di atas pada level kabupaten/kota, masing-masing sebesar 20 dan 6,7 persen. Akan tetapi, beberapa provinsi sudah melaksanakan perilaku kesehatan kerja dan olahraga secara menyeluruh seperti di Provinsi Gorontalo. Selain itu, di beberapa provinsi, sebagian besar wilayah

kabupaten/kota telah menerapkan kawasan tanpa rokok yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Adapun penerapan kawasan tanpa rokok di tiga provinsi lainnya, masih dilakukan di sebagian kecil kabupaten/kota.

Dilihat dari sisi lingkungan, kondisi kesehatan di Regional Sulawesi bervariasi. Upaya peningkatan kualitas air minum melalui aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, menunjukkan kondisi yang lebih baik (61,3 – 84,9 persen) daripada kondisi nasional sebesar 57,8 persen. Namun, kondisi di lima provinsi selain Provinsi Sulawesi Tengah, masih perlu upaya perbaikan karena hanya mencapai kisaran 61,3 – 69 persen. Sementara itu, kondisi rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan kondisi yang belum ideal, karena baru 72,75 persen rumah tangga yang dapat melakukan hal tersebut. Adapun kondisi akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat masih perlu dilakukan perbaikan kondisi karena baru 74,61 – 77,07 persen rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak. Selain itu, masih terdapat rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo (11,70 dan 12,77 persen) dengan status angka rumah tangga kumuh yang lebih tinggi daripada angka nasional, 10,04 persen.

Pada indeks pendidikan, kondisi komponen HLS dan RLS juga terus mengalami perbaikan. Peningkatan pada komponen pembentuk indeks pendidikan lebih baik daripada peningkatan pada komponen pembentuk indeks kesehatan. Secara khusus, kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin dari angka RLS mengalami peningkatan yang lebih baik daripada perbaikan kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tercermin dari angka HLS.

Pembangunan sistem pendidikan tertinggi di Regional Sulawesi berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Angka HLS di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 13,68 dengan pertumbuhan 3,32 persen dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, angka HLS terendah di Regional Sulawesi berada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 12,86 dengan tingkat pertumbuhan sepanjang enam tahun terakhir mencapai 4,21 persen. Perkembangan komponen HLS di Provinsi Sulawesi Barat menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Regional Sulawesi.

Upaya pembangunan sistem pendidikan terus dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sistem pendidikan. Berdasarkan data statistik pendidikan pada setiap jenjang pendidikan tahun 2020/2021 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah h terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 58.372 (38,92 persen) dari total 149.982 guru SD, 30.882 (44,58 persen) dari total 69.272 guru

TABEL 69. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017-2021

Wilayah	Kesehatan (Miliar Rp)						Pendidikan (Miliar Rp)						Ekonomi (Miliar Rp)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren
SULAWESI BARAT	89,05	116,40	89,15	69,12	84,76		410,28	466,54	522,78	565,17	724,09		1.106,82	1.130,24	1.099,90	597,47	1.195,56	
SULAWESI SELATAN	1.218,01	1.374,26	1.434,01	1.524,50	1.256,86		4.149,50	4.368,77	4.805,17	4.391,21	4.182,42		4.933,17	5.687,34	4.913,25	3.964,20	5.225,31	
SULAWESI TENGAH	142,37	201,42	207,47	146,56	174,12		1.130,67	1.110,74	1.420,99	1.251,40	1.601,76		3.024,95	2.783,64	2.463,44	2.148,72	2.381,98	
SULAWESI TENGGARA	115,99	184,01	164,04	104,86	128,31		1.114,57	1.172,11	1.509,91	1.296,32	1.372,53		2.577,13	2.414,04	2.467,73	2.027,35	2.950,47	
SULAWESI UTARA	743,28	918,39	926,39	990,11	784,46		1.411,12	1.613,60	1.654,56	1.561,57	1.512,65		3.776,89	4.252,36	3.220,74	2.076,07	3.577,98	
SULAWESI	2.308,70	2.794,48	2.821,05	2.835,15	2.428,50		8.216,13	8.731,77	9.913,41	9.065,68	9.393,46		15.418,97	16.267,62	14.165,05	10.813,81	15.331,31	

SMP, 16.018 (44,94 persen) dari total 35.645 guru SMA, dan 10.702 (42,29 persen) dari total 25.307 guru SMK merupakan guru baru dalam lima tahun terakhir. Selain itu, upaya peningkatan guru, tidak hanya dilakukan dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Sebanyak 94,87 persen guru SMK, 98,06 persen guru SMA, 97,35 persen guru SMP, dan 92,76 persen guru SD merupakan lulusan di atas sarjana.

Perbaikan fasilitas sekolah dilakukan dalam bentuk perbaikan secara kuantitas dan kualitas. Penambahan kuantitas sekolah di Regional Sulawesi berfokus pada jenjang SMP dan SMA. Penambahan kuantitas sekolah pada jenjang tersebut terjadi hampir di seluruh provinsi. Adapun kuantitas sekolah jenjang SMK mengalami penurunan di seluruh provinsi. Sementara itu, pada tingkat SD penambahan kuantitas sekolah hanya terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Selain kuantitas sekolah, perbaikan dari segi kuantitas juga dilakukan terhadap ruang kelas. Kuantitas ruang kelas mengalami penambahan pada seluruh jenjang di seluruh provinsi di Regional Sulawesi. Selain itu, pemeliharaan terhadap ruang kelas terus dilakukan, sehingga sampai dengan tahun ajaran 2020/2021 kondisi pada hampir seluruh ruang kelas pada semua jenjang di seluruh provinsi tergolong baik dan rusak ringan.

Upaya perbaikan juga terus dilakukan pada fasilitas penunjang lainnya, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar, maupun tidak berkaitan langsung. Penambahan fasilitas penunjang yang berkaitan langsung dilakukan terhadap laboratorium dan perpustakaan dengan pemeliharaan yang rutin dilakukan, sehingga kualitas kedua fasilitas tersebut tergolong baik dan rusak ringan pada semua jenjang di seluruh provinsi. Sementara itu, objek perbaikan fasilitas penunjang yang tidak berkaitan langsung adalah berupa UKS dan sanitasi sekolah.

Kualitas pendidikan masyarakat tertinggi di Regional Sulawesi berada di Provinsi Sulawesi Utara. Capaian angka RLS di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 9,62 dengan peningkatan 7,37 persen dari tahun 2016. Sementara itu, capaian angka RLS terendah berada

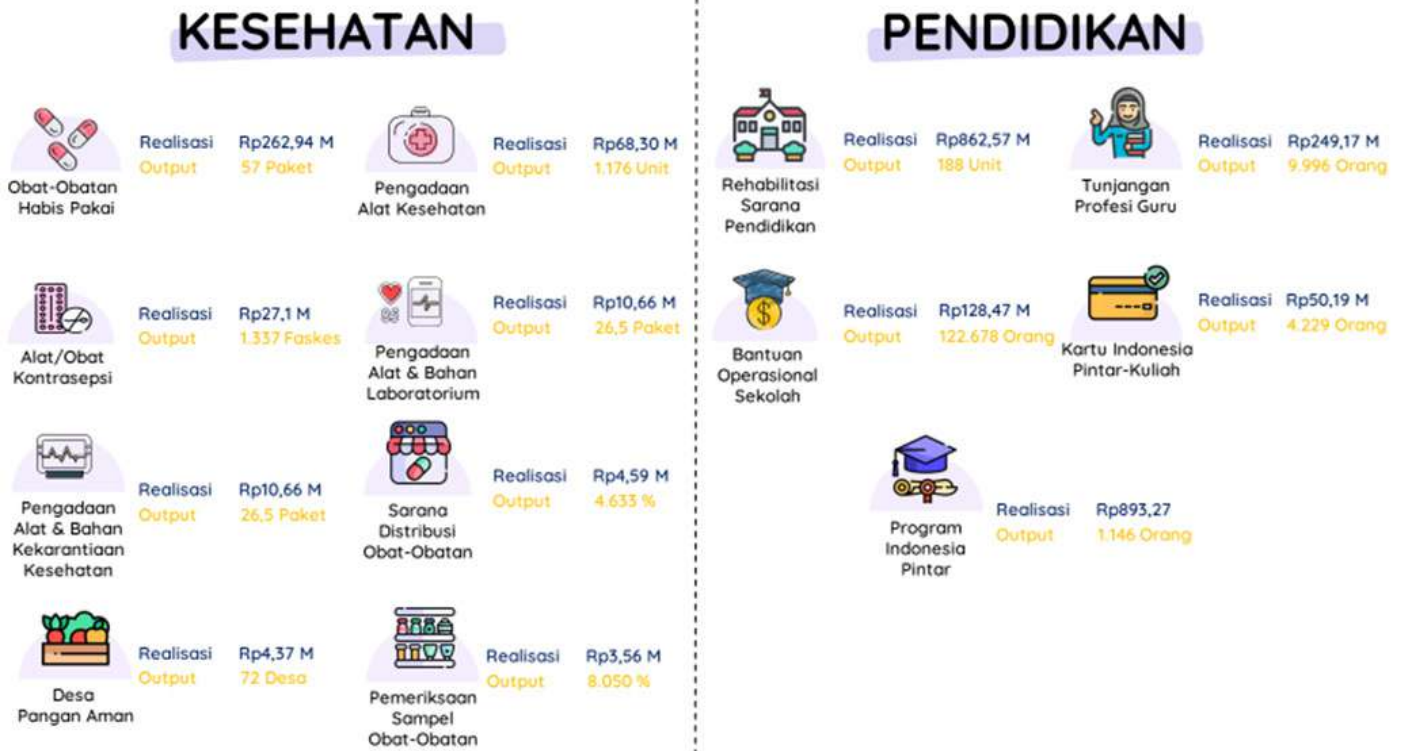
di Provinsi Sulawesi Barat dengan capaian 7,96. Angka RLS di Provinsi Sulawesi Barat meningkat sebesar 11,48 persen dalam enam tahun terakhir.

Rendahnya RLS di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat dibandingkan provinsi lain di Regional Sulawesi, selaras dengan tingginya tingkat kemiskinan di kedua provinsi tersebut. Realita ini mengindikasikan kondisi perekonomian keluarga menjadi hambatan untuk minat sekolah/belajar. Anak cenderung memilih untuk membantu orang tua bekerja di ladang/kebun atau di laut, mengingat sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor yang mendominasi perekonomian di kedua provinsi tersebut dengan kontribusi di Provinsi Gorontalo sebesar 39,92 persen dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 43,66 persen. Selain itu, mindset yang terbangun di tengah masyarakat adalah pekerjaan di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tidak memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi. Kondisi ini juga memengaruhi angka putus sekolah di kedua provinsi tersebut. Angka putus sekolah pada jenjang SMP di Provinsi Gorontalo sebesar 0,32 persen dan di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,19 persen, lebih tinggi dari angka putus sekolah nasional sebesar 0,11 persen.

Indeks pengeluaran yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita sempat terhambat di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Terhentinya aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat, menyebabkan kontraksi pengeluaran per kapita pada seluruh provinsi di Regional Sulawesi di tahun 2020 secara YoY. Namun, membaiknya kondisi penanganan Covid-19 dan akselerasi vaksinasi di tahun 2021 menghasilkan perbaikan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat di Regional Sulawesi kembali meningkat, meskipun sebagian belum kembali ke level sebelum pandemi.

Secara umum, seluruh provinsi mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dari tahun 2016. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp11.184, mengalami peningkatan 5,53 persen dari tahun 2016. Sementara itu, pengeluaran per kapita terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp9.153.

GAMBAR 149. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL SULAWESI



Sumber: BPS, diolah

Namun, pola konsumsi yang tercermin dari angka pengeluaran per kapita di Provinsi Sulawesi Barat tumbuh mencapai 6,41 persen dalam enam tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi kedua setelah Provinsi Sulawesi Utara di Regional Sulawesi.

Upaya pemerintah dalam mendukung perbaikan kondisi pembangunan manusia di Regional Sulawesi melalui belanja pemerintah mengalami perlambatan seiring pandemi Covid-19. Dukungan pemerintah melalui belanja berdasarkan fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mengalami tren menurun pada tahun 2020 di hampir seluruh provinsi. Pada tahun 2020 pemerintah melakukan refocusing dan realokasi belanja untuk program PC-PEN. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan yang harus tertunda. Namun, seiring perbaikan kondisi Covid-19 dengan penanganan yang lebih baik, realisasi anggaran belanja pendidikan dan kesehatan kembali meningkat di tahun 2021 dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda. Hanya realisasi belanja kesehatan yang tetap mengalami penurunan di tahun 2021.

Komposisi tiga belanja pemerintah berdasarkan fungsi menunjukkan belanja fungsi ekonomi memiliki kontribusi yang lebih tinggi daripada fungsi kesehatan dan pendidikan. Kontribusi belanja ekonomi di Regional Sulawesi sebesar 56,78 persen, sedangkan kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar 8,58 persen dan 34,65 persen. Hal ini disebabkan cakupan belanja ekonomi yang lebih luas, sedangkan

belanja kesehatan dan pendidikan lebih spesifik.

Komposisi dari sisi lokasi, menunjukkan kontribusi Provinsi Sulawesi Selatan menjadi yang tertinggi. Kontribusi Provinsi Sulawesi Selatan di belanja kesehatan sebesar 49,83 persen, pendidikan sebesar 41,04 persen, dan ekonomi sebesar 31,29 persen. Sementara itu, kontribusi terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat yaitu belanja kesehatan sebesar 3,36 persen, pendidikan sebesar 7,10 persen, dan ekonomi sebesar 7,16 persen. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang menjadi pusat aktivitas perekonomian di Regional Sulawesi, sehingga aktivitas dan kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan lebih banyak dan intens.

APBN terus bekerja keras dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Regional Sulawesi. Dukungan melalui postur belanja fungsi kesehatan sebagian besar diarahkan untuk mendukung aspek layanan kesehatan baik untuk layanan dasar, maupun rujukan. Penguatan layanan puskesmas dan rumah sakit melalui pengadaan alat kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar, serta pembinaan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan. Upaya pemerataan layanan kesehatan juga terus dilakukan melalui pengembangan prasarana dasar puskesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK). Tahun 2020, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat menjadi fokus upaya pemerataan pelayanan kesehatan DTPK. Selain itu, sebagai respon atas status Provinsi Sulawesi Barat yang menempati

urutan ke-dua daerah rawan bencana (sesuai indeks risiko bencana yang diterbitkan BNPB), pembinaan atas implementasi Public Safety Center (PSC) 119 menjadi manifestasi dukungan APBN.

Penguatan juga terus dilakukan untuk komponen lain dalam aspek layanan kesehatan. Pengendalian penyakit merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran derajat kesehatan masyarakat. Bentuk upaya APBN dilakukan melalui mitigasi potensi penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Pencegahan juga dilakukan dengan kegiatan imunisasi PD3I. Selain itu, bentuk lainnya dilakukan melalui pelayanan kekarantina kesehatan dalam rangka memutus sebaran penyakit yang berpotensi menular baik secara langsung, maupun tidak langsung. Selebihnya dukungan APBN diarahkan untuk mengendalikan penyakit-penyakit tertentu seperti Tuberkulosis, HIV/AIDS, Hepatitis, IMS, ISPA, Kanker, Kusta, serta penyakit tular vektor dan zoonosis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tahun 2020, upaya pengendalian penyakit di Regional Sulawesi berfokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Ketersediaan obat-obatan esensial dan pengawasan mutu obat dan makanan serta kesehatan ibu dan anak tidak luput dari dukungan APBN. APBN senantiasa menjaga ketersediaan obat dengan pengawasan mulai dari pengujian sampel hingga distribusi obat dan makanan. Adapun dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak sebagian besar dilakukan untuk intervensi stunting. Penguatan paket gizi dan penyediaan makanan tambahan pada ibu hamil dan balita, peningkatan layanan persalinan di fasilitas kesehatan, dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kunjungan neonatal dan antenatal menjadi langkah nyata APBN dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan manusia di Regional Sulawesi.

Aspek lingkungan dan perilaku kesehatan masyarakat juga tidak lepas dari dukungan APBN. Pada aspek lingkungan, pembangunan infrastruktur dan pengawasan untuk penyediaan air minum dan akses terhadap sanitasi yang layak dilakukan di seluruh provinsi. Perbaikan kondisi atas kedua komponen tersebut juga turut menjangkau DTPK. Dukungan terbesar dalam aspek lingkungan dialokasikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang dalam masa pemulihan setelah mengalami bencana gempa tsunami pada tahun 2018. Sementara itu, dukungan APBN terhadap aspek perilaku kesehatan dialokasikan untuk KKBPK, program Germas Hidup Sehat, dan Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Pengendalian konsumsi rokok terus digalakan di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Adapun pembentukan perilaku kesehatan masyarakat sejak dini, dialokasikan terhadap pembinaan untuk

posyandu aktif di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Pada sektor pendidikan, APBN senantiasa menyokong pembangunan sistem dan kualitas pendidikan. Kualitas hasil pendidikan tidak terlepas dari keberadaan seorang guru yang merupakan figur sentral dalam dunia pendidikan. Dalam rangka menjaga rasio guru dengan siswa tetap ideal, kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas dalam dukungan terhadap dunia pendidikan. Dukungan APBN berupaya menjangkau berbagai level guru, khususnya guru Non PNS. Berbagai program diberikan kepada para guru Non PNS seperti Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Insentif lainnya. Keberadaan reward tersebut diharapkan dapat memotivasi para guru untuk memberikan layanan yang optimal bagi pembangunan dunia pendidikan. Pemberian insentif kepada guru non PNS disalurkan oleh seluruh provinsi, tetapi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara merupakan kedua provinsi tertinggi dalam penyaluran. Meskipun kedua provinsi tersebut merupakan provinsi yang paling maju dari segi pendidikan dibandingkan provinsi lain di Regional Sulawesi, upaya peningkatan kualitas pendidikan senantiasa berlangsung guna mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Selain itu, benefit lain diberikan dalam bentuk pengembangan diri. Berbagai pelatihan dan dukungan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi menjadi manifestasi dukungan APBN. Seluruh provinsi di Regional Sulawesi terus berbenah untuk meningkatkan kompetensi para guru. Secara khusus, Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi yang paling peduli dengan pengembangan kualitas guru, seiring tingginya realisasi APBN untuk program pengembangan kompetensi guru. Upaya peningkatan kapasitas dan kualitas guru diharapkan dapat membangun iklim pendidikan yang lebih kondusif dan berkualitas.

Dukungan lain dari APBN diwujudkan dalam bentuk BOS dan BOP. Setiap tahunnya, APBN senantiasa menyalurkan BOP dan BOS, sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat yang mengalami kendala dari sisi finansial. Keberadaan BOS dan BOP diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti pendidikan. APBN juga memberikan dukungan dalam bentuk lain yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada para siswa. Dukungan tersebut berupa program PIP/KIP, Bidikmisi, dan beasiswa dalam bentuk lainnya. Program beasiswa dari pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan biaya personal siswa seperti perlengkapan sekolah, uang transportasi, uang saku, dan biaya lainnya. Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi yang paling gencar dalam menyalurkan program beasiswa APBN untuk mendorong masyarakat mengenyam pendidikan yang lebih baik.

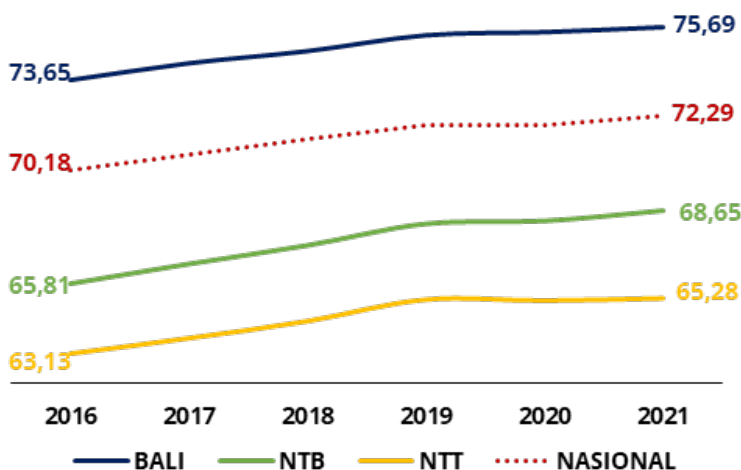
Pengembangan fasilitas pendidikan terus dilakukan

untuk sistem pendidikan yang lebih baik. Pemerintah senantiasa melakukan pembangunan dan perbaikan infrastuktur sarana pendidikan. Pembangunan dan perbaikan juga turut dilakukan untuk sarana dan prasarana pendukung lain seperti meubelair, laboratorium komputer, UKS, sanitasi, perpustakaan serta sarana pendukung lainnya. Upaya pemerintah menunjukkan hasil yang dapat dilihat dari status fasilitas penunjang pendidikan. Hampir tidak terdapat bangunan dengan status rusak sedang dan berat di Regional Sulawesi. Selain Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi APBN untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan disalurkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah terus berbenah setelah mengalami musibah tsunami gempa pada tahun 2018 yang lalu.

APBN juga turut mendukung pengembangan sistem pendidikan dalam bentuk yang lain. Pengembangan sistem pendidikan dilakukan berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah didukung APBN. Salah satu objek pengembangan sistem adalah kurikulum pembelajaran. Program lainnya adalah upaya akreditasi sekolah yang merupakan salah satu standar dalam upaya menjamin kualitas pendidikan di sekolah. Guna mewujudkan hal tersebut, pembinaan terus dilakukan baik kepada sekolah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Adapun upaya pengembangan sistem pendidikan paling tinggi disalurkan untuk Provinsi Gorontalo yang merupakan provinsi dengan indeks pendidikan terendah kedua setelah Provinsi Sulawesi Barat.

Tahun 2021, dukungan fiskal APBN di Regional Sulawesi pada bidang kesehatan berfokus pada peningkatan lingkungan, serta layanan dan perilaku kesehatan. Dari ketiga objek tersebut, layanan kesehatan menjadi objek prioritas dalam peningkatan. Output utama pada layanan kesehatan berupa RO obat-obatan serta alat dan bahan pendukung kesehatan.

GAMBAR 150. CAPAIAN IPM



Sumber: BPS, diolah

GAMBAR 152. IPM BALI NUSRA



Sumber: BPS, diolah

Sementara itu, pada objek perilaku kesehatan prioritas dukungan fiskal ditujukan untuk RO alat dan obat kontrasepsi. Selanjutnya pada objek lingkungan, desa pangan aman menjadi prioritas peningkatan kualitas kesehatan di Regional Sulawesi.

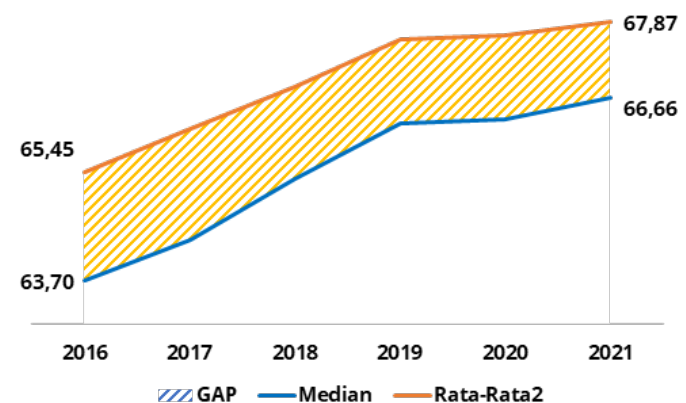
Pada sektor pendidikan, dukungan fiskal APBN tahun 2021 di Regional Sulawesi senantiasa berupaya untuk meningkatkan indikator sistem pembangunan dan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan sistem pembangunan pendidikan menitikberatkan pada peningkatan mutu sarana pendidikan dan kesejahteraan guru. Sementara itu, bantuan operasional sekolah dan program bantuan tunai berupa KIP dan PIP menjadi fokus utama peningkatan kualitas pendidikan di Regional Sulawesi.

2.V. PERKEMBANGAN IPM REGIONAL BALI NUSRA

Sepanjang lima tahun terakhir, tingkat IPM provinsi-provinsi di Bali-Nusra terus mengalami perbaikan. Meskipun sempat melambat dan beberapa menurun di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, perkembangan IPM di Regional Bali Nusra di tahun 2021 nampak mulai melanjutkan kenaikan.

Pada tahun 2021, Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021. Capaian IPM

GAMBAR 151. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL BALI-NUSRA



Sumber: BPS, diolah

tertinggi diraih oleh Provinsi Bali sebesar 75,69, cukup jauh dibanding provinsi NTB yang mencapai 68,65 dan NTT yang mencapai 65,28. Hanya NTT yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD sebesar 65,54 atau masih kurang 0,26 poin. Secara keseluruhan di regional Bali-Nusra, pertumbuhan IPM rata-rata Tahun 2021 mencapai 0,32%. Nilai tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya tumbuh rata-rata 0,06% dari tahun 2019. Hal tersebut sedikit banyak berkaitan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Tahun 2020.

Sebagai kawasan andalan pariwisata di Kawasan Indonesia bagian tengah, peningkatan IPM dalam enam tahun terakhir cukup tinggi dibandingkan regional lain, namun hanya Bali yang mempunyai IPM di atas nilai Nasional. Peningkatan tertinggi dalam enam tahun terakhir dalam regional Bali-Nusra dicapai oleh Nusa Tenggara Barat yang mencapai 4,32% yang merupakan peningkatan tertinggi ke-4. Hal ini tidak lepas dari adanya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang cukup mendorong IPM wilayah Nusa Tenggara Barat dibanding wilayah lain yang tanpa KEK. Sedangkan Provinsi Bali yang sejak 2016 sudah mencapai IPM 73,65 nampak sudah mengalami perlambatan peningkatan sehingga hanya mencapai 2,77%.

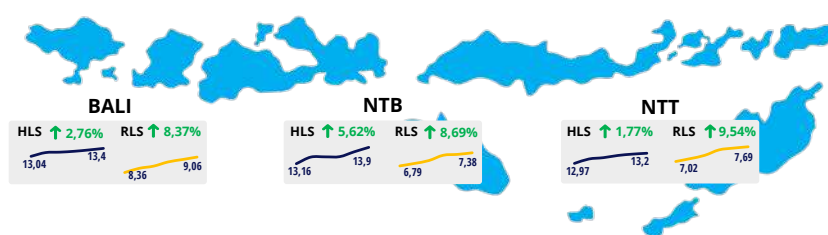
Pada level regional, disparitas capaian IPM antar provinsi menunjukkan kondisi yang belum merata. Selisih capaian IPM antara Provinsi Bali (75,69) sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (65,28) sebesar 10,41 poin. Namun selisih tersebut sudah sedikit menurun dibandingkan kondisi enam tahun lalu yang mencapai 10,52 poin, menunjukkan upaya pemerataan antar wilayah di Regional Bali-Nusra cukup menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih tergolong tinggi. Hal ini juga diakibatkan Provinsi Bali yang memang telah lama menjadi destinasi pariwisata terbesar di Indonesia yang banyak dikenal di seluruh dunia.

Grafik menunjukkan perkembangan rata-rata dan nilai tengah capaian IPM sampai level provinsi dan kabupaten/kota di Regional Bali Nusra, serta gap antara rata-rata dan nilai tengah tersebut. Grafik tersebut menunjukkan terdapat penyempitan gap antara rata-rata dengan nilai tengah dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan pembangunan di wilayah tertinggal mulai terakselerasi dengan baik untuk mengejar ketertinggalan dari daerah dengan capaian yang lebih baik.

Pada indeks kesehatan, kondisi komponen UHH terus mengalami perbaikan. Dalam enam tahun terakhir, UHH seluruh provinsi di Regional Bali-Nusra terus meningkat. Pelayanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku kesehatan masyarakat terus membaik.

Derajat kesehatan yang direpresentasikan dengan

GAMBAR 153. HLS DAN RLS BALI-NUSRA



Sumber: BPS, diolah

UHH tertinggi pada Regional Bali-Nusra berada di Provinsi Bali. Angka UHH Provinsi Bali tahun 2021 sebesar 72,24. Angka tersebut mengalami peningkatan 1,16 persen dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, UHH terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan angka 66,69, meski mengalami peningkatan 1,85 persen dalam enam tahun terakhir. Hanya Provinsi Bali yang memiliki angka UHH diatas capaian Nasional sebesar 71,57. Tingginya angka UHH ditopang juga dengan tingginya cakupan pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil di Provinsi bali yang mencapai angka 96,1 pada Tahun 2020, tertinggi ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Utara. NTB sendiri mencapai peringkat 4 dengan angka 95,7, sedangkan NTT tertinggal jauh di angka 59,6. Di sisi lain, NTB mempunyai persentase Ibu Hamil Positif HIV yang cukup tinggi (0,88%) jika dibandingkan NTT (0,30%) dan Bali (0,32%) pada Tahun 2020. Angka kecukupan Dokter juga mengindikasikan adanya Gap dimana Bali mempunyai 90,8% dokter berlebih, sedangkan NTB kekurangan 40,3% dan NTB 13,3%. (Kemenkes RI, 2021).

Dilihat dari sisi lingkungan, kondisi kesehatan di Regional Bali Nusra cukup baik. Upaya peningkatan kualitas air minum melalui aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, menunjukkan kondisi yang cukup baik karena sudah diatas Target RPJMN. Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat tertinggi di Regional Bali Nusra (71,9). Sementara itu, kondisi rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak di Provinsi Bali menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta (97,36). Adapun kondisi akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga masih perlu dilakukan perbaikan karena baru 69,7 persen rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi layak. Selain itu, masih terdapat rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan status angka rumah tangga kumuh sebesar 31,17, cukup jauh di atas angka nasional sebesar 10,04 persen dan merupakan yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua.

Pada indeks pendidikan, kondisi komponen HLS dan RLS juga terus mengalami perbaikan. Peningkatan pada komponen pembentuk indeks pendidikan lebih baik daripada peningkatan pada komponen pembentuk indeks kesehatan. Secara khusus, kualitas

TABEL 70. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017-2021

Wilayah	Kesehatan (Miliar Rp)						Pendidikan (Miliar Rp)						Ekonomi (Miliar Rp)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren
BALI	974,55	1.051,44	1.049,37	1.104,93	1.020,90		1.990,52	2.086,30	2.401,38	2.179,15	2.474,98		1.692,10	2.047,52	2.208,99	1.804,71	2.838,45	
NUSA TENGGARA BARAT	123,81	186,32	209,39	143,64	163,94		2.006,67	1.941,90	2.160,43	2.301,98	1.878,81		2.493,25	2.431,62	2.469,50	2.740,80	3.904,57	
NUSA TENGGARA TIMUR	173,84	316,09	269,45	186,99	226,18		1.133,80	1.139,13	1.307,06	1.508,47	1.702,52		4.285,83	4.460,26	4.012,34	4.111,57	5.549,31	
BALI NUSRA	1.272,21	1.553,85	1.528,21	1.435,57	1.411,02		5.130,99	5.167,34	5.868,87	5.989,60	6.056,32		8.471,18	8.939,39	8.690,83	8.657,08	12.292,34	

pendidikan masyarakat yang tercermin dari angka RLS mengalami peningkatan yang lebih baik daripada perbaikan kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tercermin dari angka HLS.

Pembangunan sistem pendidikan tertinggi di Regional Bali Nusra berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Angka HLS di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 13,9 atau hampir setara dengan Diploma I/II dengan pertumbuhan 5,62 persen dalam enam tahun terakhir. Tingginya capaian HLS di Nusa Tenggara Barat tersebut selaras dengan tingginya persentase kepala sekolah dan guru yang layak pada jenjang SD sebesar 93,91 persen; SMP 97,89 persen; SMK 96,69 persen, dan SMA 98,62 persen.

Sementara itu, angka HLS terendah di berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 13,2 dengan tingkat pertumbuhan sepanjang enam tahun terakhir mencapai 1,77 persen yang sekaligus menjadi pertumbuhan yang terendah dibandingkan provinsi lain di Regional Bali Nusra. Hal ini juga dapat dilihat dari persentase kepala sekolah dan guru yang layak pada jenjang SD sebesar 92,32 persen; SMP 96,35 persen; SMK 93,67 persen, yang semuanya memiliki nilai paling rendah diantara 2 provinsi lainnya di Regional Bali Nusra. Hanya tingkat SMA (97,58 persen) yang berhasil mengungguli Bali di angka 96,58 persen

Kualitas pendidikan masyarakat tertinggi di Regional Bali-Nusra berada di Provinsi Bali. Capaian angka RLS di Provinsi Bali sebesar 9,06 dengan peningkatan 8,37 persen dari tahun 2016. Capaian kualitas pendidikan Provinsi Bali tersebut selaras dengan rendahnya angka mengulang sekolah jenjang SD rata-rata sebesar 0,05 persen; SMP 0,02 persen; SMK 0,04 persen dan SMA 0,0 persen. Dari sisi angka putus sekolah, rata-rata jenjang SD sebesar 0,04 persen; SMP 0,02 persen; SMK 0,03 persen; dan SMA 0,04 persen. Sementara itu, capaian angka RLS terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan capaian 7,38 yang meningkat 8,69 persen, sedangkan Nusa Tenggara Timur naik 9,54% dalam enam tahun terakhir yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam regional Bali-Nusra. Peningkatan pembangunan sistem pendidikan dan kualitas pendidikan masyarakat tersebut menjadi sinyal positif dan menjadi momentum yang harus dijaga dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan

di Regional Bali Nusra.

Pemerintah terus berupaya membangun sistem pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana sistem pendidikan. Berdasarkan data statistik pendidikan pada setiap jenjang pendidikan tahun 2020/2021 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah guru terus meningkat dalam lima tahun terakhir di regional Bali Nusra. Sebanyak 42.981 (38,51 persen) dari total 111.612 guru SD; 25.430 (44,15 persen) dari total 57.595 guru SMP; 11.487 (39,65 persen) dari total 28.969 guru SMA; dan 8.946 (43,64 persen) dari total 20.499 guru SMK merupakan guru baru dalam lima tahun terakhir di regional Bali Nusra. Selanjutnya, upaya peningkatan kuantitas tenaga pendidik saat ini cukup optimal. Hal ini tercermin dari perbandingan antara jumlah guru dengan siswa jenjang SD regional Bali Nusra rata-rata 1:14; SMP 1:12; SMA 1:14; dan SMK 1:14. Upaya peningkatan tenaga pendidikan, tidak hanya dilakukan dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Sebanyak 94,57 persen tenaga pendidik SD, 97,45 persen tenaga pendidik SMP, 97,59 persen tenaga pendidik SMA, dan 95,2 persen tenaga pendidik SMK merupakan lulusan di atas sarjana.

Indeks pengeluaran yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita sempat terhambat di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Terhentinya aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat, menyebabkan kontraksi pengeluaran per kapita pada seluruh provinsi di Regional Bali Nusra di tahun 2020 secara YoY. Namun, membaiknya kondisi penanganan Covid-19 dan akselerasi vaksinasi di tahun 2021 menghasilkan perbaikan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat di Regional Bali Nusra kembali meningkat, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi.

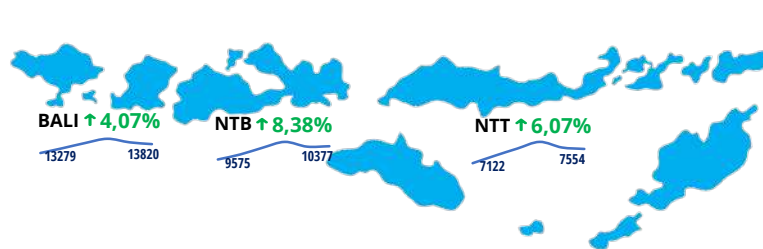
Secara umum, seluruh provinsi mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dari tahun 2016. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Provinsi Bali sebesar Rp13.820, mengalami peningkatan 4,07 persen dari tahun 2016. Sementara itu, pengeluaran per kapita terendah berada di Provinsi NTT sebesar Rp7.554. Namun, pola konsumsi yang tercermin dari angka pengeluaran per kapita di Provinsi NTT tumbuh

mencapai 6,07 persen dalam enam tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi kedua setelah Provinsi NTB yang naik 8,38 persen pada regional Bali Nusra.

Upaya pemerintah dalam mendukung perbaikan kondisi pembangunan manusia di Regional Bali Nusra melalui belanja pemerintah mengalami perlambatan karena dampak negatif pandemi Covid-19. Dukungan pemerintah melalui belanja K/L berdasarkan fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi nampak variatif. Tren menunjukkan untuk Provinsi Bali belanja sektor kesehatan meningkat, sedangkan sektor pendidikan dan ekonomi menurun pada Tahun 2020. Sebaliknya pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Timur, belanja di sektor pendidikan dan ekonomi justru di genjot, sedangkan untuk kesehatan nampak menurun signifikan di Tahun 2020. Pada 2021, Realisasi anggaran belanja pendidikan, kesehatan dan ekonomi kembali meningkat terutama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda. Penurunan nampak hanya terjadi pada Belanja kesehatan di Bali dan Belanja Pendidikan di Nusa Tenggara Barat

Komposisi tiga belanja pemerintah berdasarkan fungsi menunjukkan belanja fungsi ekonomi memiliki kontribusi yang lebih tinggi daripada fungsi kesehatan dan pendidikan. Kontribusi belanja ekonomi di Regional Bali Nusra pada 5 tahun terakhir sebesar 57,06 persen, sedangkan kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar 34,21 persen dan 8,73 persen. Hal ini disebabkan cakupan belanja ekonomi yang lebih luas, sedangkan belanja kesehatan dan pendidikan lebih spesifik serta sebagian besar sudah dianggarkan pada belanja pemerintah daerah

GAMBAR 154. PENGELUARAN PER KAPITA BALI-NUSRA



Sumber: BPS, diolah

provinsi maupun kabupaten/kota

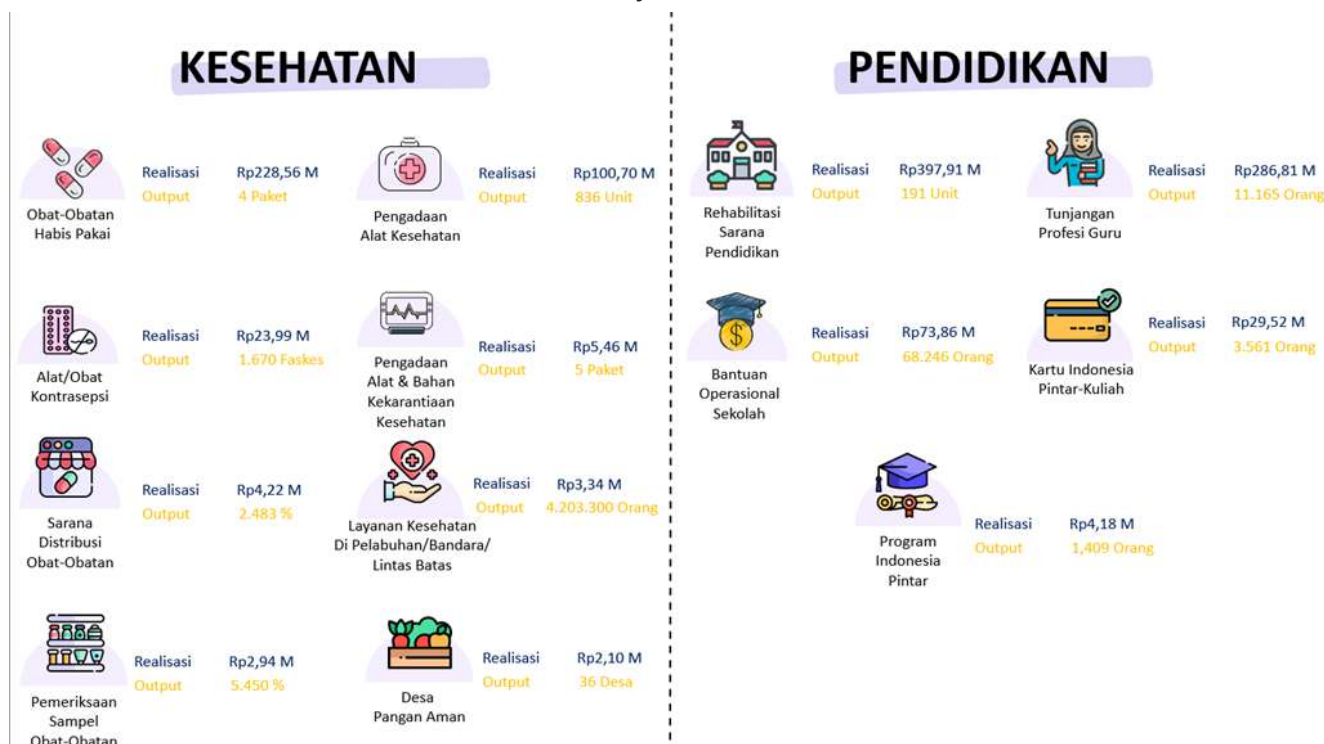
Komposisi dari sisi lokasi, menunjukkan kontribusi Nusa Tenggara Timur menjadi yang tertinggi. Kontribusi Nusa Tenggara Timur menjadi yang terbesar diantara 3 Fungsi penunjang IPM di Regional Bali Nusra dipengaruhi belanja ekonomi yang mencapai 47,65 persen dalam 5 tahun terakhir dibanding Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, kontribusi di sektor Kesehatan dan Pendidikan dalam 5 tahun terakhir didominasi pada Provinsi Bali yang mencapai masing-masing 72,23 persen dan 39,46 persen.

Tahun 2021, dukungan fiskal APBN di Regional Bali Nusra pada bidang kesehatan masih berfokus pada

TABEL 71. BELANJA SUB-FUNGSI KESEHATAN PERORANGAN REGIONAL BALI NUSRA TA 2017-2021 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Bali	826,95	850,22	865,40	962,62	0,16
NTB	2,62	2,21	1,87	0,44	1,28
NTT	3,71	3,33	2,50	0,67	1,71

GAMBAR 155. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL BALI-NUSRA



Sumber: BPS, diolah

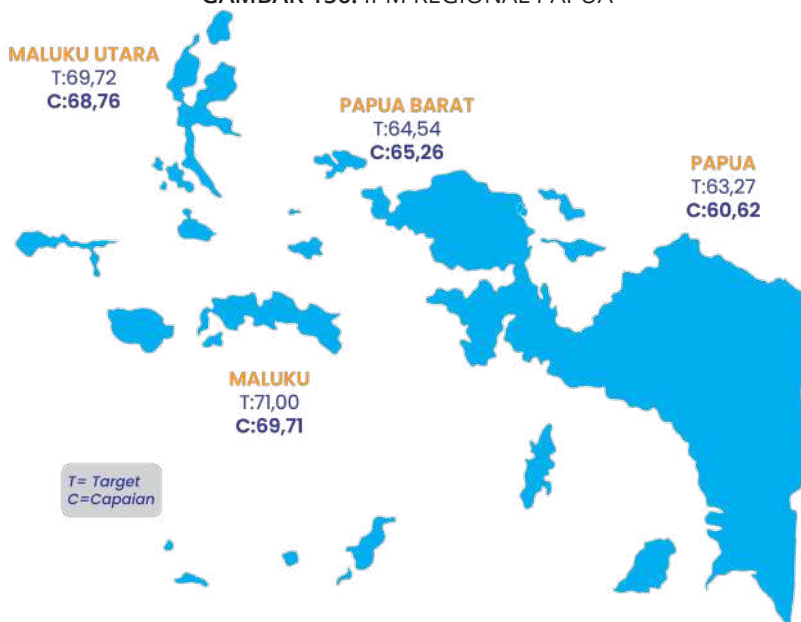
penanganan pandemi Covid-19. Output dengan realisasi terbesar berupa Obat obatan habis pakai terealisasi sebesar Rp228,56M dengan jumlah output mencapai 4 Paket. Realisasi terbesar kedua berupa pengadaan alat kesehatan sebesar Rp100,7 M yang telah menghasilkan 836 unit alkes.

Sub-Fungsi Pelayanan Kesehatan Perorangan memegang peranan tingginya UHH pada Provinsi Bali yang selama Tahun 2017-2020 mempunyai alokasi belanja yang paling besar yakni selalu di atas Rp800 miliar jika dibanding NTB dan NTT yang tiap tahunnya hanya berkisar paling tinggi sekitar Rp3,7 miliar, bahkan pada TA 2020 angkanya tidak sampai Rp700 juta. Mulai TA 2021 belanja Fungsi Pelayanan Kesehatan Perorangan Prov. Bali turun drastis hingga hanya mencapai angka Rp156 juta, sebaliknya NTB dan NTT naik Capaian tertinggi persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2020 yakni sebesar 100%.

Pada sektor pendidikan, dukungan fiskal APBN tahun 2021 di Regional Bali Nusra fokus dalam rehabilitasi sarana prasarana. Upaya peningkatan sistem pembangunan pendidikan menitikberatkan pada peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan dengan realisasi Rp379,31M dengan capaian 191 unit sarpras, disamping Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp286,81 M kepada 11 ribu orang sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas SDM pendidik, serta Rp73,86M Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang kepada 68.246 orang.

2.VI. PERKEMBANGAN IPM REGIONAL PAPUA

GAMBAR 156. IPM REGIONAL PAPUA



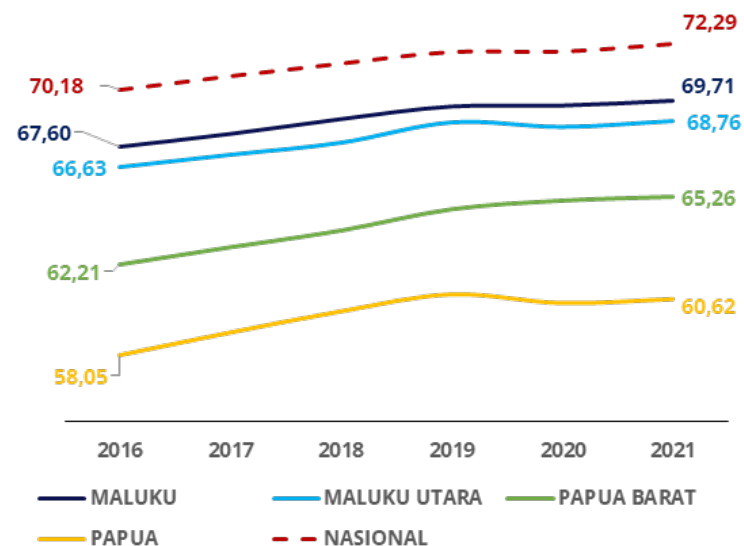
Sumber: BPS, diolah

IPM provinsi-provinsi di Regional Maluku-Papua mengalami pertumbuhan positif dalam enam tahun terakhir. Namun, capaian IPM seluruh provinsi di Regional Maluku-Papua masih lebih rendah daripada IPM nasional. Sejalan dengan capaian yang rendah, pertumbuhan IPM berkisar di antara 0,26 persen sampai dengan 0,44 persen

Tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan nasional sebesar 0,53 persen. Hal ini mengindikasikan upaya pemerataan pembangunan yang masih belum optimal. Sampai dengan tahun 2021, Regional Maluku-Papua masih menjadi regional dengan capaian IPM yang lebih rendah daripada regional lainnya

Pada tahun 2021, hanya provinsi Papua Barat yang mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021. Tiga provinsi lainnya di

GAMBAR 157. IPM PAPUA

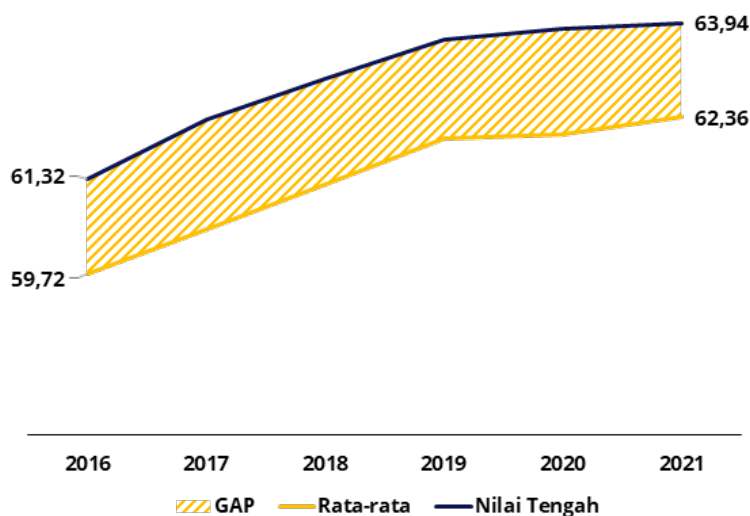


Sumber: BPS, diolah

Regional Maluku-Papua belum dapat mencapai target tahun 2021. Provinsi Papua memiliki gap capaian dengan target paling tinggi yang mencapai 4,19 persen. Gap tersebut lebih tinggi daripada gap Provinsi Maluku dan Maluku Utara masing-masing sebesar 1,82 persen dan 1,38 persen. Tingginya gap di Provinsi Papua disebabkan belum dilakukannya penyesuaian target IPM dengan kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, capaian IPM Provinsi Papua tahun 2021 juga lebih rendah daripada capaian pada tahun 2019 yang menunjukkan proses pembangunan masih tertahan akibat pandemi.

Rendahnya capaian IPM di Regional Maluku-Papua disebabkan oleh disparitas yang tinggi pada level kabupaten/kota. Terdapat kesenjangan pembangunan yang tinggi antar kabupaten/kota, khususnya antara ibu kota provinsi dengan kabupaten/kota di wilayah 3T. Pada grafik pada gambar Perkembangan

GAMBAR 158. PERKEMBANGAN RATA-RATA DAN NILAI TENGAH CAPAIAN IPM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI REGIONAL PAPUA



Sumber: BPS, diolah

rata-rata dan nilai tengah capaian IPM provinsi dan kabupaten/kota di Regional Papua menunjukkan angka nilai tengah yang lebih tinggi daripada rata-rata. Selain itu, dalam perkembangan selama enam tahun terakhir, tidak terdapat kecenderungan penyempitan antara nilai tengah dengan rata-rata. Grafik tersebut menunjukkan terdapat disparitas IPM yang tinggi antara sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki IPM rendah dengan sebagian kecil kabupaten/kota yang memiliki IPM yang lebih tinggi. Selain itu, berdasarkan perkembangan yang ada, upaya pemerataan antar wilayah masih belum memperlihatkan hasil yang optimal. Kondisi ini menjadi early warning bagi pemerintah dalam perumusan, perencanaan, serta implementasi program dan kegiatan agar upaya pemerataan dapat

berjalan lebih baik.

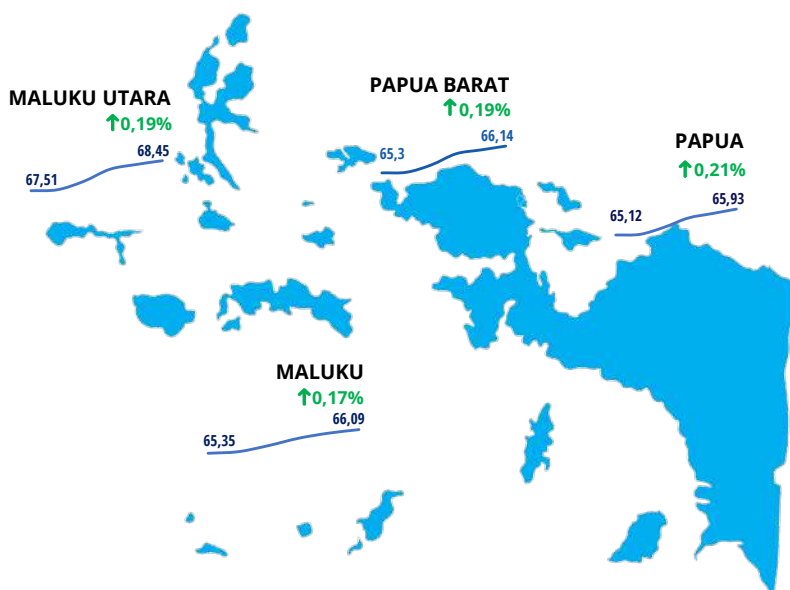
Pada indeks kesehatan, kondisi komponen UHH tumbuh positif. Dalam enam tahun terakhir, UHH seluruh provinsi di Regional Maluku-Papua mengalami pertumbuhan, tetapi pada angka yang cukup rendah. Meskipun pelayanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku kesehatan masyarakat terus membaik, hasil yang diperoleh masih belum sesuai dengan ekspektasi.

Derajat kesehatan yang direpresentasikan dengan UHH tertinggi pada Regional Maluku-Papua berada di Provinsi Maluku Utara. Angka UHH Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebesar 68,45. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,19 persen dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, UHH terendah berada di Provinsi Papua dengan angka 65,12. Angka UHH Provinsi Papua tumbuh positif 0,21 persen dalam enam tahun terakhir. Pertumbuhan UHH di Provinsi Sulawesi Barat merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Regional Maluku-Papua. Namun, dengan tingkat pertumbuhan tersebut, upaya untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya masih belum optimal.

Tingginya AKB di Regional Maluku-Papua, menjadi salah satu penyebab rendahnya UHH di Regional Maluku-Papua dibandingkan dengan regional yang lain. AKB terendah berada di Provinsi Papua dengan 4,63 bayi lahir mati dari setiap seribu kelahiran. Angka tersebut sedikit lebih tinggi daripada AKB nasional sebanyak 4,6. AKB tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara dengan 11,38 bayi lahir meninggal dari setiap seribu kelahiran. Adapun AKB di Provinsi Maluku sebesar 10,64, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 7,13. Rendahnya AKB Provinsi Maluku Utara, kontradiktif dengan angka UHH yang lebih tinggi daripada provinsi lain di Regional Maluku-Papua. Kondisi tersebut menjadi representasi bahwa indikator AKB merupakan salah satu indikator yang harus menjadi prioritas dalam peningkatan derajat kesehatan di Provinsi Maluku Utara.

Sejauh ini, fasilitas layanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin/nifas serta bayi di Regional Maluku-Papua lebih tertinggal dibandingkan provinsi lain. Seluruh provinsi memiliki persentase ibu hamil yang memperoleh layanan kesehatan lebih rendah daripada angka nasional sebesar 84,6 persen. Layanan kesehatan ibu hamil di Provinsi Papua menjadi yang paling rendah secara nasional dengan persentase 27,5 persen. Pun begitu halnya dengan Provinsi Papua Barat dengan persentase 34,5 persen. Adapun cakupan layanan kesehatan ibu hami di Provinsi Maluku sebesar 64,3 persen dan Provinsi Maluku Utara sebesar 70,7 persen. Pada periode hamil, cakupan pemberian tablet tambah

GAMBAR 159. UHH REGIONAL PAPUA



Sumber: BPS, diolah

darah di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku berada pada kisaran 25,3 – 50,8 persen, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebesar 69,1 persen. Kondisi tersebut tergolong mengkhawatirkan karena anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Selain itu, anemia defisiensi besi pada ibu hamil dapat berdampak pada tumbuh kembang janin/bayi pada periode kehamilan, maupun setelahnya. Pada indikator lain berupa makanan tambahan bagi ibu hamil KEK di Provinsi Papua dan Papua Barat tergolong rendah masing-masing mencakup 65,7 persen dan 73,6 persen. Angka tersebut lebih rendah dari cakupan nasional sebesar 89,0 persen. Indikator lain berupa ibu hamil yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan menunjukkan kondisi serupa. Tingkat ibu hamil yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan di seluruh provinsi berada pada kisaran 31,4 – 69,5 persen dan lebih rendah dari cakupan nasional sebesar 86,0 persen. Hal ini berlanjut pada pemberian imunisasi dasar lengkap pada seluruh provinsi di Regional Maluku-Papua yang lebih rendah dari cakupan nasional dan target dalam renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020.

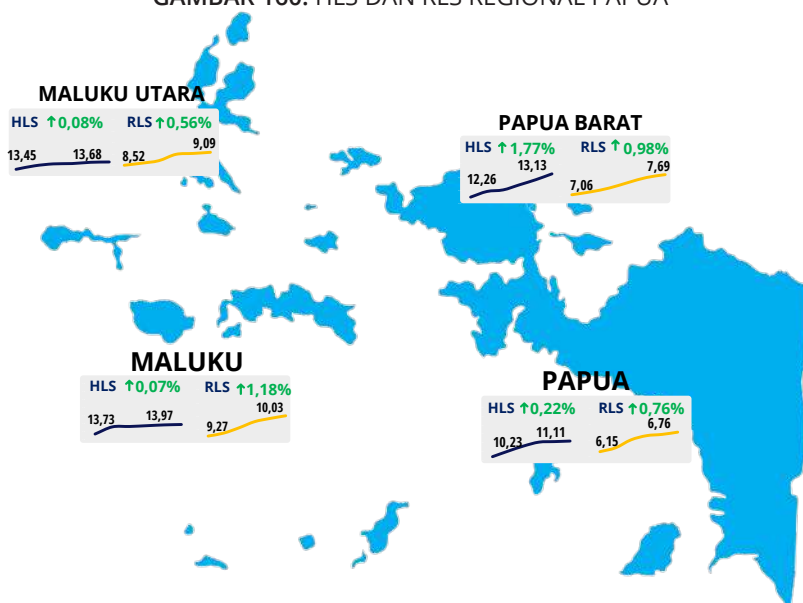
Sejalan dengan layanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin/nifas serta bayi, fasilitas layanan kesehatan dasar secara umum juga belum tergolong baik. Di Provinsi Papua dan Papua Barat, belum tentu terdapat puskesmas di setiap kecamatan karena memiliki rasio 0,7 – 0,8. Namun, kondisi keberadaan puskesmas di Provinsi Maluku dan Maluku Utara lebih baik karena setiap kecamatan memiliki satu puskesmas, bahkan di Provinsi Maluku setiap kecamatan hampir memiliki dua puskesmas dengan rasio 1,8. Tidak optimalnya kondisi kuantitas puskesmas, dibarengi dengan kondisi kualitas. Hanya sebagian kecil puskesmas di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah terakreditasi, yaitu masing-masing sebesar 28,0 persen dan 44,7

persen. Angka tersebut lebih rendah dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebesar 72,6 persen dan 76,9 persen. Akan tetapi, ketersediaan obat esensial pada puskesmas di seluruh provinsi tergolong baik dengan persentase di atas target Kementerian Kesehatan sebesar 85 persen. Adapun jumlah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki dukungan jumlah minimal dokter yang standar masih tergolong rendah dengan kisaran persentase sebesar 20,0 – 40,0 persen. Selain itu, kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas juga tergolong masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh persentase puskesmas dengan standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih rendah pada kisaran 6,1– 17,1 persen. Hampir separuh puskesmas di Provinsi Papua dan Papua Barat juga tidak memiliki dokter.

Kesadaran masyarakat akan perilaku sehat masih rendah, seiring dengan keterbatasan layanan kesehatan. Provinsi Papua Barat dan Maluku merupakan dua provinsi yang memiliki cakupan pemberian asi eksklusif yang lebih rendah daripada target Renstra Kementerian Kesehatan sebesar 34,0 persen dan 37,2 persen. Tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pemantauan akan tumbuh kembang anak melalui penimbangan secara periodik setiap bulan masih rendah. Hanya Provinsi Maluku Utara yang memiliki kesadaran lebih baik daripada angka nasional sebesar 61,3 persen. Perilaku sehat lainnya ditunjukkan oleh pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga. Kesehatan kerja merupakan suatu kewajiban sesuai dengan amanat PP Nomor 88 tahun 2019 dalam pasal 3. Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum menjalankan amanat tersebut, sedangkan di Provinsi Maluku tingkat pelaksanaan kesehatan kerja tergolong rendah sebesar 9,1 persen. Hanya Provinsi Maluku Utara yang memiliki tingkat pelaksanaan lebih baik daripada angka nasional sebesar 64,0. Lebih jauh lagi, saat ini belum terdapat pelaksanaan kesehatan olahraga pada seluruh provinsi di Regional Maluku-Papua. Selain itu, sebagian besar wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat belum menerapkan kawasan tanpa rokok. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kesehatan masyarakat secara keseluruhan belum berlangsung dengan optimal.

Kondisi lingkungan di Regional Maluku-Papua belum mencapai kondisi yang selayaknya. Jumlah pemeriksaan dan pengawasan kualitas air minum di Provinsi Papua dan Papua Barat hanya mencapai 51,3 persen dan 34,4 persen sarana dan prasarana, masih di bawah target RPJMN sebanyak 60 persen. Namun, jumlah pemeriksaan dan pengawasan kualitas air minum di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah melebihi target RPJMN. Aksesibilitas rumah tangga terhadap air minum layak di Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat juga belum optimal dan di bawah capaian nasional. Adapun, aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi yang layak di seluruh

GAMBAR 160. HLS DAN RLS REGIONAL PAPUA



Sumber: BPS, diolah

provinsi tidak dalam kondisi baik karena keempat provinsi menjadi empat provinsi dengan tingkat akses terendah pada kisaran 29,0 persen - 68,0 persen dan di bawah kondisi nasional sebesar 87,5 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga kumuh, rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan penghuninya, di Regional Maluku-Papua tergolong tinggi. Secara khusus, persentase rumah tangga kumuh tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 40,27 persen dan Maluku 11,59 persen. Tingkat rumah tangga kumuh di kedua provinsi tersebut lebih tinggi daripada tingkat nasional sebesar 10,04 persen.

Pada indeks pendidikan, kondisi komponen HLS dan RLS juga mengalami pertumbuhan positif. Kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin dari angka RLS mengalami peningkatan yang lebih baik daripada perbaikan kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tercermin dari angka HLS.

Pembangunan sistem pendidikan tertinggi di Regional Maluku-Papua berada di Provinsi Maluku. Angka HLS di Provinsi Maluku mencapai 13,97 dengan pertumbuhan 0,07 persen dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, angka HLS terendah di Regional Maluku-Papua berada di Provinsi Papua sebesar 11,11 dengan tingkat pertumbuhan sepanjang enam tahun terakhir sebesar 0,22 persen. Sementara itu, Provinsi Papua Barat menjadi provinsi yang mengalami akselerasi tertinggi dalam enam tahun terakhir yang tumbuh sebesar 1,77 persen.

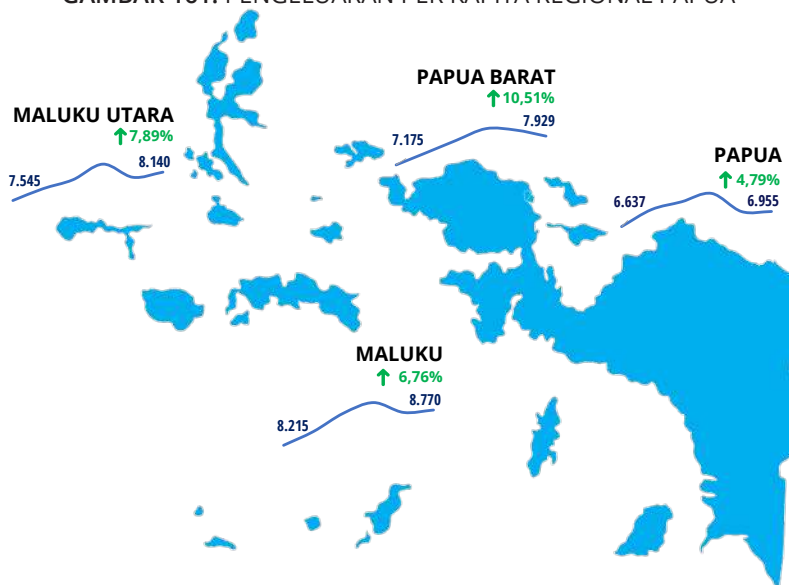
Upaya pembangunan sistem pendidikan terus dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana sistem pendidikan. Berdasarkan data statistik pendidikan pada setiap jenjang pendidikan tahun 2020/2021 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah guru terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 21.004 (41,61 persen) dari total 50.480 guru SD, 13.078 (49,38 persen) dari total 26.485 guru SMP, 7.451 (45,97 persen) dari total 16.210 guru SMA, dan 3.562 (41,50 persen) dari total 8.584 guru SMK merupakan guru baru dalam lima tahun terakhir. Selain itu, upaya peningkatan guru, tidak hanya dilakukan dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Sebanyak 85,10 persen guru SD, 93,93 persen guru SMP, 97,37 persen guru SMA, dan 91,54 persen guru SMK merupakan lulusan di atas sarjana.

TABEL 72. KONDISI RUANGAN KELAS DENGAN STATUS RUSAK SEDANG DAN BERAT

Provinsi	SD		SMP	
	R. Sedang	R. Berat	R. Sedang	R. Berat
Maluku	10	2	-	-
Papua	75	28	4	9
Papua Barat	1	9	-	-

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

GAMBAR 161. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL PAPUA



Sumber: BPS, diolah

Peningkatan tidak hanya dilakukan dari sisi guru sebagai fasilitator, tetapi juga fasilitas sekolah sebagai tempat menimba ilmu. Jumlah sekolah di Regional Maluku-Papua secara umum mengalami peningkatan. Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan terjadi di seluruh provinsi pada berbagai jenjang. Hanya jenjang SMK di Provinsi Papua yang mengalami penurunan jumlah. Adapun jumlah ruang kelas di seluruh provinsi dan jenjang pendidikan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Dari sisi kualitas ruangan kelas, sebagian besar berada pada kondisi baik dan rusak ringan. Akan tetapi, pada jenjang SD dan SMP masih terdapat kondisi ruangan kelas dengan status rusak sedang dan berat.

Upaya perbaikan juga terus dilakukan pada fasilitas penunjang lainnya, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar, maupun tidak berkaitan langsung. Penambahan fasilitas penunjang yang berkaitan langsung dilakukan terhadap laboratorium dan perpustakaan dengan pemeliharaan yang rutin dilakukan, sehingga kualitas kedua fasilitas tersebut tergolong baik dan rusak ringan pada hampir di semua jenjang di seluruh provinsi. Hanya terdapat satu laboratorium yang berada dalam keadaan rusak berat pada jenjang SD dan SMP di Provinsi Papua. Adapun pada fasilitas perpustakaan terdapat satu yang mengalami rusak sedang pada jenjang SD di Provinsi Maluku, satu rusak sedang pada jenjang SD dan SMP di Provinsi Maluku Utara, dan tiga rusak sedang dan dua rusak berat pada jenjang SD dan SMP di Provinsi Papua. Sementara itu, objek perbaikan fasilitas penunjang yang tidak berkaitan langsung adalah berupa UKS dan sanitasi sekolah.

Kualitas pendidikan masyarakat tertinggi di Regional Maluku-Papua berada di Provinsi Maluku. Capaian angka RLS di Provinsi Maluku sebesar 10,03 dengan peningkatan 1,18 persen dari tahun 2016. Sementara

TABEL 73. PENGELUARAN PER KAPITA REGIONAL PAPUA TAHUN 2017-2021

Wilayah	Kesehatan (Miliar Rp)						Pendidikan (Miliar Rp)						Ekonomi (Miliar Rp)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren	2017	2018	2019	2020	2021	Tren
MALUKU	125,17	151,21	158,57	168,99	231,78		1.101,67	1.143,49	1.604,79	1.212,49	1.470,32		2.796,76	2.849,78	2.613,93	2.092,56	2.645,18	
MALUKU UTARA	114,10	152,06	124,67	80,69	96,30		581,25	618,53	893,87	690,74	777,00		2.148,65	2.280,48	1.777,06	1.357,21	1.624,65	
PAPUA	214,76	243,32	239,45	144,28	254,59		893,82	908,67	958,46	884,03	951,54		6.972,12	6.515,59	5.728,76	4.383,87	6.125,99	
PAPUA BARAT	116,41	139,56	162,54	74,22	90,21		520,28	703,10	955,92	621,39	584,71		3.162,81	2.976,70	3.174,86	2.362,59	4.508,37	
MALUKU-PAPUA	570,44	686,15	685,23	468,18	672,87		3.097,03	3.373,79	4.413,03	3.408,65	3.783,58		15.080,33	14.622,55	13.294,61	10.196,23	14.904,20	

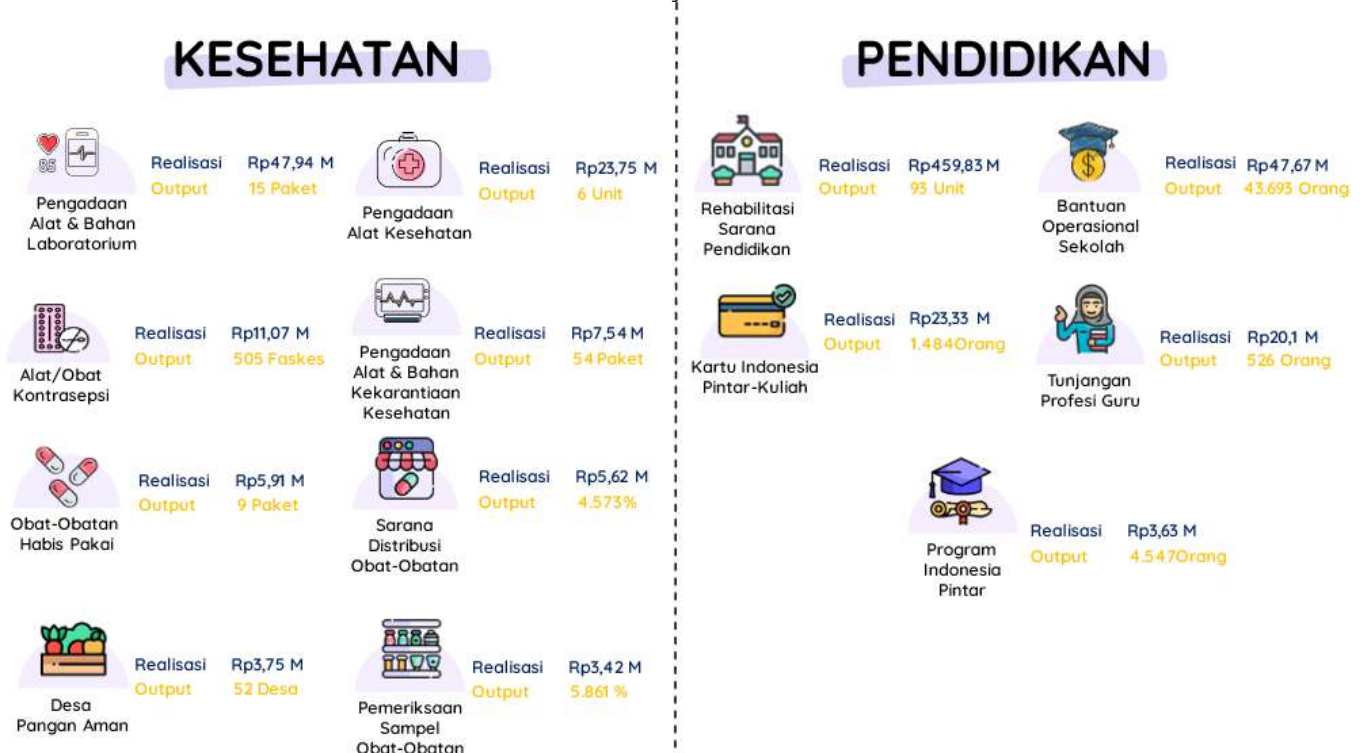
itu, capaian angka RLS terendah berada di Provinsi Papua dengan capaian 6,76. Angka RLS di Provinsi Papua meningkat sebesar 0,76 persen dalam enam tahun terakhir. Secara khusus, upaya akselerasi pembangunan sistem dan kualitas pendidikan masyarakat di Provinsi Papua sudah sepatutnya menjadi prioritas mengingat rendahnya capaian dan tingkat pertumbuhan di Provinsi Papua.

Ketertinggalan pendidikan di Regional Maluku-Papua secara spesifik berada di Provinsi Papua. Pembangunan kualitas pendidikan di Provinsi Papua masih belum merata terutama di wilayah tanah adat La Pago dan Mee Pago yang berada di daerah pegunungan tengah Provinsi Papua. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan dua wilayah tersebut yaitu aksesibilitas, ekonomi, dan SDM. Kondisi topografi yang ekstrem di wilayah tersebut menyebabkan sulit dan mahalnya pembangunan, sehingga untuk peningkatan kualitas pendidikan memerlukan upaya yang lebih ekstra. Dari sisi ekonomi, penopang perkembangan wilayah Papua adalah sektor pertambangan dan penggalian, tetapi dampak dari aktivitas pertambangan masih

belum dinikmati secara merata di kedua wilayah tersebut. Sebagai wilayah pedalaman dengan tingkat aksesibilitas dan fasilitas pendidikan yang belum ideal, aktivitas utama di kedua wilayah adat tersebut adalah bertani, berkebun, beternak, dan berburu. Kondisi tersebut menyebabkan orientasi utama masyarakat di kedua wilayah adat tersebut lebih memilih untuk menjalankan aktivitas perekonomian daripada mengenyam pendidikan.

Pada indeks pengeluaran, kondisi pengeluaran per kapita seluruh provinsi juga tumbuh positif dibandingkan enam tahun yang lalu. Pertumbuhan tertinggi dialami Provinsi Papua Barat yang tumbuh sebesar 10,51 persen dengan capaian pengeluaran per kapita sebesar Rp6.955,00. Pertumbuhan pengeluaran per kapita terendah berada di Provinsi Papua sebesar 4,79 persen dengan capaian sebesar Rp6.955,00. Capaian pengeluaran per kapita di Provinsi Papua juga merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain di Regional Maluku-Papua. Namun apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, capaian pengeluaran per kapita seluruh provinsi belum kembali pada level sebelumnya.

GAMBAR 162. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS BELANJA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN REGIONAL PAPUA



Sumber: BPS, diolah

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan umum, akselerasi pembangunan kualitas manusia di Regional Maluku-Papua menjadi prioritas pemerintah. Perencanaan pembangunan yang disusun pemerintah melalui RPJMN mengarah pada pemerataan kesejahteraan antara kawasan barat dengan timur Indonesia, khususnya Regional Maluku-Papua. APBN menjadi instrumen pemerintah dalam mendukung implementasi perencanaan yang telah disusun. Dukungan alokasi APBN dapat dilihat dari belanja berdasarkan klasifikasi fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Sepanjang lima tahun terakhir, dukungan APBN sempat melambat pada tahun 2020, seiring dengan pandemi Covid-19. Perlambatan tersebut terjadi pada seluruh belanja per fungsi di hampir seluruh provinsi. Hanya belanja fungsi kesehatan di Provinsi Maluku yang terus mengalami peningkatan.

Alokasi tertinggi ditujukan untuk belanja fungsi ekonomi di seluruh provinsi. Tingginya alokasi fungsi ekonomi diharapkan dapat mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan di Regional Maluku-Papua. Pembangunan fungsi kesehatan dan pendidikan juga terus dilakukan pemerintah guna mendukung akselerasi perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat di Regional Maluku-Papua.

Pada fungsi kesehatan, dukungan fiskal utamanya ditujukan untuk aspek layanan kesehatan. Upaya ini dilakukan mengingat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Penguatan dilakukan dalam peningkatan dan penguatan puskesmas dan layanan kesehatan rujukan (rumah sakit), khususnya untuk daerah dengan status DTPK. Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, peningkatan dan penguatan juga ditujukan untuk subbidang pelayanan dasar kesehatan. Selain itu, dukungan fiskal juga turut diberikan untuk perbaikan kondisi bagi ibu hamil dan nifas, serta anak. Melalui perbaikan kondisi pada seribu hari pertama kehidupan, dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas SDM generasi penerus kedepan, sekaligus menjadi langkah dalam pencegahan stunting. Penyediaan obat-obatan dan upaya pengendalian penyakit juga terus dilakukan, terutama untuk pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan, serta malaria, mengingat Regional Maluku-Papua merupakan endemi bagi penyakit kaki gajah dan kecacingan, serta malaria.

Meskipun tidak sebesar alokasi untuk peningkatan dan penguatan layanan kesehatan, dukungan fiskal turut dialokasikan untuk aspek perilaku kesehatan dan lingkungan. Pada aspek perilaku kesehatan, dukungan terutama berfokus pada implementasi program KB. Implementasi program KB diharapkan

dapat berkontribusi dalam kontrol jarak kelahiran, sehingga dapat membuat ibu hamil lebih sehat dan mengurangi risiko kematian bayi. Pada aspek lingkungan, dukungan fiskal berfokus pada aksesibilitas dan kualitas air minum dan sanitasi yang layak.

Pada bidang pendidikan, dukungan fiskal dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang. Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, seluruhnya memperoleh dukungan fiskal. Lebih jauh lagi, dukungan APBN turut dialokasikan untuk PAUD serta SKB dan SLB. Dukungan terbesar APBN untuk pendidikan dialokasikan pada program BOS. Alokasi fiskal turut ditujukan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur. Selain itu, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik senantiasa menjadi perhatian fiskal untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik.

Tahun 2021, dukungan fiskal APBN di Regional Maluku-Papua pada bidang kesehatan berfokus pada peningkatan lingkungan, serta layanan dan perilaku kesehatan. Dari ketiga objek tersebut, layanan kesehatan menjadi objek prioritas dalam peningkatan. Output utama pada layanan kesehatan berupa RO sarana dan prasarana berupa alat dan bahan laboratorium, alat kesehatan, serta penyediaan dan kontrol kualitas dan distribusi dari obat-obatan. Sementara itu, pada objek perilaku kesehatan prioritas dukungan fiskal ditujukan untuk RO alat dan obat kontrasepsi. Selanjutnya pada objek lingkungan, desa pangan aman menjadi prioritas peningkatan kualitas kesehatan di Regional Maluku-Papua.

Pada sektor pendidikan, dukungan fiskal APBN tahun 2021 di Regional Maluku-Papua sudah menyentuh upaya peningkatan indikator sistem pemabangunan dan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan sistem pembangunan pendidikan menitikberatkan pada perbaikan sarana pendidikan. Sementara itu, bantuan operasional sekolah dan program bantuan tunai berupa KIP dan PIP menjadi fokus lain dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Regional Maluku-Papua.

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Foto Sahid Subekti

1. SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan umum dan analisis yang telah diulas pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perekonomian Indonesia tahun 2021 berhasil rebound dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69 persen (C-to-C), setelah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (C-to-C). Pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh regional dengan pertumbuhan tertinggi Regional Maluku-Papua sebesar 10,09 persen, sedangkan terendah dialami Regional Bali-Nusa Tenggara sebesar 0,07 persen.
2. Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2021, menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 mencapai Rp16.970,8 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp15.438,0 triliun. PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5, sehingga Indonesia kembali termasuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country).

Peningkatan kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang menggeliat kembali setelah tahun sebelumnya terdapat pengetatan restriksi aktivitas dan mobilitas akibat pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang lebih terkendali, menghasilkan penurunan kasus Covid-19 yang turut didukung akselerasi vaksinasi. Selain itu, stimulus fiskal melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dalam instrumen APBN/D mampu menjadi bantalan sekaligus berperan strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian.

Penguatan permintaan eksternal, seiring membaiknya perekonomian global dan keterbatasan pasokan di sektor energi, turut mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini berdampak pada kenaikan harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, seperti CPO, batu bara, nikel, dan sebagainya, sehingga aktivitas ekspor Indonesia lebih baik.

Konsumsi RT masih menjadi penyumbang terbesar PDB nasional. Tercatat, Konsumsi RT berkontribusi sebesar 54,42 persen terhadap PDB nasional, disusul dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,81 persen, sedangkan konsumsi pemerintah murni sebesar 9,14 persen. Seluruh komponen dari sisi pengeluaran mencapai pertumbuhan positif.

3. Sejalan dengan perekonomian yang mengalami peningkatan, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan.

a. Angka IPM menunjukkan peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan dari 71,94 menjadi 72,29.

b. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,19 persen menjadi sebesar 9,71 persen.

c. Tingkat ketimpangan mengalami perbaikan kondisi dengan penurunan dari sebelumnya 0,385 menjadi 0,381.

d. Tingkat pengangguran turut mengalami penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,07 persen menjadi sebesar 6,49 persen.

4. Geliat perekonomian menghasilkan perbaikan kondisi pendapatan negara. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.011,35 triliun, mengalami peningkatan sebesar 22,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan negara terakselerasi seiring peningkatan aktivitas ekspor dengan kenaikan harga komoditas ekspor, meskipun kebijakan relaksasi perpajakan untuk objek tertentu masih berlanjut di tahun 2021.

Realisasi belanja APBN 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun meningkat sebesar 7,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja APBN telah menjalankan peran sebagai instrumen countercyclical yang dikelola secara pruden, sehingga dapat menjaga perekonomian dari potensi pelemahan yang dalam dengan risiko yang tetap terkendali. APBN 2021 menjadi manifestasi atas kebijakan fiskal ekspansif, memberikan berbagai stimulus ekonomi yang berfokus sebagai jaringan pengaman sosial (social safety net).

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, defisit tahun 2021 diperkenankan untuk melewati batas maksimal 3 persen dari PDB. Defisit APBN tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau berada pada kisaran 4,57 persen terhadap PDB, lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar 5,70 persen terhadap PDB.

Defisit APBN tahun 2021 ditutup dengan pembiayaan sebesar Rp871,72 triliun, sehingga menghasilkan SiLPA sebesar Rp96,66 triliun. Sebagian besar sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri, utamanya melalui instrumen surat berharga negara.

5. Kinerja APBD tahun 2021 mengalami penurunan

baik dari sisi pendapatan daerah, maupun belanja daerah. Konsolidasi pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 7,97 persen, sehingga realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp1.140,89 triliun. Penurunan pendapatan daerah terjadi seiring penurunan target pendapatan daerah.

Realisasi konsolidasi belanja APBD tahun 2021 sebesar Rp1.213,77 mengalami penurunan sebesar 6,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada hampir seluruh komponen belanja daerah, kecuali komponen belanja tidak terduga untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/4350 SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA 2022 yang mengamankan kenaikan 5-10% BTT daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kinerja konsolidasi pendapatan dan belanja daerah, defisit APBD tahun 2021 sebesar Rp72,87 triliun. Realisasi defisit APBD mengalami peningkatan sebesar 20,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit konsolidasi APBD mengalami penyempitan dibandingkan target sebelumnya. Defisit konsolidasi APBD ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp73,69 triliun. Kontribusi pembiayaan terutama berasal dari penerimaan pinjaman daerah program PEN PT. SMI.

6. Perbedaan karakteristik dan geografis daerah, serta kultur masyarakat di masing-masing regional menghasilkan potensi daerah yang berbeda antara satu regional dengan regional lainnya. Adapun sektor potensial berdasarkan data tiga tahun terakhir masing-masing regional adalah sebagai berikut:

- a. Regional Sumatera, sektor informasi dan komunikasi;
- b. Regional Jawa, sektor informasi dan komunikasi;
- c. Regional Kalimantan, sektor industri pengolahan;
- d. Regional Sulawesi, sektor industri pengolahan serta informasi dan komunikasi;
- e. Regional Bali-Nusa Tenggara, sektor pertambangan dan penggalan;
- f. Regional Maluku-Papua, sektor pengadaan listrik dan gas serta informasi dan komunikasi.

Laju pertumbuhan sektor potensial di masing-masing regional pada tahun 2021 menunjukkan seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif baik secara nominal maupun persentase. Hal tersebut tidak lepas dari dampak pemulihan ekonomi seiring dengan situasi pandemi yang mulai membaik serta terkendali.

7. Secara umum belanja pemerintah pusat dan daerah yang dilihat dari belanja K/L dengan TKDD pada komponen DAK Fisik, Dak non Fisik, dan Dana Desa telah berjalan selaras. Tidak terdapat tumpang tindih antara belanja K/L dengan TKDD. Keduanya saling mendukung dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan. Selain itu, harmonisasi antara belanja pusat dan daerah juga dilihat implementasi dukungan terhadap pencapaian Major Project. Hasil analisis menunjukkan implementasi belanja pusat dan daerah saling mendukung dalam upaya pencapaian Major Project untuk seluruh Prioritas Nasional (PN).

8. APBN sebagai instrumen fiskal berperan penting dalam upaya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh regional, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Pada sektor kesehatan, dukungan APBN diarahkan untuk perbaikan kondisi lingkungan serta perilaku dan layanan kesehatan masyarakat secara holistik. Seiring dengan dukungan APBN, dalam lima tahun terakhir kesejahteraan yang diukur dengan IPM mengalami peningkatan terus menerus, sehingga dapat menghasilkan perbaikan kondisi kesejahteraan.

Dukungan APBN untuk peningkatan bidang kesehatan diarahkan untuk aspek lingkungan, perilaku kesehatan, dan layanan kesehatan tercermin dari belanja fungsi kesehatan. Dukungan untuk aspek lingkungan utamanya melalui perbaikan infrastruktur sanitasi dan persampahan dan peningkatan kualitas air minum. Pada aspek perilaku masyarakat dukungan utamanya melalui program gerakan masyarakat sehat, pencegahan dan penanganan masalah gizi, dan perilaku hidup sehat pada balita dan ibu hamil. Adapun pada aspek layanan kesehatan, dukungan utamanya dilakukan melalui layanan kesehatan untuk ibu hamil dan bersalin, peningkatan dan pembangunan fasilitas layanan kesehatan baik di puskesmas, maupun rumah sakit, pengendalian penyakit, dan penyediaan obat esensial.

Dukungan APBN untuk bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan sistem dan kualitas pendidikan tercermin dari belanja fungsi pendidikan. Kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, BOS, PIP, KIP, dan TPG PNS dan Non PNS merupakan manifestasi dukungan APBN dalam upaya peningkatan layanan bidang pendidikan.

2. REKOMENDASI

Tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa karena pelaksanaan APBN/D yang dilakukan di tengah kondisi yang diliputi ketidakpastian seiring belum

berakhirnya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan guncangan yang sangat hebat terhadap perekonomian Indonesia, mobilitas manusia terhenti, dan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yang masuk kedalam jurang resesi. Namun, pada tahun 2021, kondisi perekonomian mulai membaik yang diawali dengan keberhasilan domestik dan global dalam mengendalikan penularan pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari peran APBN dan APBD yang berhasil menjadi bantalan selama masa awal pandemi sekaligus memberikan stimulus fiskal yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

APBN dan APBD tahun 2021 menjadi fondasi dalam menyeimbangkan berbagai tujuan pemerintah. APBN dan APBD menjadi instrumen utama dalam mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta melanjutkan berbagai pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. APBN terus berupaya untuk menjadi instrumen yang dapat melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN dan APBD harus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas, sehingga peran APBN dan APBD dapat berjalan secara optimal dan terjaga.

Berdasarkan capaian kinerja perekonomian, kesejahteraan, dan fiskal tahun 2021 di masing-masing regional sebagaimana telah diulas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan respon fiskal pemerintah sebagai berikut:

2.I. REGIONAL SUMATERA

Pengembangan Regional Sumatera dapat dilakukan melalui dukungan pengembangan sektor industri baik dari segi sarana dan prasarana seperti dukungan infrastruktur baik fisik maupun non fisik sehingga berdampak pada nilai tambah produk industri. Dukungan dapat berjalan optimal dengan harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berjalan dengan baik. Pengembangan sektor industri diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dengan mentransformasi sumber-sumber ekonomi berbasis SDA menjadi komoditas yang lebih memiliki nilai. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

2.I.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Peningkatan kepatuhan pemungutan dan pelimpahan atas pajak pemerintah pusat;
- ii. Kementerian Keuangan melalui Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan pelatihan dan bimbingan mulai dari tingkat UMKM untuk dapat melakukan

ekspor ke luar negeri;

- iii. Peningkatan koordinasi dengan eselon 1 dan pihak terkait dalam hal penyelesaian revisi penyesuaian kebijakan refocusing dan realokasi anggaran; dan
- iv. Implementasi strategi quick wins dalam belanja fungsi pendidikan sehingga dapat meningkatkan nilai IPM.

2.I.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa program-program prioritas terkait penurunan kemiskinan berjalan sesuai dengan yang tertera dalam RPJMA;
- ii. Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan membuat kebijakan dan melakukan penguatan akses permodalan, memberikan sosialisasi secara masif bekerja sama dengan Kantor Vertikal Kementerian Keuangan dan perbankan kepada masyarakat terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), dan sumber-sumber permodalan lain;
- iii. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan fungsi;
- iv. peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengamanan stok/buffer stock barang terutama makanan dan minuman pada festive season; dan
- v. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar secara berkelanjutan mengawal proses pemutakhiran proposal investasi dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

2.II. REGIONAL JAWA

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pembangunan di Regional Jawa, dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat berfokus pada peningkatan belanja di sektor potensial regional. Di samping itu, kebijakan struktural dan fiskal regional juga dapat diarahkan dan diintensifkan pada sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB belum signifikan. Kebijakan terkait seperti kebijakan subsidi listrik, subsidi air minum dan sebagainya. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

2.II.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Pembebasan lahan atau realokasi bangunan, diperlukan adanyakan MoU dengan BUMN seperti PT PLN dan PT KAI sehingga tidak menghambat pengerjaan fisik pembangunan;
- ii. Perpanjangan insentif pajak, restrukturisasi

penyelesaian kredit bagi usaha di sektor transportasi dan pergudangan serta pemberian bantuan subsidi gaji/upah; dan

- iii. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait upaya pembangunan dan investasi serta usaha menciptakan kesempatan usaha dan kesempatan kerja.

2.II.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Melakukan pembangunan berbasis sektoral dengan beberapa rencana aksi, yaitu (1) strategi revitalisasi sektor pertanian melalui penerapan sistem eco-farming, penyebaran pupuk secara merata, perbaikan irigasi, perbaikan sarana pertanian, dan kegiatan penyuluhan. (2) strategi reindustrialisasi melalui hilirisasi dan hulunisasi industri, pemberian insentif fiskal berupa tax holiday (minimal PBB untuk industri yang menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa, atau memberikan nilai tambah tinggi), dan kebijakan lain seperti konektivitas dan penyediaan energi untuk industri. (3) strategi pemulihan dengan memanfaatkan berbagai program pemerintah. (4) strategi digitalisasi dalam rangka mendukung pengembangan UMKM melalui empat langkah, yaitu meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha UMKM, mengintervensi perbaikan probis yang dilakukan dalam beberapa program, perluasan akses pasar dengan kerja sama bersama LKPP, dan memunculkan pahlawan lokal UMKM;
- ii. Penguatan pasar domestik atau wisatawan lokal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada semua destinasi wisata dan komponen pendukungnya; dan
- iii. Optimalisasi penyaluran DAK Fisik yang telah selaras dengan prioritas nasional.

2.III. REGIONAL KALIMANTAN

Sampai dengan tahun 2021, komoditas unggulan Regional Kalimantan didominasi hasil sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (unrenewable resources). Kekayaan alam yang melimpah, disertai dengan kenaikan harga komoditas yang mengalami kenaikan di satu sisi menjadi keuntungan bagi Regional Kalimantan. Namun mempertimbangkan keterbatasan unrenewable resources, Regional Kalimantan harus melakukan transformasi basis perekonomian menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui (renewable resources). Hal ini sebagai manifestasi untuk membangun perekonomian dengan memperhatikan aspek lingkungan agar tetap sustainable dan dinikmati generasi penerus. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Pusat

- i. Perlu adanya regulasi untuk melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak antara DJP dengan pemerintah daerah;
- ii. Menyampaikan informasi terkait potensi investasi Daerah di Kalimantan Selatan kepada para potential investor terutama PT SMI sebagai investment agent Pemerintah, Potensi investasi tersebut berbasis pada sektor potensial, utamanya sektor industri pengolahan hasil tambang batubara dan hasil perkebunan kelapa sawit yang dapat berupa pembangunan industri pengolahan biodiesel, industri pengolahan DME, maupun industri pengolahan minyak goreng, sebagai bentuk hilirisasi dari kegiatan ekstraktif sumber daya alam batubara dan kelapa sawit; dan
- iii. Perlu dibuat sistem yang dapat memberikan informasi setoran pajak atas objek pajak di daerah, bukan berdasarkan NPWP yang dimungkinkan dapat berasal dari luar daerah objek pajak;

2.III.A. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Pengeluaran pemerintah harus lebih difokuskan ke daerah pedesaan dan remote area seperti penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai di daerah pedesaan terutama sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi;
- ii. Pemda perlu melakukan penambahan formulasi indikator kinerja berkenaan transformasi struktur ekonomi dari komoditas bahan mentah ke industri turunan/hilirisasi serta sektor-sektor produktif lainnya;
- iii. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/ retribusi daerah untuk meningkatkan PAD;
- iv. Pelaksanaan skema padat karya sebagai perwujudan prioritas dalam mengurangi tingkat pengangguran; dan
- v. Perlunya review dan fokus anggaran daerah, khususnya penganggaran sektor kesehatan, pada upaya peningkatan kualitas SDM yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia.

2.IV. REGIONAL SULAWESI

Sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan harus ditingkatkan dan dieksekusi dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah juga harus senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya terkait tata kelola keuangan negara dan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan alokasi belanja saling melengkapi dan tidak tumpang tindih serta tidak terjadinya duplikasi dan anggaran berlebih. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

2.IV.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Keterpaduan perencanaan dan penganggaran dalam rumusan RSPD dengan belanja daerah melalui perumusan suatu aturan yang mengikat sampai tingkat daerah dengan dukungan sistem teknologi informasi;
- ii. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perlu mengaktifkan kembali program Retrieval untuk memfasilitasi siswa putus sekolah kembali dapat bersekolah; dan
- iii. Melanjutkan langkah-langkah pemberian insentif berupa kebijakan relaksasi pinjaman dan pemberian tambahan subsidi bunga baik untuk KUR maupun non-KUR.

2.IV.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Evaluasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban terkait capaian output strategis;
- ii. Perlu adanya upaya-upaya mitigasi bencana mengingat beberapa provinsi di Regional Sulawesi merupakan wilayah rawan bencana;
- iii. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan pengendalian impor dengan melakukan strategi promosi dan proteksi melalui peningkatan supply side, perumusan regulasi yang kondusif untuk perkembangan produksi pertanian domestik, dan penguatan kelembagaan pertanian;
- iv. Menjamin adanya sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RJPMD, dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMN untuk memastikan arah kebijakan pembangunan selaras dengan prioritas nasional; dan
- v. Belanja fungsi ekonomi difokuskan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan belanja per kapita

2.V. REGIONAL BALI-NUSA TENGGARA

Kondisi pariwisata di Regional Bali-Nusa Tenggara masih belum pulih seperti kondisi sebelum pandemi. Kondisi ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi Regional Bali-Nusa Tenggara untuk mengantisipasi potensi kejadian serupa di masa depan. Pengembangan aktivitas sektor selain pariwisata memiliki urgensi yang tinggi, sehingga aktivitas perekonomian dapat tetap berlangsung dan meminimalisasi dampak yang dirasakan akibat pandemi. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

2.V.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Daerah dengan kemiskinan ekstrim perlu di eskalasi untuk mendapat DAK Fisik bidang sanitasi dan pelayanan dasar dengan alokasi yang lebih besar dari daerah lain;
- ii. Sektor pariwisata perlu diarahkan kepada quality tourism, utamanya yang berbasis cultural tourism, traditional tourism, eco-tourism, education tourism, health tourism (medical, healing, wellness), dan digital tourism; dan
- iii. Perlu dukungan kebijakan fiskal yang lebih besar terhadap percepatan capaian IPM, sehingga dapat mengkapitalisasi bonus demografi menjadi modal pembangunan yang menguntungkan.

2.V.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Pemerintah daerah agar meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi melalui sektor-sektor strategis yang banyak menyerap tenaga kerja, dan job creation;
- ii. Pemerintah daerah diharapkan tetap konsisten memberi dukungan terhadap peningkatan cakupan vaksinasi dan deteksi Varian Omicron melalui karantina di pintu masuk orang asing serta pengawasan terhadap transmisi lokal; dan
- iii. Memastikan ketersediaan alokasi anggaran kesehatan yang memadai pada APBD masing-masing pemerintah daerah melalui koordinasi dan sinergi antara Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dengan dinas kabupaten/kota yang menangani masalah kesehatan.

2.VI. REGIONAL MALUKU-PAPUA

Akselerasi pembangunan menjadi prioritas bagi Regional Maluku-Papua untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pembangunan perlu dilakukan secara merata, terutama bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah 3T. Penyediaan layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan perlu terus digencarkan untuk membangun kultur yang kondusif bagi kondisi kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut. Adapun rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

2.VI.A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

- i. Aktivitas monitoring data program PC-PEN untuk mempermudah koordinasi dan evaluasi program PC-PEN di daerah dapat dilakukan sampai dengan tingkat Kanwil DJPb dan KPPN;
- ii. Melakukan penyempurnaan secara terus-menerus dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pembuatan inovasi digital agar proses penyaluran APBN ke daerah berjalan dengan baik dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran;

- iii. Mendorong bank Penyalur untuk dapat menerapkan bisnis proses penyaluran KUR dan non KUR lebih longgar sesuai dengan relaksasi yang diberikan pada calon debitur, sehingga penyaluran KUR di masa Pandemi Covid-19 berjalan secara normal dan Perlu dilakukan pengembangan supaya penginputan data ke SIKP dapat dilakukan dengan self assessment secara online oleh masing-masing debitur UMi; dan
- iv. Mendorong perkembangan UMKM, dengan melakukan pelatihan, pendampingan, pemberian akses permodalan (KUR, UMi, inisiatif Pemda, dan lainnya), serta pengembangan pangsa pasar untuk hasil produksi UMKM.

2.VI.B. BAGI PEMERINTAH DAERAH

- i. Mendorong pihak swasta dan investor untuk membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas SDM agar penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
- ii. Mendorong perkembangan UMKM, dengan melakukan pelatihan, pendampingan, pemberian akses permodalan (KUR, UMi, inisiatif Pemda, dan lainnya), serta pengembangan pangsa pasar untuk hasil produksi UMKM;
- iii. Pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan eksportir dan pihak industri untuk meningkatkan komoditas ekspor;
- iv. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang setempat dalam penilaian dan penagihan pajak daerah; dan
- v. Dalam hal percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, Regional Maluku-Papua agar lebih fokus mendorong sektor pengadaan listrik dan gas, serta industri pengolahan (migas).

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN

LAMPIRAN I LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL 2019-2021

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB		
			2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	Sumatera	4,14%	-0,37%	2,79%
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	5,22%	-1,07%	2,61%
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	5,01%	-1,62%	3,29%
4	Provinsi Riau	Sumatera	2,81%	-1,13%	3,36%
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	4,83%	-3,80%	3,43%
6	Provinsi Jambi	Sumatera	4,35%	-0,44%	3,66%
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	5,69%	-0,11%	3,58%
8	Provinsi Lampung	Sumatera	5,26%	-1,67%	2,79%
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	4,94%	-0,02%	3,24%
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	3,32%	-2,30%	5,05%
11	Provinsi Banten	Jawa	5,26%	-3,39%	4,44%
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	5,82%	-2,39%	3,56%
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	5,02%	-2,52%	3,74%
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	5,36%	-2,65%	3,32%
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	6,59%	-2,68%	5,53%
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	5,53%	-2,33%	3,57%
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	5,09%	-1,82%	4,78%
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	6,12%	-1,41%	3,40%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	4,09%	-1,82%	3,48%
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	4,70%	-2,87%	2,48%
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	6,89%	-1,09%	3,98%
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	5,60%	-9,33%	-2,47%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	3,90%	-0,62%	2,30%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	5,25%	-0,84%	2,51%
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	6,91%	-0,71%	4,65%
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	10,92%	-2,42%	3,32%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	8,83%	4,86%	11,70%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	6,50%	-0,65%	4,10%
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	6,40%	-0,02%	2,41%
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	5,65%	-0,99%	4,16%
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	6,25%	5,35%	16,40%
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	5,41%	-0,92%	3,04%
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	2,66%	-0,76%	-0,51%
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	-15,74%	2,39%	15,11%
NASIONAL			4,98%	-2,02%	3,69%
1	Regional Sumatera		4,54%	-1,19%	3,18%
2	Regional Jawa		5,72%	-2,51%	3,66%
3	Regional Kalimantan		3,91%	-2,27%	3,18%
4	Regional Sulawesi		6,65%	0,23%	5,67%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		2,68%	-5,01%	0,07%
6	Regional Maluku-Papua		6,99%	1,44%	10,09%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan LPI BI 2021

LAMPIRAN II NOMINAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2019-2021

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Nominal PDRB (Juta Rupiah)					
			2019		2020		2021	
			Nominal	Kontri-busi	Nominal	Kontri-busi	Nominal	Kontri-busi
1	Provinsi Aceh	Sumatera	164.162.978,19	1,02%	166.372.320,74	1,05%	184.976.301,57	1,09%
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	799.608.954,24	4,99%	811.188.308,84	5,14%	859.870.945,35	5,07%
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	245.949.737,17	1,53%	241.993.529,11	1,53%	252.749.645,35	1,49%
4	Provinsi Riau	Sumatera	760.247.508,90	4,74%	728.649.985,32	4,62%	843.211.153,00	4,97%
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	267.631.477,89	1,67%	254.227.859,75	1,61%	275.636.327,71	1,63%
6	Provinsi Jambi	Sumatera	216.927.708,24	1,35%	206.242.610,97	1,31%	233.725.458,64	1,38%
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	453.402.714,08	2,83%	456.647.864,37	2,90%	491.566.450,41	2,90%
8	Provinsi Lampung	Sumatera	356.676.828,41	2,22%	353.530.038,78	2,24%	371.903.171,89	2,19%
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	72.098.240,45	0,45%	73.305.267,04	0,46%	79.576.326,26	0,47%
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	75.794.959,50	0,47%	75.495.257,20	0,48%	85.942.704,03	0,51%
11	Provinsi Banten	Jawa	661.321.340,75	4,12%	625.979.345,13	3,97%	665.921.915,45	3,93%
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	2.815.636.157,03	17,55%	2.768.189.732,78	17,55%	2.914.581.082,81	17,19%
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	2.123.153.711,49	13,24%	2.084.620.246,45	13,22%	2.209.822.383,53	13,03%
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	1.360.960.130,98	8,48%	1.347.922.689,03	8,55%	1.420.799.908,38	8,38%
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	141.047.688,00	0,88%	138.306.833,26	0,88%	149.369.169,14	0,88%
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	2.345.548.552,28	14,62%	2.299.791.051,72	14,58%	2.454.498.796,27	14,48%
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	212.150.332,22	1,32%	214.001.753,68	1,36%	231.321.163,28	1,36%
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	150.046.095,64	0,94%	152.187.394,25	0,96%	170.001.210,89	1,00%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	180.557.639,22	1,13%	179.094.106,63	1,14%	192.576.581,16	1,14%
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	652.480.257,35	4,07%	607.586.183,05	3,85%	695.158.330,32	4,10%
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	96.509.929,57	0,60%	100.509.859,57	0,64%	110.668.941,63	0,65%
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	251.934.097,83	1,57%	223.900.894,64	1,42%	219.800.030,51	1,30%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	132.500.099,76	0,83%	133.613.744,17	0,85%	140.153.319,13	0,83%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	106.731.763,32	0,67%	106.480.968,02	0,68%	110.885.751,03	0,65%
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	504.320.725,10	3,14%	504.059.368,35	3,20%	545.230.029,06	3,22%
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	46.365.789,57	0,29%	46.427.581,98	0,29%	50.341.228,80	0,30%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	185.740.087,21	1,16%	197.440.782,72	1,25%	246.987.356,72	1,46%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	129.225.147,50	0,81%	130.178.026,09	0,83%	139.057.828,16	0,82%
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	41.145.449,91	0,26%	41.729.772,04	0,26%	43.896.365,58	0,26%
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	130.126.510,04	0,81%	132.230.056,87	0,84%	142.600.019,59	0,84%
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	39.695.490,69	0,25%	42.319.470,43	0,27%	52.359.851,79	0,31%
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	46.152.817,52	0,29%	46.262.452,53	0,29%	48.564.217,18	0,29%
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	84.356.967,99	0,53%	83.588.641,76	0,53%	85.072.858,48	0,50%
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	189.510.696,13	1,18%	199.232.884,44	1,26%	235.343.249,91	1,39%
NASIONAL			16.039.718.584,17	100,00%	15.773.306.881,71	100,00%	16.954.170.073,01	100,00%
1	Regional Sumatera		3.412.501.107,07	21,28%	3.367.653.042,12	21,35%	3.679.158.484,21	21,70%
2	Regional Jawa		9.447.667.580,53	58,90%	9.264.809.898,37	58,74%	9.814.993.255,58	57,89%
3	Regional Kalimantan		1.291.744.254,00	8,05%	1.253.379.297,18	7,95%	1.399.726.227,28	8,26%
4	Regional Sulawesi		1.036.923.709,33	6,46%	1.052.065.588,05	6,67%	1.168.112.827,91	6,89%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		491.165.960,91	3,06%	463.995.606,83	2,94%	470.839.100,67	2,78%
6	Regional Maluku-Papua		359.715.972,33	2,24%	371.403.449,16	2,35%	421.340.177,36	2,49%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

LAMPIRAN III TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI, DAN NILAI TUKAR RUPIAH 2019-2021

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	SUKU BUNGA ^{*)}			INFLASI ^{**)}			NILAI TUKAR (Rp) ^{***)}		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	1,69%	3,59%	2,24%	13.901	14.105	14.265
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	2,33%	1,96%	1,71%	13.901	14.105	14.265
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	1,67%	2,11%	1,40%	13.901	14.105	14.265
4	Provinsi Riau	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	2,36%	2,42%	1,54%	13.901	14.105	14.265
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	2,03%	1,18%	2,26%	13.901	14.105	14.265
6	Provinsi Jambi	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	0,81%	3,01%	1,66%	13.901	14.105	14.265
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	2,06%	1,55%	1,82%	13.901	14.105	14.265
8	Provinsi Lampung	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	3,35%	2,00%	2,19%	13.901	14.105	14.265
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	2,91%	0,89%	2,42%	13.901	14.105	14.265
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	5,00%	3,75%	3,50%	2,62%	1,08%	3,75%	13.901	14.105	14.265
11	Provinsi Banten	Jawa	5,00%	3,75%	3,50%	3,30%	1,45%	1,91%	13.901	14.105	14.265
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	5,00%	3,75%	3,50%	3,23%	1,59%	1,53%	13.901	14.105	14.265
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	5,00%	3,75%	3,50%	3,21%	2,18%	1,69%	13.901	14.105	14.265
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	5,00%	3,75%	3,50%	3,37%	1,56%	1,70%	13.901	14.105	14.265
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	5,00%	3,75%	3,50%	2,77%	1,40%	2,29%	13.901	14.105	14.265
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	5,00%	3,75%	3,50%	2,12%	1,44%	2,45%	13.901	14.105	14.265
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	5,00%	3,75%	3,50%	2,64%	4,68%	1,45%	13.901	14.105	14.265
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	5,00%	3,75%	3,50%	2,45%	1,03%	3,32%	13.901	14.105	14.265
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	5,00%	3,75%	3,50%	4,01%	1,68%	2,55%	13.901	14.105	14.265
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	5,00%	3,75%	3,50%	1,66%	0,78%	2,15%	13.901	14.105	14.265
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	5,00%	3,75%	3,50%	1,47%	1,32%	2,73%	13.901	14.105	14.265
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	5,00%	3,75%	3,50%	2,40%	0,80%	2,01%	13.901	14.105	14.265
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	5,00%	3,75%	3,50%	1,87%	0,60%	2,12%	13.901	14.105	14.265
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	5,00%	3,75%	3,50%	0,67%	0,61%	1,67%	13.901	14.105	14.265
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	5,00%	3,75%	3,50%	2,35%	2,04%	2,40%	13.901	14.105	14.265
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	5,00%	3,75%	3,50%	2,72%	1,78%	4,39%	13.901	14.105	14.265
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	5,00%	3,75%	3,50%	2,30%	1,62%	2,20%	13.901	14.105	14.265
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	5,00%	3,75%	3,50%	3,22%	1,37%	2,59%	13.901	14.105	14.265
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	5,00%	3,75%	3,50%	2,84%	0,81%	2,59%	13.901	14.105	14.265
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	5,00%	3,75%	3,50%	3,52%	-0,18%	2,65%	13.901	14.105	14.265
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	5,00%	3,75%	3,50%	2,02%	2,13%	2,38%	13.901	14.105	14.265
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	5,00%	3,75%	3,50%	2,08%	0,21%	0,21%	13.901	14.105	14.265
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	5,00%	3,75%	3,50%	1,93%	0,71%	3,47%	13.901	14.105	14.265
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	5,00%	3,75%	3,50%	0,66%	1,64%	1,79%	13.901	14.105	14.265
NASIONAL			5,00%	3,75%	3,50%	2,72%	1,68%	1,87%	13.901	14.105	14.265

Sumber:

*)BI;

**)BRS masing-masing Provinsi;

***) situs BPS RI data dinamis.

LAMPIRAN IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2019-2021

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
			2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	Sumatera	71,90	71,99	72,18
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	71,74	71,77	72,00
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	72,39	72,38	72,65
4	Provinsi Riau	Sumatera	73,00	72,71	72,94
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	75,48	75,59	75,79
6	Provinsi Jambi	Sumatera	71,26	71,29	71,63
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	70,02	70,01	70,24
8	Provinsi Lampung	Sumatera	69,57	69,69	69,90
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	71,21	71,40	71,64
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	71,30	71,47	71,69
11	Provinsi Banten	Jawa	72,44	72,45	72,72
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	80,76	80,77	81,11
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	72,03	72,09	72,45
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	71,73	71,87	72,16
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	79,99	79,97	80,22
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	71,50	71,71	72,14
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	67,65	67,66	67,90
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	70,91	71,05	71,25
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	70,72	70,91	71,28
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	76,61	76,24	76,88
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	71,15	70,63	71,19
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	75,38	75,50	75,69
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	68,14	68,25	68,65
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	65,23	65,19	65,28
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	71,66	71,93	72,24
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	65,73	66,11	66,36
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	69,50	69,55	69,79
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	71,20	71,45	71,66
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	68,49	68,68	69,00
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	72,99	72,93	73,30
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	68,70	68,49	68,76
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	69,45	69,49	69,71
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	64,70	65,09	65,26
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	60,84	60,44	60,62
NASIONAL			71,92	71,94	72,29

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

LAMPIRAN V TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2019-2021

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	TINGKAT KEMISKINAN			JUMLAH PENDUDUK MISKIN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	Sumatera	15,01%	15,43%	15,53%	809.760	833.910	850.260
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	8,63%	9,14%	8,49%	1.260.500	1.356.720	1.273.070
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	6,29%	6,56%	6,04%	343.090	364.790	339.930
4	Provinsi Riau	Sumatera	6,90%	7,04%	7,00%	483.920	491.220	496.660
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	5,80%	6,13%	5,75%	127.760	142.610	137.750
6	Provinsi Jambi	Sumatera	7,51%	7,97%	7,67%	273.370	288.100	279.860
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	12,56%	12,98%	12,79%	1.067.160	1.119.650	1.116.610
8	Provinsi Lampung	Sumatera	12,30%	12,76%	11,67%	1.041.480	1.091.140	1.007.020
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	14,91%	15,30%	14,43%	298.000	306.000	291.790
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	4,50%	4,89%	4,67%	67.370	72.050	69.700
11	Provinsi Banten	Jawa	4,94%	6,63%	6,50%	641.420	857.640	852.280
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	3,42%	4,69%	4,67%	362.300	496.840	498.290
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	6,82%	8,43%	7,97%	3.375.890	4.188.520	4.004.860
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	10,58%	11,84%	11,25%	3.679.400	4.119.930	3.934.010
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	11,44%	12,80%	11,91%	440.890	503.140	474.490
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	10,20%	11,46%	10,59%	4.056.000	4.585.970	4.259.600
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	7,28%	7,24%	6,84%	370.470	370.710	354.000
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	4,81%	5,26%	5,16%	131.240	141.780	141.030
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	4,47%	4,83%	4,56%	190.290	206.920	197.760
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	5,91%	6,64%	6,27%	220.910	243.990	233.130
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	6,49%	7,41%	6,83%	48.610	52.700	49.490
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	3,61%	4,45%	4,72%	156.910	196.920	211.460
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	13,88%	14,23%	13,83%	705.680	746.040	735.300
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	20,62%	21,21%	20,44%	1.129.460	1.173.530	1.146.280
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	8,56%	8,99%	8,53%	759.580	800.240	765.460
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	10,95%	11,50%	11,85%	151.870	159.050	165.990
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	13,18%	13,06%	12,18%	404.030	403.740	381.210
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	11,04%	11,69%	11,74%	299.970	317.320	323.260
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	15,31%	15,59%	15,41%	184.710	185.310	184.600
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	7,51%	7,78%	7,36%	188.600	195.850	186.550
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	6,91%	6,97%	6,38%	87.180	87.520	81.180
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	17,65%	17,99%	16,30%	319.510	322.400	294.970
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	21,51%	21,70%	21,82%	207.590	215.220	221.290
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	26,55%	26,80%	27,38%	900.950	912.230	944.490
NASIONAL			9,22%	10,19%	9,71%	24.785.870	27.549.700	26.503.630
1	Regional Sumatera		9,82%	10,22%	9,75%	5.772.410	6.066.190	5.862.650
2	Regional Jawa		8,29%	9,71%	9,16%	12.555.900	14.752.040	14.023.530
3	Regional Kalimantan		5,81%	6,16%	5,85%	961.520	1.016.100	975.410
4	Regional Sulawesi		10,07%	10,41%	10,04%	1.988.760	2.061.510	2.007.070
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		13,36%	13,92%	13,59%	1.992.050	2.116.490	2.093.040
6	Regional Maluku-Papua		20,39%	20,65%	20,43%	1.515.230	1.537.370	1.541.930

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

LAMPIRAN VI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN (RASIO GINI) 2019-2021

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	TINGKAT KETIMPANGAN		
			2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	Sumatera	0,321	0,319	0,323
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	0,315	0,314	0,313
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	0,307	0,301	0,300
4	Provinsi Riau	Sumatera	0,331	0,321	0,327
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	0,337	0,334	0,339
6	Provinsi Jambi	Sumatera	0,324	0,316	0,315
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	0,339	0,338	0,340
8	Provinsi Lampung	Sumatera	0,331	0,320	0,314
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	0,329	0,323	0,321
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	0,262	0,257	0,247
11	Provinsi Banten	Jawa	0,361	0,365	0,363
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	0,391	0,400	0,411
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	0,398	0,398	0,406
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	0,358	0,359	0,368
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	0,428	0,437	0,436
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	0,364	0,364	0,364
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	0,318	0,325	0,315
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	0,335	0,320	0,320
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	0,334	0,351	0,325
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	0,335	0,335	0,331
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	0,292	0,300	0,285
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	0,370	0,369	0,375
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	0,374	0,386	0,384
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	0,355	0,356	0,339
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	0,391	0,382	0,377
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	0,365	0,356	0,366
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	0,330	0,321	0,326
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	0,393	0,388	0,394
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	0,410	0,406	0,409
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	0,376	0,368	0,359
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	0,310	0,290	0,278
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	0,320	0,326	0,316
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	0,381	0,376	0,374
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	0,391	0,395	0,396
NASIONAL			0,380	0,385	0,381

* Situs BPS RI data per-September; September 2021 dari BRS

LAMPIRAN VII INDIKATOR KETENAGAKERJAAN 2019-2021

	NAMA PROVINSI	REGIONAL	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ^{*)}			Tingkat Pengangguran ^{**)}			Jumlah Pengangguran (orang) ^{***)}		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	Sumatera	63,36%	65,10%	63,78%	6,20%	6,59%	6,30%	146.622	166.600	158.857
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	70,19%	68,67%	69,10%	5,41%	6,91%	6,33%	382.438	507.805	475.156
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	67,51%	69,01%	67,72%	5,33%	6,88%	6,52%	138.459	190.609	179.948
4	Provinsi Riau	Sumatera	65,10%	65,24%	65,03%	5,97%	6,32%	4,42%	190.143	203.837	145.669
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	64,76%	0,6628	68,27%	6,91%	10,34%	9,91%	69.479	117.176	119.595
6	Provinsi Jambi	Sumatera	66,09%	67,79%	67,17%	4,19%	5,13%	5,09%	73.965	93.990	93.754
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	67,86%	68,65%	68,77%	4,48%	5,51%	4,98%	185.918	238.363	219.199
8	Provinsi Lampung	Sumatera	69,09%	70,16%	69,35%	4,03%	4,67%	4,69%	171.455	209.568	210.632
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	69,30%	71,73%	69,75%	3,39%	4,07%	3,65%	34.439	43.801	38.745
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	67,70%	66,89%	65,88%	3,62%	5,25%	5,03%	26.871	38.756	37.176
11	Provinsi Banten	Jawa	64,52%	0,6448	63,79%	8,11%	10,64%	8,98%	490.808	661.061	562.310
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	64,81%	63,81%	62,63%	6,22%	10,95%	8,50%	320.901	572.780	439.899
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	65,07%	64,53%	64,95%	7,99%	10,46%	9,82%	1.901.498	2.533.076	2.430.147
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	68,62%	69,43%	69,58%	4,49%	6,48%	5,95%	819.355	1.214.342	1.128.223
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	72,94%	71,12%	73,52%	3,14%	4,57%	4,56%	69.170	101.846	106.432
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	69,45%	70,33%	70,00%	3,92%	3,84%	5,74%	843.754	1.301.145	1.281.395
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	68,30%	0,6883	68,45%	4,45%	5,81%	5,82%	110.272	151.561	153.307
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	69,68%	68,40%	68,67%	4,10%	4,58%	4,53%	56.790	63.309	63.874
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	69,41%	69,33%	69,26%	4,31%	4,74%	4,95%	91.730	103.648	109.968
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	66,44%	65,50%	65,49%	6,09%	6,87%	6,83%	110.574	124.884	126.186
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	66,28%	66,51%	66,24%	4,40%	4,97%	4,58%	15.380	17.290	16.224
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	73,87%	74,32%	73,54%	1,52%	5,63%	5,37%	37.551	144.500	138.669
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	68,65%	70,45%	70,57%	3,42%	4,22%	3,01%	84.516	113.430	82.495
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	68,50%	73,11%	73,78%	3,35%	4,28%	3,77%	83.030	121.884	109.928
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	62,90%	63,40%	64,73%	4,97%	6,31%	5,72%	200.304	269.817	252.349
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	69,27%	70,19%	70,27%	3,18%	3,32%	3,13%	21.054	23.132	22.208
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	67,59%	69,44%	68,73%	3,15%	3,77%	3,75%	46.802	59.381	59.371
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	69,07%	69,83%	70,09%	3,59%	4,58%	3,92%	45.292	61.860	54.134
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	66,83%	66,46%	65,94%	4,06%	4,28%	3,01%	23.809	25.410	17.959
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	63,87%	63,42%	62,15%	6,25%	7,37%	7,06%	75.485	90.248	85.540
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	64,49%	0,6428	64,70%	4,97%	5,15%	4,71%	27.303	29.997	28.133
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	63,12%	65,07%	65,75%	7,08%	7,57%	6,93%	54.575	63.489	59.589
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	68,27%	69,55%	70,34%	6,24%	6,80%	5,84%	28.846	33.501	29.985
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	76,92%	72,16%	78,29%	3,65%	4,28%	3,33%	67.173	75.658	64.996
NASIONAL			67,49%	67,77%	67,80%	5,28%	7,07%	6,49%	7.045.761	9.767.754	9.102.052
1	Regional Sumatera		67,68%	66,69%	67,80%	5,04%	6,14%	5,63%	1.419.789	1.810.505	1.678.731
2	Regional Jawa		67,22%	67,35%	67,35%	5,77%	8,09%	7,45%	4.445.486	6.384.250	5.948.406
3	Regional Kalimantan		68,30%	68,04%	67,93%	4,72%	5,52%	5,55%	384.746	460.692	469.559
4	Regional Sulawesi		65,23%	65,82%	66,16%	4,47%	5,45%	4,97%	412.746	529.848	491.561
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		70,25%	72,57%	72,61%	2,77%	4,69%	4,02%	205.097	379.814	331.092
6	Regional Maluku-Papua		70,43%	68,77%	71,92%	4,91%	5,50%	4,66%	177.897	202.645	182.703

Sumber:

*)BRS masing2 Provinsi;

**)BRS data per-agustus;

***) Statistik Indonesia 2019, 2020, dan 2021.

LAMPIRAN VIII JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 2019-2021

No.	Nama Provinsi	Regional	2019 ^{*)}		2020 ^{**)}		2021 ^{***)}	
			Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
1	Provinsi Aceh	Sumatera	5.371.532	1,99%	5.274.871	1,95%	5.347.889	1,95%
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	14.562.549	5,39%	14.799.361	5,48%	15.242.297	5,57%
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	5.441.197	2,01%	5.534.472	2,05%	5.604.457	2,05%
4	Provinsi Riau	Sumatera	6.971.700	2,58%	6.394.087	2,37%	6.574.932	2,40%
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	2.189.700	0,81%	2.064.564	0,76%	2.082.785	0,76%
6	Provinsi Jambi	Sumatera	3.624.600	1,34%	3.548.228	1,31%	3.603.439	1,32%
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	8.470.700	3,13%	8.467.432	3,13%	8.565.814	3,13%
8	Provinsi Lampung	Sumatera	8.447.700	3,13%	9.007.848	3,33%	8.882.107	3,24%
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	1.991.800	0,74%	2.010.670	0,74%	2.037.019	0,74%
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	1.488.800	0,55%	1.455.678	0,54%	1.461.893	0,53%
11	Provinsi Banten	Jawa	12.927.300	4,78%	11.904.562	4,41%	12.030.892	4,39%
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	10.557.800	3,91%	10.562.088	3,91%	11.261.595	4,11%
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	49.316.712	18,25%	48.274.162	17,87%	48.220.094	17,61%
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	34.718.200	12,85%	36.516.035	13,51%	37.313.063	13,62%
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	3.842.932	1,42%	3.668.719	1,36%	3.677.446	1,34%
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	39.698.631	14,69%	40.665.696	15,05%	41.063.094	14,99%
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	5.069.100	1,88%	5.414.390	2,00%	5.466.942	2,00%
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	2.714.859	1,00%	2.669.969	0,99%	2.656.442	0,97%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	4.244.100	1,57%	4.073.584	1,51%	4.119.824	1,50%
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	3.721.389	1,38%	3.766.039	1,39%	3.849.832	1,41%
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	742.245	0,27%	701.814	0,26%	698.003	0,25%
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	4.336.900	1,61%	4.317.404	1,60%	4.279.129	1,56%
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	5.070.400	1,88%	5.320.092	1,97%	5.432.209	1,98%
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	5.456.203	2,02%	5.325.566	1,97%	5.489.851	2,00%
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	8.851.240	3,28%	9.073.509	3,36%	9.218.736	3,37%
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	1.380.256	0,51%	1.419.229	0,53%	1.442.225	0,53%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	3.054.000	1,13%	2.985.734	1,10%	3.051.754	1,11%
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	2.704.737	1,00%	2.624.875	0,97%	2.679.179	0,98%
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	1.202.600	0,45%	1.171.681	0,43%	1.200.663	0,44%
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	2.507.000	0,93%	2.621.923	0,97%	2.657.998	0,97%
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	1.255.800	0,46%	1.282.937	0,47%	1.323.927	0,48%
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	1.802.900	0,67%	1.848.923	0,68%	1.880.666	0,69%
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	959.617	0,36%	1.134.068	0,42%	1.150.468	0,42%
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	3.379.302	1,25%	4.303.707	1,59%	4.313.086	1,57%
NASIONAL			270.203.917	100,00%	270.203.917	100,00%	273.879.750	100,00%
1	Regional Sumatera		58.560.278	21,84%	58.557.211	21,67%	59.402.632	21,69%
2	Regional Jawa		151.061.575	56,35%	151.591.262	56,10%	153.566.184	56,07%
3	Regional Kalimantan		16.491.693	6,15%	16.625.796	6,15%	16.791.043	6,13%
4	Regional Sulawesi		19.699.833	7,35%	19.896.951	7,36%	20.250.555	7,39%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara		14.863.503	5,54%	14.963.062	5,54%	15.201.189	5,55%
6	Regional Maluku-Papua		7.397.619	2,76%	8.569.635	3,17%	8.668.147	3,16%

Sumber:

*) Statistik Indonesia 2019;

**) Statistik Indonesia 2020

**) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021.

LAMPIRAN IX NTP DAN NTN 2019-2021

No.	Nama Provinsi	Regional	NTP			NTN		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Provinsi Aceh	Sumatera	98,36	98,82	101,06	100,02	97,49	105,27
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera	104,51	110,18	119,52	100,86	99,52	106,18
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera	100,10	100,71	107,85	98,27	98,10	100,90
4	Provinsi Riau	Sumatera	106,64	119,47	139,95	99,33	99,49	103,91
5	Provinsi Kepulauan Riau	Sumatera	100,93	97,22	102,25	101,32	103,56	109,51
6	Provinsi Jambi	Sumatera	101,71	107,67	127,26	104,22	107,31	113,65
7	Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera	98,94	95,34	107,90	96,78	100,36	104,67
8	Provinsi Lampung	Sumatera	96,91	94,58	101,19	101,23	101,35	105,73
9	Provinsi Bengkulu	Sumatera	104,91	114,32	133,01	97,23	94,31	100,89
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	102,30	103,82	127,21	103,02	105,56	111,25
11	Provinsi Banten	Jawa	101,73	102,39	98,36	101,28	98,73	100,99
12	Provinsi DKI Jakarta	Jawa	-	-	-	98,21	95,19	97,83
13	Provinsi Jawa Barat	Jawa	101,33	101,38	97,56	100,02	99,39	108,86
14	Provinsi Jawa Tengah	Jawa	101,82	101,68	100,14	99,89	102,71	108,45
15	Provinsi DI Yogyakarta	Jawa	102,70	101,25	97,46	101,99	106,66	115,83
16	Provinsi Jawa Timur	Jawa	101,20	100,85	100,00	98,44	95,77	101,11
17	Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan	102,90	108,67	129,48	101,99	102,13	106,45
18	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan	102,69	103,66	119,65	102,11	102,38	102,48
19	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan	99,78	101,06	108,19	102,46	99,83	98,86
20	Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan	105,99	112,53	123,55	101,67	103,17	103,01
21	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan	99,41	102,80	106,74	104,83	102,84	104,15
22	Provinsi Bali	Bali-Nusra	98,14	94,14	92,66	98,77	99,27	100,20
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	104,65	107,46	106,98	102,85	104,89	112,11
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	97,07	95,99	95,30	96,07	94,20	92,55
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi	96,01	96,93	98,14	98,91	99,64	107,43
26	Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi	103,89	110,26	123,32	99,43	99,23	106,28
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi	96,04	95,06	99,48	96,10	98,11	103,28
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi	96,65	96,19	98,76	98,40	97,45	101,64
29	Provinsi Gorontalo	Sulawesi	100,30	99,72	103,30	94,64	95,23	96,06
30	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi	97,04	98,66	106,87	100,52	100,83	106,45
31	Provinsi Maluku Utara	Maluku-Papua	97,86	96,47	102,30	100,03	97,29	104,50
32	Provinsi Maluku	Maluku-Papua	97,86	96,32	100,61	103,34	101,26	107,17
33	Provinsi Papua Barat	Maluku-Papua	102,89	101,84	102,30	97,62	95,56	93,69
34	Provinsi Papua	Maluku-Papua	100,29	101,77	101,64	107,09	110,52	111,59
NASIONAL			100,91	101,69	104,66	100,23	100,22	104,69

LAMPIRAN X IKHTISAR REALISASI APBN MENURUT REGIONAL 2019-2021

REGIONAL		Pendapatan APBN					
		2019		2020		2021	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.943.674,88	100,00%	1.960.633,57	100,00%	1.647.765,43	100,00%
1	Sumatera	86.455,26	4,41%	81.920,89	4,97%	113.326,73	5,63%
2	Jawa	1.761.644,52	89,85%	1.469.097,84	89,16%	1.781.687,91	88,58%
3	Kalimantan	48.295,97	2,46%	40.145,89	2,44%	51.582,69	2,56%
4	Sulawesi	27.643,17	1,41%	24.431,49	1,48%	28.939,17	1,44%
5	Bali-Nusa Tenggara	20.479,62	1,04%	16.811,39	1,02%	17.766,87	0,88%
6	Maluku-Papua	16.115,05	0,82%	15.375,84	0,93%	18.043,71	0,90%
7	Nasional	1.960.633,58	100,00%	1.647.783,34	100,00%	2.011.347,07	100,00%

REGIONAL		Belanja APBN					
		2019		2020		2021	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		2.213.186,54	100,00%	2.309.287,24	100,00%	2.593.300,04	100,00%
1	Sumatera	325.959,10	14,12%	280.373,64	10,80%	309.393,68	11,10%
2	Jawa	1.495.056,37	64,74%	1.890.895,50	72,85%	2.004.198,83	71,93%
3	Kalimantan	129.501,09	5,61%	112.221,82	4,32%	123.879,92	4,45%
4	Sulawesi	146.087,81	6,33%	127.424,11	4,91%	144.045,17	5,17%
5	Bali-Nusa Tenggara	81.376,13	3,52%	72.231,56	2,78%	82.453,28	2,96%
6	Maluku-Papua	131.306,81	5,69%	112.334,47	4,33%	122.440,48	4,39%
7	Nasional	2.309.287,31	100,00%	2.595.481,10	100,00%	2.786.411,36	100,00%

REGIONAL		Surplus/Defisit APBN					
		2019		2020		2021	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		-269.511,66	100,00%	-348.653,67	100,00%	-945.534,61	100,00%
1	Sumatera	-239.503,84	68,69%	-198.452,75	20,94%	-196.066,95	25,30%
2	Jawa	266.588,15	-76,46%	-421.797,66	44,51%	-222.510,92	28,71%
3	Kalimantan	-81.205,12	23,29%	-72.075,92	7,61%	-72.297,24	9,33%
4	Sulawesi	-118.444,64	33,97%	-102.992,62	10,87%	-115.106,00	14,85%
5	Bali-Nusa Tenggara	-60.896,51	17,47%	-55.420,17	5,85%	-64.686,41	8,35%
6	Maluku-Papua	-115.191,76	33,04%	-96.958,64	10,23%	-104.396,77	13,47%
7	Nasional	-348.653,73	100,00%	-947.697,75	100,00%	-775.064,29	100,00%

LAMPIRAN XI IKHTISAR REALISASI APBD MENURUT REGIONAL 2019-2021

REGIONAL		Pendapatan APBD					
		2019		2020		2021	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.072.559,68	100,00%	1.163.879,21	100,00%	1.053.392,89	100,00%
1	Sumatera	294.456,58	24,69%	300.438,41	24,23%	280.593,60	24,59%
2	Jawa	478.407,00	40,11%	507.577,01	40,94%	474.701,92	41,61%
3	Kalimantan	116.593,33	9,78%	121.781,24	9,82%	107.298,54	9,40%
4	Sulawesi	119.283,08	10,00%	122.722,18	9,90%	110.139,69	9,65%
5	Bali-Nusa Tenggara	77.905,27	6,53%	79.344,22	6,40%	72.210,09	6,33%
6	Maluku-Papua	105.987,33	8,89%	107.888,00	8,70%	95.950,78	8,41%
7	Nasional	1.192.632,60	100,00%	1.239.751,05	100,00%	1.140.894,62	100,00%

REGIONAL		Belanja APBD					
		2019		2020		2021	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		1.047.078,30	100,00%	1.136.023,64	100,00%	1.038.667,01	100,00%
1	Sumatera	303.389,05	24,42%	312.374,12	24,02%	293.710,99	24,20%
2	Jawa	505.633,61	40,71%	535.119,58	41,15%	505.647,11	41,66%
3	Kalimantan	120.427,79	9,70%	128.760,34	9,90%	116.919,98	9,63%
4	Sulawesi	122.923,85	9,90%	129.853,57	9,99%	117.914,38	9,71%
5	Bali-Nusa Tenggara	81.105,54	6,53%	82.979,44	6,38%	78.800,72	6,49%
6	Maluku-Papua	108.669,78	8,75%	111.267,19	8,56%	100.772,06	8,30%
7	Nasional	1.242.149,61	100,00%	1.300.354,25	100,00%	1.213.765,25	100,00%

REGIONAL		Surplus/Defisit APBD					
		2019		2020		2021	
		Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.	Nilai (miliar)	Kontr.
NASIONAL		25.481,38	100,00%	27.855,57	100,00%	14.725,88	100,00%
1	Sumatera	(8.932,47)	18,04%	(11.935,71)	19,69%	(13.117,40)	18,00%
2	Jawa	(27.226,61)	54,98%	(27.542,58)	45,45%	(30.945,19)	42,47%
3	Kalimantan	(3.834,45)	7,74%	(6.979,10)	11,52%	(9.621,44)	13,20%
4	Sulawesi	(3.640,77)	7,35%	(7.131,39)	11,77%	(7.774,69)	10,67%
5	Bali-Nusa Tenggara	(3.200,26)	6,46%	(3.635,23)	6,00%	(6.590,63)	9,04%
6	Maluku-Papua	(2.682,45)	5,42%	(3.379,19)	5,58%	(4.821,28)	6,62%
7	Nasional	(49.517,02)	100,00%	(60.603,19)	100,00%	(72.870,63)	100,00%



LAMPIRAN XII REALISASI APBN (i-Account) 2019-2021 (LKPP)

I-Account (dalam Miliar Rp)	REALISASI APBN (Miliar Rupiah)					
	2019			2020		
	PAGU	REALISASI	%RE-ALISASI	PAGU	REALISASI	%RE-ALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	2.165.111,82	1.960.633,57	90,56%	1.699.948,46	1.647.783,34	96,93%
Pendapatan Perpajakan	1.786.378,65	1.546.141,89	86,55%	1.404.507,51	1.285.136,32	91,50%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	378.297,86	408.994,34	108,11%	294.140,95	343.814,21	116,89%
Hibah	435,31	5.497,34	1262,86%	1.300,00	18,83	1,45%
BELANJA NEGARA	2.461.112,05	2.309.287,25	93,83%	2.739.165,85	2.595.481,10	94,75%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	1.634.339,52	1.496.313,84	91,55%	1.975.240,21	1.832.950,92	92,80%
Belanja Pegawai	381.327,10	376.074,25	98,62%	403.722,74	380.532,23	94,26%
Belanja Barang	355.613,15	334.418,20	94,04%	273.162,11	422.338,23	154,61%
Belanja Modal	179.252,02	177.841,48	99,21%	137.383,86	190.919,83	138,97%
Belanja Bantuan Sosial	101.998,22	112.480,25	110,28%	174.517,69	202.529,97	116,05%
Belanja Hibah	1.940,65	6.476,21	333,71%	5.072,14	6.275,91	123,73%
Belanja Lain-Lain	114.002,26	11.699,74	10,26%	450.574,16	120.035,19	26,64%
Belanja Pembayaran Bunga Utang	275.885,27	275.521,16	99,87%	338.784,31	314.088,11	92,71%
Belanja Subsidi	224.320,86	201.802,56	89,96%	192.023,20	196.231,46	102,19%
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	826.772,53	812.973,40	98,33%	763.925,65	762.530,18	99,82%
Dana Transfer Umum (DTU)	524.223,75	524.890,20	100,13%	470.800,22	475.518,81	101,00%
Dana Alokasi Umum	417.873,58	420.910,23	100,73%	384.381,52	381.612,45	99,28%
Dana Bagi Hasil	106.350,16	103.979,97	97,77%	86.418,70	93.906,36	108,66%
Dana Transfer Khusus (DTK)	200.368,84	186.394,66	93,03%	182.558,70	176.578,83	96,72%
Dana Alokasi Khusus Fisik	69.326,70	64.165,65	92,56%	53.787,35	50.175,98	93,29%
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	131.042,14	122.229,01	93,27%	128.771,35	126.402,86	98,16%
Dana Otsus, DIY, DID	32.179,94	31.874,39	99,05%	39.376,73	39.332,01	99,89%
Dana Otsus, DIY, DID	32.179,94	31.874,39	99,05%	39.376,73	39.332,01	99,89%
Dana Desa	70.000,00	69.814,15	99,73%	71.190,00	71.100,52	99,87%
Dana Desa	70.000,00	69.814,15	99,73%	71.190,00	71.100,52	99,87%
SURPLUS/DEFISIT	(296.000,24)	(348.653,67)	117,79%	(1.039.217,39)	(947.697,75)	91,19%
PEMBIAYAAN	296.000,24	402.051,51	135,83%	1.039.217,39	1.193.293,83	114,83%
Penerimaan Pembiayaan	374.250,58	453.164,49	121,09%	1.402.843,55	1.396.213,76	99,53%
Pengeluaran Pembiayaan	(78.250,35)	(51.112,98)	65,32%	(363.626,15)	(202.919,93)	55,80%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	-	53.397,78	-	-	245.596,08	-
						96.658,88

Sumber: LKPP 2018, 2019, 2020

HALAMAN INI
SENGAJA DIKOSONGKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN

DITJEN PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN